

SIAP MENUJU PERADABAN BARU

READY FOR A NEW ERA

LAPORAN TAHUNAN 2018 ANNUAL REPORT





TENTANG LAPORAN TAHUNAN PT MRT JAKARTA TAHUN 2018

ABOUT THE 2018 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2018 PT MRT Jakarta dengan tema “Siap Menuju Peradaban Baru”. Laporan Tahunan ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja PT MRT Jakarta dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kesiapan proyek MRT Jakarta jelang pengoperasian; kinerja keuangan; serta informasi tentang tugas, peran, dan fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan membangun pemahaman dan kepercayaan tentang PT MRT Jakarta dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta pencapaian Perusahaan pada tahun 2018. Laporan Tahunan PT MRT Jakarta 2018 disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam buku yang sama, dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas baik.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh situs web resmi PT MRT Jakarta dengan alamat www.jakartamrt.co.id.

Welcome to PT MRT Jakarta 2018 Annual Report with the theme “Ready For A New Era”. This Annual Report is a source of comprehensive documentation that contains information on the performance of PT MRT Jakarta in a year. The information contains complete documentation describing the Company’s profile; readiness of MRT Jakarta project prior to the operation; financial performance; and information on duties, roles and functions of the Company’s organization structure that apply the best practices and principles of Good Corporate Governance (GCG).

In addition, this Annual Report also aims to build understanding and trust about PT MRT Jakarta by providing appropriate, balanced and relevant information. Shareholders and all other stakeholders may obtain adequate information regarding the policies that have been and will be carried out, and the Company’s achievements in 2018. PT MRT Jakarta 2018 Annual Report is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English in one book, using easy-to-read letter font and font size and printed with good quality.

This Annual Report can be viewed and downloaded on the official website of PT MRT Jakarta at www.jakartamrt.co.id



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY



Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang, terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PT MRT Jakarta tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil sesuai harapan. Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan", "MRT Jakarta", atau "Perusahaan" yang mengacu pada PT MRT Jakarta, sebagai Perusahaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengadaan sarana, pengoperasian prasarana dan sarana, perawatan prasarana dan sarana, dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT Jakarta. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT MRT Jakarta.

This Annual Report contains various statements regarding the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies and objectives, which are classified as forward-looking statements in accordance with prevailing laws and regulation. These statements have the prospect of risk and uncertainty, and may result in actual result being different from that reported. The prospective statements in this Annual Report are made based on assumptions on current state and future conditions of the Company's business environment. PT MRT Jakarta does not guarantee validity of the documents and the results may not match expectations. This Annual Report contains the words "MRT Jakarta", or "the Company" to define PT MRT Jakarta as the company engaging in the business of urban public railway infrastructure covering MRT facility construction, operations, maintenance, and management; provision of urban public railway facilities covering MRT facility construction, operations, maintenance, and management; as well as development and management of property/businesses at the station and the surrounding areas, as well as depots and the surrounding areas. In addition, the word "We" is also used on several occasions with the same function, which simply refers to PT MRT Jakarta.



INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

INFORMATION PRESENTED IN ANNUAL REPORT

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT MRT Jakarta menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia tempat di mana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Laporan Tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam kriteria *Annual Report Award* (ARA) yang terakhir dirilis pada tahun 2016.

The references and standards used in the preparation of PT MRT Jakarta Annual Report use standard parameters and criteria that apply in Indonesia where the Company carries out its business activities. This Annual Report uses the standards listed in the the Annual Report Award (ARA) criteria which was released most recently in 2016.

Dalam rangka menjalankan *best practice* pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Perusahaan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi kami atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, PT MRT Jakarta mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

In order to perform the best practice of Good Corporate Governance (GCG) principles implementation, this report presentation also refers to the National Committee for Corporate Governance (KNKG) guidelines. The Company also presents several aspects that are part of our development and interpretation of the Annual Report contents. Thus, PT MRT Jakarta hopes that this Annual Report can encourage improvement in a fair information disclosure along with the fulfillment of composition and substance aspects.



TEMA DAN KESINAMBUNGANNYA

CONTINUITY OF THEME



2016 Breaking Through the Frontier

Atas dukungan berbagai pihak, pembangunan MRT Jakarta berhasil mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemajuan melebihi rencana yang ditargetkan di akhir 2016. Pembangunan prasarana menunjukkan kemajuan menggembirakan, persiapan operasi dan pemeliharaan pun telah diinisiasi. Pengembangan usaha mulai dipersiapkan. 2016 adalah tahun menerobos batas, dimana PT MRT Jakarta menyiapkan pengoperasian dan pengelolaan yang berstandar internasional.

2016 Breaking Through The Frontier

With the support from various parties, MRT Jakarta development was able to surmount all challenges and make progress above the target planned at the end of 2016. Infrastructure development showed encouraging progress, preparation of operation and maintenance has also been initiated. Business development was prepared. 2016 is the year to break through the frontier, in which MRT prepared an international standard operation and management.



2017 Achieving The Milestones

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh momentum bagi PT MRT Jakarta. Banyak pencapaian yang berhasil diukur dalam fase konstruksi yang dijalankan. Hal tersebut menandakan Perusahaan terus memegang komitmen untuk segera menghadirkan moda transportasi publik yang solutif bagi Jakarta sebagai kota metropolitan. Tema "Achieving The Milestones" sendiri mewakili kerja keras Perusahaan dalam merealisasikan pencapaian-pencapaian penting seperti tersambunginya jalur layang hingga jalur bawah tanah (Lebak Bulus-Bundaran HI), penugasan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan TOD Koridor Utara-Selatan Fase 1 MRT Jakarta, telah dilakukannya uji coba kereta MRT di Jepang dan banyak pencapaian lainnya.

2017 Achieving The Milestones

2017 was a year full of momentum for PT MRT Jakarta. There are many accomplishments recorded in the construction phase carried out. Such achievements reflect the Company's continued commitment to immediately delivering a solution of public transportation mode for Jakarta as the Capital city. The theme "Achieving The Milestones" represents the hard work of PT MRT Jakarta in realizing important milestones, such as the completion of the elevated section and the underground section (Lebak Bulus-Bundaran HI), assignment of PT MRT Jakarta as the Main Operator for the TOD area in MRT Jakarta Phase 1's North-South Corridor, trial run of MRT trains in Japan, and many other achievements.







TEMA DAN KESINAMBUNGANNYA CONTINUITY OF THEME

2018 Siap Menuju Peradaban Baru

Pembangunan proyek MRT Jakarta yang telah ditunggu-tunggu warga Jakarta telah memasuki tahapan penghujung. Berbagai persiapan untuk tahapan pengoperasian penuh telah dilakukan. Sumber daya manusia telah dipersiapkan jauh hari. Demikian pula dengan perencanaan bisnis, serta perencanaan pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit, atau *Transit Oriented Development* (TOD) telah dipersiapkan dengan matang.

Testing & commissioning serta *trial run* menjadi bagian penting dari seluruh tahapan persiapan ini. Antusiasme warga Jakarta pun terlihat demikian tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses *trial run* ini. Layaknya orkestrasi, *trial run* menjadi Siap Menuju Peradaban Baru sebelum akhirnya panggung pertunjukan dibuka untuk umum.

“Siap Menuju Peradaban Baru”, sebuah tema yang diharapkan bisa menggambarkan perjalanan MRT Jakarta di sepanjang tahun 2018. Tema yang bisa diartikan sebagai “pelatihan umum terakhir kali sebelum pelaksanaan acara sesungguhnya” menggambarkan seluruh daya upaya yang telah dilakukan semua pihak agar MRT Jakarta dapat beroperasi menuju peradaban baru sesuai targetnya, Maret 2019.

2018 Ready For A New Era

Development of MRT Jakarta the people of Jakarta have waiting for has entered the final stage. Various preparations for the full operation stage are already made. Human Capital has been prepared long before, along with business planning and Transit Oriented Development (TOD) area management planning that have been carefully prepared.

Testing and commissioning and trial run are important parts of the entire preparatory phase. The people of Jakarta look enthusiastic to participate in the trial run. Like orchestration, the trial run becomes a rehearsal before the stage is finally open to the public.

“Ready For A New Era” a theme that is expected to describe MRT Jakarta journey throughout 2018. This theme can be interpreted as “the last general preparation prior to the actual event”, which illustrates all the efforts made by all parties in order for MRT Jakarta to operate towards new era to the March 2019 target.





DAFTAR ISI

CONTENT

2	Tentang Laporan Tahunan PT MRT Jakarta Tahun 2018 <i>About The 2018 Annual Report of PT MRT Jakarta</i>	78	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>
3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab <i>Disclaimer and Limitation of Liability</i>	84	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Values</i>
4	Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan <i>Information Presented in Annual Report</i>	87	Makna Logo Perusahaan <i>Meaning of Corporate Logo</i>
5	Tema dan Kesinambungannya <i>Continuity of Theme</i>	88	Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>
8	Daftar Isi <i>Content</i>	92	Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>
10	Tugas Pokok PT MRT Jakarta <i>Main Duties of PT MRT Jakarta</i>	97	Profil Pejabat Eksekutif <i>Executive Officials Profile</i>
11	Jejak Langkah <i>Milestones</i>	113	Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi <i>Employee Demographic and Competence Development</i>
14	MRT Jakarta dalam Kemajuan 2018 <i>MRT Jakarta's Progress in 2018</i>	122	Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholders Composition</i>
16	Kemajuan Konstruksi MRT Jakarta Fase I (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) <i>MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) Construction Progress</i>	124	Informasi Tentang Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV) <i>Information on Subsidiaries, Associates, Joint Venture (Jv) And Special Purpose Vehicle (Spv)</i>
PERFORMA 2018 2018 PERFORMANCE		125	Struktur Grup MRT Jakarta <i>Group Structure of MRT Jakarta</i>
24	Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>Financial Highlights</i>	125	Informasi tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham <i>Share Issue and Listing Chronology Information</i>
26	Informasi Tentang Ikhtisar Saham <i>Share Highlights Information</i>	125	Informasi tentang Penerbitan dan Pencatatan Obligasi dan/atau Efek Lainnya <i>Bonds and/or Other Securities Issue and Listing Information</i>
28	Informasi Tentang Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Efek Lainnya <i>Information on Bonds, Sukuk or Conversion Bonds, and Other Securities</i>	126	Lembaga dan Profesi Penunjang <i>Supporting Institutions and Professionals</i>
29	Informasi Tentang Sumber Pendanaan <i>Information on Funding Source</i>	129	Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certification</i>
LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT		129	Informasi tentang Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan <i>Information on Addresses of Subsidiaries, Associates, Branch and Representative Office</i>
32	Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners's Report</i>	130	Informasi pada Situs Web Perusahaan <i>Information on Company Website</i>
46	Laporan Direksi <i>Board of Directors' Report</i>	132	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal <i>Education and/or Training of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit</i>
64	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT MRT Jakarta <i>Statement of Members of Board of Commissioners on The Responsibility for The 2018 Annual Report of PT MRT Jakarta</i>	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	
65	Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018 PT MRT Jakarta <i>Statement of Members of Board of Directors on The Responsibility For The 2018 Annual Report of PT MRT Jakarta</i>	138	Tinjauan Umum: Urgensi Transportasi Publik Jakarta <i>General Review: The Urgency of Public Transportation in Jakarta</i>
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		142	Tinjauan Operasi <i>Operation Review</i>
68	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan <i>General Information and Corporate Identity</i>	155	Tinjauan Keuangan <i>Financial Review</i>
70	Riwayat Singkat Perusahaan <i>Brief History of MRT Jakarta</i>	176	Prospek Usaha Tahun 2019 <i>Business Prospect in 2019</i>
74	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	176	Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspect</i>



DAFTAR ISI CONTENT

177	Tinjauan Keuangan Lainnya <i>Other Financial Review</i>	520	Transparansi Praktik Bad Governance <i>Transparency of Bad Governance Practices</i>
184	Informasi Kelangsungan Usaha <i>Going Concern Information</i>	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	
186	Rencana Pengembangan Usaha <i>Business Development Plan</i>	524	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan <i>Corporate Social Responsibility and Sustainability Development</i>
197	Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang Perusahaan <i>Business Road Map: The Company's Long-Term Plan</i>	526	Kebijakan Umum Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkup MRT Jakarta <i>General Policy on Corporate Social Responsibility Implementation of MRT Jakarta</i>
PENUNJANG BINSIS BUSINESS SUPPORTING		530	Komitmen untuk Lingkungan Hidup yang Harmoni: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan <i>Commitment to Harmonious Living Environment: Environmental Corporate Social Responsibility</i>
200	Tumbuh Bersama Karyawan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia <i>Growing With Employees: Management of Human Resources</i>	560	Tumbuh bersama Karyawan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Growing with Employees: Corporate Social Responsibility on Employment, Health and Safety</i>
220	Pemanfaatan dan Optimalisasi Teknologi Informasi <i>Utilization and Optimization of Information Technology</i>	579	Berbagi dengan Masyarakat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Sharing with Community: Corporate Social Responsibility on Social and Community Development</i>
TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE		585	Layanan Bermutu: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab terhadap Kualitas Produk/Jasa serta Konsumen dan Mitra Kerja <i>Quality Services: Corporate Social Responsibility for Products / Services Quality, Consumers and Business Partners</i>
230	Pemahaman Mendasar tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Basic Understanding on Good Corporate Governance</i>	LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT	
232	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup MRT Jakarta <i>Development of Good Corporate Governance Implementation Within MRT Jakarta</i>	649	Kriteria Annual Report Awards 2018 <i>2018 Annual Report Awards Criteria</i>
262	Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Organ Structure of Good Corporate Governance</i>		
438	Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>		
462	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>		
475	Corporate Social Responsibility <i>Corporate Social Responsibility</i>		
476	Perkara Penting <i>Important Case</i>		
480	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Company Information and Data Access</i>		
486	Kode Etik <i>Code of Conduct</i>		
495	Etika Penyebaran Informasi Non-Publik <i>Ethics of Disseminating Non-Public Information</i>		
496	Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control</i>		
501	Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik <i>Information on Funding for Political Activities</i>		
501	Kebijakan Anti Korupsi <i>Anti Corruption Policy</i>		
502	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>State Official Assets Report (LHKPN)</i>		
507	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Policy on Procurement of Goods and Services</i>		
511	Whistleblowing System <i>Whistleblowing System</i>		
518	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors</i>		



TUGAS POKOK PT MRT JAKARTA

MAIN DUTIES OF PT MRT JAKARTA

Tugas pokok PT MRT Jakarta meliputi pembangunan Prasarana moda transportasi MRT Jakarta; melakukan Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta; dan mengembangkan bisnis melalui usaha properti di stasiun dan kawasan sekitarnya.

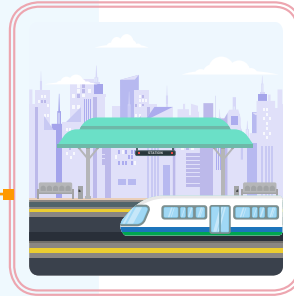
PT MRT Jakarta's main duties include developing infrastructure for MRT Jakarta transportation mode; carrying out MRT Jakarta operations and maintenance; and developing business through property business in the stations and its surrounding areas.

Tugas Pokok PT MRT Jakarta

*Main Duties of
PT MRT Jakarta*



Penyelenggaraan Prasarana
Providing Infrastructure



Penyelenggaraan Sarana
Providing Facilities



Pengembangan Bisnis di Stasiun dan Kawasan Sekitarnya
Developing businesses in the Stations and the Surrounding Areas





JEJAK LANGKAH

MILESTONES

1990-1992

Penyusunan *Masterplan* Angkutan Umum Terpadu Jabodetabek oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan Pola Transportasi Terpadu antara Kereta Api, *Light Rail*, dan Bus.

Preparation of integrated public transport Masterplan for Jabodetabek by the Ministry of Transportation, which proposed an integrated transportation pattern between Railway, Light Rail, and Bus.

1995-1996

Basic Design oleh konsorsium Indonesia-Jepang-Eropa dengan kesimpulan bahwa proyek ini tidak layak dilakukan dengan skema pembiayaan swasta penuh (BOT) karena biaya yang dapat ditutup dengan perolehan tiket hanya sebesar 15%.

Basic Design by consortium of Indonesia-Japan-Europe with conclusion that this project was not feasible with full private financing scheme (BOT) because only 15% of the costs could be covered with the acquisition tickets.

1999

Revisi *Basic Design* oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan agar proyek ini dibiayai oleh Pemerintah dengan partisipasi swasta yang minimal.

Revision of Basic Design by the Ministry of Transportation which proposed that this project should be financed by the Government with private sector participation at minimum.

2004

- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Pola Transportasi Makro (PTM) yang merupakan masterplan penanganan masalah transportasi di Jakarta, dengan membangun sarana transportasi massal yang prima dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sarana transportasi massal yang dimaksud adalah Mass Rapid Transit (MRT).
- 2 Maret 2004, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Departemen Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M-Monas-Kota.
- Juli 2004, Departemen Perhubungan mengeluarkan Studi *Implementation Program for Jakarta MRT System* (Lebak Bulus-Dukuh Atas).
- DKI Jakarta Provincial Governor Decision No. 84 of 2004 regarding Macro Transportation Pattern (PTM) serving as the masterplan in handling transportation problems in Jakarta by developing prime mass transportation facility that is integrated with other transportation modes. This mass transportation mode refers to the Mass Rapid Transit (MRT).
- March 2, 2004, DKI Jakarta Provincial Governor signed a Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Transportation of Republic of Indonesia and DKI Jakarta Provincial Government on MRT Development prioritized on Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M-Monas-Kota corridor.
- July 2004, the Ministry of Transportation released a Study on the Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas).

2002

Studi JICA pada *Integrated Transportation Master Plan II* menekankan prioritas pada pembangunan Subway.

JICA's study on integrated transportation Master Plan II emphasized the priority on subway development.

2000

Studi Kelayakan MRT (*Subway*) oleh Tim Studi JICA yang menekankan pentingnya pembangunan *Subway* di Jakarta, dan agar proyek ini layak dibiayai perlu keterlibatan Pemerintah dalam pembiayaannya.

Feasibility Study of MRT (Subway) by JICA Study Team that emphasized the importance of Subway construction in Jakarta, and that, in order to make this project worth funded, it would need the Government's involvement in its financing.

2005

- Studi pada tahun 2004 direvisi pada bulan Maret 2005 menjadi *Revised Implementation Program (Revised IP) for Jakarta MRT System* (Lebak Bulus-Dukuh Atas) dan digunakan Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemerintah Jepang untuk membiayai proyek pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta.
- Studi oleh Tim *Special Assistance for Project Formation (SAPROF)* dari JBIC untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara pemangku kepentingan atas proyek ini di Indonesia.
- Desember 2005 diperoleh beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam *Minutes of Discussion (MoD)* yang ditandatangani oleh JBIC, Bappenas, Departemen Perhubungan serta Pemprov DKI Jakarta.
- Agustus 2005, Sub-Komite MRT dibentuk di bawah Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan dalam mendirikan Perusahaan operator MRT (MRTC).
- The study conducted in 2004 was revised in March 2005 to become the Revised Implementation Program (Revised IP) for MRT Jakarta System (Lebak Bulus-Dukuh Atas) and was used by the Government of the Republic of Indonesia to send a request for financing to the Government of Japan for MRT development in Jakarta.
- A Study by the Special Assistance for Project Formation (SAPROF) Team from JBIC was carried out to facilitate agreement among the stakeholders for this project in Indonesia.
- December 2005, several agreements were made and stated in the Minutes of Discussion (MoD) signed by JBIC, Bappenas, the Ministry of Transportation, and the Provincial Government of DKI Jakarta.
- August 2005, MRT Sub-Committee was formed under the National Committee for the Acceleration of Infrastructure Provision (KKPPI) to implement required processes in establishing MRT operator company (MRTC).

2007

- Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, yang mengatur kewenangan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- Kajian SAPI (*Special Assistance for Project Implementation*) dan SAPMAN (*Special Assistance for Procurement Management*) dilakukan oleh JBIC untuk membantu Departemen Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.
- Revision of Law No. 13 Year 1992 regarding Railways into Law No. 23 of 2007, which regulates the authority of railways infrastructure and mode management that was previously controlled by the Central Government through State Owned Enterprise (SOE), presently could be organized by a Business Entity established by the Local Government.
- Study of SAPI (*Special Assistance for Project Implementation*) and SAPMAN (*Special Assistance for Procurement Management*) was conducted by JBIC to assist the Ministry of Transportation and DKI Jakarta Provincial Government.

2006

- 18 Oktober 2006, *Memorandum on Engineering Services (MoES)* ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan JBIC sebagai dasar persetujuan pinjaman.
- 28 November 2006, *Loan Agreement Tahap 1 (IP-536)* ditandatangani berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam *Minutes of Discussion (MoD)* dan *Memorandum on Engineering Services (MoES)* mengenai pinjaman sebesar ¥1,869 miliar yang dipergunakan untuk pembiayaan:
- Konsultasi Penyusunan *Basic Design (Engineering Services)*.
- Konsultasi Manajemen, untuk membentuk dan mengembangkan PT MRT Jakarta.
- Konsultasi Pengadaan, untuk membantu PT MRT Jakarta melangsungkan Proyek sebagai implementasi dari *Basic Design* yang dihasilkan kegiatan pada butir 1 (satu) di atas.
- October 18, 2006, *Memorandum on Engineering Services (MOES)* was signed between the Indonesian Government and JBIC as the basis of loan approval.
- November 28, 2006, *Phase I Loan Agreement (IP-536)* was signed based on the terms previously agreed in the Minutes of Discussion (MoD) and the Memorandum on Engineering Services (MoES) regarding a loan of ¥1.869 billion which would be used in financing:
- Consultation for Basic Design Preparation (Engineering Services).
- Management Consulting to establish and develop PT MRT Jakarta.
- Procurement Consulting, to assist PT MRT Jakarta in Project auctioning as an implementation of Basic Design activity resulted from the activity of point 1 (one) above.



2008

- 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta berdiri, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.
- 28 November 2008, penandatanganan *Minutes of Discussion* (MoD 2008) sebagai dasar penandatanganan Perjanjian Pinjaman untuk tahap konstruksi MRT.
- 5 Desember 2008, penandatanganan *Aide Memoir* antara JICA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan *preparatory study for extension* Dukuh Atas-Kota-Kampung Bandan, yang ditindaklanjuti oleh JICA dengan mengirim tim untuk melaksanakan *feasibility study* koridor Selatan-Utara tahap II, Dukuh Atas-Kota-Kampung Bandan, dan *pre-feasibility study* jalur Timur-Barat.
- June 17, 2008, PT MRT Jakarta was established upon approval from DKI Jakarta Council through the Regional Regulation No. 3 of 2008 regarding the Establishment of BUMD PT MRT Jakarta, and the Regional Regulation No. 4 of 2008 regarding Regional Capital Investment in PT MRT Jakarta.
- November 28, 2008, the *Minutes of Discussion* (MOD 2008) were signed to become the basis for the signing of Loan Agreement for MRT's construction phase.
- December 5, 2008, JICA and DKI Jakarta Provincial Government signed the *Aide Memoir* for the implementation of *preparatory study for extension* of Dukuh Atas-Kota-Kampung Bandan, which was followed-up by JICA by sending a team to carry out a *feasibility study* on the South- North corridor Phase II, Dukuh Atas-Kota- Kampung Bandan, and a *pre-feasibility study* on the East-West lane.



2009

- 19 Februari 2009, pengangkatan Direksi Direksi Periode I MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
- 25 Maret 2009, penandatanganan naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 1 antara Pemerintah RI dengan Pemprov DKI, yang menghibahkan sebagian porsi (LA IP-536) kepada Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk pengadaan Konsultan Pendampingan Tender dan Konsultan Manajemen.
- 31 Maret 2009, Loan Agreement tahap 2 (L/A 2) untuk pinjaman tahap konstruksi senilai ¥48,15 miliar sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk Proyek MRT (L/A2).
- 24 Juli 2009, Penandatanganan NPPH 2 yang menghibahkan seluruh porsi (L/A 2) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk konstruksi MRT.
- 23 November 2009, *Basic Design Engineering* mulai dilaksanakan di Kementerian Perhubungan.
- February 19, 2009, the appointment of Period I Board of Directors of PT MRT Jakarta by the Governor of DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
- March 25, 2009, the signing of Agreement Manuscript for Grant Continuation (NPPH) 1 between the Government of the Republic Indonesia and DKI Jakarta Provincial Government that granted portions (LA IP- 536) to DKI Jakarta Provincial Government, which was intended for the procurement of Tender Assistance Consulting and Management Consulting services.
- March 31, 2009, Loan Agreement phase 2 (L/A 2) for the construction phase loans worth of ¥48.15 billion as the second part of total loans for MRT Project (L/A 2).
- July 24, 2009, the signing of NPPH 2 that granted all portions (L/A 2) to DKI Jakarta Provincial Government, which was intended for MRT construction.
- November 23, 2009, *Basic Design Engineering* began to be conducted in the Ministry of Transportation.



2011

- Pelaksanaan kegiatan lelang fisik Proyek MRT khususnya dilaksanakan karena telah mempunyai payung hukum. Payung hukum tersebut telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan seluruh kegiatan MRT, termasuk proses tender, diberikan kewenangannya kepada PT MRT Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan Proyek MRT meliputi Jasa Konsultasi *Basic Engineering Design* (BED), Jasa Konsultansi Manajemen (MCS), Jasa Konsultansi Pengadaan (TAS), Pekerjaan Sipil dan Peralatan, Jasa Konsultansi Manajemen Operasional (OMCS), dan Jasa Konsultansi Pengelola (CMCS)/Pegawainya Pembangunan telah dijelaskan dalam *Loan Agreement* (L/A 1) dan (L/A 2) serta Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).
- Desember 2011, sepuluh konsorsium kontraktor dinyatakan lolos dalam proses Prakuilifikasi Pengadaan fisik untuk Pembangunan Tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI).
- Terbitnya *No Objection Letter* (NOL) dari JICA atas daftar pendek para Calon Kontraktor Pekerjaan Sipil MRT Jakarta Tahap I pada 7 Desember 2011 yang lolos prakuilifikasi.
- The physical tender of MRT Project was particularly executed because there was already a legal protection issued by the Central Government and DKI Jakarta Provincial Government, which declared that the authority for the entire MRT activities, including tender process, was granted to PT MRT Jakarta.
- The implementation of MRT Project activities including Consulting Services of Basic Engineering Design (BED), Management Consulting Services (MCS), Tender Assistance Services (TAS), Civil Works and Equipment Tender, Operation and Maintenance Consulting Services (OMCS), and Construction Management Consulting Services (CMCS)/ Construction Supervisor has been described in the Loan Agreement (L/A 1) and (L/A 2) as well as the Agreement Manuscript for Grant Continuation (NPPH).
- December 2011, ten consortiums of contractors passed in Physical prequalification tender process for Phase I Construction (Lebak Bulus-Bundaran HI).
- Publication of *No Objection Letter* (NOL) from JICA on a shortlist of Contractor Candidates in Civil Works of MRT Jakarta Phase I on December 7, 2011, who passed in prequalification.



2010

- 8 Juli 2010, *Minutes of Discussion* (MoD) antara JICA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BAPPENAS, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. MOD ini membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan – Utara Tahap I dari Lebak Bulus-Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus-Bundaran HI. Perpanjangan ini dilakukan dengan menarik stasiun Bundaran HI yang semula berada di MRT koridor Selatan-Utara tahap II menjadi tahap I. Perubahan ini dilakukan untuk meminimalisir dampak lalu lintas pada Masa Konstruksi dan mengakomodir kebutuhan *turnback facility* MRT koridor Selatan-Utara tahap I.
- July 8, 2010, *Minutes of Discussion* (MoD) were signed between JICA, Provincial Government of DKI Jakarta, BAPPENAS, and Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation. This MOD discussed the route extension of South-North MRT corridors Phase I from Lebak Bulus-Dukuh Atas, to Lebak Bulus-Bundaran HI. This extension was performed by pulling Bundaran HI station, which formerly located in the phase II of South-North MRT corridor to be included in the phase I. These changes were conducted to minimize the impact of traffic during Construction Period and to accommodate the needs of *turnback facility* in South-North MRT corridor of Phase I.

2012

- 31 Januari 2012, PT MRT Jakarta menggelar rapat penjelasan pelaksanaan lelang (*aanwijzing*) di kantor PT MRT Jakarta, yang dihadiri jajaran Panitia Pengadaan Konstruksi Sipil MRT, KPK, LKPP dan jajaran Direksi PT MRT Jakarta serta para Calon Kontraktor Sipil.
- PT MRT Jakarta membuat pakta integritas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Etika Perilaku (*Code of Conduct*) PT MRT Jakarta, sebagai komitmen menjalankan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
- 27 September 2012, dilakukan sosialisasi MRT Jakarta melalui pameran di 7 (tujuh) pusat perbelanjaan di Jakarta.
- 28 September 2012, diumumkan nama-nama nominasi konsorsium pemenang lelang 3 (tiga) Paket Bawah Tanah. Sebagai Konsorsium pertama yang mengerjakan Paket (CP-104, dan CP-105) adalah Shimizu Obayashi sebagai *leader*-nya dengan anggota Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi *Joint Venture*. Sedangkan untuk (CP-106) nominasinya adalah Konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) bersama Hutama Karya *Joint Operation*.
- January 31, 2012, PT MRT Jakarta held tender explanation meeting (*aanwijzing*) at its office, attended by MRT Civil Construction Tender Committee, KPK, LKPP and the Board of Directors of PT MRT Jakarta, as well as Civil Contractor Candidates.
- PT MRT Jakarta prepared integrity pact on procurement of goods and services in accordance with Code of Conduct of PT MRT Jakarta, as a commitment to carrying out the tender process that complies with the applicable regulations and does not violate any rules; therefore, the tender process could run smoothly and on time.
- September 27, 2012, the socialization of MRT Jakarta was conducted through exhibitions in 7 (seven) shopping centers in Jakarta.
- September 28, 2012, announcement of the names of the winning tenderer consortium nominations of 3 (three) Underground Packages. The first consortium working on CP-104 and CP-105 Packages was Shimizu Obayashi as the leader with members consisted of Wijaya Karya, and Jaya Konstruksi *Joint Venture*. While for CP-106 Package, the nominees were consortium of Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) together with Hutama Karya *Joint Operation*.



JEJAK LANGKAH MILESTONES



2013

- Pengangkatan Direksi Periode II PT MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
- Proyek MRT Jakarta memasuki tahap konstruksi (*groundbreaking*).
- *Appointment of Board of Directors of PT MRT Jakarta by the Governor of DKI Jakarta, Joko Widodo.*
- *MRT Project entered the construction phase (groundbreaking).*



2014

Proyek MRT Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu proyek dari 20 proyek infrastruktur di dunia.
MRT Jakarta Project gained international recognition as one of the 20 best infrastructure projects in the world.



2016

- TBM Antareja dan Antareja II telah berhasil menembus Stasiun Senayan - Istora – Bundungan Hilir dari lokasi awal pengoperasian TBM di titik Patung Pemuda Senayan.
- TBM Mustikabumi I dan Mustikabumi II mulai bekerja dari titik Stasiun Bundaran HI dan telah berhasil membuat terowongan jalur bawah tanah menembus Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Setiabudi. Stasiun Setiabudi adalah tempat berakhirnya seluruh pekerjaan terowongan jalur bawah tanah.
- Pemasangan gelagar (*box girder*) jalur layang MRT telah dimulai di Jalan Fatmawati.
- Penandatanganan kontrak *Operation & Maintenance Consulting Services (OMCS)*.
- Penyelesaian pembebasan lahan prioritas.
- Perubahan Direktur Utama, Direktur Konstruksi, dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
- *Antareja and Antareja II TBMs had successfully tunneled through Senayan - Istora – Bundungan Hilir station from the TBM launching point at Patung Pemuda Senayan.*
- *Mustikabumi I and Mustikabumi II TBMs started to tunnel from Bundaran HI Station and had successfully tunneled through Dukuh Atas Station towards Setiabudi Station. The Setiabudi station is the meeting point for all tunneling works.*
- *Installation of MRT elevated section's box girder had begun along Jalan Fatmawati.*
- *The signing of Operation & Maintenance Consulting Services (OMCS) contract.*
- *The settlement of the acquisition of priority land areas.*
- *Changes of President Director, Construction Director, and Director of Operation and Maintenance of PT MRT Jakarta by Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.*



2015

- Beroperasinya *Tunnel Boring Machines (TBM)* Antareja untuk konstruksi bawah tanah, dengan peresmian pengoperasian TBM oleh Presiden Joko Widodo.
- 4 Desember 2015, penandatanganan Perjanjian Pinjaman No. IP-569 dan IP-571 antara JICA dengan Pemerintah Republik Indonesia guna pembiayaan lanjutan proyek pembangunan MRT Jakarta.
- *President Joko Widodo inaugurated the operation of Antareja Tunnel Boring Machines (TBM) for underground construction.*
- *December 4, 2015, the signing of Loan Agreement No. IP-569 and IP-571 between JICA and the Government of the Republic of Indonesia to further finance the development of MRT Jakarta project.*



2017

- Selesaiannya keseluruhan proses *tunneling* jalur bawah tanah MRT Jakarta dari Senayan hingga Bundaran HI.
- Dimulainya pekerjaan pemasangan rel di area Depo Lebak Bulus.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan TOD Koridor Utara – Selatan Fase 1 MRT Jakarta.
- Ditandatanganinya Perjanjian Penyelenggaraan.
- Seluruh rangkaian jalur layang dan bawah tanah MRT Jakarta Koridor Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia telah tersambung.
- Dimulainya proses *Basic Engineering Design (BED)* proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI-Kampung Bandan).
- Ditandatanganinya kontrak dengan mitra penyedia jasa periklanan dan telekomunikasi.
- Uji coba kereta MRT Jakarta yang sedang dibangun di Nippon Sharyo Jepang.
- *The completion of overall tunneling process of underground section of MRT Jakarta, from Senayan to Bundaran HI.*
- *The commencement of railway installation in Lebak Bulus Depot area.*
- *The Provincial Government of DKI Jakarta assigned PT MRT Jakarta to become the Main Operator to Manage the North – South Corridor of TOD Area of Phase 1 of MRT Jakarta.*
- *The signing of "Perjanjian Penyelenggaraan".*
- *All sequences of MRT Jakarta elevated section and underground section of Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia had been connected.*
- *The commencement of Basic Engineering Design (BED) process of Phase 2 of MRT Jakarta (Bundaran HI – Kampung Bandan).*
- *The signing of contract with advertising partner and telecommunication provider.*
- *Trial run of MRT Jakarta train being developed in Nippon Sharyo, Japan.*



2018

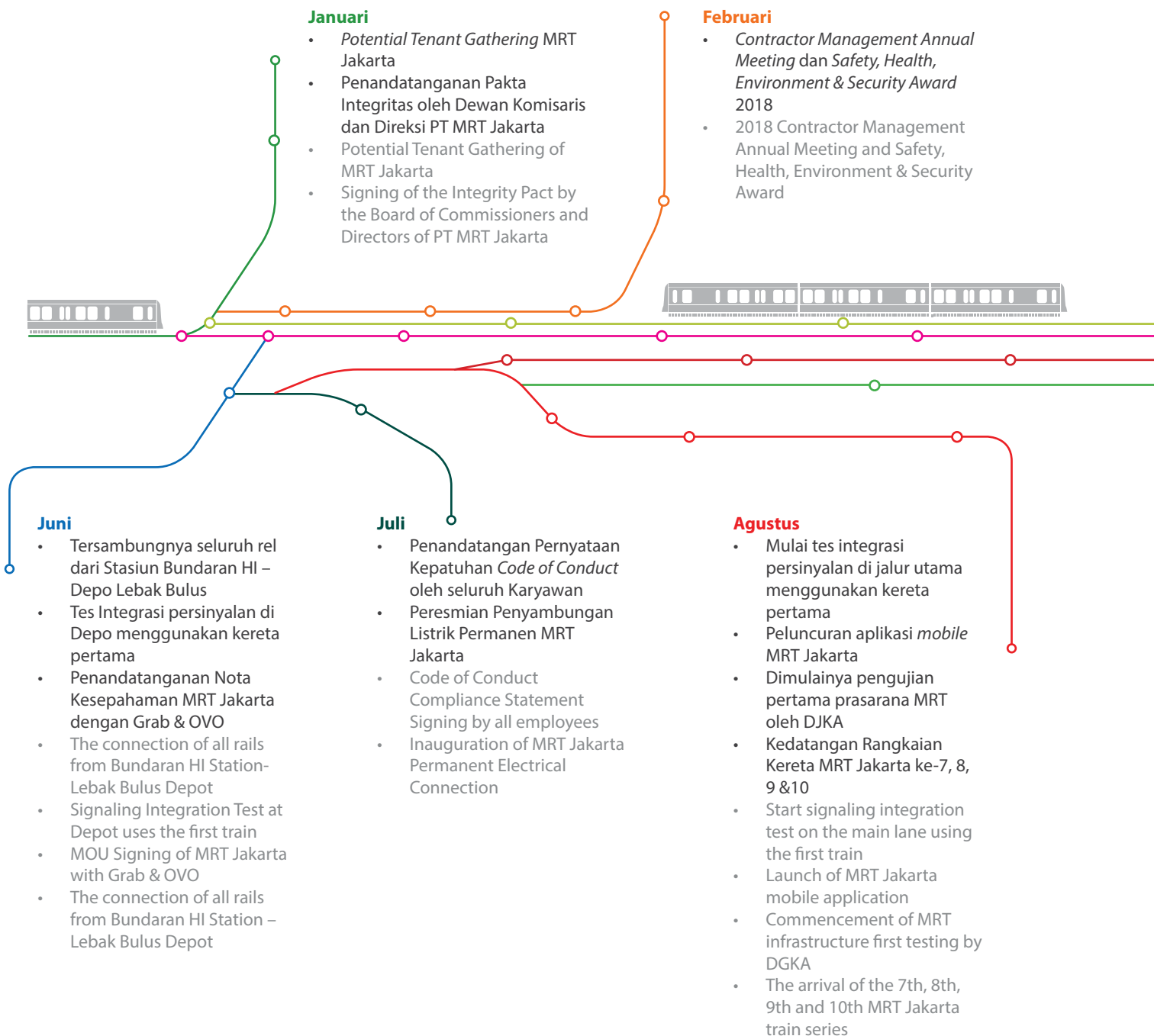
- Tersambungannya seluruh rel dari Stasiun Bundaran HI – Depo Lebak Bulus
- Peluncuran aplikasi *mobile* MRT Jakarta
- Dimulainya tes integrasi persinyalan di jalur utama menggunakan kereta pertama
- Dimulainya pengujian pertama prasarana MRT oleh DJKA
- Dimulainya tes uji pergerakan kereta (*Dynamic Test*) di jalur utama
- Rangkaian kereta MRT Jakarta fase 1 telah lengkap 16 rangkaian
- Dimulainya *Parallel Trial Run*
- Selesaiannya rangkaian *training* Masinis dan OCC
- *Connection of all the railways from Bundaran HI Station - Lebak Bulus Depot*
- *Launch of MRT Jakarta mobile application*
- *Started signaling integration tests on the main lane using the first train*
- *Commencement of the first trial of MRT infrastructure by DJKA*
- *Started the train Dynamic Test on the main lane*
- *16 trains for MRT Jakarta phase 1 were completed*
- *Parallel Trial Run Phase*
- *Completion of the Machinist and OCC training activities*



MRT JAKARTA DALAM KEMAJUAN 2018

MRT JAKARTA'S PROGRESS IN 2018

PERJALANAN DAN PENCAPAIAN DI SEPANJANG TAHUN 2018 JOURNEY AND ACHIEVEMENT THROUGHOUT 2018





MRT JAKARTA DALAM KEMAJUAN 2018 MRT JAKARTA'S PROGRESS IN 2018

Maret

- Pengisian & Penyampaian LHKPN oleh semua pejabat struktural PT MRT Jakarta
- RUPS Tahunan & RUPS LB PT MRT Jakarta
- Uji coba *Shunting Loco* MRT Jakarta
- Perancangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas
- Completion & Submission of LHKPN for all structural officials of PT MRT Jakarta
- Annual GMS & Extraordinary GMS of PT MRT Jakarta
- Shunting Loco Test of MRT Jakarta
- Designing Transit Oriented Areas of Dukuh Atas

April

- Kedatangan Rangkaian Kereta MRT Jakarta ke 1 & 2
- Malam Apresiasi bagi Para Pemilik Lahan di sekitar trase Fase 1 MRT Jakarta
- Pengujian Kompetensi sumber daya manusia Perkeretaapian MRT Jakarta oleh Dirjen KA
- The Arrival of MRT Jakarta Train Series 1 & 2
- Appreciation Night for Land Owners around MRT Jakarta Phase 1
- Human Capital Competence Assessment of MRT Jakarta Railways by Director General of Railways

Mei

- Penandatanganan Nota Kesepahaman MRT Jakarta dengan Go-Jek
- MOU Signing of MRT Jakarta with Go-Jek

September

- Mulai tes uji pergerakan kereta (*Dynamic Test*) di jalur utama
- *Exclusive Marketing Gathering Naming Rights*
- Penghargaan Sayembara *Transport HUB KBT Dukuh Atas*
- Start the train Dynamic Test on the main lane
- *Exclusive Marketing Gathering Naming Rights*
- *Transport HUB Contest Award of TOD Dukuh Atas*

Oktober

- Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bekraf untuk retail UMKM
- Penandatanganan *Explanatory Note* dan *Loan Agreement* Fase II MRT Jakarta
- Penunjukan 2 Direksi dan 1 Komisaris baru PT MRT Jakarta
- Kedatangan Rangkaian Kereta MRT Jakarta ke-5, 6, & 11
- MOU Signing with Bekraf for retail Micro Small & Medium Enterprises (UMKM)
- Explanatory Note and Loan Agreement Signing Phase II of MRT Jakarta
- Appointment of 2 Directors and 1 new Commissioner of PT MRT Jakarta
- The arrival of the 5th, 6th and 11th MRT Jakarta train series.

November

- Uji coba operasi sistem perkeretaapian secara terintegrasi oleh kontraktor
- Penandatanganan Nota kesepahaman PT MRT Jakarta dan Transjakarta
- Kedatangan Rangkaian Kereta MRT Jakarta ke-4, 12, & 13
- Trial operation of the railway system is integrated by the contractor
- MOU Signing between PT MRT Jakarta and Transjakarta
- The Arrival of the 4th, 12th and 13th MRT Jakarta train series.

Desember

- 16 Rangkaian kereta MRT Jakarta fase 1 telah lengkap
- Uji coba rangkaian kereta MRT Jakarta 2-16
- Fase *Parallel Trial Run*
- Selesaiannya rangkaian *training* Masinis dan OCC
- Kedatangan Rangkaian Kereta MRT Jakarta ke-3, 14, 15, & 16
- 16 train series of MRT Jakarta phase 1 is complete
- Train series 2-16 trial of MRT Jakarta
- *Parallel Trial Run* Phase
- Completion of the Engineer and OCC training series
- The arrival of the 3rd, 14th, 15th and 16th MRT Jakarta train series.

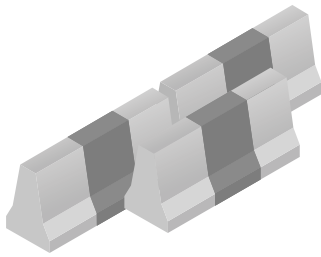


KEMAJUAN KONSTRUKSI MRT JAKARTA FASE I (LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA)

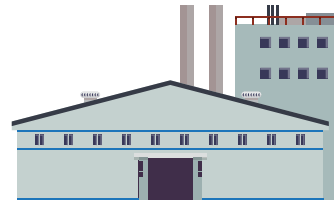
MRT JAKARTA PHASE I (LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA) CONSTRUCTION PROGRESS

Konstruksi Layang

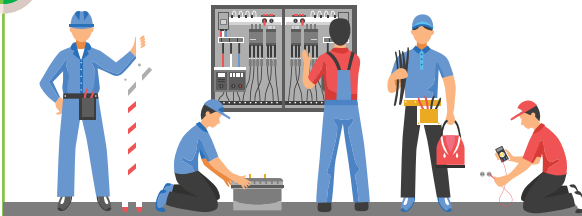
Elevated Section



Parapet sepanjang jalur elevated selesai
Parapets along the elevated sections were completed



Struktur di bangunan Workshop & Inspection Shed di Depo
The structure in the Workshop & Inspection Shed was



Instalasi peralatan di Receiving Sub Station (RSS)
Equipment installation at the Receiving Sub Station (RSS)



Pekerjaan arsitektural tembok dan keramik pada area
concourse dan platform stasiun elevated
Wall and ceramic architectural work on the concourse
area and elevated station platform

Kemajuan Pembangunan Sarana & Prasarana

Development Progress Of Facilities And Infrastructure

97,80%

Depot & Elevated Section
CP 101 - CP 103

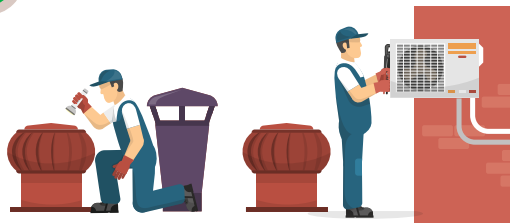
98,41%

Underground Section
CP 104- CP 106

KEMAJUAN KONSTRUKSI MRT JAKARTA FASE I
 MRT JAKARTA PHASE I (LEBAK BULUS - BUNDARAN HOTEL INDONESIA) CONSTRUCTION PROGRESS

Konstruksi Bawah Tanah

Underground Construction



Pekerjaan struktur *Cooling Tower & Ventilation Tower* di seluruh stasiun *undergrounds*
Cooling Tower & Ventilation Tower Structure work in all underground stations



Pedestrian di Jalan Sudirman
Pedestrian on Jalan Sudirman



Reinstatement Taman Duku Atas
Reinstatement of Taman Duku Atas



94,65%

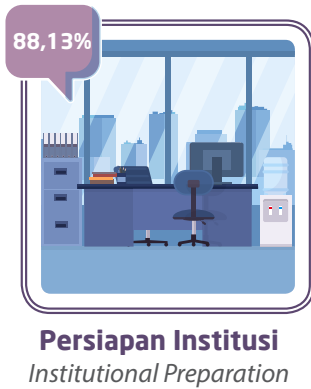
*Railway Systems & Rolling Stock
 CP 107- CP 108*

98,86%

*Overall
 CP 101- CP 108*

Kesiapan Operasi dan Pemeliharaan

Readiness Of Operation And Maintenance



Pencapaian Governance, Risk Management & Compliance (GRC)

Achievement of Governance, Risk Management & Compliance

PERATURAN DIREKSI PT MRT JAKARTA NOMOR 023 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN MENJALANKAN 3 LINES OF DEFENSE



Sebagai wujud pengembangan GRC, Perusahaan telah melakukan :

- Evaluasi Penerapan GCG (85.14)
- Implementasi *Business Continuity Management* (BCM);
- Pengukuran *Risk Maturity* oleh Audit Internal (2.89) & 3rd Party – PPM (3.3)
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal oleh BPKP (70.73)

SURAT EDARAN NO. 009 TAHUN 2018 TENTANG CHECKLIST GRC



Corporate Governance

Manajemen Risiko
Risk Management

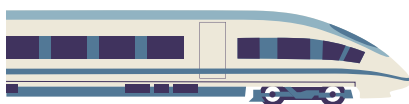
Corporate Governance

As a form of GRC development, the Company has done:

- Evaluation of GCG Implementation (85.14)
- Implementation of *Business Continuity Management* (BCM);
- Measurement of *Risk Maturity* by Internal Audit (2.89) & 3rd Party - PPM (3.3)
- Evaluation of Internal Control System by BPKP (70.73)

Parallel Trial Run MRT Jakarta

Parallel Trial Run Of Mrt Jakarta



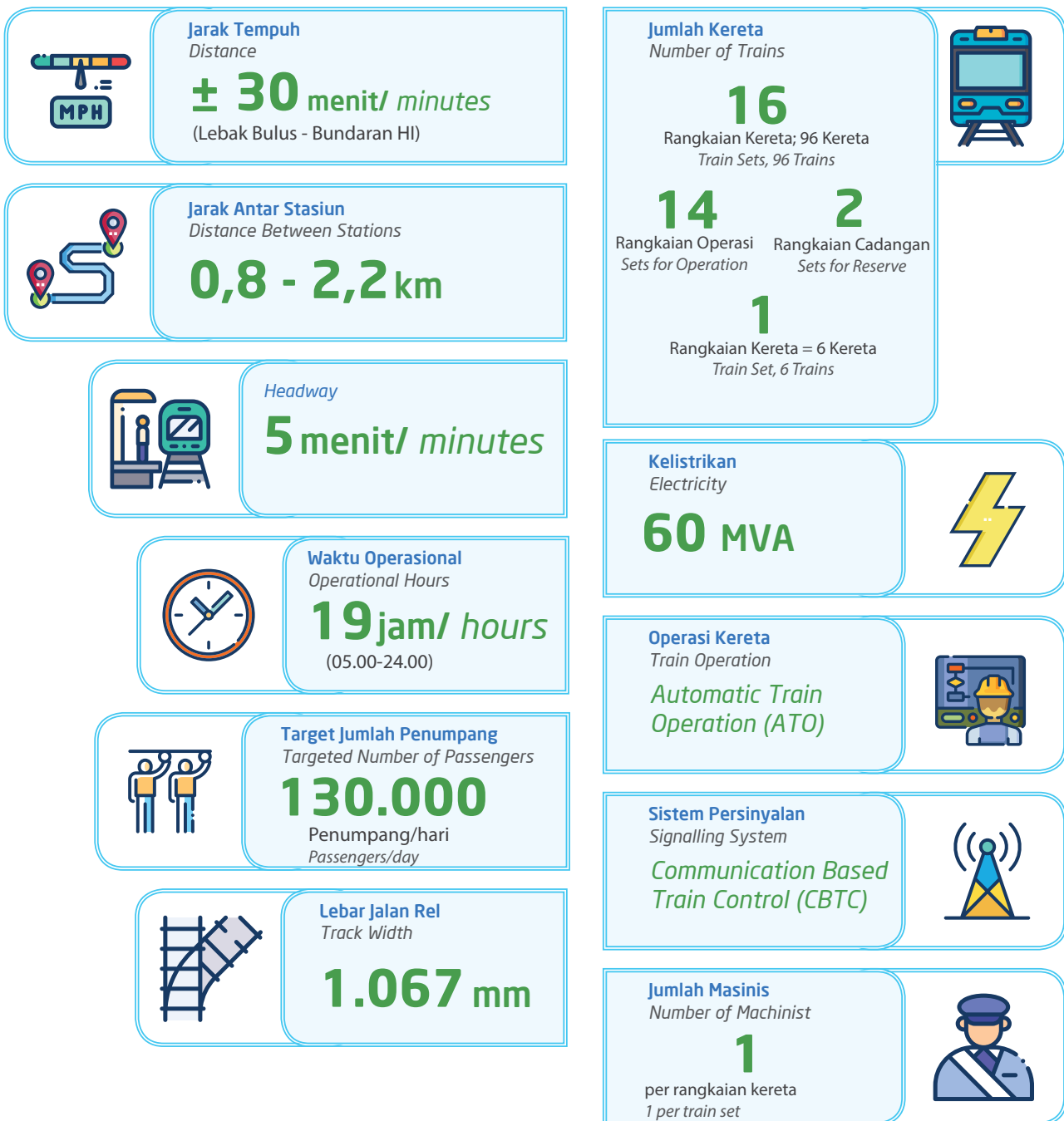
“Parallel Trial Run MRT Jakarta telah dilakukan sejak 26 Desember 2018 dan akan terus dilakukan hingga 26 Februari 2019. Selain sebagai uji coba dan bentuk familiarisasi masinis sebelum beroperasi penuh, *Parallel Trial Run* juga menjadi bagian dari kampanye Perusahaan untuk mengajak masyarakat Jakarta menggunakan moda transportasi publik dalam rangka mengurangi kemacetan Jakarta.

MRT Jakarta's Parallel Trial Run has been conducted since December 26, 2018 and will continue until February 26, 2019. Besides serving as trial run and form of machinist familiarization prior to full operation, the Parallel Trial Run is also part of the Company's campaign to encourage the people of Jakarta to use public transportation modes in order to reduce congestion in Jakarta.



Rencana Pengoperasian MRT Jakarta

Operation Plane of MRT Jakarta



Potensi Regenerasi Kota

Potential regeneration city

Pertumbuhan Pembangunan Growth Development



10,83 juta m²
Area Pengembangan
Campuran Baru
10.83 Million M² New Mixed
Development Area



242,2 Triliun Rupiah
Pertumbuhan Nilai Properti Dalam
Kawasan TOD MRT Jakarta
242.2 Trillion Rupiah Growth Of
Property Value In The Area Of MRT
Jakarta Tod



153.776 SRP
Berkurang
Reduced

Kontribusi Pendapatan Daerah Contribution Of Regional Income



742 Miliar Rupiah/Tahun
Kontribusi Dari Pajak Bumi & Bangunan
di kawasan TOD MRT Jakarta
742 Billion Rupiah / Year Contribution
From Land & Building Taxes In Mrt Jakarta
Tod Area



182 Miliar Rupiah/Tahun
Kontribusi Pajak Dari Pajak Sewa
Menyewa (Rental Office & Retail)
182 Billion Rupiah / Year
Tax Contribution From Office Rental &
Retail Taxes



15,4 Triliun Rupiah
Kontribusi Pajak Dari Pajak Jual Beli
Properti (seperti PJB, BPHTB, dll).
15.4 Trillion Rupiah
Tax Contribution From Buying Property
Taxes (Such As Pjb, Bphtb, Etc.).

Kontribusi Sosial & Lingkungan Social & Environmental Contribution



34.047 unit
POTENSI PENGEMBANGAN HUNIAN
TERJANGKAU DALAM KAWASAN TOD
34,047 UNITS
POTENTIAL DEVELOPMENT OF
AFFORDABLE HOUSING IN TOD AREA



73,9 HA
TAMAN DAN RUANG TERBUKA PUBLIK
PARK AND PUBLIC OPEN SPACE

Taman, Plaza dan ruang terbuka akan mengubah identitas dan memberikan ruang-ruang bagi komunitas untuk beraktivitas sosial
Parks, plazas, and open spaces will change identities and provide spaces for the community to engage in social activities.



639.380
PEKERJA YANG DITAMPUNG
EMPLOYED WORKERS
Pengembangan berkepadatan tinggi membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat diakses dengan mudah melalui stasiun transit
High density development may open new jobs and be easily accessed through the transit station



149,1 km
PENGEMBANGAN JALUR PEJALAN KAKI
DEVELOPMENT OF SIDEWALK

Jakarta memiliki jalan sepanjang 7.000km namun hanya memiliki trotoar sepanjang 400km. Pengembangan trotoar baru dapat memberikan rute pedestrian yang aman, nyaman dan aksesibel di dalam kawasan TOD
Jakarta has a 7,000km road but only has 400km of sidewalks. The development of new sidewalks can provide pedestrian routes that are safe, comfortable and accessible in the TOD area.

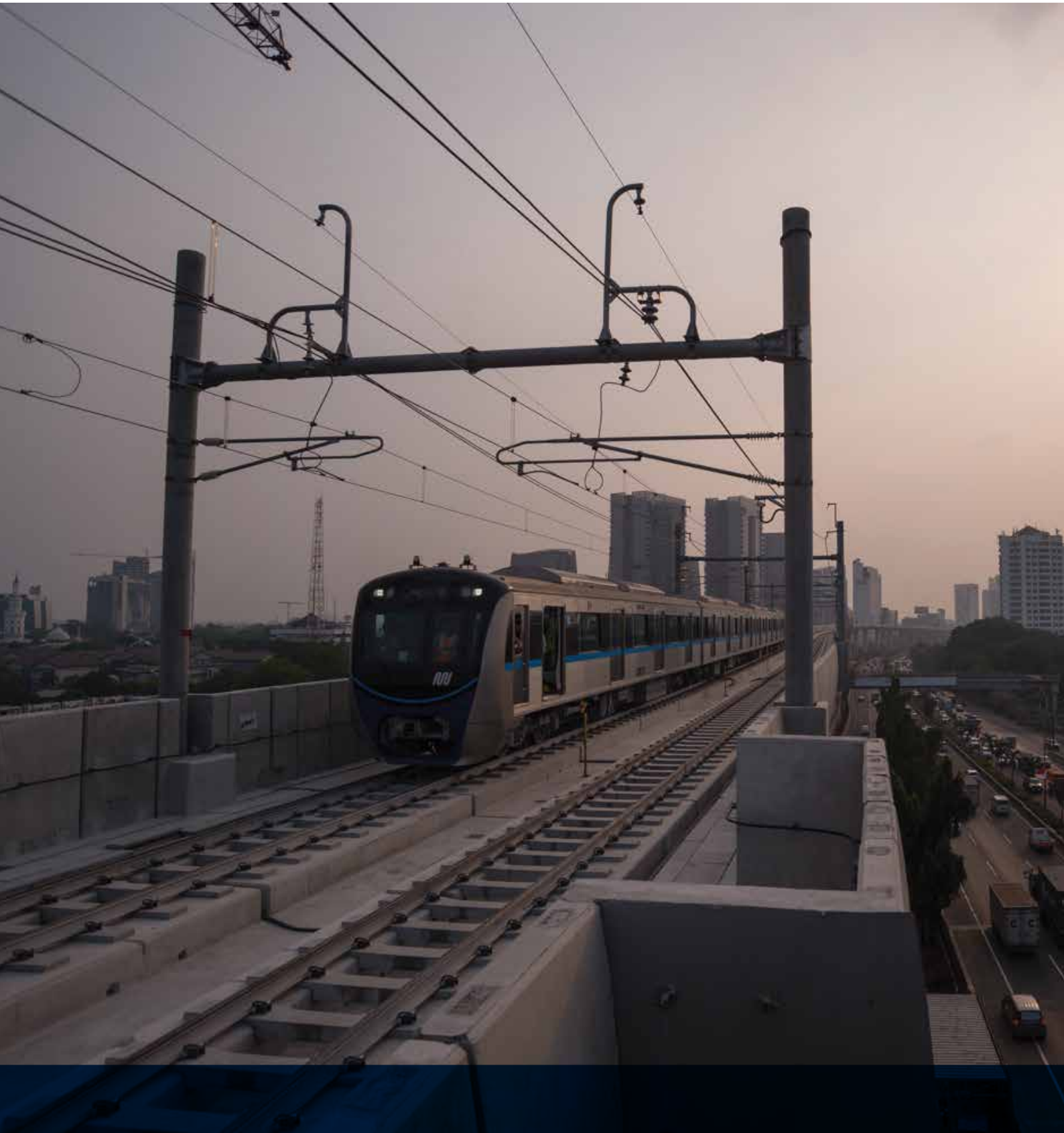


21 HA
AREA AKTIVITAS PUBLIK
AREA OF PUBLIC ACTIVITIES
Kegiatan – kegiatan informal seperti PKL, hawker center serta ojek online diwadahi pada beberapa lahan pada Kawasan TOD.
Informal activities such as street vendors, hawker centers and online motorcycle taxis are contained in several lands in the TOD area



56.854 m²
AREA TEPI SUNGAI AKTIF
RIVERSIDE AREAS

Area tepi sungai dapat dimanfaatkan sebagai plaza/taman yang dapat digunakan beraktivitas oleh pedestrian
The riverside area can be used as a plaza / park that can be used by pedestrian activities





01

PERFORMA 2018

2018 PERFORMANCE

Pertumbuhan aset meningkat 37%, hal ini sejalan dengan progres fisik pembangunan yang dilakukan Perusahaan.

Asset growth increased 37%, it was in line with the Company physical progress.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Lab a (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Income/Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain in million rupiah, unless stated otherwise	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017- 2018 (%)
Beban Usaha Operating Expenses	(207.263)	(136.266)	(79.457)	(63.667)	(55.721)	52,08%
Penghasilan (Beban) Lain-lain Neto Other Income (Expense) – Net	68.544	21.135	43.043	909	23.967	224,18%
Rugi Tahun Berjalan Loss for the Year	(138.719)	(115.130)	(36.413)	(62.758)	(31.754)	20,49%
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expense)	1.213	(1.764)	449	561	387	(168,78)%
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Loss for the Year	(137.506)	(116.894)	(35.964)	(62.196)	(32.141)	17,63%

Keterangan: Perusahaan belum beroperasi secara komersial, dengan demikian tidak terdapat akun Pendapatan/Penjualan dalam laporan laba/rugi Perusahaan.
Remarks: The Company has not operated commercially, thus there is no Income / Sales account in the Company's profit / loss statement

Posisi Keuangan Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain in million rupiah, unless stated otherwise	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017- 2018 (%)
Aset Lancar Current Assets	616.805	785.531	475.867	395.308	299.642	(21,48)%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	12.797.094	8.996.310	5.619.354	3.768.693	1.970.429	42,25%
Jumlah Aset Total Assets	13.413.899	9.781.842	6.095.221	4.164.001	2.270.071	37,13%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	382.882	466.942	262.755	201.743	421.766	(18,00)%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	748.155	555.257	345.127	201.997	41.055	34,74%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.131.037	1.022.198	607.882	403.740	462.821	10,65%
Jumlah Ekuitas Total Equity	12.282.862	8.759.644	5.487.339	3.760.261	1.807.250	40,22%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	13.413.899	9.781.842	6.095.221	4.164.001	2.270.071	37,13%

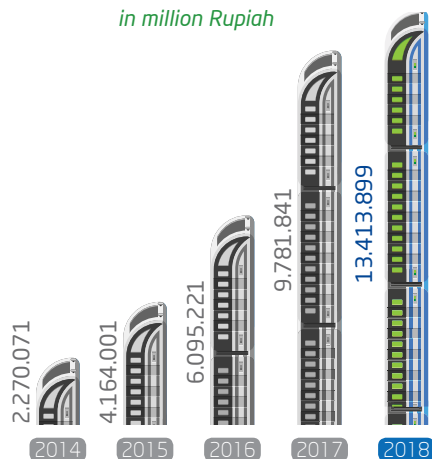
Keterangan: Perusahaan tidak memiliki entitas asosiasi/ventura bersama, dengan demikian tidak terdapat informasi tentang investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama.
Remarks: The Company does not have an associate / joint venture entity, thus there is no information on investments in associate / joint venture entities

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
FINANCIAL HIGHLIGHTS

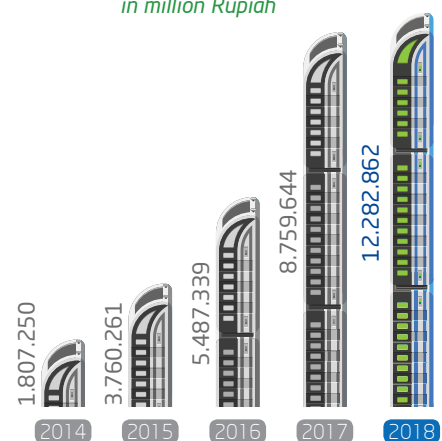
Rasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain <i>in million rupiah, unless stated otherwise</i>	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017- 2018 (%)
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	1,61	1,68	1,81	1,96	0,71	(4,24)%
Rasio Solvabilitas <i>Solvability Ratio</i>	11,86	9,57	10,03	10,31	4,90	23,93%
Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	1,58	1,67	1,79	1,94	0,70	(5,46)%
Quick Ratio	1,61	1,68	1,81	1,96	0,71	(4,24)%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas <i>Debt to Equity Ratio</i>	0,09	0,12	0,11	0,11	0,26	(21,09)%
Rasio Utang Jangka Pendek untuk Ekuitas <i>Short Term Debt to Equity Ratio</i>	0,03	0,05	0,05	0,05	0,23	(41,52)%
Rasio Utang Jangka Panjang untuk Ekuitas <i>Long Term Debt to Equity</i>	0,06	0,06	0,06	0,05	0,02	0,00%
Rasio Utang terhadap Aset <i>Debt to Asset Ratio</i>	0,08	0,10	0,10	0,10	0,20	(19,31)%

**Total Aset
(Rp juta)**
*Total Assets
in million Rupiah*



**Total Ekuitas
(Rp juta)**
*Total Equity
in million Rupiah*





INFORMASI TENTANG IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS INFORMATION



JUMLAH SAHAM

Jumlah saham Perusahaan sebanyak 6.165.807 lembar saham, dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6.165.307 lembar atau 99,99%, dan PD Pasar Jaya sebanyak 500 lembar atau 0,01% dari seluruh jumlah saham Perusahaan. Jumlah ini mengalami perubahan dibandingkan tahun 2017 namun tidak mengalami perubahan komposisi kepemilikan saham, di mana pemegang saham memutuskan untuk melakukan penambahan modal dari Rp5.721.807.000.000 di tahun 2017 menjadi Rp6.165.807.000.000 di tahun 2018.

Perusahaan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

NUMBER OF SHARES

The Company's shares amounted to 6,165,807 shares, with DKI Jakarta Provincial Government ownership of 6,165,307 shares or 99.99%, and PD Pasar Jaya ownership of 500 shares or 0.01% of the Company's total shares. These figures changed compared to 2017 but there was no change in the share ownership composition, where the shareholders decided to increase capital from Rp5,721,807,000,000 in 2017 to Rp6,165,807,000,000 in 2018.

The Company does not issue shares to be owned by the public or by management or employees.



INFORMASI TENTANG IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHTS INFORMATION

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Hingga 31 Desember 2018 Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Di sepanjang 2018, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

DIVIDEN SAHAM

Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2018, Perusahaan belum beroperasi secara komersial dan belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta keputusan pemegang saham.

INFORMATION ON SHARES TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2018, the Company has never conducted an Initial Public Offering and has not traded its shares to the public. Accordingly, there is no information related to shares trading that contains market capitalization based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest and closing share price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed; trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed; and information in graphical form which contains at least the closing price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed and the trading volume of shares in the Stock Exchange where the shares are listed for each quarter in the last 2 (two) years; including temporary suspension of stock trading in the last 2 (two) years.

INFORMATION ON CORPORATE ACTIONS

Throughout 2017 and 2018, the Company did not carry out corporate actions such as stock splits, reverse stock, bonus shares, or a decrease in share nominal value.

SHARE DIVIDEND

Since its establishment until the end of 2018, the Company has not yet operated commercially and has not yet distributed dividends to shareholders. This is in accordance with the provisions in the Articles of Association and the decisions of shareholders.



INFORMASI TENTANG IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA EFEK LAINNYA

INFORMATION ON BONDS, SUKUK OR CONVERSION BONDS, AND OTHER SECURITIES

Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

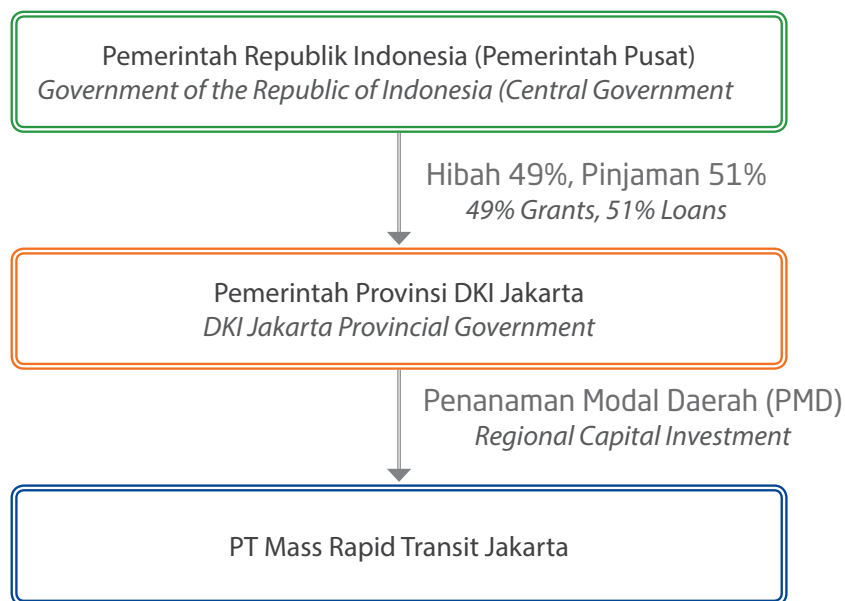
The Company does not issue bonds, sukuk or convertible bonds, or other securities. Thus, there is no information on the number of outstanding bonds / sukuk / convertible bonds, interest / reward rates, maturity dates, and rating of bonds / sukuk.

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN

INFORMATION ON FUNDING SOURCE

Sumber pendanaan proyek MRT Jakarta didapatkan dari ekuitas modal saham pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD). Berikut disampaikan sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan proyek MRT Jakarta:

The funding for MRT Jakarta project is sourced from the capital investment made by the Company's shareholders comprising DKI Jakarta Provincial Government, through the Regional Capital Investment (PMD) scheme. Following are the funding sources for MRT Jakarta project construction and development:







02

LAPORAN MANAJEMEN *MANAGEMENT REPORT*

MRT Jakarta berupaya melakukan perencanaan yang matang terhadap penganangan kawasan berorientasi, sebagai wujud integrasi dari berbagai moda transportasi publik.
MRT Jakarta strives to make a thorough planning for the launching of-oriented areas, as a manifestation of integration from various modes of public transportation





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS'S REPORT



RUKIJO

Plt. Komisaris Utama
Acting Official President Commissioner



“

Kunci utama keberhasilan persiapan pengoperasian MRT Jakarta adalah harmoni dan kerja keras semua pihak. Mari kita menyongsong Jakarta yang baru.

The main key to a successful preparation of The MRT Jakarta is Harmony and hardwork of all parties. Let's we welcome the new Jakarta.

”

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Sebagai ibukota dari Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Jakarta mencerminkan laju perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Dengan populasi penduduk pada usia tenaga kerja produktif yang cukup besar, pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, yang berimbas pada kemacetan Jakarta. Darurat kemacetan Jakarta, mungkin ini kalimat yang dapat menggambarkan persoalan kemacetan sebagai sesuatu yang harus segera ditangani.

Inisiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sesegera mungkin membenahi transportasi publik merupakan bagian dari upaya solutif untuk menjawab problem kemacetan di Jakarta. Pembangunan proyek MRT Jakarta dan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta, disebut juga "Perusahaan", bersama-sama dengan moda transportasi publik lainnya, diharapkan akan memberikan layanan transportasi publik yang dapat diandalkan oleh penduduk kota Jakarta.

Izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporannya dalam laporan tahunan Perusahaan tahun 2018, yang akan menjadi bagian dalam pelaporan manajemen atas kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2018, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

Dear distinguished shareholders and stakeholders,

As the capital city of Indonesia which has a large population, Jakarta reflects the pace of economic development and growth. Given quite a large number of working age population, motorized vehicles consumption has been in an upward trend, which then impacts on traffic congestions in Jakarta. "Traffic congestion emergency in Jakarta", this may be a sentence to describe traffic congestion issue as something that must be addressed immediately.

The Central Government and DKI Jakarta Provincial Government's initiative to immediately improve public transportation is part of the solution to address congestion problems in Jakarta. MRT Jakarta development project and the establishment of PT MRT Jakarta Regional Owned Enterprise (BUMD), hereinafter also referred to as "the Company", together with other modes of public transportation, are expected to provide reliable public transportation services for the Jakarta city residents.

Please allow us the Board of Commissioners to present our report in this 2018 annual report of the Company, which serves as part of management reporting on the Company's performance throughout 2018, especially the performance of our supervisory and advisory duties.



PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN DIREKSI

Sebagai salah satu organ utama dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peran melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berkewajiban untuk membangun hubungan yang harmonis dan strategis dengan Direksi sebagai organ yang bertindak untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan strategis dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi; dan pengawasan langsung oleh Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dilakukan dengan tujuan melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi dan kesiapan operasi MRT Jakarta, serta mengetahui kendala dan risiko serta rencana mitigasi dan penyelesaiannya. Di sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris melaksanakan 12 kali rapat dengan mengundang Direksi. Rapat ini menjadi forum penting bagi Dewan Komisaris untuk dapat menerima seluruh laporan kemajuan proyek MRT Jakarta yang telah memasuki tahapan persiapan operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bisnis.

Pengawasan juga dilakukan secara langsung terhadap ketepatan waktu, kendala, risiko serta mitigasinya dari perspektif masing-masing komite yang dimiliki Dewan Komisaris. Pengawasan ini dilakukan melalui *site visit* atau kunjungan ke paket pekerjaan konstruksi bersama komite, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 31 Januari 2018, pemantauan paket pekerjaan konstruksi CP 104 dan CP 105 untuk Stasiun Senayan - Benhil.
- Februari 2018, pemantauan paket pekerjaan konstruksi CP 105 dan CP 106 untuk jalur Stasiun Benhil - Bundaran HI.
- 10 April 2018, pemantauan paket pekerjaan konstruksi CP 101 untuk Depo Lebak Bulus.
- 13 Juli 2018, pemantauan paket pekerjaan konstruksi CP 104 dan CP 105 mulai dari Stasiun Senayan.
- 13 Agustus dan 7 Desember 2018, pemantauan paket pekerjaan konstruksi CP 107 dan CP 108 untuk mekanikal elektrikal dan kereta.

SUPERVISION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGIC POLICIES BY THE BOARD OF DIRECTORS

As one of the Good Corporate Governance (GCG) organs with the main role to carry out supervisory function, the Board of Commissioners is obliged to establish harmonious and strategic relationships with the Board of Directors as the organ acting to carry out the Company's management. The strategic policies supervision is carried out through 2 (two) activities, i.e: Board of Commissioners meetings by inviting Directors; and the Board of Commissioners' direct supervision.

The Board of Commissioners' meeting inviting the Board of Directors is conducted with the aim of monitoring the construction and readiness of MRT Jakarta operation, as well as finding out the constraints and risks and their mitigation and resolution plans. Throughout 2018, the Board of Commissioners held 12 meetings inviting the Board of Directors. This meeting is an important forum for the Board of Commissioners to receive all progress reports on MRT Jakarta project that has entered operation and maintenance preparation phase, and business development.

The supervision is also carried out directly on the timeliness, constraints, risks and mitigation from the perspective of each committee under the Board of Commissioners. This supervision is carried out by making site visits to the construction work packages together with the committees, with details as follows:

- *January 31, 2018, monitoring of CP 104 and CP 105 construction work packages for Senayan - Benhil Station.*
- *February 2018, monitoring of CP 105 and CP 106 construction work packages for Benhil - Bundaran HI Station lane.*
- *April 10, 2018, monitoring of CP 101 construction work package for Lebak Bulus Depot.*
- *July 13, 2018, monitoring of CP 104 and CP 105 construction work packages starting from Senayan Station.*
- *August 13 and December 7, 2018, monitoring of CP 107 and CP 108 construction work packages for electronics and mechanical and trains.*

Agar fungsi pengawasan atas kebijakan strategis yang dilakukan Direksi dapat berjalan secara efektif, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota Dewan Komisaris.

To ensure effective performance of the duty to supervise the implementation of strategic policies by the Board of Directors, the Board of Commissioners segregates the duties and responsibilities among the Board of Commissioners members.

Lingkup Pembagian Peran Pengawasan dan Konsultasi Antar Anggota Dewan Komisaris
Segregation of Supervisory and Consultancy Duties among Members of the Board of Commissioners



Bidang keuangan dan anggaran
Finance and Budget



Bidang konstruksi
Construction



Bidang operasi dan pemeliharaan
Operation and Maintenance



Bidang pengembangan usaha dan Transit Oriented Development (TOD)
Business Development and Transit Oriented Development (TOD)

Selain Dewan Komisaris, peran pengawasan juga dilakukan Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD). Secara triwulanan, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPBUMD, selaku pembina BUMD, di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Besides the Supervisory Board, the supervisory role is also carried out through Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) or Regional Owned Company (BUMD) and Investment Development Agency. As a BUMD supervisor, BPBUMD oversees the performance of DKI Jakarta Provincial BUMDs to be reported to the DKI Jakarta Provincial Government.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Penilaian terhadap kinerja Direksi melekat pada pengelolaan kinerja Perusahaan berdasarkan target-target yang telah ditetapkan. Berikut disampaikan pencapaian target kinerja sebagai penilaian bagi kinerja Perusahaan yang melekat sebagai kinerja Direksi.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN THE COMPANY'S MANAGEMENT AND ASSESSMENT BASIS

Assessment of the Board of Directors performance is attached to the Company's performance management based on predetermined targets. The following is achievement of the performance targets as an assessment of the Company's performance inherent in the Board of Directors performance.



SASARAN STRATEGIS PERUSAHAAN

- Penyelesaian Konstruksi Fase I dan persiapan Fase II pada Februari 2019 (bobot penilaian 42%)
Phase I Construction Completion and Phase II Preparation in February 2019 (assessment weight 42%)
- Kepastian Kesiapan Operasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Usaha untuk Maret 2019 (bobot penilaian 37%)
Certainty of Operational, Maintenance and Business Development Readiness for March 2019 (assessment weight 37%)
- Sistem korporasi berstandar Internasional (bobot penilaian 21%)
International standard based corporate system (assessment weight 21%)

Capaian penting untuk pengukuran kinerja Perusahaan di atas, dan pandangan Dewan Komisaris terhadap pencapaian kinerja tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konstruksi Fase I dan Persiapan Fase II
Dalam bidang konstruksi, Direksi telah melakukan pengurusan secara baik, seperti:
 - » Penyelesaian pekerjaan Konstruksi Fase I per 31 Desember 2018 mencapai penyelesaian 96,87% atau 0,01% lebih besar dari target 96,86%.
 - » Realisasi dan hibah dan pinjaman mencapai 99,74% dari anggarannya atau 19,74% lebih besar dari target yang ditetapkan 80%.
 - » Telah ditandatanganinya *Loan Agreement* lanjutan untuk menjamin ketersediaan pendanaan utama dalam penyelesaian konstruksi Fase I dan pelaksanaan Fase II.

Adapun capaian yang belum maksimal adalah persentase kesiapan *groundbreaking* konstruksi Fase II yang hanya mencapai 79%.

Important achievement for the Company's performance measurement above, and the Board of Commissioners' opinion on the performance achievement, can be described as follows:

1. Completion of Phase I Construction and Phase II Preparation
In the field of construction, the Board of Directors has properly managed the following works:
 - » Completion of Phase I Construction work as of December 31, 2018 reached 96.87% or 0.01% above the target of 96.86%.
 - » Realization and grants and loans reached 99.74% of the budget or 19.74% above the target of 80%.
 - » A further Loan Agreement has been signed to ensure the availability of major funding in Phase I construction completion and Phase II implementation.

Results that have not been optimal include the *groundbreaking* readiness of Phase II construction with an achievement of 79%.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS'S REPORT

2. Kesiapan Operasi, Pemeliharaan dan Pengembangan usaha

Mengingat sistem MRT masih relatif baru seperti teknologi dan ketersediaan SDM bahkan regulasi yang berkaitan dengannya, terdapat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi Direksi dalam capaian kinerjanya. Hal ini terjadi karena capaian setiap *milestone* tidak sepenuhnya dibawah kendali Direksi, khususnya bidang perizinan dan regulasinya. Namun demikian, Dewan Komisaris memandang bahwa capaian Direksi dalam mempersiapkan operasi, pemeliharaan MRT dan pengembangan usaha, telah mencukupi, yaitu:

- » Kesiapan operasi sistem perkeretaapian (MRT) telah dicapai Direksi 85,70 % atau lebih rendah 2,71% dari target yang ditetapkan sebesar 88,41%.
- » Persentase kesiapan penetapan tarif, asset dan subsidi hanya mencapai 60% atau hanya mencapai tersedianya draf Peraturan Gubernur terkait penetapan tarif MRT.
- » Presentase finalisasi perjanjian kerjasama dengan mitra terpilih untuk seluruh sektor *non farebox* (retail dan *naming rights*) telah mencapai target 100%.
- » Presentase penyelesaian pengembangan di kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) telah mencapai 100% atau telah selesainya gagasan desain pengembangan Kawasan ex Pasar Blora.

3. Praktik GRC (*Governance, Risk & Control*)

Secara umum, Direksi telah melakukan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan secara baik, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola dan praktik pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang baik. Hal ini terlihat dari:

- » Opini "wajar, dalam semua hal yang material" untuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- » BPKP memberikan skor 85,14 (baik) atas penilaiannya terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG pada setiap struktur dan proses pada organ Korporasi atau lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 83.
- » Tingkat *maturity risk management* telah mencapai 2,5 dari skala 4 atau 100% target tahapan pengembangan *risk management maturity* Perusahaan.

Selain indikator di atas, pada tanggal 9 Januari 2019 KPK telah memberikan penghargaan kepada Perusahaan atas kepatuhan LHKPN sebanyak 100%.

2. *Readiness of Operations, Maintenance and Business Development*

Given the relatively new system of MRT Jakarta such as technology, human resources availability, and even regulations related to it, there are many challenges and obstacles facing the Board of Directors in their performance achievement. This is because the achievement of each milestone is not entirely under the control of the Board of Directors, especially related to licensing and regulations. However, the Board of Commissioners views that the Board of Directors achievements in preparing MRT Jakarta operations, maintenance, and business development, are adequate, namely:

- » *The railway system operation (MRT) readiness has reached 85.70%, which is 2.71% below the target set at 88.41%.*
- » *Readiness in determination of tariffs, assets and subsidies has reached 60%, with the achievement of the availability of Governor Regulation draft related to MRT tariff determination.*
- » *Finalization of cooperation agreements with selected partners for all non-farebox sectors (retail and naming rights) has reached the target of 100%.*
- » *Completion of development in the Transit Oriented Development (TOD) area has reached 100% or the completion of ex. Pasar Blora development design.*

3. *GRC (Governance, Risk & Control) Practices*

In general, the Board of Directors has done a good job in the Company's management and stewardship, as well as adhering to good governance principles and risk management practices and internal controls. This can be seen from:

- » *"Fairly, in all material aspects" opinion for the Financial Statements that have been audited by the Public Accountants Firm.*
- » *BPKP's score of 85.14 ("Good") for the assessment of GCG principles implementation in each structure and process of the Company's organs, or above the target of 83.*
- » *The risk management maturity level has reached 2.5 on a scale of 4 or 100% of the Company's risk management maturity development phase target.*

In addition to the above indicators, on January 9, 2019 KPK awarded the Company for 100% LHKPN compliance.



Adapun hal-hal lain yang masih membutuhkan perhatian Direksi kedepan terdapat pada aspek *Public Readines* Indeks dengan nilai 61,64% atau mencapai 88% dari target sebesar 70% dan *Knowledge Management maturity* level Perusahaan masih berada pada skor 3,07 .

Dengan level *Public Readines* Indeks sebesar 61,64%, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih rentan untuk tetap menggunakan moda transportasi lain.

Other matters that still require the Board of Directors' attention in the future are the Public Readiness Index of 61.64% or 88% of the target set at 70%, and the Company's Knowledge Management maturity level's score of 3.07.

With the Public Readiness Index of 61.64%, it can be concluded that the community is still vulnerable to using other modes of transportation.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris bersama komite dan organ pendukung Dewan Komisaris lainnya telah melakukan tinjauan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2019 yang disusun Direksi. RKAP Perusahaan untuk tahun 2019 menitikberatkan pada dimulainya pengoperasian penuh operasi MRT Jakarta dengan tetap melakukan pembangunan konstruksi fase II koridor Bundaran HI hingga Kota, serta pengembangan usaha. Dewan Komisaris berpandangan bahwa sasaran strategi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut telah mencerminkan prospek usaha yang baik, dengan mempertimbangkan perluasan jaringan/koridor, potensi jumlah penumpang yang akan diangkut, hasil pengembangan usaha dan *non farebox* serta ketersediaan dana.

Dengan RKAP 2019 yang menitikberatkan pada dimulainya operasi MRT Jakarta untuk beroperasi secara komersial, di tahun 2019 Perusahaan menargetkan jumlah penumpang yang diangkut MRT Jakarta sebanyak 65.000 penumpang/hari atau 50% dari total proyeksi penumpang 130.000 penumpang/hari. Selain operasional MRT Jakarta, Perusahaan juga telah mempertimbangkan prospek usaha melalui pengembangan usaha dan pendapatan *non farebox*.

Beroperasi komersialnya Perusahaan akan memberikan dampak dan perubahan nyata pada kinerja keuangan Perusahaan. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya, Perusahaan menargetkan adanya Pendapatan Usaha, yaitu sebesar Rp776,13 miliar untuk tahun 2019. Beban Pokok Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp397,35 miliar, Laba Kotor Rp378,78 miliar, Beban Administrasi dan Umum Rp230,29 miliar, Rugi Tahun Berjalan Rp250,52 miliar, dan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Rp265,09 miliar.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE BOARD OF DIRECTORS' BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners together with its committees and other supporting organs of the Board of Commissioners have reviewed the 2019 Work and Budget Plan (RKAP) prepared by the Board of Directors. The Company's 2019 RKAP emphasizes the commencement of MRT Jakarta's full operation by continuously carrying out construction phase II of Bundaran HI – Kota corridor, as well as business development. The Board of Commissioners believes that the strategy, program and activity objectives related to this matter have reflected good business prospects, taking into account the networks/corridors expansion, potential number of passengers to be transported, results of business development and non-farebox as well as the availability of funds.

With the 2019 RKAP focusing on the commencement of MRT Jakarta commercial operations, in 2019 the Company targets the number of passengers transported by MRT Jakarta to be 65,000 passengers/day or 50% of the total passengers projection of 130,000 passengers day. In addition to MRT Jakarta operations, the Company has also considered business prospects through business development and non-farebox revenues.

The Company's commercial operations will have significant impact on and changes to the Company's financial performance. For the first time since its establishment, the Company has targeted Operating Revenues of Rp776.13 billion for year 2019. Cost of revenue is projected at Rp397.35 billion, Gross Profit Rp378.78 billion, Administrative and general expenses Rp230.29 billion, Loss Current year Rp250.52 billion, and Comprehensive Loss year Rp265.09 billion.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS'S REPORT

Dewan Komisaris berpandangan bahwa seluruh target yang dicanangkan di tahun 2019 telah mencerminkan seluruh kekuatan dan keunggulan Perusahaan, khususnya ketika Perusahaan telah memasuki statusnya yang telah beroperasi secara komersial. Target-target di atas sangat mungkin tercapai, terutama dengan fungsi MRT Jakarta menjadi solusi bagi kebutuhan moda transportasi publik di Jakarta.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI PERUSAHAAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK/002/BOC-MRT/V/2017 dan No. SK/042-2/BOD-MRT/V/2017 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Pengelolaan pengaduan melalui WBS dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary* yang berada di bawah Direksi. Namun, Perusahaan juga membentuk Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang bertugas memutuskan hasil validasi data/informasi laporan yang masuk melalui saluran WBS dan melaporkannya pada Direktur Utama atau Komisaris Utama. Komite ini juga bertugas untuk melaporkan hasil validasi data/informasi laporan melalui saluran WBS kepada Komisaris Utama jika terlapor adalah Direksi, untuk kemudian diputuskan, apakah laporan dengan Direksi sebagai pihak terlapor dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Manajemen Perusahaan melalui *Corporate Secretary* juga aktif melakukan sosialisasi adanya WBS Perusahaan secara terbuka. Situs web Perusahaan telah memuat informasi rinci tentang saluran pelaporan melalui WBS yang dapat diakses secara terbuka oleh pemangku kepentingan Perusahaan dengan alamat www.wbs.jakartamrt.co.id/wbs.

The Board of Commissioners believes that all targets set out in 2019 have reflected all of the Company's strengths and competitive edges, especially when the Company has entered its commercial operations status. The above targets are very likely to be achieved, especially with MRT Jakarta's function as a solution for the need of public transportation modes in Jakarta.

THE BOARD OF COMMISSIONERS VIEWSON THE MANAGEMENT OF WHISTLEBLOWING SYSTEMS (WBS) IN THE COMPANY AND THE BOARD OF COMMISSIONERS' ROLE IN THE COMPANY'S WBS

The Company has in place Whistleblowing System (WBS) established through a Joint Decision Letter of the Board of Commissioners and Directors No. SK/ 002 / BOC-MRT / V / 2017 and No. SK / 042-2 / BOD-MRT / V / 2017 concerning Whistleblowing System Guidelines. Management of complaints through the WBS is carried out by the Corporate Secretary Division under the Board of Directors. However, the Company has also formed Whistleblowing Handling Committee tasked to decide results of data/ information validations reports received by the WBS channel and make report to the President Director and President Commissioner. This Committee is also tasked to report results of data/information validation reports through the WBS channel to the President Commissioner if the party being reported is the Board of Directors, then a decision will be made whether the said report can be proceeded to the next stage or not.

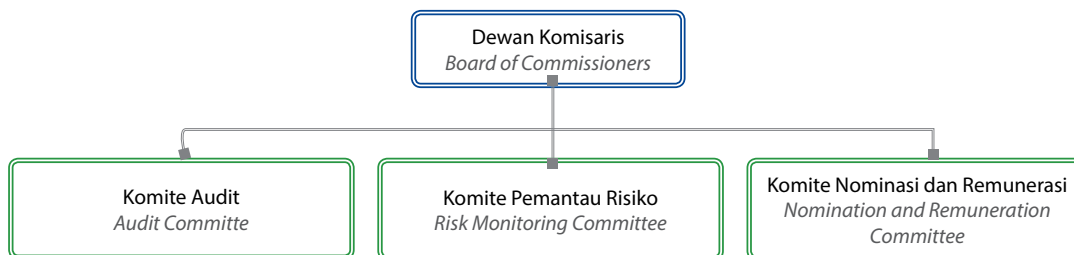
The Company's management through Corporate Secretary is also active in disseminating the existence of Company WBS openly. The Company's website contains detailed information about the reporting channel through the WBS which can be accessed openly by the Company's stakeholders at www.wbs.jakartamrt.co.id/wbs.

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, di sepanjang tahun 2018 saluran WBS yang diberlakukan Perusahaan menampung 3 (tiga) pengaduan pelanggaran, di mana 2 (dua) di antaranya tidak terbukti dan selesai tanpa status tindak lanjut, serta 1 (satu) pengaduan ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komitmen manajemen untuk mengembangkan WBS sebagai bagian dari penegakan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Keterbukaan saluran WBS yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan menunjukkan niat besar Perusahaan untuk dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam penegakan prinsip GCG.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Salah satu keberhasilan pelaksanaan peran pengawasan Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas secara aktif oleh organ-organ pendukungnya. Hingga akhir tahun 2018, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.



Komite Audit berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan masukan atau rekomendasi dan memastikan laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi Perusahaan, efektifitas Sistem Pengendalian Internal dan efektifitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan masukan atau rekomendasi dan

Based on the report submitted to the Board of Commissioners, throughout 2018 the WBS channel implemented by the Company received 3 (three) violation complaints comprising 2 (two) complaints that were not proven and completed without being followed-up status, and 1 (one) complaint that was already followed up.

The Board of Commissioners appreciates the management's commitment to developing WBS as part of GCG principles enforcement within the Company. The WBS channel transparency delivered to all stakeholders is testament to the Company's great intention to involve stakeholders in GCG principles enforcement.

THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

One successful implementation of the Board of Commissioners' supervisory duty is the active implementation of duties by its supporting organs. Until the end of 2018, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, namely Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

The Audit Committee has a role to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision, providing input and recommendations to the Board of Directors, encouraging the implementation of GCG principles within the Company and improving the quality of disclosure and financial reporting. Risk Monitoring Committee is tasked to assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties on the Company and risk management. While Remuneration and Nomination



LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS'S REPORT

memastikan efektifitas pelaksanaan manajemen risiko dan sistem manajemen risiko di Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan masukan atau rekomendasi pada bidang nominasi dan remunerasi di Perusahaan.

Penilaian kinerja ketiga komite di atas dilakukan berdasarkan keaktifan dari masing-masing komite, baik melalui rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing komite maupun pelaporan yang menjadi rujukan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan saran bagi Direksi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh komite atas keaktifan yang telah ditunjukkan, termasuk keterlibatan dalam kunjungan kerja ke lapangan seperti yang telah disampaikan di atas. Dewan Komisaris berharap, seluruh upaya yang telah ditunjukkan komite dapat menjadi fondasi untuk dapat menunaikan tugasnya di tahun-tahun mendatang.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 4 Mei 2018 dan 29 November 2018, Dewan Komisaris mengalami perubahan susunan keanggotaan di sepanjang tahun 2018. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018.

Committee is formed to assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring GCG implementation in the Company; including consultancy functions in the matters related the Company's remuneration and nomination.

The three committees' performance is assessed based on the activeness of each committee through meetings held by each committee and reporting that becomes references for the Board of Commissioners to provide advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners extends our appreciation to all committees for their active roles, including by involving in field work visits mentioned above. The Board of Commissioners hopes that all the efforts made by the committees can be a foundation for their duties implementation in the coming years.

CHANGES TO THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Based on the shareholders' resolutions dated May 4, 2018 and November 29 2018, there were changes to Board of Commissioners composition in 2018. Following is the Board of Commissioners composition chronology throughout 2018 and the Board of Commissioners composition as of December 31, 2018.

Kronologis Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2018

Board of Commissioners composition chronology throughout 2018

Periode 1 Januari - 4 Mei 2018 <i>January 1 - May 4, 2018</i>	Periode 4 Mei - 29 Oktober 2018 <i>May 4 - October 29, 2018</i>	Periode 7 November - 31 Desember 2018 <i>7 November - December 31, 2018</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) <i>(President Commissioner / Independent Commissioner)</i>			Erry Riyana Hardjapamekas tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 4 Mei 2018 karena telah habis masa jabatannya <i>Erry Riyana Hardjapamekas has no longer served as member of the Board of Commissioners since May 4, 2018</i>
Rukijo (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>(acting President Commissioner)</i>	Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>(Commissioner)</i>	Rukijo menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama sejak tanggal 4 Mei 2018 <i>Rukijo has been serving as acting President Commissioner since May 4, 2018</i>
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	-
Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>			Prasetyo Boeditjahjono tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 4 Mei 2018 <i>Prasetyo Boeditjahjono has no longer served as member of the Board of Commissioners since May 4, 2018</i>
	Zulfikri (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Zulfikri (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Zulfikri duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 4 Mei 2018. <i>Zulfikri has been serving as member of the Board of Commissioners since May 4, 2018</i>
		Mukhtasor (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Mukhtasor duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 29 Oktober 2018. <i>Mukhtasor has been serving as member of the Board of Commissioners since 29 October 2018</i>

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018

Board of Commissioners composition as of December 31, 2018

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode Jabatan <i>Period</i>
Rukijo	Plt. Komisaris Utama <i>Acting President Commissioner</i>	10 Agustus 2015 - RUPS Tahun 2019 <i>August 10, 2015 - 2019 GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Yusmada Faizal	Komisaris <i>Commissioner</i>	24 Agustus 2016 - RUPS Tahun 2020 <i>August 24, 2016 - 2020 GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Zulfikri	Komisaris <i>Commissioner</i>	4 Mei 2018 - RUPS Tahun 2022 <i>May 4, 2018 - 2022 GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Mukhtasor	Komisaris <i>Commissioner</i>	29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2022 <i>October 29, 2018 - 2022 GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>



LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS'S REPORT

Keputusan terkait alasan pergantian dan perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham Perusahaan.

AKHIR KATA

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terbangun antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan dan arahan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai instansi lainnya sebagai pemangku kepentingan proyek MRT Jakarta. Dukungan ini akan menjadi modal bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan untuk dapat mengoperasikan MRT Jakarta Fase I sesuai target yang dicanangkan di tahun 2019, sekaligus menghadirkan moda transportasi publik yang dapat memberikan solusi atas kemacetan Jakarta.

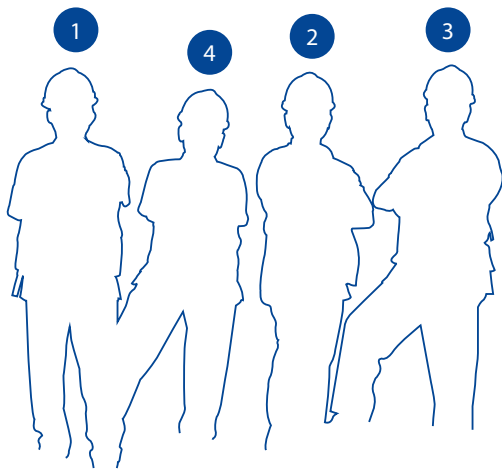
Decisions regarding the reasons for the replacement of and changes to the Board of Commissioners composition are fully the rights of the Company's shareholders.

CLOSING REMARKS

The Board of Commissioners expresses our gratitude for the cooperation that has been built amongst the shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors. The Board of Commissioners also extends our gratitude for the support, input and directives provided by the Central Government and DKI Jakarta Provincial Government and various other agencies as stakeholders of MRT Jakarta project. This support will serve as a capital for the Board of Commissioners, the Board of Directors and all levels of the Company to operate MRT Jakarta Phase I according to the target set in 2019, while presenting a public transportation mode to solve the Jakarta's traffic congestion problem.

Jakarta, 28 Maret 2019
Atas nama Dewan Komisaris PT MRT Jakarta,
Jakarta, March 28, 2019
On behalf of PT MRT Jakarta Board of Commissioners

ttd
Plt. Komisaris Utama
Acting Official President Commissioner
Rukijo



1 RUKIJO

Plt. Komisaris Utama

Acting Official President Commissioner

2 YUZMADA FAIZAL

Komisaris

Commissioner

3 ZULFIKRI

Komisaris

Commissioner

4 MUKHTASOR

Komisaris

Commissioner





LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT



WILLIAM P. SABANDAR

Direktur Utama
President Director



“
Di sepanjang tahun 2018 semua pihak yang terlibat dalam proyek MRT Jakarta bahu membahu mempersiapkan perhelatan besar beroperasinya MRT Jakarta di tahun 2019
Throughout 2018 all of the parties involved in MRT's Project work hand-in-hand to prepare for the big operation of MRT Jakarta in 2019”

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders

Berdasarkan Akta Pendirian dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018, PT MRT Jakarta, disebut juga “Perusahaan”, memegang 3 (tiga) mandat pokok, yaitu: penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana MRT; penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana MRT; serta pengembangan dan pengelolaan properti/ bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya. Laporan tahunan ini menjadi bagian dari pelaporan manajemen atas pemenuhan ketiga tugas pokok tersebut yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2018, sekaligus menjadi dokumentasi atas perjalanan Perusahaan untuk mencapai visi dan misi serta target yang telah dicanangkan.

Pursuant to the Deed of Establishment and the DKI Jakarta Provincial Government Regulation No 3 Year 2008 on the Establishment of Regional Government Owned Enterprise Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta, most recently amended by the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 9 Year 2018, PT MRT Jakarta, hereinafter referred to as “the Company”, holds 3 principal mandates: provision of urban public railway infrastructure covering MRT facility construction, operations, maintenance, and management; provision of urban public railway facilities covering MRT facility construction, operations, maintenance, and management; as well as development and management of property/businesses at the station and the surrounding areas, as well as depots and the surrounding areas. This Annual Report serves as part of management reporting on the fulfillment of the three principal duties carried out throughout 2018, while at the same time serving as the documentation of the Company's journey in pursuit of vision, mission, and predetermined targets.

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2018

Tahun 2018 menjadi tahun momentum bagi Perusahaan. Tahun ini menjadi tahun penghujung sebelum pada akhirnya MRT Jakarta Fase I akan beroperasi penuh pada Maret 2019. Berbagai kebijakan strategis telah dilakukan dalam upaya mempersiapkan pengoperasian MRT Jakarta sebagai moda transportasi yang dapat diandalkan oleh warga Jakarta. Kebijakan ini mencakup

STRATEGIC POLICIES 2018

2018 is the momentum year for the Company. This year is the closing year prior to the full operations of MRT Jakarta Phase I in March 2019, various strategic policies have been undertaken to prepare the operations of MRT Jakarta as a mode of transportation the Jakarta citizens can rely on. The policy covers works construction completion, preparation for the operations

penyelesaian konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan, persiapan bisnis baik melalui tiket maupun non-tiket, berbagai upaya untuk mewujudkan rencana *Transit Oriented Development* (TOD), hingga penyesuaian organisasi Perusahaan dalam rangka mempersiapkan tahapan pengoperasian MRT Jakarta.

and maintenance, commercial preparations such as tickets and non-tickets, some efforts to realize Transit Oriented Development (TOD), as well as company organizational alignment for the purpose of preparing MRT Jakarta operations

Inisiasi Kebijakan Strategis 2018 Strategic Policy Initiatives 2018



Pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI di tahun 2018 telah memasuki tahapan penyelesaian. Paket pekerjaan konstruksi terdiri dari pekerjaan konstruksi sipil serta sistem perkeretaapian dan pengadaan kereta, yang terbagi ke dalam 8 (delapan) paket pekerjaan, yaitu paket Konstruksi Layang (*Elevated Section*) yang terdiri dari *Contract Package* (CP) 101, CP 102, dan CP 103 dengan bentang jalur 9,79 km dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja; paket Konstruksi Bawah Tanah (*Underground Section*) yang terdiri dari CP 104, CP 105 dan CP 106 dengan bentang jalur 5,91 km dari area transisi di Sisingamangaraja hingga Bundaran HI; serta Sistem Perkeretaapian dan Pengadaan Kereta berupa paket *Railway Systems & Trackwork* dan *Rolling Stock* (Kereta) yang terdiri dari CP 107 dan CP 108.

The construction of MRT Jakarta Phase I for Lebak Bulus-Bundaran HI route was already in the completion stage. The construction work package is divided into 8 (eight) work packages, namely: the Elevated Section Package comprising Contract Package (CP) 101, CP 102, and CP 103 with a lane length of 9.79 km from Lebak Bulus to Sisingamangaraja. The Underground Section CP consists of CP 104, CP 105 and CP 106 with lane length of 5.91 km from the transit area in Sisingamangaraja to Bundaran HI; and the Railway Systems & Trackwork and Rolling Stock Procurement Packages consist of CP 107 and CP 108.

Per 31 Desember 2018, pekerjaan konstruksi sipil pada CP 101 hingga CP 106 telah mencapai 98,11%. Sedangkan CP 107 dan CP 108 yang merupakan Sistem Perkeretaapian dan Pengadaan Kereta telah mencapai 94,65% dari keseluruhan paket pekerjaan. Dengan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh semua pihak, manajemen berkeyakinan pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan.

As of December 31, 2018, civil construction work progress in the CP 101 to CP 106 has reached 98.11%, while the progress of CP 107 and CP 108 for the Railway Systems & Track work and Rolling Stock Procurement has reached 94.65% of the total work packages. With the strong commitment demonstrated by all parties, management believes that the construction work can be completed in accordance with the predetermined targets.

Persiapan operasi dan pemeliharaan yang telah diinisiasi sejak tahun 2016 terus mengalami perkembangan, sejalan dengan target pengoperasian MRT Jakarta pada Maret 2019. Persiapan operasi dan pemeliharaan terdiri dari 2 (dua) aspek,

The Company has initiated Operation and Maintenance preparation since 2016 and this has been progressing inline with the MRT Jakarta's target for operations in March 2019. The Operation and Maintenance preparation consists of 2 (two)



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT

yaitu persiapan institusi dan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan terlibat penuh dalam pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta ke depan. Persiapan institusi dilakukan melalui upaya pengembangan organisasi Perusahaan yang mencerminkan kebutuhan operasi dan pemeliharaan, serta kesiapan seluruh dokumen prasarana dan sarana MRT Jakarta sebagai Prosedur Tetap atau Manual *Maintenance* dalam tahapan pemeliharaan ke depan.

SDM sebagai tulang punggung dalam pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta dipersiapkan dengan perencanaan sejak dari sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *test & commissioning*, hingga *trial run*. Persiapan SDM meliputi tenaga untuk Masinis, *Operation Control Center* (OCC), hingga Staf Stasiun, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan sertifikasi, serta uji coba baik melalui *trial run* maupun *role play*. Perusahaan bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing untuk dapat memberikan pelatihan bagi SDM yang dipersiapkan pada tugas-tugas tertentu, seperti manajemen OCC maupun *hospitality* untuk layanan di stasiun.

Di tahun 2018, Perusahaan juga melakukan persiapan bisnis yang akan menjadi pendapatan Perusahaan di masa depan, baik melalui pendapatan tiket maupun non-tiket. Di awal tahun 2018, Direksi telah menetapkan tim Perumusan dan Penyusunan Tarif, Skema Subsidi serta Kepemilikan Aset, yang bertugas merumuskan komponen penyusun tarif, struktur subsidi yang sesuai dengan Perusahaan dan implementasi pencatatan aset sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 53 Tahun 2017 dan perjanjian penyelenggaraan MRT Jakarta. Tahapan ini akan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk memperhitungkan pendapatan melalui tiket.

Model bisnis non-tiket juga telah dipersiapkan melalui beberapa inisiasi. Perusahaan akan mengembangkan bisnis *Non-Farebox* dan Properti dengan beberapa cakupan seperti periklanan, telko, ritel, dan properti. Pengembangan usaha ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional dan pemeliharaan MRT Jakarta, pembayaran pinjaman, mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan publik dalam jangka pendek, dan kemandirian secara finansial serta nilai keekonomian bagi pemegang saham dan investor. Pengembangan bisnis melalui ritel dilakukan melalui 2 (dua) konsep yang berbeda, yaitu konsep ritel reguler dan ritel Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) sebagai mitra Perusahaan dalam memilih mitra UMKM yang akan mengisi usaha ritel di stasiun.

aspect, namely institutional preparation and preparation of Human Resources (HR) who will be fully engaged in the MRT Jakarta's future operation and maintenance. Institutional preparation is carried out through the development of the Company's organization that reflects the operation and maintenance needs, as well as the readiness of all MRT Jakarta's infrastructure and facilities documents as a Maintenance Manual in the future maintenance stages.

HR as the backbone of MRT Jakarta operation and maintenance is prepared with planning from certification, education and training, tests & commissioning, to trial run. HR preparation includes personnel for Machinists, Operation Control Center (OCC), to Station Staff, starting from recruitment, training and certification, and trials both through trial run and role play. The Company cooperates with various parties who have capacity in their respective fields to provide training for human resources prepared for certain tasks, such as OCC management and hospitality for service at the stations.

In 2018, the Company also made business preparation for the Company's future revenues both ticket revenues and non-ticket revenues. At the beginning of 2018, the Board of Directors has established a team assigned to formulate and prepare Tariff Formulation and Arrangement, Subsidy Scheme, as well as Assets Ownership. The team will formulate tariff constituting components, subsidy structure appropriate for the Company and assets recording implementation pursuant to DKI Jakarta Government Regulation No. 53 Year 2017 and MRT Jakarta operational agreement. This phase shall become the basis for the Company to calculate its ticket revenues.

The non-ticket business model has also been prepared through several initiations. The Company will develop the Non-Farebox business and Property business covering advertising, telecommunications, retail and property. This business development aims to support MRT Jakarta's operational and maintenance costs, loan repayments, reduce dependence on public funding in the short term, and build financial independence and economic value for shareholders and investors. Business development through retail is carried out through 2 (two) different concepts: regular retail and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) retail. The Company has collaborated with the Indonesia's Creative Economy Agency "Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)" as the Company's partner in selecting MSME partners who will fill the retail business at the station.

Selain itu, Perusahaan juga terus melakukan upaya perencanaan yang matang terhadap penancangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas. Kawasan ini akan menjadi transit dari berbagai moda transportasi publik seperti *Airport Train Station*, Stasiun MRT Dukuh Atas, Stasiun Commuter Sudirman, TransJakarta, dan LRT. Hal ini menjadikan area Dukuh Atas memiliki potensi pengembangan yang besar melalui konsep TOD.

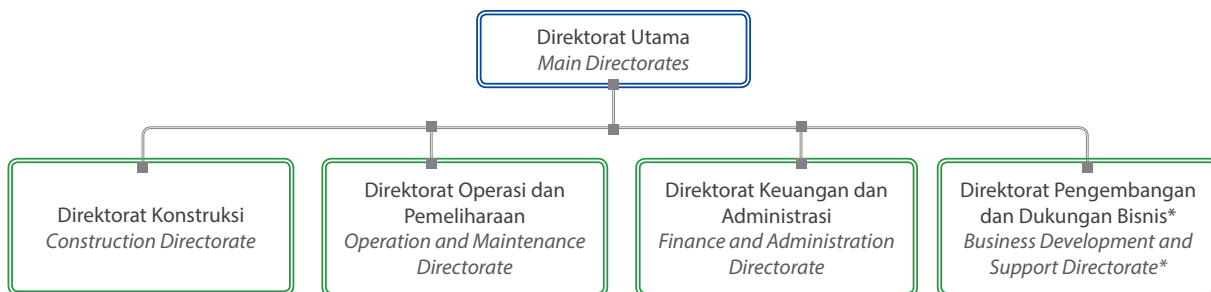
Perusahaan berupaya melibatkan publik pada perencanaan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas melalui penyelenggaraan sayembara untuk gagasan desain konsep transit hub Dukuh Atas. Kegiatan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta ini berhasil menjangring 51 karya, yang kemudian dinilai oleh juri yang terdiri dari praktisi arsitektur dan perkotaan, akademisi, budayawan, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada aspek organisasi, Perusahaan terus melakukan evaluasi dan pembaharuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di pertengahan tahun 2018 terdapat perubahan nomenklatur direktorat dengan tujuan mempersiapkan organisasi yang akan mewardahi tahapan pengoperasian dan pemeliharaan serta pengembangan bisnis. Melalui struktur organisasi yang telah disahkan pada 31 Mei 2018, Perusahaan memperluas direktoratnya dari sebelumnya 4 (empat) direktorat, menjadi 5 (lima) direktorat. Penambahan dilakukan pada Direktorat Pengembangan dan Dukungan Bisnis yang akan mewardahi pengembangan bisnis Perusahaan saat MRT Jakarta resmi beroperasi.

Additionally, the Company also continues to make a thorough plan for Dukuh Atas Transport Hub. This Area will serve as a transit area for various modes of public transportation such as Airport Train Station, Dukuh Atas MRT Station, Sudirman Commuter Station, TransJakarta, and LRT. This will make Dukuh Atas an area with ample potential for TOD concept based development.

The Company attempts to invite public participation in the planning of Dukuh Atas Transport Hub by organizing Dukuh Atas Transport Hub Design Competition. This activity is organized in collaboration with the Indonesian Institute of Architects (IAI) Jakarta and able to receive 51 designs which will be judged by judges consisting of architectural and urban practitioners, academicians, artists, and representatives of DKI Jakarta Provincial Government.

In terms of organizational aspect, the Company continued to make evaluation and update for the purpose of organizational development and complying with prevailing legislation. In the end 2018, there was a change to the directorate nomenclature with a view to prepare an organization to accommodate operation and maintenance phase as well as business development. Through an organizational structure enacted on May 31, 2018, the Company has expanded its directorates from the previous 4 (four) directorates to 5 (five) directorates. This addition is done to the Business Development and Support Directorate which will accommodate the Company's business development after MRT Jakarta commences its operations.



*) Penambahan direktorat baru pada Mei 2018 dalam rangka persiapan pengoperasian penuh MRT Jakarta dan pengembangan bisnis Perusahaan.
*The addition of a new directorate in May 2018 was to prepare of MRT Jakarta full operation and the Company's business development.



Melalui berbagai upaya dan kebijakan strategi seperti yang telah dijelaskan di atas, Perusahaan sesungguhnya telah siap mengoperasikan MRT Jakarta. Kesiapan ini diharapkan menjadi landasan bagi pemenuhan target pengoperasian di tahun 2019 yang diharapkan akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

PENCAPAIAN REALISASI AKHIR TERHADAP TARGET DI AWAL TAHUN 2018

Pada aspek operasi, target Perusahaan dapat dilihat dari pencapaian pada pekerjaan konstruksi. Seperti yang telah disampaikan di atas, per 31 Desember 2018 kemajuan pekerjaan konstruksi telah mencapai 96,865%, di atas target yang telah dicanangkan yang sebesar 96,862% dari keseluruhan pekerjaan. Pencapaian ini didapatkan dari pekerjaan konstruksi sipil dan pekerjaan *system & rolling stock*.

Pekerjaan konstruksi sipil yang terdiri dari CP 101 hingga CP 106 mencatat kemajuan pekerjaan 98,105%, mengalami deviasi 0,034% dari target kemajuan pekerjaan 98,139% atas keseluruhan pekerjaan. Adanya deviasi ini disebabkan keterlambatan pekerjaan akses jalur masuk (*entrance*) stasiun dan penataan kembali (*reinstatement*) area stasiun, yang terjadi sebagai akibat lahan di area jalur layang yang belum dapat diakses seluruhnya, serta adanya kegiatan Asian Games yang menyebabkan keterbatasan kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi di area jalur bawah tanah.

Untuk CP 107 dan CP 108 yang merupakan *system & rolling stock*, per 31 Desember 2018 mencatat aktualisasi kemajuan proyek mencapai 94,647%, di atas target yang dicanangkan sebesar 94,578%. Keberhasilan ini disebabkan oleh kemajuan pekerjaan *rolling stock* yang telah mengirimkan seluruh rangkaian kereta sebanyak 16 rangkaian ke Depo Lebak Bulus.

Pada operasi dan pemeliharaan yang ditargetkan mencapai 90,00% per 31 Desember 2018, tercatat membukukan pencapaian 85,70%. Operasi dan pemeliharaan terdiri dari persiapan institusi dan persiapan SDM, dimana masing-masing persiapan mencatat pencapaian 88,13% dan 85,25%. Adanya deviasi tersebut disebabkan masih adanya kebutuhan SDM yang belum terpenuhi dan training kontraktor yang belum selesai terlaksana. Per 31 Desember 2018, *Standard Operational Procedure* (SOP) Sarana, Prasarana dan Operasi MRT Jakarta, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) masih dalam

By making all the efforts and undertaking strategic policies mentioned above, the Company is really ready to operate MRT Jakarta. This readiness is expected to become a basis to realize the target of operation in 2019, which hopefully can run smoothly in accordance with the plan.

ACHIEVEMENT OF FINAL REALIZATION TO THE TARGET OF THE BEGINNING OF 2018

In terms of operational aspect, the Company's target can be seen from the construction works achievement. As mentioned before, as of December 31, 2018, the Company's construction works progress has reached 96.865%, above the predetermined target of 96.862% of the entire works. This was achieved from civil construction work and system & rolling stock work.

Civil Construction work progress in the CP 101 to CP 106 has reached 98.11%, experiencing a deviation of 0.03% compared to the entire work progress target of 98.139%. This deviation was caused by a delay in the station entrance access work and reinstatement of the station area. This delay was because the land in the elevated lane area was not fully accessible, as well as due to the Asian Games event which caused the Contractor's limitations to carry out construction work in the underground lane area.

For CP 107 and CP 108 which are for the system & rolling stock, as of December 31, 2018, the project progress reached 94,647%, above the predetermined target of 94,578%. This success is due to the rolling stock work progress, where a whole series of trains totaling 16 trains are already delivered to the Lebak Bulus Depot.

The achievement of operations and maintenance, which was targeted to reach 90.00% as of December 31, 2018, was recorded at 85.70%. Operations and maintenance consisted of institutional preparation and HR preparation with achievement of 88.13% and 85.25% respectively. The deviation was due to unfulfilled HR needs and not yet been completed contractor training. As of December 31, 2018, the Standard Operational Procedure (SOP) of MRT Jakarta Facilities, Infrastructure and Operations in the Transportation Ministry's Directorate General of Railways of (DJKA) was still under review. During the preparation of this



tahap peninjauan. Pada saat laporan tahunan ini disusun, DJKA telah menyetujui seluruh SOP Sarana, Prasarana dan Operasi MRT Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi Perusahaan untuk dapat mengoperasikan MRT Jakarta sesuai target waktu pada Maret 2019.

Untuk pengembangan di kawasan *Transit Oriented Development* sesuai dengan target tahun 2018 telah mencapai 100%. Keberhasilan ini ditandai dengan telah tersedianya masterplan dan usulan panduan rancang kota untuk area Dukuh Atas dan Bundaran HI. Hal ini juga diikuti oleh pelaksanaan Pencanangan Pengembangan Kawasan Transit Terpadu Dukuh Atas pada 29 Maret 2018. Salah satu pengembangan di Dukuh Atas adalah perencanaan lahan *ex Pasar Blora* bekerja sama dengan PD Pasar Jaya yang akan dijadikan sebagai *transport hub*. Gagasan desain untuk *transport hub* ini sendiri telah tersedia melalui hasil sayembara yang diadakan oleh PT MRT Jakarta bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta (IAI Jakarta). Adapun Pameran dan Malam Penghargaan Sayembara Gagasan Desain Konsep Transit Hub Dukuh Atas diselenggarakan pada tanggal 27 September 2018.

Pada tahapan pengembangan bisnis, tahun 2018 Perusahaan menargetkan untuk dapat merealisasikan proses pra instalasi dan instalasi. Realisasi pencapaian pada proses pra instalasi memenuhi 100% terhadap target, yang terdiri dari persetujuan desain instalasi *telco*, instalasi *advertising* dan proses pemilihan mitra retail regular melalui seleksi. Untuk realisasi pencapaian pada proses instalasi, Perusahaan mampu mencapai kemajuan hingga 74,2% dari target 100% yang terdiri dari instalasi *telco* dan *advertising*. Deviasi pada proses instalasi terjadi pada instalasi *advertising* yang disebabkan adanya keterlambatan pihak mitra dalam melakukan instalasi.

Pada kinerja keuangan, per 31 Desember 2018 Perusahaan membukukan rugi bersih komprehensif sebesar Rp137,51 miliar atau 71,98% dari rencana kerja anggaran tahun 2018 sebesar Rp191,03 miliar. Pencapaian rugi bersih ini di bawah target ini terutama disebabkan efisien Perusahaan dalam menggunakan anggaran beban usaha selama periode 2018. Selain itu, menguatnya Rupiah terhadap kurs Yen pada akhir tahun 2018 menyumbang laba kurs sebesar Rp33,56 miliar.

Untuk beban administrasi dan umum, realisasi tahun 2018 sebesar Rp207,26 miliar, atau 92,67% dari rencana kerja anggaran tahun 2018 sebesar Rp223,62 miliar. Persiapan Perusahaan untuk dapat mengoperasikan MRT Jakarta diimplementasikan melalui peningkatan jumlah karyawan

Annual Report, DJKA approved all SOPs for MRT Jakarta Facilities, Infrastructure and Operations which later became the basis for the Company to be able to operate MRT Jakarta according to the targeted schedule in March 2019.

Progress of the Transit Oriented Development area development based on the 2018 target has reached 100%. This success was marked by the availability of a master plan and proposed city design guidelines for Dukuh Atas and Bundaran HI areas. This was also followed by the Launch of Dukuh Atas Integrated Transit Area Development on March 29, 2018. One of the developments in Dukuh Atas is the planning of Ex-Pasar Blora in collaboration with PD Pasar Jaya for transport hub. The transport hub design was already available from a competition held by PT MRT Jakarta in collaboration with the Indonesian Institute of Architects Jakarta (IAI Jakarta). Exhibition and Competition Awarding Night of the Dukuh Atas Transit Hub Concept Design was held on September 27, 2018.

At business development phase, in 2018 the Company targeted to realize the pre-installation and installation processes. The pre-installation process target was achieved 100% consisting of telco installation design agreement, advertising installation, and regular retail partner selection process. While the Company's achievement for installation process progress was 74.2% of the 100% target consisting of telco and advertising installations. Deviation in the installation process was in the advertising installation due to the partner's delay in conducting the installation.

On the financial performance, as of December 31, 2018, the Company booked comprehensive loss (net) of Rp137.51 billion or 71.98% of the 2018 budget work plan of Rp191,03 billion. This below-target achievement was mainly due to the Company's efficiency in using the 2018 operating expenses budget. In addition, the strengthening of Rupiah against Yen exchange rate at the end of 2018 contributed to gain of the exchange rate of Rp33.56 billion.

Administrative and general expenses were realized at Rp207.26 billion in 2018, or 92.67% of the 2018 budget work plan of Rp223.62 billion. The Company's preparations to operate MRT Jakarta are carried out through an increase in the number of



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT

menjadi sebesar 520 karyawan di tahun 2018 untuk persiapan operasi pada tahun 2019, serta peningkatan biaya pelatihan yang difokuskan untuk menunjang layanan penumpang pada saat MRT Jakarta beroperasi secara komersial. Selain itu, terdapat penambahan sewa kantor, serta implementasi *Enterprise Resource Planning* untuk penguatan dukungan teknologi informasi Perusahaan menjelang beroperasinya MRT Jakarta.

KENDALA, TANTANGAN, DAN SOLUSINYA

Salah satu tantangan terbesar yang berhasil dijawab oleh seluruh jajaran Perusahaan adalah meningkatkan aspek *safety* atau keselamatan kerja. Aspek ini telah menjadi perhatian sejak tahun 2017 dan terus menjadi fokus pembenahan Perusahaan, khususnya saat bercermin dengan beberapa insiden kecil yang terjadi di tahun 2017. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan aspek ini melalui peningkatan di seluruh lini, termasuk penekanan terkait kewajiban bagi seluruh kontraktor untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), serta kesadaran akan pentingnya *safety* kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Upaya ini terbukti berhasil, di mana Perusahaan berhasil mendapatkan medali emas untuk audit K3. Dari 166 indikator yang dinilai, 153 di antaranya dinyatakan lulus.

Keamanan kawasan khususnya depo dan stasiun juga menjadi perhatian. Kasus vandalisme yang menerpa salah satu kereta MRT Jakarta menjadi evaluasi besar bagi manajemen untuk memperkuat aspek keamanan pada seluruh aset MRT Jakarta. Tantangan ini dipenuhi melalui pemenuhan kebutuhan akan petugas keamanan yang dapat memberikan jaminan akan keamanan dari aset-aset yang dimiliki Perusahaan, yang sesungguhnya merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan ajang Asian Games di Jakarta pada pertengahan tahun 2018 juga menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek MRT Jakarta, Perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat menghadirkan citra kota Jakarta yang bersih dan tertata sebagai ibukota Indonesia, khususnya terhadap tamu-tamu dari negara lain. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangkitkan moral seluruh karyawan dapat bahu-membahu bekerja siang dan malam untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut. Terbukti, penyelenggaraan Asian Games di Jakarta berjalan dengan sukses, dan menghadirkan decak kagum baik dari kalangan domestik maupun mancanegara.

employees become 520 employees to make preparations for the 2019 operations, as well as an increase in training costs focused on supporting passenger services when MRT Jakarta operates commercially. In addition, there are additional office leases, as well as the implementation of Enterprise Resource Planning to strengthen the Company's information technology support prior to the MRT Jakarta Operations.

CONSTRAINTS, CHALLENGES, AND SOLUTIONS

One of the biggest challenges that was successfully answered by all levels of the Company was to improve the safety aspect. This aspect has been a matter of importance since 2017 and continues to be the focus of the Company's improvement, especially when looking back several minor incidents occurring in 2017. The Company attempts to improve this aspect through improvements in all lines, including the emphasis on the obligation for all contractors to implement the Occupational Health and Safety Management System (SMK3), as well as on the awareness of importance of safety to all employees and stakeholders. This effort proved to be successful, where the Company succeeded to achieve a gold medal for OHS audit. The Company passed 153 of 166 indicators assessed.

Security aspect of the areas, especially the depots and stations, is also one of the Company's concerns. Vandalism done to one of the MRT Jakarta trains became a big evaluation for management to strengthen the security aspect of all MRT Jakarta assets. This challenge is fulfilled by meeting the needs of security officers to guarantee the security of the Company's assets, which actually are the assets belonging to the DKI Jakarta Provincial Government.

The Asean Games event taking place in Jakarta in mid-2018 was also a challenge for the Company. As the party responsible for MRT Jakarta development project, the Company has an obligation to present the image of clean and orderly Jakarta as the capital of Indonesia, especially for guests from other countries. The biggest challenge was how to motivate all employees to work together day and night to realize such obligation. Evidently, the Asean Games in Jakarta could be organized successfully, and received appreciation from both domestic and foreign parties.



PROSPEK USAHA 2019

Tahun 2019 akan menjadi tahun monumental bagi Perusahaan. Target beroperasi penuhnya MRT Jakarta pada Maret 2019 akan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Dengan beroperasinya MRT Jakarta, Perusahaan menargetkan jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 65.000 penumpang/hari atau 50% dari total proyeksi penumpang 130.000 penumpang/hari. Selain itu, Perusahaan memiliki prospek usaha melalui pengembangan usaha dan pendapatan *non farebox*.

Perusahaan menargetkan adanya Pendapatan Usaha di tahun 2019, sebesar Rp776,13 miliar untuk tahun 2019, Beban Pokok Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp397,35 miliar, Laba Kotor Rp378,78 miliar, Beban Administrasi dan Umum Rp230,29 miliar, Rugi Tahun Berjalan Rp250,52 miliar, dan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Rp265,09 miliar. Kenaikan beban pada awal pengoperasian MRT Jakarta akan menjadi bagian dari kebijakan strategis Perusahaan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi penumpang MRT Jakarta, yang akan menjadi fondasi utama bagi perkembangan operasi dan bisnis Perusahaan di masa-masa yang akan datang.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai BUMD, Perusahaan memiliki kewajiban besar untuk memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan terkait badan hukum Perusahaan Terbatas, maupun peraturan untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan. Proses operasi dan usaha serta pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab menjadi komitmen penting dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkup Perusahaan.

Direksi bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut melalui pembentukan organisasi yang sesuai dengan prinsip GCG yang dilandasi oleh 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan dilakukan melalui 3 (tiga) aspek besar, yaitu keberadaan struktur organ GCG sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, proses/mekanisme GCG yang mengatur hubungan antar organ GCG, dan hasil GCG yang diwujudkan melalui sosialisasi, evaluasi dan peningkatan GCG.

2019 BUSINESS PROSPECT

2019 will be a monumental year for the Company. MRT Jakarta's full operational target in March 2019 will have a major impact on the overall performance of the Company. With the operation of MRT Jakarta, the Company targets 65,000 passengers/day or 50% of the total passenger projection of 130,000 passengers/day. In addition, the Company has business prospects through business development and non-farebox revenue.

For 2019, Company has targeted Operating Revenues of Rp776.13 billion, Cost of Revenues of Rp397.35 billion, Gross Profit of Rp378.78 billion, Administrative and General Expenses of Rp230.29 billion, Loss for the Year of Rp250.52 billion, and Comprehensive Loss for the Year of Rp265.09 billion. The increase in expenses at the start of MRT Jakarta operation will be part of the Company's strategic policy to provide the best service for MRT Jakarta passengers, which will be the main foundation for the development of the Company's operations and business in the future.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION DEVELOPMENT

As a BUMD, the Company is fully obliged to comply with all applicable laws and regulations related to Limited Liability Company legal entity and to the Company's operation and maintenance. The operations and business processes and management of responsible organizations are important commitments in the application of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company.

The Board of Directors is responsible for realizing this commitment through the establishment of an organization according to GCG basic principles comprising transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as defined in the General Guidelines for GCG issued by the National Committee on Policy Governance (KNKG). GCG principles in the Company is implemented through 3 (three) major aspects, namely: the existence of GCG structure in accordance with applicable laws and regulations, GCG processes / mechanism that regulate the relationship between GCG organs, and GCG results realized through GCG dissemination, evaluation and improvement.



Bersama-sama dengan Dewan Komisaris, Direksi juga bertanggung jawab untuk menciptakan proses dan mekanisme GCG melalui berbagai *soft structure* atau perangkat kebijakan yang mengatur hubungan antar organ GCG. Seluruh kebijakan dan prosedur GCG yang dimiliki Perusahaan dapat diakses dan dipantau oleh publik melalui situs web Perusahaan dengan alamat www.jakartamrt.co.id. Beberapa perangkat kebijakan yang mengalami pembaharuan di sepanjang tahun 2018 adalah:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Direksi No. 014 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*).
- Pedoman Standar Perilaku (*Code of Conduct/CoC*), yang telah diperbaharui melalui Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
- Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), yang telah diperbaharui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 008 Tahun 2018 dan No. 072-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
- Kebijakan Manajemen Risiko, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Direksi No. 033 Tahun 2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko.
- *Roadmap* GCG Periode 2017-2021, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Direksi No. 007 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Dokumen.
- Kewajiban menjalankan *Three Lines of Defense* bagi Pejabat Struktural, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Direksi No. 023 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menjalankan *Three Lines of Defense* bagi Pejabat Struktural.

Together with the Board of Commissioners, the Board of Directors is also responsible for establishing GCG processes and mechanisms through various *soft structures* or policy tools that regulate the relationships between GCG organs. All GCG policies and procedures owned by the Company can be accessed and monitored by the public through the Company's website with the address www.jakartamrt.co.id. Updated policy tools in 2018 are as follows:

- *Code of Good Corporate Governance*, updated by virtue of the Board of Directors Regulation No. 014 Year 2018 on the Code of Corporate Governance.
- *Code of Conduct (CoC)*, updated by virtue of the Board of Directors Regulation No. 007-1 Year 2018 on the Code of Conduct.
- *Board Manual*, updated by virtue of the Board of Commissioners and Board of Directors' Joint Decision Letter No. 008 Year 2018 and No. 072-1 Year 2018 on the Board Manual.
- *Risk Management Policy*, by virtue of the Board of Directors Regulation No. 033 Year 2018 on the Risk Management Policy.
- *GCG Roadmap for the 2017-2021 Period*, updated by virtue of the Board of Directors Regulation No. 007 Year 2018 concerning Document Control Guidelines.
- *The obligation to conduct Three Lines of Defense for Structural Officials*, updated by virtue of the Board of Directors Regulation No. 023 Year 2018 concerning the obligation to conduct Three Lines of Defense for Structural Officials



Untuk dapat menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan serta dalam rangka mencapai *Good Corporate Citizen*, Perusahaan melakukan sosialisasi prinsip GCG secara rutin. Sosialisasi dilakukan melalui surat elektronik kepada seluruh karyawan, maupun publikasi pada situs web Perusahaan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, sosialisasi GCG dilakukan melalui tatap muka, tayangan video pada layar televisi yang berada di kantor Perusahaan.

Penerapan prinsip GCG juga dilakukan melalui pengelolaan risiko di seluruh lingkup dan tingkatan Perusahaan. Pengelolaan risiko bertujuan memberikan deteksi dini atas operasi dan pengelolaan usaha. Agar pengelolaan risiko dapat berjalan sesuai dengan perkembangan organisasi, operasi dan bisnisnya, Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko secara berkala. Di tahun 2018, evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko dilakukan secara internal, dengan hasil tingkat *maturity* sebesar 2,89 atau "*Repeatable*", yang menandakan bahwa proses pengelolaan risiko telah dibangun dan berulang, dan bergantung pada keberlanjutan SDM yang dimiliki Perusahaan.

Selain itu, manajemen Perusahaan memastikan penerapan sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Penilaian dan evaluasi atas sistem pengendalian internal telah dilakukan pada tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penilaian dan evaluasi meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan yang terbagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*). Hasil evaluasi menunjukkan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk tahun 2017 menunjukkan capaian 70,73 atau berada pada tingkat efektivitas "*Cukup Efektif*".

Evaluasi dan peningkatan penerapan GCG di lingkup Perusahaan dilakukan melalui *assessment* atau penilaian. Seperti halnya *assessment* tahun 2017, untuk *assessment* tahun 2018 dilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan 10 aspek pengujian, yaitu:

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Partisipan GCG

To foster awareness of all employees and realize a Good Corporate Citizen, the Company routinely disseminates the principles of GCG. Dissemination is carried out through electronic mail to all employees, as well as publications on the Company's website that can be easily seen and downloaded by employees and other stakeholders. In addition, GCG socialization is done through face-to-face, video shows on television screens that are in the Company's office.

The implementation of GCG principles is also carried out through risk management in all scopes and levels of the Company. Risk management aims to provide early detection of business operations and management. In order for risk management to run in accordance with its organizational, operational and business development, the Company evaluates the implementation of risk management systems on a regular basis. In 2018, the risk management system implementation evaluation was carried out internally, with the maturity level result of 2.89 or "Repeatable", indicating that the risk management process has been built and recurs, and depends on the Company's HR sustainability.

In addition, the Company's management ensures effective implementation of internal control system. Assessment and evaluation of the internal control system was carried out in 2018 by the DKI Jakarta Province's Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The scope of assessment and evaluation includes all aspects supporting the Company's internal control system implementation, which are divided into 5 (five) components, namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. The evaluation results indicate that the Company's internal control system for 2017 shows a performance of 70.73 with "Fairly Effective" effectiveness level.

GCG evaluation and improvement in the Company is carried out through assessment. Same with the 2017 assessment, the 2018 GCG assessment was also carried out by the DKI Jakarta Province's BPKP using 10 assessment aspects as follows:

1. *Commitment*
2. *Policy*
3. *GCG Participants*

- a. Pemegang Saham
 - b. Dewan Komisaris
 - c. Komite Dewan Komisaris
 - d. Direksi
 - e. Satuan Pengawasan Intern
 - f. Sekretaris Perusahaan
4. Pengungkapan Informasi

Hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2018 menunjukkan skor 85,14 dengan predikat "Baik", meningkat dari hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2017 dengan skor 80,45 juga dengan predikat "Baik". Peningkatan hasil *assessment* penerapan GCG yang telah dilakukan sejak tahun 2015 menunjukkan keinginan besar seluruh jajaran Perusahaan untuk terus berbenah dan meningkatkan level pemahaman serta penerapan GCG.

Kunci utama keberhasilan dalam penerapan prinsip GCG adalah komitmen kuat seluruh pihak yang terlibat dalam proses operasi dan pengembangan Perusahaan; baik pemegang saham maupun instansi terkait, seluruh organ GCG di internal Perusahaan, hingga pemangku kepentingan. Direksi mengucapkan terima kasih atas komitmen tersebut, dan berharap dapat terus mewujudkan penerapan GCG yang akan berdampak pada keberlanjutan Perusahaan di masa depan.

- a. Shareholders
- b. Board of Commissioners
- c. Board of Commissioners' Committees
- d. Board of Directors
- e. Internal Audit Unit
- f. Corporate secretary

4. Information Disclosure

The Company's GCG assessment score in 2018 was 85.14 with the title "Good", increasing from the 2017 GCG assessment score of 80.45 with the same title - "Good". The effort to increase GCG assessment results has been conducted since 2015, which shows the enthusiasm of all lines in the Company to continuously make improvement and increase the level of GCG understanding and implementation.

The main key to success in GCG principles implementation is the strong commitment of all parties involved in the Company's operations and development processes; both shareholders and related agencies, all GCG organs in the Company, and the stakeholders. The Board of Directors would like to thank for such the commitment, and hopes to continuously implement GCG that will have an impact on the Company's

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Komitmen Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Commitment to Corporate Social Responsibility Implementation





Ke-4 aspek di atas menjadi komitmen Perusahaan untuk dapat mewujudkan tanggung jawab sosialnya, atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Manajemen berkomitmen bahwa kehadiran Perusahaan harus dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat Jakarta, dan bukan sebaliknya.

Komitmen pada aspek lingkungan hidup telah diwujudkan sejak *ground breaking* pembangunan proyek MRT Jakarta di tahun 2013. Secara berkesinambungan, komitmen ini terus diwujudkan melalui berbagai hal, baik itu pemenuhan perizinan terkait lingkungan hidup, pemantauan efek emisi rumah kaca dan dampak lingkungan dari proses pembangunan, hingga keanekaragaman hayati yang dilakukan melalui relokasi pohon di berbagai titik yang tersebar dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI.

Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja diwujudkan melalui dorongan kuat tentang kesadaran akan pentingnya aspek K3, baik kepada kontraktor, karyawan, maupun pemangku kepentingan. Perusahaan juga berupaya memberikan kesempatan pengembangan kompetensi diri kepada setiap karyawan, baik melalui promosi maupun kegiatan di luar kantor yang dapat memperkuat hubungan kultural antar karyawan maupun dengan manajemen. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk memenuhi seluruh kompensasi yang telah menjadi hak setiap karyawan.

Pada aspek pengembangan sosial kemasyarakatan diwujudkan melalui keterbukaan Perusahaan melalui kunjungan proyek untuk menjadikan proyek MRT Jakarta sebagai edukasi bagi berbagai pihak. Kunjungan proyek dari berbagai instansi, civitas akademika, pemerhati lingkungan dan tata kota, hingga pelaku usaha, diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pembelajaran terkait manajemen proyek. Di samping itu, aspek pengembangan sosial kemasyarakatan dilakukan melalui rencana pengembangan bisnis ritel berbasis UMKM. Bekerjasama dengan BEKRAF, Perusahaan akan mengembangkan bisnis ritel dengan mengajak beberapa UMKM pilihan.

Tanggung jawab produk, barang dan/atau jasa dilakukan melalui pemenuhan kualitas proyek MRT Jakarta yang sangat baik. Apresiasi yang diberikan oleh berbagai pihak atas kualitas konstruksi proyek MRT Jakarta dapat menjadi bekal bagi Perusahaan untuk terus mengembangkan tanggung jawabnya menghadirkan layanan yang berkualitas bagi masyarakat Jakarta.

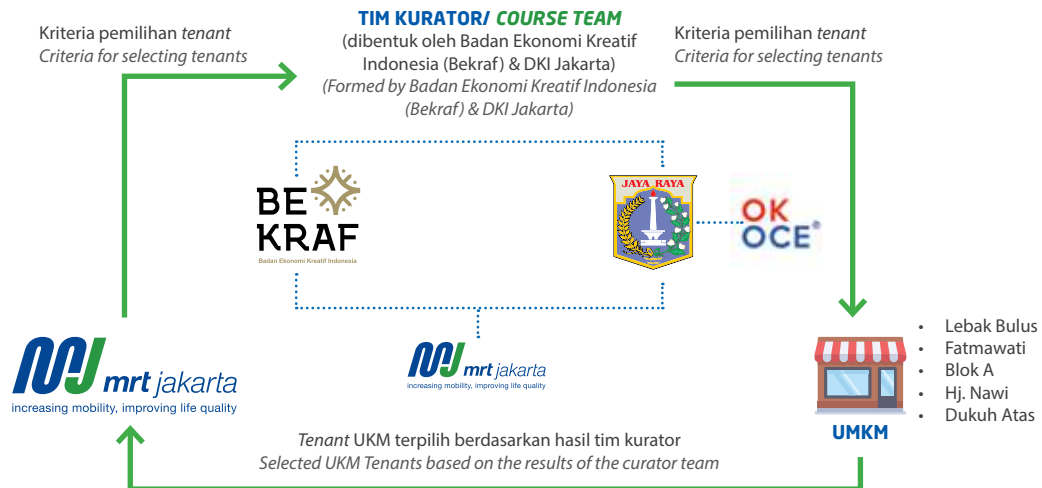
The above 4 aspects are the Company's commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) implementation. Management is committed that the Company's presence should bring positive impact on the people of Jakarta, and not the other way around.

The commitment to environmental aspect has been manifested since the MRT Jakarta construction project ground breaking in 2013. This commitment is continuously realized through various things, including by fulfilling environmental permits as well as monitoring of greenhouse emission effect, environmental impacts of the development process, and biodiversity efforts, which was realized by relocating trees at various points from Lebak Bulus to Bundaran HI.

Labor Practice, Occupational Health and Safety are realized by strongly encouraged awareness of the importance of the OSH aspect to contractors, employees, and stakeholders. The Company also seeks to provide opportunities to all employees to develop their competencies through promotion and outside activities that can strengthen cultural relations between employees and management. In addition, the Company is also committed to fulfilling all compensations that have become the right of employees.

The social development aspect is realized through the Company's transparency through project visits to make MRT Jakarta project an education for various parties. Project visits made by various agencies, academics, environmental and city planning observers, as well as business people, are expected to provide added value for project management learning. In addition, the social development aspect is carried out through MSME-based retail businesses development plan. In collaboration with BEKRAF, the Company will develop the retail business by inviting some selected MSMEs.

Products, goods and/or services liabilities are carried out through the fulfillment of MRT Jakarta project quality. Appreciation from various parties for MRT Jakarta construction quality shall become the basis for the Company to continue developing its responsibility to deliver quality services for the people of Jakarta.



PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Melalui keputusan pemegang saham pada tanggal 26 Oktober 2018, susunan dan komposisi Direksi mengalami perubahan. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Direksi di sepanjang tahun 2018 dan susunan keanggotaan Direksi per 31 Desember 2018:

Based on the Shareholders' resolution on October 26, 2018, there was a change to the Company's Board of Directors' composition. Chronology of the changes and Board of Directors' composition throughout 2018 is as follows:

Kronologis Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2018 Chronology of Board of Directors Composition in 2018

1 Januari - 29 Oktober 2018 January 1 – October 29, 2018	29 Oktober - 31 Desember 2018 October 29 – December 31, 2018	Keterangan Remarks
William P. Sabandar (Direktur Utama) (President Director)	William P. Sabandar (Direktur Utama) (President Director)	-
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) (Construction Director)	Silvia Halim (Direktur Konstruksi) (Construction Director)	-
Agung Wicaksono (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) (Operation and Maintenance Director)		Agung Wicaksono tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018. Agung Wicaksono has no longer served as Board of Directors member since October 29, 2018.
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) (Finance and Administration Director)	Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) (Finance and Administration Director)	-
	Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) (Operation and Maintenance Director)	Muhammad Effendi duduk dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018. Muhammad Effendi has been serving as Board of Directors member since October 29, 2018.
	Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis) (Business Development and Support Director)	Ghamal Peris duduk dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018. Muhammad Effendi has been serving as Board of Directors member since October 29, 2018.



Susunan Direksi per 31 Desember 2018
Board of Directors Composition as of December 31, 2018.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Title</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode <i>Period</i>
William P. Sabandar	Direktur Utama <i>President Director</i>	21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – FY2023 GMS</i>	Ke-2 <i>2nd</i>
Silvia Halim	Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i>	21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – FY2023 GMS</i>	Ke-2 <i>2nd</i>
Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i>	29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 – FY2023 GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Ghamal Peris	Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis <i>Business Development and Support Director</i>	29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 – FY2023 GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Tuhyat	Direktur Keuangan dan Administrasi <i>Finance and Administration Director</i>	21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – FY2023 GMS</i>	Ke-2 <i>2nd</i>

Keputusan terkait alasan pergantian dan perubahan susunan dan komposisi Direksi sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham Perusahaan.

Decision related to reasons for replacement of and changes to the Board of Directors composition shall be the full rights of the Company's Shareholders.

AKHIR KATA

Direksi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya selaku representasi pemegang saham atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah dilakukan. Demikian pula kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai instansi sebagai pemangku kepentingan proyek MRT Jakarta, izinkan Direksi menghaturkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

CLOSING REMARKS

The Board of Directors would like to extend our gratitude to the Board of Commissioners, as the shareholders' representation, and their supporting organs for providing directives and advices, as well as performing supervisory function. To the Central Government, the DKI Jakarta Provincial Government, and various agencies as stakeholders of MRT Jakarta project, the Board of Directors would like to express our gratitude for their support.



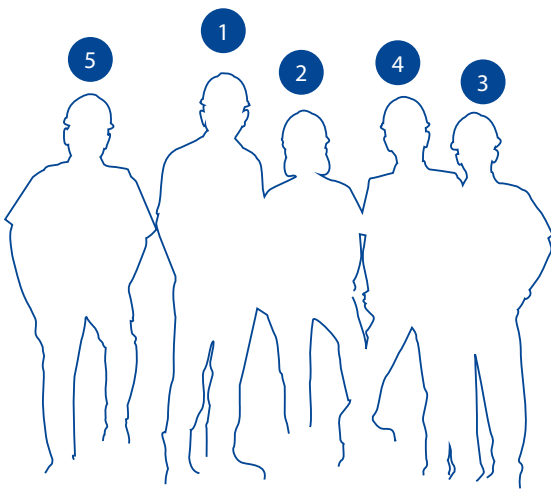
LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan. Demikian pula kepada seluruh mitra kerja, Direksi memberikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kerjasama yang telah tercipta. Semoga semangat kebersamaan ini akan menjadikan motivasi bagi seluruh jajaran di lingkup Perusahaan untuk dapat mewujudkan target pengoperasian MRT Jakarta Fase I di tahun 2019, dan menjadi solusi bagi ketersediaan transportasi publik di ibukota Jakarta.

To all employees, allow us the Board of Directors to extend our appreciation for all the dedication you have shown us. The Board of Directors would also like to extend our gratitude for the support and cooperation that have been established so far. Hopefully the spirit of togetherness will motivate all people in the Company to achieve the MRT Jakarta Phase I operation target in 2019, which shall become a solution for public transportation availability in the Jakarta capital city.

Jakarta, 28 Maret 2019
Atas nama Direksi PT MRT Jakarta,
Jakarta, March 28, 2019
On behalf of PT MRT Jakarta Board of Directors

ttd
Direktur Utama
President Director
William P. Sabandar



1 WILLIAM P. SABANDAR

Direktur Utama
President Director

2 SILVIA HALIM

Direktur Konstruksi
Construction Director

3 TUHIYAT

Direktur Keuangan dan Administrasi
Finance and Administration Director

4 MUHAMMAD EFFENDI

Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operations and Maintenance Director

5 GHAMAL PERIS

Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis
Business Development and Support Director





SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PT MRT JAKARTA

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 2019

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT MRT Jakarta for 2018 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 28, 2019

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Rukijo

Plt. Komisaris Utama

Acting Official President Commissioners

Yusmada Faizal

Komisaris

Commissioner

Zulfikri

Komisaris

Commissioner

Mukhtasor

Komisaris

Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PT MRT JAKARTA

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT MRT Jakarta for 2018 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 28 Maret 2019

Jakarta, March 28, 2019

Direksi
Board of Directors

William P. Sabandar

Direktur Utama
President Director

Silvia Halim

Direktur Konstruksi
Construction Director

Tuhiyat

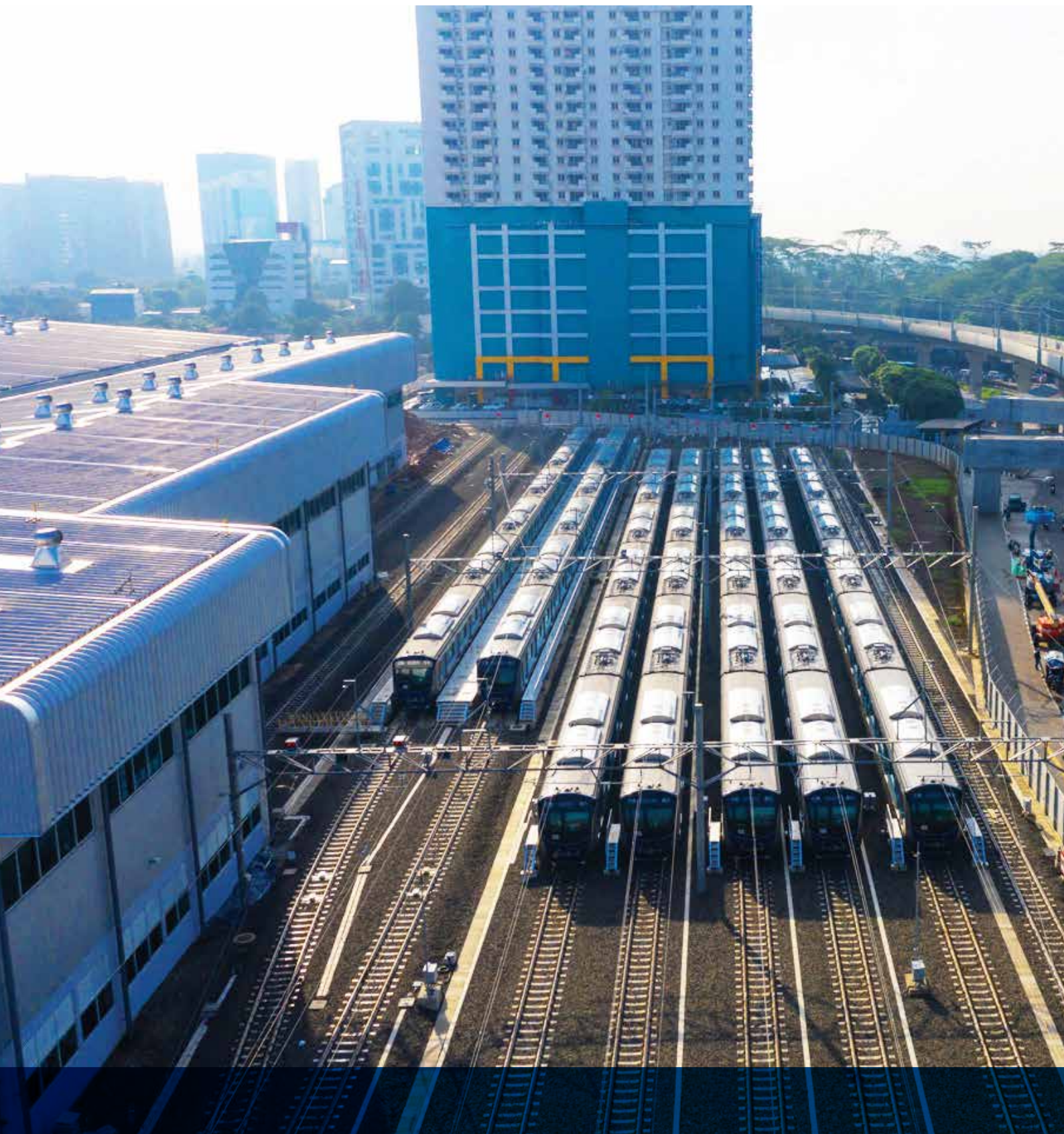
Direktur Keuangan dan
Administrasi
Finance and Administration
Director

Muhammad Effendi

Direktur Operasi dan
Pemeliharaan
Operation and Maintenance
Director

Ghamal Peris

Direktur Pengembangan dan
Dukungan Bisnis
Business Development and
Support Director





03

PROFIL PERUSAHAAN *COMPANY PROFILE*

Ruang lingkup kegiatan usaha PT MRT Jakarta adalah penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana; penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana; dan pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.

PT MRT Jakarta's scope of business activities is the provision of urban public railway infrastructure covering construction, operations, maintenance, and management of infrastructure; provision of urban public railway facilities covering construction, operations, maintenance, and management of facilities; as well as development and management of property/businesses at the station and the surrounding areas.



INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan/ Company Name
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA



Tanggal Pendirian/ Date of Establishment
17 Juni 2008
June 17, 2008



Dasar Hukum Pendirian/ Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-36355.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan badan Hukum Perusahaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 21216 Tahun 2008.

The Deed of Establishment of Limited Liability Company, PT Mass Rapid Transit Jakarta, No. 140 dated June 17, 2008, drawn up by Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-36355.AH.01.01. Tahun 2008 on the Ratification of the Company Legal Entities by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 27, 2008, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 86 dated October 24, 2008, Supplement No. 21216 of 2008.



Status Perusahaan/ Company Status

Perusahaan Terbatas (PT) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Limited Liability Company (PT) Regional-Owned Enterprise (ROE)



Bidang Usaha/ Line of Business
Pengangkutan Darat
Land Transportation



Ruang Lingkup Kegiatan Usaha/ Scope of Business Activities

- Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Perkotaan yang meliputi Pembangunan Prasarana, Pengoperasian Prasarana, Perawatan Prasarana, dan Pengusahaan Prasarana MRT;
- Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Perkotaan yang meliputi Pembangunan Sarana, Pengoperasian Sarana, Perawatan Sarana, dan Pengusahaan Sarana MRT;
- Pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya serta depo dan kawasan sekitarnya.

(Berdasarkan Akta Pendirian dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018).

- Management of Urban Public Railway Infrastructure, which includes Infrastructure Developments, Infrastructure Operations, Infrastructure Maintenance and Infrastructure Concessions of MRT.
- Management of Urban Public Railway Facilities/ Modes, which include Facility Developments, Facility Operations, Facility Maintenance and Facility Concessions of MRT.
- Development and management of properties/ businesses at and around the station as well as the depot.

(Pursuant to the Deed of Establishment and DKI Jakarta Provincial Regulation No. 3 of 2008 on the Establishment of Regional-Owned Enterprise (ROE) Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta as most recently amended by DKI Jakarta Provincial Regulation No. 9 of 2018).



INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY



Cakupan Proyek/ *Scope of Projects*

- Struktur Layang, Struktur Bawah Tanah, *Railway System & Trackwork dan Rolling Stock*
- *Elevated Structure, Underground Structure, Railway System & Trackwork and Rolling Stock*



Kepemilikan/ *Ownership*

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 99,99%
- PD Pasar Jaya 0,01%
- *DKI Jakarta Provincial Government 99.99%*
- *PD Pasar Jaya 0.01%*



Modal Dasar/ *Authorized Capital*

Rp10.200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*

Rp5.721.807.000.000



Kantor Pusat/ *Head Office*

Wisma Nusantara, Lantai 21 - 23
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta-Indonesia
Telp: +62 21 390 6454, 310 3629
Fax: +62 21 315 5846

Kantor Proyek/ *Project Office*

Depo Lebak Bulus
Jl. Lebak Bulus Raya, Jakarta Selatan

Surel/ *E-mail* : info@jakartamrt.co.id

Situs Web/ *Website* : www.jakartamrt.co.id

Media Sosial/ *Social Media*

: www.facebook.com/jakartamrt

: @mrtjakarta

: @mrtjkt

: MRT Jakarta

Kontak Perusahaan/ *Company Contact*

Wisma Nusantara, Lantai 21-23
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta-Indonesia
Tel. : +62 21-390 6454, +62 21-310 3629
Fax. : +6221-315 5846
Email : corsec@jakartamrt.co.id



Jumlah Karyawan/ *Number of Employees*

520 orang (2018)
520 employees (2018)



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF MRT JAKARTA



SEKILAS SEJARAH MRT JAKARTA

PT Mass Rapid Transit Jakarta; disebut sebagai “PT MRT Jakarta”, “MRTJ” atau “Perusahaan”; merupakan badan hukum Perusahaan Terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan *Operation and Maintenance* (O&M) prasarana dan sarana MRT serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

PT MRT Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2018 tentang Perusahaan Terbatas MRT Jakarta (Perusahaan Daerah).

MRT JAKARTA AT A GLANCE

PT Mass Rapid Transit Jakarta, hereinafter referred to as PT MRT Jakarta, is one of the Regional-Owned Enterprises (ROE) of DKI Jakarta Provincial Government which was established on June 17, 2008. In accordance with its business scope, PT MRT Jakarta has duty to carry out the concession and development of MRT infrastructures and facilities/modes, Operation and Maintenance activities of MRT infrastructures and modes, as well as development and management of properties/businesses at and around MRT stations and depots.

The establishment of PT MRT Jakarta is based on the Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 3 of 2008, on the Establishment of Regional-Owned Enterprise (ROE) Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta as amended by the Regional Number 9 Year 2018 concerning Limited Liability Company MRT Jakarta (Regional Company).



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF MRT JAKARTA

Sesungguhnya rencana pembangunan MRT di Jakarta telah dirintis sejak tahun 1985. Di tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional, dimana Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana pinjaman disambut oleh Pemerintah Jepang yang bersedia memberikan dana pinjaman.

Pada 28 November 2006, penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar. JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian Proyek MRT ini.

JBIC kemudian melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman. Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan tahun 2008-2009. Tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010. Pekerjaan konstruksi dimulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Uji coba operasional dimulai tahun 2014. Namun jadwal tersebut akhirnya mundur. Desain proyek dilakukan mulai 2008-2009, tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013 dan direncanakan selesai pada tahun 2019.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 3 (tiga) jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pengelola (BP), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah (BUMD/PD) dan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Terbatas (BUMD/PT). Ditinjau dari perspektif manajemen, baik BP maupun BUMD/PD tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk alih daya (*outsource*) maupun bekerja sama dengan sektor swasta, sehingga berisiko terjadinya inefisiensi karena terbatasnya pendanaan dari Pemerintah Daerah. Sementara BUMD/PT memiliki fungsi yang sama dengan sektor swasta sehingga mampu memanfaatkan sumber daya eksternal secara maksimal. Berdasarkan hal inilah maka kemudian dibentuk PT MRT Jakarta.

MRT development plan in Jakarta has been initiated since 1985. In 2005, the President of the Republic of Indonesia designated the MRT project as a national project, this status change encouraged the Indonesian Government and Regional DKI Jakarta Provincial Government to coordinate and share the responsibility. Loan to implement MRT project was provided and disbursed by the Japanese Government to accelerate its project.

On November 28, 2006, the financing agreement of MRT Jakarta project was signed by the Governor of Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Kyosuke Shinozawa, and the Indonesian Ambassador for Japan, Yusuf Anwar. JBIC was also willing to design and provide study recommendation to the Provincial Government of DKI Jakarta, including agreement between JBIC and Indonesian Government, to appoint an institution as one-door service for organizing the completion of MRT project.

JBIC then merged with Japan International Cooperation Agency (JICA) which acted as an assessor team from JBIC as a lender. In a timeline devised by JICA and MRT Jakarta, technical design and land acquisition are to be conducted in 2008-2009. Tenders for construction and electrical and mechanical equipment would take place in 2009-2010 while construction work will begin from 2010 to 2014, with operational trials to begin in 2014. Unfortunately, the schedule was finally postponed. In the new timeline, the design project would be conducted from 2008 to 2009 while construction phase would start on October 2013 with completion targeted in 2019.

Based on the applicable laws and regulations, there are 3 (three) types of business entities that can be established by the Local Government, namely Management Agency (BP), Regional-Owned Enterprises in the form of Local Company (BUMD/PD) and, Regional-Owned enterprises in the form of a limited liability company (BUMD/PT). From the management perspective, both BP and BUMD/PD do not have enough flexibility to hire outsourced employees or cooperate with private sectors, so there is a risk of inefficiency due to the limited funding from the Local Government. Meanwhile, BUMD/PT has the same function with the private sectors so it can utilize external resources optimally. Hence, based on these considerations, PT MRT Jakarta is established.



Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Koridor Selatan-Utara Tahap I sepanjang ± 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut 1 (satu) Depo. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik tahap I, selain menggandeng Konsultan Manajemen Lalu Lintas, PT MRT Jakarta juga memastikan telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pengoperasian Tahap I akan dimulai pada tahun 2018.

Pembangunan Jalur MRT Koridor Selatan-Utara Tahap I ini akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pengembangan selanjutnya adalah meneruskan pembangunan jalur MRT Koridor Selatan-Utara Tahap II dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kampung Bandan, serta pengembangan jalur Timur-Barat.

Dalam struktur tugasnya, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mulai dari tahap *Engineering Service*, Konstruksi hingga Operasi dan Pemeliharaan. Adapun penjabarannya:

- Dalam tahap *Engineering Service*, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap proses prakualifikasi dan pelelangan kontraktor.
- Dalam tahap Konstruksi, PT MRT Jakarta sebagai atribusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses pelelangan kontraktor, serta konsultan manajemen dan operasional.
- Dalam tahap operasi dan pemeliharaan, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan, termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan *revenue* yang layak bagi PT MRT Jakarta.

Pelaksanaan pembangunan MRT melibatkan beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta sendiri. Oleh karena itu, dokumen anggaran yang diperlukan juga melibatkan lembaga-lembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan berbeda namun dengan satu *output* yang sama, pembangunan MRT.

The MRT Jakarta project began with the construction of Phase 1 of MRT South-North corridor of ± 16 km in length from Lebak Bulus to Bundaran Hotel Indonesia, with 13 stations and 1 (one) depot. To minimize the physical construction impact of phase 1, apart from cooperating with the traffic management consultants, PT MRT Jakarta also ensures the possession of Environmental Impact Analysis (EIA). The Phase 1 will start to operate in 2018.

The construction of Phase 1 of the MRT South-North Corridor is just a starting step towards the development of an integrated network of MRT system, which is a part of Jakarta's future public transportation network. The next development is to continue the construction of Phase II of the MRT South-North Corridor, i.e. from Bundaran Hotel Indonesia to Kampung Bandan, and the development of East-West line.

In its structural duties, PT MRT Jakarta is responsible for all activities, starting from the Engineering Services, Construction, to Operation and Maintenance. The descriptions are:

- *In the stage of Engineering Service, PT MRT Jakarta is responsible for contractor prequalification and tender processes.*
- *In Construction stage, PT MRT Jakarta acts as the attribution of DKI Jakarta Provincial Government in signing contracts with construction contractors and consultants that will assist in the contractor tender process, as well as consultants for management and operational affairs.*
- *In Operation and Maintenance stage, PT MRT Jakarta is responsible for the operations and maintenance, including ensuring the achievement of an adequate number of passengers to provide decent revenue for PT MRT Jakarta.*

The implementation of MRT development involves numerous government institutions, both at the level of Central Government, DKI Jakarta Provincial Government, and PT MRT Jakarta itself. Therefore, the required budget documents also involve those institutions with different names of programs and activities but working together towards the same output, namely MRT construction.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, pembangunan Proyek MRT Jakarta telah mencapai 98,10%.

Up to the end of 2018, the construction of MRT Jakarta Project has reached 98.10%.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

INFORMATION ON CHANGES OF COMPANY NAME

Sejak berdirinya pada 17 Juni 2008 hingga 31 Desember 2018, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta).

Since its establishment on June 17, 2008 until December 31, 2018, the Company has maintained its initially given name, i.e. PT Mass PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta).



BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir mengalami perubahan melalui Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Akta No. 57 Tanggal 17 April 2018, ruang lingkup kegiatan usaha PT MRT Jakarta adalah sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 the Articles of Association of the Company which were last amended through Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notary Deed, Deed No. 57 On April 17, 2018, the scope of business activities of PT MRT Jakarta is as follows:



Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Scope of Business Activities Based on Articles of Association

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
Management of urban public railway infrastructure, which includes infrastructure developments, infrastructure operations, infrastructure maintenances and concessions.

Keterangan Remarks

Telah dilakukan pengusahaan prasarana dan pembangunan prasarana
Infrastructure concession and infrastructure development



Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Scope of Business Activities Based on Articles of Association

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
Management of urban public railway infrastructure, which includes infrastructure developments, infrastructure operations, infrastructure maintenances and concessions.

Keterangan Remarks

Telah dilakukan pengusahaan prasarana dan pembangunan prasarana
Infrastructure concession and infrastructure development



Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Scope of Business Activities Based on Articles of Association

Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.
Development and management of property/business in the station and its surrounding area.

Keterangan Remarks

Telah dilakukan pengusahaan prasarana dan pembangunan prasarana
The development and management of property or business has been carried out at the station and the surrounding area



Hingga akhir tahun 2018, PT MRT Jakarta masih dalam tahapan pembangunan konstruksi dan belum beroperasi secara komersial.

Up to the end of 2018, PT MRT Jakarta is still in the stage of construction and has not been operating commercially.

TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Tujuan PT MRT Jakarta adalah sebagai berikut:

- Memberikan pembangunan tahap pertama.
- Mencapai keunggulan operasional.
- Terus mengembangkan baik secara jaringan dan bisnis *non-farebox*, termasuk *Transit Oriented Development* (TOD).
- Menetapkan diri sebagai penyedia transportasi massal dan pengembang sistem perkotaan terdepan di Indonesia.

Strategi bisnis PT MRT Jakarta mengacu pada bisnis intinya, yaitu mengedepankan pemahaman kepada kompetensi inti Perusahaan sebagai operator yang fokus, efisien dan berkelas dunia.

GOALS, OBJECTIVES, AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT

The goals of PT MRT Jakarta are as follows:

- Provide the first phase construction.
- Achieve operational excellence.
- Continue to develop both network and non-farebox businesses, including the *Transit Oriented Development* (TOD).
- Establish itself as a leading mass transportation provider and urban systems developer in Indonesia.

The business strategies of PT MRT Jakarta refer to its core business, which is promoting the understanding toward the Company's core competencies as a focused, efficient and world-class operator.

Bisnis Inti MRT Jakarta MRT Jakarta Core Business



Pengembang dan operator dari jaringan transportasi MRT
Developer and operator of MRT transportation network

PT MRT Jakarta bertujuan untuk memberikan layanan mobilitas kepada seluruh warga Jakarta sekaligus sebagai sarana untuk meremajakan kota dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditempuh dengan menjadi penyedia layanan transportasi berbasis rel di wilayah perkotaan, mengembangkan kawasan sekitar stasiun dengan pendekatan TOD.

Layanan transportasi berbasis rel merupakan jasa layanan angkutan umum dengan mekanisme tarif yang akan dikontrol secara ketat oleh Pemerintah, karenanya PT MRT Jakarta harus mampu mengembangkan kesempatan dan potensi bisnis lainnya untuk mendapatkan *revenue*. Eksplorasi sumber pendapatan di luar layanan transportasi meliputi periklanan, kerja sama dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan properti di kawasan seputar stasiun.



Penyedia *Transit Orientated Development* (TOD)
Provider of Transit Orientated Development (TOD)

PT MRT Jakarta aims to provide mobility services to all citizens of Jakarta as well as becoming a means to rejuvenate the city by spurring economic growth. These are achieved by becoming a provider of rail-based transportation services in urban areas and develop the area around the station with TOD approach.

Rail-based transportation service is public transport services with tariff mechanism that will be strictly controlled by the government; hence, MRT Jakarta must be able to develop other business opportunities and potentials to earn revenue. Explorations of revenue sources outside the transportation services include advertising, cooperation with providers of telecommunications infrastructure and property development in the area around the station.



Salah satu potensi bisnis lainnya yang dipandang menarik untuk dikembangkan adalah Jasa Konsultansi. Layanan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan karyawan PT MRT Jakarta sekaligus membuka kesempatan bagi pengembangan pembangunan infrastruktur transportasi di berbagai daerah perkotaan di seluruh Indonesia.

One of the business potentials deemed interesting to develop is Consultancy Services. This service can be useful for the development of PT MRT Jakarta employees as well as opening opportunities for the development of transportation infrastructure construction in various urban areas throughout Indonesia.

CAKUPAN PROYEK

SCOPE OF PROJECTS

Per 31 Desember 2018, Perusahaan dalam tahapan pengembangan konstruksi serta pengadaan prasarana penunjang, yang terdiri dari 3 (tiga) cakupan, yaitu konstruksi layang, konstruksi bawah tanah, serta *Railway Systems & Trackwork* dan *Rolling Stock*.

As of December 31, 2018, the Company is in the stage of developing construction and procurement of supporting infrastructure, which consists of 3 (three) scopes, namely Elevated Section, Underground Section, and Railway Systems & Trackwork and Rolling Stock.

Konstruksi Layang

Elevated Section



Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang yang membentang ±10 km; dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 Stasiun Layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja. Sementara Depo MRT dibangun di area Lebak Bulus, berdekatan dengan Stasiun Lebak Bulus. Seluruh stasiun penumpang dan lintasan dibangun dengan struktur layang yang berada di atas permukaan tanah, sementara Depo MRT dibangun di permukaan tanah (*on ground*).

Several parts of MRT Jakarta's line is elevated structures that extend for ±10 km; from Lebak Bulus to Sisingamangaraja. This route consists of 7 stations namely Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M and Sisingamangaraja stations. Meanwhile, MRT train depot is located at Lebak Bulus area, adjacent to Lebak Bulus station. All passenger stations and lanes are constructed with Elevated Structure towering above the ground. Meanwhile, Train Depot is built above road surface (on ground).

Tipe struktur layang yang akan digunakan adalah Tiang Tunggal (*Single Pier*) pada bagian bawah serta Gelagar Persegi Beton Pracetak (*Precast Concrete Box Girder*) pada bagian atas. Ketinggian Gelagar dari permukaan jalan telah memperhitungkan persyaratan minimal jarak bebas vertikal 5,0 meter sesuai peraturan yang berlaku untuk jalan perkotaan.

The type of elevated structures to be used is Single Pier on the bottom and Precast Concrete Box Girder on the top. The height of the girder from the road surface has been calculate the requirements for minimum vertical distance 5.0 meters in accordance with the applicable rules for urban streets.

Pekerjaan Konstruksi Layang MRT Jakarta terdiri dari tiga Paket, yaitu *Contract Package (CP) 101, CP 102 dan CP 103*.

The elevated section of MRT Jakarta is implemented in three construction packages, namely Contract Package (CP) 101, CP 102 and CP 103.



Konstruksi Bawah Tanah (*Underground*)

Underground Section



Konstruksi bawah tanah (*Underground*) MRT Jakarta membentang ±6 km, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan 6 (enam) stasiun MRT bawah tanah, yang terdiri dari Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia.

The MRT Jakarta's underground section extends for ±6 km, consisting of underground tunnels and 6 (six) underground stations, namely Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas and Bundaran Hotel Indonesia stations.

Metode pengerjaan konstruksi bawah tanah menggunakan TBM (*Tunnel Boring Machine*) tipe EPB (*Earth Pressure Balance*) dengan pembagian koridor paket pengerjaan terbagi menjadi tiga: CP 104, CP 105 dan CP 106.

The underground section is built using TBM (Tunnel Boring Machine), of EPB type (Earth Pressure Balance Machine). The underground section is implemented with three construction packages, i.e. CP 104, CP 105 and CP 106.

Railway Systems & Trackwork dan Rolling Stock

Railway Systems & Trackwork and Rolling Stock



Railway Systems merupakan prasarana penunjang sistem perkeretaapian yang terdiri dari 10 subsystem, antara lain *Substation System, Overhead Contact System, Power Distribution System, Signaling System, Telecommunication System, Facility SCADA, Automatic Fare Collection System, Platform Screen Doors, Escalator & Elevator, dan Trackwork*. Sistem perkeretaapian MRT Jakarta akan menggunakan sistem persinyalan terbaru di Indonesia dengan memperkenalkan sistem persinyalan CBTC (*Communication Based Train Control*) dan menerapkan sistem *moving block* untuk pengaturan perjalanan kereta.

Railway Systems refer to the supporting infrastructures of railways, which consist of 10 subsystems, namely *Substation System, Overhead Contact System, Power Distribution System, Signaling System, Telecommunication System, SCADA Facility, Automatic Fare Collection System, Platform Screen Doors, Escalator & Elevator and Trackwork*. The railway system of MRT Jakarta will be using the latest signaling system in Indonesia namely the CBTC (*Communication- Based Train Control*) signaling system which applies the *moving block* system for train travel arrangements.

Pekerjaan *Railway Systems & Trackwork dan Rolling stock* MRT Jakarta terdiri dari dua Paket, yaitu CP 107 dan CP 108.

Railways Systems & Trackwork and Rolling Stock works of MRT Jakarta consist of two packages, i.e. CP 107 dan CP 108.



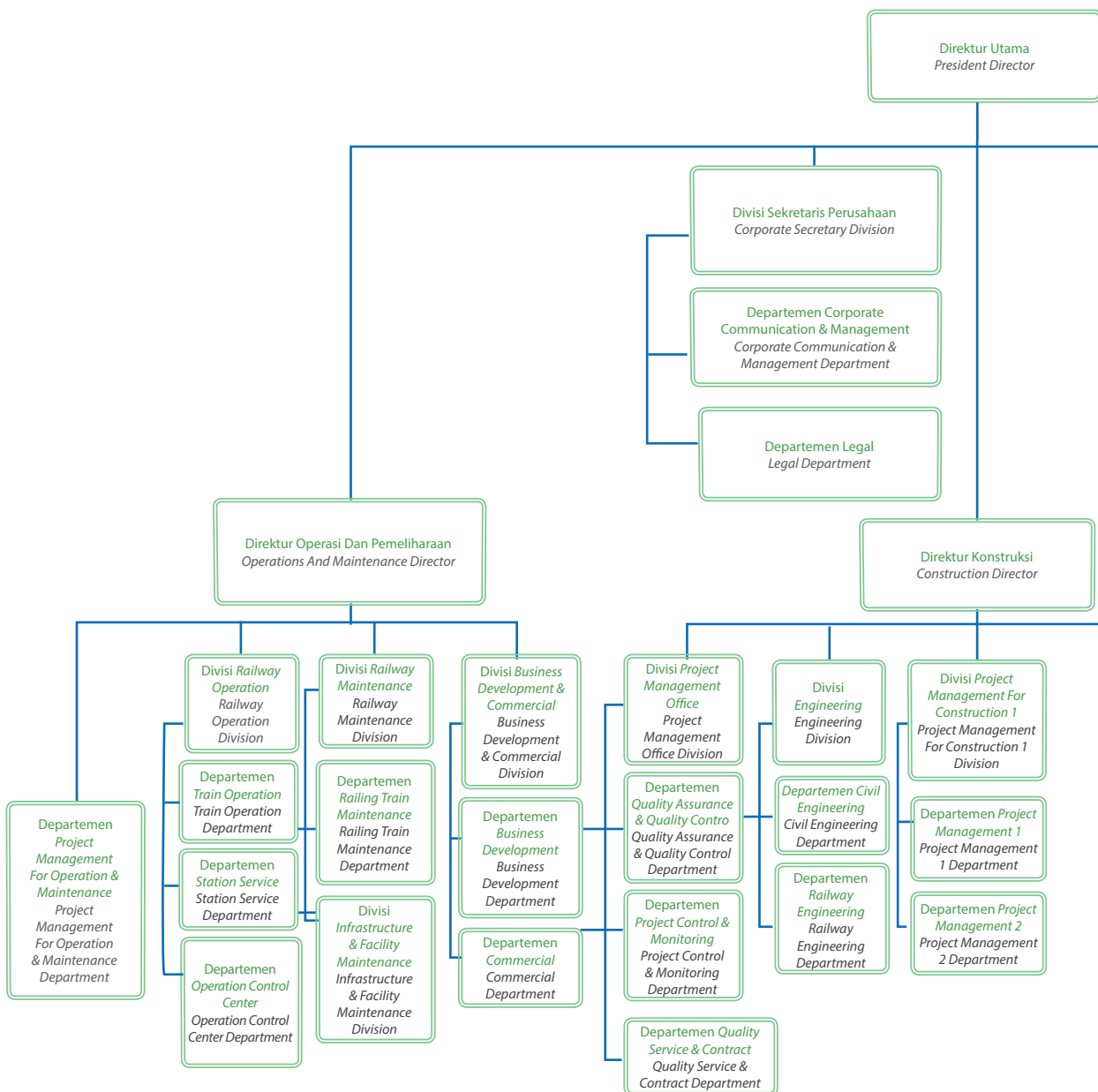
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

Di sepanjang tahun 2018, struktur organisasi Perusahaan mengalami 2 (dua) kali pergantian, sebagai bagian dari persiapan organisasi dan kebutuhan Perusahaan terkait pengoperasian MRT Jakarta yang ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2019.

Struktur 1

Struktur organisasi Perusahaan sejak akhir tahun 2017/awal tahun 2018 - 31 Mei 2018



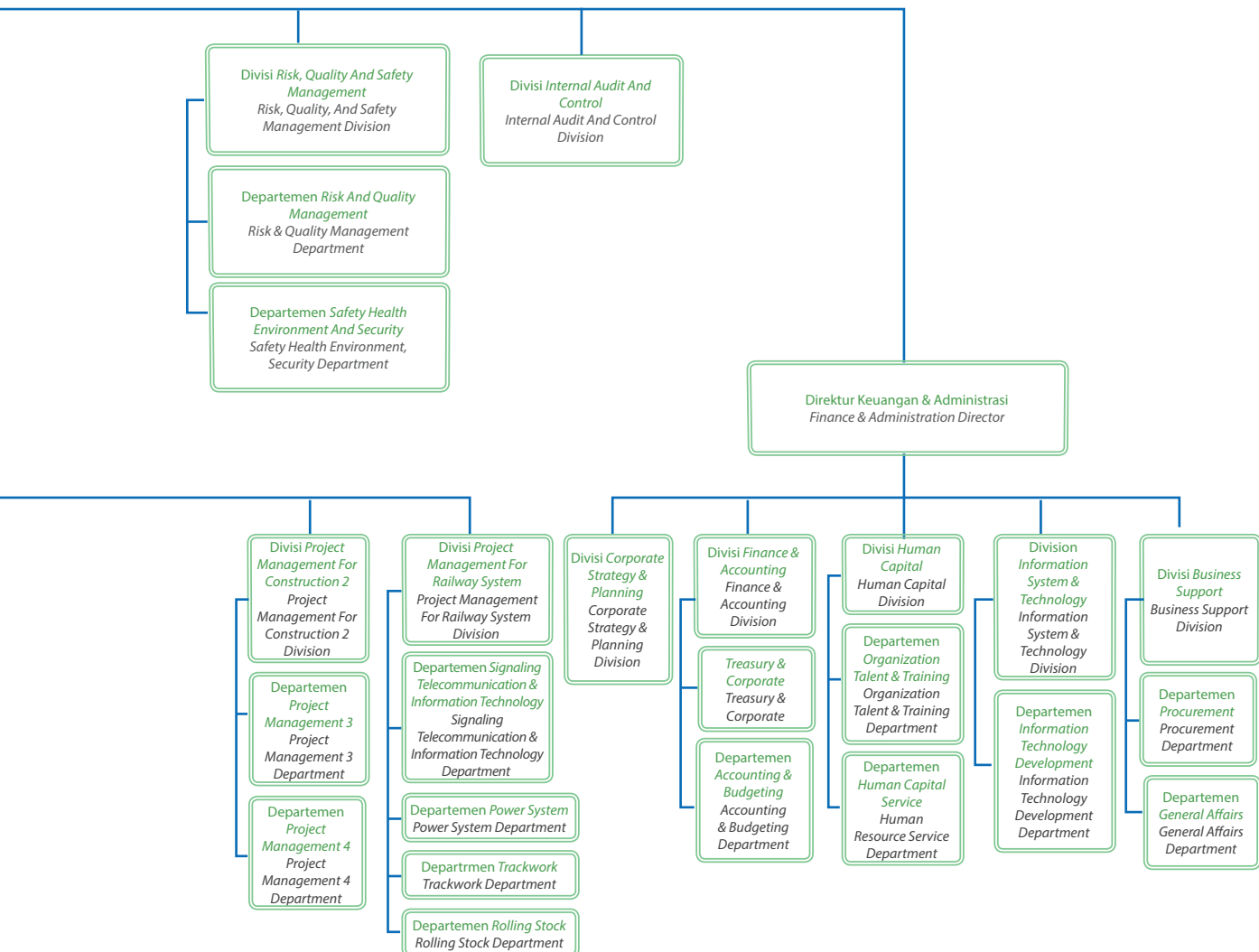


STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

Throughout 2018, the Company's organization structure experienced 2 (two) changes, as part of the Company's organizational preparation and needs related to the operation of MRT Jakarta which is targeted to be operational in March 2019.

Structure 1

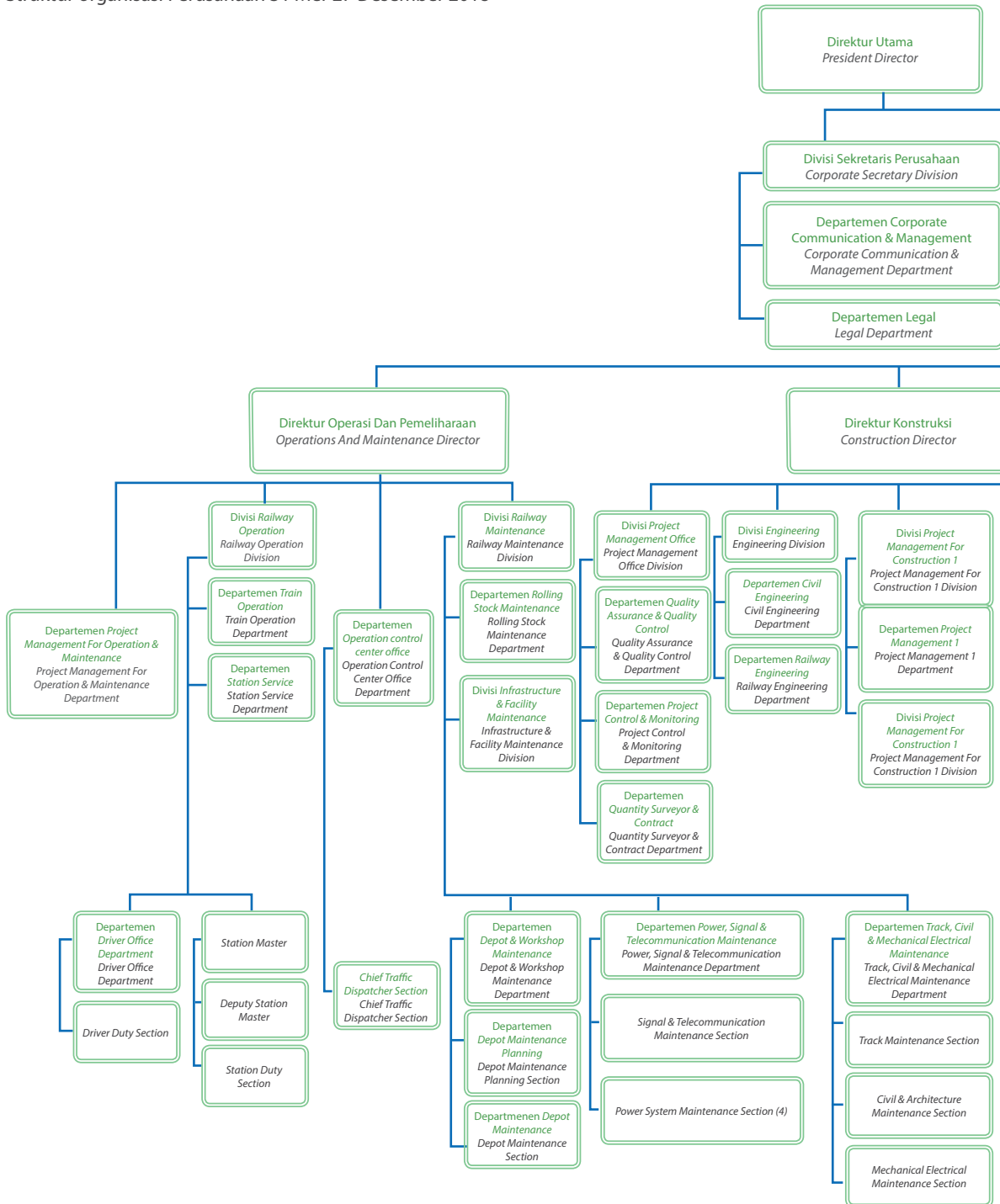
Company organization structure since the end of 2017 / beginning of 2018 - May 31, 2018





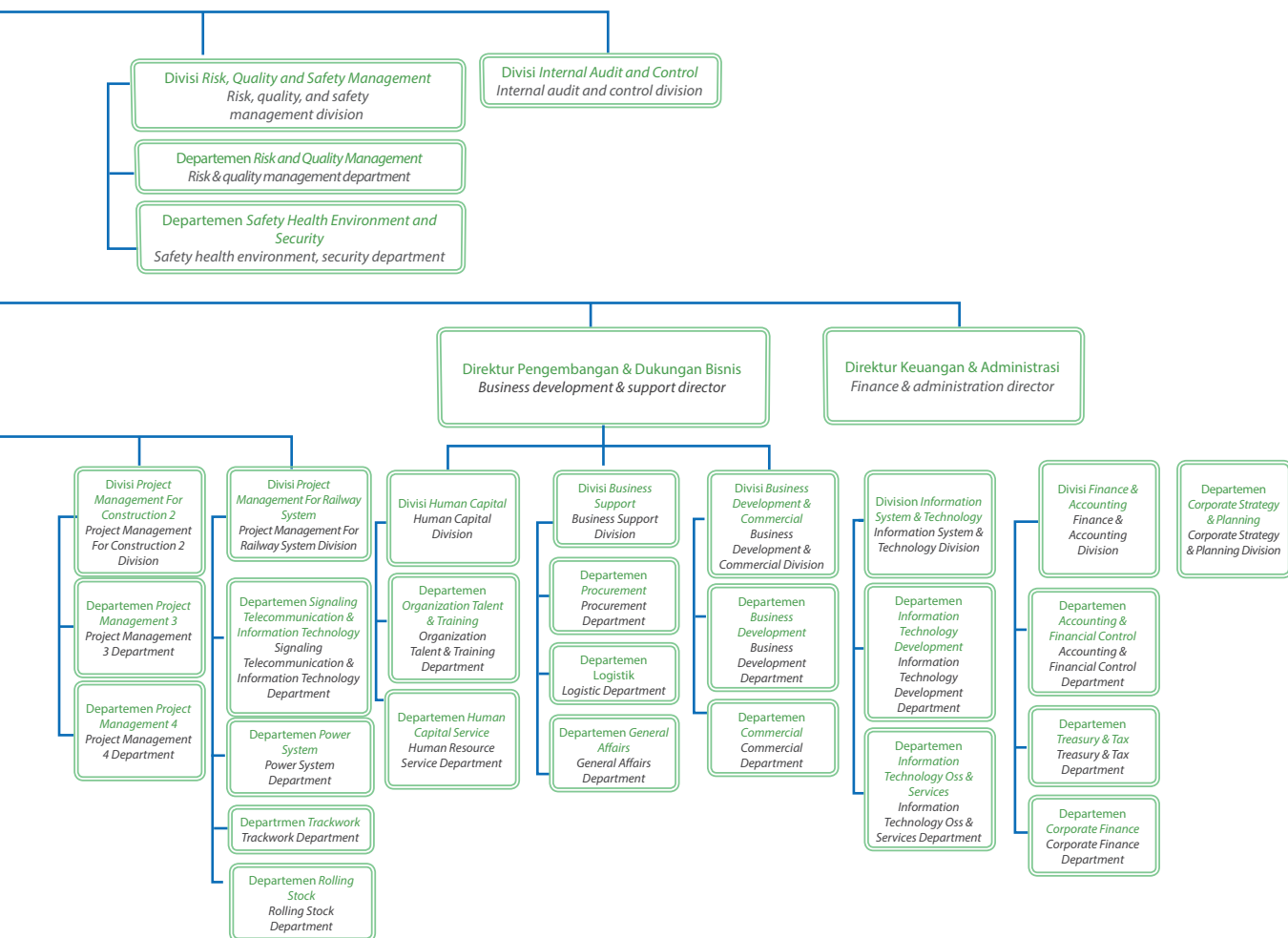
Struktur 2

Struktur organisasi Perusahaan 31 Mei-27 Desember 2018



STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

Structure 2
Company organization structure May 31 - December 27, 2018



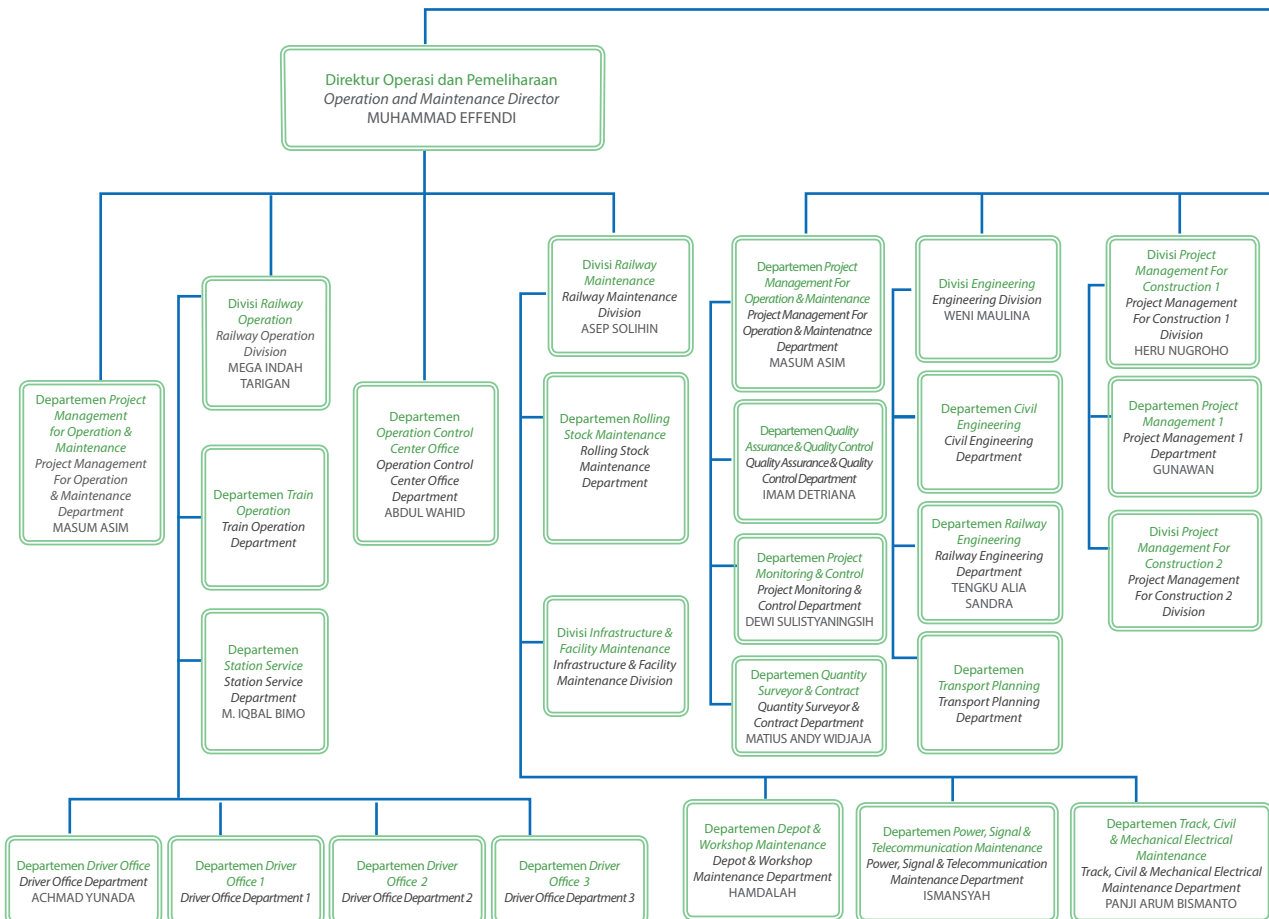
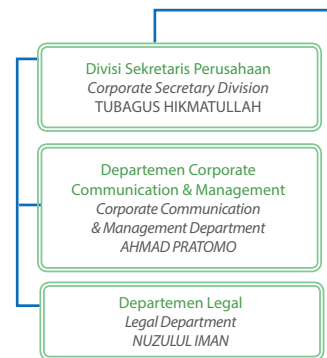


Struktur 3

Struktur organisasi Perusahaan sejak 27 Desember 2018 - kini Struktur organisasi Perusahaan sejak 27 Desember 2018 - kini

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT MRT Jakarta No. 119 tanggal 27 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi di Lingkungan PT MRT Jakarta.

The Company's organization structure has been approved through the Board of Directors Decree of PT MRT Jakarta No. 119 dated December 27, 2018 concerning Organization Structure within PT MRT Jakarta.





VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE VALUES

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

THE COMPANY'S VISION AND MISSION

VISI/VISION

“ Untuk menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan.

To become the leading provider of public transportation, committed to encourage economic growth through mobility improvement, traffic reduction and the development of urban transit systems.”

Visi dan misi Perusahaan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris serta manajemen senior untuk memastikan keberlanjutan. Pernyataan Visi dan Misi disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2028 yang telah disahkan.
The company vision and mission be reviewed periodically by involving, board of directors the board of commissioners and senior management to ensure continuity. Vision and mission statements are based on the Company Long Term Plan (RJPP) 2014-2028 agreed.

Sebuah visi yang diyakini dan tercermin dalam budaya bisnis haruslah diciptakan dan diartikan dengan kejelasan, kesinambungan dan konsistensi. Visi PT MRT Jakarta menyatakan keinginan sebagai penyedia dan pengelola jaringan MRT unggulan di Indonesia untuk mampu memberikan sebuah hasil akhir dengan kelas dunia dan diakui secara tinggi dari seluruh Indonesia dan regional.

A vision that is believed and reflected in the business culture must be created and defined with clarity, continuity, and consistency. The vision of PT MRT Jakarta expresses a desire as a provider and manager of supreme MRT network in Indonesia to be able to give world-class final result and be highly recognized from all over Indonesia and the region.

Visi PT MRT Jakarta bertujuan untuk memberikan suatu proyek yang membentuk elemen penting dari strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan mobilitas warga Jakarta.

PT MRT Jakarta's Vision aims to deliver a project which forms an important element of long-term strategy of DKI Jakarta Provincial Government to improve the mobility of people in Jakarta.

- **Indonesia's leading provider**

Menjadi pemimpin dalam moda transportasi massal dan penyedia jasa konsultasi untuk jaringan MRT lain di Indonesia.

- **Economic growth**

Penelitian membuktikan bahwa jaringan adalah pemicu pembangunan ekonomi dan menguntungkan komunitas.

- **Enhancing mobility**

MRT Jakarta adalah salah satu komponen strategi pemerintah untuk mengurangi kemacetan & meningkatkan mobilitas di Jakarta.

- **Indonesia's leading provider**

Being a leader in mass transportation modes and consulting services provider for other MRT network in Indonesia.

- **Economic growth**

Research shows that network is a trigger for economic development and beneficial for the communities.

- **Enhancing mobility**

MRT Jakarta is one component of government's strategy to reduce congestion and improve mobility in Jakarta.



MISI/MISSION

Untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua hal yang Kami lakukan melalui:

1. Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, tepercaya dan nyaman;
2. Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan,
3. Membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi dan memotivasi tenaga kerja kami.

To strive for excellence in a sustainable way in all our undertakings through the following:

1. *Development and operation of a safe, trusted and comfortable public transportation network;*
2. *Rejuvenation of urban environment through prominent urban transit developments; and*
3. *Building reputation as a preferred company by involving, inspiring and motivating our manpower.*

Dalam proses pencapaian Visi, Misi PT MRT Jakarta menggambarkan tujuan bisnis, arah dan waktu pencapaian.

In the process of achieving the Vision, the Mission of PT MRT Jakarta describes business goals, direction and timing of attainment.

- **What**
 - » Memberikan layanan moda transportasi massal yang berkelanjutan dan berkelas dunia.
 - » Menumbuhkan lingkungan kerja yang terus maju, menginspirasi dan mengembangkan karyawan.
- **Where**

Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia.
- **When**

Misi bertujuan untuk mencapai layanan yang berkelanjutan dan berjangka waktu panjang.

- **What**
 - » *Providing sustainable and world-class mass transportation modes services.*
 - » *Fostering a working environment that continues to advance, inspire and develop employees.*
- **Where**

Not only in Jakarta, but across Indonesia.
- **When**

The mission aims to achieve sustainable and long term services.



NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Perusahaan yang menjadi acuan dalam berperilaku sehingga menjadi sebuah budaya Perusahaan di MRT Jakarta tertuang dalam *Code of Conduct* yang diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi No. 40 Tahun 2009 yang masih dalam tahap proses pengesahan. Nilai-nilai tersebut adalah "I CAN", yaitu:

CORPORATE VALUES

The Corporate Values as reference in behaving in MRT Jakarta are contained in the Code of Conduct that has been established in the Board of Directors Decision Letter No. 40 of 2009 and are currently in ratification process. These values are known as "I CAN", namely:



INTEGRITY

Setiap Insan Perusahaan secara konsisten menampilkan sikap jujur dan "satu kata dengan perbuatan" sesuai dengan pedoman perilaku dan Tata Kelola Perusahaan.

Each individual of the Company consistently displays honesty and "one word with action" principles according to corporate governance and code of conduct.



CUSTOMER FOCUS

Setiap Insan Perusahaan menampilkan sikap proaktif dalam memahami, membantu, & melayani kebutuhan pelanggan serta membangun relasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

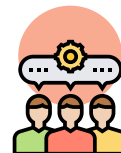
Each Company's individual must proactively understand, assist & serve customer's need as well as building good relation with all stakeholders.



ACHIEVEMENT ORIENTATION

Setiap Insan Perusahaan memiliki semangat untuk berprestasi dan berani menghadapi tantangan dengan cara kerja yang efektif dan efisien.

Each Company's individual has the spirit to create achievements and to face challenges with effective and efficient procedures.



NURTURING TEAM WORK

Setiap Insan Perusahaan menghargai perbedaan dan kontribusi setiap individu serta membangun komitmen untuk bersinergi secara produktif.

Each Company's individual appreciates differences and contributions of other individuals as well as building commitment to productively creating synergy.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN

MEANING OF CORPORATE LOGO



Logo MRT Jakarta mengambil gaya huruf “M” dan “J” membentuk *track* kereta MRT. Jalur yang ramping dan mengalir melambangkan perjalanan yang mulus dari keberangkatan hingga tujuan, bahkan dengan adanya perhentian di stasiun persinggahan. Warna hijau merepresentasikan pertumbuhan, lingkungan, yang kemudian menciptakan keharmonisan dengan warna biru yang menunjukkan stabilitas dan keandalan yang menjadi ciri khas dari PT MRT Jakarta.

Biru dan hijau adalah warna inti PT MRT Jakarta. Warna-warna ini digunakan dalam berbagai aplikasi dan selalu mencerminkan identitas perusahaan MRT Jakarta itu sendiri.

Dalam logo MRT Jakarta, terdapat 2 (dua) kata kunci yang menyatu sebagai tagline, yaitu “*Increasing Mobility*” dan “*Improving Life Quality*”. Tagline ini didesain untuk menarik perhatian dengan ringkas dan memberikan pemahaman yang mengesankan mengenai citra perusahaan kepada pelanggan. Tagline ini mencakup visi utama MRT Jakarta, yaitu meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

MRT Jakarta logo took the style of the letter “M” and “J” to form the MRT train tracks. Sleek and flowing track symbolizes a smooth journey from departure to destination, even in the presence of a stopover station. The green color represents growth, environment, which then creates harmony in blue color which indicates the stability and reliability that is the hallmark of PT MRT Jakarta.

Blue and green are the core colors of PT MRT Jakarta. These colors are used in various applications and always reflect the corporate identity of MRT Jakarta.

*In MRT Jakarta logo, there are 2 (two) keyword fused as a tagline, which is “*Increasing Mobility*” and “*Improving Life Quality*”. The tagline is designed to attract attention with its briefness and ability to give impressive understanding about the corporate image to customers. The tagline includes the main vision and mission of MRT Jakarta, which is to increase mobility and improve quality of life for Jakarta citizens.*



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



RUKIJO

Plt. Komisaris Utama
Periode Jabatan: 10 Agustus 2015 - RUPS Tahun 2019, Periode Pertama

Acting President Commissioner
Period of Office : August, 10, 2015 – 2019 Annual GMS, First Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Metro, 1 Februari 1967

DOMISILI

Tangerang, Banten, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Komisaris Perusahaan sejak 10 Agustus, melalui Keputusan RUPS PT MRT Jakarta Tahun 2015, Periode I
Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT MRT Jakarta, tanggal 4 Mei 2018.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lampung (1990) serta Magister (S2) Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (2007).

PENGALAMAN KERJA

Memiliki pengalaman profesi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) (2007-2009); Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK Kemenkeu (2009-2013); Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu (2013-2014); Direktur Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu (2014-2016); Sekretaris DJPK Kemenkeu (2016-sekarang). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diangkat sejak tahun 2016.

RANGKAP JABATAN

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2016-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI

Rukijo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Rukijo sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Rukijo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Rukijo tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 52
was born in Metro, February 1, 1967

DOMICILE

Tangerang, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Appointed as the Company's Commissioner since August 10, through PT MRT Jakarta GMS Decision in 2015, Period I
Appointed as Acting President Commissioner through Circular Decision of PT MRT Jakarta Shareholders dated May 4, 2018.

EDUCATION

Bachelor of Economics majoring in Economics and Development Studies from University of Lampung (1990) and Master of Management from University of Muhammadiyah Jakarta (2007).

HISTORY OF EMPLOYMENT

Rukijo has professional experiences the as Head of Personnel at Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance (DJPK Kemenkeu) (2007-2009); Head of Subdirector of Transfer Execution II at DJPK Kemenkeu (2009-2013); Director of Regional Tax and Retribution at DJPK Kemenkeu (2013-2014); Director of Balancing Fund at DJPK Kemenkeu (2014-2016); and Secretary of DJPK Kemenkeu (2016-present). Presently, he also serves as Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance since his appointment in 2016.

CONCURRENT POSITION

Presently, he also serves as Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance since his appointment in 2016.

AFFILIATION

Rukijo has an affiliation with the Ultimate/ Controlling Shareholder through a position at the Ministry of Finance as part of the Company's ultimate owner entity. Rukijo's position as the Company's Commissioner has gone through fit and proper test. In addition, Rukijo has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, Rukijo does not own the Company's shares.



PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



YUZMADA FAIZAL

Komisaris
Periode Jabatan: 24 Agustus 2016 - RUPS Tahun 2020, Periode Pertama

Commissioner
Period of Office: August 24, 2016 – 2020 Annual GMS, First Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Baturaja, 24 Juni 1964

DOMISILI

Kotamadya, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Komisaris di Perusahaan sejak 24 Agustus 2016 berdasarkan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., yang merupakan periode ke-1.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1988); dan Magister (S2) Teknik jurusan Teknik Jalan Raya/Transportasi dari University of New South Wales (1996).

PENGALAMAN KERJA

Beliau merupakan profesional yang berpengalaman sebagai seorang birokrat, khususnya di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, yakni sebagai Kepala Seksi (Kasi) SDPU Jakarta Utara (sejak 1998); Kasi Rentek Jalan dan Jembatan DPU DKI Jakarta (sejak 2001); Kasi Bina Teknik Jaringan Jalan Subdin Bintek Jalan DPU Provinsi DKI Jakarta (2001-2006); Kepala SDPU Jalan Kota Administrasi Jakarta Pusat (2006-2009); Kepala SDPU Jalan Kota Administrasi Jakarta Barat (2009-2012); Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta (2012-2014); Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan (2014-2015); serta sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta (2015-sekarang). Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta (2015-2018); serta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (2018-sekarang).

RANGKAP JABATAN

Selain sebagai Komisaris pada PT MRT Jakarta, menjabat juga sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (2018-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI

Yuzmada Faizal memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Yuzmada Faizal sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Yuzmada Faizal tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Yuzmada Faizal tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 54
was born in Baturaja, June 24, 1964

DOMICILE

DKI Jakarta, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Appointed as the Company's Commissioner since August 24, 2016 based on Deed of GMS No. 48 dated September 13, 2016 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. This is the 1st Period of Office.

EDUCATION

He graduated with a Bachelor of Engineering degree majoring in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1988); and Master of Engineering degree majoring in Highway/Transportation Engineering from the University of New South Wales (1996).

HISTORY OF EMPLOYMENT

He is a professional bureaucrat at the DKI Jakarta Provincial Government. During his career, he has served various strategic positions, such as the Section Head of North Jakarta SDPU (since 1998); Section Head of Road and Bridge Technical Plan at DPU DKI Jakarta (since 2001); Section Head of Road Network Technical Development, Road Technical Development Subsection at DPU DKI Jakarta (2001-2006); Head of Road SDPU of Central Jakarta Administrative City (2006-2009); Head of Road SDPU of West Jakarta Administrative City (2009-2012); Road Department Head at Public Works Office of DKI Jakarta Province (2012-2014); Head of Road of Public Works Office of South Jakarta Administrative City (2014-2015); and Head of Department of Highway DKI Jakarta Province (2015-present). Head Office of Bina Marga Jakarta (2015 - 2018); and Assistant for Development and Environment Regional Secretary Jakarta Capital City (2018 - now).

CONCURRENT POSITION

He concurrently serves as Assistant for Development and Environment of the Regional Secretary, DKI Jakarta Province.

AFFILIATION

Yuzmada Faizal has an affiliation with the Ultimate/Controlling Shareholder through a position in the DKI Jakarta Provincial Government as the ultimate owner of the Company. Yuzmada Faizal's position as the Company's Commissioner has gone through fit and proper test. In addition, Yuzmada Faizal has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, Yuzmada Faizal does not own the Company's shares.



ZULFIKRI

Komisaris
Periode Jabatan: 4 Mei 2018 - RUPS Tahun 2022,
Periode Pertama

Commissioner
Period of Office: May 4, 2018 - 2022 Annual GMS,
First Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun
Kelahiran Lintau, 9 Juli 1962

DOMISILI

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Komisaris melalui Keputusan Sirkular RUPS PT MRT Jakarta Tanggal 4 Mei 2018. Pengangkatan untuk periode pertama.

PENDIDIKAN

Sarjana: Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1987)
Pascasarjana : Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya, Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung (1990)
Pascasarjana: Ekonomi Transportasi, Program Pasca Sarjana Universitas LYON II ENTREQ, Perancis (1997)

PENGALAMAN KERJA

Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian (November 2017 - Sekarang); Direktur Prasarana Perkeretaapian (Mei 2017 - November 2017); Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Mei 2016 - Mei 2017); Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Multimoda (Februari 2014 - Mei 2016); Kepala Bagian Perencanaan (Januari 2011 - Februari 2014).

RANGKAP JABATAN

Selain sebagai Komisaris pada PT MRT Jakarta, menjabat juga sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Lembaga Kementerian Perhubungan (2017-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI

Zulfikri memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Zulfikri sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Zulfikri tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Zulfikri tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 56
was born in Lintau, July 9, 1962

DOMICILE

South Tangerang, Banten, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Appointed as Commissioner through PT MRT Jakarta GMS Circular Decision dated May 4, 2018. Appointment for the first period.

EDUCATION

Bachelor of Civil Engineering and Planning, Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1987)
Master of System and Highway Engineering, Post Graduate Program Bandung Institute of Technology, Bandung (1990)
Master of Transportation Economics, Postgraduate Program University of LYON II ENTREQ, France (1997)

HISTORY OF EMPLOYMENT

He now serves as Director General of Railways (November 2017 - present); Railway Infrastructure Director (May 2017 - November 2017); Railway Traffic and Transportation Director (May 2016 - May 2017); Head of Multimodal Research and Development Center (February 2014 - May 2016); Head of Planning Section (January 2011 - February 2014).

CONCURRENT POSITION

He concurrently serves as Director General of Railways, Ministry of Transportation.

AFFILIATION

Zulfikri has an affiliation with the Ultimate/Controlling Shareholder through a position at the Ministry of Transportation as the Company's ultimate owner entity. Zulfikri's position as the Company's Commissioner has gone through fit and proper test. In addition, Zulfikri has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, Zulfikri does not own the Company's shares.



PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



MUKHTASOR

Komisaris
Periode Jabatan: Periode Jabatan: 29 Oktober
2018 - RUPS Tahun 2022, Periode Pertama

Commissioner
Period of Office: October 29, 2018 - 2022 Annual
GMS, First Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Blitar, 20 April 1969

DOMISILI

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 29 Oktober 2018, Periode Pertama.

PENDIDIKAN

1993: Sarjana Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
1998: Master of Engineering, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland (MUN), Canada
2001: Doctor of Philosophy, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada.

PENGALAMAN KERJA

Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014); Penasehat Senior Direktur Utama PT Pertamina (2015-2016); Anggota Dewan Penasehat Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2017); dan Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (2009-sekarang).

RANGKAP JABATAN

Selain sebagai Komisaris pada PT MRT Jakarta, menjabat juga sebagai Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

HUBUNGAN AFILIASI

Tidak mempunyai hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham.

Kepemilikan Saham MRT Jakarta

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Mukhtasor tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 49
was born in Blitar, April 20, 1969

DOMICILE

Surabaya, East Java, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Appointed as Commissioner through Circular Decision of PT MRT Jakarta Shareholders dated October 29, 2018, First Period.

EDUCATION

Bachelor of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Sepuluh November Institute of Technology (ITS)
1998 : Master of Engineering, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland (MUN), Canada
2001 : Doctor of Philosophy, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada.

HISTORY OF EMPLOYMENT

He once served as members of National Energy (2009 - 2014); Senior Advisers of the Chairman PT Pertamina (2015 - 2016); Members of the Advisory Board of the Ministry of Environment and Forestry Minister (2015 - 2017); and as a Professor at Institute of Technology (ITS), Surabaya (2009 - Now).

CONCURRENT POSITION

He concurrently serves as Professor at Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS).

AFFILIATION

Has no affiliation with either members of the Board of Commissioners, other Directors, or with Shareholders.

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, Mukhtasor does not own the Company's shares.



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



WILLIAM P. SABANDAR

Direktur Utama

Periode Jabatan: 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Kedua

President Director

Period of Office: March 21, 2018 - 2023 Annual GMS, Second Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Makassar, 04 November 1966

DOMISILI

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

William menjabat sebagai Direktur Utama sejak 21 Oktober 2016 sesuai keputusan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 51 Tanggal 21 Oktober 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., merupakan periode ke-2.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, (1990), Master (S2) Teknik Transportasi dari Universitas New South Wales, Australia (2000), Doktor Geografi Transportasi dari Universitas Canterbury, Selandia Baru (2004).

PENGALAMAN KERJA

William memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman yang solid dalam pembangunan dan manajemen krisis di berbagai bidang, termasuk sebagai Kepala Rekonstruksi Kepulauan Nias (2005-2009); Utusan Khusus Sekretaris Jenderal ASEAN merangkap Kepala Operasi untuk Rekonstruksi Myanmar (2009-2010); Direktur Corporate Affairs Sekretariat ASEAN (2011-2012); Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2012-2014); Kepala Operasi Satuan Tugas Nasional REDD+ (2014-2015); Penasehat Senior Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap Kepala Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2015-2016).

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, William P. Sabandar tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 52
was born in Makassar, November 4, 1966

DOMICILE

South Tangerang, Banten, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

William has been serving as the Company's President Director since October 14, 2016 pursuant to the Resolution of 2016 GMS through Deed No. 51 dated October 21, 2016, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary, and is his 2nd period serving in the Company.

EDUCATION

Bachelor of Civil Engineering, University of Hasanuddin, (1990), Master of Transportation Engineering from University of New South Wales, Australia (2000), Doctor of Transportation Geography from University of Canterbury, New Zealand (2004).

HISTORY OF EMPLOYMENT

William P. Sabandar has more than 25 years of solid experience in the development and management of crisis in various areas, including as Head of Nias Island Reconstruction (2005-2009); Special Representative of the Secretary-General of ASEAN cum Head of Operations for Myanmar Reconstruction (2009-2010); Director of Corporate Affairs of the ASEAN Secretariat (2011-2012); Expert Assistant to the Head of Presidential Work Unit for Development Monitoring and Control (UKP4) (2012-2014); Chief of Operations of the National REDD+ Task Force (2014-2015); Senior Advisor to the Minister of Energy and Mineral Resources cum Head of the National Task Force on Accelerated Development of Renewable Energy and Energy Conservation (2015-2016).

CONCURRENT POSITION

Has no concurrent position

AFFILIATION

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors and Major / Controlling Shareholders

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, William P. Sabandar does not own the Company's shares.



PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE



SILVIA HALIM

Direktur Konstruksi
Periode Jabatan: 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Kedua

Construction Director
Period of Office: March 21, 2018– 2023 Annual GMS, Second Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Jakarta, 18 Juni 1982

DOMISILI

Denpasar, Bali, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Silvia mulai menjabat sebagai Direktur Konstruksi sejak 24 Agustus 2016 sesuai keputusan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., merupakan periode ke-2.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Nanyang Technological University, Singapura (2004).

Pengalaman Kerja

Project Manager, Road Projects Group di Land Transport Authority (LTA) Singapura, (2004-2016).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham MRT Jakarta

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Silvia Halim tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 36
was born in Jakarta, June 18, 1982

DOMICILE

Denpasar, Bali, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Silvia Halim has been serving as the Company's Construction Director since August 24, 2016 pursuant to the Resolution of 2016 GMS through Deed No. 48 dated September 13, 2016, of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH., Notary, and is her 2nd period serving in the Company.

EDUCATION

Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from Nanyang Technological University, Singapore (2004)

HISTORY OF EMPLOYMENT

Project Manager for Road Projects Group at Land Transport Authority (LTA) of Singapore, (2004-2016).

CONCURRENT POSITION

Has no concurrent position

AFFILIATION

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors and Major / Controlling Shareholders

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, Silvia Halim does not own the Company's shares.



TUHIYAT

Direktur Keuangan dan Administrasi
Periode Jabatan: 21 Maret 2018-RUPS Tahun
2023, Periode Kedua

Finance and Administration Director
Period of Office: March 21, 2018– 2023 Annual
GMS, Second Period

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Serang, 2 Februari 1966

DOMISILI

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Tuhiyat mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi sejak 23 Maret 2013 sesuai RUPS Tahun 2013 melalui Akta No. 94 Tanggal 22 Maret 2013, Notaris Yuliati Widyadhari, SH. Jis, merupakan periode ke-2.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994) dan Magister (S2) Manajemen di Universitas Krisnadwipayana, Jawa Barat (2000).

PENGALAMAN KERJA

Berkarier dalam bidang audit dan keuangan. Beliau Memiliki pengalaman profesi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987-2001); Senior Internal Auditor PT Antam (Persero) Tbk (2001-2004); Manajer Accounting PT Antam (Persero) Tbk (2004-2005), Asisten Senior Manager Accounting PT Antam (Persero) Tbk (2005-2006), Senior Manager Accounting & Budgeting PT Antam (Persero) Tbk (2006-2008), Senior Manajer Treasury, Tax and Insurance PT Antam (Persero) Tbk (2008-2012).

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Tuhiyat tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 52
was born in Serang, November 2, 1966

DOMICILE

South Tangerang, Banten, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Tuhiyat has been serving as the Company's Finance and Administration Director since March 23, 2013 pursuant to the Resolution of 2013 GMS through Deed No. 94 dated March 22, 2013, of Yuliati Widyadhari, SH, Notary, Jis and is his 2nd period serving in the Company.

EDUCATION

Bachelor of Accounting from State College of Accounting (STAN) (1994) and Master of Management from University of Krisnadwipayana, West Java (2000).

HISTORY OF EMPLOYMENT

He has expertise and experiences in audit and finance. Tuhiyat's professional experiences are gained during his service at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1987-2001); as a Senior Internal Auditor of PT Antam (Persero) Tbk (2001-2004); Manager of Accounting of PT Antam (Persero) Tbk (2004-2005), Assistant Senior Manager of Accounting of PT Antam (Persero) Tbk (2005-2006), Senior Manager of Accounting & Budgeting of PT Antam (Persero) Tbk (2006-2008), and Senior Manager of Treasury, Tax and Insurance of PT Antam (Persero) Tbk (2008-2012).

CONCURRENT POSITION

Has no concurrent position

AFFILIATION

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors and Major / Controlling Shareholders

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, William P. Sabandar does not own the Company's shares.



PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE



MUHAMMAD EFFENDI

Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Periode Jabatan: 29 Oktober 2018 - RUPS Tahun
2023, Periode Pertama

*Operations and Maintenance Director
Period of Office: October 29, 2018 – 2023 Annual
GMS, First Period*

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Palembang, 1 Maret 1964

DOMISILI

Kotamadya, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Muhammad Effendi mulai menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan sejak tanggal 29 Oktober 2018 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham diluar RUPS.

PENDIDIKAN

Diploma di bidang *Occupational Safety and Health (K3)* di Australian Center for Work Safety, Australia (1998), Sarjana (S1) Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, (1989), dan Magister (S2) Management di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI)-Monash (2003).

PENGALAMAN KERJA

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur, Muhammad Effendi adalah Kepala Divisi Manajemen Proyek untuk Konstruksi 2 PT MRT Jakarta (2017-2018) yang menangani pembangunan jalur dan stasiun bawah tanah MRT Jakarta fase I. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Divisi Konstruksi dan Penasehat Konstruksi Rasgas Company Ltd di Qatar selama 12 tahun (2005-2017). Muhammad Effendi dipercaya memegang tanggung jawab sebagai Direktur dan Manager di sejumlah perusahaan sejak 1997 hingga 2005.

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Muhammad Effendi tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 54
was born in Palembang, March 1, 1964

DOMICILE

DKI Jakarta, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Muhammad Effendi was appointed as the Company's Operation and Maintenance Director by the Circular Decision of PT MRT Jakarta Shareholders dated October 29, 2018.

EDUCATION

Diploma in Occupational Health and Safety (K3) from Australian Center for Work Safety, Australia (1998), Bachelor of Civil Engineering from Faculty of Engineering, Parahyangan Catholic University, Bandung, (1989), and Magister Management, Indonesian Institute for Management Development (IPMI) - Monash (2003).

HISTORY OF EMPLOYMENT

Before being appointed as Director, Muhammad Effendi was Head of Project Management Division for Construction 2 of PT MRT Jakarta (2017-2018) which handled the lines construction and underground station Phase I of MRT Jakarta. Previously, he was Head of Construction and Advisory Construction of Rasgas Company Ltd in Qatar for 12 years (2005-2017). Muhammad Effendi was trusted to hold responsibility as Director and Manager in a number of companies since 1997 to 2005.

CONCURRENT POSITION

Has no concurrent position

AFFILIATION

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors and Major / Controlling Shareholders

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, Silvia Halim does not own the Company's shares.



GHAMAL PERIS

Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis
Periode Jabatan: 29 Oktober 2018 - RUPS Tahun
2023, Periode Pertama

*Business Development and Support Director
Period of Office: October 29, 2018 – 2023 Annual
GMS, First Period*

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Jakarta, 11 Februari 1980

DOMISILI

Kotamadya, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Ghamal mulai menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis sejak tanggal 29 Oktober 2018 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham diluar RUPS.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia, Depok (2003), Master (S2) of Business Administration dari HEC-Paris, Prancis (2012).

PENGALAMAN KERJA

Berkarir pertama kali di PT Nestle Indonesia sebagai Head of Area (2003). Kemudian berkarier di Sodexo Benefits and Rewards Services (BRS) Indonesia dengan beberapa jabatan pernah dipercayakan kepadanya, antara lain Project Manager (2003-2006) dan Marketing & Business Development Manager - Member of Executive Committee (2006-2009); hingga akhirnya dipercaya untuk menduduki jabatan di Sodexo BRS International sebagai International Development Manager - Gift Market Paris, Prancis (2009-2013) dan Business Development Director Asia, Singapura.

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Ghamal Peris tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian
Age of 39
was born in Jakarta, February 11, 1980

DOMICILE

DKI Jakarta, Indonesia

HISTORY OF APPOINTMENT

Ghamal was appointed as the Company's Business Development and Support Director by the Circular Decision of PT MRT Jakarta Shareholders dated October 29, 2018.

EDUCATION

Bachelor of Economic Management from University of Indonesia, Depok (2003), Master of Business Administration from HEC-Paris, France (2012)

HISTORY OF EMPLOYMENT

Started his career at PT Nestle Indonesia as Head of Area (2003). Then a career at Sodexo Benefits and Rewards Services (BRS) Indonesia with several positions entrusted to him, including Project Manager (2003-2006) and Marketing & Business Development Manager - Member of Executive Committee (2006-2009); until finally being trusted to occupy position at Sodexo BRS International as International Development Manager - Gift Market Paris, France (2009-2013) and Business Development Director Asia, Singapore.

CONCURRENT POSITION

Has no concurrent position

AFFILIATION

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors and Major / Controlling Shareholders

SHARE OWNERSHIP OF MRT JAKARTA

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Therefore, William P. Sabandar does not own the Company's shares.



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



TUBAGUS HIKMATULLAH

Kepala Divisi *Corporate Secretary*/ Head of *Corporate Secretary Division*

Menjabat sejak: 01 Desember 2014

Latest Position: December 1, 2014

Warga negara: Indonesia
Usia: 46 tahun
Domisili: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 September 2014
Riwayat Pendidikan: S2 Finance, University of Wollongong, Australia, 1999

Nationality: Indonesian
Age: 46 Years old
Domicile: South Tangerang, Banten, Indonesia
Joint Date: September 1, 2014
History of Education: Master of Finance from University of Wollongong, Australia



MUHAMAD KAMALUDDIN

Kepala Divisi *Corporate Strategy & Planning*/ Head of *Corporate Strategy & Planning Division*

Menjabat sejak: 03 Juli 2017

Latest Position: July 3, 2017

Warga negara: Indonesia
Usia: 44 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 3 April 2017
Riwayat Pendidikan: S2 Business Administration, London Business School, 2008

Nationality: Indonesian
Age: 44 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: April 3, 2017
History of Education: Master of Business Administration, London Business School, 2008



ERNIE WIDIANTY

Kepala Divisi *Risk, Quality & Safety Management*/ Head of *Risk, Quality & Safety Management Division*

Menjabat sejak: 01 Desember 2014

Latest Position: December 1, 2014

Warga negara: Indonesia
Usia: 45 tahun
Domisili: DKI Jakarta
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Januari 2010
Riwayat Pendidikan: S2 Business Administration, Nanyang Technological University, Singapura, 2009

Nationality: Indonesian
Age: 45 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: January 1, 2010
History of Education: Master of Business Administration, Nanyang Technological University, Singapore, 2009



ANDY REVY ROHADIAN

Kepala Divisi *Internal Audit & Control*/ Head of *Internal Audit & Control Division*

Menjabat sejak: 06 Juni 2017

Latest Position: June 6, 2017

Warga negara: Indonesia
Usia: 52 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 6 Maret 2017
Riwayat Pendidikan: D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1996

*Nationality: Indonesian
Age: 52 Years old
Domicile: Bogor, West Java, Indonesia
Joint Date: March 6, 2017
History of Education: Diploma IV State Accounting College (STAN), 1996*



MEGA INDAHWATI NATANGSA T.

Kepala Divisi *Railway Operation*/ Head of *Railway Operation Division*

Menjabat sejak: 02 Februari 2017

Latest Position: February 2, 2017

Warga negara: Indonesia
Usia: 35 tahun
Domisili: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Oktober 2009
Riwayat Pendidikan: S2 Business Administration and Engineering HTW Berlin, 2009

*Nationality: Indonesian
Age: 35 Years old
Domicile: Bekasi, West Java, Indonesia
Joint Date: October 1, 2009
History of Education: Master of Business Administration and Engineering HTW Berlin, 2009*



ASEP SOLIHIN PERTAMANA

Kepala Divisi *Railway Maintenance*/ Head of *Railway Maintenance Division*

Menjabat sejak: 21 Maret 2018

Latest Position: March 21, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 42 tahun
Domisili: Depok, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 5 September 2013
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2006

*Nationality: Indonesian
Age: 42 Years old
Domicile: Depok, West Java, Indonesia
Joint Date: September 5, 2013
History of Education: Bachelor of Electrical Engineering, University of Indonesia, 2006*



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



RR MUNGKI INDRIATI PRATIWI

Kepala Divisi *Business Development & Commercial*/ Head of *Business Development & Commercial Division*

Menjabat sejak: 12 Maret 2017

Latest Position: March 12, 2017

Warga negara: Indonesia
Usia: 44 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 4 Desember 2017
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Arsitektur,
Universitas Indonesia, 1998

*Nationality: Indonesian
Age: 44 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: December 4, 2017
History of Education: Bachelor of
Architectural Engineering, University of
Indonesia, 1998*



AIDIN BARLEAN

Kepala Divisi *Business Support*/ Head of *Business Support Division*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 48 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Maret 2016
Riwayat Pendidikan: S1 Ilmu Hukum,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996

*Nationality: Indonesian
Age: 48 Years old
Domicile: Bogor, West Java, Indonesia
Joint Date: March 1, 2016
History of Education: Bachelor of Law, Gajah
Mada University, Yogyakarta, 1996*



WENI MAULINA

Kepala Divisi *Engineering*/ Head of *Engineering Division*

Menjabat sejak: 01 November 2018

Latest Position: November 01, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 13 Agustus 2010
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Institut Teknologi Bandung, 2009

*Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: August 13, 2010
History of Education: Bachelor of Civil
Engineering, Bandung Institute of
Technology, 2009*



RIFKIANDI DARAJATUN

Kepala Divisi *Project Management Office*/ Head of *Project Management Office Division*

Menjabat sejak: 18 April 2018

Latest Position: April 18, 2018

Warga negara: Indonesia

Nationality: Indonesian

Usia: 45 Tahun

Age: 45 Years old

Domisili: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Domicile: South Tangerang, Banten, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta: 2 Januari 2018

Joint Date: January 2, 2018

Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, 1997

History of Education: Bachelor of Physics Engineering, Bandung Institute of Technology, 1997



ARIF RAHMAT

Kepala Divisi *Project Management for Railway System* / Head of *Project Management for Railway System Division*

Menjabat sejak: 15 Januari 2018

Latest Position: January 15, 2018

Warga negara: Indonesia

Nationality: Indonesian

Usia: 49 tahun

Age: 49 Years old

Domisili: DKI Jakarta, Indonesia

Domicile: DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta: 8 Maret 2010

Joint Date: March 8, 2010

Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, 1994

History of Education: Master of Civil Engineering, Trisakti University, 1994



AGUNG PRAMONO

Kepala Divisi *Information System & Technology*/ Head of *Information System & Technology Division*

Menjabat sejak: 18 April 2018

Latest Position: April 18, 2018

Warga negara: Indonesia

Nationality: Indonesian

Usia: 40 tahun

Age: 40 Years old

Domisili: DKI Jakarta, Indonesia

Domicile: DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta: 13 Maret 2017

Joint Date: March 13, 2017

Riwayat Pendidikan: S2 Manajemen, Universitas Prasetya Mulya, Jakarta, 2006

History of Education: Master of Management, Prasetya Mulya University, Jakarta, 2006



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



ARINA IMAWATI

Kepala Divisi Finance & Accounting/ Head of Finance & Accounting Division

Menjabat sejak: 12 Februari 2018

Latest Position: February 12, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 40 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 12 Februari 2018
Riwayat Pendidikan: S2 Manajemen,
Universitas Prasetya Mulya, Jakarta

Nationality: Indonesian
Age: 40 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: February 12, 2018
History of Education: Master of
Management, Prasetya Mulya University,
Jakarta



HERU NUGROHO

Kepala Divisi Project Management For Construction 1 & 2 Head of Project Management For
Construction 1 & 2 Division

Menjabat sejak: 16 Januari 2017

Latest Position: January 16, 2017

Warga negara: Indonesia
Usia: 54 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 September
2009
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut
Teknologi Bandung, 1990

Nationality: Indonesian
Age: 54 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: September 1, 2009
History of Education: Bachelor of Civil
Engineering, Bandung Institute of
Technology, 1990



AHMAD PRATOMO

Kepala Departemen Corporate Communication & Management/ Head of Corporate
Communication & Management Department

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: Depok, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Juni 2015
Riwayat Pendidikan: S2 Manajemen,
Universitas Mercu Buana, 2016

Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: Depok, West Java, Indonesia
Joint Date: June 1, 2015
History of Education: Master of
Management, Mercu Buana University, 2016



NUZULUL IMAN

Kepala Departemen Legal/ Head of Legal Department

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 19 September 2016
Riwayat Pendidikan: S2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2014

*Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: September 19, 2016
History of Education: Master of Law, University of Indonesia, 2014*



GITA SEPTIANINGSIH

Kepala Departemen Risk & Quality Management/ Head of Risk & Quality Management Department

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 3 Januari 2011
Riwayat Pendidikan: S2 Manajemen, Universitas Trisakti, 2015

*Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: January 3, 2011
History of Education: Master of Management, Trisakti University, 2015*



MASUM ASIM

Kepala Departemen Project Management for Operation & Maintenance/ Head of Project Management for Operation & Maintenance Department

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 38 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 April 2014
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Elektro ISTN, 2004

*Nationality: Indonesian
Age: 38 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: April 1, 2014
History of Education: Bachelor of Electrical Engineering ISTN, 2004*



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



ABDUL WAHID NURKHOLIS

Kepala Departemen *Operation Control Center Office*/ Head of *Operation Control Center Office Department*

Menjabat sejak: 02 Januari 2019

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 2 Mei 2017
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Elektro,
Universitas Mercu Buana, 2008

Latest Position: January 2, 2019

*Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: May 2, 2017
History of Education: Bachelor of Electrical
Engineering, Mercu Buana University, 2008*



MUCHAMAD IQBAL BIMO ARIFANTO

Kepala Departemen *Station Service*/ Head of *Station Service Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 29 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 5 Januari 2015
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Industri,
Universitas Indonesia, 2017

Latest Position: May 31, 2018

*Nationality: Indonesian
Age: 29 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: January 5, 2015
History of Education: Master of Industrial
Engineering, University of Indonesia, 2017*



NOVRIE FRANSISCUS PINEDENDI

Station Master 1/ *Station Master 1*

Menjabat sejak: 7 Agustus 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 41 tahun
Domisili: Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 7 Mei 2018
Riwayat Pendidikan: S1 Manajemen, STIE
Pioneer Manado, 2003

Latest Position: August 7, 2018

*Nationality: Indonesian
Age: 41 Years old
Domicile: Bekasi, West Java, Indonesia
Joint Date: May 7, 2018
History of Education: Bachelor of
Management, STIE Pioneer Manado, 2003*



CHAIR AMIN

Station Master 2/ Station Master 2

Menjabat sejak: 4 September 2018

Latest Position: September 4, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 43 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 4 Juni 2018
Riwayat Pendidikan: S1 Komunikasi,
Universitas Mercu Buana, 2018

*Nationality: Indonesian
Age: 43 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: June 4, 2018
History of Education: Bachelor of
Communication, University of Mercu Buana,
2018*



BAFRIS WALYU SIREGAR

Station Master 3/ Station Master 3

Menjabat sejak: 4 September 2018

Latest Position: September 4, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 49 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 21 Juni 2018
Riwayat Pendidikan: S1 Manajemen, STIE
MIJI, 2003

*Nationality: Indonesian
Age: 49 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: June 21, 2018
History of Education: Bachelor of
Management, STIE MIJI, 2003*



ACHMAD YUNADA

Kepala Departemen Driver Office/ Head of Driver Office Department

Menjabat sejak: 4 September 2018

Latest Position: September 4, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 42 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 4 Juni 2018
Riwayat Pendidikan: S1 Manajemen,
Universitas Indonesia, 2001

*Nationality: Indonesian
Age: 42 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: June 4, 2018
History of Education: Bachelor of
Management, University of Indonesia, 2001*



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



HENDAR KUSNANDAR

Kepala Departemen *Rolling Stock Maintenance*/ Head of *Rolling Stock Maintenance Department*

Menjabat sejak: 15 Januari 2018

Latest Position: January 15, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 30 tahun
Domisili: Kuningan, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 6 Maret 2012
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Mesin,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

*Nationality: Indonesian
Age: 30 Years old
Domicile: Kuningan, West Java, Indonesia
Joint Date: March 6, 2012
History of Education: Master of Mechanical
Engineering, University of Indonesia,
Jakarta, 2012*



HAMDALAH HAZHAR

Kepala Departemen *Rolling Stock Depot & Workshop Maintenance*/ Head of *Rolling Stock Depot & Workshop Maintenance Department*

Menjabat sejak: 3 Januari 2019

Latest Position: January 3, 2019

Warga negara: Indonesia
Usia: 29 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 5 Maret 2012
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Mesin,
Universitas Indonesia, 2011

*Nationality: Indonesian
Age: 29 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: March 5, 2012
History of Education: Bachelor of Mechanical
Engineering, University of Indonesia, 2011*



ISMANSYAH

Kepala Departemen *Power, Signal & Telecommunication Maintenance*/ Head of *Power, Signal & Telecommunication Maintenance Department*

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

Latest Position: August 21, 2019

Warga negara: Indonesia
Usia: 37 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 27 November
2014
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Elektro,
Universitas Indonesia, 2009

*Nationality: Indonesian
Age: 37 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: November 27, 2014
History of Education: Bachelor of Electrical
Engineering, University of Indonesia, 2009*



PANJI ARUM BISMANTOKO

Kepala Departemen *Track, Civil & Mechanical Electrical Maintenance/ Head of Track, Civil & Mechanical Electrical Maintenance Department*

Menjabat sejak: 31 Oktober 2018

Latest Position: October 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Februari 2016
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Mesin,
Universitas Indonesia, 2011

*Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: February 1, 2016
History of Education: Bachelor of Mechanical
Engineering, University of Indonesia, 2011*



TENGU ALIA SANDRA

Kepala Departemen *Railway Engineering/ Head of Railway Engineering Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 35 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 7 Juni 2017
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Persinyalan,
Central Queensland University, 2016

*Nationality: Indonesian
Age: 35 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: June 7, 2017
History of Education: Master of Signalling
Engineering, Central Queensland University,
2016*



DEWI SULISTYANINGSIH

Kepala Departemen *Project Monitoring & Control/ Head of Project Monitoring & Control Department*

Menjabat sejak: 30 Juni 2016

Latest Position: June 30, 2016

Warga negara: Indonesia
Usia: 38 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 9 Agustus 2010
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Sipil, Institut
Teknologi Bandung, 2010

*Nationality: Indonesian
Age: 38 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: August 9, 2010
History of Education: Master of Civil
Engineering, Bandung Institute of
Technology, 2010*



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



IMAM DETRIANA

Kepala Departemen *Quality Assurance & Quality Control*/ Head of *Quality Assurance & Quality Control Department*

Menjabat sejak: 2 Agustus 2018

Latest Position: August 02, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 36 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 2 Mei 2018
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Industri,
Ecole Des Mines De Nantes, 2008

*Nationality: Indonesian
Age: 36 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: May 2, 2018
History of Education: Master of Industrial
Engineering, Ecole Des Mines De Nantes,
2008*



MATIUS ANDY WIDJAJA

Kepala Departemen *Quantity Surveyor & Contract*/ Head of *Quantity Surveyor & Contract Department*

Menjabat sejak: 7 Agustus 2018

Latest Position: August 7, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 40 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 22 Mei 2018
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Sipil, Virginia
Polytechnic Institute and State University

*Nationality: Indonesian
Age: 40 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: May 22, 2018
History of Education: Master of Civil
Engineering, Virginia Polytechnic Institute
and State University*



GUNAWAN

Kepala Departemen *Project Management 1*/ Head of *Project Management 1 Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 33 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 2 Februari 2015
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Sipil,
Universitas Diponegoro, 2010

*Nationality: Indonesian
Age: 33 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: February 2, 2015
History of Education: Bachelor of Civil
Engineering, Diponegoro University, 2010*



INDRA GUNAWAN

Kepala Departemen *Project Management 2*/ *Head of Project Management 2 Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 40 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Oktober 2012
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Mesin,
ITENAS, 2002

*Nationality: Indonesian
Age: 40 Years old
Domicile: Bogor, West Java, Indonesia
Joint Date: October 1, 2012
History of Education: Bachelor of Mechanical
Engineering, ITENAS, 2002*



RIZKI SHEBUBAKAR

Kepala Departemen *Project Management 3*/ *Head of Project Management 3 Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 30 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 17 November 2014
Riwayat Pendidikan: S2 Manajemen,
Universitas Indonesia, 2017

*Nationality: Indonesian
Age: 30 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: November 17, 2014
History of Education: Master of
Management, University of Indonesia, 2017*



YANTO YULIANTO

Kepala Departemen *Signalling, Telecommunication & IT*/ *Head of Signalling,
Telecommunication & IT Department*

Menjabat sejak: 1 Desember 2015

Latest Position: December 1, 2015

Warga negara: Indonesia
Usia: 41 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 17 Februari 2015
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Sipil,
Universitas Indonesia, 2011

*Nationality: Indonesian
Age: 41 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: February 17, 2015
History of Education: Master of Civil
Engineering, University of Indonesia, 2011*



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



NAUSA NUGRAHA SURYA PUTRA

Kepala Departemen Power System/ Head of Power System Department

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 34 tahun
Domisili: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Juli 2015
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Mesin, Universitas Indonesia, 2008

*Nationality: Indonesian
Age: 34 Years old
Domicile: South Tangerang, Banten, Indonesia
Joint Date: July 1, 2015
History of Education: Bachelor of Mechanical Engineering, University of Indonesia, 2008*



MUHAMMAD IRFAN FIRMANSYAH

Kepala Departemen Trackwork/ Head of Trackwork Department

Menjabat sejak: 30 Juni 2016

Latest Position: June 30, 2016

Warga negara: Indonesia
Usia: 34 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 Desember 2014
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009

*Nationality: Indonesian
Age: 34 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: December 1, 2014
History of Education: Bachelor of Civil Engineering, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2009*



PRABOWO SETYO BRAMANTORO

Kepala Departemen Rolling Stock/ Head of Rolling Stock Department

Menjabat sejak: 1 Maret 2018

Latest Position: March 1, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 33 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 23 Oktober 2013
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Elektro, Universitas Trisakti, 2009

*Nationality: Indonesian
Age: 33 Years old
Domicile: Bogor, West Java, Indonesia
Joint Date: October 23, 2013
History of Education: Bachelor of Electrical Engineering, Trisakti University, 2009*



SENO PRANATA

Kepala Departemen *Business Development*/ *Head of Business Development Department*

Menjabat sejak: 19 Februari 2018

Latest Position: February 19, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 34 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 4 Januari 2016
Riwayat Pendidikan: S2 Desain Urban,
Universitas Trisakti, 2012

*Nationality: Indonesian
Age: 34 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: January 4, 2016
History of Education: Master of Urban
Design, Trisakti University, 2012*



CALVINA ANASTASIA HOTMA ASINA SITORUS

Kepala Departemen *Procurement*/ *Head of Procurement Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 31 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 2 Januari 2014
Riwayat Pendidikan: S1 Teknik Industri,
Universitas Katolik Parahyangan, 2013

*Nationality: Indonesian
Age: 31 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: January 2, 2014
History of Education: Bachelor of Industrial
Engineering, Parahyangan Catholic
University, 2013*



HARI SUPRIYANTO

Kepala Departemen *General Affairs*/ *Head of General Affairs Department*

Menjabat sejak: 30 November 2016

Latest Position: November 30, 2016

Warga negara: Indonesia
Usia: 46 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 1 September 2016
Riwayat Pendidikan: S1 Akuntansi STIE
Swadaya, 1997

*Nationality: Indonesian
Age: 46 Years old
Domicile: Bogor, West Java, Indonesia
Joint Date: September 1, 2016
History of Education: Bachelor of
Accounting, STIE Swadaya, 1997*



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE



WENDY PRATOMO

Kepala Departemen *Safety Health Environment Security*/ *Head of Safety Health Environment Security Department*

Menjabat sejak: 21 September 2018

Latest Position: September 21, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 38 tahun
Domisili: Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 21 Juni 2018
Riwayat Pendidikan: S2 Teknik Lingkungan,
UCLA, 2006

*Nationality: Indonesian
Age: 38 Years old
Domicile: Bekasi, West Java, Indonesia
Joint Date: June 21, 2018
History of Education: Master of
Environmental Engineering, UCLA, 2006*



FAJAR DHARMAWAN

Kepala Departemen *Accounting & Financial Control*/ *Head of Accounting & Financial Control Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 32 tahun
Domisili: Tangerang, Banten, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 19 Januari 2015
Riwayat Pendidikan: S2 Administrasi Bisnis
Lembaga Administrasi Negara RI, 2004

*Nationality: Indonesian
Age: 32 Years old
Domicile: Tangerang, Banten, Indonesia
Joint Date: January 19, 2015
History of Education: Master of Business
Administration, Institute of Indonesian State
Administration, 2004*



NOVIADI WIDJAYA

Kepala Departemen *Corporate Finance*/ *Head of Corporate Finance Department*

Menjabat sejak: 31 Mei 2018

Latest Position: May 31, 2018

Warga negara: Indonesia
Usia: 47 tahun
Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 2 Maret 2009
Riwayat Pendidikan: S1 Akuntansi STIE YAI,
2002

Nationality: Indonesian
Age: 47 Years old
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia
Joint Date: March 2, 2009
History of Education: Bachelor of
Accounting, STIE YAI, 2002



RENDI ALHIAL

Kepala Departemen *Human Capital Services*/ *Head of Human Capital Services Department*

Menjabat sejak: 22 November 2016

Latest Position: November 22, 2016

Warga negara: Indonesia
Usia: 34 tahun
Domisili: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di MRT Jakarta: 22 Agustus 2016
Riwayat Pendidikan: S2 Psikologi Klinis,
Universitas Indonesia, 2011

Nationality: Indonesian
Age: 35 Years old
Domicile: Bekasi, West Java, Indonesia
Joint Date: August 22, 2016
History of Education: Master of Clinical
Pysch, University of Indonesia, 2011

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCE DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 520 orang, mengalami peningkatan sebesar 80,56% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2017 yang sebanyak 288 orang. Peningkatan signifikan ini terutama disebabkan perekrutan karyawan Pra-Operasi pada Divisi Operasi dan Pemeliharaan sebagai bagian dari persiapan MRT Jakarta untuk beroperasi. Di tahun 2018, terdapat level organisasi baru, yaitu Kepala Seksi yang diisi oleh 84 karyawan.

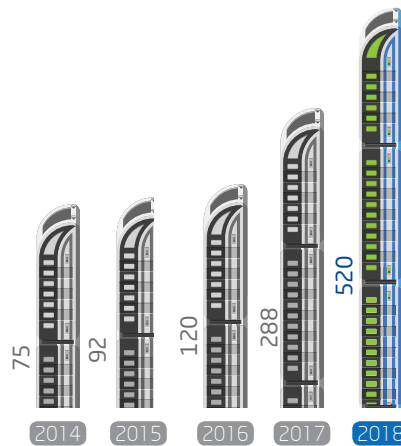
Profil demografi karyawan Perusahaan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC

As of December 31, 2018, the total workforce of PT MRT Jakarta reached 520 employees, an increase of 80.56% compared to the number of employees on December 31, 2017 which were 288 employees. This significant increase was mainly due to the recruitment of Pre-Operation employees in the Operations and Maintenance Division as part of the preparation of Jakarta MRT to operate. In 2018, there was a new level of organization, namely the Section Head which was filled by 84 employees.

The demographic profile of PT MRT Jakarta employees can be seen in the following tables and charts:

Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5(Lima)Tahun Terakhir 2014-2018
Movement of Total Employee in the Last 5 (five) Years 2014-2018



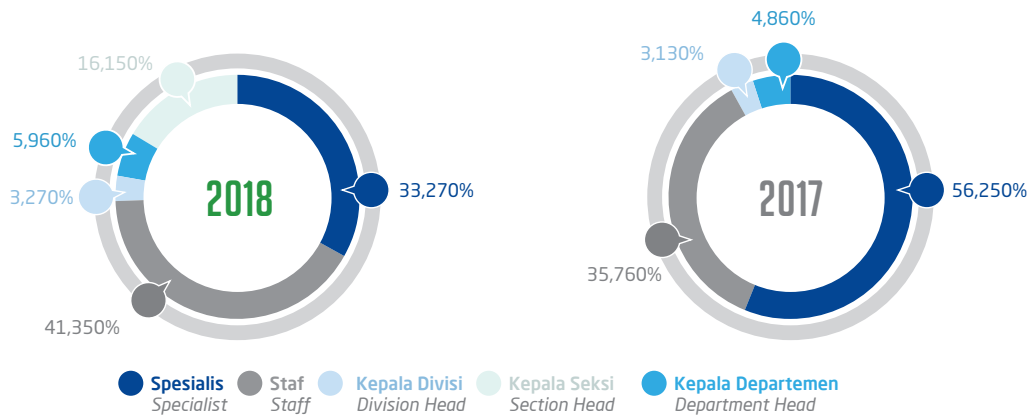
Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Employee Demographic by Organization Level (employee)

Level Organisasi Organization Level	2018				2017			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Kepala Divisi Division Head	12	5	17	3,27%	8	1	9	3,13%
Kepala Departemen Department Head	27	4	31	5,96%	11	3	14	4,86%
Kepala Seksi Section Head	75	9	84	16,15%	-	-	-	-
Spesialis Specialist	109	64	173	33,27%	115	47	162	56,25%



Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Employee Demographic by Organization Level (employee)

Level Organisasi Organization Level	2018				2017			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Staf Staff	162	53	215	41,35%	78	25	103	35,76%
Jumlah Total	385	135	520	100,00%	212	76	288	100,00%



Berdasarkan komposisi level organisasi, terjadi penambahan cukup signifikan pada level Spesialis sebagai bagian dari persiapan Perusahaan jelang beroperasinya MRT Jakarta.

Based on the organizational level composition, there was a significant additions at the Specialist level as part of the Company's preparation prior to the commencement of MRT Jakarta operations.

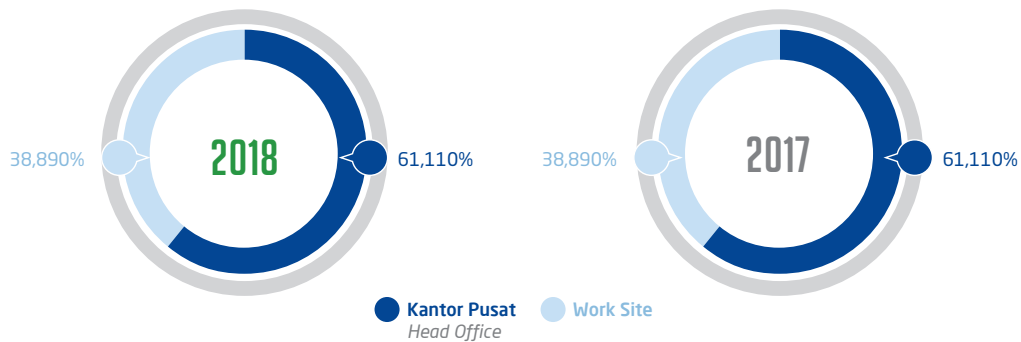
Demografi Karyawan Berdasarkan Direktorat (orang)
Employee Demographic by Directorate (employee)

Direktorat Directorate	2018				2017			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Utama Main	19	22	41	7,88%	17	12	29	10,07%
Konstruksi Construction	47	22	69	13,27%	48	17	65	22,57%
Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	270	68	338	65,00%	113	32	145	50,35%
Pengembangan dan Dukungan Bisnis Finance and Administration	28	18	46	8,85%	0	0	0	0%
Kuangan dan Administrasi	21	5	26	5,00%	34	15	49	17,01%
Jumlah Total	385	135	520	100,00%	212	76	288	100,00%

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCE DEVELOPMENT

Demografi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja/Penempatan (orang) Employee Demographic by Work Location/Placement (employee)

Lokasi Kerja/ Penempatan <i>Work Location/Placement</i>	2018				2017			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	120	74	194	37,31%	140	36	176	61,11%
Work Site	265	61	326	62,69%	82	30	112	38,89%
Jumlah Total	385	135	520	100,00%	212	76	288	100,00%

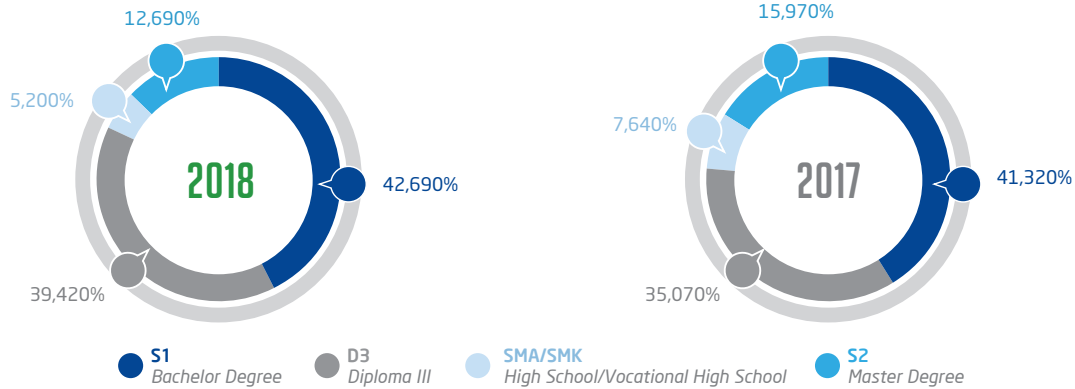


Komposisi karyawan berdasarkan lokasi kerja didominasi oleh karyawan di *Work site*. Hal ini disebabkan oleh Perusahaan sedang mempersiapkan karyawan untuk beroperasi di Maret 2019.

The composition of employees based on work location is dominated by employees at the Work site. This is because the Company is preparing employees to operate in March 2019.

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Employee Demographic by Education (employee)

Tingkat Pendidikan <i>Education</i>	2018				2017			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
S2 <i>Master Degree</i>	48	18	66	12,69%	34	12	46	15,97%
S1 <i>Bachelor Degree</i>	157	65	222	42,69%	80	39	119	41,32%
D3 <i>Diploma III</i>	153	52	205	39,42%	76	25	101	35,07%
SMA/SMK <i>High School/Vocational High School</i>	27	-	27	5,20%	22	-	22	7,64%
Jumlah Total	385	135	520	100,00%	212	76	288	100,00%

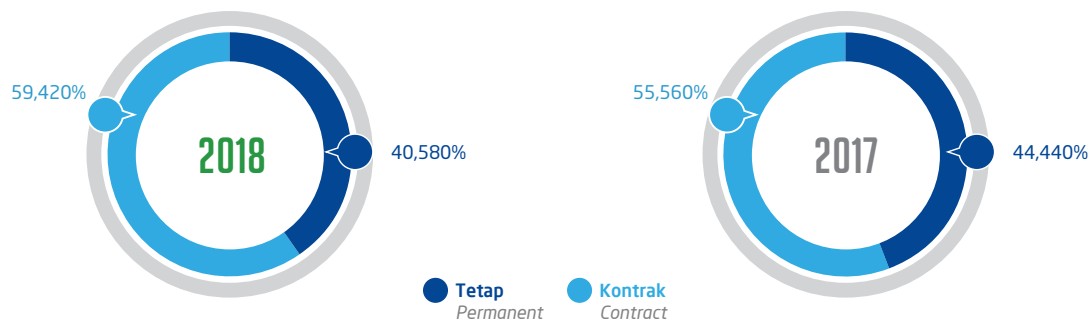


Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi karyawan tahun 2017 dan 2018 didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1); sementara karyawan dengan latar belakang pendidikan Diploma (D3) berada di urutan kedua.

Based on education, employee composition in 2017 and 2018 is dominated by employees with a Bachelor Degree; while employees with Diploma (D3) are in second place.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Demographic by Employment Status (employee)

Status Kepegawaian Employment Status	2018				2017			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Tetap Permanent	148	63	211	40,58%	94	34	128	44,44%
Kontrak Contract	237	72	309	59,42%	118	42	160	55,56%
Sub Jumlah Sub Total	385	135	520	100,00%	212	76	288	100,00%
Outsourcing	47	1	48		22	1	23	
Jumlah Total	432	136	568		234	77	311	



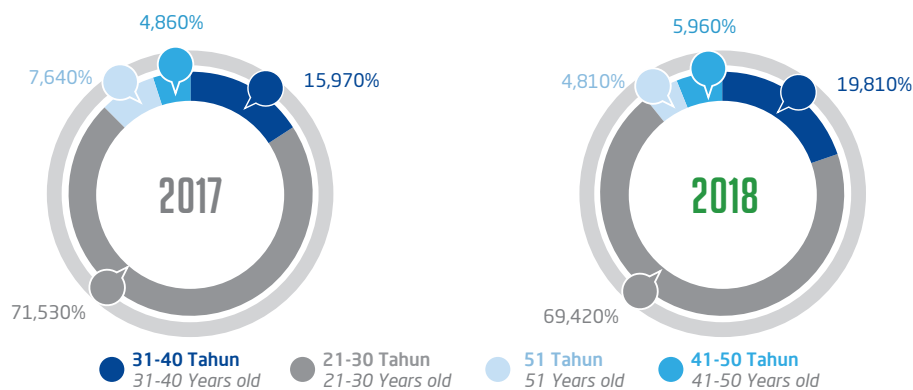
DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCE DEVELOPMENT

Status kepegawaian bagi karyawan Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan tetap adalah karyawan yang telah diangkat secara tetap melalui mekanisme yang berlaku secara internal di lingkup Perusahaan. Perusahaan juga menggunakan karyawan *outsourcing* yang mengisi beberapa fungsi, yaitu *cleaning service, driver, dan messenger*.

Employment Status for the Company's employees is divided into 2 (two), namely permanent employees and contract employees. Permanent employees are employees who have been appointed permanently through a mechanism that applies internally within the Company. The company also uses outsourcing employees who fill several functions, namely cleaning services, drivers, and messengers.

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang) Employee Demographic by Age (employee)

Rentang Usia Age	2018				2017			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
≥ 51 tahun ≥ 51 Years old	25	0	25	4,81%	22	-	22	7,64%
41-50 tahun 41-50 Years old	28	3	31	5,96%	13	1	14	4,86%
31-40 tahun 31-40 Years old	80	23	103	19,81%	29	17	46	15,97%
21-30 tahun 21-30 Years old	252	109	361	69,42%	148	58	206	71,53%
Jumlah Total	385	135	520	100,00%	212	76	288	100,00%



Seperti yang terlihat pada tabel dan bagan di atas, karyawan Perusahaan didominasi oleh SDM yang berada di rentang usia produktif, yaitu karyawan di rentang usia 21-30 tahun dan 31-40 tahun. Komposisi yang cukup besar pada rentang usia produktif akan menjadi potensi besar bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang di masa-masa yang akan datang.

As seen in the table and chart above, the Company's employees are dominated by Human Capital in productive age, ie employees in the age of 21-30 years and 31-40 years. A large composition in the productive age will be a great potential for the Company to be able to grow and develop in the future.



Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographic by Gender (employee)

Gender	2018		2017	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Laki-laki Male	385	74,04%	212	73,61%
Perempuan Female	135	25,96%	76	26,39%
Jumlah Total	520	100,00%	288	100,00%

Lebih lanjut tentang demografi karyawan Perusahaan dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam laporan tahunan ini.

More about the demographics of the Company's employees can be seen in the discussion of Human Capital in the Business Support Function chapter in this annual report.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE COMPETENCE DEVELOPMENT

Sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah, Perusahaan memiliki tugas besar untuk dapat menciptakan nilai tambah terhadap kompetensi, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan kompetensi SDM Perusahaan tidak hanya berorientasi pada optimalisasi SDM sebagai penunjang usaha, namun juga memberikan dampak positif terhadap perilaku SDM Perusahaan, baik sebagai karyawan Perusahaan maupun sebagai anggota masyarakat. Pengembangan SDM Perusahaan dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang mendukung kegiatan yang dilakukan Perusahaan.

As a government-owned business entity, the Company has a big duty to be able to create added value to the competencies, capacities and capabilities of Human Capital (HC). The development of the Company's HC competencies is not only oriented towards optimizing HC as a business support, but also has a positive impact on the behavior of the Company's HC, both as employees of the Company and as members of the community. The development of the Company's HC is carried out through coaching and development to fulfill the competencies and expertise that support the activities carried out by the Company.

Gagasan Besar tentang Pengembangan Kompetensi SDM MRT Jakarta
The Great Concept for the Development of MRT Jakarta HC Competence



Peningkatan nilai profesionalitas karyawan sesuai nilai-nilai Perusahaan
Increasing the Employee Professionalism Value according to Corporate Values



Pengembangan kompetensi, inovasi, kreativitas, kerjasama dan disiplin karyawan
Competence development, innovation, creativity, cooperation and employee discipline



Pengembangan dan peningkatan suasana, metode kerja serta koordinasi antar unit
Development and improvement of atmosphere, work methods and coordination between units



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCE DEVELOPMENT

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi siapa saja yang berkompeten dan memiliki keinginan yang sama untuk dapat bekerja sama di bawah payung PT MRT Jakarta dan tumbuh bersama. Kesempatan terbuka sejak proses seleksi calon karyawan, penerimaan karyawan baru, hingga pengembangan kompetensi dan promosi. Perusahaan tidak memandang latar belakang baik suku, agama, ras, ataupun gender sebagai basis penilaian kinerja karyawan.

The company is committed to provide the widest opportunity for anyone who is competent and has the same desire to be able to work together under the umbrella of PT MRT Jakarta and grow together. Opportunities open since the prospective employee selection process, new employee admissions, to competence development and promotion. The company does not view the background of either ethnicity, religion, race or gender as a basis for evaluating employee performance.

Berikut ini disampaikan pengembangan kompetensi SDM yang mencerminkan kesempatan pengembangan kompetensi berdasarkan level jabatan organisasi dan kesempatan kesetaraan gender:

The following is conveyed the development of HC competencies that reflect competence development opportunities based on the level of organizational positions and opportunities for gender equality:

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2018 Competence Development by Position and Gender Equality Year 2018

Level Jabatan Position	Jumlah Peserta Number of Participants		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Konferensi Conference			
Direktur Director	1	0	1
Kepala Divisi Division Head	5	1	6
Kepala Departemen Department Head	3	2	5
Kepala Seksi Section Head	1	2	3
Spesialis Specialist	12	9	21
Staf Staff	0	0	0
Seminar			
Direktur Director	1	0	1
Kepala Divisi Division Head	2	1	3
Kepala Departemen Department Head	2	1	3
Kepala Seksi Section Head	1	0	1



Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2018
Competence Development by Position and Gender Equality Year 2018

Level Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
Spesialis <i>Specialist</i>	4	4	8
Staf <i>Staff</i>	0	0	0
<i>Sertifikasi</i> <i>Certification</i>			
Direktur <i>Director</i>	0	0	0
Kepala Divisi <i>Division Head</i>	4	1	5
Kepala Departemen <i>Department Head</i>	5	2	7
Kepala Seksi <i>Section Head</i>	33	2	35
Spesialis <i>Specialist</i>	32	18	50
Staf <i>Staff</i>	88	13	101
<i>Training</i>			
Direktur <i>Director</i>	0	0	0
Kepala Divisi <i>Division Head</i>	32	6	38
Kepala Departemen <i>Department Head</i>	84	11	95
Kepala Seksi <i>Section Head</i>	265	45	310
Spesialis <i>Specialist</i>	185	104	289
Staf <i>Staff</i>	477	192	669
<i>Workshop</i>			
Direktur <i>Director</i>	0	0	0
Kepala Divisi <i>Division Head</i>	2	6	8

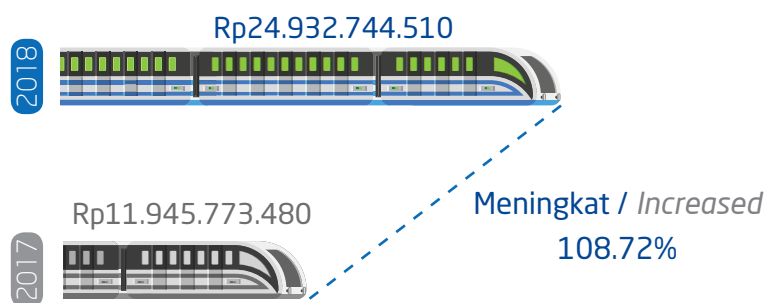


DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCE DEVELOPMENT

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2018
Competence Development by Position and Gender Equality Year 2018

Level Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah Total
Kepala Departemen <i>Department Head</i>	8	1	9
Kepala Seksi <i>Section Head</i>	3	2	5
Spesialis <i>Specialist</i>	10	12	22
Staf <i>Staff</i>	0	0	0

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competence Development Costs



Uraian lengkap terkait kebijakan MRT Jakarta dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam laporan tahunan ini.

A full description of MRT Jakarta policy in managing and developing HC competencies can be seen in the discussion of Human Capital in Business Support Function chapter in this annual report.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

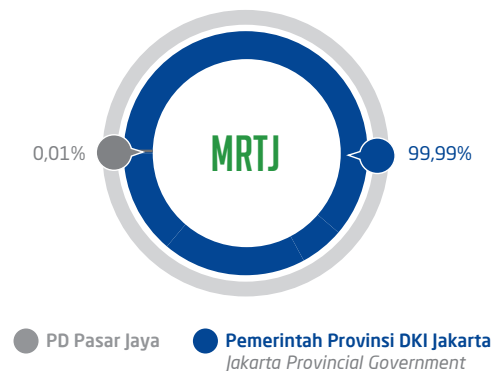
SHARE OWNERSHIP COMPOSITION OF MRT JAKARTA

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-in Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Kepemilikan Saham 5% atau lebih 5% or more Share Ownership			
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta Provincial Government	6.165.307	6.165.307.000.000	99,99%
Kepemilikan Kurang dari 5% Ownership Less than 5%			
PD Pasar Jaya	500	500.000.000	0,01%
Jumlah Total	6.165.807	6.165.807.000.000	100,00%

Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000,-/lembar saham
Share Nominal Value = Rp1,000,000,-/share

Komposisi Pemegang Saham MRT Jakarta per 31 Desember 2018

Shareholders Composition of MRT Jakarta
as of December 31, 2018



INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA OLEH MANAJEMEN KUNCI

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Berikut disampaikan transparansi informasi terkait kepemilikan saham oleh manajemen kunci Perusahaan:

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP IN MRT JAKARTA BY KEY MANAGEMENT

Up to the end of 2018, the Company does not issue shares for the public or share ownership programs for management and employees. Following is the transparency of information regarding share ownership by the Company's key management:



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS COMPOSITION

Nama Name	Jabatan Position	2018		2017	
		Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham Number of Shares (lembar/share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>					
Rukijo	Plt. Komisaris Utama <i>Acting President Commissioner</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Yuzmada Faizal	Komisaris <i>Commissioner</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Zulfikri	Komisaris <i>Commissioner</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Mukhtasor	Komisaris <i>Commissioner</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Direksi <i>Board of Directors</i>					
William P. Sabandar	Direktur Utama <i>President Director</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Silvia Halim	Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Ghamal Peris	Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis <i>Business Development and Support Director</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Tuhayat	Direktur Keuangan dan Administrasi <i>Finance and Administration Director</i>	- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	
Kepemilikan Saham oleh Karyawan <i>Share Ownership by Employee</i>		- Nihil - - Nil -		- Nihil - - Nil -	

Keterangan:

Nihil = tidak memiliki saham Perusahaan

Remarks:

Nil = does not own the Company's shares



INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDER AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDER UP TO NAME OF END OWNERS

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemegang saham utama/pengendali MRT Jakarta dengan kepemilikan langsung sebesar 99,99%, dan kepemilikan tidak langsung melalui PD Pasar Jaya sebesar 0,01%.

DKI Jakarta Provincial Government is the main shareholder / controller of MRT Jakarta with direct ownership of 99.99%, and indirect ownership through PD Pasar Jaya of 0.01%.

Pemegang saham utama/pengendali Perusahaan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,99%. Selain itu, terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap saham Perusahaan, melalui PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya merupakan pendiri sekaligus pemegang saham minoritas Perusahaan sebesar 0,01%. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas pemilik akhir Perusahaan.

The main / controlling shareholder of the Company is DKI Jakarta Provincial Government, with direct ownership of 99.99%. In addition, there is an indirect share ownership by DKI Jakarta Provincial Government towards the Company's shares, through PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya is the founder and minority shareholder of the Company at 0.01%. As such, DKI Jakarta Provincial Government is the ultimate owner of the Company.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya didirikan di tahun 1966 oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah Jakarta. Dari 152 pasar yang dimiliki, PD Pasar Jaya mengelola 148 pasar dengan omset bisnis yang diperdagangkan mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun dengan 105.223 tempat usaha. Berdasarkan survei, pasar-pasar yang dikelola PD Pasar Jaya dikunjungi lebih dari 2 juta pengunjung setiap harinya. Hingga akhir tahun 2018, PD Pasar Jaya dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Regional-Owned Enterprise (PD) Pasar Jaya was established in 1966 by DKI Jakarta Regional Government in order to carry out public services in the area of market area management, fostering market traders, helping to stabilize prices and smooth distribution of goods and services in the Jakarta area. Of the 152 markets owned, PD Pasar Jaya manages 148 markets with traded business turnover reaching more than Rp150 trillion per year with 105,223 business places. Based on the survey, the markets managed by PD Pasar Jaya are visited by more than 2 million visitors every day. Until the end of 2018, PD Pasar Jaya is owned 100% by the DKI Jakarta Provincial Government.

INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

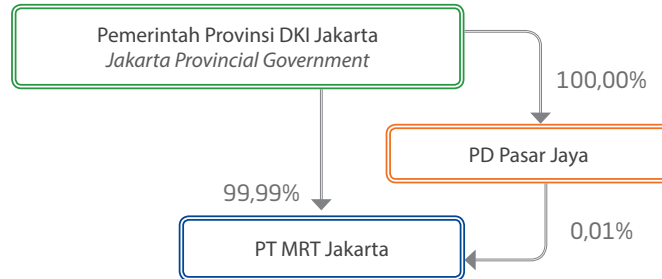
Per 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) ataupun Special Purpose Vehicle (SPV). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

As of December 31, 2018 and the date of submission of this data / information, the Company did not have Subsidiary, Associates, Joint Venture (JV) or Special Purpose Vehicle (SPV). Thus, there is no information regarding the names of subsidiaries and / or associates; share ownership percentage; a description of subsidiary and/or associates' line of business; and a description of subsidiaries and / or associates' operation status.



STRUKTUR GRUP MRT JAKARTA

GROUP STRUCTURE OF MRT JAKARTA



Pemegang saham utama/pengendali Perusahaan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,99%, dan kepemilikan tidak langsung melalui PD Pasar Jaya sebesar 0,01%. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas induk sekaligus entitas pemilik akhir Perusahaan.

The Company's main/controlling shareholder is DKI Jakarta Provincial Government, with direct ownership of 99.99%, and indirect ownership through PD Pasar Jaya of 0.01%. Thus, DKI Jakarta Provincial Government is the parent entity as well as the ultimate entity of the Company.

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

SHARE ISSUE AND LISTING CHRONOLOGY INFORMATION

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak menerbitkan saham kepada publik, tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2018 and the date of submission of this data / information, the Company does not issue shares to the public, does not conduct Initial Public Offering and does not trade in its shares on any stock exchange. Thus there is no information regarding the year of issuance of shares, number of shares, share value, share price for each corporate action, the number of listed shares after each corporate action, and the name of stock exchange where the stock of the Company is listed.

INFORMASI TENTANG PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI DAN/ATAU EFEK LAINNYA

BONDS AND/OR OTHER SECURITIES ISSUE AND LISTING INFORMATION

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2018 and the date of submission of this data/ information, the Company does not issue other securities in any form. Thus there is no information regarding the names of other effects, the year of issuance of other effects, the rate of interest/benefits of other securities, and the date of other securities maturity; other securities offer value; name of the stock exchange where the other securities are listed; and effect of rating.



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang List of Supporting Institutions and Professionals

Nama dan Alamat Name and Address		Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Biaya Costs (Rp)	Periode Penugasan Period of Assignment
Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Ernst & Young (EY) Purwantono, Sungkoro & Surja Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52 Jakarta 12190, Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Audit Laporan Keuangan Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Audit kepatuhan terhadap pengendalian internal <i>Audit of Financial Statements</i> <i>Compliance Audit of laws and regulations</i> <i>Compliance Audit to internal controls</i> 	581.394.418	21 November 2018 s/d 29 Maret 2019 (Periode Waktu Pekerjaan EY) <i>November 21, 2018 until March 29, 2019</i>
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i>	Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710, Indonesia	<p>Memberikan pandangan dan pendapat hukum serta rekomendasi langkah hukum yang komprehensif, memberikan jasa hukum secara keseluruhan, mempersiapkan rancangan atau <i>review</i> serta dokumen dan/atau perjanjian, mewakili dan membantu dalam rapat-rapat dan transaksi, serta pendampingan dalam bentuk perancangan peraturan, <i>legal drafting</i>, hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan.</p> <p><i>Provide legal views and opinions as well as comprehensive legal action recommendations, provide legal services as a whole, prepare designs or reviews and documents and / or agreements, represent and assist in meetings and transactions, as well as assistance in the form of regulatory arrangements, legal drafting, relations industrial and dispute resolution.</i></p>	1.186.466.875	10 Februari 2016 - 7 Februari 2019. <i>February 10, 2016 - February 7, 2019</i>



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang *List of Supporting Institutions and Professionals*

Nama dan Alamat <i>Name and Address</i>		Jenis dan Bentuk Jasa <i>Types and Forms of Services</i>	Biaya <i>Costs (Rp)</i>	Periode Penugasan <i>Period of Assignment</i>
Notaris <i>Notary Public</i>	Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Membuat akta-akta, melegalisir dokumen, mengaktanotasikan perjanjian, identifikasi data yang diperlukan sesuai tugas yang diberikan dan data pendukung lain yang terakit, melaksanakan rapat dalam rangka pengumpulan data, menghadiri rapat dan menindaklanjuti hasil rapat/ koordinasi, melakukan pengecekan keabsahan dokumen dan kewenangan pihak yang akan melakukan perbuatan hukum berdasarkan data yang dikumpulkan, membuat <i>scenario</i> RUPS dan melakukan legal review terhadap Agenda RUPS yang akan dilaksanakan. <i>Drafting deeds, legalizing documents, activating agreements, identifying required data according to assignments and other supporting data, conducting meetings in order to collect data, attending meetings and following up on the results of meetings / coordination, checking the validity of documents and the authority of the party will carry out legal actions based on the data collected, establishing the RUPS scenario and conduct a legal review of the AGMS Agenda to be implemented.</i>	118.200.000	1 Maret 2016 – 27 Februari 2019. <i>March 1, 2016 – February 27, 2019</i>



Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik 6 (enam) Tahun Terakhir 2013-2018
List of Public Accounting Firms and Public Accountants at Last 6 (six) Years 2013-2018

Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firms</i>	Akuntan Publik <i>Public Accountants</i>	Jasa Service	Jasa Lainnya <i>Other Services</i>	Opini <i>Opinion</i>	Biaya <i>Costs</i>
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Drs. David Sungkoro, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018 <i>General Audit on Financial Statements of 2018 Fiscal Year</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance to Regulations and Legislation and Compliance to Internal Control</i>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Fairly in all material respect</i>	Rp581,4 juta
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	Drs. David Sungkoro, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2017 <i>General Audit on Financial Statements of 2017 Fiscal Year</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance to Regulations and Legislation and Compliance to Internal Control</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Rp508,8 juta
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja	E. Batara Manurung, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2016 <i>General Audit on Financial Statements of 2016 Fiscal Year</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance to Regulations and Legislation and Compliance to Internal Control</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Rp480 juta
2015	Purwanto, Sungkoro & Surja	E. Batara Manurung, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2015 <i>General Audit on Financial Statements of 2015 Fiscal Year</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance to Regulations and Legislation and Compliance to Internal Control</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Rp400 juta
2014	Purwanto, Suherman & Surja	E. Batara Manurung, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2014 <i>General Audit on Financial Statements of 2014 Fiscal Year</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance to Regulations and Legislation and Compliance to Internal Control</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Rp335 juta
2013	Purwanto, Suherman & Surja	Drs. David Sungkoro, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2013 <i>General Audit on Financial Statements of 2013 Fiscal Year</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan <i>Compliance to Regulations and Legislation</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Rp288 juta



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATION



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tingkat Pencapaian 92,17% (Memuaskan)
*Occupational Safety and Health Management System
Achievement Rate of 92.17% (Satisfying)*

EMAS/GOLD



Dikeluarkan Oleh
Issued by

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Masa Berlaku Hingga
Validity Period



2022

INFORMASI TENTANG DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

INFORMATION ON ADDRESSES OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCH AND REPRESENTATIVE OFFICE

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi, dan tidak memiliki kantor cabang dan/atau kantor perwakilan. Alamat Perusahaan terdapat pada kantor pusat dan kantor proyek yang telah dicantumkan pada bagian "Informasi Umum dan Identitas Perusahaan" pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Until the end of 2018, the Company does not have subsidiaries or associates, and does not have branch offices and / or representative offices. The Company's address is located at the head office and project offices which have been included in the "General Information and Company Identity" section of the Company Profile chapter in this annual report.



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jakartamrt.co.id. Situs web ini berisi informasi terkini tentang perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta, informasi pengadaan, informasi seputar korporasi, profil Perusahaan, info karier, edukasi awal penggunaan MRT Jakarta saat nanti beroperasi, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The company has an official website www.jakartamrt.co.id. This website contains up-to-date information about the development of the Jakarta MRT project, information on procurement, information about the corporation, company profile, career info, early education on the use of the MRT Jakarta when it operates, up to the latest news. This website is a portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a broad audience.



Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Remarks
Struktur grup perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu <i>Company group structure and shareholder information up to individual end owners</i>	√	Terdapat informasi tentang kepemilikan PT MRT Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>There is information about the ownership of PT MRT Jakarta by the DKI Jakarta Provincial Government</i>
Isi Kode Etik <i>Code of Ethics</i>	√	Terdapat informasi tentang Tata Kelola Perusahaan khususnya Kode Etik <i>There is information about Corporate Governance, especially the Code of Ethics</i>
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. <i>Information on General Meeting of Shareholders (GMS) includes at least the material of agenda discussed in GMS, GMS summary of minutes, and information on important dates, namely the date of GMS announcement, the date of GMS, the date of GMS summary of minutes.</i>	x	PT MRT Jakarta belum menjadi <i>listed company</i> , sehingga tidak terdapat kewajiban untuk memublikasikan hasil RUPS <i>PT MRT Jakarta has not yet become a listed company, so there is no obligation to publish the results of the GMS</i>



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Remarks
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) <i>Annual financial statements (last 5 years)</i>	√	Laporan keuangan telah tercakupkan dalam laporan tahunan (<i>annual report</i>). Pada <i>website</i> PT MRT Jakarta telah di <i>publish Annual Report</i> tahun 2013, 2014, 2015, 2016. <i>The financial statements have been included in the annual report. PT MRT Jakarta's website has published the Annual Report in 2013, 2014, 2015, 2016.</i>
Profil Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors Profile</i>	√	Terdapat informasi tentang profil Dewan Komisaris dan Direksi <i>There is information about the Board of Commissioners and Directors Profile</i>
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal <i>Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit Charter</i>	x	Piagam/Charter masih dalam tahap pengembangan <i>Charter is still under development</i>

√: tersedia pada situs web PT MRT Jakarta

x: belum tersedia pada situs web PT MRT Jakarta

√: available on PT MRT Jakarta website

x: not yet available on PT MRT Jakarta website



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY AND INTERNAL AUDIT UNIT

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM, baik untuk Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan. Pembiayaan pelatihan dan pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Bagi Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan wajib melakukan laporan dan/atau berbagi pengetahuan kepada lainnya.

The Company has a policy to provide training and education with a view to improve the competence and capacity of HR, both for the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees. The training and education cost is entirely the responsibility of the Company. The Board of Commissioners, the Board of Directors and employees attending training and education must report and/or share knowledge with others.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Direksi Board of Directors				
Tuhyat Direktur Administrasi dan Keuangan Administration and Finance Director	Seminar	Kongres dan Seminar XIII Ikatan Akuntansi Indonesia Congress and XIII Seminar of Institute of Indonesia Chartered Accountants	Jakarta, 11-13 Desember 2018 Jakarta, December 11-13, 2018	Ikatan Akuntansi Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants
Muhammad Effendi Direktur Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Director	Konferensi Conference	Underground Singapore 2018 Programme	Singapura, 26-29 September 2018 Singapore, September 26 – 29, 2018	Tunnelling and Underground Construction Society
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
<ul style="list-style-type: none"> Tubagus Hikmatullah Corporate Secretary Division Head Rita Dwi Pramita Good Corporate Governance 	Training	Pelatihan Kerugian Negara Dalam BUMN dan BUMD: Risiko Investasi atau Korupsi Training on State Losses in BUMN and BUMD (SOEs): Investment Risk or Corruption	Bandung, 12-15 Desember 2018 Bandung, December 12-15, 2018	Asia Anti Fraud (AAF)
<ul style="list-style-type: none"> Tubagus Hikmatullah Corporate Secretary Division Head Rita Dwi Pramita Good Corporate Governance 	Workshop	Governance and Risk Culture the Fundamental of GRC Benchmarking and International Workshop	Australia, 25-31 Agustus 2018 Australia, August 25-31, 2018	CRMS Indonesia
Tubagus Hikmatullah Corporate Secretary Division Head	Training	Kegiatan Pelatihan LSS Project Sponsor Lean Six Sigma Project Training Activities of Lean Six Sigma	Jakarta, 28 Juni 2018 Jakarta, June 28, 2018	Unotalent - PT. Karya Mandiri Sejahtera Indonesia
Ahmad Pratomo Corporate Communication and Management Department Head	Konferensi Conference	Conference International Public Relation Summit 2018 (Shifting the Power of Strategic Communication in the Era of Digital Economy) International Public Relations 2018 Summit (Shifting the Power of Strategic Communication in the Era of Digital Economy)	Bali, 3 - 6 November 2018 Bali, November 3-6, 2018	Indonesian Public Relations Summit (IPRS) - Ega Briefings



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY AND INTERNAL AUDIT UNIT

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Ahmad Pratomo Corporate Communication and Management Department Head	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Kompetensi PR Perhumas Batch V Public Relations Competence Certification Batch V	Jakarta, 19-20 September 2018 Jakarta, September 19-20, 2018	Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Public Relations Association of Indonesia
Ahmad Pratomo Corporate Communication and Management Department Head	Training	Pelatihan Leadership dan Six Sigma Training of Leadership and Six Sigma	Jakarta, 5-24 April 2018 Jakarta, April 5-24, 2018	Unotalent - PT. Karya Mandiri Sejahtera Indonesia
Jezzy Dela Puspita Executive Secretary	Konferensi Conference	Conference International Public Relation Summit 2018 (Shifting the Power of Strategic Communication in the Era of Digital Economy) International Public Relations 2018 Summit (Shifting the Power of Strategic Communication in the Era of Digital Economy)	Bali, 3 - 6 November 2018 Bali, November 3-6, 2018	Indonesian Public Relations Summit (IPRS) - Ega Briefings
Rasita Pryandini Executive Secretary	Konferensi Conference	Konferensi The 32rd Annual Summit Convention and Exhibition General Affair Forum 2018 The 32rd Annual Summit Convention and Exhibition General Affair Forum 2018	Bali, 29-31 Agustus 2018 Bali, August 29-31, 2018	GA Forum 2018 Committee
Kartika Tri Utami Corporate Communication Specialist	Konferensi Conference	Digital Marketing and Strategy Innovation Summit	Singapura, 9-12 Oktober 2018 Singapore, October 9-12, 2018	The Innovation Enterprise Ltd
Kartika Tri Utami Corporate Communication Specialist	Training	In House Training Legal Drafting and Formal Report Writing	Jakarta, 19-21 Maret 2018 Jakarta, March 19-20, 2018	Lembaga Administrasi Negara (LAN) National Institute of Public Administration Indonesia (LAN)
Ghassani Herstanti Corporate Communication Specialist	Seminar	Seminar dan Master Class - Citra Pariwisata 2018 Seminar and Master Class - 2018 Citra Pariwisata	Jakarta, 28-29 November 2018 Jakarta, November 28-29, 2018	Citra Pariwisata
Indra Kurnia Corporate Communication Specialist	Training	Pelatihan Tangrams Effectiveness Academy @ Spikes Tangrams Effectiveness Academy @ Spikes	Singapura, 25-29 September 2018 Singapore, September 25-29, 2018	Spikes Asia
Rita Dwi Pramita Good Corporate Governance Specialist Training	Training	Pelatihan Kerugian Negara Dalam BUMN dan BUMD: Risiko Investasi atau Korupsi Training on State Losses in BUMN and BUMD (SOEs): Investment Risk or Corruption	Bandung, 12-15 Desember 2018 Bandung, December 12- 15, 2018	Asia Anti Fraud (AAF)
Indah Maesari Office Support Staff	Training	Pelatihan Advanced Office Management and Effective Administration Skill Advanced Office Management and Effective Administration Skill Training	Bandung, 16-20 Desember 2018 Bandung, December 16- 20, 2018	IPDC Training Institute



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Audit dan Pengendalian Internal <i>Audit and Internal Control</i>				
Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Certified Internal Auditor <i>Certified Internal Auditor Certification</i>	Jakarta, Desember 2018 <i>Jakarta, December 2018</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i> Said Muhammad Ichsan <i>Audit Assurance Specialist</i> 	Seminar	Seminar Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi Pimpinan Institusi/Korporasi <i>Seminar on Implementation of Corruption Prevention Strategy for Institutional / Corporate Leaders</i>	Jakarta, 18 September 2018 <i>Jakarta, September 18, 2018</i>	Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) <i>Forensic Auditors Association of Indonesia (AAFI)</i>
Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i>	Training	Kegiatan Pelatihan LSS Project Sponsor Lean Six Sigma <i>Lean Six Sigma Sponsor LSS Project Training Activities</i>	Jakarta, 28 Juni 2018	Unotalent - PT. Karya Mandiri Sejahtera Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i> Said Muhammad Ichsan <i>Audit Assurance Specialist</i> Rizaldi <i>Internal Control Consulting Services</i> 	Training	Inhouse Training COSO 2013 dan Psikologi Audit <i>COSO 2013 Inhouse Training and Audit Psychology</i>	Jakarta, 14-15 Mei 2018 <i>Jakarta, May 14-15, 2018</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i> Kantheni Utamingtyas <i>Audit Assurance Specialist</i> 	Training	Pelatihan Implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan <i>Training on Implementation of Governance, Risk Management and Compliance</i>	Bandung, 26-27 April 2018 <i>Bandung, April 26-27, 2018</i>	CRMS Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i> Said Muhammad Ichsan <i>Audit Assurance Specialist</i> 	Sertifikasi <i>Certification</i>	Pelatihan dan Sertifikasi ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko <i>ISO 31000 Training and Certification International Risk Management Standards</i>	Bandung, 4-10 Februari 2018 <i>Bandung, February 4-10, 2018</i>	CRMS Indonesia
Andy Revy Rohadian <i>Internal Audit and Control Division Head</i>	Training	Lokakarya COSO <i>COSO Workshop</i>	Jakarta, 8-9 Januari 2018 <i>Jakarta, January 8-9, 2018</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i>
Said Muhammad Ichsan <i>Audit Assurance Specialist</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi dan Konferensi Internasional - Enterprise Risk Management Associate (ERMA) <i>International Certifications and Conferences - Enterprise Risk Management Associate (ERMA)</i>	Yogyakarta, 5-8 Desember 2018 <i>Yogyakarta, December 5-8, 2018</i>	CRMS Indonesia
Said Muhammad Ichsan <i>Audit Assurance Specialist</i>	Seminar	Acara Wisuda Qualified Internal Auditor dan Seminar Nasional Internal Audit <i>Graduation Ceremony for Qualified Internal Auditors and National Internal Audit Seminars</i>	Yogyakarta, 17-20 April 2018 <i>Yogyakarta, April 17-20, 2018</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i>



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY AND INTERNAL AUDIT UNIT

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Said Muhammad Ihsan Audit Assurance Specialist	Training	Pelatihan Kontrak Konstruksi - FIDIC Construction Contract Training - FIDIC	Bandung, 21-24 Maret 2018 Bandung, March 21-24, 2018	MRT Jakarta
Said Muhammad Ihsan Audit Assurance Specialist	Training	Pelatihan Prosedur dan Teknik Audit SDM Human Capital Audit Procedure and Engineering Training	Jakarta, 22-23 Februari 2018 Jakarta, February 22-23, 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Certified Internal Auditor Certified Internal Auditor Certification	Jakarta, Desember 2018 Jakarta, December 2018	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist	Training	Pelatihan ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko: Audit Manajemen Risiko ISO 31000 Training International Risk Management Standards: Risk Management Audit	Bandung, 22 - 27 Oktober 2018 Bandung, October 22-27, 2018	CRMS Indonesia
Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist	Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (Audit Intern Tingkat Lanjutan 1) Qualified Internal Auditor Training and Certification (Advanced Level Internal Audit 1)	Jakarta, 3-14 September 2018 Jakarta, September 3-14, 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
<ul style="list-style-type: none"> Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist Kantheni Utamingtyas Audit Assurance Specialist 	Workshop	Workshop Pengelolaan Audit Internal Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit) Risk-Based Internal Audit Management Workshop (Risk Based Internal Audit)	Bandung, 8-11 Juli 2018 Bandung, July 8-11, 2018	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist Kantheni Utamingtyas Audit Assurance Specialist 	Training	Inhouse Training COSO 2013 dan Psikologi Audit COSO 2013 Inhouse Training and Audit Psychology	Jakarta, 14-15 Mei 2018 Jakarta, May 14-15, 2018	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist	Training	Pelatihan Kontrak Konstruksi - FIDIC Construction Contract Training - FIDIC	Bandung, 21-24 Maret 2018 Bandung, March 21-24, 2018	MRT Jakarta
Rizaldi Internal Control Consulting Services Specialist	Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Goods and Services Procurement Certification Exam and Training	Surabaya, 25 Februari-4 Maret 2018 Surabaya, February 25 - March 4, 2018	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
Kantheni Utamingtyas Audit Assurance Specialist	Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tahun 2018 Qualified Internal Auditor Training and Certification Training and Certification Program for 2018	Jakarta, 15-26 Oktober 2018 Jakarta, October 15-26, 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit





04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY'S PERFORMANCE

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan dan keterlibatan penuh Pemerintah Pusat memulai proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap I dengan rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia. Sampai dengan tahun 2018, MRT Jakarta melakukan proses konstruksi hingga tahapan pengujian dan direncanakan akan beroperasi penuh pada Maret 2019.

Since 2013, the DKI Jakarta Provincial Government with the Central Government's full support and involvement has commenced the Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta project's Phase I of Lebak-Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Until 2018, MRT Jakarta has been in the construction process to trial-run stage and is expected to fully operate in March 2019.



TINJAUAN UMUM URGENSI TRANSPORTASI PUBLIK JAKARTA

GENERAL REVIEW: THE URGENCY OF UPUBLIC TRANSPORTATION IN JAKARTA



KEMACETAN JAKARTA DAN UPAYA MENGATASINYA

Sebagai ibukota Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menjadi cerminan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Indonesia untuk dapat mengelola tata kota dan tata kelola lalu lintas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang cukup menjanjikan. Di samping itu, jumlah penduduk yang besar yang ditopang oleh generasi dengan umur yang produktif memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan perekonomiannya.

Namun, potensi besar itu masih harus dikelola dengan lebih serius. Numbeo, sebuah *database* tentang *cost of living*, merilis indeks lalu lintas seluruh negara. Numbeo *Traffic Index* 2019 dengan pengukuran di akhir tahun 2018 dan/atau awal tahun 2019 menempatkan Jakarta di peringkat ke-5 sebagai kota termacet di dunia. Indeks ketidakefisienan menempatkan Indonesia di posisi ke-7, sementara indeks Emisi CO2 menempatkan Jakarta di peringkat ke-20.

TRAFFIC CONGESTION IN JAKARTA AND THE SOLUTION EFFORTS

As the capital city of Indonesia, DKI Jakarta Province is a reflection of the capacity and capability of the Government of Indonesia to manage city planning and traffic management. With fairly stable economic growth in recent years, Indonesia has a great potential to become one of the countries with a promising economy. Moreover, a huge population supported by productive age generation has a great impact on economic development.

However, such ample potential still should be managed more seriously. Numbeo, a database of cost of living, released a traffic index of all countries. The 2019 Numbeo Traffic Index with measurements conducted at the end of 2018 and / or at the beginning of 2019 assigned Jakarta as the Rank 5 of the cities with worst traffic in the world. The inefficiency index puts Indonesia in Rank 7, while for CO2 Emission index Jakarta was ranked 20th.

TINJAUAN UMUM
GENERAL REVIEW: THE URGENCY OF UPUBLIC TRANSPORTATION IN JAKARTA

Numbeo Traffic Index 2019

Rank	City	Traffic Index	Time Index (in minutes)	Time Exp. Index	Inefficiency Index	CO2 Emission Index
1	Dhaka, Bangladesh	297,76	63,25	20.109,74	366,79	5.409,62
2	Kolkata, India	283,68	61,06	17.140,95	310,48	5.486,86
3	Delhi, India	277,81	55,97	11.345,97	310,54	9.545,31
4	Nairobi, Kenya	277,66	56,73	12.122,16	303,23	8.725,53
5	Jakarta, Indonesia	274,39	55,91	11.288,35	308,59	8.961,23
6	Colombo, Sri Lanka	273,48	58,20	13.700,32	311,45	6.493,05
7	Mumbai, India	271,95	57,25	12.660,20	279,84	7.303,27
8	Manila, Philippines	271,86	56,44	11.823,00	289,67	8.039,58
9	Sharjah, United Arab Emirates	256,76	50,43	6.658,29	296,32	11.559,52
10	Tehran, Iran	254,90	53,51	9.074,60	257,94	8.111,50

Sumber/ source: www.numbeo.com

Tingginya tingkat kemacetan di Jakarta tak lepas dari pertumbuhan perekonomian yang sebagian besar didorong oleh konsumsi masyarakat. Dengan populasi penduduk yang didominasi oleh mereka yang berusia produktif, konsumsi masyarakat terkonsentrasi pada belanja modal pribadi; salah satunya adalah belanja kendaraan bermotor.

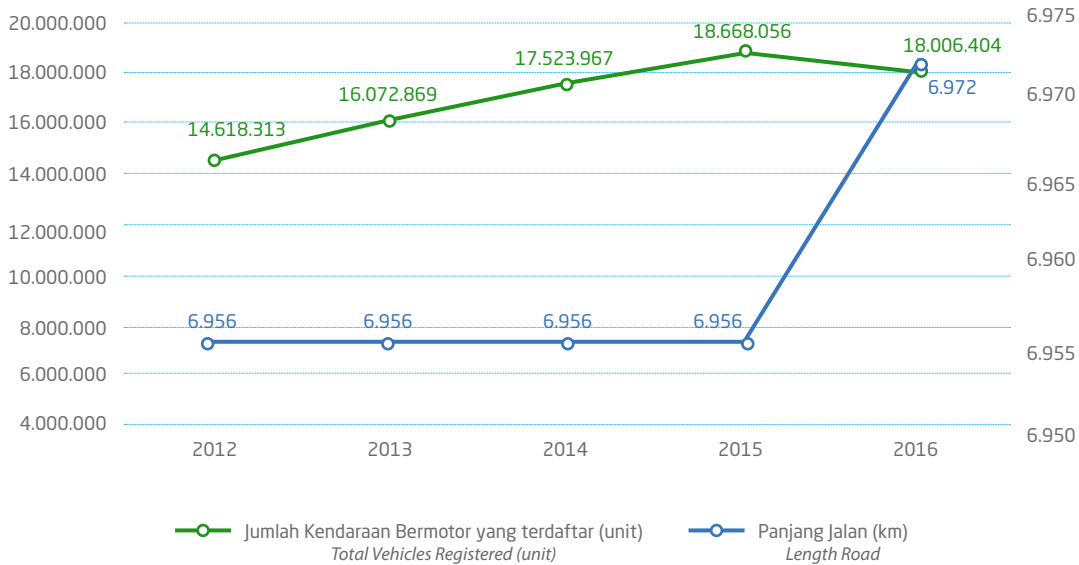
The high traffic congestion in Jakarta is inseparable from economic growth that is largely driven by public consumption. With a population dominated by productive age group, public consumption is concentrated in spending on private capital; one of which is motorized vehicles spending.

Pertumbuhan panjang jalan yang tak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar bisa menjadi gambaran sederhana untuk dapat menjelaskan predikat Jakarta sebagai kota yang penuh dengan kemacetan. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, pada periode 2012-2015, BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat tidak adanya penambahan panjang jalan DKI Jakarta; berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar yang terus mengalami pertumbuhan secara signifikan. Baru pada tahun 2016, jumlah panjang jalan mengalami peningkatan, walaupun penambahan ini tak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan.

The growth of road length that is not comparable with the growth in total registered motorized vehicles can be a simple illustration to explain Jakarta as a city filled with traffic jams. As seen in the graph below, in the period 2012-2015, DKI Jakarta Province's Statistics Agency noted that there was no increase in the road network length in DKI Jakarta. This is not corresponding with the number of registered motorised vehicles that continuously grows significantly. Total road network length only increased in 2016, although this addition was not comparable with the continuously increasing number of motorized vehicles.



Grafik Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teraftar
Graph - Road Network Length and Total Registered Motorized Vehicles



Sumber: Statistik Transportasi DKI Jakarta, BPS Provinsi DKI Jakarta
Source: DKI Jakarta Transportation Statistics, BPS DKI Jakarta Province

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai hal untuk dapat menekan dan mengelola kemacetan di Jakarta. Berbagai kebijakan seperti aturan “3 in 1” yang kemudian diubah menjadi “Ganjil-Genap”, penambahan infrastruktur *flyover* dan *underpass* di beberapa titik, hingga pengelolaan transportasi umum yang terintegrasi, terus didorong agar kemacetan di Jakarta dapat berkurang.

The DKI Jakarta Provincial Government has sought various things to suppress and manage congestion in Jakarta. Various policies such as the “3 in 1” rule which was later changed to “Ganjil-Genap” (Odd-Even Numbers), the addition of flyover infrastructure and underpasses at some points, to integrated public transport management, continued to be encouraged in order to reduce traffic congestion in Jakarta.

MRT JAKARTA DAN URGENSI TRANSPORTASI PUBLIK IBUKOTA

MRT JAKARTA AND THE URGENCY OF PUBLIC TRANSPORTATION IN THE CAPITAL CITY

Salah satu strategi besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai masalah kemacetan dilakukan dengan pengelolaan transportasi umum yang terintegrasi. Setelah Bus Rapid Transit atau yang lebih dikenal dengan bus TransJakarta beroperasi pada tahun 2004, perlahan budaya penggunaan transportasi publik oleh masyarakat mulai terbangun. Terutama dengan konektivitas kepada beberapa wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, TransJakarta memberikan dampak yang cukup baik terhadap kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang terkelola dengan layanan yang prima.

One of the DKI Jakarta Provincial Government’s key strategies to solve congestion problem is through integrated public transport management. After the Rapid Transit Bus, better known as TransJakarta bus operated in 2004, the community’s public transportation culture slowly begins to develop, especially with connectivity to several buffer zones such as Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi, TransJakarta has a good impact on the community’s need for managed public transportation with excellent service.



TINJAUAN UMUM GENERAL REVIEW: THE URGENCY OF UPUBLIC TRANSPORTATION IN JAKARTA

Di tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan dan keterlibatan penuh Pemerintah Pusat memulai mega proyek (MRT) Jakarta tahap I dengan rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta Bab III Pasal 3 point b dan e, "Memasyarakatkan Sistem Angkutan Umum Massal dan Menambah Jaringan *Primer, Busway, dan Subway*". Selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2018, MRT Jakarta melakukan proses konstruksi hingga tahapan pengujian. Proyek ini direncanakan beroperasi penuh pada Maret 2019.

Bersama-sama dengan *Light Rapid Transit (LRT)* Jakarta yang menghubungkan beberapa daerah penyangga Jakarta, MRT Jakarta akan menjadi sebuah bagian dari solusi Pemerintah Indonesia untuk dapat menjawab persoalan kemacetan di Jakarta.

In 2013, the Provincial Government of DKI Jakarta with full support and involvement of the Central Government began the first phase of the Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta project on the Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia route. This is in line with the DKI Jakarta Provincial Governor's Decree No. 84 of 2004 concerning Determination of Macro Transportation Patterns in DKI Jakarta Province Chapter III Article 3 points b and e, "Popularizing Mass Public Transport Systems and Developing Additional Primary Networks, Busway and Subway Networks". For 5 (five) years until 2018, MRT Jakarta has conducted the construction process until the testing phase. This project is planned to be fully operational in March 2019.

Together with the Jakarta Light Rapid Transit (LRT) that connects several Jakarta buffer zones, MRT Jakarta will be a part of the Indonesian Government's solution to answer congestion problem in Jakarta.



TINJAUAN OPERASI

OPERATION REVIEW



Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan belum melakukan kegiatan usaha, dan belum mencatatkan segmen operasi dalam laporan keuangannya. Kegiatan Perusahaan masih berpusat pada pembangunan konstruksi dan persiapan pengembangan operasi dan pemeliharaan proyek MRT Jakarta. Untuk itu, pada bagian ini Perusahaan tidak menyampaikan tinjauan operasi dalam bentuk Segmen Operasi.

KEMAJUAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN MRT JAKARTA

Rencana pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan dalam beberapa tahap dan saat ini terdapat 2 (dua) fase yang telah disetujui pinjaman dana nya oleh pihak pemegang (lender). Fase I yang menghubungkan jalur Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan panjang rute 15,7 kilometer dan fase II yang menghubungkan jalur Bundaran Hotel Indonesia hingga Kampung Bandan dengan panjang rute 8,1 kilometer. Pembangunan fase I telah dilaksanakan mulai akhir tahun 2013 dan direncanakan akan selesai pada bulan Maret 2019. Selanjutnya untuk fase II direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2019.

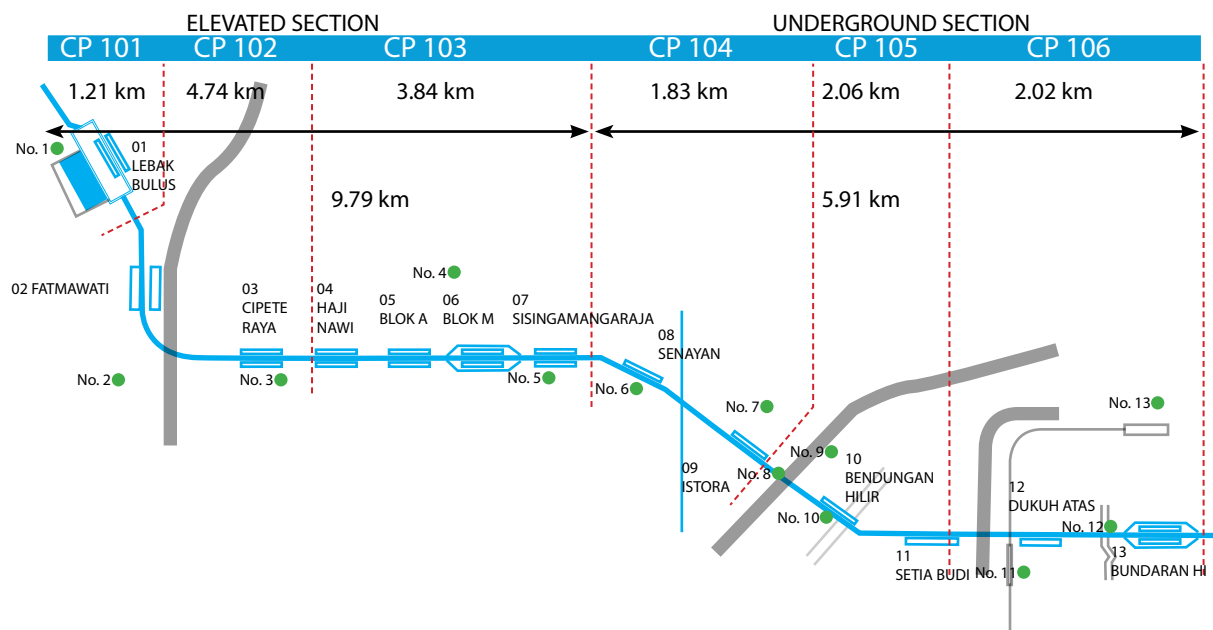
Until the end of 2018, the Company has not conducted business activities, and has not recorded operating segments in its financial statements. The Company's activities are still focused on construction and preparation for the MRT Jakarta operational development and maintenance. For this reason, in this section, the Company does not present operational review in the form of an Operating Segment.

MRT JAKARTA CONSTRUCTION PROJECT PROGRESS

MRT Jakarta construction project plan is carried out in several phases and currently there are 2 (two) phases that have been approved by the lenders. Phase I connects the Lebak Bulus line to the Bundaran Indonesia Hotel with a route network length of 15.7 kilometers and phase II connects the Hotel Indonesia Roundabout to Kampung Bandan with a route network length of 8.1 kilometers. Phase I development commenced at the end of 2013 and is planned to be completed in March 2019. Furthermore, phase II is planned to commence at the end of 2019.

Pembangunan tahap I Lebak Bulus – Bundaran HI dibagi dalam paket pekerjaan yaitu pekerjaan konstruksi sipil, sistem perkeretaapian dan pengadaan kereta. Paket pekerjaan ini terbagi menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan, yaitu Paket Konstruksi Layang (*Elevated Section*) yang terdiri dari paket *Contract Package* (CP) 101, CP 102, dan CP 103 dengan bentang jalur 9,79 km dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja; Paket Konstruksi Bawah Tanah (*Underground Section*) yang terdiri dari paket CP 104, CP 105 dan CP 106 dengan bentang jalur 5,91 km dari area transisi di Sisingamangaraja hingga Bundaran HI; serta Sistem Perkeretaapian dan Pengadaan Kereta berupa Paket *Railway Systems & Trackwork* dan *Rolling Stock* (Kereta) yang terdiri dari paket CP 107 dan CP 108.

The construction of Phase I of Lebak Bulus - Bundaran HI is divided into work packages namely civil construction work, railroad system and procurement of trains. This work package is divided into 8 (eight) work packages, namely the Elevated Section Package which consists of the Contract Package (CP) 101, CP 102, and CP 103 packages with a path span of 9.79 km from the Lebak Bulus to Sisingamangaraja areas. The Underground Section CP consists of CP 104, CP 105 and CP 106 packages with a path span of 5.91 km from the transition area in Sisingamangaraja to Bundaran HI; and the Railway System and Procurement of Train in the form of Railway Systems & Trackwork and Rolling Stock (Train) Packages consisting of CP 107 and CP 108 packages.





Paket Kontrak Konstruksi CP 101 - CP 106
Construction Contract Package CP 101 - CP 106

Paket Package	Konstruksi Construction	Jalur Lane	Panjang Length	Kontraktor Contractor
CP 101	Konstruksi Layang dan Depo <i>Elevated Section and Depot Construction</i>	Lebak Bulus	1,21 km	Tokyu-WIKA Joint Operation
CP 102	Konstruksi Layang <i>Elevated Section Construction</i>	Fatmawati - Cipete Raya	4,74 km	
CP 103		Haji Nawi - Sisingamangaraja	3,84 km	Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture
CP 104	Konstruksi Bawah Tanah <i>Underground Section Construction</i>	Sisingamangaraja (Transisi) - Istora Senayan	1,83 km	Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture
CP 105		Bendungan Hilir - Setiabudi	2,06 km	
CP 106		Dukuh Atas - Bundaran Hotel Indonesia	2,02 km	Sumitomo Mitsui-Hutama Karya Joint Operation

Paket Kontrak Prasarana dan Sarana CP 107 - CP 108
Facilities and Infrastructure Contract Package CP 107 - CP 108

Paket Package	Pekerjaan Work	Kontraktor Contractor
CP 107	<i>Railway System</i>	<i>Metro One Consortium</i>
CP 108	<i>Rolling Stock</i>	<i>Sumitomo Corporation</i>

Hingga 31 Desember 2018, kemajuan konstruksi pada CP 101 hingga CP 106 yang berupa pekerjaan konstruksi sipil mencapai 98,11%, mengalami deviasi 0,03% dibandingkan target akhir tahun yang dicanangkan sebesar 98,14%. Adanya deviasi ini disebabkan oleh keterlambatan pekerjaan akses jalur masuk (*entrance*) stasiun dan penataan kembali (*reinstatement*) area stasiun. Adanya keterlambatan ini dipengaruhi oleh lahan di area jalur layang yang belum dapat diakses seluruhnya, serta adanya kegiatan Asian Games yang menyebabkan keterbatasan Kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi di area jalur bawah tanah.

Untuk CP 107 dan CP 108 yang merupakan system & rolling stock, per 31 Desember 2018 mencatat aktualisasi kemajuan proyek mencapai 94,65%, di atas target yang dicanangkan sebesar 94,58%. Keberhasilan ini disebabkan oleh kemajuan pekerjaan *rolling stock* yang telah mengirimkan seluruh rangkaian kereta sebanyak total 16 rangkaian ke Depo Lebak Bulus.

As of December 31, 2018, construction progress in the CP 101 to CP 106 in the form of civil construction work reached 98.11%, experiencing a deviation of 0.03% compared to the planned year-end target of 98.14%. This deviation was caused by a delay in the station entrance access work and reinstatement of the station area. This delay was because the land in the elevated lane area was not be fully accessible, as well as due to the Asian Games event which caused the Contractor's limitations to carry out construction work in the underground lane area.

For CP 107 and CP 108 which are for the system & rolling stock, as of December 31, 2018, the project progress reached 94.65%, above the planned target of 94.58%. This success is due to the rolling stock work progress, where a whole series of trains totaling 16 trains are already delivered to the Lebak Bulus Depot.



Progres Konstruksi
Construction Progress

Contract Package			Construction Progress Accumulation 31 December 2018 (%)		
			Plan (%)	Actual (%)	Deviation (%)
Depot & Elevated Section	TWJO	CP101	98,104	98,110	0,006
		CP102	97,688	97,710	0,022
	OSI	CP103	93,490	97,438	3,948
	Depot Elevated		96,648	97,801	1,153
Underground Section	SOWJ	CP104	99,500	97,624	(1,876)
		CP105	99,200	97,941	(1,259)
	SMCC-HK	CP106	99,999	99,161	(0,838)
	Underground		99,643	98,412	(1,231)
Total Civil			98,139	98,105	(0,034)
System & Rolling Stock	MOC	CP107	93,587	93,089	(0,498)
	SC	CP108	96,807	98,151	1,344
System & Rolling Stock			94,578	94,647	0,069
Overall (CP101-CP108)			96,862	96,865	0,003

Berikut disampaikan kemajuan konstruksi pada 13 stasiun yang akan menjadi perhentian MRT Jakarta Fase I.

The construction progress of the 13 stations which will be the MRT Jakarta Phase I stop is as follows:

No.	Nama Stasiun Name of Station	Progress 31 Desember 2018 Progress as of Dec 31, 2018
1	Lebak Bulus	98,17%
2	Fatmawati	96,76%
3	Cipete Raya	97,35%
4	Haji Naw	98,14%
5	Blok A	97,91%
6	Blok M	99,15%
7	Sisingamangaraja	98,28%
8	Senayan	99,48%
9	Istora	95,27%
10	Bendungan Hilir	98,05%
11	Setiabudi	97,26%
12	Dukuh Atas	99,90%
13	Bundaran HI	99,91%

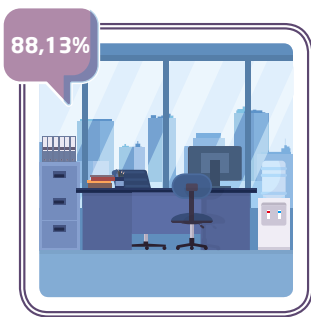


PERSIAPAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN MRT JAKARTA

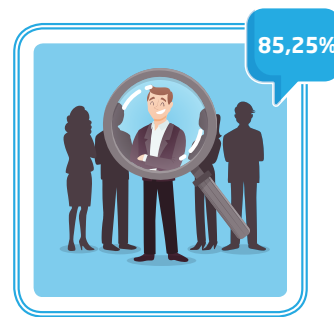
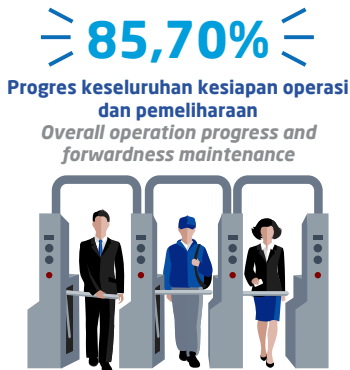
Selain konstruksi, di tahun 2018 Perusahaan telah mempersiapkan Operasi dan Pemeliharaan, yang menitikberatkan pada 2 (dua) hal besar, yaitu persiapan institusi dan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

PREPARATION FOR MRT JAKARTA OPERATION AND MAINTENANCE

In addition to construction, in 2018 the Company has prepared Operation and Maintenance, which focuses on 2 (two) major things, namely institutional preparation and Human Resources (HR) preparation.



Persiapan Institusi
Institutional Preparation



Persiapan SDM
Human Capital Preparation

Persiapan SDM dimulai dari berbagai pelatihan yang diperuntukkan bagi Insan MRT Jakarta untuk mempersiapkan fondasi kokoh dan kompeten di bidangnya. Selama tahun 2018, berbagai pelatihan untuk mempersiapkan diri masuk ke fase *Trial Run* telah dilaksanakan. Berikut adalah *highlight* kegiatan selama tahun 2018:

- Persiapan SDM Operasi
 - » Diklat Pembinaan Mental & Karakter

HR preparation starts with various trainings intended for the MRT Jakarta personnel to prepare a solid and competent foundation in their fields. During 2018, various trainings to prepare for entering the *Trial Run* phase have been carried out. The following are highlights of activities during 2018:

- HR Operations Preparation
 - » Mental & Character Development Education and Development



Tujuan dari pelatihan ini adalah terbentuknya SDM berkualitas, profesional, santun, bermartabat dan adaptif terhadap perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha, dengan total peserta 245. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 14-20 Oktober 2018 di Marko Pusdikpassus Batujajar.

The purpose of this training is to establish quality human resources who are professional, polite, dignified and adaptive to the Company's development and changes in the business environment, with a total of 245 participants. The training was held on October 14-20 2018 at the Batujajar Pusdikpassus Marko.

» Pelaksanaan Knowledge Sharing di PT KCI

» Implementation of Knowledge Sharing at PT KCI



Jumlah Peserta/Number of Participant :
3 station master, 14 station manager dan 16 station staff.
Waktu/Time : 18 Agustus – 2 September 2018/
August 18-September, 2018
Lokasi/Venue: Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Dukuh Atas, Manggarai, Bogor/ Palmerah Station, Tanah Abang, Dukuh Atas, Manggarai, Bogor
Aktifitas/ Activities: Penanganan Ticketing, Crowd Management, Cash & Revenue Handling dan Karakteristik Penumpang/ Ticketing Handling, Crowd Management, Cash & Revenue Handling and Passenger Characteristics

» Pelaksanaan training Service Communication & Attitude di Garuda Indonesia Training Center

» Implementation of Communication & Attitude Service training at the Garuda Indonesia Training Center



R.A.P.I.D

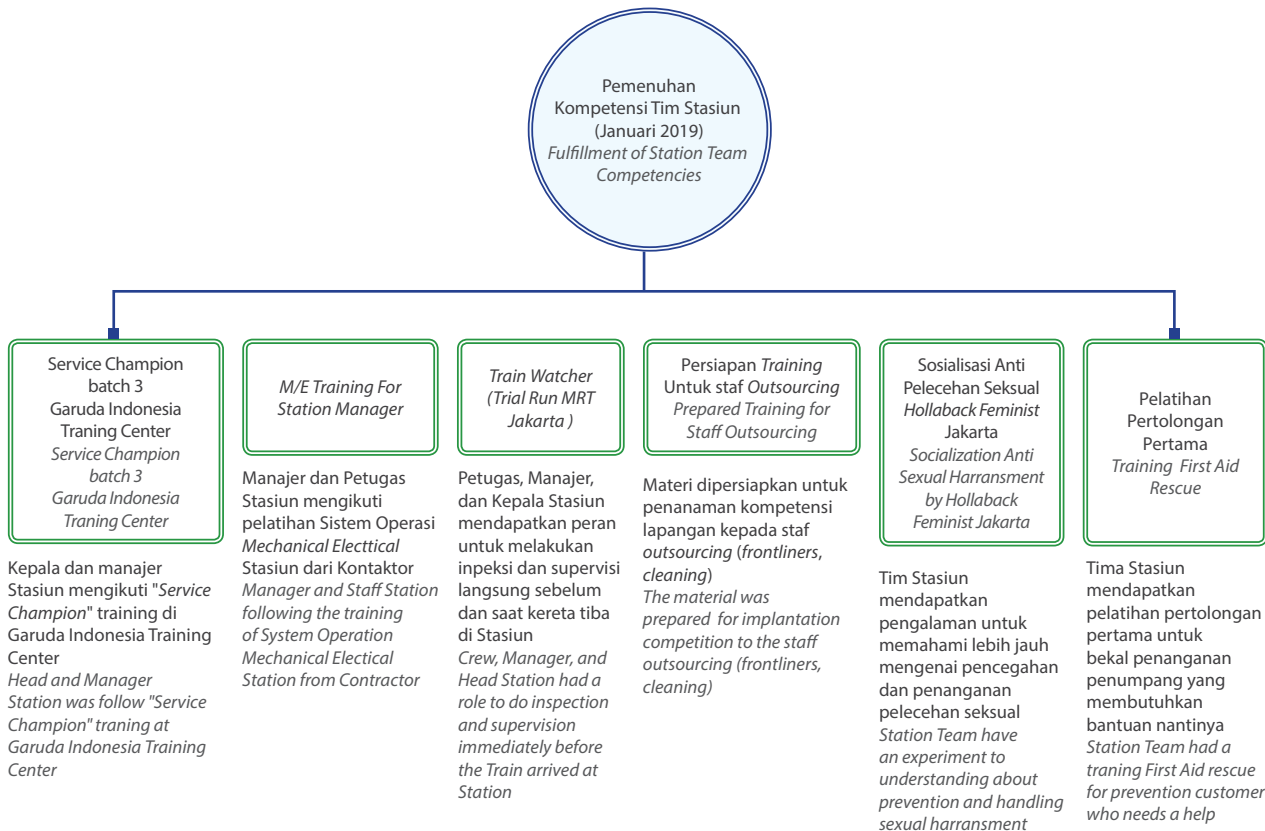
Training diadakan pada 27-31 Agustus 2018 dalam memahami MRT Brand Personalities and Service, serta memahami Great Service Indicators.

Training was held on August 27-31 2018 in understanding the MRT Brand Personalities and Service, and understanding Great Service Indicators.

Brand Personality	Core Values				Voice Of Customer (Haskoning Report)								
	Integrity	Customer Focus	Achievement Orientation	Nurturing Teamwork	Travel Time	Reliability	Comfort Of Travel	Connectivity	Accessibility	Cost	Transfer	Safety	Capacity
Reliable	X		X		X	X						X	
Attentive		X					X			X		X	
Passionate	X	X			X	X							
Interactive		X		X			X						
Dynamic		X				X		X	X		X		X



- » Kesiapan-kesiapan lainnya untuk Garda Terdepan MRT Jakarta
- » Other preparation for MRT Jakarta Front Guards



- Persiapan SDM Pemeliharaan
 - » Training dan Sertifikasi Tenaga Pemeriksa dan Perawatan
 - Melakukan Training di Operator Internasional
- Prepare HR Maintenance
 - » Training and Certification Examiner and Maintenance Personnel
 - Do the Training in Operator International



Training Rolling Stock, Japan Railway (JR) East pada bulan Mei 2018

Training Rolling Stock, Japan Railway (JR) East in May 2018



TINJAUAN OPERASI
OPERATION REVIEW



**Training Track, Odakyu Electric Railway Co,LTD.
9 - 16 Oktober di Jepang**

Training track, Odakyu Electric Railway Co,LTD in October 9-16, Japan



**Training Sipil, Hanshin Electric Railway, Osaka Jepang
12-20 September 2018**

Civil Training, Hansin Electric Railway, Osaka Japan in September 12-20, 2018



Training Power System, Hanshin Electric Railway, Osaka Jepang pada 15 - 19 Oktober 2018

System Power Training, Hansin Electric Railway, Osaka Japan in October 15-19, 2018



Training Signal, Sendai Subway Jepang pada bulan Desember 2018

Signal Training, Sendai Subway, Japan, in December 2018



- Melaksanakan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi

- *Certification activities conducted by certification agencies*



Sertifikasi track dan sipil yang dilakukan oleh DJKA pada bulan April 2018

Track and civil certification conducted by the DGKA in April 2018



Sertifikasi Welding Inspector pada bulan Desember 2018

Welding Inspector Certification in December 2018

- Melaksanakan sertifikasi pada peralatan khusus

- *Certification on Special Equipment*



Sertifikasi peralatan khusus motor car (Lifting Platform dan crane) oleh DJKA pada bulan oktober 2018

Special Motor Car Equipment (Lifting Platforms and cranes) Certification by DJKA in October 2018



TINJAUAN OPERASI
OPERATION REVIEW



Training motor car operation untuk rolling stock staff pada akhir Desember 2018
Motor Car operation training for the rolling stock staff at the end of December 2018



Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Umum) oleh Kementerian Ketenagakerjaan
Occupational Health and Safety certification (General OHS) by the Ministry of Manpower



Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Eskalator dan elevator oleh Kementerian Ketenagakerjaan
Occupational Health and Safety (OHS) Certification for Escalators and Elevators by the Ministry of Manpower



Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan kerja untuk Kelistrikan (K3 Listrik) oleh Kementerian Ketenagakerjaan
Occupational Safety and Health (OHS) Certification for Electricity (Electricity OHS) by the Ministry of Manpower



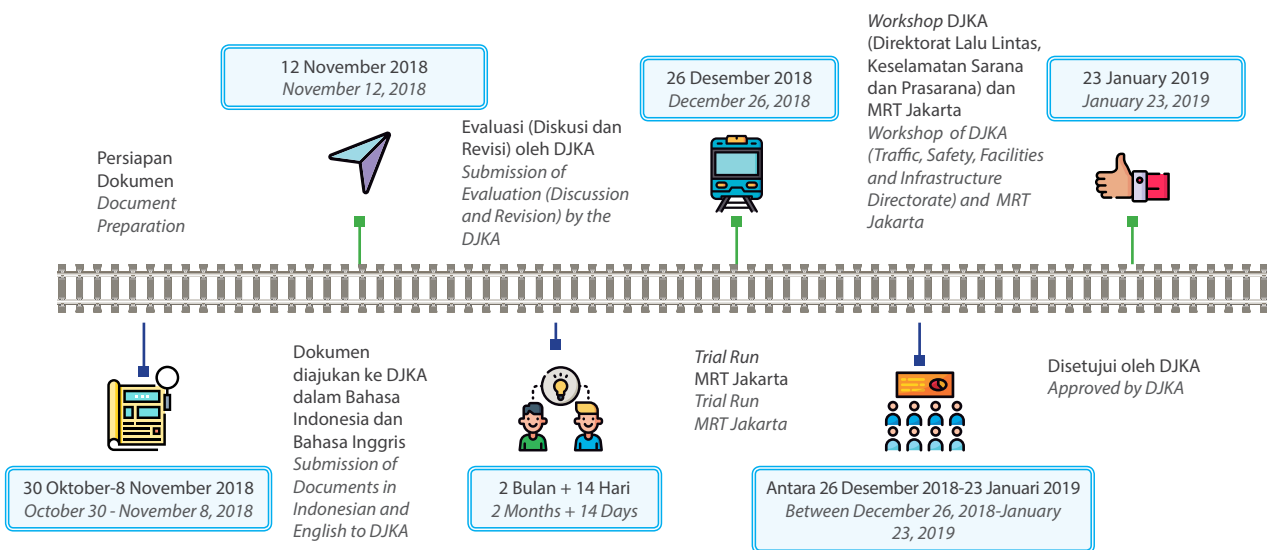
Salah satu kebijakan penting dalam kesiapan Operasi dan Pemeliharaan adalah *testing and trial run* MRT Jakarta, serta *Standard Procedure Operational (SOP)/Manual* yang akan menjadi standar baku pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta ke depan. Ujicoba MRT Jakarta dilakukan secara parallel dengan proses konstruksi dalam rangka akselerasi proses dan telah dilakukan sejak 24 Desember 2018 hingga 26 Februari 2019. *Parallel Trial Run* dilaksanakan sebagai bentuk familiarisasi masinis di *mainline* menuju proses sertifikasi masinis yang menjadi syarat terbitnya ijin operasi.

One of the important policies in the readiness of Operation and Maintenance is the testing and trial run of MRT Jakarta as well as the Operational Standard Procedure (SOP)/Manual which will become the standard for the operation and maintenance of MRT Jakarta in the future. The MRT Jakarta trial is conducted in parallel with the construction process in the context of process acceleration and has been carried out since December 24, 2018 to February 26, 2019. The Parallel Trial Run is carried out as a form of familiarization of engineers in the mainline towards the driver certification process which is a requirement for the issuance of operating licenses.

Setelah melaksanakan *Parallel Trial Run*, MRTJ berencana melaksanakan *10 Days Emergency Operation Training* dengan segala skenario yang mungkin terjadi ketika operasi komersial dimulai pada tanggal 27 Februari hingga 11 Maret 2019. Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk menguji kompetensi SDM begitu pula manual yang telah dibuat, ketika terjadi keadaan darurat. Setelah berakhirnya periode *Full Trial Run*, MRT Jakarta siap untuk melayani publik sampai peresmian dilakukan. Proses uji coba MRT Jakarta menjadi bagian penting dalam alur waktu atau *timeline* rencana *Standard Procedure Operational (SOP)/Manual* yang akan menjadi standar baku pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta, seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini.

After implementing the Parallel Trial Run, MRTJ plans to implement 10-Day Emergency Operation Training with all possible scenarios when commercial operations begin on February 27 to March 11, 2019. This training is an important step to test HR competencies as well as the manuals when an emergency occurs. After the end of the Full Trial Run period, MRT Jakarta will be ready to serve the public until the inauguration takes place. MRT Jakarta trial process is an important part of the Operational Standard (SOP) / Manual plan timeline that will become the standard for the operation and maintenance of MRT Jakarta, as shown in the chart below.

Rencana Standard Procedure Operational (SOP)/Manual
Standard Operating Procedure (SOP) / Manual Plan





PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN TARIF, SKEMA SUBSIDI SERTA KEPEMILIKAN ASET

Perusahaan juga telah mempersiapkan tarif, skema subsidi serta kepemilikan aset MRT Jakarta oleh Perusahaan. Tahapan ini merupakan bagian dari pola usaha yang akan dikembangkan oleh Perusahaan, khususnya melalui pendapatan melalui tiket.

Pada tanggal 27 Februari 2018, Direksi menetapkan tim Perumusan & Penyusunan Tarif, Skema Subsidi Serta Kepemilikan Aset dengan Surat Tugas No. 091/INT/BOD-MRT/ST/II/2018. Pembentukan tim dilatarbelakangi oleh adanya isu terkait komponen penyusunan tarif, struktur subsidi yang sesuai dengan Perusahaan dan implementasi pencatatan aset sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 53 Tahun 2017 dan Perjanjian Penyelenggaraan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. DTKJ telah menyampaikan rekomendasi tarif kepada Gubernur sesuai dengan Surat No. 153/DTKJ/XII/18 tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan bahwa penetapan tarif MRT Jakarta dengan skema tarif berbasis jarak yang nilai maksimalnya sebesar Rp12.000 dan sudah terintegrasi dengan Transjakarta dan Jak Lingko.
2. RUPS Tahun 2018 telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 terkait dengan komponen subsidi yaitu:
 - » Subsidi Sarana berdasarkan perhitungan tarif menurut PM 17 Tahun 2018
 - » Subsidi Prasarana (Perawatan dan Operasional Prasarana) berdasarkan PM 156 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan seluruh aset prasarana MRT Jakarta baik aset prasarana yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta setelah pembangunan maupun aset prasarana yang dimiliki MRT Jakarta selama masa penyelenggaraan.
 - » Subsidi Modal Usaha Aset Prasarana berdasarkan aset Prasarana yang belum diserahkan sesuai Pergub 53 Tahun 2017.
3. Sesuai dengan arahan dari BPKD pada 28 Desember 2018, Perusahaan sedang menyiapkan surat terkait permohonan tata cara subsidi yang saat ini sedang dalam pembahasan internal Perusahaan.

FORMULATION AND COMPILATION OF TARIFFS, SUBSIDY SCHEMES AND ASSET OWNERSHIP

The Company has also prepared tariffs, subsidy scheme and ownership of MRT Jakarta assets by the Company. This phase is part of the business pattern that will be developed by the Company, especially through revenues through tickets.

On February 27, 2018, the Board of Directors established a team for Formulating & Arranging Tariffs, Subsidy Scheme and Asset Ownership with Letter of Assignment No. 091 / INT / BOD-MRT / ST / II / 2018. The formation of the team was motivated by the issue related to tariff components, subsidy structure appropriate for the Company and the implementation of asset recording in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation No. 53 of 2017 and the Organizing Agreement. The activities that have been carried out include the following:

1. DTKJ has submitted a tariff recommendation to the Governor in accordance with Letter No. 153 / DTKJ / XII / 18 dated December 17, 2018 stating that MRT Jakarta tariffs are stipulated with a distance-based tariff scheme with a maximum value of Rp12,000 and already integrated with Transjakarta and Jak Lingko.
2. The 2018 Annual GMS has approved the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) related to the subsidy component, namely:
 - » Facility Subsidy based on tariffs calculation according to PM 17 Year 2018
 - » Infrastructure Subsidy (Maintenance and Operational Infrastructure) based on PM 156 Year 2015 which are adjusted to all MRT Jakarta infrastructure assets, consisting of infrastructure assets submitted to the DKI Jakarta Provincial Government after construction and infrastructure assets owned by MRT Jakarta during the implementation period.
 - » Infrastructure Asset Working Capital Subsidy based on Infrastructure assets that have not been submitted in accordance with the Governor Regulation No 53 Year 2017.
3. In accordance with the directives of the BPKD on 28 December 2018, the Company is preparing a letter regarding the application for subsidy procedures, which are currently under the Company's internal discussion.



PERSIAPAN PENGEMBANGAN USAHA

Sejalan dengan rencana pengoperasian penuh MRT Jakarta di tahun 2019, Perusahaan telah mempersiapkan model bisnis dan pengembangan usaha melalui beberapa aspek. Selain pemasukan dari tiket, Perusahaan juga akan mengembangkan bisnis *Non-Farebox* dan Properti, dengan beberapa segmen mencakup periklanan, telko, ritel, dan properti. Rencana pengembangan usaha ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional dan pemeliharaan MRT Jakarta, pembayaran pinjaman, mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan publik dalam jangka pendek, dan kemandirian secara finansial serta nilai keekonomian bagi pemegang saham dan investor. Perusahaan memutuskan pengembangan bisnis *Non-Farebox* membutuhkan kemitraan dengan pihak eksternal agar dapat memperoleh hasil yang optimal dan memaksimalkan pengembalian finansial.

Di tahun 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Avabanino Perkasa sebagai Mitra Penyedia Layanan Periklanan di Area Operasional MRT Jakarta Fase 1. PT Avabanindo Perkasa didukung oleh Alternative Media Group (AMG), Puncak Berlian Sdn Bhd (Redberry Malaysia), dan VGI Global Media Sdn Bhd Malaysia yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang periklanan. Hingga akhir tahun 2018, persiapan bisnis dari periklanan telah mencapai 50%.

Perusahaan juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Tower Bersama sebagai Mitra Penyedia/Pengelola Konektivitas Seluler dan WIFI di Area Operasional MRT Jakarta Fase 1. Hingga akhir tahun 2018, persiapan telko telah mencapai 98,4%.

Kesiapan bisnis *Non-Farebox* lainnya adalah di sisi ritel. Dalam pelaksanaan bisnis ritel, Perusahaan mempunyai dua konsep yang berbeda, yaitu konsep ritel reguler dan ritel UMKM. Dalam pelaksanaan seleksi mitra ritel UMKM perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BEKRAF sebagai jembatan untuk memilih mitra UMKM. Hingga akhir tahun 2018 persiapan ritel reguler telah mencapai 70% dan ritel UMKM telah mencapai 30%.

BUSINESS DEVELOPMENT PREPARATION

In line with the MRT Jakarta's full operation plan in 2019, the Company has prepared a business model and business development through several aspects. In addition to revenue from tickets, the Company will also develop the Non-Farebox and Property business, with several segments including advertising, telco, retail and property. The business development plan aims to support MRT Jakarta's operational and maintenance costs, loan repayments, as well as reduce dependence on public funding in the short term, and financial independence and economic value for shareholders and investors. The Company has decided that the Non-Farebox business development requires partnerships with external parties in order to obtain optimal results and maximize financial returns.

In 2017, the Company signed a cooperation agreement with PT Avabanino Perkasa as an Advertising Service Provider Partner in MRT Jakarta Phase 1 Operational Area. PT Avabanindo Perkasa is supported by Alternative Media Group (AMG), Puncak Berlian Sdn Bhd (Redberry Malaysia), and VGI Global Media Sdn Bhd Malaysia which already has experience in the advertising. Until the end of 2018, business preparation from advertising has reached 50%.

The Company has also signed a cooperation agreement with PT Tower Bersama as Cellular and WIFI Connectivity Provider Partner /Manager in the MRT Jakarta's Phase 1 Operational Area. By the end of 2018, the telecom preparation has reached 98.4%.

Other Non-Farebox business readiness is on the retail side. In implementing retail business, the Company has two different concepts: regular retail and MSME retail. In selecting MSME retail partners the Company has signed a cooperation agreement with BEKRAF as a bridge to choose MSME partners. Until the end of 2018, regular retail preparations have reached 70% and MSME retail has reached 30%.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, & Surja (a member firm or Ernst & Young Global Limited). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND CONFORMITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the Financial Statements for the years ended 31 December 2018 and 31 December 2017 which have been audited by Purwanto, Sungkoro, & Surja (a member firm or Ernst & Young Global Limited). Public Accountants Firm. The Company's financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") (Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

Jumlah Aset Perusahaan tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 37,13% dibandingkan tahun 2017, sejalan dengan pertumbuhan nilai Aset Tetap yang meningkat hingga 51,74% yang didapatkan dari penyertaan modal saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan konstruksi fisik Proyek MRT Jakarta

The Company's Total Assets in 2018 increased by 37.13% compared to 2017, in line with the growth in the Fixed Assets value which increased by 51.74%, which was derived from the equity capital of the DKI Jakarta Provincial Government in connection with the MRT Jakarta Project's physical construction."

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets	616.805	785.531	(168.726)	(21,48%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	12.797.094	8.996.310	3.800.784	42,25%
Jumlah Aset Total Assets	13.413.899	9.781.842	3.632.058	37,13%



	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i>				
Liabilitas <i>Liabilities</i>				
Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i>	382.883	466.942	(84.059)	(18,00%)
Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i>	748.155	555.257	192.898	34,74%
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	1.131.037	1.022.198	108.839	10,65%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	12.282.862	8.759.644	3.523.219	40,22%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i>	13.413.899	9.781.842	3.632.058	37,13%

Aset
Assets

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Aset Lancar <i>Current assets</i>				
Kas dan setara kas <i>Cash and cash equivalents</i>	604.891	780.343	(175.452)	(22,48%)
Piutang bunga <i>Interest receivables</i>	518	721	(203)	(28,14%)
Biaya dibayar dimuka dan uang muka - neto <i>Prepaid expenses and advances - net</i>	6.167	4.350	1.817	41,77%
Pajak dibayar dimuka <i>Prepaid taxes</i>	3.277	-	3.277	100,00%
Piutang lain-lain - neto <i>Other receivables</i>	1.952	118	1.835	1.558,74%
Total Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	616.805	785.531	(168.726)	(21,48%)



	Aset Assets			
	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)
Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i>				
Uang muka Kontraktor <i>Advances for Contractors</i>	68.571	608.532	(539.961)	(88,73%)
Aset tetap - neto <i>Fixed Assets - net</i>	12.721.798	8.383.939	4.337.860	51,74%
Uang jaminan <i>Security Deposits</i>	6.725	3.839	2.885	75,15%
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	12.797.094	8.996.310	3.800.784	42,25%
Total Aset Total Assets	13.413.899	9.781.842	3.632.058	37,13%

Aset Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2018 tumbuh 37,13% atau sebesar Rp3,63 triliun menjadi Rp13,41 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp9,78 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan progres fisik pembangunan yang dilakukan Perusahaan, di mana Aset tetap naik Rp4,34 triliun atau 51,74% dari Rp8,38 triliun di tahun 2017 menjadi Rp12,72 triliun.

Penurunan Aset Lancar terjadi sebagai akibat penurunan posisi Kas dan Setara Kas sebesar 22,48% dari Rp780,34 miliar ditahun 2017 menjadi Rp604,89 miliar per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan Kas dan Setara Kas digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan selama periode 2018.

Sementara kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar 42,25% atau sebesar Rp3.800,78 miliar menjadi Rp12.797,09 miliar di tahun 2018 yang dipengaruhi oleh pertumbuhan Aset Tetap sebesar 51,74% atau sebesar Rp4.337,86 miliar. Uang jaminan naik signifikan sebesar 75,15% dari tahun 2017 dan Uang Muka Kontraktor mengalami penurunan signifikan sebesar 88,73%.

The Company's total assets as of December 31, 2018 grew 37.12% or Rp3.63 trillion to Rp13.41 trillion compared to 2017 amounting to Rp9.78 trillion. This growth was in line with the physical progress of PT MRT Jakarta construction, where fixed assets rose by Rp4.34 trillion or 51.74% from Rp 8.38 trillion in 2017 to Rp 12.72 trillion.

The decline in Current Assets occurred as a result of a decrease in Cash and Cash Equivalents by 22.48% from Rp780.34 billion in 2017 to Rp604.89 billion. The decrease in Cash & Cash Equivalents was for the Company's operations during the 2018 period.

While the increase in Non-Current Assets was 42.25% or Rp3,800.17 billion to Rp12,796.48 billion in 2018 attributable to the growth of Fixed Assets of 51.74% or Rp4,337.86 billion. Security deposits rose significantly by 75.15% from 2017 and Contractors Advances significantly decreased by 88.73%



Liabilitas
Liabilities

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp- million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Liabilitas Jangka Pendek <i>Current liabilities</i>				
Utang Usaha - pihak ketiga <i>Trade Payables - Third parties</i>	11.207	-	11.207	100,00%
Utang Kontraktor dan Konsultan - pihak ketiga <i>Payables to Contractors and Consultants - third parties</i>	14.649	-	14.649	100,00%
Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek <i>Short-term Employee Benefits Liabilities</i>	1.358	452	907	200,59%
Biaya yang masih harus dibayar <i>Accrued cost</i>	354.094	465.431	(111.337)	(23,92%)
Hutang Pajak <i>Tax Payables</i>	1.573	1.059	514	48,59%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Non-Current Liabilities	382.883	466.942	(84.059)	(18,00%)
Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i>				
Utang retensi <i>Retention Payables</i>	691.273	542.408	148.865	27,45%
Liabilitas imbalan karyawan <i>Employee benefit liabilities</i>	16.882	12.848	4.034	31,39%
Pendapatan ditangguhkan <i>Deferred income</i>	40.000	-	40.000	100,00%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	748.155	555.257	192.898	34,74%
Total Liabilitas Total Liabilities	1.131.037	1.022.198	108.839	10,65%

Total Liabilitas Perusahaan naik sebesar 10,65% atau sebesar Rp108,84 miliar dari Rp1.022,20 miliar pada 31 Desember 2017 menjadi Rp1.131,03 miliar pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka Panjang yaitu kenaikan retensi dan pendapatan ditangguhkan.

The Company's total liabilities increased by 10.65% or Rp108.84 billion from Rp1,022.20 billion as of December 31, 2017 to Rp1,131, 03 billion as of December 31, 2018. This increase was mainly due to an increase in non-current liabilities namely an increase in retention and deferred income.

Liabilitas Jangka Pendek mengalami penurunan 18,00% atau sebesar Rp84,06 miliar menjadi Rp382,88 miliar di 31 Desember 2018. Penurunan tersebut atas biaya yang masih harus dibayar sebesar 23,92% dari Rp465,43 miliar per 31

Current liabilities decreased by 18.00% or Rp84.06 billion to Rp382.88 billion as of December 31, 2018. The decrease was in accrued expenses of 23.92% from Rp465,43 billion as of December 31, 2017 to Rp354,09 billion as of December 31, 2018. Meanwhile,

Desember 2017 menjadi Rp354,09 miliar per 31 Desember 2018. Sementara itu Utang Kontraktor dan Konsultan terdapat kenaikan sebesar Rp14,65 miliar. Hal tersebut disebabkan belum terbayarnya beberapa tagihan atas paket pekerjaan CP 106 dan Konsultan ES Fase II.

Payables to Contractors and Consultants increased by Rp14.65 billion. This is due to unpaid payables for CP 106 work package and Phase II ES Consultants.

Total Liabilitas Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar 34,74% dari Rp555,26 miliar per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp748,16 miliar per 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan Utang retensi 27,45% atau sebesar Rp148,86 miliar menjadi Rp691,27 miliar pada 2018 seiring dengan kemajuan pembayaran konstruksi dan progres fisik, *system* dan *rolling stock* pada tahun 2018.

Total Non-Current Liabilities increased by 34.74% from Rp555.26 billion as of December 31, 2017 to Rp748.16 billion as of December 31, 2018. This increase was mainly due to the increase in retention payables of 27.45% or Rp148.86 billion to Rp691,27 billion in 2018 along with construction payments progress, and the physical system and rolling stock progress in 2018.

Ekuitas
Equity

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)
Modal saham <i>Share Capital</i>	6.165.807	5.721.807	444.000	7,76%
Modal disetor lainnya <i>Share Capital</i>	6.606.170	3.389.445	3.216.725	94,90%
Defisit <i>Deficit</i>	(490.137)	(351.418)	(138.719)	39,65%
Penghasilan komprehensif lain <i>Other Comprehensive Income</i>	1.024	(190)	1.213	639,13%
Ekuitas Neto <i>Equity-Net</i>	12.282.862	8.759.644	3.523.219	40,22%

Ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp12.282,86 miliar, naik 40,22% atau sebesar Rp3.523,22 miliar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp8.759,64 miliar. Kenaikan ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan modal disetor per 31 Desember yang naik 94,90% atau sebesar Rp3.217,72 miliar dari Rp3.389,44 miliar di tahun 2017 menjadi Rp6.606,17 miliar ditahun 2018. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada penghasilan komprehensif lain yang naik 639,13% atau Rp1,21 miliar, dari beban Rp190 juta di tahun 2017 menjadi laba Rp1,02 miliar di tahun 2018.

The Company's equity as of December 31, 2018 was recorded at Rp 12,282.86 billion, a 40.22% or Rp3,523.22 billion increase compared to the previous year's equity of Rp8,759.64 billion. This increase was mainly due to an increase in paid-in capital as of December 31, which increased by 94.90% or Rp3,217.72 billion from Rp3,389.44 billion in 2017 to Rp6,606.17 billion in 2018. A significant increase occurred in other comprehensive income which rose 639.13% or Rp1.21 billion, from loss of Rp190 million in 2017 to a profit of Rp1.02 billion in 2018.



LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Meski Perusahaan mengalami kenaikan kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp21,22 miliar atau naik 18,15% di tahun 2018 dibanding tahun 2017, namun Perusahaan berhasil membukukan kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar 168,77% atau Rp2,98 miliar dari beban Rp1,76 di tahun 2017 menjadi laba Rp1,21 miliar di tahun 2018

Eventhough the Company experienced comprehensive loss for the year of Rp21.22 or an increase by 18.15% in 2018 compared to 2017, the Company managed to record an increase in other comprehensive income of 168.77% or Rp2.98 billion from the expense of Rp1.76 in 2017 to become a profit of Rp1.21 billion in 2018

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Behan Usaha <i>Operating Expense</i>				
Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expense</i>				
Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Employees' Salaries and welfare</i>	92.071	56.682	35.388	62,43%
Pelatihan dan keanggotaan <i>Training and membership</i>	37.667	29.980	7.686	25,64%
Biaya sewa kantor & kendaraan <i>Office & vehicle rent</i>	19.073	12.219	6.854	56,10%
Biaya Jasa Konsultan <i>Consultant Service Fee</i>	17.537	15.677	1.860	11,86%
Perlengkapan kantor <i>Office supplies</i>	16.018	5.484	10.534	192,07%
Keperluan rumah tangga <i>Household needs</i>	7.787	4.877	2.910	59,68%
Promosi dan pameran <i>Promotions and exhibitions</i>	6.219	4.104	2.114	51,52%
Transportasi dan parkir <i>Transportation and parking costs</i>	3.198	1.893	1.305	68,92%



TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)
Penyusutan & Amortisasi <i>Depreciation & Amortization</i>	3.101	2.371	729	30,77%
Biaya Perijinan, Rapat Koordinasi & RUPS <i>Licensing Fees, Coordination Meetings & GMS costs</i>	2.528	1.802	726	40,29%
Komunikasi, energi dan utilitas <i>Communication, energy and utilities</i>	1.472	1.083	389	35,89%
Sumbangan dan Sponsorship <i>Donations and Sponsorship</i>	330	77	254	331,69%
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expense	207.235	136.250	70.985	52,10%
Penghasilan (Beban) Lain-Lain <i>Other Income (Expense)</i>				
Penghasilan Bunga <i>Interest income</i>	34.947	23.226	11.721	50,47%
Laba (rugi) selisih kurs- neto <i>Gain (loss) on foreign exchange</i>	33.566	(2.149)	35.715	1.661,74%
Pendapatan/(Beban) Lain-lain <i>Other Income / (Expense)</i>	31	59	(28)	(46,90%)
Beban Keuangan <i>Finance Expense</i>	(29)	(15)	(13)	84,94%
Penghasilan (Beban) Lain-lain Neto Net Other Income (Expense)	68.516	21.120	47.396	224,41%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income For The Year	(138.719)	(115.130)	(25.589)	20,49%
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expense)	1.213	(1.764)	2.978	168,77%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) For The Year	(137.506)	(116.895)	(20.611)	17,63%



Pada tahun 2018, Beban Usaha Perusahaan adalah Beban Administrasi dan Umum yang tercatat naik sebesar 52,10% dari Rp136,25 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp207,23 di tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh:

- Beban gaji dan kesejahteraan karyawan naik sebesar 62,43% dari Rp56,68 miliar di tahun 2017 menjadi Rp92,07 miliar seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan yang mencapai 520 orang pada tahun 2018. Selain itu tahun 2018, karyawan mendapatkan tunjangan *transport* dan makan.
- Beban perlengkapan kantor didalamnya termasuk biaya informasi dan teknologi, naik sebesar 192,07% dari Rp5,48 miliar di tahun 2017 menjadi Rp16,02 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran atas *license* ERP.
- Beban pelatihan dan keanggotaan juga tercatat naik 25,64% atau sebesar Rp7,67 miliar dari Rp29,98 miliar di tahun 2017 menjadi Rp37,67 miliar di tahun 2018. Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan serta informasi bagi seluruh pegawai perusahaan dengan menyertakan kedalam pelatihan, workshop, studi banding atau *benchmarking*

Sementara itu, penghasilan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 224,41% atau sebesar Rp47,40 miliar dari Rp21,12 miliar di tahun 2017 menjadi Rp68,52 di tahun 2018. Begitupun dengan rugi tahun berjalan yang tercatat naik 20,49% dari Rp115,13 miliar menjadi Rp138,72 miliar. Namun, Perusahaan berhasil membukukan keuntungan penghasilan komprehensif lain sebesar 168,77% atau Rp2,98 miliar dari beban Rp1,76 di tahun 2017 menjadi laba Rp1,21 miliar di tahun 2018. Meski demikian, Perusahaan mengalami kenaikan kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp20,61 miliar pada tahun 2018 atau naik 17,63% dibanding tahun 2017.

In 2018, the Company's Operating Expenses constituted General and Administrative Expense which increased by 52.10% from Rp136.25 billion in 2017 to Rp207.23 in 2018. This increase was mainly due to:

- *An increase in employee salaries and welfare expenses by 62.43% from Rp56.68 billion in 2017 to Rp92.07 billion in line with the increase in the number of employees to 520 in 2018. In addition, in 2018 there were benefits for employees, namely transportation and meal allowances.*
- *Office supply expense, including information and technology costs that increased by 192.07% from Rp5.48 billion in 2017 to Rp16.02 billion. The increase was mainly due to payments for ERP licenses.*
- *Training and membership expenses also rose by 25.64% or Rp7.67 billion from Rp29.98 billion in 2017 to Rp37.67 billion in 2018. These expenses were incurred by the company to improve the competence, knowledge and information for all company's employees by registering the employees in training, workshops, comparative studies or benchmarking.*

Meanwhile, other income increased by 224.41% or Rp47.40 billion from Rp21.12 billion in 2017 to Rp68.52 in 2018. Likewise, loss for the year increased by 20.49% from Rp115.13 billion to Rp138.72 billion. However, the Company managed to record other comprehensive income by 168.77% or Rp2.98 billion from loss of Rp1.76 billion in 2017 to Rp1.21 billion profit in 2018. However, the Company recorded comprehensive loss for the year of Rp20.61 billion in 2018 or increased by 17.63% compared to 2017.

ARUS KAS

CASH FLOWS

Kas dan setara kas akhir periode 2018 tercatat turun menjadi Rp604,89 miliar dari Rp780,34 miliar di awal tahun 2018, yang dikarenakan pergerakan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi

Cash and cash equivalents at the end of the 2018 decreased to Rp604.89 billion from Rp780.34 billion at the beginning of 2018, which was attributable to the movement of cash flows from operating activities and cash flows from investing activities



TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash flow provided by Operating Activities</i>	(111.599)	(111.282)	(0.316)	0,28%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash flow provided by Investing Activities</i>	(63.853)	(23.629)	(40.224)	170,24%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash flow provided by Financing Activities</i>	-	444.000	(444.000)	(100,00%)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas <i>Net Increase of Cash and Cash Equivalents</i>	(175.452)	309.089	(484.541)	(156,76%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year</i>	780.343	471.254	309.089	65,59%
Kas dan Setara Kas Akhir Periode <i>Cash and Cash Equivalents at the End of the Period</i>	604.891	780.343	(175.452)	(22,48%)

Kas dan setara kas akhir periode 2018 tercatat turun menjadi Rp604,89 miliar dari Rp780,34 miliar di awal tahun 2018, yang dikarenakan pergerakan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi, serta tidak terdapatnya arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2018.

Cash and cash equivalents at the end of the 2018 period decreased to Rp 604.89 billion from Rp 780.34 billion at the beginning of 2018, due to movements in cash flows provided by operating activities and cash flows provided by investing activities, as well as the absence of cash flows provided by financing activities in 2018.

Arus Kas untuk Aktivitas Operasi

Cash Flow Used In Operating Activities

Arus Kas untuk Aktivitas Operasi *Cash Flow Used In Operating Activities*

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Penerimaan bunga <i>Interest Receipt</i>	35.150	23.082	12.068	52,28%
Penerimaan Kas dari mitra usaha <i>Cash Receipt from business partner</i>	40.000	-	40.000	100,00%
Pembayaran kepada Komisaris, Direksi dan Karyawan <i>Payment to Commissioners, Directors, and Staff</i>	(96.315)	(75.432)	(20.883)	27,68%
Pembayaran kepada Vendor dan Pemasok <i>Payment to Vendors and Suppliers</i>	(90.434)	(58.933)	(31.501)	53,45%
Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi <i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>	(111.599)	(111.282)	(0.316)	0,28%



Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tercatat meningkat 0,28% atau sebesar Rp316,24 juta dari Rp111,28 miliar di tahun 2017 menjadi Rp111,60 miliar di tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kepada vendor dan pemasok yang naik 53,45% atau sebesar Rp31,50 miliar dari Rp58,93 miliar di tahun 2017 menjadi Rp90,43 miliar. Selain penggunaan kas operasi tersebut Perusahaan juga mengalami kenaikan dari penerimaan bunga deposito dan giro sebesar 52,28% atau Rp12,07 miliar menjadi Rp35,15 miliar di tahun 2018. Dan juga di tahun 2018 Perusahaan mendapatkan penerimaan kas dari mitra usaha sebesar Rp40 miliar.

Net cash used in operating activities was recorded to increase by 0.28% or Rp316.24 million from Rp111.28 billion in 2017 to Rp111.60 billion in 2018. This increase was mainly due to an increase in payments to vendors and suppliers by 53.45% or Rp31.50 billion from Rp58.93 billion in 2017 to Rp 90.43 billion. In addition to the use of operating cash, the Company also experienced an increase in cash received from time deposit and current account interest by 52.28% or Rp12.07 billion to Rp35.15 billion in 2018. The Company also received cash received from business partners of Rp40 billion.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi
Cash Flow used in Investing Activities

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%)
			(1)	(2)
Perolehan Aset Tetap <i>Acquisition of Fixed Assets</i>	(63.853)	(23.629)	(40.224)	170,24%
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi <i>Net Cash Provided by Investing Activities</i>	(63.853)	(23.629)	(40.224)	170,24%

Perolehan aset tetap dari arus kas untuk aktivitas investasi per 31 Desember 2018 tercatat *minus* Rp63,85 miliar atau naik 170,24% dari *minus* Rp23,63 miliar di tahun 2017. Peningkatan ini digunakan untuk investasi seiring dengan persiapan operasi Perusahaan pada tahun 2019.

The acquisition of fixed assets from cash flows used in investing activities as of December 31, 2018 was recorded minus Rp63.85 billion, up 170.24% from minus Rp23.63 billion in 2017. That increase is used for investing, according with the Company operating preparation in 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Cash Flow from Financing Activities

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
			(1)	(2)
Modal disetor Lainnya <i>Other Paid-In Capital</i>	-	444.000	(444.000)	(100,00%)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>	-	444.000	(444.000)	(100,00%)



Di tahun 2018, tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan baik terkait modal disetor lainnya, maupun kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan.

In 2018, there was no cash flow from financing activities related to other paid-up capital, as well as net cash provided by financing activities.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

SOLVENCY AND ACCOUNTS RECEIVABLE COLLECTIBILITY

Kemampuan Membayar Utang Solvency

	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
			(3=1-2)	(3:2)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(3:2)
Rasio Lancar (%) <i>Current Ratio (%)</i>	1,61	1,68	(0,07)	(4,24%)
Rasio Solvabilitas (%) <i>Solvability Ratio (%)</i>	11,86	9,57	2,29	23,93%
Rasio Kas (%) <i>Cash Ratio (%)</i>	1,58	1,67	(0,09)	(5,46%)
<i>Quick Ratio (%)</i>	1,61	1,68	(0,07)	(4,24%)
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (%) <i>Liabilities to Equity Ratio (%)</i>	0,09	0,12	(0,02)	(21,09%)
Rasio Utang Jangka Pendek Terhadap Ekuitas (%) <i>Current Debt to Equity Ratio</i>	0,03	0,05	(0,06)	(41,52%)
Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (%) <i>Non-Current Debt to Equity Ratio (%)</i>	0,06	0,06	-	-
Rasio Utang Terhadap Aset (%) <i>Debt to Assets Ratio (%)</i>	0,08	0,10	(0,02)	(19,31%)

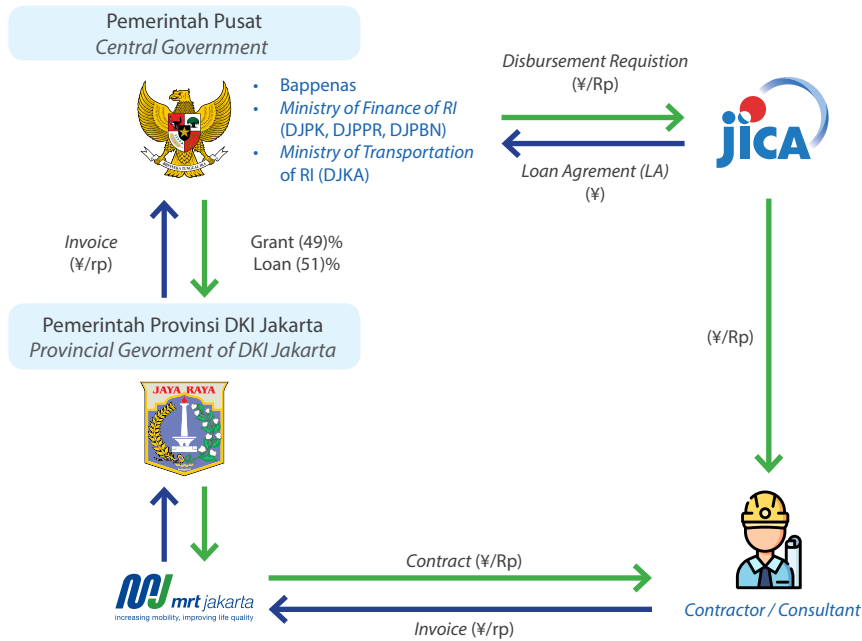
Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik, hal ini terlihat dari rasionya di tahun 2018 adalah 1,61%, 11,86 %, 1,58 %, 1,61 %, masing – masing untuk *current ratio*, *solvability ratio*, *cash ratio* dan *quick ratio*. Meskipun turun dibandingkan tahun 2017 namun tidak signifikan sehingga Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan masih dalam kondisi sehat dan mampu untuk memenuhi segala kewajiban baik untuk jangka pendek dan jangka Panjang.

The Company has a good level of liquidity, which can be seen from its ratios in 2018 consisting of 1.61%, 11.86 %, 1.58 %, 1.61 %, respectively for current ratio, solvability ratio, cash ratio and quick ratio. Although the ratios decreased compared to 2017, the decrease was not significant, so Management believes that the Company is still in a sound condition and able to fulfill all obligations both in the short and long terms.



Kemampuan Membayar Hutang

Hutang terhadap kontraktor dan konsultan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi penyelesaian proyek dibiayai dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sumber dari pendanaan proyek berasal dari penerusan hibah dan pinjaman JICA oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemampuan bayar atas kewajiban kepada kontraktor dan konsultan terjamin dengan komitmen Loan JICA. Berikut adalah skema penerusan hibah dan pinjaman JICA ke Pemerintah RI lalu diteruskan hibahkan dan pinjamkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :



Solvency

Payables to contractors and consultants related to construction works on project completion are financed from DKI Jakarta Provincial Government's capital investment. Funding for the project is sourced from channeling of JICA grants and loans by the Government of the Republic of Indonesia. The ability to pay for the liabilities to contractors and consultants is guaranteed by the JICA Loan commitment. The following is the scheme for the channeling of JICA grants and loans to the Government which are then channelled as grants and loans to the DKI Jakarta Provincial Government:

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Sampai tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan masih dalam fase konstruksi proyek dan belum melakukan kegiatan usahanya, sehingga tidak memiliki piutang usaha.

Accounts Receivable Collectibility

As of December 31, 2018, the Company was still in the project construction phase and has not carried out its business activities, so the Company had no trade accounts receivable.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Struktur Modal Perusahaan

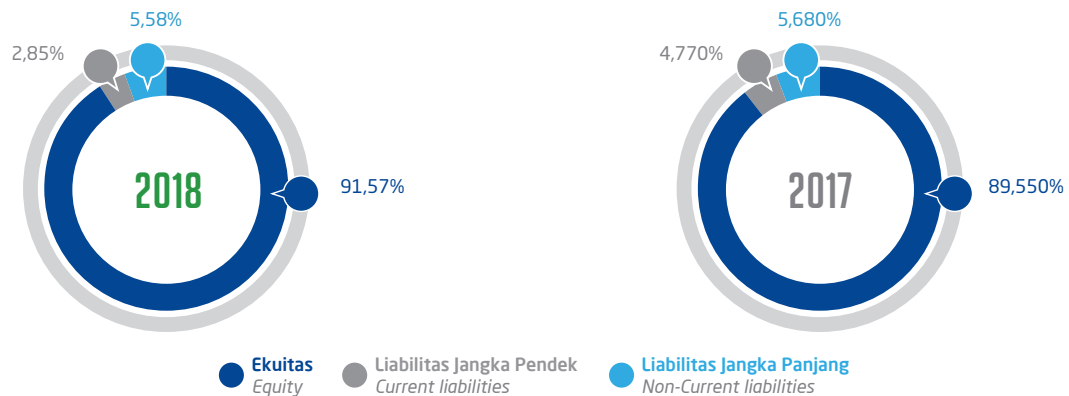
Company Capital Structure

Struktur modal Perusahaan tahun 2018 yang terdiri dari utang jangka pendek, jangka panjang dan ekuitas dan perbandingannya dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut.

The Company's capital structure in 2018 consisting of current liabilities, non current liabilities and equity and its comparison with 2017 are as follows.

Struktur Modal dan Perubahannya
Capital Structure and Changes to Capital Structure

Struktur Modal Capital Structure	2018		2017		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp -million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp -million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(4=1-2)	(4/2)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	382.882	2,85%	466.942	4,77%	(84.059)	(18,00%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	748.155	5,58%	555.257	5,68%	192.898	34,74%
Ekuitas Equity	12.282.862	91,57%	8.759.644	89,55%	3.522.608	40,21%
Jumlah Modal yang Diinvestasikan Total Capital Investment	13.413.899	100,00%	9.781.842	100,00%	3.631.448	37,12%



Jumlah Modal yang diinvestasikan pada tahun 2018 naik sebesar Rp3.632,06 miliar atau 37,13% dari Rp9.781,84 miliar di tahun 2017 menjadi Rp13.413,90 miliar di tahun 2018. Kenaikan ini lebih dikarenakan adanya peningkatan ekuitas di tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp12.282,86 miliar atau naik 40,22% dibanding 2017 sebesar Rp8.759,64 miliar. Sementara, meskipun liabilitas jangka panjang tercatat naik 34,74% di tahun 2018, namun liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 18,00% di tahun 2018 dibanding tahun 2017.

The Company's total capital investment in 2018 rose by Rp3,631.45 billion or 37.12% from Rp9,781.84 billion in 2017 to Rp13,413.29 billion in 2018. This increase was due to an increase in equity in 2018 which was recorded at Rp12,282.25 billion, a 40.21% increase compared to 2017 amounting to Rp 8,759.64 billion. Meanwhile, although non-current liabilities increased by 34.74% in 2018, current liabilities decreased by 18.00% in 2018 compared to 2017.



Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Dalam mengelola permodalannya, Perusahaan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi.
- Pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut dan langkah-langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi pihak lain.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Management Policy on the Company's Capital Structure

In managing its capital, the Company continues to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders. The Company actively and routinely reviews and manages its capital to ensure the capital structure and optimal returns to shareholders, taking into account:

- Efficient use of capital based on cash flows used in operations.
- Future Capital expenditures and capital requirements

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

During 2018, the Company did not have material commitment for capital investment. Therefore, the Company have no information regarding the name of the party making the commitment, purpose of the commitment, the source of funds expected to fulfill the commitment and the steps planned by the Company to protect the risk from other party's position.

CAPITAL INVESTMENT REALIZATION

Investasi Barang Modal Capital Expenditure	Tujuan Purpose	Nilai (Rp-juta) Amount (Rp-million)
Perolehan aset tetap berupa kendaraan & peralatan <i>Acquisition of fixed assets in the form of vehicles & equipment</i>	Penambahan inventaris kantor & kendaraan operasional <i>Addition of office inventories & operational vehicles</i>	110
System Informasi ERP SAP <i>ERP SAP Information System</i>	Investasi system informasi secara menyeluruh mengelola kegiatan operasional <i>information system investment to manage operational activities comprehensively</i>	12.614
Kapitalisasi Gaji Pegawai Direktorat Konstruksi <i>Capitalization of Salaries of Construction Directorate Employees</i>	Pengakuan beban gaji pegawai direktorat konstruksi menjadi aset dalam pelaksanaan <i>Recognition of employee salary expense in the Construction Directorate to become an asset in implementation</i>	16.721
Kapitalisasi biaya terkait proyek <i>Project-related cost capitalization</i>	Pengakuan biaya yang berhubungan dengan kegiatan proyek seperti Verifikasi, Listrik PLN <i>Recognition of costs related to project activities such as Verification, PLN Electricity</i>	24.862

Investasi Barang Modal Capital Expenditure	Tujuan Purpose	Nilai (Rp-juta) Amount (Rp-million)
Beban Pra-Operasi Pre-operating Expense	Memperoleh desain prospek ekonomi kawasan berorientasi transit (TOD) Obtaining the economic prospects design of transit oriented development (TOD) area	7.906

Investasi barang modal di tahun 2018 mengalami kenaikan 55,31% atau sebesar Rp22,16 miliar dari Rp40,06 miliar di tahun 2017 menjadi Rp62,21 miliar.

Capital expenditure in 2018 increased by 55.31% or Rp22.16 billion from Rp40.06 billion in 2017 to Rp62.21 billion.

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditure	62.213	40.057	22.156	55,31%

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION, AND / OR DEBT / CAPITAL RESTRUCTURING

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 17 April 2018, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp6.165.807.000.000, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2018, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 14 tanggal 14 Januari 2019 para pemegang saham kembali menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan menjadi sebesar Rp9.111.248.000.000.

Based on the resolution of the GMS on April 17, 2018, the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital to Rp6,165,807,000,000, based on the General Meeting of Shareholders on December 21, 2018 which were on Notarial Deed No. 14 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated January 14, 2019 the shareholder again agreed to increase the issued and paid-up capital to become Rp9,111,248,000,000.

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyertaan modal disetor yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman sebesar Rp3.660.724.931.450. Per 31 Desember 2018, penambahan modal sebesar Rp6.606.169.772.791 belum diaktakan sehingga dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" di dalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan.

Throughout 2018, the Company received the addition of Capital Investment from the DKI Jakarta Provincial Government as investment in paid-in capital originating from the channeling of grants and loans amounting to Rp3,660,724,931,450. As of December 31, 2018, the additional capital of Rp6,606,169,772,791 has not been notarized so that it is recorded as "Other Paid Up Capital" in the Equity section in the statement of financial position.



INFORMASI LAINNYA TENTANG INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG

Perusahaan tidak memiliki informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang di tahun 2018.

OTHER INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGERS, ACQUISITIONS, AND / OR DEBT RESTRUCTURING

The Company has no material information regarding investment, expansion, divestment, merger, acquisition and/or debt restructuring in 2018.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI, DAN PROYEKSI USAHA

COMPARISON BETWEEN BUDGET TARGETS WITH REALIZATION, AND BUSINESS PROJECTION

Laba (Rugi) Profit (Loss)

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)	Realisasi 2018 2018 Realization	Target 2018 2018 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 2018 Realization vs 2018 Target (%)	Proyeksi 2019 2019 Projection	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 2019 Projection vs 2018 Realization (%)	Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 2019 Projection vs 2018 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)
Pendapatan Usaha Farebox Revenue	-	-	-	776.138	-	-
Total Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	-	-	-	397.353	-	-
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	-	-	-	378.785	-	-
Jumlah Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	207.264	223.616	92,67%	235.514	111,13%	102,99%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for the Year	(138.719)	(189.262)	73,29%	(250.525)	180,60%	132,37%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for the Year	(137.506)	(191.026)	71,98%	(265.095)	192,79%	138,77%

Pada 31 Desember 2018 Perusahaan membukukan rugi bersih komprehensif sebesar Rp137,51 miliar atau 71,98% dari rencana kerja anggaran tahun 2018 dimana rugi bersih adalah Rp191,03 miliar. Penurunan rugi bersih ini disebabkan oleh efisien Perusahaan dalam menggunakan anggaran beban usaha selama periode 2018. menguatnya rupiah terhadap kurs

As of December 31, 2018, the Company recorded a comprehensive net loss of Rp137.51 billion or 71.98% of the 2018 budget work plan where the net loss was targeted at Rp191.03 billion. The decrease in net loss was due to the Company's efficiency efforts in using the operating expenses budget during the 2018 period. The strengthening of rupiah against the yen exchange rate at the

yen pada akhir tahun 2018 menyumbang laba kurs sebesar Rp33,56 miliar menyebabkan Perusahaan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp138,72 miliar di tahun 2018 atau turun sebesar 73,29% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp189,26 miliar.

end of 2018 contributed to gain in foreign exchange of Rp33.56 billion, so that the Company recorded a net loss of Rp138.72 billion in 2018 or decreased by 73.29% from the 2018 budget of Rp 189.26 billion.

Proyeksi Perusahaan tahun 2019 mengalami rugi bersih sebesar Rp333,45 miliar atau meningkat 240,38% dari anggaran tahun 2018. Peningkatan signifikan ini disebabkan pada tahun 2019 Perusahaan sudah masuk dalam fase operasi sehingga Perusahaan membukukan kenaikan beban operasi serta beban administrasi dan umum sebesar Rp627,65 miliar.

The Company projects net loss of Rp333.45 billion in 2019 or an increase by 240.38% from the 2018 budget. This significant increase because in 2019 Company will in the operation phase so that the Company projects to record an increase in operating expenses and general and administrative expenses of Rp627.65 billion.

Beban Administrasi dan Umum
Profit (Loss)

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)	Realisasi 2018 2018 Realization	Target 2018 2018 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 2018 Realization vs 2018 Target (%)	Proyeksi 2019 2019 Projection	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 2019 Projection vs 2018 Realization (%)	Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 2019 Projection vs 2018 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>						
Gaji & Tunjangan <i>Salary & Benefits</i>	92.071	100.076	92,00%	80.648	87,59%	80,59%
Biaya Jasa Konsultan <i>Consultant Fees</i>	17.537	20.631	85,00%	26.606	151,71%	128,96%
Sewa Kantor & Kendaraan <i>Office & Vehicle rent</i>	19.073	20.077	95,00%	22.232	116,56%	110,73%
Energi & Telekomunikasi <i>Energy & Telecommunications</i>	1.472	1.636	89,99%	2.486	168,86%	151,96%
Biaya Perijinan & Rapat Koordinasi <i>Licensing Fees & Coordination Meetings</i>	2.528	2.873	88,01%	8.355	330,43%	290,81%
Transportasi dan parkir <i>Transportation and parking</i>	3.198	3.365	95,03%	2.865	89,59%	85,14%
Alat Tulis Kantor & Cetak <i>Office Stationery & Print</i>	1.482	1.560	95,03%	2.935	197,98%	188,14%



Beban Administrasi dan Umum
Profit (Loss)

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)	Realisasi 2018 2018 Realization	Target 2018 2018 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 2018 Realization vs 2018 Target (%)	Proyeksi 2019 2019 Projection	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 2019 Projection vs 2018 Realization (%)	Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 2019 Projection vs 2018 Target (%)
Biaya Perlengkapan Kantor & Proyek <i>Office & Project Equipment Costs</i>	5.381	5.664	95,01%	10.533	195,73%	185,96%
Biaya Information, Communication & Technology <i>Information, Communication & Technology costs</i>	10.637	12.086	88,01%	30.970	291,16%	256,25%
Biaya Umum/ Kerumahtanggaan <i>General Affairs / Domestic Costs</i>	6.304	7.042	89,53%	5.435	86,21%	77,18%
Biaya Identitas, Komunikasi & Sosialisasi <i>Identity, Communication & Socialization Costs</i>	6.219	6.937	89,65%	10.183	163,75%	146,79%
Sumbangan <i>Donation</i>	330	340	97,13%	400	121,12%	117,65%
Biaya Perjalanan Dinas <i>Official travel expenses</i>	10.456	10.560	99,02%	7.642	73,09%	72,37%
Training dan Pengembangan <i>Training and Development</i>	27.446	30.769	89,20%	19.001	69,23%	61,75%
Jumlah Beban Administrasi & Umum <i>Total Administrative & General Expenses</i>	207.263	223.616	92,67%	230.292	111,13%	102,99%

Perusahaan membukukan total beban usaha (beban administrasi dan umum) sebesar Rp207,26 miliar di tahun 2018 atau 92,67% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp223,62 miliar. Berikut highlight pencapaian biaya tahun 2018 :

1. Gaji dan Tunjangan : merupakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Perusahaan. Di tahun 2018 terealisasi sebesar Rp92,07 miliar atau 92,00% dari anggaran. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah pegawai pada tahun 2018 yang mencapai 520 karyawan untuk persiapan operasi pada tahun 2019.

The company recorded total operating expenses (administrative and general expenses) of Rp207.26 billion in 2018 or 92.67% of the 2018 budget of Rp223.62 billion. The following is the 2018 expenses highlights:

1. Salaries and Benefits represent payment of income and allowance of the Company's employees. This activity was realized realized at 92% or Rp92.07 billion from the budget. This was due to the increase in the number of employees in 2018 by 520 employees in preparation for operations in 2019.



TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

2. Biaya Jasa Konsultan : merupakan pembayaran kepada konsultan, auditor, notaris dan professional lainnya. Terealisasi sebesar Rp17,54 miliar atau 85,00% dari anggaran, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan Perusahaan ditahun 2018 untuk persiapan operasi komersial.
2. *Professional fees represent payments to consultants, auditors, notary and other professionals. This activity was realized at 85.00% or Rp17,54 billion of the budget, which was due to adjustments to the Company's needs in 2018 in preparation for commercial operations.*
3. Biaya sewa kantor dan kendaraan, biaya atas penggunaan gedung kantor dan kendaraan selama tahun 2018. Terealisasi sebesar Rp19,07 miliar atau 95,00% dari anggaran, hal ini seiring meningkatnya jumlah pegawai Perusahaan untuk persiapan operasi komersial sehingga terjadi penambahan sewa kantor ditahun 2018.
3. *Office and vehicle rent is payments for the use of for office building and vehicle during 2018. This activity was realized at Rp19.07 billion or 95,00% of the budget. This is in line with the increasing number of the Company's employees in preparation for commercial operations resulting in additional office leases in 2018.*
4. Biaya *Information, Communication & Technology*, terealisasi sebesar Rp10,64 miliar atau 88,01% dari anggaran. Realisasi biaya ini digunakan untuk peningkatan sistem untuk menunjang kegiatan pada saat komersial. Adapun di tahun 2018 Perusahaan mengimplementasikan ERP yaitu SAP.
4. *Information, Communication & Technology cost was realized at Rp10.64 billion or 88.01% from the budget. This cost was incurred to improve the system to support activities during commercial times. Whereas in 2018 the Company implemented SAP ERP.*
5. Biaya Training dan Pengembangan terealisasi sebesar Rp27,45 miliar atau 89,20% dari anggaran. Peningkatan realisasi pada tahun 2018 sejalan dengan persiapan komersial dan seiring dengan peningkatan pegawai pada tahun 2018. Perusahaan mengadakan pelatihan terutama difokuskan untuk menunjang pelayan penumpang pada saat komersial.
5. *Training and Development Cost was realized at Rp27.45 billion or 89.20% of the budget. The increase in the 2018 realization was in line with commercial preparations and with the increase in total employees in 2018. The Company organized training programs mainly focused on supporting passenger services during commercial times.*

Total beban pokok Perusahaan dan beban administrasi dan umum pada rencana kerja tahun 2019 masing-masing adalah Rp397,35 miliar dan Rp230,29 miliar. Tingginya biaya pada tahun 2019 dikarenakan untuk menunjang kegiatan operasi komersial pada tahun 2019.

Total cost of revenues and general and administrative expenses in the 2019 work plan are Rp397.35 billion and Rp230.29 billion respectively. The high costs in 2019 are to support the commercial operation activities in 2019.



Posisi Keuangan, Struktur Modal dan Dividen
Financial Position, Capital Structure and Dividend

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)	Realisasi 2018 2018 Realization	Target 2018 2018 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 2018 Realization vs 2018 Target (%)	Proyeksi 2019 2019 Projection	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 2019 Projec- tion vs 2018 Realization (%)	Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 2019 Projec- tion vs 2018 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)
Aset Lancar Current Assets	616.805	516.229	119,48%	558.800	90,60%	108,25%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	12.797.094	12.503.728	102,34%	16.681.330	130,36%	133,41%
Total Aset Total Assets	13.413.899	13.019.957	103,02%	17.240.130	128,53%	132,41%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	382.883	167.343	228,80%	37.164	9,71%	22,21%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	748.155	544.198	137,48%	722.890	96,62%	132,84%
Ekuitas Neto Equity - Net	12.282.252	12.308.416	99,79%	16.480.076	134,18%	133,89%
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liability and Equity	13.413.899	13.019.957	103,02%	17.240.130	128,53%	132,41%

Perusahaan mencatatkan total aset pada tahun 2018 sebesar Rp13.413,89 miliar atau 103,02% dari rencana tahun 2018 sebesar Rp13.019,96. Hal ini sejalan dengan peningkatan progress fisik selama tahun 2018 dan tingginya penyerapan tagihan dari kontraktor dan konsultan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan ekuitas bersih Perusahaan menjadi Rp12.282,25 miliar hal ini disebabkan sesuai keputusan RUPS Akta Notaris no 57 terdapat setoran modal ditempatkan sebesar Rp444 miliar dari pemerintah provinsi DKI dan juga selama tahun 2018 terdapat penerusan hibah dan pinjaman sebesar Rp3.660,72 miliar.

Total aset ditahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp17.240,13 miliar atau naik 128,53% dari total aset tahun 2018. Peningkatan diproyeksikan dari peningkatan nilai aset tahun 2019 sesuai dengan nilai total aset MRT Fase I.

The Company recorded total assets in 2018 of Rp13,413.89 billion or 103.02% of the 2018 plan of Rp13,019.96. This was in line with the increase in physical progress during 2018 and the high absorption of accounts payables from contractors and consultants. In 2018 there was an increase in the Company's net equity to Rp12,282.25 billion. This was because pursuant to the Notarial Deed on GMS Resolutions No. 57, there was a paid-in capital of Rp444 billion from DKI Jakarta provincial government and channeling of grants and loans of Rp3,660,72 billion.

Total assets in 2019 are projected at Rp17,240.13 billion, a 128.53% increase from total assets in 2018. The increase is projected to source from the increase in total assets in 2019 according to the total assets of MRT Jakarta Phase I.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

1. Pada tanggal 14 Januari 2019, terdapat perubahan anggaran dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No 14 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0028922. Keputusan ini menghasilkan beberapa perubahan, antara lain: menetapkan perubahan modal dasar PT MRT Jakarta dari sebelumnya sebesar Rp10.200.000.000.000 menjadi Rp14.659.000.000.000, dan peningkatan modal disetor yang semula sebesar Rp6.165.807.000.000 menjadi Rp9.111.248.000.000.
2. Pada tanggal 11 Februari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak Bank Mandiri dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta fase 1 di stasiun Istora. Perjanjian tersebut berlaku 10 tahun setelah tanggal pendapatan.
3. Pada tanggal 13 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/MK.7/2019 dengan pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penerusan hibah atas Loan Agreement IP-578 untuk kegiatan Mass Rapid Transit Jakarta Phase 2 (I). Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman IP-578 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar JPY70.021.000.000.

DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Perusahaan mencatatkan realisasi laba selisih kurs pada akhir tahun 2018 sebesar Rp33.565 miliar. Selain rupiah dalam transaksi perseoran menggunakan mata uang Yen dalam melakukan pencatatan hutang atas invoice dan uang muka konstruksi & konsultan. Pencatatan atas transaksi tersebut dikonversi kedalam mata uang rupiah sesuai tanggal invoice, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap Yen pada saat tanggal pembayaran (*Drawdown Loan*) dari JICA ke kontraktor menyebabkan terjadi selisih kurs pada pencatatan akuntansi.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE REPORTING DATE

1. On January 14, 2019, there was a change in the Company's Articles of Association as stated in Notarial Deed of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 14, which was later ratified by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with number AHU-AH.01.03-0028922. This decision produced several changes, including: determination of changes in authorized capital of PT MRT Jakarta from the previous Rp10,200,000,000,000 to Rp14,659,000,000,000, and an increase in paid-in capital of Rp6,165,807,000,000 to Rp9,111,248,000,000.
2. On February 11, 2019, the Company entered into Cooperation Agreement with Bank Mandiri on the Rights for Station Name for the purpose exclusive naming rights MRT Jakarta phase 1's Istora station. The agreement is valid for 10 years after the date of revenue.
3. On February 13, 2019, the Government of the Republic of Indonesia signed a Grant Agreement with the DKI Provincial Government for MRT Phase 2 activities. This agreement provides that the government provided funds of JPY 70,021,000,000 with the following distribution: (a) Civil works and equipment amounting to JPY 59,108,000,000, (b) Consulting services amounting to JPY 6,311,000,000, and (c) Unexpected funds amounting to JPY 4,602,000,000 or other utilization portions determined.

IMPACT OF FOREIGN CURRENCY EXCHANGE

The Company recorded gain on foreign exchange of Rp33.565 billion at the end of 2018. In addition to Rupiah, the Company's transaction also used Japanese Yen to record debts for construction invoices and advances & consultants. The recording of these transactions is converted into rupiah currency according to the date of invoice. The strengthening of Rupiah exchange rate against Yen on the date of Drawdown Loan from JICA to the contractor caused foreign exchange difference in accounting records.



PROSPEK USAHA TAHUN 2019

BUSINESS PROSPECT IN 2019

Tahun 2019 akan menjadi tahun bersejarah bagi Perusahaan, serta bagi Negara Indonesia. Proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional yang telah dinantikan oleh banyak pihak; baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham, maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan; direncanakan akan beroperasi penuh pada Maret 2019.

Dengan beroperasinya MRT Jakarta, Perusahaan diwajibkan untuk mengelola pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta, sekaligus mengusahakan kegiatan bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Perusahaan telah memiliki sejumlah rencana untuk dapat mengoptimalkan kegiatan bisnis tersebut. Tentang rencana kegiatan usaha dapat dilihat pada bagian Rencana Pengembangan Usaha pada bab ini.

2019 will be a historic year for the Company, as well as for the State of Indonesia. MRT Jakarta Project is a national project that has been awaited by many parties; both by the Central Government and the DKI Jakarta Provincial Government as shareholders, as well as the community as stakeholders. MRT Jakarta is planned to be fully operational in March 2019.

With the operation of MRT Jakarta, the Company is required to manage the MRT Jakarta operation and maintenance, while at the same time seeking business activities that can provide added value to shareholders. The Company has a number of plans to optimize its business activities. The planned business activities can be seen in the section on Business Development Plans in this chapter.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Perusahaan merupakan penyedia layanan MRT Jakarta, sebuah moda transportasi publik yang diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta. Perusahaan berkepentingan untuk mengajak masyarakat Jakarta untuk dapat menggunakan moda transportasi publik yang tersedia, khususnya MRT Jakarta sebagai produk dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan.

The Company is the provider of MRT Jakarta services, a mode of public transportation for the residents of Jakarta. The Company has an interest in inviting the residents of Jakarta to use the available public transportation modes, especially MRT Jakarta as product and services provided by the Company.



TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA

OTHER FINANCIAL REVIEW

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

Dasar Kebijakan Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen

Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 20

1. Laba bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan dibagi sebagai Dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perusahaan.
5. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi tentang Realisasi Pembagian Dividen Perusahaan

Hingga tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perusahaan masih dalam tahap pembangunan proyek dan belum melakukan kegiatan operasionalnya sehingga tidak memiliki laba yang dapat dijadikan dividen untuk dibagikan. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki informasi mengenai kebijakan pembagian dividen, total dividen yang dibagikan, jumlah dividen kas per saham, *payout ratio* dan tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Use of Profit and Dividend Distribution Policy

Company's Article 20

1. *The Company's net profit in a financial year stated in the balance sheet and income statement enacted by the Annual GMS and in the form of positive retained earnings balance is divided according to the method of use determined by the GMS.*
2. *In the event that the GMS does not determine its use, the net profit after deducting the allowance for reserves required by Law and the Company's Articles of Association shall be distributed as Dividends.*
3. *If the calculation of profit and loss for a financial year shows a loss that cannot be covered by reserved fund, then the loss will still be recorded and included in the profit and loss calculation and in the subsequent financial year the Company is deemed not to gain profit if the loss recorded and included in the profit and loss calculation is still not yet completely covered.*
4. *Profit distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after being provided for payment are included in the reserve fund specifically for that purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by the entitled shareholders before the expiration of a period of 5 (five) years, by submitting proof of their rights to the dividends that is acceptable by the Company's Board of Directors.*
5. *The Company can distribute interim dividends before the financial year ends in accordance with the applicable laws and regulations.*

Information About Realization of the Company's Dividends Distribution

As of December 31, 2017 and 2018, the Company is still in the project development phase and has not carried out its operational activities so that it does not have profit that can be used as dividends to be distributed. Therefore, the Company has no information regarding dividend distribution policies, total dividends distributed, total cash dividends per share, payout ratio and announcement date and payment of cash dividends for each year.



KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena hal tersebut, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu kontribusi kepada Negara/Pemerintah Pusat. Di sepanjang tahun 2018, kontribusi pembayaran pajak Perusahaan tercatat sebesar Rp 14,45 miliar, meningkat/menurun 76% dibandingkan kontribusi pembayaran pajak tahun 2017 yang sebesar Rp10,99 miliar. Rincian pembayaran pajak Perusahaan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut.

CONTRIBUTION TO THE STATE

Under Law No. 28 Year 2007 concerning General Provisions and Procedures of Taxation, Tax is a mandatory contribution to the State owed by a Person or an Entity based on the Law, by not receiving direct compensation and being used for State purposes for the greatest prosperity of the people.

Taxpayers are individuals or entities, including taxpayers, tax withholder, and tax collectors who have tax rights and obligations in accordance with the provisions of tax laws. Because of this, the Company has an obligation to fulfill tax obligations as a contribution to the State / Central Government. Throughout 2018, the Company's tax payments contribution was recorded at Rp14.45 billion, an increase by 76% compared to the contribution of tax payments in 2017 which amounted to Rp10.99 billion. Details of Company tax payments for 2017 and 2018 are as follows.

	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	2017 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp- million)	Persentase Percentage (%)
PPh Pasal 21-26 WHT Article 21-26	12.054	9.422	2.632	27,93%
PPh Pasal 23-26 WHT Article 23-26	636	329	307	93,31%
PPh Pasal 4 ayat 2 WHT Article 4 Verse 2	1.760	1.188	572	48,15%
Jumlah Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	14.451	10.992	3.459	31,47%



INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dilakukan Perusahaan.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sejak berdirinya hingga 31 Desember 2018, Perusahaan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Perusahaan juga tidak menerbitkan obligasi yang mewajibkan Perusahaan melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi untuk transaksi Perusahaan di sepanjang tahun 2017 dan 2018.

INFORMATION ABOUT EMPLOYEE AND / OR MANAGEMENT OWNERSHIP PROGRAMS (ESOP / MSOP)

Until the end of 2018, the Company did not have an Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP). As such, there is no information regarding ESOP / MSOP conducted by the Company.

INFORMATION ABOUT THE REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Since its establishment until December 31, 2018, the Company has never conducted Initial Public Offering nor issue of bonds that require the Company to report the use of the proceeds from the public offering of bonds. Therefore, there is no information regarding the realization of the use of proceeds from public offering.

MATERIAL TRANSACTIONS BEARING CONFLICT OF INTERESTS AND / OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES / RELATED PARTIES

Policy on Related Parties

The Company applies PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures, which require disclosure of relationships, transactions, and balances of related parties, including commitments, in financial statements. This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions carried out with unrelated parties.

Name of Transacting Parties, Nature of Affiliation, Nature of Transaction, and Reasons for Transaction

The following are the names of the transacting and nature of the affiliate relationship for the Company's transactions throughout 2017 and 2018.



Pengungkapan Pihak Berelasi Disclosure on Related Parties

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction	Alasan Dilakukannya Transaksi
PT Bank Daerah Khusus Ibukota	Dalam pengendalian Bersama Under Common Control	Penempatan Deposito & Rekening Giro Perusahaan Placement of Deposits & Current Accounts of the Company	Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga. The interest rate obtained from the related party bank is proportional to the interest rate obtained from the third party bank.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga transaksi dengan pihak-pihak berelasi tetap disajikan dalam laporan keuangan. Semua berdasarkan peraturan yang berlaku dari setiap instansi yang melakukan perikatan.

Explanation of Transactions Fairness

The Company is controlled by the Provincial Government of DKI Jakarta, so transactions with related parties are still presented in the financial statements. All are based on the applicable regulations of each agency engaged in the commitment.

Saldo dan Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2018

Berikut saldo dan realisasi transaksi pihak berelasi per 31 Desember 2018.

Balance and Realization of Related Party Transactions in 2018

The following are the balances and realization of related party transactions as of December 31, 2018.

Saldo yang Signifikan dengan Pihak Berelasi untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (jutaan Rupiah)

Significant Balance with Related Parties for the Years Ended December 31 2018 dan 2017 (million Rupiah)

Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Transactions with related parties in Assets	2018	2017	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets	
			2018	2017
	Rp-juta Rp-million	Rp-juta Rp-million	%	%
Giro Current Accounts	8.355	25.280	0,06%	0,26%
Deposito Berjangka Time Deposits	545.000	650.000	4,06%	6,64%
Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	553.355	675.280	4,13%	6,90%
Jumlah Aset Total Assets	13.413.290	9.781.842		



TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA OTHER FINANCIAL REVIEW

Selama tahun 2017 dan 2018, transaksi pihak berelasi hanya berkaitan dengan asset Perusahaan berupa penempatan Giro dan Deposito.

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (a member firm or Ernst & Young Global Limited).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan periode buku 2018 PT MRT Jakarta tidak terdapat transaksi yang bersifat luar biasa (*Extra ordinary item*) sesuai PSAK 25.

Throughout 2017 and 2018, related party transactions were only related to the Company's assets in the form of current accounts and time deposits.

Company Policy Regarding Transactions Review Mechanism

Fairness of transactions and compliance with regulations on related party transactions have gone through a review and audit process by internal and external auditors. The Company carries out transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 concerning "Related Party Disclosures".

Compliance with Relevant Regulations and Provisions

Compliance with relevant regulations and provisions, namely Financial Accounting Standards (FAS) in Indonesia is carried out through efforts to disclose SFAS 7 on "Related Party Disclosures" in the Company's 2018 financial statements audited by Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accountants (a member firm or Ernst & Young Global Limited).

All transactions conducted with related parties, whether or not carried out under terms and conditions with third parties, are disclosed in the financial statements.

FINANCIAL INFORMATION BEARING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Up to the 2018 PT MRT Jakarta book period, there were no extraordinary transaction in accordance with PSAK 25.



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

AMENDMENTSTO LAW AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECTING THE COMPANY

Perubahan Peraturan/Perundang-undangan <i>Amendments To Law And Regulations</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Dampaknya Terhadap Perusahaan <i>Impact on the Company</i>
Terbitnya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Terbatas MRT Jakarta (Perusahaan Daerah) <i>Issuance of Regional Regulation Number 9 Year 2018 concerning Perusahaan Terbatas MRT Jakarta (Regional Company)</i>	Mencabut Peraturan Daerah No. 3/2008, Peraturan Daerah No. 4/2008, Peraturan Daerah No. 7/2013 dan Peraturan Daerah No. 8/2013 serta menyesuaikan Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017. <i>To revoke Regional Regulation No. 3/2008, Regional Regulation No. 4/2008, Regional Regulation Number 7/2013 and Regional Regulation Number 8/2013 and to adjust Regional Regulations on the Establishment of the Company with Government Regulation Number 57 Year 2017.</i>	Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan dan mengubah nama Perusahaan menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan tunduk pada ketentuan peralihannya. <i>It is necessary to make adjustments to the Company's Articles of Association and change the name of the Company to PT MRT Jakarta (Perseroda) by adhering to the transitional provisions.</i>
Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No. 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi DKI Jakarta Jalur Utara – Selatan <i>Issuance of the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia as Chair of the Committee for the Priority Infrastructure Provision Acceleration Number 1 Year 2018 concerning the Composition of the Imposition of Loans for Mass Rapid Transit Development in the. DKI Jakarta Province North - South Lane</i>	Melakukan penambahan jumlah pinjaman untuk tahap I dan tahap II, dengan komposisi pembebanan pinjaman untuk Pemerintah Pusat sebesar 49% dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51%. <i>To increase total loans for Phase I and Phase II, with the composition of loan lending to Central Government by 49% and DKI Jakarta Provincial Government by 51%.</i>	Perusahaan mendapatkan dana untuk melakukan pembangunan MRT Jakarta tahap I termasuk untuk pembayaran <i>Variation Order</i> dan <i>Contract Price Adjustment</i> dan untuk tahap II. <i>The Company obtained funds to carry out the first phase of MRT Jakarta construction including payment for Variation Orders and Contract Price Adjustments and for phase II.</i>
Terbitnya Surat Gubernur Prov. DKI Jakarta tentang Persetujuan Prinsip Jalur MRT Tahap II Koridor Bundaran Hotel Indonesia – Kampung Bandan <i>Issuance of DKI Jakarta Provincial Governor's Letter concerning Principle Approval of MRT Phase II Lane of Bundaran Hotel Indonesia - Kampung Bandan Corridor</i>	Menetapkan trase untuk pembangunan jalur MRT Koridor Bundaran Hotel Indonesia – Kampung Bandan, selain itu juga menugaskan Perusahaan untuk mengupayakan terealisasinya bentuk kerjasama dengan PT KAI (Persero). Persetujuan prinsip ini berlaku selama 1 tahun dan akan dilakukan peninjauan kembali. <i>To establish a platform for the construction of MRT Corridor of Bundaran Hotel Indonesia - Kampung Bandan lane, and to assign the Company to realize the cooperation with PT KAI (Persero). This principle agreement is valid for 1 year and subject to review.</i>	Perusahaan dapat segera memulai pembangunan jalur MRT Koridor Bundaran HI – Kampung Bandan dan segera memulai kerja sama dengan PT KAI (Persero). <i>The Company can immediately starts the construction MRT Corridor of Bundaran HI - Kampung Bandan Corridor lane and immediately starts cooperation with PT KAI (Persero).</i>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES TO ACCOUNTING POLICY AND THE IMPACT ON THE COMPANY

Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes to Accounting Policy</i>	Penjelasan <i>Description</i>	Dampaknya Terhadap Perusahaan <i>Impact on the Company</i>
<p>Kebijakan Penghapusan aset tetap <i>Fixed asset disposal policy</i></p>	<p>Proses persetujuan penghapusan aset ketika :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset sudah tidak dipakai lagi (<i>disposal</i>) • Rusak karena kecelakaan (<i>destruction</i>) • Pengalihan status penggunaan <p>Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, diusulkan penghapusan aset harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</p> <p><i>Asset disposal process will be done when the assets are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No longer used (disposal)</i> • <i>Damaged due to accident (destruction)</i> • <i>Status of the usage is transferred</i> <p><i>In accordance with the PT MRT Jakarta's Articles of Association,, the elimination of assets should be approved by the GMS which is attended or represented by shareholders who have at least $\frac{3}{4}$ of the total number of legitimate voting rights and approved by at least $\frac{3}{4}$ of the total votes issued legally at the Meeting.</i></p>	<p>Dengan diberlakukannya Kebijakan Akuntansi mengenai Penghapusan aset tetap yang sudah disetujui oleh Direksi, akan berdampak dalam transaksi aset dan juga pajak yang akan terjadi ke depannya.</p> <p><i>The adoption of the Fixed Assets Disposal Accounting Policy approved by the Board of Directors will have an impact on asset transactions and also taxes that will occur in the future.</i></p>



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

GOING CONCERN INFORMATION

Proyek pembangunan MRT Jakarta masih dalam tahap konstruksi dan persiapan operasi. Dengan demikian, hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan meliputi proses dalam penyelesaian tahapan konstruksi dan persiapan operasi.

Perusahaan memiliki Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh *Direktur Finance & Administration* dengan anggota *Direktur Operation & Maintenance*, *Direktur Construction*, *Corporate Secretary*, *Kepala Divisi Risk, Quality & Safety Management*, *Kepala Divisi Internal Audit & Control* dan *Kepala Divisi Project Management Office*. Pembentukan komite ini menjadi bagian dari keinginan Perusahaan untuk melakukan pengelolaan risiko yang utuh, mengingat Manajemen Risiko berperan bukan hanya mengelola potensi dampak negatif dalam pencapaian tujuan Perusahaan, namun juga mengeksplorasi potensi dan peluang-peluang positif untuk meningkatkan nilai Perusahaan dan pendekatan pengelolaan risiko tersebut mempunyai orientasi rentang waktu ke masa depan yang cukup jauh untuk dapat membangun kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menjaga nilai Perusahaan.

MRT Jakarta construction project is still under construction and operational preparation. Accordingly, matters that have a significant impact on the Company's business sustainability include the construction and operational preparation phase completion process.

The Company has Risk Management Committee chaired by the Director of Finance & Administration with members comprising Director of Operation & Maintenance, Director of Construction, Corporate Secretary, Head of Risk, Quality & Safety Management Division, Head of Internal Audit & Control Division and Head of Project Management Office Division. The establishment of this committee is part of the Company's desire to carry out comprehensive risk management, considering that Risk Management plays a role not only in managing potential negative impacts on the Company's objectives achievement, but also in exploring positive potentials and opportunities to increase the Company's value and a long period of time orientation to the future in order to build organizational readiness and capacity in maintaining the Company's value.

Key Performance Indicator Tahun 2018 Key Performance Indicator In 2018

No	Sasaran strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Triwulan IV Q4	
			Target	Realisasi Realization
1	Penyelesaian Konstruksi Fase I dan Persiapan Fase II pada Februari 2019 <i>Completion of Phase I Construction and Phase II Preparation in February 2019</i>	Persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi MRT fase 1 <i>Completion of Phase I Construction and Phase II Preparation in February 2019</i>	96,86%	96,87%
		Persentase realisasi dana hibah dan pinjaman untuk pelaksanaan konstruksi proyek mrt fase - 1 <i>Percentage of realization of grants and loans for the construction of MRT Project Phase 1</i>	80%	99,74%
		Ditandatangani Loan Agreement (L/A) tambahan dana untuk penyelesaian konstruksi proyek MRT Fase - 1 dan pendanaan konstruksi fase 2 <i>Signing of Loan Agreement (L / A) for additional funds to complete MRT Phase 1 construction and Phase 2 Funding</i>	100%	100%
		Persentase kesiapan <i>Groundbreaking</i> konstruksi proyek MRT Fase - 2 <i>Percentage of MRT Project Phase-2 construction Groundbreaking readiness</i>	100%	79%



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
GOING CONCERN INFORMATION

No	Sasaran strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Triwulan IV Q4	
			Target	Realisasi Realization
2	Kepastian Persiapan Operasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Usaha untuk Maret 2018 <i>Confirmation of Operation, Maintenance and Business Development Preparation for March 2018</i>	Persentase kesiapan untuk mengoperasikan sistem perkeretaapian <i>Percentage readiness to operate the railway system</i>	88,41%	85,70%
		Persentase penyelesaian penetapan tarif, aset dan subsidi <i>Percentage of tariff, assets and susidy determination</i>	100%	60%
		Persentase finalisasi perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra terpilih untuk seluruh sektor NFB (<i>Retail & Naming Rights</i>) <i>Percentage of finalization of cooperation agreements (PKS) with selected partners for all sectors of NFB (Retail & Naming Rights)</i>	100%	100%
		Persentase <i>progress</i> (sesuai target tahun 2018) pengembangan di kawasan Transit Oriented Development) <i>Percentage of progress (according to target in 2018) of Transit Oriented Development progress</i>	100%	100%
3	Sistem Korporasi berstandar Internasional <i>International standard corporate system</i>	Sistem Skor Maturitas Manajemen Risiko <i>Risk Management Maturity Score System</i>	100%	100%
		Nilai <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) <i>Good Corporate Governance (GCG) Score</i>	100%	100%
		Nilai <i>Indeks Public Readiness</i> <i>Public Readiness Index</i>	100%	88%
		Tingkat <i>Knowledge Management Maturity</i> <i>Knowledge Management Maturity Level</i>	100%	100%



RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

BUSINESS DEVELOPMENT PLAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018, Perusahaan diberikan hak untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan properti di stasiun, kawasan stasiun, dan depo serta hak konsesi untuk mengelola dan mengembangkan lahan, bangunan baik yang berada di bawah tanah maupun di atas tanah di seluruh wilayah dalam stasiun dan depo serta di luar stasiun dan di luar depo dalam luasan tertentu untuk dikomersialisasikan melalui cara-cara disewakan atau dikerjasamakan untuk menciptakan potensi pendapatan selain pendapatan langsung dari penjualan tiket.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.140 Tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan TOD Koridor Utara – Selatan MRT Jakarta Fase I, dengan fungsi sebagai berikut:

- Untuk Mengoordinasikan pemilik lahan dan/atau bangunan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan
- Mendorong upaya percepatan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan TOD sesuai Panduan Rancang Kota (PRK)
- Mengoordinasikan pemilik lahan dan/atau bangunan, penyewa serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan di Kawasan TOD
- Memonitor pelaksanaan pengembangan Kawasan TOD

Maka untuk itu PT MRT Jakarta melakukan penyusunan Masterplan dan Panduan Rancang Kota Kawasan TOD MRT Jakarta baik untuk fase I dan fase II.

PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Pengembangan Kawasan Berorientasi *Transit* atau *Transit Oriented Development* (TOD) telah dikenal luas sebagai bentuk pembangunan kota yang telah dipraktekkan di seluruh penjuru kota dunia untuk mereduksi penggunaan kendaraan mobil dan mempromosikan pola penataan ruang yang kondusif terhadap penggunaan moda *transit*.

Konsep rancangan TOD MRT Jakarta berdasarkan Dokumen *Masterplan* & Usulan Panduan Rancang Kota (PRK) memiliki 8 (delapan) prinsip perencanaan sebagai berikut.

Based on the Regional Regulation of the DKI Jakarta Provincial Government No. 9 Year 2018, the Company is granted the right to conduct property development and management at stations, station areas and depots as well as concession rights to manage and develop land, buildings both underground and above ground in all areas in stations and depots and in outside the stations and outside the depots in a certain area to be commercialized through ways of being leased or making cooperation to create potential income other than direct income from ticket sales.

In accordance with Governor Regulation No. 140 Year 2017, PT MRT Jakarta is assigned as the Main Operator of the MRT Jakarta Phase I North - South Corridor TOD with the following functions:

- *To coordinate land and / or building owners in regional planning and development;*
- *To encourage efforts to accelerate the development of TOD infrastructure and facilities in accordance with the City Design Guidelines.*
- *To coordinate the land and / or building owners, tenants and other stakeholders in the TOD area management, maintenance and supervision.*
- *To monitor the TOD area development*

Therefore, PT MRT Jakarta has prepared the City Masterplan and Design Guidelines for the TOD areas of MRT Jakarta phase I and phase II

DEVELOPMENT OF TRANSIT ORIENTED AREAS

Transit Oriented Development (TOD) has been widely recognized as a form of urban development that has been practiced in all parts of the world to reduce the use of car vehicles and promote spatial arrangements that are conducive to the use of transit modes.

The draft concept of the MRT Jakarta TOD that is based on the Masterplan Document & Proposed City Design Guide (PRK) has 8 planning principles as follows.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi campuran
Pengembangan fungsi campuran dalam radius tempuh jalan kaki dari setiap stasiun. Beragam fungsi dan bentuk kawasan yang terintegrasi dalam setiap pengembangan kawasan baik secara horisontal maupun vertikal. Keseimbangan antara fungsi komersial, perkantoran, kelembagaan, hunian, dan fasilitas umum yang mendukung kehidupan perkotaan selama 24 jam. 2. Kepadatan tinggi
Memaksimalkan kepadatan di area sekitar stasiun. Kawasan Berorientasi <i>Transit</i> merupakan pengembangan yang terpadu, padat, dan aktif sepanjang waktu. Stasiun transfer memiliki daya dukung untuk menampung pembangunan kepadatan yang besar. 3. Peningkatan konektivitas
Koneksi sederhana, langsung, dan intuitif menuju, dari, dan di antara stasiun. 4. Perbaikan kualitas hidup
Pengalaman ruang yang menarik, aman, dan nyaman. Fasilitas yang mendukung kebutuhan harian penumpang, pejalan kaki, pekerja, penghuni, dan pengunjung. Tersedianya jalan, <i>plaza</i>, dan ruang terbuka yang berkualitas yang dapat memberi kontribusi positif kepada identitas dan karakter kawasan TOD. 5. Keadilan sosial
Membuka kesempatan pekerjaan dan hunian untuk semua kalangan sosial-ekonomi, mempertahankan komunitas dan jaringan sosial eksisting di daerah pengembangan, menyediakan infrastruktur sosial untuk mendukung identitas dan hubungan komunitas yang baik. 6. Keberlanjutan lingkungan
Mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan. Mengarahkan desain kawasan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan komunitas menuju pembangunan yang semakin ramah lingkungan. 7. Infrastruktur yang tangguh dan berketahanan
Kota dirancang untuk dapat bertahan dari bencana besar dan menyesuaikan dengan perubahan iklim. 8. Regenerasi ekonomi
Mengembangkan ekonomi lokal yang dapat menarik investasi dan menciptakan peluang pekerjaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mixed function</i>
<i>To develop mixed functions within a walking radius of each station. Various functions and forms of integrated area in each area development both horizontally and vertically. Balance between commercial, office, institutional, residential and public facilities that support urban life for 24 hours.</i> 2. <i>High density</i>
<i>To maximize the density in the area surrounding the station. Transit Oriented Areas is an integrated, solid, and all-time active development. The transfer station has carrying capacity to accommodate the construction of large densities.</i> 3. <i>Increased connectivity</i>
<i>Simple, direct and intuitive connections to, from, and between stations.</i> 4. <i>Improved quality of life</i>
<i>An interesting, safe and comfortable space experience. Facilities that support the daily needs of passengers, pedestrians, workers, residents and visitors. Availability of quality roads, plazas and open spaces that can contribute positively to the TOD identity and character.</i> 5. <i>Social justice</i>
<i>To open employment and residential opportunities for all socio-economic circles, maintain existing communities and social networks in the development area, provide social infrastructure to support good community identity and relationships</i> 6. <i>Environmental sustainability</i>
<i>To reducing the impact of development on the environment. To direct sustainable regional design, work with government, industry and communities towards more eco-friendly development.</i> 7. <i>Strong and resilient infrastructure</i>
<i>The city is designed to survive major disasters and adapt to climate change.</i> 8. <i>Economic regeneration</i>
<i>To develop a local economy that can attract investment and create job opportunities.</i> |
|---|---|



Tantangan utama Perusahaan dalam menerapkan pendekatan TOD pada kawasan *transit* sepanjang koridor MRT Jakarta adalah tantangan peremajaan kota terpadu (*Integrated Urban Renewal*) di kawasan yang telah terbangun dan akan diproyeksikan menjadi kawasan *transit*, bukan sekedar pembangunan kawasan *transit* di atas lahan kosong biasa. Untuk menjawab tantangan peremajaan kota secara efektif, Pemerintah DKI Jakarta harus memiliki instrumen konsolidasi lahan (*Land consolidation*) disamping instrumen penataan kota yang biasa semacam Panduan Rancang Kota (*Urban Design Guidelines*). Pendekatan ini mendorong peremajaan Kota Terpadu dan membuka peluang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi banyak kawasan penting sepanjang koridor MRT Jakarta.

RENCANA BISNIS NON FAREBOX DAN PROPERTI

Keberhasilan Perusahaan untuk menyediakan secara konsisten pelayanan yang terintegrasi dan berkelas internasional kepada penumpangnya secara pasti bergantung pada kemampuannya untuk tidak hanya memfokuskan strategi bisnisnya dan mengalokasikan sumber dayanya untuk pendapatan Farebox, melainkan juga pada pendapatan *Non-farebox Business* (NFB). Pendapatan NFB berpotensi untuk diperoleh melalui pengoptimalan aset operasional Perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari berbagai bisnis seperti Periklanan, manajemen Ritel, dan layanan jaringan Telko di dalam stasiun, dll. atau pengoptimalan aset non-operasional untuk memperoleh pendapatan dari bisnis Properti yang diperoleh atas realisasi konsep *Transit-Oriented Development* (TOD) di area sekitar stasiun. Ide-ide NFB harus mencakup seluruh aktivitas sepanjang layanan rantai nilai penumpang MRT Jakarta yang menyertakan ide bisnis berbasis lokasi dan non-lokasi, mulai dari perencanaan dan pemesanan perjalanan, perjalanan menuju/dari stasiun, aktivitas di dalam stasiun, pengalaman di dalam kereta dan saat tiba di tujuan akhir.

Implementasi dari pengembangan bisnis NFB oleh operator MRT Jakarta telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perda) No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta yang diperbarui dengan Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Terbatas MRT Jakarta (Perseroda) Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, lingkup kerja PT MRT Jakarta tidak hanya mencakup konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas perkeretaapian dan infrastruktur pendukung terkait dengan bisnis *farebox*, namun juga pada properti atau bisnis NFB di dalam dan sekitar stasiun dan di depo dan area sekitarnya.

The Company's main challenges in applying the TOD approach to transit areas along the MRT Jakarta corridor is the Integrated Urban Renewal in the existing areas that have been built and are projected to become transit areas, not just the construction of transit areas on vacant lands. To answer the challenges of effective city rejuvenation, the DKI Jakarta Government must have a land consolidation instrument in addition to the usual urban planning instruments such as the Urban Design Guidelines. This approach encourages the rejuvenation of an Integrated City and opens the opportunity for the DKI Jakarta Provincial Government to revitalize many important areas along the MRT Jakarta corridor.

NON FAREBOX BUSINESS PLANS AND PROPERTY

The Company's success to consistently provide integrated and international class services to its passengers is definitely dependent on its ability not only to focus its business strategy and allocate its resources to Farebox's revenue, but also to Non-Farebox Business (NFB) revenue. NFB revenue has the potential to be obtained by optimizing the Company's operational assets to obtain revenues from various businesses such as Advertising, Retail management, and Telko network services in stations, etc. or optimization of non-operational assets to generate revenue from the Property business from the Transit-Oriented Development (TOD) realization in the areas surrounding the station. NFB ideas must cover all activities along the Jakarta MRT passenger value chain services that include location and non-location-based business ideas, ranging from planning and booking trips, trips to/from stations, in-station activities, inside train experience and when arriving at the final destination.

The NFB business development by the MRT Jakarta operator has been mandated in the DKI Jakarta Provincial Regulation (Perda) No. 3 Year 2008 concerning the Establishment of Regional Owned Enterprise (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta which was amended by Perda No. 9 Year 2018 concerning the Establishment of Regional Owned Enterprise (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta. Based on the regulatory framework, the work scope of PT MRT Jakarta not only covers the construction, operation, maintenance and development of railway facilities and supporting infrastructure related to the farebox business, but also covers the NFB property or business in the stations and surrounding the stations and in the depots and surrounding area.



RENCANA PENGEMBANGAN USAHA BUSINESS DEVELOPMENT PLAN

Formulasi dari Rencana Bisnis *Non-Farebox* dan Properti MRT Jakarta Fase 1 bertujuan untuk mengidentifikasi peluang pendapatan NFB yang berkelanjutan untuk meningkatkan keuntungan PT MRT Jakarta secara menyeluruh dan untuk mengembangkan rencana bisnis NFB dan Properti di area *transit* koridor Fase 1 MRT Jakarta mulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Beberapa segmen NFB utama di dalam rencana bisnis ini adalah sebagai berikut: Periklanan, Telko, Ritel, dan Properti. Dengan melakukan potensi-potensi NFB ini secara optimal, PT MRT Jakarta bermaksud untuk memanfaatkan pendapatan NFB guna mendukung biaya operasional dan pemeliharannya, mendukung pembayaran pinjaman, mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan publik dalam jangka pendek, dan pada akhirnya, mencapai keberlanjutan dan kemandirian secara finansial serta memberikan pengembalian yang berkelanjutan untuk investor PT MRT Jakarta dalam jangka panjang.

Setelah melakukan studi dan analisis lebih lanjut terkait pengembangan bisnis *non farebox* dan properti yang dapat dilakukan Perusahaan, disimpulkan bahwa pengembangan beberapa *non-farebox* ini perlu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan pihak eksternal agar dapat memperoleh hasil yang optimal dan memaksimalkan pengembalian finansial dari bisnis-bisnis ini.

PENYEDIAAN LAYANAN TELKO UNTUK PUBLIK

Salah satu pengembangan *non farebox* business yang perlu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan pihak eksternal adalah penyediaan konektivitas seluler di sepanjang area operasional (depo, jalur *elevated*, terowongan bawah tanah, dan stasiun-stasiun) MRT Jakarta Fase 1. Penyediaan koneksi seluler dari multi operator atau selanjutnya disebut *in-building solutions* (IBS) adalah kegiatan untuk menyediakan layanan koneksi seluler dari beberapa operator seluler yang mencakup berbagai jaringan (GSM; CDMA; 2G/3G/4G dan seluruh pengembangannya) dan juga layanan WIFI di area operasional PT MRT Jakarta, yang memastikan terpenuhinya ketersediaan kebutuhan penumpang untuk telekomunikasi melalui jaringan telepon seluler (suara dan data) yang stabil dan dapat diandalkan. Di sisi lain, ketersediaan akses internet yang diperlukan oleh *Tenant Retail* di dalam stasiun perlu diakomodir.

Formulation of the Plan for Non-Farebox Business and Property of MRT Jakarta Phase 1 aims to identify sustainable NFB revenue opportunities to increase the overall profit of PT MRT Jakarta and to develop the plan for NFB business and properties in the MRT Jakarta Phase 1's corridor transit area from Lebak Bulus to Bundaran HI. Some of the main NFB segments in this business plan are as follows: Advertising, Telko, Retail, and Property. By optimally carrying out these NFB potentials, PT MRT Jakarta intends to utilize NFB's revenue to support its operational and maintenance costs, support loan payments, reduce dependence on public funding in the short term, and ultimately, to achieve financial sustainability and independence and provide ongoing returns for investors of PT MRT Jakarta in the long run.

After conducting further studies and making analysis on the development of NFB business and property that can be done by the Company, it was concluded that the development of several non-fareboxes needs to be implemented in the form of partnerships with external parties in order to obtain optimal results and maximize financial returns from these businesses .

PROVISION OF TELKO SERVICES FOR THE PUBLIC

One non-farebox business development that needs to be implemented in the form of partnerships with external parties is the provision of cellular connectivity along the operational area (depots, elevated lanes, underground tunnels, and stations) of MRT Jakarta Phase 1. The provision of cellular connections from multi operators or hereinafter referred to as in-building solutions (IBS) is an activity to provide cellular connection services from a number of cellular operators covering a variety of networks (GSM; CDMA; 2G / 3G / 4G and all related developments) and also WIFI services in the operational area of PT MRT Jakarta, which ensuring the availability of passenger needs for telecommunications through a stable and reliable cellular telephone network (voice and data). On the other hand, the availability of internet access required by the Retail Tenant within the station should also be accommodated.



Setelah melalui proses seleksi, PT Tower Bersama terpilih sebagai Mitra Penyedia/Pengelola Konektivitas Seluler dan WIFI di Area Operasional MRT Jakarta Fase 1, dan telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 15 Desember 2017.

KERJA SAMA PERIKLANAN

Terkait pengembangan bisnis non farebox dalam bidang periklanan, dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan pihak eksternal agar dapat memperoleh hasil yang optimal dan memaksimalkan pengembalian finansial dari bisnis periklanan baik di dalam/luar kereta maupun di dalam/luar stasiun.

PT MRT Jakarta, melalui Tim Seleksi Mitra Penyedia Layanan Periklanan melaksanakan proses *Beauty Contest* dengan mengundang perusahaan Media *Outdoor/Out-of-Home* (OOH) potensial yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk membentuk usaha periklanan. Usaha periklanan ini dimungkinkan sampai dengan pembentukan perusahaan *joint venture* (JV) bersama PT MRT Jakarta. Usaha periklanan ini dimulai dari merencanakan, merancang, membangun, menjual, dan mengelola periklanan di dalam/luar kereta sebanyak 16 rangkaian *Rolling Stock*, 1 rangkaian terdiri dari 6 cars dan di dalam/luar stasiun untuk 13 stasiun MRT Jakarta Fase 1 untuk periode 20 tahun. Kerja sama perusahaan periklanan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama yang kerjasamanya dimungkinkan untuk dilanjutkan dan diperluas cakupannya tidak sebatas pada pelaksanaan MRT Jakarta Fase 1 saja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT MRT Jakarta.

Proses seleksi mitra dimaksudkan untuk dapat:

- Meningkatkan pendapatan NFB PT MRT Jakarta dengan mengelola titik-titik periklanan di dalam/luar kereta dan di dalam/luar stasiun.
- Berkontribusi terhadap citra dari PT MRT Jakarta sebagai operator perkeretaapian kelas dunia melalui format dan konten periklanan dengan kualitas tinggi yang dapat dibandingkan dengan entitas transportasi global kelas dunia.
- Memposisikan PT MRT Jakarta sebagai lokasi yang paling dicari untuk periklanan di antara berbagai moda transportasi di Indonesia.
- Memberikan nilai tambah kepada organisasi-organisasi/ individu-individu yang beriklan di properti PT MRT Jakarta.

After going through a selection process, PT Tower Bersama was selected as the Provider Partner/Cellular and WIFI Connectivity Manager in the MRT Jakarta Phase 1 Operational Areas, and has signed a cooperation agreement on December 15, 2017.

ADVERTISING COOPERATION

With regard to the non-farebox business development in the field of advertising, the Company has built partnerships with external parties in order to obtain optimal results and maximize financial returns from the advertising business both inside/ outside the trains and inside/outside the stations.

PT MRT Jakarta, through the Advertising Services Provider Partner Selection Team has conducted a Beauty Contest process by inviting potential Outdoor/Out-of-Home (OOH) Media companies that have the appropriate qualifications to form an advertising business. This advertising business will be allowed to run until the establishment of a joint venture company (JV) with PT MRT Jakarta. This advertising business starts from planning, designing, building, selling, and managing advertising on / outside the trains as many as 16 series of Rolling Stocks, 1 series consisting of 6 cars and inside/outside stations for 13 stations of MRT Jakarta Phase 1 for a period of 20 years. This advertising business cooperation is stated in the Cooperation Agreement where there is a possibility to continue the cooperation and expand its scope not limited to the implementation of MRT Jakarta Phase 1 in accordance with the applicable provisions in PT MRT Jakarta.

The partner selection process is intended to be able to:

- *Increase NFB revenues of PT MRT Jakarta by managing advertising points inside/ outside the trains and inside/ outside the stations.*
- *Contribute to the image of PT MRT Jakarta as a world-class railway operator through high-quality format and advertising content that can be compared to world-class global transportation entities.*
- *Place PT MRT Jakarta as the most sought-after location for advertising among various modes of transportation in Indonesia.*
- *Provide added value to organizations / individuals who advertise on the property of PT MRT Jakarta.*

Setelah melalui proses seleksi, PT Avabanino Perkasa terpilih sebagai Mitra Penyedia Layanan Periklanan di Area Operasional MRT Jakarta Fase 1, dan telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 13 Desember 2017. Dalam kerja sama ini, PT Avabanindo Perkasa didukung oleh Alternative Media Group (AMG), Puncak Berlian Sdn Bhd (Redberry Malaysia), dan VGI Global Media Sdn Bhd Malaysia yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang periklanan.

KERJA SAMA RITEL

Dalam hal pemanfaatan area-area komersial di Stasiun-Stasiun MRT Jakarta kami membuka peluang kerja sama melalui seleksi mitra yang dibuka secara umum melalui media digital. Sesuai dengan konsep yang ada bahwa pemilihan seleksi mitra ritel dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

1. Ritel Reguler: Kerja sama ritel reguler ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan yang terintegrasi dan bermutu tinggi yang konsisten kepada penumpang. Mitra Retail reguler merupakan mitra yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan telah memiliki outlet di Mal ternama, Bandara, Stasiun, Pelabuhan dan area publik lainnya.
2. Ritel UMKM: Perusahaan menilai kerja sama ritel UMKM ini sangat penting karena selain mampu memberikan pelayanan bagi penumpang, ritel UMKM diharapkan dapat meningkatkan dampak sosial ekonomi yang baik bagi kawasan sekitar serta memberikan nilai tambah dan menjadi identitas bagi kawasan di sekitar Stasiun MRT.

TRANSIT PROPERTY BUSINESS

Pilihan utama Perusahaan dalam mengembangkan *Transit Property Business* adalah dengan:

1. Mengembangkan & memiliki *Transit Oriented Property*: Perusahaan berusaha untuk memiliki properti *estate* di atas dan sekitar stasiun dengan:
 - » mengembangkan area yang dikuasai MRT Jakarta; dan
 - » bekerja sama dengan Pemerintah atas kelebihan tanah untuk diberikan/diakusisi oleh MRT Jakarta dan penyampaian *transit oriented development*.
2. Menegosiasikan akses interkoneksi dengan pemilik properti dalam kawasan *transit* terutama yang bersebelahan dengan stasiun/depo MRT Jakarta: Memaksimalkan interkoneksi/integrasi dengan stasiun/depo MRT Jakarta untuk menambahkan *ridership* penumpang MRT Jakarta, dan/atau melalui

After going through a selection process, PT Avabanino Perkasa was selected as the Advertising Service Provider Partner in the MRT Jakarta Phase 1 Operational Areas, and signed a cooperation agreement on December 13, 2017. In this collaboration, PT Avabanindo Perkasa is supported by Alternative Media Group (AMG), Puncak Berlian Sdn Bhd (Redberry Malaysia), and VGI Global Media Sdn Bhd Malaysia which already have experience in advertising.

RETAIL COOPERATION

In terms of utilization of commercial areas in MRT Stations we open up opportunities for cooperation through partner selection which is opened in general through digital media. In accordance with the existing concept, the retail partner selection is divided into 2 (two) categories, namely:

1. *Regular Retail: This regular retail collaboration is intended to provide consistent and high-quality integrated services to passengers. Regular Retail Partners are partners who have experience in their fields and already have outlets in well-known malls, airports, stations, ports and other public areas.*
2. *UMKM Retail: The Company considers the UMKM retail cooperation to be very important because in addition to being able to provide services for passengers, MSME retail is expected to increase the socio-economic impact that is good for the surrounding areas and provide added value and become an identity the MRT Stations' surrounding areas.*

TRANSIT PROPERTY BUSINESS

The Company's main choice in developing Transit Property Business is by:

1. *Developing & possessing Transit Oriented Property: The Company strives to own property estates above and around the stations by:*
 - » *Developing areas controlled by MRT Jakarta; and*
 - » *cooperating with the Government on excess land to be granted / acquired by MRT Jakarta and the delivery of transit oriented development.*
2. *Negotiating interconnection access with property owners in transit areas especially those adjacent to MRT Jakarta's stations / depots: Maximizing interconnection / integration with Jakarta MRT stations/ depots to add MRT Jakarta's passengers ridership, and/or through joint participation in third party property development such as management*



partisipasi bersama pengembangan properti milik pihak ketiga seperti pengelolaan area interkoneksi untuk mengembangkan potensi area retail bersama.

Kesempatan *direct value capture* lainnya terbatas untuk Perusahaan karena keterbatasan kepemilikan lahan dalam kuasa Perusahaan. Perusahaan akan bekerja dengan pemilik properti yang berbatasan untuk mengidentifikasi kesempatan untuk *property* berorientasi *Transit*. Fitur utama dari pengaturan ini dapat berupa:

- Fasilitas akses langsung antara stasiun MRT Jakarta dan properti yang berdekatan;
- Negosiasi terhadap *access rights* atau persetujuan penyewaan dengan penyewaan dinegosiasikan antara MRT Jakarta dan pihak ketiga; dan,
- Kewajiban pemeliharaan bisa saja diberikan kepada pihak ketiga.

PENYUSUNAN MASTER PLAN DAN USULAN PANDUAN RANCANG KOTA (PRK) KAWASAN TRANSIT TERPADU

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan dengan konsep TOD, perlu dibuat perencanaan jangka panjang di level kawasan yang dijadikan acuan bagi pembuatan Panduan Rancang Kota (PRK) atau *Urban Design Guidelines* (UDGL). Pengembangan Kawasan *Transit* Terpadu sepanjang Koridor MRT Jakarta Tahap 1 terbagi menjadi dua titik. Titik pertama berpusat kepada Stasiun Dukuh Atas dan ditambah dengan 6 stasiun layang lainnya, sedangkan titik kedua merupakan masterplan jaringan pejalan kaki.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No.182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta tahap 1 akan menjadi kawasan TOD sesuai dengan klasifikasinya dan dalam rangka "*Rail + Property*" maka MRT Jakarta akan mempersiapkan masterplan kawasan TOD untuk ke-13 stasiun MRT Jakarta Tahap 1.

Masterplan Fase 1 meliputi perencanaan untuk Dukuh Atas, Blok M – Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A, Haji Nawi), dan Fatmawati. Konsultan terpilih merupakan kerja sama antara PT Pandega Desain Weharime dan PT Wahana Trans Utama dari Jakarta yang bergerak di bidang jasa konsultasi arsitektur - *master plan* dan jasa konsultasi bidang transportasi. Sementara Skidmore, Owings

of interconnection areas to jointly develop potential retail areas.

Other direct value capture opportunities are limited to the Company due to limited land ownership by the Company. The Company will work with adjacent property owners to identify opportunities for developing Transit-Oriented property. The main features of this arrangement can be in the form of:

- *Facilitation of direct access between MRT Jakarta stations and adjacent properties;*
- *Negotiation of access rights or rental agreements with negotiated rentals between MRT Jakarta and third parties; and,*
- *Maintenance obligations may be given to third parties.*

PREPARATION OF THE MASTER PLAN AND PROPOSED URBAN DESIGN GUIDELINES FOR INTEGRATED TRANSIT AREAS

In the context of implementing regional development with the TOD concept, long-term planning at the regional level should be made as a reference for the preparation of the City Design Guidelines (PRK) or Urban Design Guidelines (UDGL). Development of an Integrated Transit Area along the MRT Jakarta Phase 1 Corridors is divided into two points. The first point is centered on Dukuh Atas Station added with 6 other elevated stations, while the second point is a pedestrian network masterplan.

As stated in Governor Regulation No. 182 of 2012 concerning the City Design Guidelines (PRK) for the Development of MRT Jakarta Phase 1 Corridors that all the areas surrounding the MRT Jakarta Phase 1 will be TOD areas according to its classification and in the context of "Rail + Property", MRT Jakarta will prepare the TOD area masterplan for the 13 stations of MRT Jakarta Phase 1.

The Phase 1 Masterplan includes planning for Dukuh Atas, Blok M - Sisingamangaraja, Fatmawati Raya (Cipete, Blok A, Haji Nawi), and Fatmawati corridors. The appointed consultant is a collaboration between PT Pandega Desain Weharime and PT Wahana Trans Utama from Jakarta which engages in architectural – master plan consulting services and transportation consulting

& Merrills merupakan konsultan dari USA dengan pengalaman internasional dari tahun 1936 di bidang arsitektur dan master plan di lebih dari 50 negara dunia, salah satu proyek arsitektural SOM yang terkenal adalah One World Trade Center – New York, Burj Khalifa–Dubai dan King Abdul Aziz – Jeddah, sementara untuk proyek master plan dari SOM adalah Beijing Financial Center – Beijing, Denver Union Station – Denver dan Tokyo Midtown – Tokyo. Proses penyusunan dokumen ini telah selesai pada tahun 2018.

services. While Skidmore, Owings & Merrills (SOM) is a consultant from the USA with international experience from 1936 in the fields of architecture and master plans in more than 50 countries around the world, one of SOM's famous architectural projects is the One World Trade Center - New York, Burj Khalifa - Dubai and King Abdul Aziz - Jeddah, while the master plan project from SOM is Beijing Financial Center - Beijing, Denver Union Station - Denver and Tokyo Midtown - Tokyo. The document drafting process was already completed in 2018.

Masterplan Fase 1 juga berfokus pada area bawah tanah meliputi area Bundaran HI, Setiabudi, Bendungan Hilir, dan Istora – Senayan. Konsultan terpilih merupakan kerja sama antara ARUP International, Pusat Studi Urban Desain (PSUD) dan PT Pandega Desain Weharima, ARUP merupakan salah satu konsultan yang menggabungkan antara keahlian teknis dengan keahlian design baik dalam bidang masterplan ataupun arsitektur yang berdiri dari tahun 1946 dengan berbagai pengalaman internasional lebih dari 50 negara. Berikut adalah beberapa pengalaman ARUP di berbagai kota dunia seperti South Beach, Singapore hasil kerja sama dengan Norman Foster, Seattle Central Library, USA kerja sama dengan Rem Koolhaas, Sydney CBD and Rail Rail kerja sama dengan Hassell dan Jan Gehl. Proses penyusunan dokumen ini telah selesai pada tahun 2018.

The Phase 1 Masterplan also focuses on the underground area covering the area of Bundaran HI, Setiabudi, Bendungan Hilir, and Istora - Senayan. The appointed consultant is a collaboration between ARUP International, the Center for Urban Design Studies (PSUD) and PT Pandega Desain Weharima. ARUP is one of the consultants who combines technical expertise with design expertise in the field of masterplan or architecture founded in 1946 with various international experiences in more than 50 countries. ARUP has long standing experiences in various world cities such as South Beach, Singapore in collaboration with Norman Foster, Seattle Central Library, USA in collaboration with Rem Koolhaas, Sydney CBD and Rail Rail in collaboration with Hassell and Jan Gehl. The document preparation process was already completed in 2018.

Sebagai tindak lanjut untuk kesiapan MRT Jakarta Fase 2, PT MRT Jakarta juga sedang melakukan proses penyusunan *Masterplan* dan Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Terpadu MRT Jakarta Fase II yang meliputi area Sarinah, Monas-Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, dan Glodok-Kota. PT MRT Jakarta bekerja sama dengan PT LAPI ITB, Pusat Studi Urban Desain (PSUD), dan Gensler USA. Beberapa pengalaman Gensler dalam desain antara lain adalah Shanghai Tower, Abu Dhabi Financial Center, Saadiyat Island, dan Incheon International Airport, South Korea.

As a follow up to the MRT Jakarta Phase 2 readiness, PT MRT Jakarta is also in the process of drafting the City Design Master Plan and Guidelines for MRT Jakarta Phase 2 Transit Areas which include Sarinah, Monas-Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, and Glodok -City. PT MRT Jakarta cooperates with PT LAPI ITB, Urban Design Study Center (PSUD), and Gensler USA. Some of Gensler's experiences in design include Shanghai Tower, Abu Dhabi Financial Center, Saadiyat Island, and Incheon International Airport, South Korea.

Manfaat penggunaan Dokumen *Master plan* dan Panduan Rancang Kota (PRK) bagi Kawasan *Transit* Terpadu ini di antaranya meliputi:

- Sebagai masukan pada Pemprov DKI Jakarta untuk penyusunan Panduan Rancang Kota (PRK) kawasan *transit* terpadu.
- Sebagai pedoman awal bagi para pelaku pembangunan, dalam melakukan proses perancangan, pemanfaatan ruang/pembangunan fisik maupun pemanfaatan ruang serta pengelolaan pada Kawasan *Transit* Terpadu; yang diharapkan akan lebih terpadu dan menyatu dengan sistem stasiun dari sarana angkutan umum masal yang ada dalam kawasan khususnya stasiun MRT Jakarta.

The benefits of using the City Design Master Plan and Guidelines for the Integrated Transit Areas are as follows:

- *As inputs to the DKI Jakarta Provincial Government for the preparation of the Integrated City Design Guidelines.*
- *As initial guidelines for parties in the development in carrying out the design process, space utilization/physical development as well as space utilization and management in the Integrated Transit Areas; which are expected to be more integrated with the station system of mass public transportation facilities in the area, especially the MRT Jakarta stations.*



- Sebagai acuan dan visi dasar dalam menyelaraskan kepentingan berbagai *stakeholders* terkait (instansi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) terutama dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pentahapan dan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut serta pengelolaan kawasan yang berorientasi *transit*.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan program-program pengembangan kawasan yang tanggap terhadap rencana investasi dan kota berkelanjutan.

- *As a basic reference and vision in aligning the interests of various relevant stakeholders (government agencies, communities and business world), especially in the formulation of technical policies, planning, programming, phasing and implementation of development from each stakeholder and the transit-oriented areas management.*
- *As guidelines in preparing regional development programs that are responsive to investment plans and sustainable city.*

RENCANA PENGELOLAAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) DI STASIUN DUKUH ATAS MRT JAKARTA

Kawasan Dukuh Atas dimana terdapat banyak moda transportasi publik di area tersebut seperti *Airport Train Station*, *Dukuh Atas MRT Station*, *Sudirman Commuter Station*, *TransJakarta*, dan *LRT* menjadikan area ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dengan konsep TOD.

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) PLAN AT MRT JAKARTA DUKUH ATAS STATION

There are some modes of public transportation in Dukuh Atas such as Airport Train Station, Dukuh Atas MRT Station, Sudirman Commuter Station, TransJakarta, and LRT, which make this area has ample potential to be developed with the TOD concept.

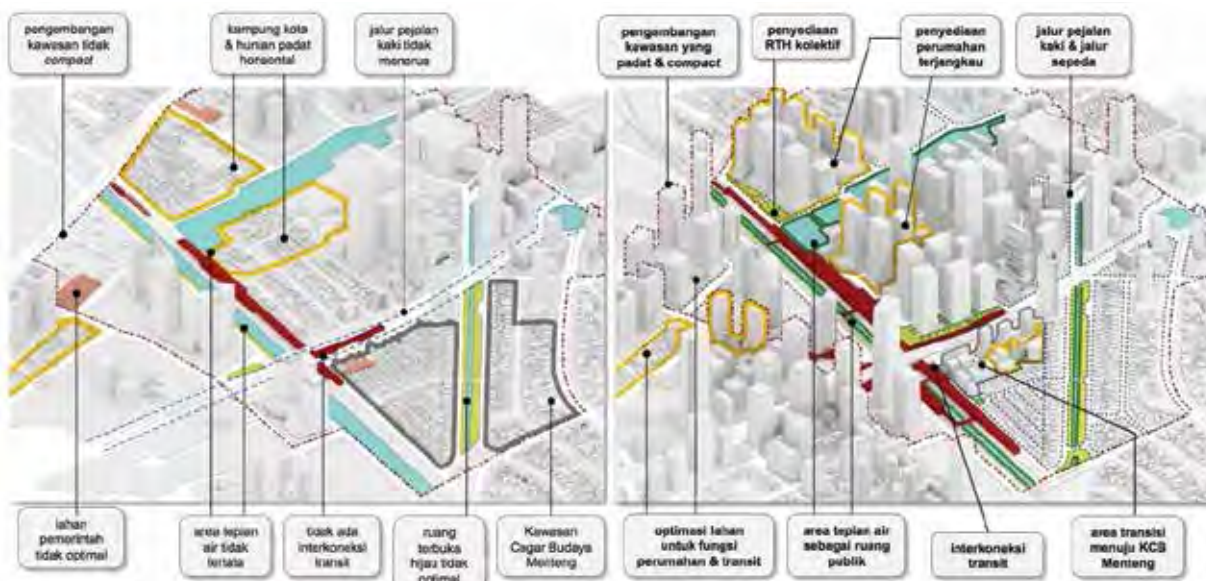
Gambar Rencana Pengembangan TOD Stasiun Dukuh Atas
Plan development TOD Station Dukuh Atas

Kondisi Existing Kawasan

Condition Existing Area

Realisasi PRK

PRK Realization



Sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai area TOD, telah diadakan pencanangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 29 Maret 2018 bertempat di lahan ex. Pasar Blora yang bekerja sama dengan PD Pasar Jaya. Pada acara ini pula dibahas pentingnya keterlibatan publik dalam pengembangan kawasan kota.

As an area that has ample potential to be developed as a TOD area, the DKI Jakarta Province Governor Anies Baswedan, on March 29, 2018 held an inauguration to announce Dukuh Atas as TOD area taking place on ex Blora Market land in collaboration with PD Pasar Jaya. In this event, the importance of public involvement in urban areas development was also discussed.



Pencanangan Kawasan Berorientasi Transit DUKUH Atas dan Peluncuran Partisipasi Publik, 29 Maret 2018
Announcement of Dukuh Atas Transit Oriented Development Area and Launching of Public Participation, March 29, 2018

Keterlibatan publik dalam proses pengembangan kawasan difasilitasi dengan penyelenggaraan sayembara untuk gagasan desain konsep *transit* hub Dukuh Atas yang diselenggarakan oleh PT MRT Jakarta bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta (IAI Jakarta). Keberadaan transport hub tersebut menjadi sangat penting dalam kawasan TOD Dukuh Atas untuk mendukung dan mendorong terjadinya perubahan pergerakan manusia dalam kawasan TOD yang lebih mendukung pejalan kaki.

Public involvement in the regional development process was facilitated by the holding of Dukuh Atas Transport Hub Competition organized by PT MRT Jakarta in collaboration with the Indonesian Institute of Architects Jakarta (IAI Jakarta). The existence of this transport hub is very important in the Dukuh Atas TOD area to support and encourage changes in the movement of people in the TOD area that are more supportive to pedestrians



Pameran Karya Sayembara Gagasan Desain Konsep Transit Hub Dukuh Atas 27 September 2018
Work Exhibition of the Dukuh Atas Transport Hub Competition September 27, 2018



Adapun sayembara ini diikuti oleh 51 karya dan dinilai oleh juri-juri yang terdiri dari praktisi arsitektur dan perkotaan, akademisi, budayawan, dan perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta. Proses sayembara *transport HUB* Dukuh Atas menghasilkan Juara 1 dengan konsep “*ReGreen-eration*”, Juara 2 dengan konsep “*Taman Transit Dukuh Atas*”, dan Juara 3 dengan konsep “*Urban Acupuncture*”.

The competition was participated in by 51 works and was judged by judges consisting of architectural and urban practitioners, academicians, artists, and representatives from the DKI Jakarta Provincial Government. The Dukuh Atas Transport Hub Competition winners are : 1st Place with the concept of “ReGreen-eration”, 2nd Place with the concept of “Dukuh Atas Transit Park”, and the 3rd Place with the concept of “Urban Acupuncture”.



SINERGI ANTAR BUMD

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan turut berperan untuk mendorong sinergi antar BUMD yang juga berada di bawah kepemilikan Pemprov DKI Jakarta. Di samping mendukung program Pemerintah atas penguatan BUMN/BUMD sebagai agen pembangunan, sinergi ini dapat memberikan kesempatan kepada BUMD untuk mengembangkan kompetensi dan kapabilitasnya demi meningkatkan daya saing dari masing-masing BUMD.

Sinergi antar BUMD telah tercipta melalui beberapa program, seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan dan Bank DKI terkait pembayaran gaji serta pemberian pinjaman kepada karyawan Perusahaan. Sinergi lainnya juga muncul melalui penyediaan fasilitas rapat Perusahaan di luar kantor oleh PT Jakarta Tourisindo. Sinergi-antar BUMD seperti ini akan terus diupayakan sebagai bagian dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat BUMD untuk dapat terus tumbuh dan memberikan nilai tambahnya kepada masyarakat Jakarta.

SYNERGY BETWEEN BUMDS

As one of the Regional Owned Enterprises (BUMDs) owned by the DKI Jakarta Provincial Government, the Company has a role to encourage synergy amongst BUMDs under the ownership of the DKI Jakarta Provincial Government. In addition to supporting Government programs for strengthening BUMN/BUMD as agents of development, this synergy can provide opportunities for BUMDs to develop their competencies and capabilities in order to increase the competitiveness of each BUMD.

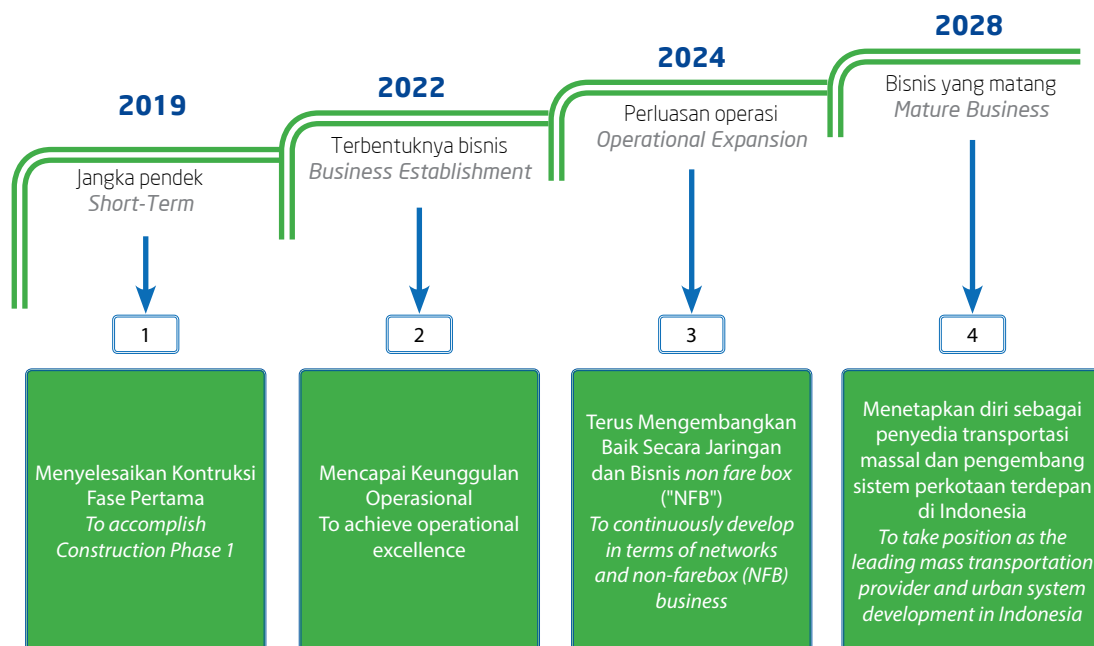
Synergies amongst BUMDs have been created through several programs, such as Cooperation Agreements (PKS) between the Company and DKI Bank regarding salary payments and the Company's employee loans. Other synergies also were created through the provision of the Company's meeting facilities outside the office by PT Jakarta Tourisindo. Such synergies amongst BUMDs will continue to be sought as part of the DKI Jakarta Provincial Government policy in strengthening BUMD to continuously grow and provide added value to the people of Jakarta.

PETA JALAN USAHA
BUSINESS ROAD MAP: THE COMPANY'S LONG-TERM PLAN

Salah satu perwujudan sinergi BUMD dilakukan melalui integrasi antar moda transportasi di Jakarta, yaitu MRT Jakarta, TransJakarta, dan LRT. Integrasi ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan fasilitas antar moda transportasi yang akan memberikan layanan transportasi publik terpadu bagi masyarakat Jakarta. Di samping itu, integrasi ini juga akan menciptakan nilai tambah bagi pengelolaan usaha pada masing-masing BUMD.

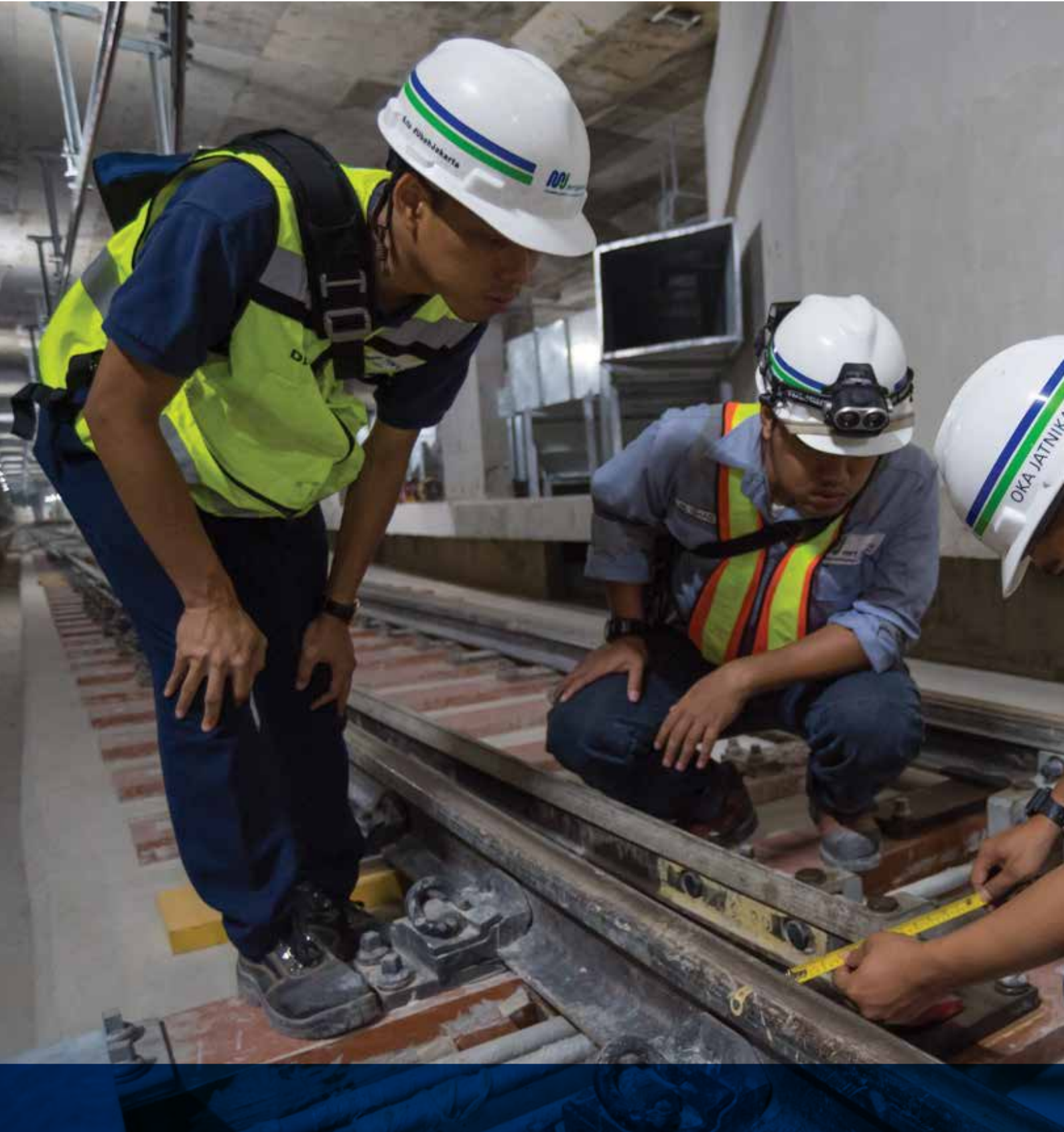
The BUMD synergy is embodied through, among others, the integration between modes of transportation in Jakarta, namely MRT Jakarta, TransJakarta busway, and LRT. This integration is expected to encourage the use of inter-mode transportation facilities that will provide integrated public transportation services for the people of Jakarta. In addition, this integration will also create added value for business management in each BUMD.

PETA JALAN USAHA
RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
BUSINESS ROAD MAP: THE COMPANY'S LONG-TERM PLAN



Seperti yang tergambar pada bagan di atas, Perusahaan memiliki rencana jangka panjang hingga tahun 2028, dengan capaian memiliki bisnis yang matang. Tahapan-tahapan di atas menjadi tujuan pengembangan Perusahaan ke depan, dengan landasan utama mengedepankan layanan bagi penumpang MRT Jakarta sekaligus membangun model usaha yang berkelanjutan.

As illustrated in the chart above, the Company has a long-term plan until 2028, with the targeted achievement of having a mature business. The above stages are the objectives of the Company's development going forward, with the main foundation to prioritize services for MRT Jakarta passengers while building a sustainable business model.





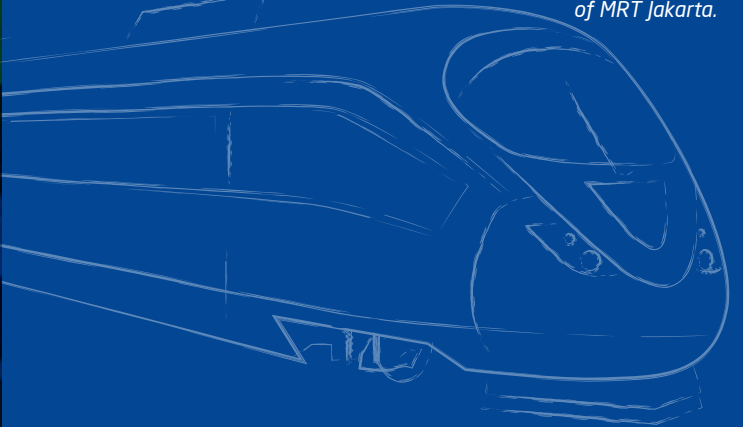
05

PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORTING

Sebagai aset berharga Perusahaan, kehadiran Sumber Daya Manusia menjadi aspek keberhasilan untuk dapat menghadirkan layanan MRT Jakarta yang berkualitas.

As a valuable asset of the Company, the presence of Human Resources is an aspect of success to delivering quality services of MRT Jakarta.





TUMBUH BERSAMA KARYAWAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES



Sebagai entitas usaha berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih muda belia, elemen Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam membentuk fondasi, pola dan cikal bakal Perusahaan. Kehadiran SDM dalam proses awal Perusahaan, yaitu tahapan konstruksi dan persiapan pengoperasian layanan MRT Jakarta, menjadi penentu keberhasilan Perusahaan untuk dapat menghadirkan layanan MRT Jakarta yang berkualitas dan mampu menjawab persoalan kemacetan serta kebutuhan transportasi publik di ibukota.

Untuk itu, Perusahaan memandang SDM sebagai aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus, baik dalam bentuk pengembangan kompetensi, sertifikasi dan peningkatan kapasitas diri, maupun tingkat kesejahteraan. Pengelolaan SDM memiliki tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pengelolaan SDM di lingkup Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi SDM yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan strategis, pengelolaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan SDM.

As a young business entity owned by a Regional Owned Enterprise (BUMD), the element of Human Resources (HR) is crucial in shaping the foundation, pattern and forerunner of the Company. The presence of HR in the Company's initial process, namely the stages of construction and preparation for the operation of the Jakarta MRT service, determines the success of the Company to be able to present Jakarta MRT services that are of high quality and able to answer the congestion problems and the need of public transportation in the capital.

For this reason, the Company views HR as a valuable asset whose existence has always received special attention, both in the form of competency development, certification and self-improvement, as well as welfare levels. Human Resources Management has the responsibility to form reliable and competent employees to be able to carry out their duties properly. Human Resources management in the scope of the Company is carried out by the Human Resources Division which has duties and responsibilities in strategic planning, management, supervision, evaluation and development of all aspects related to the Human Resources management.



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

SISTEM MANAJEMEN SDM

Dalam mengembangkan organisasi dan SDM, Perusahaan memiliki sistem pengelolaan dan manajemen SDM yang diharapkan dapat menopang seluruh proses perkembangan yang terus berjalan seiring dengan pertumbuhan proyek dan bisnis Perusahaan ke depan.

1. Accountability Mapping Matrix

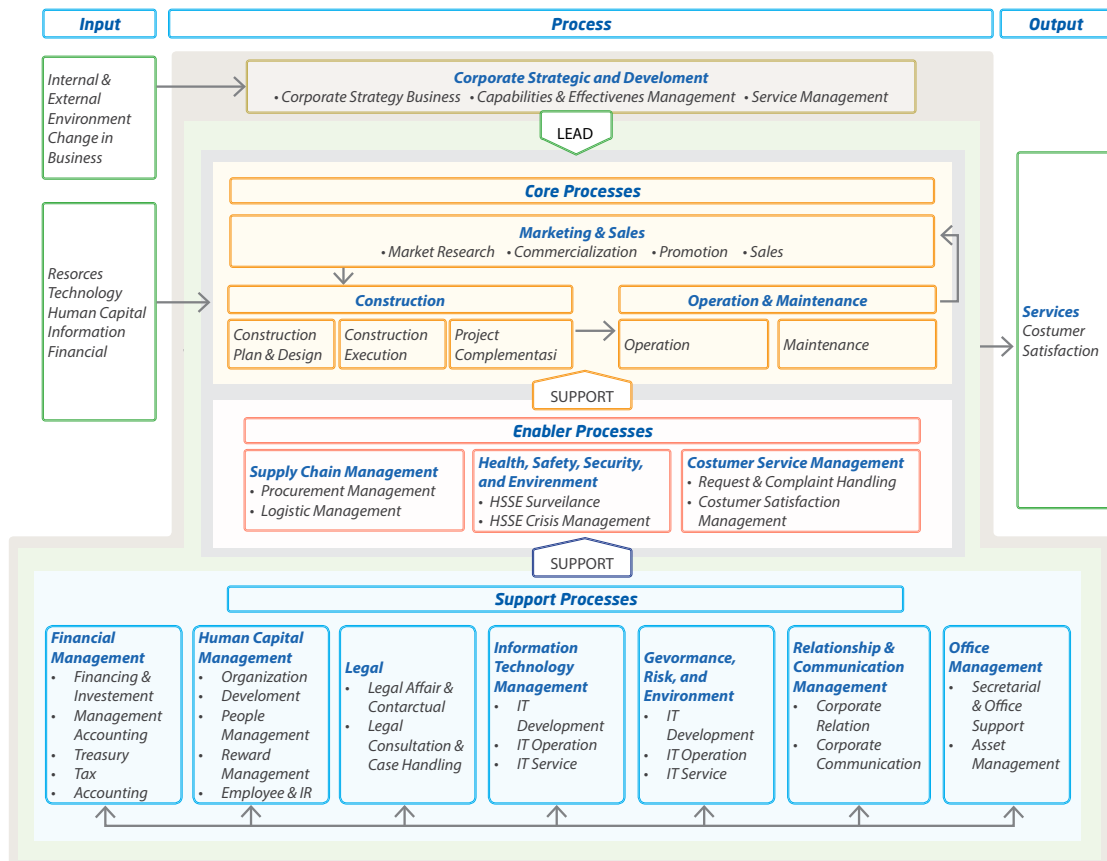
Accountability Mapping Matrix (AMM) adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memetakan seluruh bidang atau proses pekerjaan terhadap posisi atau jabatan dalam sebuah organisasi. AMM bersifat dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis Perusahaan dan perkembangan struktur organisasi. Untuk membuat AMM diperlukan analisa terhadap value chain dan analisa proses bisnis, di mana output dari AMM akan menjadi dasar dalam pembuatan Job Description. Berikut adalah value chain pada Perusahaan yang menjadi dasar dalam penyusunan proses bisnis:

THE HR MANAGEMENT SYSTEM

In developing the organization and Human Resources, the Company has an Human Resources management and management system that is expected to support the entire development process that continues to go hand in hand with the future growth of the Company's projects and business.

1. Accountability Mapping Matrix

(AMM) is a device used to map all fields or work processes to positions or occupations in an organization. AMM is dynamic in accordance with the development of the Company's business processes and the development of organizational structures. To make AMM an analysis of value chain and business process analysis is needed, where the output of AMM will be the basis for making Job Description. The following is the value chain for the Company which is the basis for the preparation of business processes:





2. *Job Profile*

Job Profile merupakan rangkuman yang berisi informasi mengenai tugas dan tanggung jawab serta kualifikasi suatu posisi jabatan. Dalam membuat *Job Profile* didasari pada kedinamisan perubahan struktur organisasi dan perkembangan proses bisnis. Proses pembuatan *Job Profile* melibatkan para kepala dari masing-masing bisnis unit sebagai pemilik proses dan bisnis unit SDM sebagai fasilitatornya. *Job Profile* menggambarkan kejelasan tugas yang harus diketahui oleh pemegang jabatan dan menggambarkan hubungan jabatan dalam struktur organisasi sehingga diharapkan tidak ada duplikasi tugas dan tanggung jawab antar jabatan. Selain itu *Job Profile* berfungsi sebagai analisis beban kerja suatu jabatan dan sebagai dasar pengukuran standar *performance* karyawan.

3. *Job Family*

Job Family adalah kumpulan atau pengelompokan pekerjaan yang secara substansial memiliki muatan atau elemen dan persyaratan pekerjaan serta kompetensi perilaku yang lebih kurang sama. *Job Family* berfungsi untuk menentukan persyaratan kompetensi untuk setiap jenis pekerjaan, mengidentifikasi Jalur karier Jabatan dan orang yang memangku jabatan (*Job to Job, Person to Job, Job to Person*) yang didasari kesamaan tugas atau tanggung jawab yang dimiliki atau yang disyaratkan. Selain itu *Job Family* juga digunakan untuk klasifikasi jabatan antara lain *Core, Support to Core* dan *Support* serta menjadi salah satu dasar dalam implementasi *outsourcing management* dan sistem remunerasi.

4. *Competency Model*

Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang yang membuatnya mampu bekerja dan menghasilkan *output* yang lebih baik daripada kebanyakan orang. Kompetensi terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar:

- a. *Technical Competency*: kompetensi yang mencakup kemampuan dan ketrampilan teknis yang dimiliki karyawan sesuai dengan bidang ilmu dan bidang pekerjaan yang digelutinya. Misalnya bidang keuangan, *marketing, engineering, teknologi informasi, legal, akunting, dan sebagainya.*
- b. *Soft Competency*: kompetensi yang mencakup kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia, nilai-nilai Perusahaan serta yang membangun interaksi dengan orang lain. *Soft Competency* ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

2. *Job Profile*

Job Profile is a summary that contains information about the duties and responsibilities and qualifications of a position. Creating of a *Job Profile* is based on the dynamism of changes in organizational structure and the development of business processes. The process of creating a *Job Profile* involves the heads of each business unit as the process owner and Human Resources unit business as the facilitator. *Job Profile* describes the clarity of tasks that must be known by the office holder and describes the position relations in the organizational structure so that there is no duplication of duties and responsibilities between offices. In addition, the *Job Profile* serves as an analysis of the workload of a position and as a basis for measuring employee performance standards.

3. *Job Family*

Job Family is a collection or grouping of jobs that substantially has content or elements and job requirements and behavioral competencies that are more or less the same. *Job Family* functions to determine competency requirements for each type of work, identify Career Paths and people who hold positions (*Job to Job, Person to Job, Job to Person*) that is based on the same tasks or responsibilities that are owned or required. In addition, *Job Family* is also used for job classification, including *Core, Support to Core* and *Support*, and is one of the bases in implementing *outsourcing management* and remuneration systems.

4. *Competency Model*

Competence is a characteristic that someone possesses that makes it able to work and produce better output than most people. *Competence* is divided into 2 (two) major parts:

- a. *Technical Competency*: competencies that include the capabilities and technical skills possessed by employees in accordance with the field of science and the field of work they do. For example in the fields of finance, *marketing, engineering, information technology, legal, accounting, etc.*
- b. *Soft Competency*: competencies that include the ability to manage work processes, human relations, company values and that build interaction with others. This *Soft Competency* is divided into 3 (three) parts, including:



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

- *Core Competency*: kompetensi yang disarikan dari visi, misi, budaya/nilai-nilai, dan strategi organisasi dan disarankan untuk seluruh karyawan, serta merujuk pada karakteristik ideal yang diharapkan dari karyawan di sebuah Perusahaan.
- *Leadership Competency*: kompetensi yang berhubungan dengan tanggung jawab manajerial dan disyaratkan untuk karyawan-karyawan yang menempati posisi manajerial (*leaders*) serta merujuk pada peran karyawan sebagai pemimpin unit kerja.
- *Spesific Comopetency*: kompetensi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan/ proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya dan harus dimiliki oleh setiap karyawan yang menduduki jabatan di masing-masing *Job Family* serta merujuk pada tugas dan tanggung jawab spesifik tiap Jabatan.
- *Core Competency*: competence that is abstracted from the vision, mission, culture / values, and organizational strategy and is recommended for all employees, and refers to the ideal characteristics expected from employees in a company.
- *Leadership Competency*: competencies related to managerial responsibility and required for employees who occupy managerial positions (*leaders*) and refer to the role of employees as leaders of work units.
- *Specific Competency*: competencies related to the field of work / business processes that become its responsibility and must be owned by every employee who occupies positions in each *Job Family* and refers to the specific tasks and responsibilities of each *Position*.

Seperangkat kompetensi yang disyaratkan untuk suatu jabatan, agar pemangku jabatan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan (sangat) baik, dan mencapai (atau melampaui) sasaran yang diharapkan merupakan *Competency Model*. Pada saat ini Perusahaan telah memiliki *Competency Model* untuk *Core Competency* dan *Leadership Competency* dimana telah menjadi acuan dalam pelaksanaan *Assessment Program*. Untuk *Technical Competency* akan disusun pada tahun 2019.

A set of competencies required for a position, so that office holders can carry out their work (very) well, and achieve (or exceed) the expected target of the Competency Model. At present the Company has a Competency Model for Core Competency and Leadership Competency which has become a reference in the implementation of the Assessment Program. Technical Competency will be prepared in 2019.

Competency Model yang disusun akan menjadi standar yang diterapkan Perusahaan dalam:

1. Merekrut dan menempatkan karyawan.
2. Menentukan jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Menentukan standar perilaku yang akan menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam Sistem Manajemen Kinerja.
4. Menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun jalur karier

The Competency Model prepared will be the standard that the Company applies in:

1. *Recruit and assign employees.*
2. *Determine the type of competency development needed.*
3. *Determine standards of behavior that will be one of the goals that must be achieved in the Performance Management System.*
4. *Being one of the considerations in preparing a career path.*



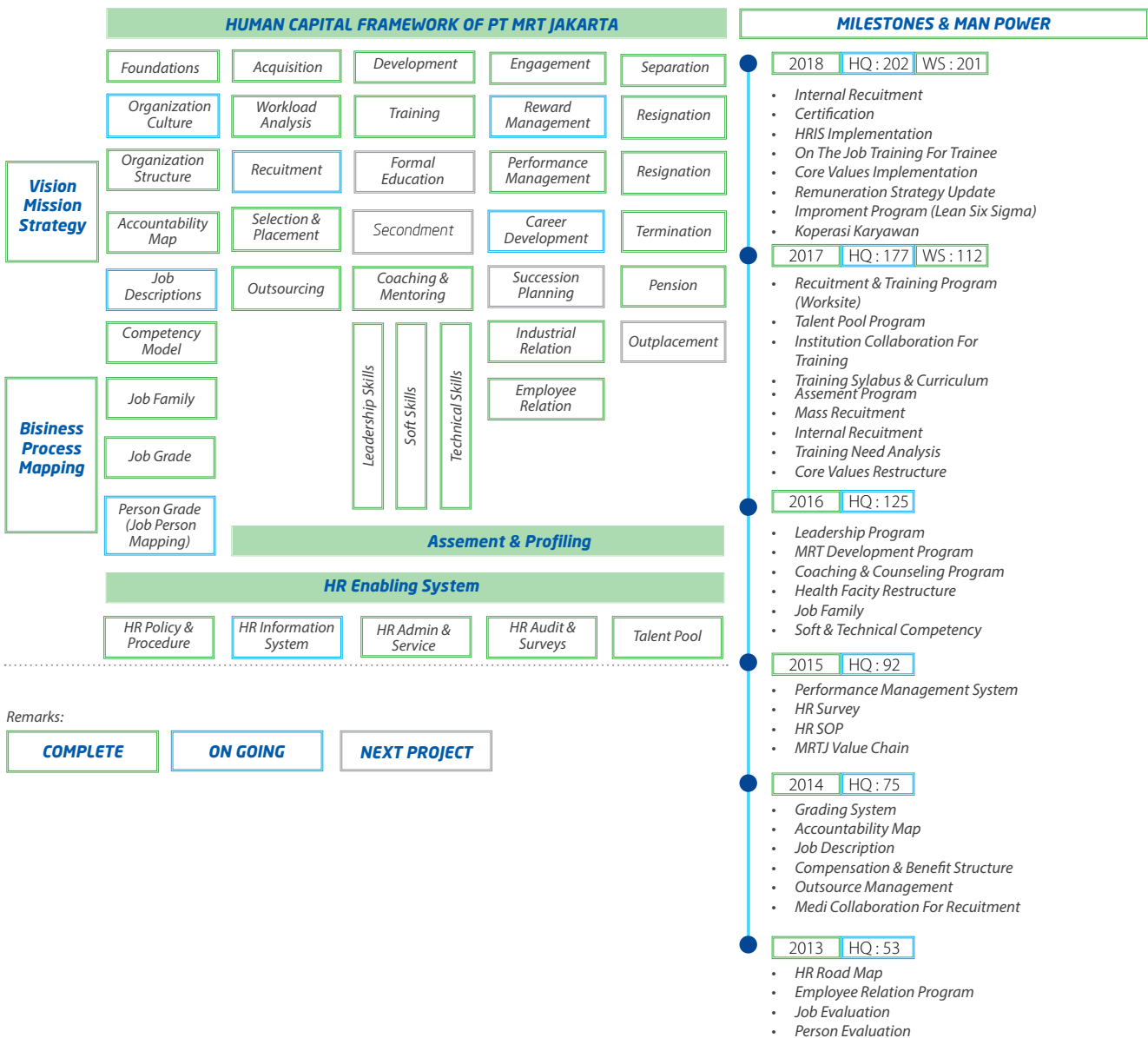
PETA JALAN PENGEMBANGAN SDM

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ROADMAP

Perusahaan telah menyusun *roadmap* pengembangan SDM untuk mendukung visi dan misi Perusahaan, sebagaimana yang terlampir di bawah ini:

The Company has compiled a HR development roadmap to support the Company's vision and mission, as attached below:

Rencana dan Target Kegiatan serta Realisasinya di Sepanjang Tahun 2018 Planning, Target Activities and Realization in 2018





TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE SDM

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan sebagai penunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas di Perusahaan, dibutuhkan sebuah acuan baku yang memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan serta menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosedural. Untuk itu, disusun beberapa *Standard Operational Procedure (SOP)* yaitu:

1. SOP *Training* (Pelatihan & Pengembangan)
2. SOP Fasilitas Kesehatan
3. SOP Perjalanan Dinas
4. SOP *Performance Management System (PMS)*
5. SOP Remunerasi
6. SOP Alih Daya
7. SOP Peraturan dan Sanksi Disiplin
8. SOP Status Kepegawaian dan Pengangkatan Karyawan
9. SOP *Talent Acquisition*
10. SOP *Talent Development*
11. SOP Terminasi

REKRUTMEN DAN TURNOVER

Perencanaan SDM, atau *Man Power Planning (MPP)* dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap jabatan pada struktur organisasi, beban kerja pada jabatan yang bersangkutan, *turnover* tenaga kerja, dan/atau produktivitas organisasi. Penyusunan MPP dilakukan untuk menjadwalkan rencana program perekrutan.

Pola penjangkaran karyawan baru dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar yang kemudian tersaring melalui proses rekrutmen dalam sistem penerimaan karyawan. Perusahaan menggunakan kegiatan *Job Fair* maupun *Job Ads* dan media sosial sebagai alat untuk melakukan penjangkaran calon karyawan baru. Proses psikotes, baik perorangan maupun massal juga dilakukan Perusahaan untuk dapat menjangkari potensi SDM terbaik.

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru sebanyak 240 orang, meningkat 42,86% dibandingkan rekrutmen karyawan baru tahun 2017 yang mencapai 168 orang. Rekapitulasi rekrutmen karyawan baru di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

HR STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

In order to create effective, efficient, and supportive performance in the process of carrying out tasks in the Company, a standard reference is needed that provides certainty and uniformity in the process of carrying out an activity and guarantees the completion of work in accordance with the set time, on target, ensures convenience and procedural fluency. For this reason, several Standard Operational Procedures (SOPs) are prepared, namely:

1. *SOP of Training (Training & Development)*
2. *SOP of Health Facility*
3. *SOP of Official Travel*
4. *SOP of Performance Management System (PMS)*
5. *SOP of Remuneration*
6. *SOP of Outsourcing*
7. *SOP of Regulations and Disciplinary Sanctions*
8. *SOP of Employee and Appointment Status*
9. *SOP of Talent Acquisition*
10. *SOP of Talent Development*
11. *SOP of Termination*

RECRUITMENT AND TURNOVER

HR planning, or Man Power Planning (MPP) is based on consideration of positions in the organizational structure, workload in the relevant office, labor turnover, and / or organization productivity. MPP preparation is done to schedule a recruitment program plan.

The pattern of recruiting new employees is carried out through collaboration with outside parties who are then filtered through the recruitment process in the recruitment system. The company uses both Job Fair and Job Ads and social media activities as a tool for screening new prospective employees. The psychological test for both mass and individual is also carried out by the Company to be able to capture the best HR potential.

Throughout 2018, the Company recruited 240 new employees, an increase of 42.86% compared to the recruitment of new employees in 2017 which reached 168 people. Recapitulation of recruitment of new employees throughout 2018 can be seen in the table below:



Karyawan On Board per Bulan Tahun 2017-2018

Employee On Board a month in 2017-2018

Bulan/Month	2017	2018
Januari January	4	2
Februari February	1	6
Maret March	13	33
April April	6	4
Mei May	5	9
Juni June	7	47
Juli July	12	19
Agustus August	4	16
September September	38	33
Oktober October	67	21
November November	7	39
Desember December	4	11
Jumlah Total	168	240

Karyawan On Board per Direktorat

Employee On Board as per Directorate

Direktorat Directorate	2017	2018
Construction	18	22
Operation & Maintenance	119	183
Main	14	10
Finance & Administration	8	5
Business Development & Support	9	20
Jumlah Total	168	240



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

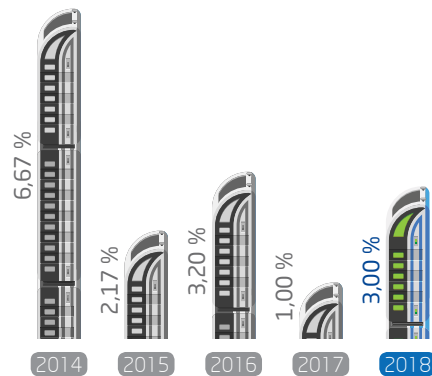
Karyawan On Board per Divisi
Employee On Board as per Division

Divisi Division	2017	2018
Project Management for Construction 1	3	0
Project Management for Construction 2	3	3
Project Management for Railway System	2	3
Project Management Office	6	12
Engineering	4	3
Project Management for Operation & Maintenance Dept	2	0
Railway Maintenance	64	46
Railway Operation	53	136
Corporate Secretary	6	7
Internal Audit & Control	3	0
Risk, Quality & Safety Management	5	3
Finance & Accounting	1	5
Human Capital	2	10
Information System & Technology	4	1
Corporate Strategy & Planning	3	1
Business Development & Commercial	4	2
Business Support	3	8
Jumlah Total	168	240

Di tahun 2018, terdapat 8 orang yang mengundurkan diri dari Perusahaan dengan alasan pribadi masing-masing. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017, dimana pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) orang yang mengundurkan diri dari Perusahaan. Berikut disampaikan tingkat *turnover* karyawan dalam 5 (lima) tahun terakhir:

In 2018, there were 8 people who resigned from the Company for their own personal reasons. This number is slightly increased compared to 2017, where in 2017 there were 4 (four) people who resigned from the Company. Following is the employee turnover rate in the last 5 (five) years:

Tingkat Turnover karyawan 2014-2018
Employee turnover rates of 2014-2018



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Sesuai Standar Kompetensi yang menjadi bagian dari HR Integrated System, Perusahaan membagi jenis pelatihan ke dalam 3 (tiga) kategori besar, yaitu *hard/technical skill*, *soft skill* dan *leadership* atau kepemimpinan.

Pada tabel di bawah ini dijabarkan komposisi pengembangan kompetensi dengan penjelasan kolom sebagai berikut:

- Jumlah Kegiatan**
Banyaknya kegiatan yang diikuti per kategori, dimana bisa terdapat kesamaan kegiatan yang diikuti oleh beberapa kategori.
- Jumlah Peserta**
Banyaknya karyawan yang mengikuti suatu kegiatan, dimana beberapa karyawan dapat mengikuti suatu kegiatan yang sama.
- Jumlah Karyawan**
Banyaknya kegiatan yang mengikuti seorang karyawan, dimana satu karyawan dapat mengikuti beberapa kegiatan yang berbeda.
- Biaya Kegiatan**
Besarnya biaya kegiatan yang diikuti karyawan per kategori.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

1. Education and Training

Training is an effort to improve the quality and competence of HR in the world of work. Employees, whether new or those already working, need to take part in training because of work demands that can change due to changes in work environment, strategy, and so on. In accordance with the Competency Standards that are part of the HR Integrated System, the Company divides the types of training into 3 (three) major categories, namely hard / technical skills, soft skills and leadership or leadership.

The table below describes the composition of competency development with the explanation of the columns as follows:

- Number of Activities**
The number of activities followed per category, where there can be similarities in activities followed by several categories.
- Number of participants**
The number of employees who participate in an activity, where several employees can take part in the same activity.
- Number of employees**
The number of activities that follow an employee, where one employee can participate in several different activities.
- Activity Costs**
The amount of activity costs followed by employees per category.



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

Komposisi dan Jumlah Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Direktorat
Composition and Amount of Competence Development Based on the Directorate

Kategori Category	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Jumlah Peserta (kepesertaan) Number of Participants	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees	Biaya Kegiatan (Rp) Activity Cost
Main Directorate	49	94	32	731.514.923
Operation & Maintenance Directorate	97	1.342	319	21.098.111.811
Construction Directorate	42	144	56	1.935.201.574
Finance & Administration Directorate	40	57	21	462.576.596
Business Development & Support	33	56	25	705.339.606
Jumlah Total	261	1.693	453	24.932.744.150

Komposisi dan Jumlah Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis Kompetensi
Composition and Amount of Competence Development Based on Type of Competency

Kategori Category	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Jumlah Peserta (kepesertaan) Number of Participants	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees	Biaya Kegiatan (Rp) Activity Cost
Hard Skill	174	1.200	435	23.121.826.081
Soft Skill	8	493	289	1.810.918.429
Jumlah Total	182	1.693	724	24.932.744.510

Komposisi dan Jumlah Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Lokasi Kegiatan
Composition and Amount of Competence Development Based on Activity Location

Kategori Category	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Jumlah Peserta (kepesertaan) Number of Participants	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees	Biaya Kegiatan (Rp) Activity Cost
Dalam Negeri Domestic	127	1.490	436	14.407.785.256
Luar Negeri International	54	203	176	10.524.959.254
Jumlah Total	181	1.693	612	24.932.744.510



Jumlah Kepesertaan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Komposisi Level Jabatan

Total Participation in Competency Development Based on Position Level Composition

Kategori Category	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Jumlah Peserta (kepesertaan) Number of Participants	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees	Biaya Kegiatan (Rp) Activity Cost
Division Head	Konferensi Conference	6	5	61.446.378
	Seminar	3	3	10.150.000
	Sertifikasi Certification	5	4	111.915.964
	Training	38	16	313.951.122
	Workshop	8	6	152.264.285
Department Head	Konferensi Conference	5	5	26.506.000
	Seminar	3	3	200.000
	Sertifikasi Certification	7	6	97.532.427
	Training	95	31	1.313.545.780
	Workshop	9	7	140.840.039
Section Head	Konferensi Conference	3	3	20.500.000
	Seminar	1	1	0
	Sertifikasi Certification	35	35	134.980.855
	Training	310	76	1.900.517.084
	Workshop	5	4	30.264.824
Engineer/Specialist	Konferensi Conference	21	21	236.474.548
	Seminar	8	7	24.549.674
	Sertifikasi Certification	50	45	460.189.149
	Training	289	119	5.384.446.841
	Workshop	22	21	215.284.678
Staff	Konferensi Conference	0	0	0
	Seminar	0	0	0
	Sertifikasi Certification	101	69	660.866.667
	Training	669	186	13.636.318.197
	Workshop	0	0	0
Jumlah Total		1.693	673	24.932.744.510



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

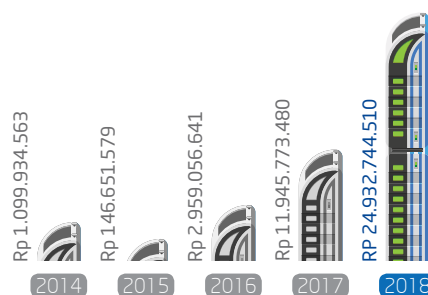
Komposisi dan Jumlah Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis Pelatihan & Pengembangan
Composition and Amount of Competence Development Based on Type of Training & Development

Kategori Category	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Jumlah Peserta (kepesertaan) Number of Participants	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees	Biaya Kegiatan (Rp) Activity Cost
Konferensi Conference	22	35	34	344.926.926
Seminar	8	15	14	34.899.674
Sertifikasi Certification	34	198	159	1.465.485.061
Training	99	1401	428	22.548.779.024
Workshop	18	44	38	538.653.826
Jumlah Total	181	1.693	673	24.932.744.510

Jumlah biaya yang diinvestasikan Perusahaan bagi pendidikan dan pelatihan di tahun 2018 meningkat hingga 108,72% dibandingkan biaya di tahun 2017 yang sebesar Rp11.945.773.480 Peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini menunjukkan komitmen Perusahaan untuk terus mengembangkan kompetensi karyawan untuk mempersiapkan saat MRT Jakarta beroperasi.

The total amount invested by the Company for education and training in 2018 increased to 108.72% compared to the cost in 2017 which amounted to Rp11,945,773,480 This increase in investment in education and training shows the Company's commitment to continue developing employee competencies to be prepared when the Jakarta MRT operates.

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018
Education and Training Cost in 2014-2018



2. Sertifikasi Profesi

Dalam rangka persiapan operasi, seluruh karyawan Perusahaan dituntut untuk profesional dalam melakukan seluruh pekerjaan serta tuntutan dari pemerintah agar setiap SDM wajib dibina dalam hal peningkatan kompetensi yang sesuai dengan profesinya.

2. Professional Certification

In preparation for operations, all employees of the Company are required to be professional in carrying out all work and demands from the government so that every HR must be fostered in terms of increasing competence in accordance with their profession.



Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi kepada individu sesuai dengan keahlian. Berikut karyawan yang telah mengikuti sertifikasi profesi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta organisasi pada tahun 2018 sebagai berikut.

Professional certification is a determination given by an organization to individuals according to their expertise. The following are employees who have participated in professional certification in accordance with the needs of work and organization in 2018 as follows.

Jenis Sertifikat Profesi <i>Type of Professional Certificate</i>	Jumlah Peserta (orang) <i>Number of Participants (person)</i>
Certified Fraud Examiner	1
Chartered Financial Analyst Level 1 Certification Examination	1
Inhouse Training dan Sertifikasi K3 Kebakaran <i>Inhouse Training and K3 Fire Certification</i>	15
Inhouse Training dan Sertifikasi Kelas D Kebakaran <i>Inhouse Training and Class D Fire Certification</i>	30
Pelatihan APICS Certified Supply Chain Professional <i>APICS Certified Supply Chain Professional Training</i>	1
Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Kemnaker <i>Ministry of Manpower General OHS Expert Training and Certification</i>	10
Pelatihan dan Sertifikasi Executive Certificate in Asset Management <i>Executive Certificate in Asset Management Training and Certification</i>	1
Pelatihan dan Sertifikasi Gardu Induk <i>Substation Training and Certification</i>	18
Pelatihan dan Sertifikasi ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko <i>Training and Certification ISO 31000 International Risk Management Standards</i>	4
Pelatihan dan Sertifikasi K3 Juru Ikat (Rigger) <i>Training and K3 Certification of Riggers</i>	6
Pelatihan dan Sertifikasi K3 Operator Crane Kelas III Kapasitas Di Bawah 25 Ton <i>Training and K3 Certification for Class III Crane Operators with Capacity Below 25 Tons</i>	9
Pelatihan dan Sertifikasi K3 Operator Mesin Produksi dan Perkakas Kelas 1 <i>Training and K3 Certification for Class 1 Production and Tool Machine Operators</i>	7
Pelatihan dan Sertifikasi Kemenaker Basic First Aid <i>Ministry of Manpower Basic Training and Certification for Basic First Aid</i>	15
Pelatihan dan Sertifikasi Kemenhub RI untuk ASP Peralatan Khusus di STTD <i>RI Ministry of Transportation Training and Certification for Special Equipment ASPs at STTD</i>	8
Pelatihan dan Sertifikasi Kemnakertrans RI Operator Forklift <i>Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration Training and Certification for Forklift Operators</i>	8
Pelatihan dan Sertifikasi Rail Transport and Rail Planning Certification Programme <i>Training and Certification for Rail Transport and Rail Planning Certification Program</i>	1
Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi K3 Lift dan Elevator <i>Training and Certification for K3 Lift and Elevator Technician</i>	8



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

Jenis Sertifikat Profesi Type of Professional Certificate	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (person)
Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik <i>Training and Certification for Occupational Health and Safety (K3) Technician</i>	18
Pelatihan dan Sertifikasi Welding Inspector <i>Training and Certification for Welding Inspector</i>	4
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa <i>Training and Certification Exam for Goods and Services Procurement</i>	6
Pelatihan Dasar Enterprise Risk Management dan Sertifikasi Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) <i>Enterprise Risk Management Basic Training and Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	5
Pelatihan Operator Boiler Kelas 2 - Kapasitas < 10 Ton <i>Training for Boiler Operator Class 2 - Capacity <10 Ton</i>	2
Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (Audit Intern Tingkat Lanjutan 1) <i>Training and Certification for Qualified Internal Auditor (Advanced Level Internal Audit 1)</i>	1
PMBOK 6th Edition Training, Study Group and PMP Certification <i>PMBOK 6th Edition Training, Study Group and PMP Certification</i>	1
Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tahun 2018 <i>Qualified Internal Auditor Certification Education and Training Program 2018</i>	1
Railway Safety Assurance Professional and Certification Program <i>Railway Safety Assurance Professional and Certification Program</i>	2
Sertifikasi Certified Human Resources Program Executive <i>Certification for Certified Human Resources Program Executive</i>	2
Sertifikasi Certified Internal Auditor <i>Certification for Certified Internal Auditor</i>	2
Sertifikasi dan Konferensi Internasional - Enterprise Risk Management Associate (ERMA) <i>International Certifications and Conferences - Enterprise Risk Management Associate (ERMA)</i>	6
Sertifikasi Kompetensi PR Perhumas Batch V <i>Certification for Public Relations Competency Batch V</i>	1
Sertifikasi Leadership Foundation <i>Certification for Leadership Foundation</i>	1
Sertifikasi Pelatihan Mediasi <i>Certification for Mediation Training</i>	1
Sertifikasi Pendidikan Profesi Akuntansi / Chartered Accountant (CA) <i>Certification for Professional Accounting Education / Chartered Accountant (CA)</i>	1
Sertifikasi Targeted Selection Interview <i>Certification for Targeted Selection Interview</i>	1

3. Talent Development Program

Talent Development Program (TDP) adalah sebuah program pengembangan karyawan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan mengefektifkan sisi *leadership*, serta dirancang dengan tujuan membentuk dan mengembangkan karyawan yang memiliki potensi agar dapat menjawab tantangan-tantangan yang di hadapi oleh Perusahaan.

Program pengembangan ini diperuntukkan bagi:

- Kepala Divisi (*Management Development Program/ MDP*)
- Kepala Departemen (*Leadership Development Program/ LDP*)
- Senior Specialist/Senior Engineer (*Supervisory Development Program/ SDP*)
- Specialist/ Engineer (*Personal Effectiveness Program/ PEP*)

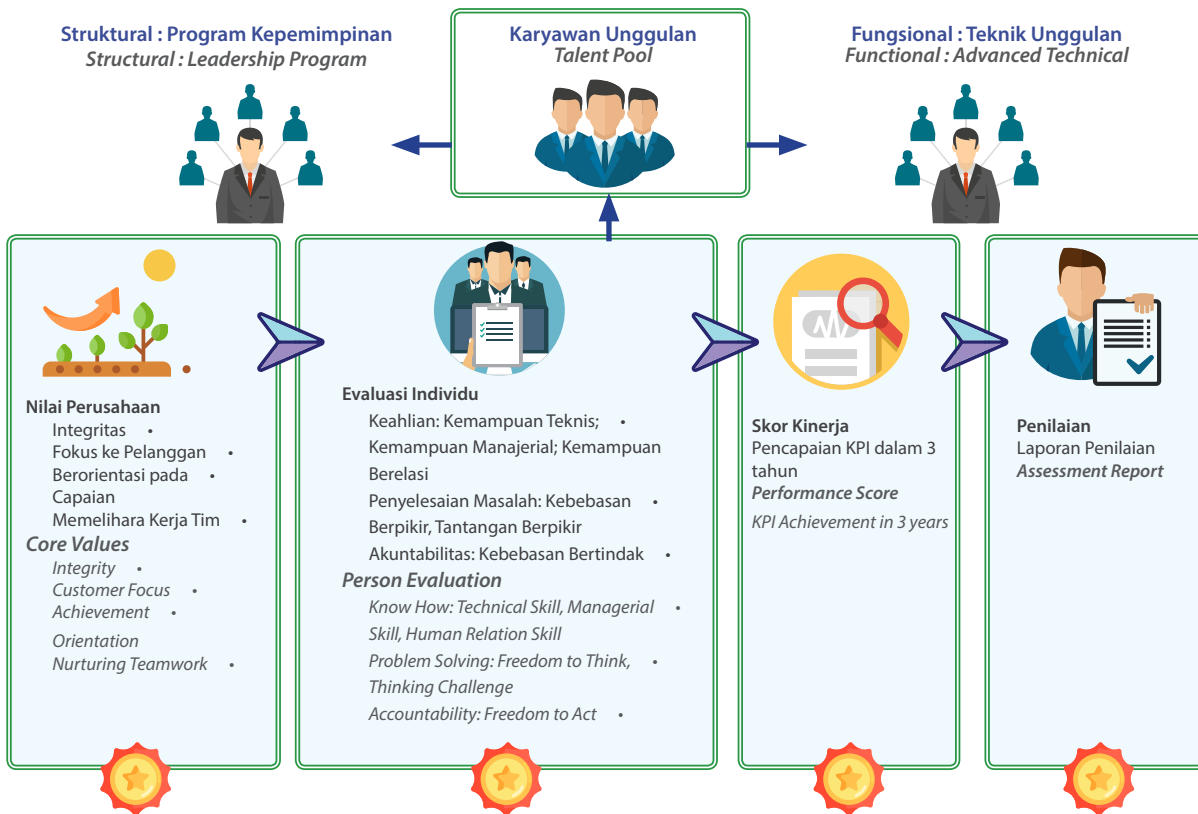
3. Talent Development Program

The Talent Development Program (TDP) is an employee development program designed to improve business skills and managerial capabilities. This program is designed with the aim of forming and developing employees who have the potential to be able to answer the challenges faced by the Company.

The development program is allocated for:

- Head of Division (*Management Development Program/ MDP*)
- Head of Department (*Leadership Development Program/ LDP*)
- Senior Specialist / Senior Engineer Senior Specialist/Senior Engineer (*Supervisory Development Program/ SDP*)
- Specialist/Engineer (*Personal Effectiveness Program/ PEP*)

Talent Development Program untuk Pengembangan Karier Talent Development Program for Career Development





TUMBUH BERSAMA KARYAWAN GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

Pada tahun 2018 ini beberapa program *talent development* untuk pengembangan Karier sudah dijalankan, berikut ini adalah program-program tersebut:

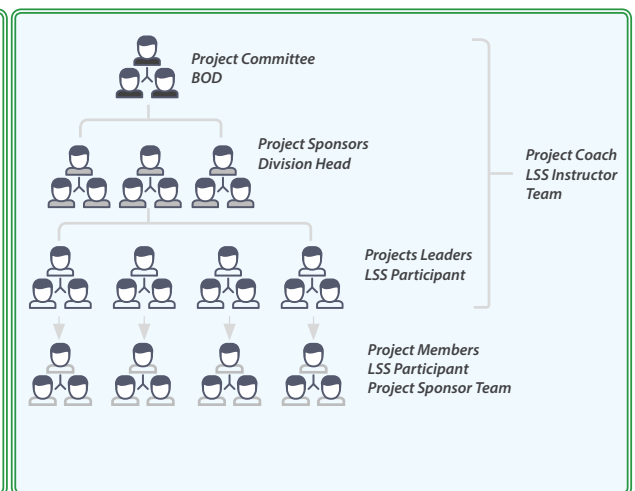
In 2018, several *talent development programs for career development* have been carried out, these are the following programs:

Leadership Program

Progress Update Leadership Program



Lean Six Sigma Project Structure



REMUNERASI DAN BENEFIT BAGI KARYAWAN

Sebagai kelanjutan dari hasil *Job Grade* dan *Person Grade* maka disusunlah Sistem Remunerasi, dimana setiap karyawan tetap dalam periode 1 (satu) tahun akan menerima:

1. *Direct Compensation*
 - a. Gaji Pokok diberikan setiap bulannya, selama 12 bulan.
 - b. Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Gaji Pokok.
 - c. Tunjangan Pajak Penghasilan.
 - d. Upah Lembur (untuk Golongan Tertentu)
 - e. Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali Gaji Pokok.
 - f. Tunjangan Pendidikan 1 (satu) kali Gaji Pokok.
 - g. Tunjangan Akhir Tahun 1 (satu) kali Gaji Pokok.
 - h. Per November 2018 karyawan diberikan: uang transportasi dan uang makan
2. *Benefit*
 - a. Fasilitas kesehatan Karyawan & Direksi.
 - b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
 - c. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
 - d. Jaminal Sosial Hubungan Kerja diluar Jam Kerja (JSHK) Bumida.

REMUNERATION AND BENEFITS FOR EMPLOYEES

As a continuation of the results of the *Job Grade* and *Person Grade*, the Remuneration System is prepared, where each permanent employee in the 1 (one) year period will receive:

1. *Direct Compensation*
 - a. Basic salary is given every month, for 12 months.
 - b. Holiday Allowance 1 (one) time Basic Salary.
 - c. Income Tax Allowance.
 - d. Overtime Wages (for Certain Groups)
 - e. Annual Leave Allowance 1 (one) time Basic Salary.
 - f. Education Allowance 1 (one) time Basic Salary.
 - g. End of Year Allowance 1 (one) time Basic Salary.
 - h. As of November 2018, the employee was given: transportation fee, and consumption fee
2. *Benefit*
 - a. Health facilities of Employees & Directors.
 - b. Financial Institution Pension Fund (DPLK).
 - c. BPJS Employment and BPJS Health Program.
 - d. Social Security Work Relationship Outside of Bumida Working Hours (JSHK).



3. Fasilitas

- a. *Employee Relations* (Futsal, *Mini Soccer* & Bulutangkis).
- b. Makan siang karyawan.
- c. Kartu parkir.

Khusus kepada Dewan Komisaris dan Direksi, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada tahun 2018 terdapat kenaikan beban gaji karyawan seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan, dengan persentase kenaikan gaji sebesar sebesar 126,94% dari jumlah gaji tahun 2017. Berikut terlampir grafik kenaikan gaji karyawan selama 5 (lima) tahun terakhir.

3. Facilities

- a. *Employee Relations* (Futsal, *Mini Soccer* & Badminton).
- b. *Employee lunch*.
- c. *Parking card*.

Especially to the Board of Commissioners and Directors, the remuneration of the Board of Commissioners and Directors of the Company is determined through the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 242 of 2015 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Supervisory Bodies and Board of Commissioners of Regional-Owned Enterprise (BUMD).

In 2018 there was an increase in employee salaries in line with the increase in the number of employees, with a percentage increase in salaries of 126.94% from the total salary in 2017. The following is a graph of salary increases for the past 5 (five) years.

Jumlah Gaji Karyawan Tahun 2014-2018
Number of Employee Salaries 2014-2018

Tahun Year	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (person)	Jumlah Gaji (Rp) Amount of Salaries (Rp)
2014	75	7.608.945.406
2015	89	12.390.590.774
2016	120	15.481.741.733
2017	288	27.042.308.267
2018	518	61.370.052.727

Di samping gaji, Perusahaan memiliki kebijakan pemberian fasilitas kesehatan kepada karyawan, yaitu:

- Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas *Medical Check Up*.
- Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kaca mata, alat bantu dengar, pemeriksaan lab dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap.

Program asuransi kesehatan yang diberikan kepada karyawan dilakukan melalui program BPJS Kesehatan. Kepada setiap karyawan, Perusahaan memfasilitasi program kesehatan mencakup karyawan sendiri dan keluarga dari karyawan, di mana fasilitas kesehatan tersebut meliputi perawatan gigi, kacamata, rawat jalan, persalinan, dan rawat inap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan proteksi dan

In addition to salaries, the Company has a policy of providing health facilities to employees, namely:

- *Periodic health facilities including Medical Check Up facilities*
- *Treatment facilities is a guaranteed reimbursement of hospitalization costs, outpatient care after discharged from the hospital, labor costs, dental care costs, replacement of glasses, hearing aids, lab checks and other medical treatments recommended by doctors after hospitalization.*

The health insurance program provided to employees is carried out through the BPJS Health program. To each employee, the Company facilitates health programs including its own employees and families of employees, where health facilities include dental care, glasses, outpatient care, childbirth, and hospitalization. This facility aims to provide protection and insurance coverage costs while undergoing a medical examination or hospital treatment



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

biaya pertanggung jawaban asuransi saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit termasuk jaminan bagi karyawan dan istri karyawan yang menjalani persalinan. Selengkapnya tentang program kesehatan bagi karyawan dapat dilihat pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atas Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

including guarantees for employees and wives of employees who undergo labor. More information about health programs for employees can be seen in the section on Corporate Social Responsibility for Employment, Health and Safety.

PROMOSI DAN KESEMPATAN KERJA

Sebagai BUMD, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjadi *role model* bagi pembentukan kesempatan kerja yang luas kepada setiap karyawan yang berprestasi. Perusahaan tidak memiliki afiliasi terhadap Suku, Agama, Ras dan kepentingan golongan tertentu; di mana Perusahaan hanya tunduk terhadap pengelolaan organisasi dan usaha berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PROMOTION AND JOB OPPORTUNITIES

As a Regional-Owned Enterprise (BUMD), the Company has a responsibility to become a rule model for the formation of broad employment opportunities for every employee who excels. The company has no affiliation with ethnicity, religion, race and interests of certain groups; where the Company is only subject to the management of the organization and business based on the applicable laws and regulations in Indonesia.

Selain itu, promosi dan kesempatan kerja juga diberikan kepada setiap karyawan berprestasi tanpa memandang gender atau jenis kelamin.

In addition, promotions and employment opportunities are also given to every employee who achieves regardless of gender.

EMPLOYEE RELATIONS DAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SEHAT

Salah satu *benefit* yang diberikan kepada karyawan adalah *employee relations* berupa kegiatan di luar aktivitas bisnis Perusahaan. Manajemen memandang perlu bagi pengembangan bentuk-bentuk *employee relations* sebagai bagian dari penguatan soliditas *teamwork* antar personal karyawan yang kemudian akan berdampak positif terhadap pembentukan lingkungan kerja yang sehat. Kegiatan olahraga, keagamaan, *sharing session & gathering* diharapkan mampu meningkatkan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan; sekaligus membentuk tim kerja yang saling mengenal satu dengan lainnya.

EMPLOYEE RELATIONS AND ESTABLISHMENT OF A HEALTHY WORK ENVIRONMENT

One of the benefits given to employees is employee relations in the form of activities outside the Company's business activities. Management considers it necessary for the development of forms of employee relations as part of strengthening the solidarity of teamwork between employee personalities which will then have a positive impact on establishing a healthy work environment. Sport activities, religious, sharing session & gathering are expected to increase employee loyalty to the Company; while forming a work team that knows each other.



(Townhall Meeting di Depo Lebak Bulus)



(Perayaan Natal 2018)



(Employee Gathering 2018)

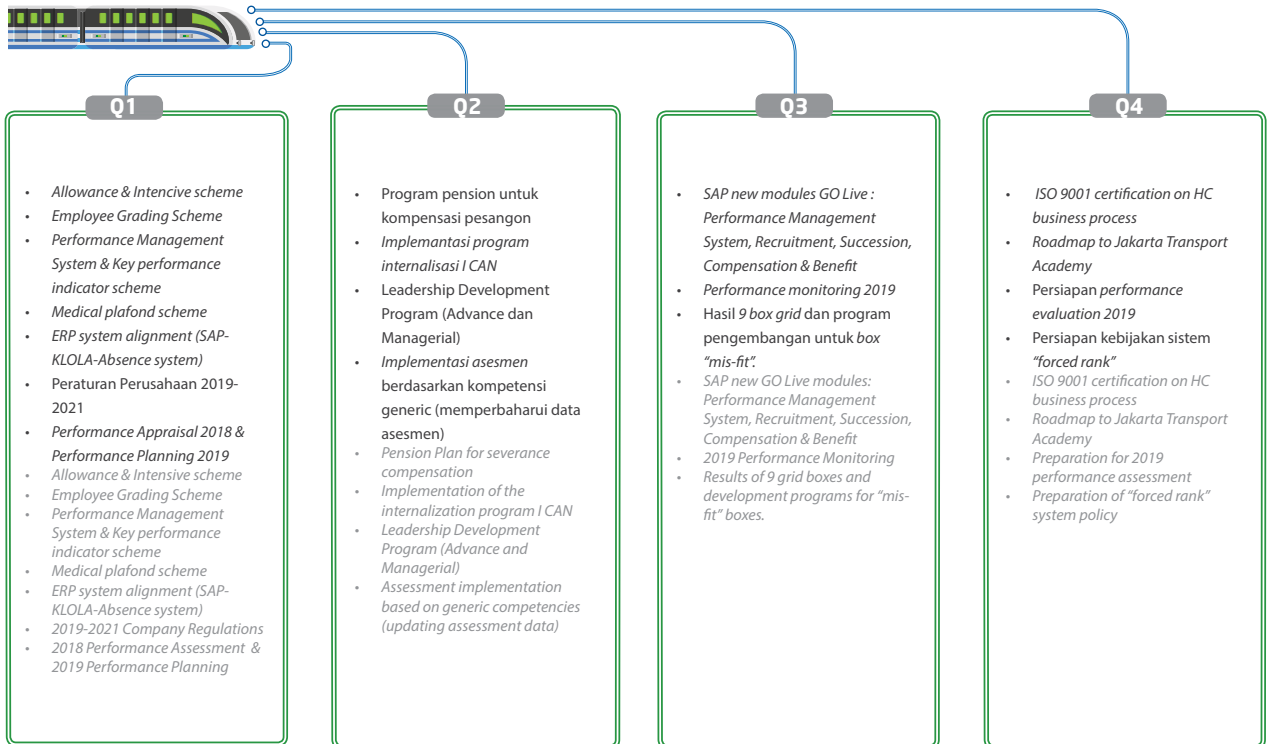


(Pekan Olahraga)



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN
GROWING WITH EMPLOYEES: MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2019 **HR DEVELOPMENT PLAN FOR 2019**





PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI

UTILIZATION AND OPTIMIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

Bidang usaha Perusahaan yang luas dan memiliki jumlah unit kerja yang besar, membuat jaringan sistem Teknologi Informasi (TI) yang andal dan terpadu menjadi hal mendesak yang harus dipenuhi. Perusahaan sepenuhnya menyadari bahwa di tengah pesatnya arus digitalisasi, TI menjadi aspek penting dalam melaksanakan kegiatan bisnis, karena pemanfaatan TI yang optimal dapat memberikan efisiensi biaya dan operasional bagi keberlangsungan usaha Perusahaan. Pengembangan sistem TI Perusahaan dilakukan dengan tujuan mengembangkan lingkungan kerja yang efisien, terintegrasi, akuntabel, transparan, serta dapat diandalkan. Sistem TI Perusahaan bertugas untuk menyediakan sistem informasi yang optimal untuk mendukung bisnis Perusahaan. Sementara pada bagian layanan, TI diharapkan mampu mendorong level produktivitas dan efisiensi Perusahaan. Selain itu, implementasi TI dalam Perusahaan adalah dengan mendukung penerapan *paperless working area*, sehingga dapat meminimalisir risiko operasional usaha, dan menghadirkan sistem keamanan yang maksimal.

The Company's extensive business fields and large number of work units make a reliable and integrated network of Information Technology (IT) systems an urgent matter that must be met. The company is fully aware that amid the rapid flow of digitalization, IT is an important aspect in carrying out business activities, because the optimal use of IT can provide cost and operational efficiency for the Company's business continuity. The development of the Company's IT system is carried out with the aim of developing an efficient, integrated, accountable, transparent and reliable work environment. The Company's IT system is tasked with providing an optimal information system to support the Company's business. While in the service section, IT is expected to be able to drive the level of productivity and efficiency of the Company. In addition, the implementation of IT in the company is to support the implementation of the paperless working area, so as to minimize the operational risk of the business, and present a maximum security system.

REGULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Perusahaan pada Perusahaan telah dirumuskan dalam regulasi tersendiri yang dalam perumusannya telah disesuaikan dengan bidang usaha dan kebutuhan Perusahaan. Perusahaan membagi regulasi terkait pengelolaan TI menjadi dua bagian;

1. Regulasi Tata Kelola TI

Di lingkup internal Perusahaan Departemen TI memiliki kebijakan yang diterapkan di Perusahaan untuk dapat memberikan informasi ataupun data yang lengkap, akurat, terkini, aman dan tepat waktu, guna mendukung pengelolaan bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, Departemen TI di tahun 2017 telah melakukan penyusunan dokumen kebijakan TI yang mana dokumen tersebut telah disahkan oleh Direksi dalam bentuk Peraturan Direksi No. 05 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi. Di tahun 2018, Perusahaan telah menerapkan kebijakan tersebut, yakni sebagai berikut:

- Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi menerapkan fungsi pengelolaan manajemen risiko yaitu perencanaan, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- Pengembangan Sistem Lunak Umum, dan Khusus;
- Operasional Sistem Informasi, pemeliharaan dan dukungan;
- Kepemilikan Perangkat keras *hardware*;

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT REGULATIONS

The Company's management of the Company has been formulated in separate regulations which in its formulation have been adjusted to the Company's business fields and needs. The company divides regulations related to IT management into two parts;

1. IT Governance Regulations

In the Company's internal scope, the IT Department has a policy that is implemented in the Company to be able to provide complete, accurate, up-to-date, safe and timely information or data to support business management that prioritizes GCG principles. Therefore, the IT Department in 2017 compiled an IT policy document which had been approved by the Board of Directors in the form of Directors Regulation No. 05 of 2017 concerning Management of Information Technology. In 2018, the Company has implemented the policy, which is as follows:

- Information Technology Development and Management implements risk management management functions, namely planning, assessing, measuring, monitoring and controlling risks;*
- General, and Special Software Development;*
- Operational Information Systems, maintenance and support;*
- Ownership of hardware*



PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI UTILIZATION AND OPTIMIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Ketentuan dan Prosedur Penggunaan Perangkat Aset Perusahaan; f. Keamanan Teknologi Informasi; dan g. <i>Disaster Recovery Plan</i> <p>2. Regulasi Rujukan Tata Kelola TI di Internal Perusahaan
Tata kelola Teknologi Informasi memiliki dasar rujukan baik dari internal maupun eksternal yang berasal dari peraturan hukum di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta. b. Keputusan Komisaris No. 004 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>) PT MRT Jakarta. c. Surat Edaran Kementerian Informasi dan Komunikasi No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> e. <i>Provisions and Processes for Using Company Asset Devices;</i> f. <i>Information Technology Security; and</i> g. <i>Disaster Recovery Plan</i> <p>2. <i>IT Governance Reference Regulations in the Internal Company Information Technology governance has a reference basis from both internal and external originating from the legal regulations below:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 96 of 2004 concerning the application of Good Corporate Governance practices to BUMD in the DKI Jakarta provincial environment.</i> b. <i>Commissioner Decree No. 004 of 2003 concerning the Code of Corporate Governance of PT MRT Jakarta.</i> c. <i>Kominfo Circular Letter No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 concerning the application of information security governance for public service providers.</i> |
|--|--|

FONDASI DASAR TEKNOLOGI INFORMASI

BASIC FOUNDATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

Perusahaan memandang fondasi dasar sistem TI ke dalam 3 (tiga) pilar utama: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan *people (brainware)*.

The company views the basic foundation of IT systems into 3 (three) main pillars: hardware, software and people (brainware).

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat keras (<i>hardware</i>). Perangkat keras TI seperti <i>notebook/ PC, server, printer, network switch, access point, rewall, cabling, alat security, jaringan dan telekomunikasi lainnya</i>. Penyediaan perangkat keras harus memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan agar dapat menunjang produktivitas kerja. 2. Perangkat lunak (<i>software</i>). Perangkat lunak atau <i>software</i> harus menjadikan keseluruhan sistem TI di Perusahaan berjalan sesuai dengan kebutuhan, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> » Penyediaan aplikasi <i>custom/software</i> berbasis <i>web-based, aplikasi enterprise, online dashboard, sistem penyimpanan data, file sharing, dan back up data</i>. » Penyediaan perlengkapan lisensi <i>software</i> seperti lisensi sistem operasi, lisensi <i>database, lisensi antivirus, lisensi Microsoft Office, aplikasi surat elektronik, lisensi networking, dan lisensi cloud</i> atau aplikasi lainnya yang menunjang kegiatan operasional karyawan. » Konfigurasi <i>software</i> pada <i>networking hardware</i> untuk <i>setting up network</i> dan jaringan internal/ internet, WAN, LAN, koneksi VPN/interkoneksi kantor pusat dengan kantor cabang. 3. <i>People (brainware)</i>. Sumber Daya Manusia yang memadai dari level teknis hingga manajemen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hardware (hardware)</i>. <i>IT hardware such as notebooks / PCs, servers, printers, network switches, access points, rewall, cabling, security tools, networks and other telecommunications. Provision of hardware must meet the specifications needed to support work productivity.</i> 2. <i>Software (software)</i>. <i>Software or software must make the entire IT system in the Company run according to needs, including:</i> <ul style="list-style-type: none"> » <i>Provision of web-based, custom / software applications, enterprise applications, online dashboards, data storage systems, file sharing, and data backup.</i> » <i>Provision of equipment for software licenses such as operating system licenses, database licenses, antivirus licenses, Microsoft Office licenses, e-mail applications, networking licenses, and cloud licenses or other applications that support employee operations.</i> » <i>Configuring software on networking hardware for setting up networks and internal networks / internet, WAN, LAN, VPN connections / interconnection headquarters with branch offices.</i> 3. <i>People (brainware)</i>. <i>Adequate Human Resources from the technical level to management.</i> |
|---|--|



STRATEGI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah membuat *roadmap* pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Direksi No. 13 Tahun 2018 tentang *IT Road Map* PT MRT Jakarta dan sesuai dengan RJPP dan RKAP 2018.

Strategi Pengelolaan Teknologi Informasi

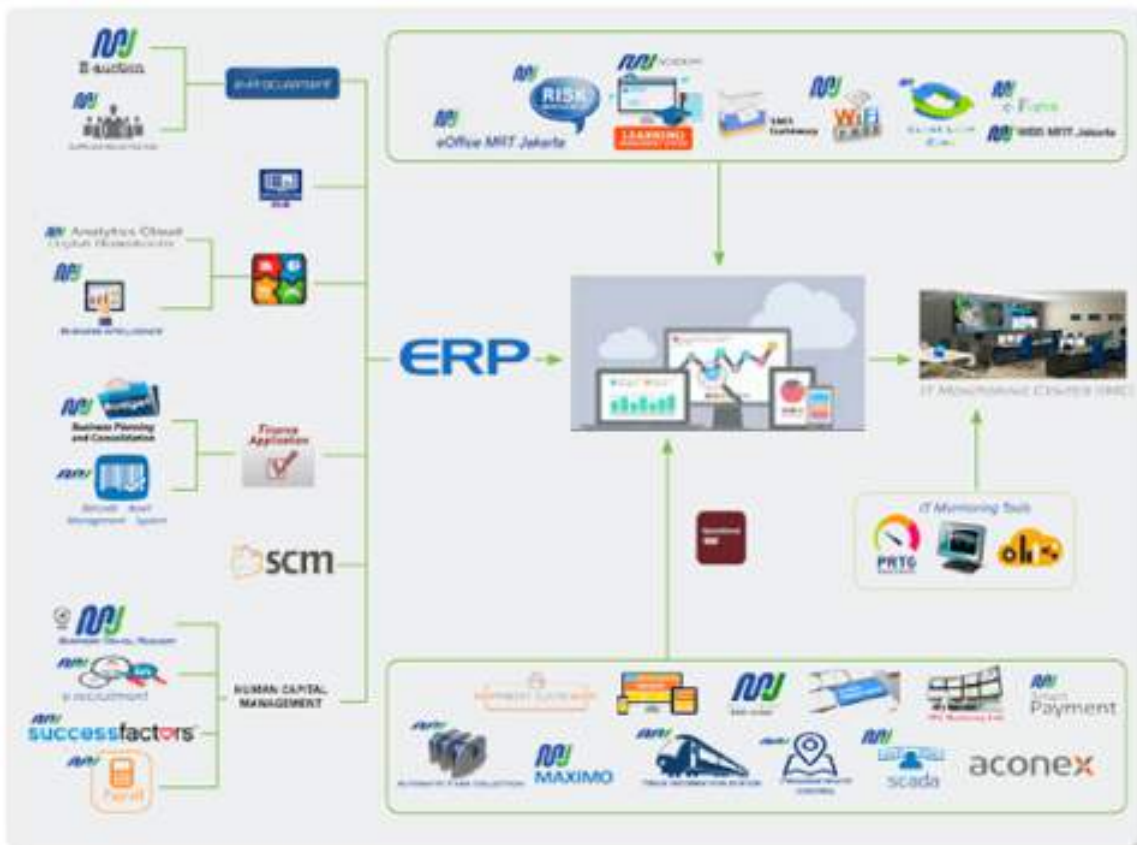
Strategi Pengelolaan berdasarkan RJPP, RKAP 2018, *Road map* Department IT, Sistem ERP dan Aplikasi IT berada di dalam 1 (satu) *window* (di-manage, develop dan dioperasikan oleh TI Divisi), seperti berikut.

ROAD MAP FOR THE DEVELOPMENT OF MRT INFORMATION TECHNOLOGY IN JAKARTA

The company has made an Information Technology development roadmap as stated in Directors Regulation No. 13 of 2018 concerning the IT Road Map of PT MRT Jakarta, as attached below:

Information Technology Management Strategy

Management strategies based on RJPP, RKAP 2018, IT Road Map Department, ERP System and IT Applications are in 1 (one) window (managed, developed and operated by TI Division), as follows.





PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI UTILIZATION AND OPTIMIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

Adapun kelebihan MRTJ, antara lain:

- Mudah me-*manage* semua aplikasi.
- Mengubah *culture* dari konvensional menjadi *Go Green* (dengan bantuan divisi lainnya) dengan cara digitalisasi.
- Mudah untuk melakukan proses audit.
- Mempermudah implementasi ISO 27001 (*Information Security Management*).

BENTUK DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018

Semua bentuk jenis pengembangan Sistem Informasi pada Aplikasi dan IT infrastruktur Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi No. 008 Tahun 2017 yang penerapannya dilakukan secara efektif secara 1 (satu) tahun penuh, mulai tahun 2018. Sehingga kebutuhan operasional maupun *corporate* dikembangkan melalui Divisi IT PT MRT Jakarta, yang menjadi 1 (satu) pintu dalam pengembangan teknologi informasi tersebut. Pengembangan teknologi informasi dapat bersifat kebutuhan yang di "*request*" oleh divisi-divisi diluar IT dalam menunjang kebutuhannya dalam menerapkan digitalisasi, dan berupa IT *Road Map* yang sudah sesuai rencana dan telah dituangkan dalam Peraturan Direksi No. 13 Tahun 2018.

Pengembangannya dilakukan menggunakan sumber daya internal yang terdapat pada Divisi IT, untuk kebutuhan yang memerlukan tenaga ahli khusus ataupun kebutuhan *hardware* atau infrastruktur yang dapat meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.

AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah melakukan berbagai pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

The advantages of the MRTJ include

- *Easy to manage all applications.*
- *Changing culture from conventional to Go Green (with the help of other divisions) by digitizing.*
- *Easy to carry out the audit process.*
- *Facilitate the implementation of ISO 27001 (Information Security Management).*

FORM AND INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT POLICY OF 2018

All forms of information system development in the Company's infrastructure applications and IT refer to Directors Regulation No. 008 of 2017, the implementation of which is carried out effectively in 1 (one) full year, starting in 2018. So that operational and corporate needs are developed through the IT Division of PT MRT Jakarta, which is 1 (one) door in the development of information technology. Development of information technology can be needs that are "requested" by divisions outside of IT in supporting their needs in implementing digitalization, and in the form of IT Road Map that has been in accordance with the plan and has been stated in the Directors' Regulation No. 13 of 2018.

The development is carried out using internal resources contained in the IT Division, for needs that require special experts or hardware or infrastructure needs that can improve the Company's operational performance.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ACTIVITIES IN 2018

Throughout 2018, the Company has carried out various Information Technology developments as attached below.



Capaian 2018 Information System & Technology



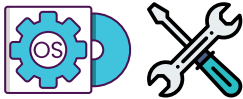
- Peraturan Direksi IT Master Plan (Juni/ June)
- Director's Rule Business Travel Request (Maret/ March)
- Review SOP / Kebijakan Keamanan Informasi (Agustus/ August)
- Single Sign On System (September)
- PAT + Partial hardware document AFC from Contractor & Maintenance Division (November)
- Board of Directors' Regulation of IT Master Plan (June)
- Board of Directors' Regulation of Business Travel Request (March)
- Review of SOP / Information Security Policy (August)
- Single Sign On System (September)
- PAT + AFC hardware partial document from Contractor & Maintenance Division (November)



- Success Factor (Oktober/ October)
- Material Management PR/ PO (Oktober/ October)
- Finance , Controlling & Fund Management (Oktober/ October)
- Sales Distribution (Oktober/ October)
- Tableau Dashboard System (Integration to BPBUMD) (November)
- Success Factor (October)
- PR / PO Material Management (Oct)
- Finance, Controlling & Fund Management (October)
- Sales Distribution (October)
- Tableau Dashboard System (Integration to BPBUMD) (November)



- Vendor Management System (December-On Going)
- Enhancement eOffice , ERM , Internal Web Portal, Guest Book (Juni/ June)
- Business Travel Request (Maret/ March)
- General Affair Office Supply System Phase 1 (November)
- Tenant Registration Web (December)
- Lost and Found (November)
- Application Documentation Wiki (December/ December)
- Lost and Found (November)
- Application Documentation Wiki (Desember/ December)
- Git Implementation (Desember/ December)
- PMO Project Tracker (Februari/ February)
- 10. Document Track (Desember/ December)
- Vendor Management System (December-On Going)
- Enhancement eOffice, ERM, Internal Web Portal, Guest Book (June)
- Business Travel Request (March)
- General Affair Office Supply System Phase 1 (November)
- Tenant Registration Web (December)
- Lost and Found (November)
- Application Documentation Wiki (December)
- PMO Project Tracker (February)
- Document Track (December)



- Implementasi IT Audit unt BI (Agustus) Migration Gmail to Outlook (Mei/ May)
- Operasional Pengelolaan & Monitoring Jaringan Infrastruktur Kantor MRT (Contionous)Operasional Pengelolaan Capacity, Security, Storage, & Server MRT Jakarta (Continuous)/
- Operational IT Help Desk (Continuous)
- IT Audit Implementation for BI (August)
- Migration Gmail to Outlook (May)
- Operational Management & Monitoring of MRT Office Infrastructure Network (Controversial)
- Operational Management of Capacity, Security, Storage & Servers of MRT Jakarta (Continuous)
- Operational IT Help Desk (Continuous)



- Penyediaan Perangkat Notebook untuk Karyawan Baru (Continuous)/
- Penyediaan Software Pendukung Karyawan Baru (April) / Implementasi Storage Repository (Maret)/
- Pengadaan Anti Virus End User (September)
- Provision of Notebook Devices for New Employees
- Provision of New Employee Support Software (April)
- Implementation of Storage Repository (March)
- End User Anti Virus Procurement (September)



- Penyediaan Jaringan Internet Infrastruktur Kantor Sophie (Juli)
- Peremajaan Infrastruktur Kantor Pusat Wisma Nusantara (Juni)
- Penyediaan Jaringan & Infrastruktur Interkoneksi Kantor MRT (Juli)
- Pengadaan UPS, Firewall, Core switch(April- Juni)/
- Pengadaan Video Wall (Mei)
- Provision of Sophie's Office Infrastructure Internet Network (July)
- Renovation of Wisma Nusantara Head Office Infrastructure (June)
- Provision of MRT Offices & Network Infrastructure (July)
- Procurement of UPS, Firewall, Core switches (April-June)
- Procurement of Video Wall (May)



PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI UTILIZATION AND OPTIMIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

INFRASTRUKTUR SISTEM *ENTERPRISE RESOURCE PLANNING* (ERP) OPERASIONAL

Untuk dapat menunjang kinerja operasional, Perusahaan secara bertahap mengembangkan infrastruktur sistem TI berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang berfungsi sebagai sistem informasi. Pengembangan Sistem Portal perlu dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang ada terutama mengintegrasikan akses user/akun sehingga setiap karyawan menggunakan 1 (satu) akun untuk semua aplikasi. Salah satunya dengan adanya *system Single Sign On* (SSO) yang terintegrasi dengan *Active Directory* yang telah dikembangkan pada tahun 2017.

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) OPERATIONAL SYSTEM INFRASTRUCTURE

In order to support operational performance, the Company has gradually developed an Enterprise Resource Planning (ERP) IT system infrastructure that functions as an information system. Portal System Development needs to be developed to integrate all existing systems, especially integrating user / account access so that each employee uses 1 (one) account for all applications. One of them is the existence of a Single Sign On (SSO) system that is integrated with Active Directory which was developed in 2017.

INTEGRASI SISTEM ICT PERKERETAAPIAN (*INDUSTRIAL SYSTEM*) DENGAN SISTEM ERP OPERASIONAL (*INFORMATION SYSTEM*)

Untuk mendukung pengelolaan sistem *Information Communication Technology* (ICT) perkeretaapian atau *industrial system*, Perusahaan mengintegrasikan sistem ICT Perkeretaapian ke dalam operasional manajemen atau sistem informasi berbasis ERP. Perancangan, implementasi dan integrasi pada sistem tersebut dilakukan sebelum masa beroperasinya MRT Jakarta agar *output* yang didapat saat MRT Jakarta beroperasi dapat berjalan secara optimal. Integrasi antara *industrial system* dengan sistem informasi dilakukan agar data dan informasi yang berada di lapangan dapat memberikan laporan berupa *dashboard* yang akurat kepada *top level management* untuk dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pengembangan ERP yang terintegrasi dengan Sistem ICT perkeretaapian dilakukan dengan merencanakan pembangunan *master plan* IT yang melibatkan seluruh fungsi unit kerja yang terkait dalam mendukung persiapan operasional MRT. Dengan adanya *master plan* IT dapat menentukan sistem ERP yang akan diimplementasikan. Pada saat dilakukan pembangunan sistem ERP, sistem tersebut terintegrasi dengan sistem ICT Perkeretaapian, sehingga sistem tersebut sudah dapat terintegrasi antara Sistem ICT Perkeretaapian dengan Sistem ERP di saat pengoperasian MRT Jakarta pada tahun 2019.

ICT SYSTEM INTEGRATION RAILWAY (INDUSTRIAL SYSTEM) WITH OPERATIONAL ERP SYSTEM (INFORMATION SYSTEM)

To support the management of the Information Communication Technology (ICT) system or industrial system, the Company integrates the ICT railway system into operational management or ERP-based information systems. The design, implementation and integration of the system are carried out prior to the operation of the Jakarta MRT so that the output obtained when the Jakarta MRT operates can run optimally. The integration between industrial systems and information systems is done so that data and information in the field can provide accurate dashboard reports to the top level management to be used as an effective and efficient decision-making tool. The development of an ERP that is integrated with the railway ICT System is done by planning the development of an IT master plan that involves all the functions of the relevant work units in supporting operational preparation of the MRT. With the existing of masterplan, IT can determine the ERP system that will be implemented. When building an ERP system, the system is integrated with the ICT Railway system, so that the system can be integrated between the Railway ICT System and the ERP System at the time of the Jakarta MRT operation in 2019.



INVESTASI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai wujud komitmen pengembangan Teknologi Informasi, Perusahaan telah berinvestasi dalam bidang Teknologi Informasi. Di bawah ini disajikan investasi Teknologi Informasi Perusahaan pada tahun 2018 dan perbandingannya dengan tahun 2017 dalam hal pengembangan bidang TI.

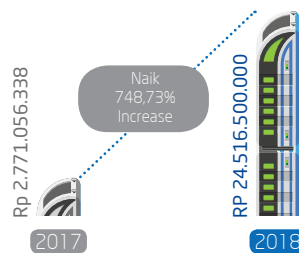
INVESTMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY

As a form of commitment to developing Information Technology, the Company has invested in Information Technology. Below is presented the Corporate Information Technology investment in 2018 and a comparison with 2017 in terms of IT development.

Investasi dan Peruntukan Teknologi Informasi Tahun 2018 Information Technology Investment and Allocation in 2018

Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment	Tujuan objective	Nilai (Rp) Amount
Software	Biaya one time implementasi ERP One-time ERP implementation costs	11.900.000.000
	Biaya bulanan Lisensi ERP Monthly ERP License Fee	5.940.000.000
	Microsoft Office (500 user license)	1.574.000.000
Infrastruktur Infrastructure	Managed Service IT Equipment & Repo	2.100.000.000
	Pembelian <i>notebook</i> , <i>desktop</i> dan perangkat lainnya Purchase of notebooks, desktops and other devices	1.642.500.000
	Server pendukung untuk kebutuhan ERP Support server for ERP needs	1.360.000.000
Total		24.516.500.000

Biaya Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment Cost



Investasi yang perbedaannya cukup besar dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2018, terdapat Implementasi ERP dan juga disebabkan oleh melonjaknya jumlah karyawan secara signifikan sehingga infrastruktur pendukung untuk pemenuhan kebutuhan Karyawan seperti *hardware*, dan lisensi juga perlu ditingkatkan agar kebutuhannya tetap memadai.

The investment with a significant difference from the previous year was due to the implementation of ERP in 2018 and also because of a significant increase in the number of employees so that the supporting infrastructure for fulfilling the employee needs such as hardware and licenses also needs to be improved to meet their needs..



PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI UTILIZATION AND OPTIMIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

Sementara itu, IT infrastruktur pendukung dalam *manage service IT Equipment & Repo*, juga dilakukan *upgrade* spesifikasi untuk mendukung kebutuhan infrastruktur dan aplikasi di lingkungan Perusahaan guna mendukung kesiapan operasi MRT Jakarta.

Meanwhile, the specification of supporting IT infrastructure in managing IT Equipment & Repo services was also upgraded to support the infrastructure and application requirements within the Company to support the readiness of Jakarta MRT operations.

RENCANA PENGEMBANGAN TI TAHUN 2019

IT DEVELOPMENT PLAN FOR 2019

Untuk tahun 2019, Perusahaan telah menyusun langkah strategis terkait pengembangan Informasi Teknologi di lingkungan Perusahaan, yakni sebagai berikut:

For 2019, the Company has formulated strategic steps related to the information technology development within the Company, namely as follows:

1. Melakukan *Transfer Knowledge (BAST)* untuk *IT Equipment dan Infrastructure*. Dari Tim *Operation* ke Tim IT sebelum berlangsungnya operasional MRT
 - » Alih pengetahuan *hardware & software* operasional untuk di pelihara oleh divisi IT
 - » Membuat ruang lingkup pekerjaan *Maintenance* di bidang *Hardware & Software* Operasional
 - » Tersedianya dokumentasi dari Kontraktor terkait *hardware & Software* yang akan diserahkan
2. Melanjutkan *blueprint* fase 2 ERP System
 - » Sosialisasi Phase 1 lanjutan
 - » Implementasi Phase 2
 - » *Go-Live* Phase 2
3. Mengelola dan mengembangkan *mobile app* untuk kegiatan operasional MRT ke Publik
 - » Pengembangan Aplikasi Mobile PT MRT Jakarta
 - » Mengintegrasikan aplikasi *mobile* dengan operasional untuk kepentingan publik
 - » Mengimplementasikan *multi channel payment* dengan aplikasi *mobile*
4. Mengembangkan teknologi termutakhir/ terkini dalam rangka mendukung kebutuhan operasional MRT
 - » Digitalisasi di lingkungan Operasional & Korporasi PT MRT Jakarta
 - » Pengembangan Aplikasi - aplikasi penunjang operasional & Korporasi PT MRT Jakarta
 - » Sosialisasi dari dua ruang lingkup diatas kepada seluruh karyawan PT MRT Jakarta.





06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang diterapkan melalui komitmen *Governance, Risk Management and Compliance (GRC)*.

The Company implements Good Corporate Governance and is integrated with compliance management, risk management and internal control implemented through the Governance, Risk Management and Compliance (GRC) commitment.



PEMAHAMAN MENDASAR TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BASIC UNDERSTANDING ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada pemegang saham. Terdapat 2 (dua) hal penekanan, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya bahkan hingga pemegang saham minoritas, dan, kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan fondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan,

Good Corporate Governance (GCG) is a series of systems that regulate and control business entities that are expected to be able to create added value for all stakeholders; including to shareholders. There are 2 (two) points of emphasis, namely the importance of the right of shareholders to obtain information correctly and in a timely manner even to minority shareholders, and, the obligation of business entities to make disclosures accurately, timely, transparently for all information on business entity performance, ownership, and stakeholders. The presence of GCG is expected to provide the foundation for the management to build an accountable business entities.

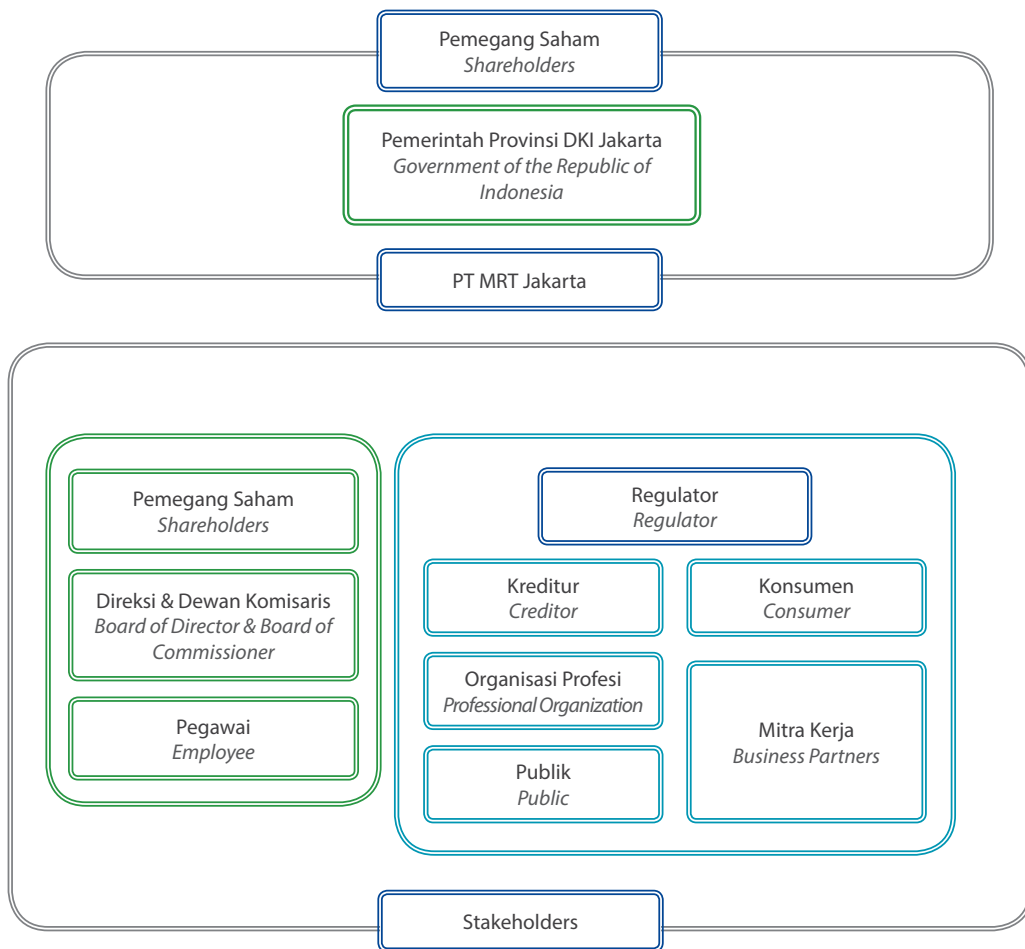
In line with the development of the business world, GCG principles have also experienced developments that include a system of supervision and control that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting, proper risk management, and ethical and stakeholder relations based



PEMAHAMAN MENDASAR TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BASIC UNDERSTANDING ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE

pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkup Perusahaan, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

on ethics. In the scope of the Company, the assessment is carried out on the implementation of GCG to ensure the realization of the principles of GCG comprehensively.





PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Langkah ini ditempuh agar Perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan organisasi mencapai visi dan misinya.

Dalam mengembangkan infrastruktur dan implementasi prinsip-prinsip GCG, Perusahaan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola yang tertanam dalam tubuh dan budaya Perusahaan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Implementasi prinsip GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Terbatas MRT Jakarta (Perusahaan Daerah).

Tujuan Penerapan GCG

Tujuan penerapan prinsip GCG di lingkungan Perusahaan adalah untuk:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan.
- Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan.
- Mengelola sumber daya secara lebih baik.
- Mengelola risiko secara lebih baik.
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.

BASIC PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a Regional-Owned Enterprise (BUMD) owned by the Provincial Government of DKI Jakarta, the Company is fully committed to implement GCG principles as a foundation in creating sustainable added value for the benefit of shareholders, the wider community, and various other stakeholders (employees, consumers, regulators, business partners, etc.) both in the short and long term.

To realize this, the Company implements GCG that is integrated with compliance management, risk management and internal control. This step is taken so that the Company has the knowledge and capability to manage Governance, Risk Management and Compliance (GRC) which is in line with business performance management and is able to deliver the organization to achieve its vision and mission.

In developing infrastructure and implementing GCG principles, the Company ensures that the principles of Corporate Governance embedded in the body and culture of the Company refer to Decree of Governor of DKI Jakarta Province No. 96 of 2004 concerning the implementation of Good Corporate Governance practice in Regional-Owned Enterprise (BUMN) within the Provincial Government of DKI Jakarta. The implementation of GCG principles in the Company's scope also refers to the Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 9 of 2018 concerning Limited Company of MRT Jakarta (Regional Company).

PURPOSES OF GCG IMPLEMENTATION

The purposes of Good Corporate Governance implementation within the Company are as follows:

- *To control and direct the relationship between the Company's Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, employees, clients, business partners, as well as community and the environment;*
- *To encourage and support the development of the Company;*
- *To manage resources better;*
- *To manage risk better;*
- *To increase accountability to the stakeholders;*
- *To prevent deviation in the Company's management;*



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

- Meningkatkan citra Perusahaan menjadi lebih baik.
- Memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (*high performance*) serta citra Perusahaan yang baik;
- Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
- Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders*.
- Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
- Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perusahaan dan karyawan dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
- Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.
- *To improve the Company's image to be much better;*
- *To maximize corporate values in the form of performance improvement (high performance) as well as good corporate image;*
- *To encourage the Company's management to be conducted in a professional, transparent and efficient manner, as well as empowering the function and improving the independency of the Company's organs;*
- *To encourage the Company's organs in making decisions and implementing actions to always be based on high moral value and compliance with the prevailing laws and regulations, as well as on awareness of corporate social responsibilities to the stakeholders;*
- *To efficiently and effectively manage the Company's resources and risks;*
- *To reduce the potentials of conflict of interest in the Company's organs and among employees in running its business;*
- *To create conducive business environment to achieve the Company's goals.*

Prinsip-prinsip GCG dan Penerapannya

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

GCG Principles and the Implementation

In implementing GCG principles, the Company refers to 5 (five) basic principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, as released in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee for Corporate Governance (KNKG).

Asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Principles of Good Corporate Governance*



Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

Explanation of the basic principles above and their general implementation within the Company are as follows:



Prinsip Dasar <i>Basic Principles</i>	Definisi <i>Definition</i>	Penerapan di Lingkup Perusahaan <i>Implementation within the Company</i>
Keterbukaan <i>Transparency</i>	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan. <i>Openness and disclosure in the process of decision making and transparency in disclosing material and relevant information regarding the Company.</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh <i>stakeholders</i>;2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi pengungkapan yang terkait dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Komisaris, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya, serta informasi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Perusahaan;3. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban PT MRT Jakarta untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.4. Kebijakan PT MRT Jakarta tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> sesuai haknya masing-masing dan ketentuan yang berlaku. <ol style="list-style-type: none">1. <i>All material and relevant information regarding the Company is delivered in a timely, adequate, clear, accurate, comparable and easily accessible to stakeholders;</i>2. <i>Information that must be disclosed includes disclosures related to the vision, mission, objectives and strategies of the Company, financial conditions, composition and compensation of Directors and Commissioners, share ownership by members of the Board of Directors and Commissioners and their families, and other information in accordance with the Articles of Association and provisions of the Company;</i>3. <i>Information disclosure does not reduce the obligation of PT MRT Jakarta to protect confidential information about the Company in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.</i>4. <i>PT MRT Jakarta policy is written and communicated to stakeholders in accordance with their respective rights and applicable provisions.</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

Prinsip Dasar <i>Basic Principles</i>	Definisi <i>Definition</i>	Penerapan di Lingkup Perusahaan <i>Implementation within the Company</i>
Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. <i>Clarity of function, execution and accountability of organization which enables an effective company management.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. 2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi yang memadai, sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. 3. Masing-masing anggota Direksi dan jajaran di bawahnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan selaras dengan visi, misi serta nilai-nilai budaya PT MRT Jakarta. 4. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board of Commissioners and Directors have clear duties, authorities and responsibilities.</i> 2. <i>Members of the Board of Commissioners and Directors have adequate competence, according to their duties and responsibilities and understand their role in implementing good corporate governance.</i> 3. <i>Each member of the Board of Directors and the ranks below has clear and consistent duties and responsibilities in line with the vision, mission and cultural values of PT MRT Jakarta.</i> 4. <i>Board of Commissioners and Directors are accountable for their performance to the Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</i>
Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Conformity in the Company's management with the principles of a sound corporate and prevailing laws and regulations.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT MRT Jakarta menjalankan kegiatan usahanya dengan senantiasa berpegang pada prinsip Korporasi dan berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku. 2. PT MRT Jakarta peduli terhadap lingkungan dan masyarakat serta melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PT MRT Jakarta runs its business activities by always adhering to the Corporate principles and based on applicable laws and regulations.</i> 2. <i>PT MRT Jakarta cares about the environment and society and carries out social responsibility fairly</i>



Prinsip Dasar <i>Basic Principles</i>	Definisi <i>Definition</i>	Penerapan di Lingkup Perusahaan <i>Implementation within the Company</i>
Kemandirian <i>Independency</i>	<p>Pengelolaan Perusahaan secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>The Company's professional management without conflict of interest and influence/pressure from any party which are in contrary to the principles of a sound corporate and prevailing laws and regulations.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT MRT Jakarta tidak mendapat intervensi dari Pemegang Saham Pengendali maupun <i>stakeholders</i> lain. 2. PT MRT Jakarta senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 3. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan kepentingan Perusahaan. <p><i>1. In carrying out its business activities, PT MRT Jakarta does not receive intervention from the Controlling Shareholders and other stakeholders.</i></p> <p><i>2. PT MRT Jakarta always avoids conflicts of interest.</i></p> <p><i>3. Decision making is carried out objectively and based on the interests of the Company.</i></p>
Kesetaraan dan Kewajaran <i>Fairness</i>	<p>Perlakuan yang sama dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Equal treatment in the fulfillment of stakeholders' right pursuant to prevailing laws and regulations.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT MRT Jakarta senantiasa berusaha memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 2. Akses informasi oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai prinsip keterbukaan dengan senantiasa memperhatikan kewajaran dan kesetaraan bagi seluruh <i>stakeholders</i> <p><i>1. PT MRT Jakarta always strives to pay attention to the interests of all stakeholders based on the principle of equality and fairness.</i></p> <p><i>2. Information access by the Company is carried out in accordance with the principle of openness by always paying attention to the fairness and equality of all stakeholders</i></p>

Dasar Hukum

Penerapan GCG di Perusahaan mengacu kepada beberapa ketentuan, peraturan, serta perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia
 - » Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - » Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 - » Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - » Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas
 - » Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - » Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003

Legal Basis

GCG implementation in the Company refers to several applicable rules, regulations and laws, namely:

- Laws of the Republic of Indonesia
 - » Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government which also regulates the existence of Regional Owned Enterprises (BUMD).
 - » Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure
 - » Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions
 - » Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
 - » Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower.
 - » Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003



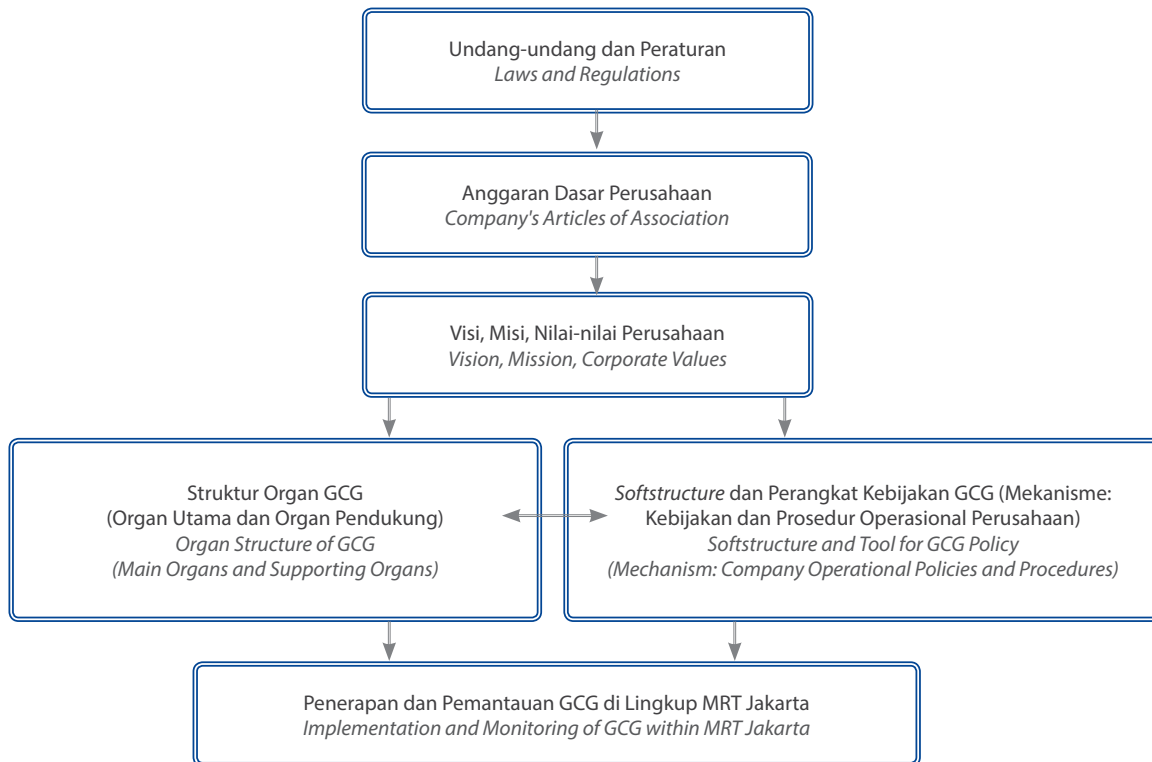
PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

- » Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- » Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Peraturan Pemerintah
 - » Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
- Peraturan dan Keputusan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - » Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Terbatas MRT Jakarta (Perusahaan Daerah).
 - » Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD.
 - » Keputusan Gubernur No. 4 Tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
 - » Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - » Keputusan Gubernur No. 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan BUMD di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
 - » 3. Keputusan Gubernur No. 102 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - » Keputusan Gubernur No. 88 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tanggal 17 Oktober 2006 ("Pedoman Umum GCG Indonesia KNKG").
- Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, yang telah disahkan melalui Akta No. 57 tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusannya No. AHU-0156597.TAH.01.03.TAHUN 2018 tanggal 20 April 2018
- » *Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime*
- » *Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism*
- *Government Regulations*
 - » *Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises (BUMD).*
- *Regulations and Decisions of DKI Jakarta Provincial Government*
 - » *Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 9 of 2018 concerning MRT Jakarta Limited Company (Regional Company).*
 - » *DKI Jakarta Governor Regulation No. 242 of 2015 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of BUMD.*
 - » *Governor Decree No. 4 of 2004 concerning BUMD Health Level Assessment within DKI Jakarta Provincial Government Environment.*
 - » *DKI Jakarta Governor Decree No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Corporate Governance in BUMD within DKI Jakarta Provincial Government.*
 - » *Governor Decree No. 105 of 2003 concerning Guidelines for Preparing Company Work Plans and Budgets (RKAP) and BUMD Financial Reports within DKI Jakarta Provincial Government.*
 - » *Governor Decree No. 102 of 2003 concerning Guidelines for Preparing Long-Term (RJP) Plans of BUMD within DKI Jakarta Provincial Government.*
 - » *Governor Decree No. 88 of 2003 concerning the Development and Development of BUMD within DKI Jakarta Provincial Government.*
- *2006 General Guidelines for Good Corporate Governance Indonesia issued by the National Committee for Corporate Governance (KNKG) dated October 17, 2006 ("General Guidelines for GCG by KNKG of Indonesia").*
- *The latest Articles of Association of the Company, which have been ratified through Deed No. 14 dated January 14, 2019 drafted by Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, which was approved by Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights based on its Decree Number AHU-0002311.AH.01.02.TAHUN 2019 dated January 16, 2019.*



STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

STRUCTURE AND MECHANISM OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Struktur GCG

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perusahaan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu,

GCG Structure

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the organizational infrastructure of a Limited Liability Company covers the interests of shareholders as outlined in the General Meeting of Shareholders (GMS); Directors with their duties to manage; and the Board of Commissioners whose function is to supervise. The PT management system adheres to a model of 2 (two) tier systems, namely the Board of Commissioners and Board of Directors with clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in regulations and legislation as well as the Articles of Association.

The company has three main organs, both the GMS, Board of Commissioners and Directors. The Board of Commissioners and Directors have a responsibility to maintain the Company's business continuity in the long term. Therefore, the Board of



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

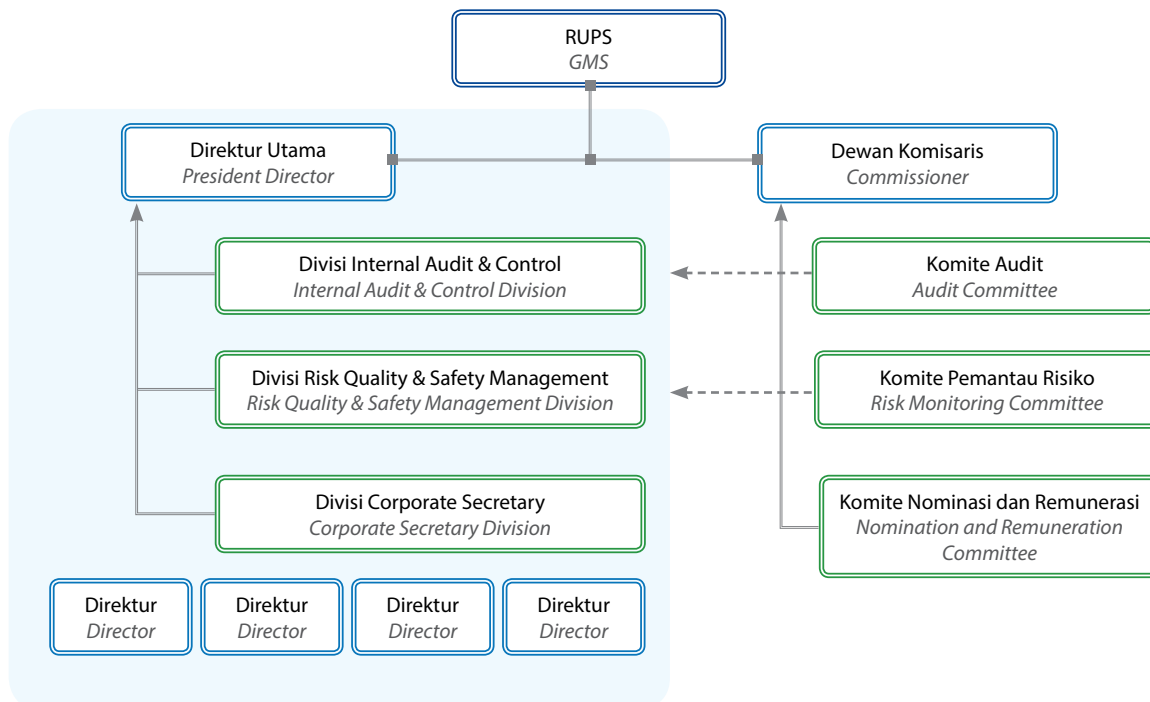
Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan.

Commissioners and Directors must have a common perception of the vision, mission, core values and culture of the Company.

Infrastruktur GCG Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat proses audit independen atas laporan keuangan dan laporan lainnya yang dilakukan oleh akuntan eksternal dalam memperkuat kontrol khususnya terkait laporan kinerja Perusahaan. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

The Company's GCG Infrastructure also includes several important aspects which play a role in supporting strengthening control and management of the Company, consisting of supporting organs which include Internal Audit, Corporate Secretary, and Risk Management Units under the Board of Directors, as well as the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Risk Monitoring Committee under the Board of Commissioners. In addition, there is an independent audit process of financial statements and other reports carried out by external accountants in strengthening control, especially related to the Company's performance reports. This structure is in accordance with the regulatory provisions in force in Indonesia.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan MRT Jakarta Organ Structure of MRT Jakarta Corporate Governance





Softstructure: Mekanisme GCG

Softstructure atau perangkat kebijakan GCG merupakan sebuah mekanisme penerapan prinsip GCG di lingkup sebuah entitas usaha. *Softstructure* GCG terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ GCG, dan hubungan kerja antar organ GCG; termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Perusahaan telah menyusun, menerapkan dan memperbaharui *softstructure* GCG yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur Operasional, meliputi antara lain:

Softstructure: GCG Mechanism

The *softstructure* or tool of GCG policy is a mechanism for implementing GCG principles within business entity. The GCG *structure* consists of various regulations and policies that regulate the scope of GCG organ responsibility, and work relationships between GCG organs; including with internal and external stakeholders.

The company has compiled, implemented and updated the GCG *softstructure* consisting of Operational Policies and Procedures, including among others:

Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedures</i>	Penetapan <i>Establishment</i>
Anggaran Dasar Perusahaan <i>Company's Articles of Association</i>	Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-36355.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan badan Hukum Perusahaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 21216 Tahun 2008. <i>Deed of Establishment of Limited Liability Company PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 dated June 17, 2008 drafted by Sutjipto, S.H., a Notary in Jakarta, who had obtained approval from Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights based on Ministerial Decree No. AHU-36355.AH.01.01.Year 2008 concerning Ratification of the Company Legal Entity by Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights dated June 27, 2008, and has been announced in Republic of Indonesia State Gazette No. 86 dated October 24, 2008, Additional State Gazette No. 21216 in 2008.</i>
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Guidelines for Good Corporate Governance</i>	Peraturan Direksi No. 014 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>) <i>Directors Regulation No. 014 of 2018 concerning Code of Corporate Governance</i>
Pedoman Standar Perilaku (<i>Code of Conduct/ CoC</i>) <i>Code of Conduct / CoC</i>	Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) <i>Directors Regulation No. 007-1 of 2018 concerning Code of Conduct</i>
Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) <i>Board of Commissioners and Directors Guidelines (Manual Board)</i>	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 008 Tahun 2018 dan No. 072-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) <i>Board of Commissioners and Directors Joint Decree No. 008 of 2018 and Number 072-1 of 2018 concerning Guidelines for Board of Commissioners and Directors (Manual Board)</i>
Piagam Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2016 tentang Piagam Komite Audit <i>Board of Commissioners Decree No. 002 of 2016 concerning Audit Committee Charter</i>
Piagam Komite Nominasi & Remunerasi <i>Nomination & Remuneration Committee Charter</i>	Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 21 Desember 2017 <i>Nomination and Remuneration Committee Charter dated December 21, 2017</i>
Piagam Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2015 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko <i>Board of Commissioners Decree No. 001 of 2015 concerning Risk Monitoring Committee Charter</i>
Piagam Audit Internal <i>Internal Audit Charter</i>	Piagam Audit Internal tanggal 25 Januari 2016 <i>Internal Audit Charter dated January 25, 2016</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedures</i>	Penetapan <i>Establishment</i>
Kebijakan Manajemen Risiko <i>Risk Management Policy</i>	Peraturan Direksi No. 033 Tahun 2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko <i>Directors Regulation No. 033 of 2018 concerning Risk Management Policy</i>
Pedoman Pengendalian Gratifikasi <i>Guidelines for Gratification Control</i>	Keputusan Direksi No. 042-1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi <i>Directors Decree No. 042-1 of 2017 concerning Guidelines for Gratification Control</i>
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa <i>Goods / Services Procurement Guidelines</i>	Keputusan Direksi No. 043 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa <i>Directors Decree No. 043 of 2017 concerning Goods / Services Procurement Guidelines</i>
Pedoman Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest Guidelines</i>	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 001 Tahun 2017 dan No. 045 Tahun 2017 tentang Pedoman Benturan Kepentingan <i>Board of Commissioners and Directors Joint Decree No. 001 of 2017 and No. 045 of 2017 concerning Conflict of Interest Guidelines</i>
Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) <i>Guidelines for Reporting Systems for Whistleblowing System</i>	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 002 Tahun 2017 dan No. 042-2 Tahun 2017 tentang Pedoman Benturan Kepentingan <i>Board of Commissioners and Directors Joint Decree No. 002 of 2017 and No. 042-2 of 2017 concerning Conflict of Interest Guidelines</i>
Pedoman Kepatuhan <i>Compliance Guidelines</i>	Peraturan Direksi No. 003 Tahun 2017 tentang Pedoman Kepatuhan (Compliance) <i>Directors Regulation No. 003 of 2017 concerning Compliance Guidelines</i>
Pedoman Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System Guidelines</i>	Peraturan Direksi No. 004 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal <i>Directors Regulation No. 004 of 2017 concerning Internal Control System Guidelines</i>
Pedoman Anti Kecurangan <i>Anti Fraud Guidelines</i>	Keputusan Direksi No. 054 Tahun 2017 tentang Pedoman Anti Kecurangan <i>Directors Decree No. 054 of 2017 concerning Anti Fraud Guidelines</i>
Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan <i>Guidelines for Preparation of Annual Reports</i>	Keputusan Direksi No. 046-1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) <i>Directors Decree No. 046-1 of 2017 concerning Guidelines for Preparation of Annual Report</i>
Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) <i>Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines</i>	Keputusan Direksi No. 048 Tahun 2017 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) <i>Directors Decree No. 048 of 2017 concerning Guidelines for Corporate Social Responsibility</i>
Pedoman Tata Kelola Informasi <i>Information Management Guidelines</i>	Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi <i>Directors Regulation No. 005 of 2017 concerning Guidelines for Management of Information Technology</i>
Pedoman Keterbukaan Informasi Publik <i>Guidelines for Public Information Disclosure</i>	Keputusan Direksi No. 053 Tahun 2017 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik <i>Directors Decree No. 053 of 2017 concerning Guidelines for Public Information Disclosure</i>
Pedoman Korespondensi <i>Correspondence Guidelines</i>	Peraturan Direksi No. 012 Tahun 2017 tentang Pedoman Korespondensi <i>Directors Regulation No. 012 of 2017 concerning Correspondence Guidelines</i>
Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Guidelines for Managing State Official Assets Reports (LHKPN)</i>	Peraturan Direksi No. 009 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) <i>Directors Regulation No. 009 of 2017 concerning Guidelines for Managing State Official Assets Reports (LHKPN)</i>
Roadmap GCG Periode 2017-2021 <i>Period 2017-2021 GCG Roadmap</i>	Peraturan Direksi No. 007 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Dokumen. <i>Directors Regulation No. 010 of 2017 concerning Good Corporate Governance Roadmap of PT MRT Jakarta for the Period of 2017 - 2021</i>
Hirarki Norma Perusahaan <i>Hierarchy Norms of the Company</i>	Peraturan Direksi No. 010 Tahun 2017 tentang Roadmap Good Corporate Governance PT MRT Jakarta Periode Tahun 2017 – 2021 <i>Directors Decree No. 051 of 2017 concerning the Company's Norm Hierarchy</i>



Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedures</i>	Penetapan <i>Establishment</i>
Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi <i>Special List of Board of Commissioners and Directors Share Ownership</i>	Keputusan Direksi No. 051 Tahun 2017 tentang Hierarki Norma Perusahaan <i>Special List of Board of Commissioners and Directors' Share Ownership updated every year</i>
Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam Penerapan GCG <i>Statement of Board of Commissioners and Directors Commitment in GCG Implementation</i>	Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris diupdate setiap tahun <i>Statement of Board of Commissioners and Directors Commitment in GCG Implementation is updated annually</i>
Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tidak Memiliki Benturan Kepentingan <i>Statement Letter of Board of Commissioners and Directors Has No Conflict of Interest</i>	Peraturan Direksi No. 007 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Dokumen. <i>Board of Directors Regulation No. 007 Year 2018 concerning Document Control Guidelines.</i>
Surat Edaran tentang Larangan Menerima Bingkisan <i>Circular Letter concerning Prohibition of Receiving Gifts</i>	Surat Edaran No. 002 Tahun 2017 tentang Larangan menerima bingkisan <i>Circular Letter No. 002 of 2017 concerning Prohibition of receiving gifts</i>
Kewajiban menjalankan <i>Three Lines of Defense</i> Bagi Pejabat Struktural <i>Obligation to run Three Lines of Defense for Structural Officials</i>	Peraturan Direksi No. 023 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menjalankan <i>three lines of Defense</i> bagi pejabat struktural <i>Directors Regulation No. 023 of 2018 concerning Obligations running Three Lines of Defense for structural officials</i>
Surat Edaran tentang aturan pengiriman data menggunakan sarana surat elektronik/email <i>Circular Letter regarding the rules for sending data using electronic mail / e-mail</i>	Surat Edaran No. 006 Tahun 2017 tentang aturan pengiriman data menggunakan sarana surat elektronik/email <i>Circular Letter Number 006 of 2017 concerning the rules for sending data using electronic mail / e-mail</i>

Kebijakan dan prosedur GCG yang dimiliki Perusahaan telah diterbitkan dalam situs web Perusahaan dengan alamat www.jakartamrt.co.id.

The Company's GCG policies and procedures have been published on the Company's website www.jakartamrt.co.id

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

SOCIALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Perusahaan mengadakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang secara rutin dilakukan kepada seluruh Insan Perusahaan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan terkait GCG. Sosialisasi dilakukan melalui email kepada seluruh Insan Perusahaan, maupun publikasi pada *website* Perusahaan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh pegawai Perusahaan maupun *Stakeholders*, media tatap muka dan melalui video pada layar televisi Perusahaan.

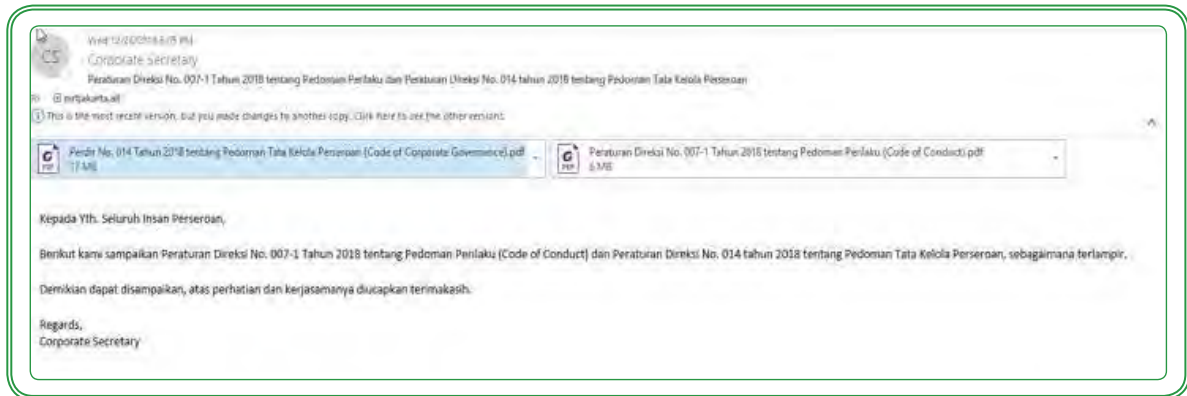
The Company holds a Corporate Governance socialization which is routinely carried out to all employees. The socialization aims to provide an understanding of the good corporate governance implementation and an understanding of GCG related policies. Socialization is carried out by e-mail to all employees, as well as publications on the Company's website that can be seen and downloaded easily by the employees and Stakeholders, face-to-face media and through videos on the Company's television screens.



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

1. Melalui email

1. By E-mail



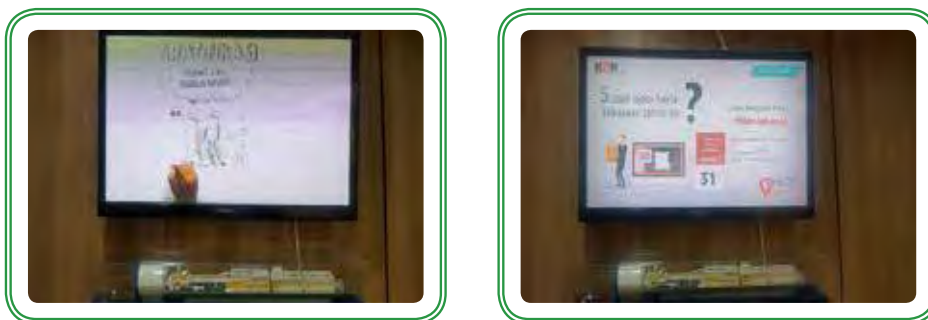
2. Melalui media tatap muka

2. By Face to Face Media

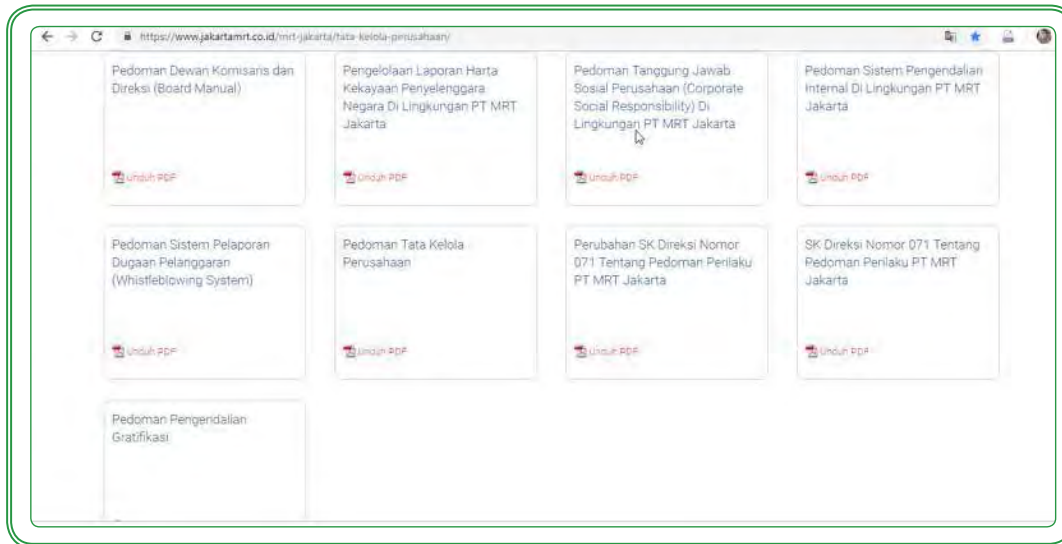


3. Melalui media TV

3. By TV



4. Situs Web



4. Website

ASSESSMENT: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dasar Penilaian dan Metode

Setiap tahun, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perusahaan. Penilaian penerapan GCG dilakukan sejak tahun 2015. Penilaian dilakukan secara *self assessment* pada tahun 2015 dan 2016, dan secara independen pada tahun 2017 dan 2018. PT MRT Jakarta menunjuk Asesor Independen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan *assessment* GCG di tahun 2018. *Assessment* yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menggunakan Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMD yang dikembangkan oleh BPKP.

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya Hingga Tahun 2018

Evaluasi penerapan GCG periode tahun buku 2017 dilakukan dengan metode *Assessment* yang disusun dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Basic Assessment and Method

Every year, the Company assesses the GCG implementation to determine the level of adequacy of GCG implementation in the Company. Assessment of GCG implementation was carried out since 2015. The assessment was carried out by self assessment in 2015 and 2016, and independently in 2017 and 2018. PT MRT Jakarta appointed the Independent Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative of DKI Jakarta Province to conduct GCG assessment in 2018. The assessment conducted by BPKP of Provincial Representative Office of DKI Jakarta uses Indicators or Assessment Parameters and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in BUMD developed by BPKP.

Assessment of 2017 GCG Implementation: Results, Recommendations and Follow-Up to 2018

Evaluation of GCG implementation for 2017 fiscal year was carried out by the Assessment method prepared and developed by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta No. ST-1096/PW09/4.2/2017 tanggal 1 November 2017. Berdasarkan hasil *Assessment* GCG yang dilakukan di tahun buku 2017 tersebut, Perusahaan memperoleh skor sebesar 80,45 dengan predikat "Baik", meningkat 9,25 poin dari skor *self assessment* di tahun 2016 yang tercatat sebesar 71,20 dengan predikat "Baik".

DKI Jakarta Province in accordance with Letter of DKI Jakarta Province Representative Head of BPKP No. ST-1096 / PW09 / 4.2 / 2017 November 1, 2017. Based on results of GCG Assessment conducted in 2017 fiscal year, the Company obtained a score of 80.45 with "Good" predicate, an increase of 9.25 points from the self assessment score in 2016 which was recorded at 71.20 with "Good" predicate.

Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	:	Assessment
Penilai <i>Assessor</i>	:	BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>BPKP Representative of DKI Jakarta Province</i>
Periode Penerapan <i>Period of Implementation</i>	:	1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 <i>January 1, 2017 to December 31, 2017</i>
Tahun Ukur <i>Measuring Year</i>	:	Tahun Buku 2017 <i>2017 Fiscal Year</i>
Waktu Pengukuran <i>Measuring Time</i>	:	3 November 2017 - 16 Januari 2018 <i>November 03, 2017 - January 16, 2018</i>

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

Details of Assessment Results of the Company's GCG implementation for 2017 fiscal year are as follows:

Aspek Pengujian <i>Assessment Aspects</i>		Bobot <i>Value</i>	Pencapaian Tahun Buku 2017 <i>Achievement of 2017 Fiscal Year</i>	
			Capaian Aktual <i>Actual Achievement</i>	Capaian <i>Achievement (%)</i>
I	Komitmen <i>Commitment</i>	15,00	11,16	74,40
II	Kebijakan <i>Policies</i>	10,00	8,25	82,46
III	Partisipan GCG <i>GCG Participants</i>			
	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	24,00	21,44	89,35
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	18,00	13,49	74,92
	Komite Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Committee</i>	5,00	3,53	70,69
	Direksi <i>Board of Directors</i>	14,00	10,77	76,92
	Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i>	5,00	3,68	73,66



Aspek Pengujian Assessment Aspects		Bobot Value	Pencapaian Tahun Buku 2017 Achievement of 2017 Fiscal Year	
			Capaian Aktual Actual Achievement	Capaian Achievement (%)
	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	4,00	3,45	86,21
IV	Pengungkapan Informasi Information Disclosure	5,00	4,68	93,56
Skor Keseluruhan Total Score		100,00	80,45	80,45
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality		"Baik"/"Good"		

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Remarks: 0-50: Not Good | 50-60: Less Good | 60-75: Good enough | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Komitmen Perusahaan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti setiap temuan dalam penilaian GCG yang menjadi rekomendasi dalam area peningkatan atau *Area of Improvement* implementasi GCG. Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

The Company's commitment in perfecting GCG implementation is among others carried out by following up on any findings in the GCG assessment which are recommendations in the Area of Improvement of GCG implementation. Until the end of 2018, the Company has followed up on the recommendations for GCG implementation of 2017 fiscal year as follows:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 Follow-Up Up to Year-End of 2018		
		Status	Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow Up
I	Komitmen Commitment			
1	Mengomunikasikan pedoman corporate governance kepada seluruh jajaran Perusahaan secara periodik untuk meningkatkan pemahaman terhadap pedoman corporate governance <i>To communicate corporate governance guidelines to all levels of the company periodically to improve understanding of corporate governance guidelines</i>	√	2018	Menyampaikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan Perusahaan dan melakukan sosialisasi. <i>Has delivered the Code of Conduct to all Company's individual and conduct socialization.</i>
2	Meningkatkan pemahaman terhadap pedoman perilaku <i>To increase understanding of behavioral guidelines</i>	√	2018	Menyampaikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan Perusahaan dan melakukan sosialisasi. <i>Has delivered the Code of Conduct to all Company' individual and conduct socialization</i>
3	Membuat laporan penegakan disiplin <i>To establish disciplinary enforcement reports</i>	x	2018	Tidak ada pelanggaran disiplin selama tahun 2018 <i>There are no disciplinary violations during 2018</i>
4	Menyampaikan laporan periodik manajemen baik kepada Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas secara tepat waktu <i>To deliver periodic management reports to both Majority Shareholders and Minority Shareholders in a timely manner</i>	√	2018	Laporan manajemen disampaikan setiap bulan kepada Pemegang Saham, baik Pemegang Saham mayoritas maupun minoritas secara tepat waktu <i>Management reports are submitted monthly to the Shareholders, both majority and minority Shareholders in a timely manner</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
5	Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemegang Saham Minoritas <i>To submit performance reports to Minority Shareholders</i>	X	2018	Penandatanganan Kontrak Kinerja baru dilakukan pada 5 Oktober 2018. Penyampaian laporan kinerja akan dilakukan pada awal tahun 2019 <i>The signing of the new Performance Contract will be held on October 5, 2018. Submission of performance reports will be conducted at the beginning of 2019</i>
6	Menandatangani Pernyataan Pakta Integritas jika terdapat pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris baru <i>To sign the Statement of Integrity Pact if there is a new appointment of Directors and Board of Commissioners</i>	√	2018	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat di tahun 2018 menandatangani Pakta Integritas. <i>The newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2018 signed the Integrity Pact.</i>
7	Menginstruksikan kepada seluruh karyawan agar menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan diperbaharui secara berkala <i>To instruct all employees to sign a statement of compliance with the Code of Conduct and be updated regularly</i>	√	2018	Pedoman Perilaku diperbaharui sesuai Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan PT MRT Jakarta dan menyampaikannya kepada seluruh Insan Perusahaan. Dilakukan pembagian buku Pedoman Perilaku kepada Insan Perusahaan pada saat acara ulang tahun PT MRT Jakarta dan terdapat seremoni penandatanganan bersama Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku. <i>The Code of Conduct is updated in accordance with Directors Regulation No. 007-1 Year 2018 concerning the Code of Conduct in PT MRT Jakarta and conveying it to all of the Company's employees. Distribution of the Code of Conduct book to the Company's employees at PT MRT Jakarta anniversary event and a joint signing ceremony of the Code of Conduct Compliance Statement.</i>
8	Menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Minoritas agar menandatangani Kontrak Kinerja <i>To deliver to Board of Commissioners and Minority Shareholders to sign a Performance Contract</i>	√	2018	Dewan Komisaris telah menandatangani Kontrak Kinerja dengan Pemegang Saham Mayoritas, namun belum dengan Pemegang Saham Minoritas <i>Board of Commissioners has signed a Performance Contract with the Majority Shareholder, but not yet with the Minority Shareholder</i>
II Kebijakan Policies				
1	Menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan hak yang seimbang kepada <i>stakeholders</i> Perusahaan dengan muatan transparansi dalam pengungkapan informasi yang relevan dan pemenuhan kewajiban tepat waktu <i>To improve policies relating to the recognition of balanced rights to corporate stakeholders with a transparency content in disclosing relevant information and fulfilling obligations on time</i>	√	2018 – 2019	Penyempurnaan kebijakan tentang pengakuan hak yang seimbang kepada <i>stakeholders</i> diakomodir pada Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) <i>Improvement of policies regarding the recognition of balanced rights to stakeholders accommodated in Directors Regulation No. 007-1 Year 2018 concerning Code of Conduct</i>
2	Melakukan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan, khususnya muatan tentang ketentuan penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui RKAP tahun buku berikutnya <i>To update Corporate Governance Guidelines, specifically contents of provisions for implementation of GMS to approve the next year's Work plan and budget (RKAP)</i>	√	2018	Pedoman tata kelola Perusahaan diperbaharui sesuai Peraturan Direksi No. 014 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance). <i>Corporate governance guidelines are updated in accordance with Directors' Regulation Number. 014 of 2018 concerning Code of Corporate Governance.</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
3	Menyempurnakan Board Manual dengan muatan sejarah singkat BUMD, visi dan misi BUMD, nilai-nilai/budayakerja BUMD, struktur organisasi BUMD, rencana dan realisasi usaha BUMD, serta opini atas Laporan Keuangan <i>To improve Board Manual with a brief history of Regional-Owned Enterprise (BUMD), vision and mission of BUMD, values / culture of BUMD, organization structure of BUMD, plan and realization of BUMD business, as well as opinions on Financial Statements</i>	X	2018-2019	Penyempurnaan Board Manual telah disusun, namun belum ditetapkan. <i>Completion of the Manual Board has been compiled, but has not been established.</i>
4	Mendorong pejabat wajib LHKPN meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) <i>To encourage compulsory LHKPN officials to improve compliance with the State Official Assets Report (LHKPN)</i>	√	2018	Seluruh wajib LHKPN telah menyampaikan LHKPN melalui e-lhkpn <i>All mandatory LHKPN has submitted LHKPN through e-lhkpn</i>
5	Menyempurnakan kebijakan pengendalian gratifikasi dengan muatan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi <i>To improve gratification control policies with the contents of Board of Commissioners and Directors Commitments</i>	X	2018 - 2019	Penyempurnaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan, namun belum ditetapkan <i>Completion of Gratification Control Guidelines has been made, but has not been determined</i>
6	Menetapkan kebijakan pengendalian dokumen yang minimum memuat kerahasiaan, keamanan dan masa penyimpanan file <i>To establish minimum document control policies that contain confidentiality, security and file retention period</i>	√	2018	Pedoman Pengendalian dokumen telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 007 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Dokumen. <i>Document Control Guidelines have been prepared and determined based on Directors' Regulation Number 007 of 2018 concerning Document Control Guidelines.</i>
III Partisipan GCG <i>GCG Participants</i>				
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>				
1	Menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara individual <i>To establish a system of performance assessment of the Directors individually</i>	x		Sistem penilaian kinerja Direksi masih berdasarkan pada penilaian terhadap pencapaian Perusahaan pada tahun buku. <i>Board of Directors' performance assessment system is still based on an assessment of the Company's achievements in the fiscal year.</i>
2	Pemegang Saham Minoritas agar meningkatkan peran aktifnya terkait dengan hak untuk memperoleh informasi material mengenai keadaan Perusahaan secara tepat waktu <i>For Minority Shareholders in order to increase their active role related to the right to obtain material information about the condition of the company in a timely manner</i>	x	2018	Pada pelaksanaannya, Perusahaan sangat menjunjung tinggi hak-hak dan wewenang pemegang saham minoritas, untuk itu Perusahaan senantiasa memberikan segala informasi terkait kinerja Perusahaan pada seluruh kepentingan melalui situs web Perusahaan di www.jakartamrt.co.id <i>In its implementation, the Company highly supports the rights and authority of minority shareholders, for which the Company always provides all information related to the performance of the Company throughout all interests through the Company's web site at www.jakartamrt.co.id</i>
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>				
1	Melaksanakan program pengenalan sesuai dengan pedoman <i>To carry out an introduction program in accordance with the guidelines</i>	√	2018	Terdapat program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. <i>There is an introduction program for new members of the Board of Commissioners.</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
2	Menginstruksikan kepada Direksi untuk memisahkan rencana pelatihan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam RKAP <i>To instruct the Board of Directors to separate the training plan of the Board of Commissioners with the Directors in the RKAP</i>	√	2018	RKAP Tahun 2018 telah memisahkan anggaran pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi <i>2018 RKAP has separated training budget for the Board of Commissioners and Directors</i>
3	Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi anggota Dewan Komisaris <i>To carry out training and development programs for members of the Board of Commissioners</i>	x	2018 - 2019	Perusahaan sangat mendukung penuh pengembangan kompetensi pada seluruh tingkat level jabatan karyawan <i>The Company fully supports the development of competencies at all levels of employee positions</i>
4	Menginstruksikan kepada Direksi untuk mendokumentasikan notulen rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi terkait arahan Dewan Komisaris dalam penyusunan rancangan RJPP <i>To instruct the Board of Directors to document the minutes of Joint meeting with the Board of Commissioners regarding the direction of the Board of Commissioners in drafting the Long-Term Plan (RJPP)</i>	√	2018	Arahan Dewan Komisaris dalam penyusunan rancangan RJPP telah didokumentasikan dalam notulen rapat. <i>The direction of the Board of Commissioners in drafting the Long-Term Plan (RJPP) has been documented in the minutes of meeting.</i>
5	Mendokumentasikan arahan mengenai Sistem Teknologi Informasi <i>To document directives regarding Information Technology Systems</i>	√	2018	Arahan Dewan Komisaris terkait sistem teknologi informasi telah didokumentasikan dalam notulen rapat. <i>The direction of the Board of Commissioners regarding information technology system has been documented in the minutes of meeting.</i>
6	Menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham <i>To establish policies and selection criteria for prospective Directors and propose those candidates to Shareholders</i>	√	2018	Kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan <i>The policies and selection criteria for prospective Directors are contained in the Corporate Governance Guidelines</i>
7	Mendokumentasikan penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara individu <i>To document the performance assessment of the Board of Directors based on individually determined criteria</i>	x		Perusahaan belum melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara individu yang terdokumentasi, Penilaian masih bersifat kolegial yang dilihat dari tingkat keberhasilan dari jajaran/Direksi dalam mengelola Perusahaan. <i>The Company has not carried out a documented performance assessment of the Board of Directors individually. The assessment is still collegial in view of the success rate of the Directors' management in managing the Company.</i>
8	Menetapkan kebijakan mengenai pengusulan remunerasi Direksi <i>To establish policies regarding proposing remuneration for Directors</i>	√	2018	Kebijakan mengenai pengusulan remunerasi Direksi terdapat pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan <i>The policy regarding proposing remuneration for the Board of Directors is found in the Corporate Governance Guidelines</i>
9	Memasukkan kegiatan pemantauan GCG sebagai bagian dari rencana kerja tahunan Dewan Komisaris <i>To incorporate GCG monitoring activities as part of the Board of Commissioners annual work plan</i>	√	2018	Pemantauan penerapan GCG menjadi salah satu rencana kerja Dewan Komisaris di Tahun 2018 <i>Monitoring the implementation of GCG is one of the work plans of the Board of Commissioners in 2018</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
10	Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris (<i>self assessment</i>) <i>To measuring and evaluate the performance of the Board of Commissioners (self assessment)</i>	x	2018	Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kontrak kinerja dengan Pemegang Saham, belum secara self assessment <i>The measurement and performance assessment of the Board of Commissioners is based on a performance contract with the Shareholders, not yet through self assessment</i>
11	Melengkapi pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris dengan muatan etika rapat, evaluasi tidak lanjut hasil rapat sebelumnya, Pembahasan atas arahan/usulan keputusan Dewan Komisaris <i>To complete the Board of Commissioners' meeting guidelines with the ethical content of the meeting, further evaluation of the results of the previous meeting, Discussion of the direction / decision of the Board of Commissioners</i>	√	2018	Tata tertib rapat Dewan Komisaris telah disempurnakan pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan <i>The rules of the Board of Commissioners meeting have been improved in the Corporate Governance Guidelines</i>
12	Menyampaikan keberatan atas risalah rapat maksimal 14 hari setelah pengiriman risalah <i>To submit objections to minutes of meeting a maximum of 14 days after the delivery of the minutes</i>	√	2018	Keberatan atas risalah rapat disampaikan tidak melebihi 14 hari setelah risalah dikirim <i>Objections to minutes of meetings are submitted not exceeding 14 days after the minutes have been sent</i>
13	Meningkatkan kehadiran rapat, baik dalam rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar mencantumkan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat ke dalam notulen rapat <i>To increase the attendance of meetings, both in the internal meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors, and instruct the Secretary of the Board of Commissioners to include reasons for absence of the Board of Commissioners in the meeting in the minutes of meeting</i>	√	2018	Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris meningkat di Tahun 2018 jika dibandingkan di Tahun 2017. <i>The attendance rate of Board of Commissioners meetings increases in 2018 compared to 2017.</i>
14	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk menyempurnakan penyimpanan dokumen Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris <i>To instruct the Secretary of the Board of Commissioners to improve the retention of documents of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Committee</i>	√	2018	Sekretaris Dewan Komisaris melakukan fungsinya dalam penyimpanan dokumen Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris <i>The Secretary of the Board of Commissioners performs its functions in storing documents of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Committee</i>
15	Melaporkan pembentukan Komite Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham <i>To report the formation of a Board of Commissioners Committee to Shareholders</i>	√	2018	Selama tahun 2018, tidak ada pembentukan Komite Dewan Komisaris baru <i>During 2018, there was no new Board of Commissioners formation</i>
Komite Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Committee</i>				
1	Menginstruksikan kepada Komite Dewan Komisaris agar melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan <i>To instruct the Board of Commissioners Committee to carry out regular meetings in accordance with the annual work program</i>	√	2018	Seluruh Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin di tahun 2018 <i>All Committees of the Board of Commissioners carry out regular meetings in 2018</i>
2	Menginstruksikan kepada Komite Audit agar melakukan kecukupan penilaian efektivitas sistem pengendalian internal secara entitas yang dilaksanakan oleh Direksi <i>To instruct the Audit Committee to carry out adequacy of assessment of the internal control system effectiveness in the entity carried out by the Board of Directors</i>	x	2018 - 2019	Komite Audit berkomitmen untuk terus mengoptimalkan efektivitas sistem pengendalian internal agar lebih terstruktur <i>Audit Committee is committed to continuously optimizing the effectiveness of the internal control system to be more structured</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
3	Menginstruksikan kepada Komite Pemantau Risiko agar mendokumentasikan penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan <i>To instruct the Risk Monitoring Committee to document the assessment of implementation effectiveness of the corporate risk management</i>	x	2018 - 2019	Komite Pemantau Risiko terus berupaya untuk meningkatkan sistem penilaian efektivitas yang terdokumentasi dengan baik <i>Risk Monitoring Committee continues to strive to improve the well-documented effectiveness assessment system</i>
4	Menginstruksikan kepada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membuat laporan kegiatan triwulan I, II, III dan IV dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris <i>To instruct the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee to establish quarterly, second, third and fourth quarter activity reports and submit the assignment results to the Board of Commissioners</i>	√	2018	Seluruh Komite Dewan Komisaris membuat laporan kegiatan per Triwulan kepada Dewan Komisaris <i>All Committees of the Board of Commissioners establish quarterly activity reports to the Board of Commissioners</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>				
1	Mengesahkan uraian tugas dan pedoman kualifikasi masing-masing jabatan <i>To validate job descriptions and qualifications guidelines for each position</i>	√	2018	Uraian tugas dan kualifikasi setiap jabatan telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 022 Tahun 2018 tentang Job Profile bagi Karyawan di lingkungan PT MRT Jakarta <i>The description of duties and qualifications of each position has been compiled and determined based on Directors Regulation No. 022 of 2018 concerning Job Profile for Employees in PT MRT Jakarta</i>
2	Menyempurnakan RKAP dengan muatan hal-hal lain yang memerlukan keputusan Pemegang Saham <i>To refining the RKAP with the contents of other matters that require Shareholders' resolutions</i>	√	2018	RKAP tahun 2018 telah memuat hal-hal yang memerlukan keputusan Pemegang Saham. <i>2018 RKAP contains matters that require Shareholders' resolutions</i>
3	Melaksanakan pengujian sistem pengendalian intern sesuai pedoman yaitu penilaian atas pengendalian tingkat Perusahaan dan penilaian atas pengendalian tingkat aktivitas serta mendokumentasikannya <i>To carry out internal control system examination according to guidelines, namely an assessment of company-level controls and an assessment of the level of activity control and documenting it</i>	√	2018	Pengujian Sistem Pengendalian Intern pada tingkat korporasi dilaksanakan oleh BPKP <i>Internal Control System examination at the corporate level is carried out by the BPKP.</i>
4	Memutakhirkan muatan SPI Charter (<i>Internal Audit Charter</i>) sesuai ketentuan yang berlaku <i>To update SPI Charter (Internal Audit Charter) contents according to applicable regulations</i>	√	2018-2019	Pemutakhiran <i>Internal Audit Charter</i> telah dilakukan, namun belum ditetapkan. <i>Updates to the Internal Audit Charter have been made, but have not been determined.</i>
5	Mengesahkan draft <i>Master Plan</i> Teknologi Informasi dan melaksanakannya <i>To ratify the draft Information Technology Master Plan and implement it</i>	√	2018	<i>Master plan</i> Teknologi Informasi telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 013 Tahun 2018. <i>The Information Technology Master Plan has been approved based on Directors Regulation No. 013 in 2018.</i>
6	Mengesahkan kebijakan mengenai hak-hak konsumen <i>To validate policies regarding consumer rights</i>	x	2018-2019	Kebijakan mengenai hak-hak konsumen sudah disusun, namun belum disahkan <i>Policies regarding consumer rights have been prepared, but have not yet been ratified</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
7	Menyusun laporan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatannya dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan RKAP serta Laporan Keuangan pada BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pasal 13 ayat 1 yang berbunyi Direksi setiap triwulan, tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan harus menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP <i>To compile periodic reports as a form of accountability for activities by referring to the DKI Jakarta Provincial Governor Decree Number 105 of 2003 concerning Guidelines for RKAP Preparation and Financial Reports on BUMD in DKI Jakarta Provincial Government article 13 paragraph 1 which states the Directors every quarter, yearly or at any time if necessary must submit a report on the implementation of the RKAP</i>	√	2018	Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP setiap triwulan kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD <i>The Company has compiled and submitted a report on the implementation of the RKAP quarterly to the Head of the BUMD Development Agency</i>
8	Menyempurnakan pedoman tata tertib rapat Direksi yang minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Direksi <i>To improve the guidelines for the Board of Directors' meetings that at a minimum regulate the ethics of meetings and preparation of minutes of meetings, follow-up evaluations of the results of previous meetings, and discussion of directives / proposals and / or decisions of the Board of Directors</i>	√	2018	Tata tertib rapat Direksi telah disempurnakan pada Pedoman Tata kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) <i>The rules of the Board of Directors meeting have been refined in the Code of Corporate Governance</i>
9	Mencantumkan alasan ketidakhadiran Direksi baik dalam rapat Direksi maupun rapat gabungan Direksi-Dewan Komisaris dalam risalah rapat <i>To list the reasons for the absence of the Board of Directors both in the Board of Directors meeting and the Board of Directors-Board of Commissioners joint meeting in the minutes of meeting</i>	√	2018	Risalah rapat telah mencantumkan alasan ketidakhadiran Direksi pada setiap rapat Direksi <i>Minutes of meetings have included the reasons for absence of the Directors at each Board of Directors meeting</i>
10	Melaksanakan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat sesuai pedoman dengan materi pengenalan yang minimal memuat: pelaksanaan prinsip GCG, gambaran tentang BUMD, pendelegasian wewenang, sistem dan kebijakan pengendalian internal, tugas dan tanggung jawab Direksi <i>To carry out an introduction program for newly appointed Directors in accordance with the guidelines with introductory material that at a minimum includes: the implementation of GCG principles, a description of BUMD, delegation of authority, systems and internal control policies, duties and responsibilities of the Board of Directors</i>	√	2018	Program pengenalan telah dilakukan kepada 2 anggota Direksi baru di Tahun 2018. <i>The introduction program has been carried out to 2 new members of the Board of Directors in 2018.</i>
11	Melaksanakan program pelatihan bagi anggota Direksi dan memisahkan anggaran pelatihan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam RKAP <i>To conduct training programs for members of the Board of Directors and separate the training budget of the Board of Commissioners and Directors in the RKAP</i>	√	2018	Anggota Direksi telah melaksanakan program pelatihan dan RKAP tahun 2018 telah memisahkan anggaran pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi <i>Members of the Board of Directors have implemented training programs and the 2018 RKAP has separated the training budget for the Board of Commissioners and Directors</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
12	Mendokumentasikan analisis terhadap capaian kinerja dan upaya perbaikan strategi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh atasan langsung <i>To document analysis of performance achievements and efforts to improve strategies based on the results of analysis carried out by direct supervisors</i>	√	2018	Setiap level jabatan menandatangani form capaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan langsung <i>Each position level signs the performance achievement form signed by the direct superior</i>
13	Menetapkan kebijakan mengenai hak-hak pelanggan <i>To establish policies regarding customer rights</i>	√	2018-2019	Kebijakan mengenai hak-hak pelanggan telah disusun, namun belum disahkan <i>Policies regarding customer rights have been prepared, but have not yet been ratified</i>
14	Melakukan evaluasi terhadap pemasok <i>To evaluate suppliers</i>	x	2018-2019	Evaluasi terhadap kinerja pemasok akan dilakukan di tahun 2019 melalui Vendor Management System (VMS) yang saat ini sedang dalam tahap Dalam tahap penyusunan skema evaluasi kinerja pemasok. <i>Evaluation of supplier performance will be carried out in 2019 through the Vendor Management System (VMS) which is currently in the stage of establishing a supplier performance evaluation scheme.</i>
15	Melakukan survei kepuasan pemasok secara berkala <i>To conduct a supplier satisfaction survey periodically</i>	x	2018-2019	Survei akan dilakukan di tahun 2019, di tahun 2018 sedang dalam tahap penyusunan tools dan aspek - aspek yang diperlukan dalam survei kepuasan pemasok. <i>Survey be carried out in 2019, in 2018 is in the stage of preparing tools and aspects needed in supplier satisfaction surveys.</i>
16	Menetapkan kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban kreditur minimal memuat perencanaan kredit, kualifikasi dari kreditur, penggunaan sesuai dengan peruntukannya, pembayaran kredit tepat waktu <i>To establish policies regarding the rights and obligations of the minimum creditor to include credit planning, qualifications from creditors, use in accordance with their designation, timely payment of credit</i>	√	2018	Kebijakan terkait kredit telah diatur didalam Peraturan Direksi No. 036 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan, Akuntansi dan Anggaran <i>Credit related policies are regulated in Board of Directors Regulation No. 036 Year 2018 concerning Financial, Accounting and Budget Guidelines.</i>
17	Menetapkan mekanisme untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan <i>To establish a mechanism for following up customer complaints</i>	x	2018-2019	Mekanisme untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan telah disusun namun belum disahkan <i>The mechanism for following up customer complaints has been compiled but has not yet been enacted.</i>
18	Menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal <i>To follow up on all audit findings of the SPI and external auditors</i>	√	2018-2019	Divisi Internal Audit & Control telah membuat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal <i>The Internal Audit & Control Division has made follow-up monitoring of the results of audits by SPI and external auditor.</i>
19	Melengkapi SOP sesuai dengan perkembangan bisnis dan menjaga konsistensi dalam penerapan kebijakan yang telah ditetapkan <i>To complete SOP in accordance with the business development and maintain consistency in implementation of the policies that have been set</i>	√	Berkelanjutan <i>Sustainability</i>	Perusahaan melakukan identifikasi dan evaluasi SOP sesuai perkembangan bisnis Perusahaan <i>The Company identifies and evaluates SOPs according to the Company's business development</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
20	Meningkatkan kualitas personel yang ditugaskan di SPI dengan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit serta melakukan pengembangan profesional berkelanjutan <i>To improve the quality of personnel assigned to SPI with the knowledge, skills and competencies needed to carry out audits and carry out continuous professional development</i>	√	2018	Selama tahun 2018, seluruh personel SPI melakukan program pengembangan <i>During 2018, all SPI personnel carried out a development program</i>
21	Menambah personel yang ditugaskan di SPI agar sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI <i>To add personnel assigned to the SPI to fit the needs for the implementation of SPI duties</i>	√	2018	Di tahun 2018, terdapat penambahan 1 orang personel SPI dan 1 orang tenaga ahli SPI <i>In 2018, there were 1 additional SPI personnel and 1 SPI expert</i>
22	Memutakhirkan pedoman audit sesuai dengan <i>best practice</i> dan kebutuhan Perusahaan <i>To update audit guidelines according to company best practices and needs</i>	√	2018-2019	Pemutakhiran pedoman audit telah dilakukan, namun belum disahkan. <i>Updating the audit guidelines has been carried out, but it has not been approved.</i>
Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i>				
1	Melakukan kegiatan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern baik pada tingkat perusahaan (<i>entity level</i>) maupun pada tingkat aktivitas (<i>activity level</i>) serta memberikan masukan kepada manajemen untuk perbaikan pengendalian internal sesuai pedoman yang ditetapkan <i>To conduct activities to evaluate the adequacy and effectiveness of the internal control system both at the company level (entity level) and at the level of activity (activity level) and provide input to management for improvement of internal controls according to established guidelines</i>	√	2018	Dilaksanakan sesuai jadwal penugasan asuransi oleh Divisi Internal Audit & Control pada masing-masing unit kerja. <i>Implemented according to the insurance assignment schedule by the Internal Audit & Control Division at each work unit.</i>
2	Memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil audit baik intern maupun ekstern <i>To monitor the implementation of follow-up on audit results both internally and externally</i>	√	2018	SPI membuat kertas kerja <i>monitoring</i> tindaklanjut hasil audit internal dan eksternal <i>SPI creates working paper monitoring the follow-up results of internal and external audits</i>
3	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian kepada manajemen <i>To contribute to improving risk management and control to management</i>	√	2018	Setiap penugasan asuransi memasukan aspek pengelolaan risiko dan pengendalian internal <i>Each insurance assignment includes aspects of risk management and internal control</i>
4	Mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi <i>To evaluate the extent to which program goals and objectives and operating activities have been set in line with organizational goals</i>	√	2018	Evaluasi sejalan dengan proses asuransi pada unit kerja yang mendukung pada pencapaian tujuan/sasaran Perusahaan. <i>Evaluation is in line with the insurance process in work units that support the achievement of company goals / objectives.</i>
5	Memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan <i>To give input on the consistency of the results obtained from activities and programs with the objectives and targets that have been set</i>	√	2018	Divisi Internal Audit & control berperan aktif untuk menyampaikan masukan/ atensi atas hal-hal yang tidak selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan. <i>Internal Audit & control division plays an active role in conveying input / attention to matters that are not aligned in achieving the company's goals and objectives.</i>



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Recommendations for Assessment of 2017 GCG Implementation</i>	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2018 <i>Follow-Up Up to Year-End of 2018</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Form of Follow Up</i>
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>				
1	Memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders secara tepat waktu <i>To provide material and relevant information to stakeholders in a timely manner</i>	√	2018	Informasi disampaikan kepada stakeholders secara tepat waktu <i>Information is conveyed to stakeholders in a timely manner</i>
2	Melengkapi laporan pelaksanaan tugas Sekper dengan hal-hal yang terkait uraian tugas Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) <i>To complete the report on the performance of the Secretary's duties with matters relating to the job description of the Corporate Secretary as stipulated in the Code of Corporate Governance.</i>	√	2018	Menyusun dan melaporkan Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) <i>Compile and report the report on the implementation of the Corporate Secretary's duties as stipulated in the Code of Corporate Governance</i>
IV Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i>				
1	Menyediakan media lain untuk mengomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan, misalnya majalah internal, bulletin dan sebagainya <i>To provide other media for communicating important information on company policies, such as internal magazines, bulletins and so on</i>	√	2018	Media sosial Perusahaan <i>Corporate Social Media</i>

v = telah ditindaklanjuti | x = belum ditindaklanjuti
v = followed up | x = has not been followed up

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018

Perusahaan telah melakukan penilaian GCG secara Assessment yang dilakukan pada tahun 2018 dan memperoleh skor 85,14 dengan predikat "Baik".

Assessment of GCG Implementation for 2018 Fiscal Year

The Company has carried out assessment on GCG implementation in 2018 and scored 85.14 with "Good" predicate.

Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	:	Assessment (Penilaian)
Penilai <i>Assessor</i>	:	BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>BPKP Representative of DKI Jakarta Province</i>
Periode Penerapan <i>Implementation Period</i>	:	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 <i>January 1, 2018 to December 31, 2018</i>
Tahun Ukur <i>Measuring Year</i>	:	Tahun Buku 2018 <i>2018 Fiscal Year</i>
Waktu Pengukuran <i>Measuring Time</i>	:	November sampai dengan Desember 2018 <i>November to December 2018</i>



Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

Details of the assessment results of the Company's GCG implementation for 2018 fiscal year are as follows:

Aspek Pengujian <i>Assessment Aspects</i>		Bobot <i>Value</i>	Pencapaian Tahun Buku 2018 <i>Achievement of 2018 Fiscal Year</i>	
			Capaian Aktual <i>Actual Achievement</i>	Capaian Achievement <i>(%)</i>
I	Komitmen <i>Commitment</i>	15,00	12,67	84,44
II	Kebijakan <i>Policies</i>	10,00	9,39	93,94
III	Partisipan GCG <i>GCG Participants</i>			
	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	24,00	21,33	88,89
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	18,00	14,17	78,71
	Komite Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Committee</i>	5,00	4,23	84,64
	Direksi <i>Board of Directors</i>	14,00	11,04	78,85
	Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i>	5,00	4,12	82,30
	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	4,00	3,64	90,96
IV	Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i>	5,00	4,55	91,07
Skor Keseluruhan <i>Total Score</i>		100,00	85,14	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>Qualification of GCG Implementation Quality</i>		"Baik" "Good"		

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Remarks: 0-50: Not Good | 50-60: Less Good | 60-75: Good enough | 75-85: Good | 85-100: Very Good



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

Perkembangan Assessment Penerapan GCG MRT Jakarta

Sejak dilakukan *assessment* GCG pada tahun 2015 tercatat perkembangan hasil atau skor *assessment* GCG selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai rekomendasi yang muncul. *Assessment* juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *assessment* menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Development of MRT Jakarta GCG Implementation Assessment

Since the GCG assessment was carried out in 2015, the progress of the results or GCG assessment scores recorded always showed improvement. This reflects the Company's commitment to implement GCG principles according to the recommendations that emerged. Assessment is also associated with applicable provisions and best practices in the implementation of GCG, so that areas that need improvement can be identified. Assessment results are very important inputs for the Company in future decision making.

Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG MRT Jakarta Sejak Tahun 2015
Achievement of Assessment Results of MRT Jakarta GCG Implementation Since 2015

Tahun Ukur Assessment <i>Measuring Year of Assessment</i>	Skor Assessment GCG <i>Score of GCG Assessment</i>	Kategori <i>Category</i>	Jenis Penilaian dan Pelaksana <i>Type of Assessment and Assesor</i>
2018	85,14	"Baik" "Good"	Assessment; BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>Assessment; Finance and Development Supervisory (BPKP) Representative of DKI Jakarta Province</i>
2017	80,45	"Baik" "Good"	Assessment; BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>Assessment; Finance and Development Supervisory (BPKP) Representative of DKI Jakarta Province</i>
2016	71,20	"Baik" "Good"	Self Assessment; Tim Internal MRT Jakarta <i>Self Assessment; MRT Jakarta Internal Team</i>
2015	65,79	"Cukup Baik" "Good"	Self Assessment; Tim Internal MRT Jakarta <i>Self Assessment; MRT Jakarta Internal Team</i>

PETA JALAN : RENCANA PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Peta jalan atau *road map* GCG berfungsi sebagai cetak biru yang dapat menggambarkan arah pengembangan praktik GCG. Perusahaan telah menyusun dan memiliki *road map* GCG yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 010 Tahun 2017 tentang *Roadmap Good Corporate Governance* PT MRT Jakarta Periode Tahun 2017-2021. *Road map* ini menjadi strategi besar Perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG secara bertahap hingga akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

ROAD MAP: GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT PLAN

The road map of GCG serves as a blueprint that can illustrate the direction of developing GCG practices. The company has compiled and has a GCG road map established based on Directors Regulation No. 010 of 2016 concerning the Roadmap of PT MRT Jakarta Good Corporate Governance Period 2017-2021. This road map has become a great strategy for the Company to gradually implement the principles of GCG to finally be able to achieve the desired goals.



Peta Jalan Pengembangan GCG MRT Jakarta 2017-2021
2017-2021 Roadmap of MRT Jakarta GCG Development

Framework Business Roadmap	Construction Phase I	Pre Operation Phase I	2019: Operational & Maintenance Phase I	
GCG Maturity Level	GCG Managed Peningkatan Infrastruktur dan Sistem <i>Improvement of Infrastructure and Systems</i>	CG Managed Peningkatan Struktur & Sistem <i>Structure & System Improvement</i>	CG Learning & Growth Pelaksanaan CG Sebagai Strategi <i>Implementation of CG as a Strategy</i>	CG Citizenship <i>Added Value Stakeholders</i>
Stage Yearly	2017	2018 - 2019	2020	2021
Focus	Fokus: Melengkapi kebijakan <i>Soft Structure</i> GCG dan sistem dasar tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Focus: <i>Complement the GCG Soft Structure policy and basic governance, risk management and internal control systems</i>	Fokus: <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi kebijakan proses bisnis Perusahaan Internalisasi <i>Governance, Risk, & Control</i> MPP pada posisi struktur yang kosong Focus: <ul style="list-style-type: none"> Completing the company's business process policies Internalization of <i>Governance, Risk, & Control</i> MPP in the position of the empty structure 	Fokus: <ul style="list-style-type: none"> <i>Corporate Brand: Trusted Company for GCG</i> Menyempurnakan proses bisnis dengan international best practice Focus: <ul style="list-style-type: none"> <i>Corporate Brand: Trusted Company for GCG</i> Improve business processes with international best practices 	Fokus: <ul style="list-style-type: none"> Global branding "Local operator with Global Thinking" Memperlihatkan perjuangan dan pengorbanan Focus: <ul style="list-style-type: none"> Global branding "Local operator with Global Thinking" Showing struggle and sacrifice
Main Drivers	Main Drivers: <i>Compliance Driven</i>	Main Drivers: <ul style="list-style-type: none"> <i>Ethical Driven</i> <i>Market Driven</i> 	Main Drivers: <ul style="list-style-type: none"> <i>Continuous improvement Driven</i> <i>Culture Driven</i> 	Main Drivers: <i>Stakeholder value Driven (Creating Share Value)</i>
	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urgent (mendesak):</i> Penyusunan pedoman <i>Soft Structure</i> sesuai dengan hasil RUPS 2016 Penyusunan tugas pokok tiap divisi Penyusunan Master Plan TI Indicator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urgent :</i> <i>Preparation of Soft Structure guidelines in accordance with the 2016 GMS resolutions</i> <i>Preparation of basic duties for each division</i> <i>Preparation of IT Master Plan</i> 	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urgent (mendesak):</i> 100% kebijakan atas proses bisnis 95% posisi organisasi terisi Sistem TI dalam tahap 4 Menetapkan <i>Service Level</i> Penyusunan GCG <i>Subsidiary</i> Indicator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urgent :</i> 100% policy on business processes 95% of the organization's position is filled IT system in stage 4 Establishing <i>Service Level</i> <i>Subsidiary GCG Preparation</i> 	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urgent (mendesak):</i> 100% posisi organisasi telah terisi Melaksanakan BPA dibandingkan operator transportasi massal kelas internasional (SMRT) Peningkatan skoring SLA Indicator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urgent:</i> 100% of the organization's position has been filled Implementing BPA compared to international mass transportation (SMRT) operators Improved SLA scoring 	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Important (penting):</i> Indonesia Sustainability Reporting Awards Benchmark untuk perusahaan lain Indicator: <ul style="list-style-type: none"> <i>Important:</i> Indonesia Sustainability Reporting Awards Benchmarks for other companies



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

Peta Jalan Pengembangan GCG MRT Jakarta 2017-2021
2017-2021 Roadmap of MRT Jakarta GCG Development

Framework Business Roadmap	Construction Phase I	Pre Operation Phase I	2019: Operational & Maintenance Phase I	
Indicators	<p>Important (pending):</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Road Map GCG 2017 – 2022 Melaksanakan pemetaan proses bisnis Perusahaan (BPM) Tone of the Top Penyusunan materi value and code of ethics induction program to internal and limited external parties Skor Assessment SK-16:75,10 GCG Champion ARA Award <p>Important :</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparation of 2017 – 2022 GCG Road Map Conducting company business process mapping (BPM) Tone of the Top Preparation of material for the value and code of ethics for internal induction programs and limited external parties Assessment Score SK-16: 75.10 GCG Champion ARA Award 	<p>Important (pending):</p> <ul style="list-style-type: none"> Skoring Assessment SK-16: 85,01 Kondisi kepatuhan dalam tahap 4 Kondisi Manajemen Risiko dalam tahap 4 Kondisi pengendalian internal dalam Minor Deficiencies Kondisi persepsi Stakeholders atas GCG dalam tahap 4 CSR Awards <p>Important:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessment Score SK-16: 85.01 Condition of compliance in stage 4 Risk Management Conditions in stage 4 Internal control conditions in Minor Deficiencies The perception condition of Stakeholders over GCG in stage 4 CSR Awards 	<p>Important (pending):</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi persepsi Stakeholders atas GCG dalam tahap 5 Skor Assessment SK-16: 90 Indonesia Trusted Company for GCG (Corporate Governance Performance Index) Pelaksanaan Sustainability Management sesuai standar GRI termasuk Sustainability Reporting Melaksanakan komunikasi reputasi Perusahaan atas GRC sebagai nilai unggul (competitive advantage) Melaksanakan komunikasi atas GCG sebagai benteng atas perilaku tidak etis (culture) ASEAN Score Card/Standar Penilaian internasional lainnya <p>Important:</p> <ul style="list-style-type: none"> The condition of the Stakeholders' perception of GCG in stage 5 Assessment Score SK-16: 90 Indonesia Trusted Company for GCG (Corporate Governance Performance Index) Implementation of Sustainability Management according to GRI standards including Sustainability Reporting Carry out communication of the company's reputation for GRC as a competitive advantage Carry out communication on GCG as a guard of unethical behavior (culture) ASEAN Score Card / Other international assessment standards 	



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2018

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2018

Beberapa kegiatan GCG di tahun 2018 adalah sebagai berikut

GCG activities in 2018 are as follows:

No	Bulan Month	Kegiatan Activities
1	Januari - Maret January - March	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal 2. Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2018 oleh Direksi dan Dewan Komisaris 3. Sosialisasi Pengisian dan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui E-LHKPN 4. Penandatanganan Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Tahun 2018 oleh Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 5. Pembuatan Daftar Khusus Saham Tahun 2018 Direksi dan Dewan Komisaris 6. Sosialisasi GCG kepada Karyawan baru 7. Pengisian dan Pelaporan LHKPN oleh seluruh Wajib LHKPN di Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialization of the Internal Control System 2. Signing of 2018 Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners 3. Socialization of Filling and Reporting of State Official Assets Report (LHKPN) through E-LHKPN 4. Signing the Statement of Having No Conflict of Interest in 2018 by the Board of Directors and Board of Commissioners 5. Preparation of 2018 Special Stock Register for Directors and Board of Commissioners 6. Socialization of GCG to new employees 7. Submission of complete LHKPN documents to the KPK



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MRT JAKARTA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION WITHIN MRT JAKARTA

No	Bulan Month	Kegiatan Activities
2	April - Juni April - June	<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Dokumen2. Pengesahan Pengkinian Peraturan Direksi tentang Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)3. Pengesahan Pengkinian Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Code of Corporate Governance</i>) <ol style="list-style-type: none">1. <i>Ratification of the Directors' Regulations concerning Document Control Guidelines</i>2. <i>Ratification of Directors' Regulations Updating concerning Code of Conduct</i>3. <i>Ratification of Directors' Regulations Updating concerning Code of Conduct</i>
3	Juli - September July - September	<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan Peraturan Direksi tentang Kewajiban menjalankan <i>Three lines of defense</i> bagi Pejabat Struktural2. Pelaksanaan sosialisasi <i>Governance, Risk Management & Compliance (GRC)</i> dan Pedoman-Pedoman GCG kepada karyawan <ol style="list-style-type: none">1. <i>Ratification of the Directors' Regulations concerning the Obligation to run 3 lines of defense for Structural Officials</i>2. <i>Implementation of Governance socialization, Risk Management & Compliance (GRC) and GCG Guidelines to Employees</i>
4	Oktober - Desember October - December	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi GRC dan Pedoman-Pedoman terkait GCG2. <i>Assessment GCG</i> oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta3. Pelaksanaan program pengenalan bagi Direktur di Perusahaan <ol style="list-style-type: none">1. <i>Information on GRC and Guidelines related to GCG</i>2. <i>GCG Assessment by State Development Audit Agency (BPKP) of DKI Jakarta Representative</i>3. <i>Induction Program for New Directors in the Company</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara garis besar, struktur GCG di lingkup Perusahaan mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, yang terdiri dari 3 (tiga) organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sistem pengelolaan Perusahaan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. Sementara RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko, dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi memiliki organ pendukung Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal serta, Divisi Risk Quality & Safety Management.

Mekanisme GCG Perusahaan dituangkan dalam berbagai perangkat kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Perangkat kebijakan ini mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh Organ Tata Kelola di lingkungan Perusahaan, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pemegang Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari Perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan Perusahaan; di mana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan merupakan BUMD Provinsi DKI Jakarta, dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

GCG structure within the Company refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which consists of 3 (three) main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), Directors, and the Board of Commissioners. As previously described, the management system of a Limited Liability Company adheres to a 2 (two) tier system model, namely the Board of Commissioners and Board of Directors with clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in regulations and legislation and Articles of Association. While the GMS is a forum for shareholders to decide on strategic matters.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committee organs, namely the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Risk Monitoring Committee, supported by the Secretary of the Board of Commissioners. While the Directors have supporting organs for the Corporate Secretary and Internal Audit as well. In addition, there is also the Risk Quality & Safety Management Division.

The Company's GCG mechanism is contained in various policy instruments that have been agreed upon jointly by the Board of Commissioners and Directors. This set of policies regulates the implementation of the work relations of all Organizations within the Company, by referring to the provisions of the Company's Articles of Association and / or applicable laws and regulations.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Shareholders

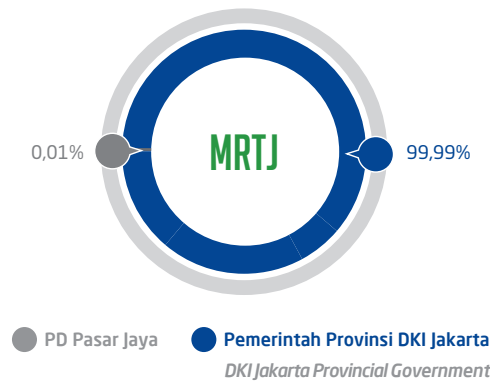
Share is unit of value or accounts in various financial instruments that refers to the ownership of the Company. Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company has provided a clear definition regarding roles, functions, rights and responsibility of Shareholders as part of the Company; which is regulated through General Meeting of Shareholders (GMS).

The Company is part of Regional-Owned Enterprises (BUMD) of DKI Jakarta Province, with DKI Jakarta Government as the Controlling Shareholder.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komposisi Pemegang Saham MRT Jakarta per 31 Desember 2018 *Composition of MRT Jakarta Shareholders as of December 31, 2018*



Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, hak-hak Pemegang Saham antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur.
3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu.
5. Mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
6. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perusahaan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with the Company's Articles of Association, the rights of Shareholders include:

1. *To attend the GMS and vote at the GMS.*
2. *To obtain material information (including the right to ask) from both the Board of Commissioners and Board of Directors regarding financial or other matters concerning the Company in a complete, timely and regular manner.*
3. *To obtain the distribution of Company profits (dividends).*
4. *To organize the GMS in the event that the Board of Directors and / or Board of Commissioners fails to hold an annual GMS and at any time requests the implementation of an Extraordinary GMS if deemed necessary.*
5. *To take binding resolutions outside the GMS provided that all shareholders with voting rights approve in writing by signing the proposal in question.*
6. *To carry out other rights under Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

General Meeting of Shareholders

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company Organ that has authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. GMS as a Company organ is a forum for Shareholders to make important resolutions relating to capital invested in the Company, taking into account the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.



RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Adapun wewenang RUPS meliputi:

- Menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan komposisi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi.
- Menetapkan target dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi Perusahaan yang perlu mendapat persetujuan RUPS.
- Menetapkan Auditor Eksternal.
- Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (bila saldo laba positif).

GMS and / or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Board of Directors by not reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations; including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or Directors.

GMS is authorized to:

- *Establish and implement the appointment and dismissal of Board of Commissioners and Board of Directors according to the applicable legislation;*
- *Determine the Board of Commissioners and Directors composition;*
- *Establish regulations regarding the concurrent positions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
- *Establish segregation of duties and authorities among the Board of Directors' members;*
- *Set the target and performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as provide assessment to the Board of Commissioners and the Board of Directors' performance;*
- *Set the salary/honorarium, benefits, facilities and incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors' performance;*
- *Conduct assessment for the Board of Commissioners and the Board of Directors candidates;*
- *Approve or reject the Long Term Plan (RJPP) and Work and Budget Plan (RKAP) of the Company;*
- *Approve the Company's proposed corporate actions requiring GMS approval;*
- *Appoint external auditor (Public Accounting Firm);*
- *Approve annual report including financial statements and report of the Board of Commissioners' supervisory duty;*
- *Determine the use of net profit including the allowance for reserve (if the retained earnings are positive).*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Jenis-jenis Pelaksanaan RUPS *Form of GMS*



RUPS Tahunan *Annual GMS*

yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

Is held to discuss annual reports and annual calculations of the Company and carried out no later than 6 (six) months after the fiscal year

RUPS Lainnya *Other GMS*

yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

Can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters not done at the Annual GMS.

Keputusan Sirkuler

Salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang setara dengan RUPS dan dilaksanakan di luar RUPS adalah Keputusan Sirkuler. Mekanisme ini bukan merupakan salah satu bentuk RUPS namun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS. Keputusan Sirkuler dilaksanakan dengan cara mengedarkan usulan secara tertulis kepada Pemegang Saham (di luar RUPS) untuk disetujui secara tertulis kembali. Persetujuan oleh seluruh Pemegang Saham merupakan syarat mutlak sahnya Keputusan Sirkuler.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan

Baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa merupakan hak dan wewenang Pemegang Saham dalam mengendalikan kinerja Perusahaan dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Perusahaan.

Circular Resolution

Circular Resolution is one of the mechanisms to make decisions that are equal to GMS and is conducted outside GMS. This mechanism is not one of GMS forms, however it is similar in power with the resolutions taken in GMS. Circular resolution is held by circulating written motion to Shareholders (outside GMS) to be given approval in written form. Circular Resolution must be approved by all Shareholders to be deemed valid and binding.

Provisions for the Company's GMS Implementation

Both the Annual GMS and Extraordinary GMS constitute the rights and authority of the Shareholders in controlling the Company's performance within the limits specified by the law or Article of Association. Resolutions taken in the Annual GMS and Extraordinary GMS are carried out transparently by taking into account the business interests of the Company.



Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS Tahunan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha di mana pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan atau diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya, dengan risalah rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh Pemegang Saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

Mengingat kepemilikan saham Perusahaan sebesar 99,99% dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,01% di bawah PD Pasar Jaya, dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sedangkan untuk pengambilan keputusan sirkuler, keputusan dinyatakan sah apabila seluruh Pemegang Saham menyetujui usulan yang didistribusikan secara tertulis.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2018

Berikut disampaikan agenda dan hasil RUPS serta keputusan Pemegang Saham di sepanjang tahun 2018.

According to the Company's Articles of Association, Annual GMS is convened regularly every year while Extraordinary GMS may be convened at any time based on the Company's needs and in line with prevailing regulations. GMS takes place in the domicile of the Company or where the Company conducts its business activities. Notice of GMS is conducted through registered letter or advertisement in newspaper in 14 days, at the latest, prior to the convention of GMS, or by means of teleconference, video conference or other electronic media. The minutes of meeting shall be prepared in writing and circulated to all Shareholders attending the meeting for their approval and signature. GMS is chaired by President Commissioner.

Considering the 99% ownership of the Company's shares is owned by the DKI Jakarta Provincial Government and 1% under PD Pasar Jaya, in terms of decision making at the GMS it is carried out with a mechanism of deliberation to reach consensus. As for circular decision making, decisions are declared valid if all Shareholders approve proposals distributed in writing.

GMS Implementation Throughout 2018

Following are the GMS agenda and results and the Shareholders Resolutions throughout 2018.

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018 Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22 Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018 MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/ Not yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
Agenda Pertama RUPS Tahunan: Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017. <i>First Agenda of Annual GMS: To approve the Company's Annual Report and to approve the Supervisory Task Report carried out by the Board of Commissioners for the 2017 fiscal year.</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning the Annual GMS Minutes.</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

<p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p>	<p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/ Not yet Implemented</i></p>	<p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i></p>
<p>Agenda Kedua RUPS Tahunan: Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sesuai dengan laporannya No. RPC-5845/PSS/2018 tanggal 5 Maret 2018 dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2017 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perusahaan.</p> <p><i>Second Agenda of Annual GMS:</i> <i>To ratify the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2017 which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) in accordance with its report No. RPC-5845 / PSS / 2018 dated March 5, 2018 with an unqualified opinion on all matters in accordance with financial accounting standards in Indonesia. Furthermore, with the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial Report for the 2017 fiscal year, the Meeting provides full repayment and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for all management and supervisory actions. has been carried out during the fiscal year ending December 31, 2017 to the extent that such action is reflected in the Company's Financial Statements.</i></p>	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning the Annual GMS Minutes.</i></p>
<p>Agenda Ketiga RUPS Tahunan: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan auditor eksternal (KAP) sesuai Prosedur Pengadaan yang berlaku di Perusahaan untuk melaksanakan audit Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</p> <p><i>Third Agenda of Annual GMS:</i> <i>To grant authority to the Board of Commissioners to determine the external auditor (KAP) in accordance with the applicable Procurement Procedures in the Company to audit the Fiscal Year which will expire on December 31, 2018.</i></p>	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning the Annual GMS Minutes.</i></p>



RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Implemented/ Not yet Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
<p>Agenda Keempat RUPS Tahunan: Penetapan Gaji/Honorarium, Insentif Kerja dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dilakukan oleh Pemegang Saham Pem. Prov. DKI Jakarta berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD Prov. DKI Jakarta yang hasilnya akan disampaikan melalui Dewan Komisaris. <i>Fourth Agenda of Annual GMS: Determination of Salary / Honorarium, Work Incentives and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2018 carried out by Shareholders of DKI Jakarta Provincial Government based on the proposal of the Board of Commissioners with reference to the DKI Jakarta Governor Regulation Number 242 of 2015 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of DKI Jakarta BUMD whose results will be delivered through the Board of Commissioners.</i></p>	√	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning the Annual GMS Minutes.</i></p>
<p>Agenda Pertama RUPS LB: 1. Penerbitan saham baru sejumlah 444.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,- per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Disetor dan Ditempatkan penuh dalam Perusahaan. 2. Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp5.721.807.000.000,- menjadi sebesar Rp6.15.807.000.000,-. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p>	√	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 133 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa.</p>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Implemented/ Not yet Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018
<p><i>First Agenda of Extraordinary GMS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Issuance of new shares totaling 444,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share to the Provincial Government of DKI Jakarta in order to convert the capital deposits made by the Provincial Government of Jakarta to become Paid-up Capital and fully Placed in the Company.</i> <i>Increase in Issued and Paid-In Capital which initially amounted Rp5,721,807,000,000 to Rp6,15,807,000,000.</i> <p><i>Granting power to the Board of Directors of the Company and / or parties appointed by the Board of Directors of the Company, both jointly and individually with the right to transfer this power to another person authorized to declare this resolution on the deed of Notary. Furthermore, the power of attorney or someone who is authorized by the power of attorney has the right to face the Notary to declare and sign this resolution as an official deed, and carry out all necessary measures, and notify the amendment to the authorized agency and make changes or additions in any form that is required for receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, and submitting and signing all applications and other documents, choosing a place of residence and carrying out other actions that may be needed.</i></p>		<p><i>Has been legally institutionalized through Deed No. 133 of 2018 concerning Minutes of Extraordinary GMS.</i></p>
<p>Agenda Kedua RUPS LB:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengubah struktur organisasi Perusahaan dengan penambahan Organisasi Direksi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Keuangan dan Administrasi Direktur Konstruksi Direktur Operasi dan Pemeliharaan Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis Menambah satu Komisaris Perusahaan. <p><i>Second Agenda of Extraordinary GMS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>To change the organization structure of the Company with the addition of the Directors' Organization as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>President Director</i> <i>Finance and Administration Director</i> <i>Construction Director</i> <i>Operation and Maintenance Director</i> <i>Development and Business Support Director</i> <i>Adding one Company Commissioner.</i> 	√	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 133 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 133 of 2018 concerning Minutes of Extraordinary GMS.</i></p>



RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/ Not yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
<p>Agenda Ketiga RUPS LB:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. <p><i>Third Agenda of Extraordinary GMS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>To approve the amendment of the Company's Articles of Association to conform with RI Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises.</i> <i>Granting authority and power to the Board of Directors of the Company and / or parties appointed by the Board of Directors of the Company, both jointly and individually with the right to transfer this power to other people authorized to declare this resolution on the deed of Notary. Furthermore, the power of attorney or someone who is authorized by the power of attorney has the right to face the Notary to declare and sign this resolution as an official, and carry out all necessary actions, and notify the amendment to the authorized agency and make changes in or additional any form that is required for receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, and submitting and signing all applications and other documents, choosing a place of residence and carrying out other actions that may be needed.</i> 	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 133 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 133 of 2018 concerning Minutes of Extraordinary GMS.</i></p>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

<p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p>	<p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/ Not yet Implemented</i></p>	<p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i></p>
<p>Agenda Keempat RUPS LB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, atas tugas-tugasnya serta tindakan yang dilakukan sejak pengangkatannya sampai dengan ditutupnya Rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, namun tidak melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang dan merugikan Perusahaan. 2. Mengangkat kembali semua Direksi Perusahaan sebagai berikut: Direktur Utama: William P. Sabandar Direktur Konstruksi: Silvia Halim Direktur Operasi dan Pemeliharaan : Agung Wicaksono Direktur Keuangan dan Administrasi: Tuhiyat Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis: dirangkap jabatan oleh salah seorang Direktur lainnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan. 3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. 	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 133 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa.</p>



RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 21 Maret 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
Annual GMS and Extraordinary GMS March 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22st Floor

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Implemented/ Not yet Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018
<p><i>Fourth Agenda of Extraordinary GMS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Respectfully dismissed all members of the Company's Board of Directors as of the closing of the Meeting and granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for their duties and actions up to the closing of the Meeting with due observance of the provisions and legislation in force, but does not give up responsibility if in the future it is proven that there is a deviant act and is detrimental to the Company.</i> <i>2. Reappointed all of the Company's Directors as follows: President Director: William P. Sabandar Construction Director: Silvia Halim Operation and Maintenance Director: Agung Wicaksono Finance and Administration Director: Tuhiyat Development and Business Support Director: concurrent position by one of the other Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners.</i> <i>3. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company and / or parties appointed by the Board of Directors of the Company, both jointly and individually with the right to transfer this power to other people authorized to declare this resolution on the deed of Notary. Furthermore, the power of attorney or someone who is authorized by the power of attorney has the right to face the Notary to declare and sign this resolution as an official, and carry out all necessary actions, and notify the amendment to the authorized agency and make changes in or additional any form that is required for receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, and submitting and signing all applications and other documents, choosing a place of residence and carrying out other actions that may be needed.</i> 		<p><i>Has been legally institutionalized through Deed No. 133 of 2018 concerning Minutes of Extraordinary GMS.</i></p>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS Sirkuler 4 Mei 2018
Circular GMS May 4, 2018

<p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p>	<p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not yet Implemented</i></p>	<p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i></p>
<p>1. Memperhatikan Surat Menteri Perhubungan yang ditujukan kepada Gubernur Prov. DKI Jakarta tanggal 20-11-2017 No.: KP.303/4/15.PHB-2017 perihal Usulan Pergantian Dewan Komisaris PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, maka Pemegang Saam menyetujui untuk:</p> <p>a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Prasetyo Boeditjahjono, sebagai Komisaris Perusahaan, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan yang telah dijalankan hingga tanggal ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini.</p> <p>b. Mengangkat Tuan Ir. Zulfikri, MSc., DEA sebagai Komisaris Perusahaan selaku (<i>ex officio</i>) Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk waktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.</p> <p>2. Pemegang Saham menyetujui untuk:</p> <p>a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Erry Riyana Hardjapamengkas sebagai Komisaris Utama sekaligus selaku Komisaris Independen Perusahaan yang telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan Akta No. 126 tanggal 25-04-2013 jis. Akta No. 43 tanggal 15-07-2013 dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan.</p> <p>b. Mengangkat Tuan Rukijo sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama Perusahaan sampai dengan pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan <i>definitive</i>.</p> <p>3. Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perusahaan selengkapnya menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris Plt. Komisaris Utama: Rukijo Komisaris: Yusmada Faizal Komisaris: Rukijo Komisaris: Zulfikri</p> <p>b. Direksi Direktur Utama: William P. Sabandar Direktur Konstruksi: Silvia Halim Direktur Operasional dan Pemeliharaan: Agung Wicaksono Direktur Keuangan dan Administrasi: Tuhiyat Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis: Dirangkap jabatan oleh salah seorang Direktur lainnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan</p> <p>Selanjutnya Para Pemegang Saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna peyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 19 tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.</p>



RUPS Sirkuler 4 Mei 2018
Circular GMS May 4, 2018

<p>Hasil Keputusan Resolution</p>	<p>Sudah/Belum Terlaksana Implemented/Not yet Implemented</p>	<p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</p>
<p>1. Noting the Letter of the Minister of Transportation addressed to the Governor of Prov. DKI Jakarta dated November 20, 2017 Number: KP.303 / 4 / 15.PHB-2017 concerning the Proposed Replacement of the Board of Commissioners of PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, the Shareholders agrees to:</p> <p>a. Respectfully dismissed Mr. Prasetyo Boeditjahjono, as Commissioner of the Company, starting from the signing of the Shareholders' Circular Resolution and expressing highest gratitude and appreciation for his dedication during his tenure as the Company's Commissioner until the date of the Shareholders' Circular Resolution.</p> <p>b. Appointed Mr. Ir. Zulfikri, MSc., DEA as the Company's Commissioner as ex officio Ministry of Transportation Director General of Railways of Republic of Indonesia with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association since the signing of Shareholders' Circular Resolution, without reducing the GMS rights for termination before term of office ends.</p> <p>2. Shareholders agree to:</p> <p>a. Respectfully dismissed Mr. Erry Riyana Hardjapamengkas as President Commissioner as well as the Independent Commissioner of the Company who has held his term of office in accordance with Deed Number 126 dated 25-04-2013 jis. Deed Number 43 dated July 15, 2013 and expresses highest gratitude and appreciation for his service while serving as the Company's President Commissioner.</p> <p>b. Appointed Mr. Rukijo as Acting President Commissioner of the Company until the appointment of the definitive President Commissioner of the Company.</p> <p>3. By carrying out the dismissal and appointment as mentioned above, the composition of the company management will be as follows:</p> <p>a. Board of Commissioners Acting President Commissioner: Rukijo Commissioner: Yusmada Faizal Commissioner: Rukijo Commissioner: Zulfikri Commissioner:</p> <p>b. Directors President Director: William P. Sabandar Construction Director: Silvia Halim Operation and Maintenance Director: Agung Wicaksono Finance and Administration Director: Tuhiyat Development and Business Support Director: concurrent position by one of the other Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners.</p> <p>Furthermore, the Shareholders authorized with the right of substitution to the Company's Board of Directors, both jointly and individually, to put this resolution into a Notary deed, as well as make changes that are required to conform to the provisions of the legislation.</p>		<p>Has been legally institutionalized through Deed No. 19 of 2018 concerning the Circular Resolution Statement of the Shareholders.</p>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pernyataan Pemegang Saham di Luar RUPS 29 Oktober 2018
Statement of Shareholders Outside the GMS October 29, 2018

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not Yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat tuan Agung Wicaksono sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan Perusahaan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direksi Perusahaan yang telah dijalankan. 2. Mengangkat tuan Mukhtasor sebagai Komisaris Perusahaan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir. 3. Mengangkat tuan Muhammad Effendi sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan Perusahaan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir. 4. Mengangkat tuan Ghamal Peris sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis Perusahaan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir. 5. Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Komisaris Plt Komisaris Utama: Rukijo Komisaris: Yuzmada Faizal Komisaris: Rukijo Komisaris: Zulfikri Komisaris: Mukhtasor b. Direksi Direktur Utama: William P Sabandar Direktur Konstruksi: Silvia Halim Direktur Operasional dan Pemeliharaan: Muhammad Effendi Direktur Keuangan dan Administrasi: Tuhiyat Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis: Ghamal Peris 6. Selanjutnya Para Pemegang Saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan keputusan ini dalam suatu akta notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p style="text-align: center;">√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 16 tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham.</p>



Pernyataan Pemegang Saham di Luar RUPS 29 Oktober 2018
Statement of Shareholders Outside the GMS October 29, 2018

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not Yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectfully dismissed Mr. Agung Wicaksono as Operation and Maintenance Director of the Company as of the last date of the signing of the Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders and expressed highest gratitude and appreciation for his service while serving as the Company's Director. 2. Appointed Mr. Mukhtasor as the Company's Commissioner as of the last date of the Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders with a term in accordance with the provisions in the Articles of Association, by not reducing the right of the General Meeting of Shareholders to terminate before the term ends. 3. Appointed Mr. Muhammad Effendi as Operation and Maintenance Director of the Company as of the last date of the signing of the Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders with a term in accordance with the provisions in the Articles of Association, without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to terminate before the term ends. 4. Appointed Mr. Ghamal Peris as Development and Business Support Director of the Company as of the last date of the signing of the Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders with a term in accordance with the provisions in the Articles of Association, without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to terminate before the term ends. 5. With the dismissal and appointment mentioned above, the composition of the company's management will be as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Commissioner Acting President Commissioner: Rukijo Commissioner: Yuzmada Faizal Commissioner: Rukijo Commissioner: Zulfikri Commissioner: Mukhtasor b. Directors President Director: William P Sabandar Construction Director: Silvia Halim Operation and Maintenance Director: Muhammad Effendi Finance and Administration Director: Tuhiyat Development and Business Support Director: Ghamal Peris 6. Furthermore, the Shareholders authorized with the right of substitution to the Company's Board of Directors, both jointly and individually, to put this resolution into a Notary deed, as well as make changes that are required to conform to the provisions of the legislation. 		<p><i>Has been legally institutionalized through Deed No. 16 of 2018 concerning Declaration of Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders.</i></p>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS 21 Desember 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
GMS December 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22nd Floor

<p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p>	<p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not</i> <i>yet Implemented</i></p>	<p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on</i> <i>Resolutions of 2018 Annual GMS</i> <i>Until the End of 2018</i></p>
<p>Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Proyek sebesar Rp4.413.862.000.000,- yang bersumber dari penerusan JICA Loan; 2. Belanja Modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebesar Rp126.165.000.000,- dan Biaya Operasional Usaha (<i>Operational Expenditure</i>) sebesar Rp 634.125.000.000,- yang bersumber dari Saldo Kas Perusahaan; dan 3. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan <i>Non-Farebox</i> sebesar Rp94.275.000.000,- dan Pendapatan <i>Farebox</i> serta Pendapatan Subsidi yang nilainya disesuaikan dengan kebijakan Pem. Prov. DKI Jakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p><i>Approved and ratified the Company's 2019 Work Plan & Budget (RKAP):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Project Budget is Rp4,413,862,000,000, which comes from the continuation of JICA Loan;</i> 2. <i>Capital Expenditure of Rp126,165,000,000 and Operational Expenditure amounting to Rp634,125,000,000 originating from the Company's Cash Balance; and</i> 3. <i>Income consisting of Non-Farebox Income of Rp94,275,000,000, and Farebox Income and Subsidized Income, whose value is adjusted to the Government policy. Prov. DKI Jakarta and statutory provisions.</i> 	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 14 tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 14 of 2018 concerning Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Dasar PT MRT Jakarta dari sebelumnya sebesar Rp10.200.000.000.000,- menjadi Rp14.659.000.000.000,-. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approved and ratified the increase of PT MRT Jakarta's Authorized Capital from Rp10,200,000,000,000 to Rp14,659,000,000,000.</i> 2. <i>Granting power to the Company's Board of Directors and / or parties appointed by the Company's Board of Directors, both jointly and individually with the right to transfer this power to another person authorized to declare this resolution on the deed of Notary. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by the power of attorney has the right to face the Notary to declare and sign this decree as an official deed, and carry out all necessary measures, and notify the amendments to the Articles of Association and make amendments and / or additions in any form that is required for receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, and submitting and signing all requests and other documents, choosing a place of residence and carrying out other actions that may be needed</i> 	<p>√</p>	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 14 tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 14 of 2018 concerning Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders</i></p>



RUPS 21 Desember 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
GMS December 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22nd Floor

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
<p>1. Penerbitan saham baru sejumlah 2.945.441 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,- per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Disetor penuh dalam Perusahaan sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 809 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.</p> <p>2. Peningkatan Modal Disetor yang semula sebesar Rp6.165.807.000.000,- menjadi sebesar Rp9.111.248.000.000,-</p> <p>3. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> <p>1. <i>Issuance of 2,945,441 new shares with nominal Rp1,000,000 per share to the DKI Jakarta Provincial Government in order to convert capital deposits made by the DKI Jakarta Provincial Government into full paid-up capital in the Company in accordance with Governor Decree Number 809 Year 2018 dated May 4, 2018 concerning Determination of Regional Equity Participation in PT MRT Jakarta.</i></p> <p>2. <i>Increase in paid-in capital of Rp6,165,807,000,000 to Rp9,111,248,000,000.</i></p> <p>3. <i>Granting power to the Company's Board of Directors and / or parties appointed by the Company's Board of Directors, both jointly and individually with the right to transfer this power to another person authorized to declare this resolution on the deed of Notary. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by the power of attorney has the right to face the Notary to declare and sign this decree as an official deed, and carry out all necessary measures, and notify the amendments to the Articles of Association and make amendments and / or additions in any form that is required for receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, and submitting and signing all requests and other documents, choosing a place of residence and carrying out other actions that may be needed</i></p>	√	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 14 tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 14 of 2018 concerning Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders</i></p>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS 21 Desember 2018
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lantai 22
GMS December 21, 2018
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 22nd Floor

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow Up by Management on Resolutions of 2018 Annual GMS Until the End of 2018</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pembentukan Anak Perusahaan atau perusahaan patungan, bersama dengan PT Jakarta Propertindo dan PT Transportasi Jakarta, yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan teknologi informasi yang pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan perundang-undangan. 2. Menyetujui PT MRT Jakarta untuk mengambil bagian saham yang akan ditempatkan dan disetorkan penuh pada perusahaan patungan serta akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran nilai saham yang akan ditempatkan dan disetorkan penuh setelah Dewan Komisaris melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approved the establishment of a subsidiary or joint venture company, together with PT Jakarta Propertindo and PT Transportasi Jakarta, which are engaged in the payment system and information technology sector whose implementation is in accordance with DKI Jakarta Provincial Government policies and legislation.</i> 2. <i>Approved PT MRT Jakarta to take part of shares that will be issued and fully paid in joint ventures and will be adjusted to the policies of the DKI Jakarta Provincial Government.</i> 3. <i>The Shareholders authorized the Board of Commissioners to determine the amount of the share value to be placed and fully paid after the Board of Commissioners has consulted with the Shareholders.</i> 	√	<p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 14 tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 14 of 2018 concerning Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders</i></p>

Informasi tentang Hasil Keputusan RUPS Tahun 2017 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Di tahun 2017, Perusahaan menggelar 3 (tiga) kali RUPS, di mana 1 (satu) kali merupakan RUPS Tahunan dan 2 (satu) kali RUPSLB. Hasil Keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Information on 2017 GMS Resolution and the Follow-Up by Management

In 2017, the Company held 3 (three) GMS, in which 1 (one) time is the Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS. The GMS Resolutions and the follow-up by the Company's Management until the end of 2018 are as follows:



RUPS Tahunan 30 Maret 2017
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lt.21
Annual GMS March 30, 2017
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 21st Floor

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Implemented/Not yet Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2017 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow-Up by Management on the Resolutions of 2017 Annual GMS Until the End of 2018</i>
Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016. <i>Approved the Company's Annual Report and approved the Report of Supervisory Tasks that have been carried out by the Board of Commissioners for the 2016 fiscal year.</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 54 tahun 2017 tentang Berita Acara RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 54 of 2017 concerning the GMS minutes of meeting</i>
Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Setelah Laporan Keuangan tahun 2016 disetujui dan disahkan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) dari tanggung jawab kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pada tahun buku 2016. <i>Ratified the Company's Financial Statements for the last fiscal year on December 31, 2016. After the 2016 Financial Statements are approved and ratified, the Meeting granted full release and discharge (acquit et de charge) all Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for actions on 2016 fiscal year.</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 54 tahun 2017 tentang Berita Acara RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 54 of 2017 concerning the GMS minutes of meeting</i>
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono dan Surja (Ernst&Young) untuk melaksanakan audit Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, dengan tetap dilakukan negosiasi harga dan bila tidak tercapai kesepakatan harga maka akan dilakukan seleksi Auditor Eksternal sesuai Prosedur Pengadaan yang berlaku di Perusahaan. <i>Appointed Purwantono, Sungkono and Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm to carry out the audit of the Fiscal Year which ended on December 31, 2017, with price negotiation being carried out and if no price agreement is reached then External Auditor selection will be carried out in accordance with the applicable Procurement Procedure in the Company.</i>	√	Telah dilakukan perikatan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud melalui proses pengadaan yang berlaku di Perusahaan dengan Kontrak No. CON/021/MRT/XI/ 2017 tanggal 21 November 2017 <i>Has been carried out an engagement with the Public Accounting Firm through the procurement process that applies in the Company with Contract No. CON / 021 / MRT / XI / 2017 November 21, 2017</i>
Penetapan gaji honorarium dan Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017 <i>Determination of salary honorarium and Performance Incentives for Directors and Board of Commissioners in 2017</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 54 tahun 2017 tentang Berita Acara RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 54 of 2017 concerning the GMS minutes of meeting</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUPS Tahunan 30 Maret 2017
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lt.21
Annual GMS March 30, 2017
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 21st Floor

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>Implemented/Not yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2017 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow-Up by Management on the Resolutions of 2017 Annual GMS Until the End of 2018</i>
Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perusahaan menjadi Rp4.107.878.000.000. <i>Increase in Issued and Fully Paid Capital of the Company to Rp4,107,888,000,000.</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 45 Tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 45 of 2017 concerning the GMS minutes of meeting</i>

√ = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
√ = implemented | x = not yet implemented

RUPS Luar Biasa 30 Maret 2017
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lt.21
Extraordinary GMS March 30, 2017
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 21st Floor

Hasil Keputusan <i>Resolution</i>	Sudah/Belum Terlaksana <i>/Not yet Implemented</i>	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2017 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow-Up by Management on the Resolutions of 2017 Annual GMS Until the End of 2018</i>
Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2018 dengan nilai total Rp3.981.276.000.000 <i>Approved and Ratified the Company's Work Plan & Budget for 2018 Fiscal Year with a total value of Rp3,981,276,000,000</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 23 Tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 23 of 2017 concerning Statement of GMS Resolutions</i>
Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp4.107.878.000.000 menjadi sebesar Rp5.721.807.000.000 <i>Increase in Issued and Paid-In Capital which initially amounted Rp4,107,888,000,000 to Rp5,721,807,000,000</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 23 Tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 23 of 2017 concerning Statement of GMS Resolutions</i>

√ = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
√ = implemented | x = not yet implemented



RUPS Luar Biasa 30 November 2017
Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara Lt.21
Extraordinary GMS November 30, 2017
MRT Jakarta Office, Wisma Nusantara 21st Floor

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Not yet Implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2017 Hingga Akhir Tahun 2018 <i>Follow-Up by Management on the Resolutions of 2017 Annual GMS Until the End of 2018</i>
Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2018 dengan nilai total Rp3.981.276.000.000 <i>Approved and Ratified the Company's Work Plan & Budget for 2018 with a total value of Rp3,981,276,000,000</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 23 Tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 23 of 2017 concerning Statement of GMS Resolutions</i>
Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp4.107.878.000.000 menjadi sebesar Rp5.721.807.000.000 <i>Increase in Issued and Paid-in Capital which initially amounted Rp4,107,888,000,000 to Rp5,721,807,000,000</i>	√	Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 23 Tahun 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS <i>Has been legally institutionalized through Deed No. 23 of 2017 concerning Statement of GMS Resolutions</i>

√ = sudah terlaksana | x = belum terlaksana
 √ = implemented | x = not yet implemented

DEWAN KOMISARIS

Prinsip *two board* dalam badan usaha di Indonesia juga dilakukan Perusahaan melalui organ Dewan Komisaris yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kelangsungan usaha, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi dan kriteria, yaitu:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

BOARD OF COMMISSIONERS

The principle of *two-board* applicable in Indonesian businesses is also adopted by the Company through Board of Commissioners organ. The Company's Board of Commissioners functions to supervise business continuity and duties and responsibilities of the Board of Directors, and to provide advice to the Board of Directors, as well as directing, overseeing and evaluating the implementation of Company's strategic policies.

Criteria and Procedure for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners must meet the following qualifications and criteria:

- Has sufficient integrity, competencies and financial reputation.
- Never been declared bankrupt or were found guilty for causing a company to go bankrupt.
- Never committed offensive action and convicted of a felony.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam peraturan yang dimiliki Perusahaan, anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta/Milik Negara/Milik Daerah lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan melarang adanya hubungan darah keluarga antara sesama anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi atau antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.

Pengangkatan/Pemberhentian dan Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan oleh mekanisme RUPS. Sesuai RUPS 2018 yang diselenggarakan pada 21 Maret 2018 dan telah disahkan melalui Akta No. 57 Tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Dewan Komisaris berubah menjadi 4 (empat) tahun dari sebelumnya adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), secara khusus dipaparkan, bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya hanya dapat dilakukan kepada anggota Dewan Komisaris yang berkinerja baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 72 ayat (2).

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2018

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 3 (tiga) orang Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang dikuasai. Di tahun 2018, terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris, sesuai Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 29 Oktober 2018. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018.

In the Company's regulations, the Board of Commissioners may not concurrently hold other positions in other private/ State Owned/Regional Owned business entities that may pose a conflict of interest, either directly or indirectly with the Company. In addition, the Company prohibits family affiliation among members of the Board of Commissioners and among members of the Board of Directors or between members of the Board of Commissioners with members of the Board of Directors.

Appointment/Dismissal and Conditions of the Board of Commissioners' Term of Office

The Board of Commissioners are appointed and/or dismissed by the GMS mechanism. In accordance with 2018 GMS held on March 21, 2018 and has been ratified by Deed No. 57 of 2018 on GMS Resolutions, the tenure of the Board of Commissioner changed into 4 (four) years than before was 5 (five) years, and can only be reappointed for 1 (one) more term, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. In the Board Manual, it is specifically described that the appointment of members of the Board of Commissioners for 1 (one) more term can only be applied to members of the Board of Commissioners who are performing well, according to the Governor of DKI Jakarta Province Regulation No. 109 of 2011 on BUMD Management, Article 72 paragraph (2).

Board of Commissioners' Composition in 2018

The Board of Commissioners consists of 4 (four) members, namely 1 (one) President Commissioner and 3 (three) Commissioners who have duties and responsibilities in accordance with the fields controlled. In 2018, there is a change in the composition of the Board of Commissioners according to the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018 and Shareholders' Statement of Resolution Outside the GMS dated October 29, 2018. The following is conveyed chronologically the composition of the Board of Commissioners throughout 2018 and the membership composition of the Board of Commissioners for December 31, 2018.



Kronologis Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2018

Chronology of the Board of Commissioners' Composition in 2018

1 Januari - 4 Mei 2018 <i>January 01 – May 04, 2018</i>	4 Mei - 29 Oktober 2018 <i>May 04 – October 29, 2018</i>	7 November - 31 Desember 2018 <i>November 07 – December 31, 2018</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) <i>(President Commissioner/ Independent Commissioner)</i>			Erry Riyana Hardjapamekas tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018 <i>Erry Riyana Hardjapamekas has no longer served in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018</i>
Rukijo (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>(Acting President Commissioner)</i>	Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>(Acting President Commissioner)</i>	Rukijo menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018, Rukijo diangkat menjadi Plt. Komisaris Utama <i>Rukijo served as Acting President Commissioner since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018, Rukijo was appointed as Acting President Commissioner</i>
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	-
Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>			Prasetyo Boeditjahjono tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018 <i>Prasetyo Boeditjahjono has no longer served in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018</i>
	Zulfikri (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Zulfikri (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Zulfikri duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018. <i>Zulfikri sits in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018</i>
		Mukhtasor (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	Mukhtasor duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 29 Oktober 2018. <i>Mukhtasor sits in the Board of Commissioners since the Shareholders' Statement of Resolution Outside the GMS dated October 29, 2018.</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018 Board of Commissioners Composition as of December 31, 2018

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Rukijo	Plt. Komisaris Utama <i>Acting President Commissioner</i>	Akta No. 19 Tanggal 6 Juli 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 19 dated September 6, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH</i>	10 Agustus 2015 - RUPS Tahun 2019 <i>August 10, 2015 – 2019 Annual GMS</i>	Ke-1 First
Yusmada Faizal	Komisaris <i>Commissioner</i>	Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 48 dated September 13, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	24 Agustus 2016 - RUPS Tahun 2020 <i>August 24, 2016 – 2020 Annual GMS</i>	Ke-1 First
Zulfikri	Komisaris <i>Commissioner</i>	Akta No. 19 Tanggal 6 Juli 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 19 dated September 6, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	4 Mei 2018 - RUPS Tahun 2022 <i>May 04, 2018-2022 Annual GMS</i>	Ke-1 First
Mukhtasor	Komisaris <i>Commissioner</i>	Akta No. 16 Tanggal 7 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 16 dated November 7, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2022 <i>October 29, 2018 – 2022 Annual GMS</i>	Ke-1 First

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profile of all Board of Commissioners' members can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Independensi Terkait Benturan Kepentingan

Independency Related to Conflict of Interest

Dewan Komisaris Perusahaan diangkat berdasarkan persyaratan dan telah melalui mekanisme pengangkatan berdasarkan aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 186 Tahun 2014, aturan tersebut salah satunya tercantum bahwa Dewan Komisaris dapat berasal dari professional maupun pejabat Negara. Aturan tersebut mencerminkan bahwa Dewan Komisaris tidak diperkenankan memiliki ikatan atau hubungan afiliasi dalam hal operasional dengan Perusahaan manapun guna menghindari terjadinya benturan kepentingan.

The Company's Board of Commissioners is appointed based on the requirements and has passed appointment mechanism pursuant to regulations contained in Articles of Associations and Governor Regulation of DKI Jakarta Provincial No. 186 of 2014, which, among others, states that the Board of Commissioners must be originating from professional individuals or State official who are no longer in service. The regulation reflects that the Board of Commissioners does not have any relation or affiliation in terms of operation with any company to avoid conflict of interest.

Board Manual: Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris

Board Manual: Board of Commissioners Work Guidelines

Dalam melaksanakan perannya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan dan telah diperbaharui dan disahkan pada 21 Desember 2016 melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta No. 008 Tahun 2016 dan No.072-1 Tahun 2016. Secara khusus *Board Manual* ini mengatur tentang Dewan Komisaris terkait beberapa hal

In performing its role, the Board of Commissioners refers to the Guidelines of Board of Commissioners and Board of Directors, or the Board Manual, which are owned by the Company and have been renewed and validated on December 21, 2016 by Joint Decision of Board of Commissioners and Board of Directors of PT MRT Jakarta No. 008 of 2016 and No. 072-1 of 2016. Specifically, the Board Manual regulates the Board of Commissioners on the



di bawah ini:

1. Masa Jabatan Dewan Komisaris
2. Program Pengenalan
3. Program Peningkatan Kapabilitas
4. Tanggung jawab
5. Tugas dan Kewajiban
 - a. Pengawasan
 - b. Kontrak Manajemen
 - c. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan RUPS
 - d. Pengurusan Manajemen Risiko
 - e. Sistem Pengendalian Internal
 - f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
 - g. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
6. Wewenang
7. Hak
8. Etika Jabatan
9. Rapat
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan Dihadiri Direksi
 - b. Prosedur Kehadiran, Prosedur Rapat serta Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
 - c. Pembuatan Risalah Rapat
10. Laporan Tugas Pengawasan
11. Komite-komite
 - a. Komite Audit
 - b. Komite yang Dianggap Perlu

Tanggung Jawab, Tugas dan Kewajiban, Wewenang, serta Hak Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

following matters:

1. *Board of Commissioners Term of Office*
2. *Orientation Program*
3. *Capability Enhancement Program*
4. *Responsibility*
5. *Duties and Obligations*
 - a. *Supervision*
 - b. *Contract Management*
 - c. *Duties Related to the GMS*
 - d. *Risk Management*
 - e. *Internal Control System*
 - f. *Disclosure and Confidentiality of Information*
 - g. *Business Ethics and Anti-Corruption*
6. *Authorities*
7. *Rights*
8. *Ethics of Position*
9. *Meeting*
 - a. *The Board of Commissioners meetings that are also attended by the Board of Directors*
 - b. *Procedure of Attendance, Meeting, Discussion, Decision Making*
 - c. *Minutes of Meeting*
10. *The Supervisory Report*
11. *Committees*
 - a. *Audit Committee*
 - b. *The Committee that is considered to be necessary*

Responsibilities, Duties and Obligations, Authority, and Rights of Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policy and the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and for providing advice to the Board of Directors. Supervision and advisory functions are held with the following principles:

1. *In conducting supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Articles of Associations and applicable laws and regulations.*
2. *Each Member of the Board of Commissioners shall have good faith and be prudent and responsible for carrying out the supervisory and advisory duties for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes.*
3. *Each Member of the Board of Commissioners holds personal responsibility for any damage on the Company if the member in question is guilty or negligent in performing their duties as*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- sebagaimana dimaksud di atas.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 {dua} Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
 5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
 6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 7. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.
 8. Atas nama Perusahaan, Pemegang Saham dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan ke pengadilan negeri.
 9. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.
- referred to above.*
4. *If the Board of Commissioners consists of 2 (two) members or more, the responsibilities as referred to in paragraph (3) shall be jointly and severally borne by each member of the Board of Commissioners.*
 5. *In conducting the supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and can not act on their own as a representative of the Board of Commissioners.*
 6. *Members of the Board of Commissioners can not be held responsible for any loss as referred to in item (3) above if he/she can prove that he/she:*
 - a. *Has conducted supervision in good faith and prudence for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
 - b. *Does not have a personal interest, either directly or indirectly, for management actions of Board of Directors resulting in losses; and has provided advice to the Board of Directors to prevent the continuation of such losses.*
 7. *Supervision should not be made as the tasks of the executives, except in the event the Company does not have the Board of Directors. In such case, the Board of Commissioners reserves the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners on the responsibility of the Board of Commissioners.*
 8. *On behalf of the Company, Shareholders can sue member of the Board of Commissioners, in which due to his/her errors or omissions causing harm to the Company to court.*
 9. *The Board of Commissioners may use independent professional services and/or form Committee to assist the Board of Commissioners.*

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Duties and Obligations of the Board of Commissioners are as follows:

1. Umum
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS.
 - b. Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. *General*
 - a. *To comply with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and GMS Decision.*
 - b. *Supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners are conducted for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes.*
 - c. *To supervise the policy of the Company's management carried out by the Board of Directors and give advice to the Board of Directors regarding the Company's development plan, Long Term Plan, Work Plan and Budget, the implementation of the Articles of Association provisions, the GMS decision, and prevailing laws and regulations.*



-
- d. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
- e. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
- g. Membahas, memberikan saran dan pertimbangan atau masukan terhadap:
- Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan;
 - Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Perusahaan;
 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - Laporan kinerja Perusahaan;
 - Laporan akhir masa jabatan anggota Direksi;
 - Laporan keuangan Perusahaan yang sudah diaudit; dan
 - Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- h. Melaporkan hasil penilaiannya terhadap pelaksanaan RJP, Renstra dan RKAP oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD).
- i. Melaporkan sedini mungkin kepada Gubernur melalui BPBUMD mengenai adanya temuan dan/atau kekeliruan dan/atau kelalaian dan/atau kesalahan pengelolaan/pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
- j. Menyusun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur melalui BPBUMD secara berkala triwulanan, semester atau tahunan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Pengawasan
Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan cara:
- Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
 - Melakukan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Melakukan kunjungan ke unit kerja/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
 - Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
- d. *To monitor the effectiveness of good corporate governance practices that are applied by the Company, among others by organizing regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*
- e. *To prepare the Board of Commissioners work plan for the next year period.*
- f. *To account for the implementation of its duties to the GMS.*
- g. *To discuss, provide advice or feedback to:*
- The Company's Long Term Plan (RJP);*
 - The Company's Business Strategic Plan (Renstra);*
 - The Company's Work Plan and Budget (CBP);*
 - The Company's Performance Report;*
 - The final report at the end of service period of the Board of Directors;*
 - The Company's audited financial statements; and*
 - Other matters related to the Company's business activities.*
- h. *To report the results of its assessment on the implementation of RJP and RKAP by the Board of Directors to the Governor through the Agency for BUMD Development and Investment (BPBUMDPM).*
- i. *To report as early as possible to the Governor through BPBUMDPM about any findings and/or errors and/or omissions and/or mistakes in the management of the Company by the Board of Directors.*
- j. *To prepare and report the results of its supervision to the Governor through BPBUMDPM quarterly, semesterly, yearly, or at any time as needed.*
- k. *To prepare and submit the final report at the end of service period of the Board of Commissioners.*
2. *Supervision*
The supervision by the Board of Commissioners is conducted among others by:
- Requesting information in writing to the Board of Directors concerning an issue in the Company;*
 - Conducting joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors;*
 - Performing visit to the certain unit/project, either with (or without) prior notice to the Board of Directors;*
 - Responding to regular reports from the Board of Directors;*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- e. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugas-tugas pengawasan tertentu sesuai Piagam Komite Audit.
3. Kontrak Manajemen
Dewan Komisaris melakukan kontrak manajemen dihadapan RUPS.
4. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan RUPS
Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RKAP tahunan atas:
 - i. Program kerja yang diajukan Direksi;
 - ii. Laporan keuangan Perusahaan;
 - iii. Laporan kinerja Perusahaan; dan
 - iv. Laporan akhir masa jabatan Direksi.
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dalam kepengurusan Perusahaan.
 - e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana aksi pengurusan Perusahaan oleh Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS.
 - g. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS.
 - h. Dalam hal ada Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
 - i. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
 - k. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan.
5. Pengurusan Manajemen Risiko
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
- e. Assigning the Audit Committee to perform certain supervisory duties according to the Audit Committee Charter.
3. Contract Management
The Board of Commissioners perform management contracts before the GMS.
4. Duties Related to the GMS
In conjunction with the GMS, the Board of Commissioners is in charge and obliged to:
 - a. GMS is led by President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend the meeting, then the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners.
 - b. Provide opinions and advice to the GMS is regarding the annual RKAP on:
 - i. The work program proposed Board of Directors;
 - ii. The financial statements of the Company;
 - iii. The Company's performance report; and
 - iv. The final report at the end of service period of the Board of Directors.
 - c. Follow the progress of the Company's activities.
 - d. Provide opinions and advice to the GMS on any matter considered important in the management of the Company.
 - e. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining performance of the Company, accompanied by suggestions regarding corrective measures to be taken.
 - f. Provide opinions and advice to the GMS regarding the action plan for management of the Company by the Board of Directors, which must obtain the approval of the GMS.
 - g. Study, analyze, and sign the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors to the GMS.
 - h. If there is a Commissioner who does not sign the Annual Report, the concerned member should mention the reasons in writing.
 - i. Perform other monitoring duties specified by the GMS.
 - j. Account for the implementation of its duties to the GMS.
 - k. Nominate candidates for External Auditor to the GMS, completed with candidacy reasons and the amount of honorarium/compensation proposed.
5. Risk Management
The Board of Commissioners has an obligation to oversee and provide advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of risk management.



6. Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

7. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
- b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.
- c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan masalah material yang dihadapi.
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data Perusahaan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

- a. Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan di mana hal tersebut dapat memengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perusahaan.
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, sebelum, selama, dan setelah menjabat dan wajib untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

6. *Internal Control System*

The Board of Commissioners has an obligation to oversee and provide advice to the Board of Directors in order to establish an effective internal control system.

7. *Disclosure and Confidentiality of Information*

- a. *The Board of Commissioners oversees the Board of Directors in order to disclose important information in the Annual Report and Financial Statements of the Company to the Shareholders, and related Government Agencies, in accordance with the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.*
- b. *The Board of Commissioners monitors the Board of Directors to take the initiative to disclose not only problems as required in the legislation, but also the essential information required by stakeholders.*
- c. *The Board of Commissioners monitors the Board of Directors to actively disclose the implementation of good corporate governance principles and material issues.*
- d. *The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's information data. Confidential information that was collected while serving as member of the Board of Commissioners should be kept confidential in accordance with the legislation in force.*

8. *Business Ethics and Anti-Corruption*

- a. *The Board of Commissioners is prohibited from providing or offering or accepting directly or indirectly anything of value to a customer or a government official to influence or as a reward for what he/she had done and other actions in according to applicable laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Commissioners shall not solicit or accept gifts and the like from any interested party, for him/herself, family or colleagues that can affect his/her objectivity in representing the interests of the Company.*
- c. *Members of the Board of Commissioners must be willing to be examined regarding his/her wealth, before, during, and after his/her service period and obliged to report and announce the wealth before and after serving.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan.
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, dan persediaan barang mati.
 - e. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, mengajukan pemberhentian ke Pemegang Saham melalui RUPSLB.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Atas usulan Direksi, Dewan Komisaris berwenang mengangkat seorang karyawan Perusahaan untuk menjadi Sekretaris Dewan Komisaris dan tidak mengubah statusnya sebagai pegawai Perusahaan.
7. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Direksi.

Authorities of the Board of Commissioners

1. *The Board of Commissioners has the authority to approve or reject in writing the Board of Directors' plan in terms of:*
 - a. *Borrow or lend money on behalf of the Company.*
 - b. *Establish a new business or participating in other companies both at home and abroad.*
 - c. *Collateralize fixed assets to perform withdrawal of short term credit.*
 - d. *Remove and abolish movable assets with generally acceptable economic age in the industry up to 5 (five) years, and eliminate bad credit and inventory of immovable assets.*
 - e. *Hold a joint operation or management contract with validity period of not more than 1 (one) year.*
2. *The Board of Commissioners at any time during office hours has the right to enter premises that are used or controlled by the Company and has the right to check all bookkeepings, letters and other evidence, check and match the conditions of cash and others and has the right to know all actions taken by the Board of Directors.*
3. *If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily obliged to take care of the Company. In such a case the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more of the Board of Commissioners Members at the expense of the Board of Commissioners.*
4. *The Board of Commissioners has the authority to temporarily dismiss one or more Members of the Board of Directors, if they act contrary to the Articles of Association or neglect their obligations or there are urgent reasons for the Company in accordance with applicable regulations. Then, submit a termination to the Shareholders through the Extraordinary GMS.*
5. *Request the Directors and / or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meetings.*
6. *Upon the proposal of the Board of Directors, the Board of Commissioners has the authority to appoint a Company employee to become the Secretary of the Board of Commissioners and not change his/her status as an employee of the Company.*
7. *Provide input, suggestions and considerations to the Directors.*



8. Memberikan teguran dan peringatan kepada Direksi atas pengelolaan/pengurusan Perusahaan yang tidak sesuai dengan RJP, Renstra dan/atau RKAP Perusahaan.
 9. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan.
 10. Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan/pengurusan Perusahaan oleh Direksi pada RUPS/RUPSLB.
 11. Meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perusahaan dan/atau pengelolaan/pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
 12. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan Perusahaan.
 13. Meminta Direksi dan/atau pejabat lain Perusahaan untuk hadir dalam rapat yang diadakan Dewan Komisaris.
 14. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan masukan, saran atau pertimbangan sesuai agenda rapat.
 15. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi Perusahaan.
 16. Memberikan persetujuan atas permohonan cuti yang diajukan oleh Direksi.
 17. Memberikan persetujuan atas permohonan izin yang diajukan Direksi untuk perjalanan dinas luar negeri.
8. *Provide verbal warning and/or written warning to the Board of Directors regarding the Company's management that is not in accordance with the Long-Term Plan (RJP), Strategic Plan and/or Work Plan and Budget (RKAP) of the Company.*
 9. *Examine members of the Board of Directors who are suspected of carrying out actions that harm the Company.*
 10. *Provide recommendations regarding the Company's management by the Board of Directors at the Annual GMS / Extraordinary GMS.*
 11. *Request data and information regarding the Company's business activities and/or management by the Directors.*
 12. *Request an explanation from the Board of Directors regarding the development of the Company.*
 13. *Request the Directors and/or other officials of the Company to attend meetings held by the Board of Commissioners.*
 14. *Attend Board of Directors meetings and providing input, suggestions or considerations according to the meeting agenda.*
 15. *Provide a performance assessment of the Company's Directors.*
 16. *Grant approval for leave requests submitted by the Board of Directors.*
 17. *Grant approval for permission applications submitted by the Board of Directors for official travel abroad.*

Hak-hak Dewan Komisaris adalah:

1. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
 2. Meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan.
 3. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
 4. Menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
 5. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan.
- The rights of the Board of Commissioners are:*
1. *Request an explanation of all matters asked to the Directors and Directors must provide an explanation.*
 2. *Request assistance from experts for a limited period of time at the expense of the Company, or form committees as needed.*
 3. *Appoint the Secretary of the Board of Commissioners at the expense of the Company.*
 4. *Receive salaries and/or allowances whose amount is determined by the GMS.*
 5. *Receive incentives for work performance, the amount of which is determined by the GMS if the Company reaches a profit level.*

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual*, tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris Perusahaan di tahun 2018 berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 28 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Segregation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Based on the *Board Manual*, the responsibilities of the Board of Commissioners are collective. The segregation of duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners in 2018 based on the Board of Commissioners Internal Meetings dated May 28, 2018 are as follows:



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RUKIJO (Plt. Komisaris Utama) (Acting President Commissioner)	
Pengawasan dan konsultasi bidang keuangan dan anggaran. Merangkap Ketua Komite Audit	<i>Financial and budget supervision and consultation. Concurrently as Audit Committee Chairman</i>
YUSMADA FAIZAL (Komisaris) (Commissioner)	
Pengawasan dan konsultasi bidang konstruksi dan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD). Merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	<i>Supervision and consultation in the field of construction and Transit Oriented Development (TOD). Concurrently as Nomination and Remuneration Committee Chairman</i>
ZULFIKRI (Komisaris) (Commissioner)	
Pengawasan dan konsultasi bidang operasi, pemeliharaan, perusahaan dan pengembangan. Merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko	<i>Supervision and consultation in the fields of operation, maintenance, business and development. Concurrently as Risk Monitoring Committee Chairman</i>
MUKHTASOR (Komisaris) (Commissioner)	
Pengawasan dan konsultasi bidang usaha pokok Perusahaan dan pengembangan usaha.	<i>Supervision and consultation of the company's core business and business development</i>

Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan. Program Pengenalan meliputi pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan; gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan atau ke proyek, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Komisaris Utama.

Di tahun 2018 Program Pengenalan Perusahaan terhadap Dewan Komisaris yang baru dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018 di Kantor PT MRT Jakarta yang diikuti oleh Direktur Keuangan & Administrasi, Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Divisi Keuangan dan Akuntansi.

Program pengenalan dilakukan pula dengan kunjungan ke lokasi proyek pembangunan MRT.

Company Orientation Program

Members of the Board of Commissioners appointed for the first time must be given an Orientation Program regarding the Company. The Orientation Program covers the implementation of Corporate Governance Principles; an overview of the Company relating to the purpose, nature, and scope of activities, financial performance and operations, strategies, long-term business plans, risks and other strategic issues; internal and external audits, systems and internal control policies, including the Audit Committee. The Company Orientation Program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company or to the project, and review of documents or other programs that are deemed to be in accordance with the Company where the program is implemented. The responsibility for holding the introduction program was carried out by the President Commissioner.

In 2018, Corporate Orientation Program for the new Board of Commissioners' members was held on October 31, 2018 at PT MRT Jakarta Office which was attended by the Finance & Administration Director, Commissioner, Secretary of the Board of Commissioners and Staff of the Finance and Accounting Division.

The Orientation Program was also carried out with a visit to the location of the MRT development project.



Kunjungan ke Lokasi Proyek Pembangunan MRT
Site Visit to the Construction Project MRT

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Perusahaan senantiasa memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan pelatihan diwajibkan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competence Development of the Board of Commissioners

The company always facilitates the implementation of human capital development programs from the top level to the lowest as a form of the Company's commitment in creating superior and competitive human capital. The policy regarding the competence development program for the Board of Commissioners is as follows:

1. *Competence Development Programs are carried out in order to improve the work effectiveness of the Board of Commissioners.*
2. *Plans for implementing a competence development program must be included in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.*
3. *Each Member of the Board of Commissioners who participates in a competence development program such as seminars and training is required to present to other Members of the Board of Commissioners in order to share information and knowledge.*
4. *The member of the Board of Commissioners concerned is responsible for making a report on the implementation of the competence development program. The report is submitted to the Board of Commissioners.*

Regarding the Competence Development activities followed by the Board of Commissioners throughout 2018, can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2018

Implementation of the Board of Commissioners Duties in 2018

1. Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris

1. Realization of the Board of Commissioners' Work Plan

Rencana Kerja Work Plan	Realisasi Realization
Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dalam <i>monitoring</i> pelaksanaan konstruksi dan kesiapan operasi MRT. Mengentahui kendala dan risiko serta rencana mitigasi dan penyelesaiannya <i>Meeting of the Board of Commissioners by inviting Directors in monitoring the implementation of construction and readiness of MRT operations. Knowing the constraints and risks as well as the mitigation and resolution plan</i>	12 Kali rapat 12 meetings
Melakukan pengawasan secara langsung terhadap ketepatan waktu, kendala, risiko serta mitigasinya dengan perspektif masing-masing komite Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. <i>Direct monitoring of timeliness, constraints, risks and mitigation with the perspective of each committee Board of Commissioner, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee.</i>	9 kali rapat dan <i>site visit</i> 9 meetings and site visits
Melakukan rapat internal Dewan Komisaris <i>Conducted an internal meeting of the Board of Commissioners</i>	9 Kali 9 Times
Melakukan <i>capacity building</i> bidang <i>governance</i> , manajemen risiko, dan pengendalian internal <i>Carry out capacity building in governance, risk management, and internal control</i>	2 kali 2 Times

2. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

2. Board of Commissioners Working Visit

Monitoring Pelaksanaan Proyek di lapangan Project Implementation Monitoring at the field	Tanggal Date	Peserta Kunjungan Kerja Work Visit Participants
Paket Pekerjaan Konstruksi CP 104- CP 105, Stasiun Senayan-St. Benhil <i>Construction Work Package of CP 104- CP 105, Senayan Station- Benhil Station</i>	31 Januari 2018 <i>January 31, 2018</i>	Dewan Komisaris dan Komite <i>Board of Commissioners and Committee</i>
Monitoring pekerjaan konstruksi CP 105, CP 106 <i>Mulai dari St. Benhil - Bundaran HI</i> <i>Monitoring the construction work of CP 105, CP 106 Starting from Benhil Station- Bundaran HI Station</i>	1 Februari 2018 <i>February 1, 2018</i>	Dewan Komisaris dan Komite <i>Board of Commissioners and Committee</i>
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite kpd BOC dilanjutkan <i>Site Visit</i> dan <i>monitoring</i> Pekerjaan Konstruksi CP 101, Lebak Bulus <i>Committee's Duties Implementation Report to the Board of Commissioners continued with Site Visit and monitoring Construction Work of CP 101, Lebak Bulus</i>	10 April 2018 <i>April 10, 2018</i>	Dewan Komisaris dan Komite <i>Board of Commissioners and Committee</i>
Monitoring pekerjaan konstruksi CP 104, CP 105 Mulai dari St. Senayan <i>Monitoring the construction work of CP 104, CP 105 Starting from Senayan Station</i>	13 Juli 2018 <i>July 13, 2018</i>	Dewan Komisaris dan Komite <i>Board of Commissioners and Committee</i>
Monitoring Pekerjaan Konstruksi CP 107 dan CP 108, Mekanikal Elektrikal dan Kereta <i>Monitoring of CP 107 and CP 108 Construction Works, Electrical and Train Mechanical</i>	13 Agustus 2018 <i>August 13, 2018</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
Monitoring Pekerjaan Konstruksi CP 107 dan CP 108, Mekanikal Elektrikal dan Kereta <i>Monitoring of CP 107 and CP 108 Construction Works, Electrical and Train Mechanical</i>	7 Desember 2018 <i>December 7, 2018</i>	Dewan Komisaris dan Komite <i>Board of Commissioners and Committee</i>



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT MRT Jakarta mempunyai 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja dari masing-masing komite dilihat dari tingkat efektifitas dari aktivitas dari Komite yang bersangkutan. Aktivitas Komite dilihat dari laporan kegiatan masing-masing komite yang disampaikan secara tiga bulanan dan tahunan kepada Komisaris Utama. Setiap 3 bulan, Komite diwajibkan ikut serta dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi Dewan Komisaris harus efektif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif, tepat, cepat dan independen. Adanya Komisaris Independen merupakan bagian dari upaya entitas usaha untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan operasional dan usaha dengan meminimalisir benturan kepentingan; baik antar anggota Dewan Komisaris, dengan Direksi maupun dengan Pemegang Saham utama.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Pedoman Umum GCG 2006 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya; baik terafiliasi dalam hubungan bisnis maupun hubungan keluarga. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen, salah satu Komisaris Independen harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, yaitu:

Performance Assessment of Committee Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PT MRT Jakarta has 3 Committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee. The performance assessment of each committee is seen from the effectiveness of the activities of the Committee concerned. Committee activities are seen from the reports of the activities of each committee submitted quarterly and annually to the President Commissioner. Every 3 months, the Committee is required to participate in a joint meeting of the Board of Commissioners and Directors.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The composition of Board of Commissioners must be effective so as to enable decision making to be carried out effectively, precisely, quickly and independently. The existence of an Independent Commissioner is part of the efforts of business entities to supervise the management of operations and businesses by minimizing conflicts of interest; both among members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors and with the main Shareholders.

In Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and General Guidelines for GCG 2006 issued by the National Committee on Governance (KNKG), Independent Commissioners are appointed based on GMS decisions from parties that are not affiliated with major shareholders, members of the Board of Directors and / or other members of the Board of Commissioners; both affiliated in business and family relationships. If there are more than 1 (one) Independent Commissioner, one of the Independent Commissioners must have an accounting or financial background.

Composition and Membership of Independent Commissioners in the Board of Commissioners' Composition

Throughout 2018, the Company has 1 (one) Independent Commissioner, namely:



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komisaris Independen MRT Jakarta di Tahun 2018 *Independent Commissioner of MRT Jakarta in 2018*

Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Periode Jabatan dan Pertama Kali Diangkat <i>Period of Office and Initial Appointment</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>
Erry Riyana Hardjapamekas	Periode ke-1, sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perusahaan <i>1st period, previously never served as ther Company's Board of Commissioners</i>	25 April 2013 - Mei 4, 2018 <i>April 25, 2013 - May 4, 2018</i>

Melalui Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018, karena telah habis masa jabatannya, pemegang saham memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Erry Riyana Hardjapamekas dari posisinya dalam jajaran Dewan Komisaris.

Through the Shareholders' Circular Resolution of May 4 2018 because his term of office has ended, the shareholders decided to respectfully dismiss Erry Riyana Hardjapamekas from his position in the Board of Commissioners.

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS PT MRT Jakarta, telah mengangkat Mukhtasor sebagai Komisaris Independen.

On October 29, 2018, the Shareholders' Resolutions outside the GMS of PT MRT Jakarta, have appointed Mukhtasor as Independent Commissioner.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Criteria for Selecting Independent Commissioner

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Tahun 186 Tahun 2014 tentang Pengurusan BUMD, Komisaris Independen di Perusahaan memiliki kriteria sebagai berikut:

The existence of Independent Commissioners in the Company always ensures that the supervision mechanism runs effectively and in accordance with the laws and regulations. Pursuant to Governor Regulation No. 186 of 2014 on Regional-Owned Enterprise (BUMD) Management, Independent Commissioner in the Company has the following requirements:

- Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT.
- Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT.
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan *medical check-up*.
- Memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Komisaris PT.
- Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum.
- Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit
- Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana
- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.

- Has high integrity, loyalty and dedication to improve and develop the Company;*
- Has high competency and professionalism in managing the Company;*
- Physically and mentally healthy supported with doctoral reference based on medical check-up;*
- Has intellectual, emotional and spiritual intelligence in accordance with the Commissioner position at the Company;*
- Has the ability and skills to act legally;*
- Has never served as Commissioner, Director and/or Supervisory Board in any company that is declared bankrupt;*
- Has educational background of at least Bachelor graduate;*
- Minimum age of 35 (thirty-five) years old and maximum of 60 (sixty) years old when their nomination is submitted to the Governor/Deputy Governor/Regional Secretary;*



9. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa.
 10. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
 11. Tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah.
 12. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 13. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik.
 14. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.
 15. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
9. *Currently not pronounced as a suspect or defendant;*
 10. *Not a member and/or management of political party and/or legislative candidate/member and/or community organization management affiliated with political party;*
 11. *Has never been penalized for causing loss to the state/ regional's financial;*
 12. *Is recommended as fit and proper by an independent expert consultant based on fit-and-proper test;*
 13. *Willing and ready to resign from Government Employees status for officials or employees of Government/Regional Government agency/institution assigned as Public Service Executor;*
 14. *Does not have family relation with members of Board of Directors or officials below Board of Directors at the Company either by blood relation or marriage, until the third degree; and*
 15. *Not a member of Indonesian National Army or National Police.*

Dengan demikian, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berperan dalam menjalankan aktivitas operasional secara keseluruhan. Visi dan misi Perusahaan yang telah dicanangkan, yang kemudian tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) menjadi kewajiban tujuan utama Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan Perusahaan. Komposisi Direksi ditentukan dan diangkat dalam RUPS.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Direksi untuk berdomisili di Indonesia. Di samping itu, anggota Direksi yang dinominasikan diharuskan untuk tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Therefore, the Company's Independent Commissioners have met the criteria in accordance with the applicable laws and regulations.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a company organ that plays a role in carrying out overall operational activities. The Company's vision and mission that has been proclaimed, which is then contained in the Company's Long Term Plan (RJPP), is the responsibility of the Board of Directors' main goal in managing the Company. The composition of the Board of Directors is determined and appointed in the GMS.

Qualifications and Criteria for Members of the Board of Directors

The company requires members of the Board of Directors to domicile in Indonesia. In addition, nominated members of the Board of Directors must never be declared bankrupt and or guilty of causing a company to go bankrupt; and has never committed a disgraceful act and has never been convicted of a crime.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan melarang adanya rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan sejenis dan/atau lembaga lain. Untuk menghindari benturan kepentingan, Perusahaan tidak mengizinkan anggota Direksi yang dinominasikan yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Perusahaan.

Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Perusahaan.

Pengangkatan/Pemberhentian dan Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Direksi diangkat dan/atau diberhentikan oleh mekanisme RUPS. Sesuai keputusan RUPS di tahun 2018 yang diselenggarakan pada 21 Maret 2018 dan telah disahkan melalui Akta No. 57 Tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), secara khusus dipaparkan, bahwa pengangkatan anggota Direksi untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya hanya dapat dilakukan kepada anggota Direksi yang berkinerja baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 72 ayat (2).

Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2018

Direksi Perusahaan terdiri dari 5 (lima) jabatan fungsional yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi, Direktur Konstruksi, Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis, serta Direktur Operasi dan Pemeliharaan.

Komposisi Direksi per 31 Desember 2018 beranggotakan 5 (lima) Direksi, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) Direktur. Di sepanjang tahun 2018 terdapat pergantian keanggotaan Direksi, sesuai keputusan para pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Oktober 2018. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Direksi di sepanjang tahun 2018 dan susunan keanggotaan Direksi per 31 Desember 2018.

The Company prohibits Board of Directors' members concurrently as Board of Commissioners, Directors or executive officers in similar companies and / or other institutions. To avoid conflicts of interest, the Company does not allow nominated members of the Board of Directors who have financial and family affiliation with the Board of Commissioners' members, other members of the Board of Directors and / or the Company's shareholders.

The majority of the Board of Directors' members have more than 5 (five) years of experience in the operational field as executive officers of the Company.

Appointment / Dismissal and Provisions of the Board of Directors' Term of Office

Directors are appointed and/or dismissed by the GMS mechanism. In accordance with the GMS resolution in 2018 which was held on March 21, 2018 and has been ratified through Deed No. 57 of 2018 concerning Statement of GMS Decree, the Board of Directors' term of office is 5 (five) years, and can only be reappointed for 1 (one) subsequent term of office, without reducing the GMS's right to terminate at any time. In the Board of Commissioners and Board of Directors Guidelines (Board Manual), specifically, the appointment of Board of Directors' members for 1 (one) subsequent term of office can only be performed to members of the Board of Directors who perform well, in accordance with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 109 of 2011 concerning Management of Regional-Owned Enterprise (BUMD), Article 72 paragraph (2).

Composition of the Board of Directors in 2018

The Company's Board of Directors consists of 5 (five) functional positions consisting of the President Director, Finance and Administration Director, Construction Director, Development and Business Support Director, Operation and Maintenance Director.

The Board of Directors' composition as of December 31, 2018 consists of 5 (five) Directors, consisting of 1 (one) President Director and 4 (four) Directors. Throughout 2018 there was a change in the Board of Directors' membership, in accordance with the shareholders' resolution outside the General Meeting of Shareholders on October 29, 2018. Following is chronology of the Board of Directors' composition throughout 2018 and the composition of Directors' membership as of December 31, 2018.



Kronologis Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2018

Chronology of the Board of Directors' Composition in 2018

1 Januari - 29 Oktober 2018 <i>January 01 – October 29, 2018</i>	29 Oktober - 31 Desember 2018 <i>October 29 – December 31, 2018</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
William P. Sabandar (Direktur Utama) <i>President Director</i>	William P. Sabandar (Direktur Utama) <i>President Director</i>	-
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) <i>Construction Director</i>	Silvia Halim (Direktur Konstruksi) <i>Construction Director</i>	-
Agung Wicaksono (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) <i>Operation and Maintenance Director</i>		Agung Wicaksono tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 29 Oktober 2018. <i>Agung Wicaksono has no longer served in the Board of Directors since the Shareholders' Resolution Outside the GMS on October 29, 2018.</i>
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi)	Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) <i>Finance and Administration Director</i>	-
	Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) <i>Operation and Maintenance Director</i>	Muhammad Effendi duduk dalam jajaran Direksi sejak Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 29 Oktober 2018. <i>Muhammad Effendi sits in the Board of Directors since the Shareholders' Resolution outside the GMS on October 29, 2018.</i>
	Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis) <i>Development and Business Support Director</i>	Ghamal Peris duduk dalam jajaran Direksi sejak Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 29 Oktober 2018. <i>Ghamal Peris sits in the Board of Directors since the Shareholders' Resolution outside the GMS on October 29, 2018.</i>

Susunan Direksi per 31 Desember 2018

Board of Directors Composition As of December 31, 2018

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode <i>Period</i>
William P. Sabandar	Direktur Utama <i>President Director</i>	Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 133 dated March 21, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	21 Maret 2018- RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – 2023 Annual GMS</i>	Ke-2 <i>2nd</i>
Silvia Halim	Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i>	Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 133 dated March 21, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	21 Maret 2018- RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – 2023 Annual GMS</i>	Ke-2 <i>2nd</i>
Muhammad Effendi	Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operation and Maintenance Director</i>	Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 16 dated November 17, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 – 2023 Annual GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Ghamal Peris	Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis <i>Development and Business Support Director</i>	Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 16 dated November 17, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 - 2023 Annual GMS</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Tuhyat	Direktur Keuangan dan Administrasi <i>Finance and Administration Director</i>	Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. <i>Deed No. 133 dated March 21, 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i>	21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 - 2023 Annual GMS</i>	Ke-2 <i>2nd</i>

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of all Directors can be seen in Company Profile Chapter in this Annual Report.

Integritas

Direktur Perusahaan tidak diperkenankan:

1. memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dari rekan bisnis Perusahaan dan/atau Anak Perusahaannya.
2. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perusahaan dan/atau Anak Perusahaannya.
3. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perusahaan (dan/atau Anak Perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.
4. ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai Direktur atau Komisaris) di perusahaan pesaing Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
5. memiliki saham di perusahaan pesaing Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.

Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta komite Dewan Komisaris, Direksi bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

Integrity

A Director is not allowed to:

1. *Grant or accept gift (which is substantial) from business partner of the Company and/or its subsidiaries*
2. *Provide unfair advantages to any third party which may impair the Company and/or its subsidiaries;*
3. *Take profit from business opportunities, which is the Company's (and/or its subsidiaries) right, either personal, partner, children or family which still has family relation through blood or through marriage until second degree.*
4. *Participate, directly and indirectly, in the management (as Director or Commissioner) of the Company's competitor and/or their subsidiaries;*
5. *Own share in the Company's competitor and/or their subsidiaries.*

In relation with the Board of Commissioners, its members and Board of Commissioners Committee, the Board of Directors acts based on mutual trust and transparency.



Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perusahaan. Anggota Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perusahaan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. untuk menjaga keunggulan kompetitif Perusahaan dan/ atau Anak Perusahaannya.
2. untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perusahaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perusahaan adalah:
 - a. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik.
 - b. Rencana strategis Perusahaan.
 - c. Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*).
 - d. Produk-produk Perusahaan dan/atau Anak Perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan.
 - e. Keunikan teknologi.
 - f. Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Direktur Perusahaan dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benturan Kepentingan

Seorang Direktur menghindari berada dalam posisi di mana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perusahaan. Direktur wajib segera melaporkan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.

Confidentiality

During their tenure and after its completion, Board of Directors members are prohibited to use or disclose (directly and indirectly) any confidential information owned by the Company. Members of Board of Directors are also prohibited to misuse Confidential Information including document and/ or strategic information drawn up and/or obtained by the Company, which shall not be disclosed or given to outside party, with the following consideration:

1. *To maintain the Company's and/or its subsidiaries competitiveness; and/or*
2. *To comply with agreements or laws and regulations which obligates the Company to maintain such confidential information. The information included into Company's Confidential Information category namely:*
 - a. *Financial Report and/or material transaction which has not been disclosed to the public;*
 - b. *Company's strategic plan;*
 - c. *Information bound to confidentiality agreement;*
 - d. *The Company's products and/or its subsidiaries which are still in development;*
 - e. *Technology exclusivity; and*
 - f. *Other information deemed confidential.*

Business Ethics and Anti-Corruption

1. *Board of Directors is obligated to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance.*
2. *The Company's Board of Directors is prohibited to give or offer or accept, either directly or indirectly, something valuable in order to influence or as a return for what has been done and other actions in accordance with laws and regulations.*

Conflict of Interest

A Director must avoid conflict of interest between personal interest and interest of the Company. Board of Directors must report to President Director and other members of Board of Directors regarding conflict of interest or the potency of conflict of interest of the Company and must provide relevant information in the report.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Transaksi di mana terdapat seorang Direktur yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Direktur yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda di mana dia memiliki benturan kepentingan. Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perusahaan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Direksi tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Anggota Direksi dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Setiap tahunnya, seluruh anggota Direksi Perusahaan menandatangani Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan.

Board Manual: Pedoman Tata Kerja Direksi

Dalam melaksanakan perannya, Direksi mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan. Secara khusus *Board Manual* ini mengatur tentang Direksi terkait beberapa hal di bawah ini:

1. Masa Jabatan
2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
3. Tugas dan Kewajiban Direksi
 - » Umum
 - » Tugas yang berhubungan dengan RUPS
 - » Tugas yang terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
 - » Tugas yang terkait dengan Rencana Jangka Panjang (RJP)
 - » Tugas yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
 - » Tugas yang terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan
 - » Tugas yang terkait dengan Pengurusan Manajemen Risiko
4. Tanggung jawab Direksi

A transaction with conflict of interest must obtain the approval of Board of Directors, and is implemented with terms and conditions that are at least related to industry and must meet prevailing legislation regarding affiliated transaction and/or transaction with conflict of interest.

Director with conflict of interest is prohibited from participating in the process of decision making regarding agenda where they have conflict of interest. In case a member of Board of Directors owns a share in the Company or other companies, such Director must meet the reporting requirements regulated in the prevailing laws and regulations. Members of Board of Directors are prohibited from receiving, granting, or offering (directly and indirectly) anything valuable to other party to influence or as a return on what has been done and other actions pursuant to the laws and regulations.

Every year, all members of the Company's Board of Directors sign Statement of Having no Conflict of Interest

Board of Directors Board Manual

In performing its duties, the Board of Directors refers to the Guidelines of Board of Commissioners and Board of Directors, owned by the Company. In particular Board Manual regulates the following matters:

1. Term of Office
2. Introduction and Capacity Improvement Program
3. Duties and Obligations of the Board of Directors
 - » General
 - » Related with GMS
 - » Related with Strategy and Work Plan
 - » Related with Long-term Plan (RJP)
 - » Related with preparation of Company's Work Plan and Budget (RKAP)
 - » Related with preparation of Annual Report
 - » Related with Risk Management
4. Responsibility of the Board of Directors



-
- | | |
|--|---|
| <p>5. Wewenang Direksi</p> <ul style="list-style-type: none">» Umum» Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris» Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris <p>6. Kontrak Manajemen</p> <p>7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi</p> <p>8. Hubungan dengan <i>Stakeholder</i></p> <p>9. Sistem Akuntansi dan Pembukuan</p> <p>10. Hak Direksi</p> <p>11. Etika Jabatan</p> <p>12. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Perusahaan</p> <p>13. Pembidangan Tugas Direksi</p> <ul style="list-style-type: none">» Umum» Direktur Utama» Direktur Konstruksi» Direktur Operasi dan Pemeliharaan» Direktur Keuangan dan Administrasi <p>14. Penggunaan Saran Profesional</p> <p>15. Komite-komite (Tim) Direksi</p> <p>16. Rapat Direksi</p> <ul style="list-style-type: none">» Umum» Jadwal dan Agenda Rapat» Prosedur Kehadiran» Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan» Pembuatan Risalah Rapat Direksi» Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Direksi <p>17. Sekretaris Perusahaan</p> | <p>5. <i>Authorities of the Board of Directors</i></p> <ul style="list-style-type: none">» <i>General</i>» <i>Required approval from the Board of Commissioners</i>» <i>Required approval from GMS and the approval should be given after considering opinions and inputs from the Board of Commissioners</i> <p>6. <i>Management Contract</i></p> <p>7. <i>Business Ethics and Anti-corruption</i></p> <p>8. <i>Relationship with Stakeholder</i></p> <p>9. <i>Accounting and Bookkeeping System</i></p> <p>10. <i>Rights of the Board of Directors</i></p> <p>11. <i>Work Ethics</i></p> <p>12. <i>Delegation of authority among the Board of Directors</i></p> <p>13. <i>Segregation of Board of Directors' Duties</i></p> <ul style="list-style-type: none">» <i>General</i>» <i>President Director</i>» <i>Construction Director</i>» <i>Operation and Maintenance Director</i>» <i>Finance and Administration Director</i> <p>14. <i>The use of Professional Advice</i></p> <p>15. <i>Committees (teams) under the Board of Directors</i></p> <p>16. <i>Board of Directors Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none">» <i>General</i>» <i>Meeting Schedule and Agenda</i>» <i>Attendance Procedure</i>» <i>Discussion and Decision Making Procedure</i>» <i>Minutes of Board of Directors Meeting</i>» <i>Procedure of Minutes of Board of Directors Meeting</i> <p>17. <i>Corporate Secretary</i></p> |
|--|---|



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tugas dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Wewenang serta Hak Direksi

Secara garis besar, tugas dan kewajiban, tanggung jawab, wewenang, serta hak Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Umum

- » Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- » Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- » Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS.
- » Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. Laporan keuangan tersebut wajib diserahkan kepada auditor publik untuk diaudit.
- » Menyiapkan susunan organisasi pengurusan Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
- » Dalam hal penyelenggaraan RUPS, Direksi harus menyiapkan mekanisme RUPS yang memungkinkan Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- » Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Duties and Obligations, Responsibilities, Authorities and Rights of Board of Directors

In general, duties and obligations, responsibilities, authorities, and rights of the Board of Directors are the following:

1. General

- » Board of Directors has the obligation to implement all activities related to the management of the Company in the best interest of the Company and aligned to the Company's purpose and objectives, also as representative for the Company either inside and outside the court with regards to every aspect and every event with limitations as regulated in laws and regulations, Articles of Association and/or Decision of general meeting of Shareholders.
- » Prepare in due time the Company's Long Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP), and its amendments, also deliver it to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain GMS ratification.
- » Establish Annual Report as a form of the Company's management accountability, also the Company's financial documents, including annual finance report and management report to the GMS.
- » Establish accounting system based on Financial Accounting Standard and internal control principles, especially management, recording, storing, and supervising function. This financial report shall be submitted to public accountant for audit purposes.
- » Prepare a management organization scheme complete with details of duties.
- » In organizing GMS, the Board of Directors should set up a mechanism that allows the Shareholders to attend the GMS in accordance with the prevailing rules and regulations. Board of Directors should guarantee that the Shareholders get their rights in accordance with the Articles of Association, all decisions are legally made in the GMS and the prevailing rule and regulations.
- » In carrying out their duties, members of Board of Directors must adhere to the Company's Articles of Association and laws and regulations, and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.



2. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham
 - » Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - » Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
 - » Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - » Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Direktur tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
 - » Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa.
3. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
 - » Menyiapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan.
 - » Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
 - » Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - » Mencapai sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
 - » Mencapai target-target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kontrak manajemen dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI).
4. Terkait dengan Manajemen Risiko

Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Sistem manajemen risiko yang dibangun akan terdiri dari pentahapan-pentahapan sebagai berikut :

 - » Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi.
 - » Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko.
 - » Penanganan Risiko, yaitu proses untuk penetapan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial.

2. *Related to General Meeting of Shareholders*
 - » *Is required to hold and keep Shareholders Register and documents related to GMS pursuant to prevailing laws and regulations.*
 - » *Provide periodic report based on procedures and time pursuant to prevailing provisions as well as other reports at any time requested by Shareholders.*
 - » *Provide accountability and all information regarding the Company's condition presented in annual report including annual calculation in the General Meeting of Shareholders.*
 - » *Sign Annual Report; in the event that the Board of Directors fails to sign the Annual Report, an explanation there of must be submitted.*
 - » *Prepare notice of and hold Annual GMS and or Extraordinary GMS.*
3. *Related to Strategy and Work Plan*
 - » *Prepare Vision, Mission and Corporate Culture.*
 - » *Ensure the implementation of the Company's business and activities pursuant to its goals, purpose and activities.*
 - » *Prepare Company Budget and Work Plan (RKAP) and Long Term Plan (RJP) including other plans related to Company's business and activities implementation, as well as its submission to Board of Commissioners and Shareholders for their ratification.*
 - » *Achieve long term targets contained in the Company's Long Term Plan (RJPP).*
 - » *Achieve targets contained in the Company Budget and Work Plan (RKAP) and management contract in the form of Key Performance Indicator (KPI).*
4. *Related to Risk Management*

To build and implement an integrated corporate risk management program is part of GCG program implementation. Risk management system consists of the following stages:

 - » *Risk Identification, a process to identify relevant risk types and its potential.*
 - » *Risk Measurement, a process to measure the impact value and probability of risk identification result.*
 - » *Risk Management, a process to determine efforts to manage risk potential.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- » Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap beberapa faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko.
 - » Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan.
 - » Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern
- » Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
 - » Sistem Pengendalian Intern mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan Pengendalian Intern dalam Perusahaan
 - Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha
 - Aktivitas pengendalian
 - Sistem informasi dan komunikasi
 - *Monitoring*
 - » Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan.
6. Terkait Pengawasan Intern
- » Membentuk Satuan Pengawasan Intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - » Fungsi Pengawasan Intern, adalah:
 - Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
 - Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
 - » Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.
 - » Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di Perusahaan.
- » *Risk Monitoring, a process to monitor several factors suspected to draw out risk.*
 - » *Evaluation, a study process of overall adequacy of risk management activities needed to be done in the Company.*
 - » *Reporting and Disclosure, a process to report implemented risk management system by the Company and its disclosure to related parties pursuant to applicable provisions.*
5. *Related to Internal Control System*
- » *The Board of Directors must determine an effective Internal Control System to secure the Company's investment and assets.*
 - » *Internal Control System includes the following:*
 - *The Company's Internal Control Environment*
 - *Study and management of business risk*
 - *Control activities*
 - *Information and Communication System*
 - *Monitoring*
 - » *The Board of Directors prepares provisions regulating reporting mechanism of suspected Company's violations.*
6. *Related to Internal System*
- » *To establish Internal Audit Unit led by a head that is appointed and dismissed by President Director based on the Company's internal mechanism with Board of Commissioners' approval.*
 - » *Internal Supervision Function*
 - *Evaluation on the effectiveness of internal control implementation, risk management and corporate governance process, pursuant to laws and regulations and company's policies.*
 - *Examination and assessment on efficiency and effectiveness in financial, operations, human capital, information technology and other activities.*
 - » *The Board of Directors must submit report of internal supervision function periodically to the Board of Commissioners.*
 - » *The Board of Directors must maintain and evaluate the quality of internal supervision function in the Company.*



7. Terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pembukuan
 - » Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang mencakup prinsip-prinsip pengendalian intern, pegurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
 - » Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
8. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas secara kolegal namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi. Pembagian tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perusahaan.

7. *Related to Accounting and Bookkeeping System*
 - » *To develop accounting system pursuant to Financial Accounting Standard including internal control principles, management, documentation, safekeeping, and supervision.*
 - » *To procure and maintain bookkeeping and administration of the Company to ensure orderly bookkeeping, adequate working capital with efficient capital cost, strong and robust balance sheet structure, timely and accurate report and financial analysis presentation and other principles pursuant to prevailing regulations for the Company.*
8. *Related to Other Duties and Responsibilities*
To implement other responsibilities pursuant to provisions regulated in the Articles of Associations and those stipulated in General Meeting of Shareholders pursuant to legislations.

Segregation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities

The Directors are tasked collegially but in order to be more efficient and effective, segregation on duties and responsibility are applied within the members. The segregation of duties among the Directors does not eliminate collegial responsibilities in the management of the Company.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

William P. Sabandar (Direktur Utama) President Director

- Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
 - Berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
 - Memimpin, mengendalikan dan Mengoordinasikan semua kegiatan di seluruh Direktorat.
 - Menetapkan kebijakan Perusahaan yang mencakup seluruh aktivitas Perusahaan.
 - Menetapkan kebijakan dan strategi dibidang *governance*, *risk management* dan *internal control* serta mengevaluasi pelaksanaannya.
 - Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang akan ditimbulkan telah ditetapkan rencana mitigasinya dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
 - Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perusahaan.
 - Memberikan persetujuan rencana audit tahunan.
 - Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal.
 - Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pengawasan manajemen mutu.
 - Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perusahaan.
 - Memastikan pencapaian kinerja Perusahaan sesuai dengan target.
 - Memberikan laporan kepada *key stakeholders* mengenai progress pembangunan proyek MRT Jakarta.
 - Menyampaikan informasi Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan.
 - Jika salah seorang Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau Rapat Direksi dapat menunjuk salah seorang Anggota Direksi lainnya untuk dapat berhak dan berwenang atas nama Direktur yang bersangkutan serta mewakili Perusahaan.
 - Sebagai penanggungjawab penerapan dan pemantauan GCG, antara lain:
 - » Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku
 - » Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
 - Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil *assessment* penerapan GCG baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun secara *self-assessment*.
 - Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan masalah hukum.
 - Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha Perusahaan.
 - Melakukan *monitoring* Daftar Pemegang Saham dan pemutakhirannya.
-
- *Act for and on behalf of the Board of Directors and representing the Company.*
 - *Act as the Company's representative in coordinating with Stakeholders.*
 - *Lead, control and coordinate all activities throughout the Directorate.*
 - *Establish Company policies that cover all activities of the Company.*
 - *Establish policies and strategies in the field of governance, risk management and internal control and evaluate their implementation.*
 - *Ensure that all material risks and the impact that will be caused have been determined by the mitigation plan and reported to the Board of Commissioners periodically.*
 - *Ensure that the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Company.*
 - *Grant approval for the annual audit plan.*
 - *Responsible for supervising the follow-up of the findings of the audit implementation both internally and externally*
 - *Responsible for overseeing the follow-up of the results of quality management supervision.*
 - *Conduct overall supervision of the Company's performance implementation*
 - *Ensure the achievement of the Company's performance is in accordance with the target.*
 - *Provide reports to key stakeholders regarding the progress of the MRT Jakarta project development.*
 - *Deliver Company information to Stakeholders.*
 - *If one of the Directors is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, the President Director or Board of Directors Meeting may appoint one of the other Directors to be entitled and authorized on behalf of the Director concerned and representing the Company.*
 - *As the person in charge of implementing and monitoring GCG, among others:*
 - » *Monitor and maintain that the company's business activities do not deviate from the applicable provisions*
 - » *Monitor and maintain company compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties.*
 - *Responsible for overseeing the follow-up of the GCG implementation assessment results, both carried out by external parties and by self-assessment.*
 - *Handle activities related to handling legal problems.*
 - *Provide input from legal aspects to the Board of Directors, relating to the operationalization and business development of the Company.*
 - *Monitoring and updating the Shareholders' List.*



Silvia Halim (Direktur Konstruksi) Construction Director

Tugas Pokok:

1. Bertanggung jawab atas pembangunan prasarana dan sarana MRT Jakarta.
2. Pengendalian biaya, waktu, maupun kualitas dalam kegiatan pembangunan MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan Direksi.
3. Mengoordinasikan dan mengawasi semua pelaksanaan proyek yang berada dalam kewenangannya.

Aspek Teknis:

1. Pengendalian atas aspek-aspek strategis dari setiap kegiatan besar dan pelaksanaan *construction risk management*.
2. Menjamin terlaksananya secara efektif, baik pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan maupun pada tahap persiapan operasi prasarana dan sarana MRT Jakarta atas aspek berikut:
 - a. Rencana pengelolaan proyek.
 - b. Sistem kontrol dan pengendalian kualitas.
 - c. Manajemen risiko dan pengelolaan keselamatan.
3. Pelaksanaan kajian terhadap produk atau *output* pekerjaan.
4. Ketersediaan jadwal induk dari tahap perencanaan sampai selesainya pembangunan.
5. Mengoordinasikan konsultan yang terlibat pada masa konstruksi.
6. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan dalam perancangan dan spesifikasi teknis *Rolling Stock, Station Building & facilities*, dan berbagai *railway system* dan pekerjaan terkait lainnya.
7. Mengarahkan dan mengoordinasikan Manajer Proyek dalam rangka memastikan seluruh aktifitas telah berjalan dalam arah pencapaian tujuan pekerjaan serta dapat diselesaikan dalam batasan-batasan waktu dan pendanaan.
8. Memimpin penyusunan prosedur operasional untuk pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa prosedur telah memenuhi atau selaras dengan kebutuhan pencapaian sasaran proyek.
9. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kerapian administrasi kontrak konstruksi, termasuk kelengkapan perizinan dan lisensi terkait yang harus diperoleh.
10. Mengembangkan rencana jangka panjang organisasi dalam kaitan sasaran pertumbuhan kapasitas atau kemampuan melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Main Duties

1. *Is responsible for the development of infrastructures and modes of MRT Jakarta system.*
2. *Control costs, time, and quality of development activities of MRT Jakarta system in accordance with strategies set by the Board of Directors.*
3. *Coordinate and oversee all projects implementation under his/her authority.*

Technical Aspect :

1. *Control on strategic aspects in each major activity and construction risk management implementation.*
2. *Ensure effective implementation, in all stages, including preparation, implementation and preparation of MRT's facilities and modes, for the following aspect:*
 - a. *Project management plan.*
 - b. *Quality assurance and quality control system.*
 - c. *Risk and safety management.*
3. *Implement review on product or work output.*
4. *Master schedule availability from planning stage until construction completion.*
5. *Coordinate involved consultants during construction stage.*
6. *Coordinate with Operation and Maintenance Director in the design and technical specification of Rolling Stock, Station Building & Facilities, and various Railway Systems.*
7. *Direct and coordinate Project Manager in order to ensure the whole activities are going as planned to achieve the work objective, and able to finish within time limit and funding.*
8. *Prepare operational procedures for project or program implementation and ensure that the procedures has fulfilled or aligned with the achievements of project or program target achievements.*
9. *Responsible for the accuracy and order of administration of construction contract, including complete licensing and related license that must be acquired.*
10. *Develop long-term organizational plan related to the capacity growth target or the ability of implementing development work.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Silvia Halim (Direktur Konstruksi) Construction Director

Tanggung jawab Pada Tahap Pra Konstruksi:

1. Perencanaan Proyek
 - a. Melakukan finalisasi rencana kerja.
 - b. Menetapkan strategi pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
 - c. Menganalisis perkiraan biaya dan menetapkan rencana biaya proyek secara keseluruhan.
 - d. Membuat *master schedule proyek* secara keseluruhan.
 - e. Mengembangkan sistem atau prosedur komunikasi dan persetujuan.
 - f. Mempersiapkan perencanaan tentang aspek kesehatan dan keselamatan.
2. *Design Review*
 - a. Melakukan *review* terhadap spesifikasi desain dan gambar termasuk *scope of work* kontraktor dalam pelaksanaan proyek.
 - b. Mengidentifikasi pekerjaan utama, pekerjaan kritis, dan kesesuaian jadwal.
 - c. Sebagai representatif dari pemegang saham dan memberikan persetujuan terhadap seluruh dokumen konstruksi.
 - d. Mengoordinasikan arsitek dan konsultan.
 - e. Melakukan rapat koordinasi proyek.
 - f. Membantu dalam pemenuhan aspek hukum.
 - g. Melakukan *review* terhadap performa fasilitas pengelolaan limbah yang direncanakan.
 - h. Memperoleh persetujuan mengenai pengelolaan limbah.
 - i. Berkaitan dengan Pengadaan Konstruksi
3. Melaksanakan dan memastikan pengadaan kontrak konstruksi sesuai rencana sampai dengan penandatanganan kontrak.

Responsibility during Pre-Construction Stage

1. *Project Planning*
 - a. *Finalize working plan with government institution.*
 - b. *Decide procurement strategy related to project implementation.*
 - c. *Analyze cost estimates and establish overall project cost plans*
 - d. *Develop overall master schedule.*
 - e. *Develop system or communication and approval procedure.*
 - f. *Prepare planning on safety and health issues.*
2. *Design Review*
 - a. *Review on specifications of designs and drawings as well as scope of work of contractor in the project implementation.*
 - b. *Identify main and critical works, as well as schedule conformity.*
 - c. *Act as a representative from the shareholder and approve all construction documents.*
 - d. *Coordinate the architects and consultants.*
 - e. *Conduct project coordination meeting.*
 - f. *Support in fulfilling legal aspects.*
 - g. *Review the performance of waste management facilities as planned.*
 - h. *Obtain approval regarding waste management.*
 - i. *Related to Construction Procurement*
3. *Carry out and ensure the procurement of construction contracts as planned until the contract signing.*



Silvia Halim (Direktur Konstruksi)
Construction Director

Tanggung jawab Pada Tahap Konstruksi

1. Persiapan Proyek
 - a. Mengembangkan dan mengaplikasikan sistem pengendalian proyek.
 - b. Membantu dalam pemilihan dan pelaksanaan sistem manajemen proyek.
 - c. Memonitoring arus kas proyek.
 - d. Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi proyek.
2. Pembangunan
 - a. Mengawasi aktivitas konstruksi lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap kontrak dan peraturan.
 - b. Memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai aktivitas dan interaksi dengan pihak lain mencakup kontraktor, konsultan, sub-konsultan, dan supplier.
 - c. Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas.
 - d. Melakukan *review* dan mempersiapkan rekomendasi pembayaran atas seluruh tagihan.
 - e. Melakukan negosiasi terhadap jumlah pembayaran untuk *variation order*, *price adjustment*, *delay payment* dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan konstruksi.
 - f. Mengawasi progress konstruksi dan mengembangkan strategi penyesuaian jadwal.
 - g. Mengoordinasikan rapat pelaksanaan proyek dan sistem dokumentasinya.
 - h. Memberikan solusi atas perselisihan dalam aspek waktu, kepraktisan, maupun biaya.
 - i. Mendistribusikan laporan kemajuan bulanan.
 - j. Mengoordinasikan dokumentasi proyek secara keseluruhan.
3. Penyelesaian Proyek
 - a. Melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan pekerjaan seluruh konstruksi sebelum serah terima maupun habisnya masa jaminan kontraktor.
 - b. Mempersiapkan dan mengawasi pekerjaan yang perlu diperbaiki.
 - c. Melakukan *review* terhadap dokumen yang diberikan oleh kontraktor
 - d. Menetapkan penjadwalan penyelesaian proyek.

Responsibility during Construction Stage

1. *Project Preparation*
 - a. *Develop and apply project controlling system.*
 - b. *Assist in selecting and implementing project management system.*
 - c. *Prepare project cash flow.*
 - d. *Determine project information and communication procedures.*
2. *Construction*
 - a. *Monitor field construction activities and ensure its alignment with contract and regulation.*
 - b. *Report to the Governor through the President Director regarding activities and interaction with other parties, including contractor, consultant, sub-consultant, and supplier.*
 - c. *Develop and apply quality control planning and quality assurance and safety of work.*
 - d. *Conduct review and prepare payment recommendation for all invoices.*
 - e. *Negotiate the amount of payments for variation orders, price adjustments, delay payments and other payments related to construction work.*
 - f. *Monitor construction project and develop punctuality strategy.*
 - g. *Conduct and document the project coordination meetings.*
 - h. *Give solution on dispute in terms of timing, practicality and costs.*
 - i. *Distribute monthly progress report.*
 - j. *Maintain project documentation.*
3. *Project Finishing*
 - a. *Conduct inspection on the implementation of the entire construction work prior to handover or expiration of contractor guaranty.*
 - b. *Prepare and monitor the works that need improvement.*
 - c. *Review all necessary documents provided by contractors.*
 - d. *Schedule and assists project finishing.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) Operation and Maintenance Director

Tugas Pokok

1. Mengusulkan kebijakan tahapan pembangunan, survei, dan standarisasi desain kelayakan operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharannya.
2. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimum operasional (*service level*) MRT Jakarta.
3. Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, dari tahap *basic design* sampai serah terima pekerjaan sebelum dioperasikan.
4. Bertanggung jawab atas persiapan pengoperasian, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan oleh Direksi dan standar pelayanan minimum.
5. Kajian sistem dan struktur kelembagaan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan.
6. Membantu Direktur Konstruksi dalam perancangan dan spesifikasi teknis *Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal, dan Power System & OCS System*.

Main Duties

1. *Propose policy of phases of construction, survey, and standardization of operational feasibility design of facilities and infrastructure as well as its maintenance program.*
2. *Coordinate the preparation and stipulation of MRT Jakarta minimum service level standards.*
3. *Participate in responsibility of construction implementation, from Basic Design stage to its handover prior to its operation.*
4. *Responsible in the preparation of operation, maintenance, and management of MRT Jakarta's infrastructures and modes system pursuant to strategies determined by Directors and minimum service standard.*
5. *Review the system and structure of organization structure for operation and maintenance activities.*
6. *Assist the Construction Director in the design and technical specifications of Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal and Power Systems & OCS System.*

Aspek Teknis

1. Dalam posisi dan bertindak sebagai ahli dalam bidang keteknisan dan kereyakasan baik di lingkungan internal (tim) maupun dengan *technology provider*.
2. Memberikan dukungan teknis pada kegiatan pelaksanaan proyek guna memenuhi standar disain yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Memberikan solusi alternatif dalam rangka tercapainya kebutuhan (persyaratan) proyek secara lebih efisien.
4. Pengendalian Aspek Teknis
5. Mengoordinasikan setiap upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis dalam organisasi.
6. Menentukan, menginformasikan mensosialisasikan, dan menetapkan pelaksanaan standar atau ketentuan teknis.
7. Memonitor dan mengusulkan perubahan-perubahan atas solusi atau hasil desain dalam hubungannya terhadap lingkup, kemampuan atau kinerja teknis, efektifitas biaya, ketahanan atau umur layanan, dan kemudahan pemeliharaan.

Technical Aspects

1. *In the position and act as expert in technical and engineering either internal environment (team) and technology provider.*
2. *Give technical support to project implementation activities in order to fulfill design standards that has been previously determined.*
3. *Give alternative solution to achieve project requirement with more efficiency.*
4. *Technical Aspect Control*
5. *Coordinate each effort in order to increase technical knowledge within the organization.*
6. *Determine, inform (socialize), and decide standard application or technical requirement.*
7. *Monitor and recommend changes of solution or design results in relation with coverage, capability or technical performance, cost effectivity, endurance or service age, and convenient maintenance.*



Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)
Operation and Maintenance Director

Persiapan Operasi MRT Jakarta

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dalam rangka keselamatan kerja dan keselarasan dengan standar keselamatan kerja yang ada, termasuk keselamatan pengguna MRT Jakarta.
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan panduan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta yang berbasis pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang.
3. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam rangka penentuan standar pengujian prasarana atau sarana sebelum pengoperasian.
4. Memberi masukan kepada unit kerja SDM dalam rangka struktur organisasi dan sertifikasi bagi karyawan operasional dan pemeliharaan sesuai ketentuan.
5. Koordinasi dalam kesiapan data base asset terkait infrastruktur dan fasilitas kereta api, beserta sistem jadwal dan pengendalian pemeliharaan.
6. Menetapkan kebijakan investasi dan *outsourcing* perlengkapan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sistem MRT.
7. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi penumpang kereta dalam melakukan perjalanan.
8. Memberi masukan bagi unit kerja *Corporate Secretary* dalam rangka menyiapkan konsep sosialisasi atau pengenalan MRT Jakarta kepada masyarakat sebelum dan selama masa permulaan pengoperasian MRT Jakarta.

MRT System Operation Preparation

1. *Coordinate in preparation and policies development related to work safety and alignment with available work safety standards, including safety of MRT Jakarta passengers.*
2. *Coordinate in preparing the provisions and guidelines for the operation and maintenance of the MRT Jakarta based on regulations issued by authorized institutions.*
3. *Coordinate with authorized institution in order to determine facilities and infrastructure test standards prior to the operation.*
4. *Provide input to Human Capital work unit on organization structure and certification for operation and maintenance employees in accordance with the provisions.*
5. *Coordinate in terms of database assets readiness related to train facilities and infrastructure, along with scheduling system and maintenance controlling;*
6. *Arrange investment policy proposals and outsourcing for MRT System facilities and infrastructure maintenance equipment.*
7. *Coordinate with Central Government or Regional Government and related organization or institutions to prepare sustainable facility and service system for train passengers to commute.*
8. *Provide input to the Corporate Secretary work unit in order to prepare the concept of socialization or introduction of MRT Jakarta to the public prior and during the beginning of the MRT Jakarta operation.*

Aspek Perencanaan

1. Melakukan koordinasi dalam penetapan dan pengembangan standar teknis yang diperlukan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas MRT Jakarta.
2. Mempersiapkan tim yang berkemampuan dalam peningkatan kebutuhan perancangan terkait dengan operasi MRT Jakarta.
3. Turut serta memberi masukan atas perencanaan pembuatan paket pekerjaan konstruksi dalam kaitan dengan pelaksanaan desain dan pekerjaan konstruksi.
4. Membantu Direktorat Konstruksi dalam *me-review* spesifikasi, dan gambar baik perencanaan maupun gambar kerja pelaksanaan.
5. Membantu mengembangkan rencana jangka panjang Perusahaan guna menjamin *sustainability* dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta.
6. Melakukan koordinasi penyusunan dan pengkajian rancangan teknis operasional, pemeliharaan dan perawatan.
7. Memonitor dan merekomendasikan perubahan-perubahan hasil rancangan dalam kaitan dengan lingkup pembangunan, kinerja teknis, efektifitas biaya, usia layanan, dan aspek pemeliharaan.
8. Melakukan koordinasi antar bidang disiplin dalam rangka kesuksesan operasi MRT Jakarta.
9. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan pengurusan seluruh perijinan yang diperlukan dalam operasional MRT Jakarta.
10. Bertanggung jawab dalam perizinan terkait operasional, pemeliharaan dan perawatan.

Planning Aspect

1. *Coordinate in the establishment and development of technical standards needed in the operation and maintenance of the MRT Jakarta facility.*
2. *Prepare capable team to increase planning design related to MRT Jakarta operations.*
3. *Participate by giving input on the construction work model planning related to design application and construction work.*
4. *Assist Construction Directorate in reviewing the specification and drawings of both the planning and implementation of working drawings.*
5. *Develop the Company's long-term plans to ensure sustainability and continuity of the implementation and operation of the MRT system.*
6. *Coordinate on preparation and reviewing technical design of operations, maintenance and treatment.*
7. *Monitor and recommend changes to the design in relation to the scope of construction, technical performance, cost effectiveness, the age of the service, and maintenance aspects.*
8. *Coordinate inter-disciplinary fields towards successful achievement of MRT Jakarta project.*
9. *Responsible for the preparation and maintenance of all licenses required in the operation of MRT Jakarta.*
10. *Responsible for licensing related to operational, maintenance and treatment.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis) *Development and Business Support Director*

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi *Corporate Strategy & Planning*, Divisi *Business Support*, Divisi *Commercial & Retail* dan Divisi *Transit Oriented Development*.
 2. Melakukan koordinasi penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa.
 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
 4. Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan investasi Perusahaan yang bersifat pengembangan usaha dan pembinaan kerjasama usaha yang berkaitan dengan bidang usaha Perusahaan.
 5. Menetapkan kebijakan kemitraan strategis.
 6. Berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, khususnya dalam bidang *engineering* (keteknisan), untuk menyiapkan dokumen pengadaan.
 7. Melakukan koordinasi dalam mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan Perusahaan.
 8. Menetapkan formulasi TOD, untuk menjamin kesinambungan (*sustainability*) operasional MRT Jakarta (*potential future direction of system, recommend service and capital improvements*).
 9. Mencari peluang usaha sesuai dengan perencanaan jangka panjang Perusahaan dengan persetujuan Direksi.
 10. Membangun, mengorganisir, dan mengoordinasikan perencanaan dan strategi pengembangan usaha.
 11. Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan dan Administrasi dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan pengembangan usaha, khususnya penggunaan ruang dalam stasiun dan fasilitas kereta api, sampai tersusunnya model bisnis, perkiraan, dan validasi asumsi untuk kebutuhan pengembangan usaha.
 12. Mengupayakan jalur pengembangan usaha yang menguntungkan dan tetap berada pada kondisi realistis dan sehat, selaras dengan bisnis utama Perusahaan.
 13. Menetapkan kebijakan tentang penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan.
 14. Melakukan koordinasi dalam merencana investasi jangka panjang Perusahaan.
 15. Mengawasi atas biaya pengembangan usaha dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka perubahan rencana maupun implementasi pengembangan usaha.
 16. Mengembangkan dan mengkomunikasikan pemahaman strategi bisnis Perusahaan.
 17. Mengembangkan rencana jangka panjang Perusahaan guna menjamin *sustainability* dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta.
1. *Coordinate the preparation and stipulation of policies for the implementation of all activities related to the functions of the Corporate Strategy & Planning Division, Business Support Division, Commercial & Retail Division and Transit Oriented Development Division.*
 2. *Coordinate the preparation of general plans for the procurement of goods and services.*
 3. *Coordinate the implementation and evaluation of the procurement of goods and services.*
 4. *Coordinate in the formulation of policies regarding the management of the Company's investment in the form of business development and fostering business cooperation related to the Company's business sector.*
 5. *Establish strategic partnership policies.*
 6. *Coordinate with the Construction Director and Operation and Maintenance Director, especially in the field of engineering (technical), to prepare procurement documents.*
 7. *Coordinate in developing strategic partnerships with relevant stakeholders in the framework of developing the Company.*
 8. *Establishing a TOD formulation, to ensure the sustainability of MRT Jakarta operations (potential future direction of system, recommend service and capital improvements).*
 9. *Looking for business opportunities in accordance with the Company's long-term planning with the approval of the Board of Directors.*
 10. *Build, organize and coordinate business development planning and strategies.*
 11. *Coordinate with the Finance and Administration Director in the formulation of strategies and implementation of business development, in particular the use of space in railway stations and facilities, to the arrangement of business models, estimates, and validation of assumptions for business development needs.*
 12. *Strive for a profitable business development path and remain in a realistic and healthy condition, in line with the Company's main business.*
 13. *Establish policies regarding the preparation of the Company's Key Performance Indicator (KPI).*
 14. *Coordinate in planning the Company's long-term investment.*
 15. *Oversee the costs of business development and make efforts needed in the context of changing plans and implementing business development.*
 16. *Develop and communicate understanding of the Company's business strategy.*
 17. *Develop the Company's long-term plan to ensure the sustainability and continuity of the MRT Jakarta operation.*



Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) Finance and Administration Director

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi *Information System & Technology*, *Finance & Accounting* dan Divisi *Human Capital*, dan berkoordinasi dengan Direksi.
2. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Direktorat Keuangan dan Administrasi.
3. Menetapkan kebijakan anggaran, keuangan dan akuntansi Perusahaan.
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Perusahaan.
5. Melakukan pengendalian anggaran, biaya dan pendapatan Perusahaan.
6. Melakukan koordinasi laporan keuangan dan laporan RKAP
7. Mengendalikan dan mengoordinasikan fungsi-fungsi administratif kegiatan impor keperluan konstruksi MRT Jakarta.
8. Menetapkan kebijakan teknologi dan sistem informasi Perusahaan.
9. Melakukan pengembangan teknologi dan sistem informasi Perusahaan.
10. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi dan sistem informasi Perusahaan.
11. Menetapkan kebijakan terkait Sumber Daya Manusia
12. Menetapkan perencanaan pelatihan pegawai dan hubungan antar pegawai Perusahaan.
13. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan dan penempatan.
14. Melakukan koordinasi proses penilaian kinerja karyawan.
15. Melakukan koordinasi dalam penerapan sistem *reward & punishment* atas prestasi kerja dan pelanggaran di Perusahaan.
16. Melakukan koordinasi penyusunan struktur organisasi dan penempatan personel disetiap jabatan yang dilengkapi dengan uraian pekerjaan (*job description*).
17. Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan manajemen suksesi atas berbagai jabatan strategis di Perusahaan.
18. Melakukan koordinasi penetapan tolok ukur kinerja, insentif dan penghargaan lain di Perusahaan.
19. Melakukan evaluasi beban kerja disetiap Unit Kerja di Perusahaan.

1. *Coordinate the preparation and stipulation of policies for the implementation of all activities related to the functions of the Information System & Technology Division, Finance & Accounting and Human Capital Division, and coordinate with the Directors.*
2. *Supervise and evaluate all activities related to the functions of the Directorate of Finance and Administration.*
3. *Establish the Company's budget, financial and accounting policies.*
4. *Carry out supervision and evaluation of the Company's budget realization.*
5. *Carry out control of the Company's budget, costs and revenues.*
6. *Coordinate financial statements and RKAP reports*
7. *Control and coordinate the administrative functions of import activities for the MRT Jakarta construction.*
8. *Establish the Company's technology and information systems.*
9. *Develop the Company's information technology and systems.*
10. *Supervise and evaluate the application of the Company's information technology and systems.*
11. *Establish policies related to Human Capital*
12. *Establish employee training plans and relationships between Company employees.*
13. *Responsible for managing Human Capital, starting from recruitment, development and placement.*
14. *Coordinate the employee performance appraisal process.*
15. *Coordinate in the implementation of a reward & punishment system for work performance and violations in the Company.*
16. *Coordinate the preparation of the organization structure and placement of personnel in each position equipped with job descriptions.*
17. *Coordinate in planning and developing succession management for various strategic positions in the Company.*
18. *Coordinate the determination of performance benchmarks, incentives and other awards in the Company.*
19. *Evaluate workloads in each Work Unit in the Company.*

Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perusahaan. Program Pengenalan meliputi:

- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan.

Company Orientation Program

Member of the Board of Directors who is appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company. The orientation program includes:

- *Description of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors based on law.*
- *Implementation of the principles of Good Corporate Governance by the Company.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
- *Description about the Company related to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and longterm business plans, competitive position, risks and other strategic issues.*
- *Information relating to the delegated authority, internal and external audit, internal control system and policies as well as the Audit Committee.*

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama; atau Komisaris Utama atau Direksi lainnya jika Direktur Utama berhalangan.

The responsibility to organize the orientation program is borne by the President Director; or President Commissioner or other Directors if the President Director is unavailable.

Di tahun 2018 Program Pengenalan Perusahaan terhadap anggota Direksi yang baru dilakukan pada tanggal 12 Desember 2018 di kantor Perusahaan yang diikuti oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan dan Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis yang baru.

In 2018 the Company Orientation Program to the new members of the Board of Directors was held on December 12, 2018 in the Company's office followed by the Operation and Maintenance Director and the new Development and Business Support Director.

Program Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas

Competency and Capability Improvement Program

Program peningkatan kompetensi dan kapabilitas untuk Direksi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi. Program ini dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Kepada anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kompetensi dan kapabilitas diminta untuk berbagi informasi hasil program dengan anggota Direksi lainnya.

Competency and capability improvement program for the Board of Directors is carried out in order to improve the work effectiveness of Board of Directors. The program is included in the Company's Work Plan and Budget. Members of the Board of Directors that have participated in a competence and capability enhancement program are required to share information from the program with other members of Board of Directors.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Information on competency improvement carried out by the Board of Directors throughout 2018 has been presented in "Company Profile" chapter in this annual report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2018

Brief Report on Implementation of The Board of Directors' Duties and Responsibilities in 2018

Selama tahun 2018, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi.

During 2018, the Board of Directors issued various decisions in the fields of operations, finance, and several business support through policy instruments in the form of Directors' Decrees, Directors Regulations, Circulars, and Directors Instruction.



Peraturan Direksi

Regulation of The Board of Directors

PER/001/BOD-MRT/I/2018	30 Januari 2018 <i>January 30, 2018</i>	Perubahan Peraturan Direksi No. 012 Tahun 2017 tentang Pedoman Korespondensi <i>Amendment to Directors' Regulation Number 012 of 2017 concerning Correspondence Guidelines</i>
PER/002/BOD-MRT/I/2018	31 Januari 2018 <i>January 31, 2018</i>	Penetapan Pedoman Penggunaan Sistem Aplikasi <i>Business Travel Request</i> (BTR) <i>Determination of Guidelines for Using Business Travel Request (BTR) Application Systems</i>
PER/003/BOD-MRT/I/2018	31 Januari 2018 <i>January 31, 2018</i>	Penetapan <i>Core Values</i> Perusahaan dan <i>Leadership Competencies</i> <i>Establishment of the Company's Core Values and Leadership Competencies</i>
PER/005/BOD-MRT/III/2018	29 Maret 2018 <i>March 29, 2018</i>	Pedoman Tata Laksana Seleksi untuk Mitra Pengusahaan Retail di Stasiun MRTJ Fase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) <i>Guidelines for Selection Management for Retail Business Partners at Phase I MRTJ Station (Lebak Bulus - Bundaran HI)</i>
PER/006/BOD-MRT/IV/2018	9 April 2018 <i>April 09, 2018</i>	Peniadaan Uang Harian untuk Pelatihan bagi Karyawan <i>Daily Allowance Write-off on trainings for employees</i>
PER/007/BOD-MRT/IV/2018	20 April 2018 <i>April 20, 2018</i>	Pedoman Pengendalian Dokumen <i>Document Control Guidelines</i>
PER/007-1/BOD-MRT/IV/2018	30 April 2018 <i>April 30, 2018</i>	Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) <i>Code of Conduct</i>
PER/008/BOD-MRT/V/2018	18 Mei 2018 <i>May 18, 2018</i>	Perubahan atas Keputusan Direksi PT MRT Jakarta No. 062 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Keuangan, Akuntansi dan Anggaran <i>Amendment on Board of Directors' Decree of PT MRT Jakarta Number 062 of 2016 concerning Determination of Standard Operating Procedures for Finance, Accounting and Budget</i>
PER/009/BOD-MRT/V/2018	31 Mei 2018 <i>May 31, 2018</i>	Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Karyawan <i>Overseas Official Travel for Employees</i>
PER/010/BOD-MRT/VI/2018	11 Juni 2018 <i>June 11, 2018</i>	Komponen Harga dan Besaran Harga Sewa Retail MRTJ Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) <i>Components of Price and Amount of Rental Price for Retail of MRTJ Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)</i>
PER/011/BOD-MRT/VI/2018	12 Juni 2018 <i>June 12, 2018</i>	Maskot Utama "Marti" <i>The "Marti" mascot</i>
PER/012/BOD-MRT/VI/2018	12 Juni 2018 <i>June 12, 2018</i>	Kebijakan Anugerah Masa Bakti <i>Service Period Award Policy</i>
PER/013/BOD-MRT/VI/2018	29 Juni 2018 <i>June 29, 2018</i>	IT Roadmap dan Blueprint <i>IT Roadmap and Blueprint</i>
PER/014/BOD-MRT/VI/2018	29 Juni 2018 <i>June 29, 2018</i>	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>) <i>Code of Corporate Governance</i>
PER/015/BOD-MRT/VII/2018	18 Juli 2018 <i>July 18, 2018</i>	Pedoman Tata Laksana Pemilihan <i>Exclusive Naming Right</i> di Stasiun MRTJ Fase 1 <i>Guidelines for the Selection of Exclusive Naming Right at Phase 1 MRTJ Station</i>
PER/016/BOD-MRT/VII/2018	31 Juli 2018 <i>July 31, 2018</i>	Pedoman Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Interkoneksi Gedung Pihak Ketiga dan Stasiun MRTJ kepada Kontraktor <i>Payment Mechanism Guidelines for Third Party Building Interconnection Construction and MRTJ Station to Contractors</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Peraturan Direksi Regulation of The Board of Directors		
PER/017/BOD-MRT/VIII/2018	13 Agustus 2018 August 13, 2018	Besaran Honorarium Narasumber dan Rapat bagi Pihak Eksternal Honorary Amount of Guest Speakers and Meetings for External Parties
PER/018/BOD-MRT/VIII/2018	13 Agustus 2018 August 13, 2018	Perubahan Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Amendment to Directors Regulation No. 007-1 Year 2018 concerning Code of Conduct
PER/019/BOD-MRT/VIII/2018	31 Agustus 2018 August 31, 2018	Pedoman Pemagangan Apprenticeship Guidelines
PER/020/BOD-MRT/VIII/2018	31 Agustus 2018 August 31, 2018	Sistem Remunerasi Karyawan Employee Remuneration System
PER/021/BOD-MRT/IX/2018	14 September 2018 September 14, 2018	Pedoman Tata Kelola Human Capital Guidelines for Governance of Human Capital
PER/022/BOD-MRT/IX/2018	14 September 2018 September 14, 2018	Job Profile Bagi Karyawan Job Profile for Employees
PER/023/BOD-MRT/IX/2018	28 September 2018 September 28, 2018	Kewajiban menjalankan <i>three lines of defense</i> bagi pejabat struktural The obligation to run the three lines of defense for structural officials
PER/024/BOD-MRT/IX/2018	28 September 2018 September 28, 2018	Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sistem Manajemen Pengamanan Implementation of Occupational Safety and Health Management System and Security Management System
PER/025/BOD-MRT/X/2018	25 Oktober 2018 October 25, 2018	Pedoman Pengelolaan Proyek (<i>Project Management Manual</i>) pada pembangunan MRT Jakarta Project Management Guidelines on the MRT Jakarta construction
PER/026/BOD-MRT/X/2018	31 Oktober 2018 October 31, 2018	Uang Makan bagi Karyawan Food Allowance for Employees
PER/027/BOD-MRT/X/2018	31 Oktober 2018 October 31, 2018	Uang Transportasi bagi Karyawan Transportation Allowance for Employees
PER/028/BOD-MRT/XI/2018	21 November 2018 November 21, 2018	Sistem Remunerasi Karyawan Employee Remuneration System
PER/029/BOD-MRT/XI/2018	21 November 2018 November 21, 2018	Pedoman Struktur Skala Upah Pokok Bagi Karyawan Golongan Manajemen Guidelines for Structure of Basic Wage Scale for Employees at Management Group
PER/030/BOD-MRT/XI/2018	21 November 2018 November 21, 2018	Pedoman Struktur Skala Upah Pokok Bagi Karyawan Golongan Non-Manajemen Guidelines for Structure of Basic Wage Scale for employees at Non-Management Group
PER/031/BOD-MRT/XI/2018	23 November 2018 November 23, 2018	Pedoman Sistem Manajemen Mutu pada Pembangunan MRT Jakarta di lingkungan Direktorat Quality Management System Guidelines on MRT Jakarta Development within the Directorate
PER/032/BOD-MRT/XI/2018	23 November 2018 November 23, 2018	Rencana Manajemen Mutu Proyek pada pembangunan MRTJ Project Quality Management Plan for MRTJ development
PER/033/BOD-MRT/XI/2018	27 November 2018 November 27, 2018	Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy



Peraturan Direksi <i>Regulation of The Board of Directors</i>		
PER/034/BOD-MRT/XII/2018	21 Desember 2018 <i>December 21, 2018</i>	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian serta Sistem Manajemen Pengamanan <i>Occupational Safety and Health Management System, Railway Safety Management System and Security Management System</i>
PER/035/BOD-MRT/XII/2018	26 Desember 2018 <i>December 26, 2018</i>	Perubahan terhadap Pedoman Pemagangan <i>Changes on Apprenticeship Guidelines</i>
PER/036/BOD-MRT/XII/2018	28 Desember 2018 <i>December 28, 2018</i>	Pedoman Keuangan, Akuntansi dan Anggaran <i>Financial, Accounting and Budget Guidelines</i>
Surat Keputusan Direksi <i>Decision Letter of The Board of Directors</i>		
SK/001/BOD-MRT/I/2018	15 Januari 2018 <i>January 15, 2018</i>	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>
SK/002/BOD-MRT/I/2018	15 Januari 2018 <i>January 15, 2018</i>	Penempatan Personel dalam Struktur Organisasi <i>Placement of Personnel in Organization Structure</i>
SK/058/BOD-MRT/V/2018	28 Mei 2018 <i>May 28, 2018</i>	Pedoman Penggunaan Tenaga Ahli <i>Guidelines for the Use of Experts</i>
SK/059/BOD-MRT/V/2018	31 Mei 2018 <i>May 31, 2018</i>	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>
SK/060/BOD-MRT/V/2018	31 Mei 2018 <i>May 31, 2018</i>	Perubahan Penempatan Personel dalam Struktur Organisasi <i>Changes in Personnel Placement in Organization Structure</i>
SK/062/BOD-MRT/VI/2018	29 Juni 2018 <i>June 29, 2018</i>	Pembentukan Komite Manajemen Risiko <i>Establishment of Risk Management Committee</i>
SK/072/BOD-MRT/VI/2018	6 Agustus 2018 <i>August 06, 2018</i>	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Liaison Officer (LO) <i>Determination of Information and Documentation Management Officer (PPID) and Liaison Officer (LO)</i>
SK/115/BOD-MRT/XII/2018	21 Desember 2018 <i>December 21, 2018</i>	Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Paket Pekerjaan CP 101-CP 103 Proyek Pembangunan MRT Jakarta <i>Determination of Procurement Result Examination Officer (PPHP) for the Work Package of CP 101-CP 103 of the MRT Jakarta Construction Project</i>
SK/119/BOD-MRT/XII/2018	27 Desember 2018 <i>December 27, 2018</i>	Struktur Organisasi <i>Organization structure</i>
Surat Edaran <i>Circular Letter</i>		
SE/001/BOD-MRT/I/2018	10 Januari 2018 <i>January 10, 2018</i>	Penyimpanan dokumen Perusahaan <i>Company Bookkeeping System</i>
SE/003/BOD-MRT/IV/2018	19 April 2018 <i>April 19, 2018</i>	Alur Penerbitan Produk Hukum Perusahaan <i>Issuance Flow of Company Legal Products</i>
SE/009/BOD-MRT/IX/2018	31 Oktober 2018 <i>October 31, 2018</i>	Pengisian Lembar Analisa GRC <i>Replenishment of GRC Analysis Gazette</i>
SE/010/BOD-MRT/XI/2018	30 November 2018 <i>November 30, 2018</i>	Pedoman Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko secara Mandiri <i>Measurement Guidelines for Risk Management Maturity Levels independently</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Informasi tentang Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki komite di bawah Direksi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait pelaksanaan tugas dan penilaian komite di bawah Direksi.

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Terkait Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan mengenai tiap keputusan dan kebijakan Direksi yang diambil dalam rangka pengurusan Perusahaan.
6. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1. Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:

Information on Committees Under the Board of Directors

Until the end of 2018, the Company does not have a committee under the Board of Directors. Thus, there is no information regarding duties and assessment implementation of committees under the Board of Directors.

TRANSPARENCY OF INFORMATION ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Policy Related To Working Relationships Between The Board Of Commissioners And Board Of Directors

The working relationship of Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the following principles:

1. *Board of Commissioners respects the responsibilities and authority of Board of Directors in managing the Company as stipulated in the legislation and the Company's Articles of Association.*
2. *Board of Directors respects the responsibilities and authorities of Board of Commissioners for overseeing and providing advice on policy and the course of management of the Company.*
3. *Each working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors is a formal institutional relationship, therefore it is always based on a standard mechanism or accountable correspondence.*
4. *Board of Commissioners of the Company is entitled to obtain accurate and complete information in a timely manner.*
5. *Board of Commissioners is entitled to get a report on all decisions and policies that are taken by Board of Directors in managing the Company.*
6. *Board of Directors is responsible for the accuracy, completeness, and timeliness of information delivery to the Company's Board of Commissioners.*

The working relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors is the relationship of check and balance in order to achieve the Company's objectives. In connection with this matter, pursuant to their respective functions, the Board of Commissioners and Board of Directors have a strong commitment to jointly:

1. *Realize the Company's goal to achieve business continuity in the long term, as reflected on:*



- a. Tercapainya *Value of the Firm* sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham;
 - b. Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen risiko;
 - c. Terlindunginya kepentingan *Stakeholders* secara wajar;
 - d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perusahaan;
 - e. Terpenuhinya pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perusahaan:
 - a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit-unit dalam organisasi Perusahaan dan personalianya;
 - d. Struktur organisasi Perusahaan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perusahaan.

- a. *The achievement of Value of the Firm as expected by Shareholders;*
 - b. *Effective and efficient implementation of internal control and risk management;*
 - c. *The protection of the interests of stakeholders in a reasonable manner;*
 - d. *Proper succession and management continuity throughout the organization of the Company;*
 - e. *The fulfillment of the implementation of Good Corporate Governance.*
2. *Agree on below issues to support the achievement of the vision, mission, and strategy of the Company:*
 - a. *Business target, strategy, long-term plan, and annual work plan and budget;*
 - b. *Policies to comply with legislation and the Company's Articles of Association;*
 - c. *Policies and assessment method on the performance of the Company, units in the organization, and its personnel;*
 - d. *The organization structure of the Company at the executive level that supports the achievement of the Company's business objectives.*

Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan BUMD yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar yang tinggi sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan GCG tahun buku 2017 dilakukan dengan parameter yang dikembangkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil *Assessment* GCG yang dilakukan di tahun buku 2017 tersebut, Perusahaan memperoleh skor sebesar 80,45 dengan predikat "Baik", di mana aspek Dewan Komisaris mencatat pencapaian 74,92 dan aspek Direksi sebesar 76,92.

Assessment of GCG Implementation For Aspect of The Board of Commissioners And Board of Directors

As the main organ in the Company, the Board of Commissioners and Directors have a central role in the growth of the Company. The assessment of these two organs is a necessity, especially because the Company is a Regional-Owned Enterprise (BUMD) that is directed to apply the principles of GCG to high standards while at the same time evaluating the implementation.

The GCG implementation assessment of 2017 fiscal year was carried out with parameters developed by the DKI Jakarta Provincial Financial and Development Supervisory Board (BPKP). Based on the results of the GCG Assessment conducted in the 2017 fiscal year, the Company obtained a score of 80.45 with "Good" predicate, where the aspects of the Board of Commissioners recorded achievement of 74.92 and aspects of the Board of Directors were 76.92.

Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	:	Assessment
Assessor/Penilai <i>Assessor</i>	:	BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>BPKP Representative of DKI Jakarta Province</i>
Periode Penerapan <i>Period of Implementation</i>	:	1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 <i>January 01, 2017 up to December 31, 2017</i>
Tahun Ukur <i>Measuring Year</i>	:	Tahun Buku 2017 <i>2017 Fiscal Year</i>
Waktu Pengukuran <i>Measuring Time</i>	:	3 November 2017 - 16 Januari 2018 <i>November 03, 2017 - January 16, 2018</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

Assessment results of the Company's GCG implementation for the 2017 fiscal year are as follows

Aspek Pengujian <i>Assessment Aspects</i>		Bobot <i>Value</i>	Pencapaian Tahun Buku 2017 <i>Achievement of 2017 Fiscal Year</i>	
			Capaian Aktual <i>Actual Achievement</i>	Capaian Achievement (%)
I	Komitmen <i>Commitment</i>	15,00	11,16	74,40
II	Kebijakan <i>Policies</i>	10,00	8,25	82,46
III	Partisipan GCG <i>GCG Participants</i>			
	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	24,00	21,44	89,35
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	18,00	13,49	74,92
	Komite Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Committee</i>	5,00	3,53	70,69
	Direksi <i>Board of Directors</i>	14,00	10,77	76,92
	Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i>	5,00	3,68	73,66
	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	4,00	3,45	86,21
IV	Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i>	5,00	4,68	93,56
Skor Keseluruhan <i>Total Score</i>		100,00	80,45	80,45
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>Qualification of GCG Implementation Quality</i>		"Baik"		

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Remarks: 0-50: Not Good | 50-60: Less Good | 60-75: Good enough | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Berikut rekomendasi dalam area peningkatan atau Area of Improvement implementasi GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, serta tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2018.

Below are recommendations in the Area of Improvement of GCG implementation for aspects of the Board of Commissioners and Directors, and their follow-up until the end of 2018.



Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Results of Recommendations on GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Available in GCG Implementation Assessment Recommendations of 2017 Fiscal Year</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) <i>Follow-Up That Has Been Done / Follow-Up Plan (If It Is A Recommendation For 2017 GCG Implementation Assessment)</i>	
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>			
1	Menyempurnakan pedoman program pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat dengan menambahkan muatan pendelegasian wewenang <i>Refining the orientation program guidelines for the newly appointed Board of Commissioners by adding a delegation of authority</i>	x	
2	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan pelaksanaan program pengenalan bagi Dewan Komisaris <i>Giving instruction to the Secretary of the Board of Commissioners to document the implementation of the introduction program for the Board of Commissioners</i>	x	
3	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan pelaksanaan program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris <i>Giving instruction to the Secretary of the Board of Commissioners to document the implementation of the Board of Commissioners' competence development program</i>	x	
4	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan pembahasan atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders. <i>Giving instruction to the Secretary of the Board of Commissioners to document the discussion of suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders.</i>	x	
5	Menginstruksikan kepada Komite Audit untuk mendokumentasikan pembahasan mengenai hasil audit eksternal dan audit internal <i>Giving instruction to Audit Committee to document discussions on external audits and internal audits findings</i>	x	
6	Menyampaikan rencana kerja tahunan secara tertulis kepada Pemegang Saham <i>Submitting an annual work plan in writing to the Shareholders</i>	x	
7	Dewan Komisaris memberikan arahan atas rancangan RJPP/ RJMP yang disusun Direksi <i>Board of Commissioners provides direction on the design of RJPP / RJMP prepared by the Directors</i>	x	
8	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan arahan mengenai Sistem Teknologi Informasi <i>Giving instruction to the Secretary of the Board of Commissioners to document the directions regarding the Information Technology System</i>	√	Arahan Dewan Komisaris terkait sistem teknologi informasi telah didokumentasikan dalam notulen rapat. <i>The Board of Commissioners' directive regarding the information technology system has been documented in the minutes of meeting.</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

<p>Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Results of Recommendations on GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year</i></p>	<p>Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Available in GCG Implementation Assessment Recommendations of 2017 Fiscal Year</i></p>	<p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) <i>Follow-Up That Has Been Done / Follow-Up Plan (If It Is A Recommendation For 2017 GCG Implementation Assessment)</i></p>
<p>9 Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham <i>Board of Commissioners plays an active role in proposing candidates for members of the Board of Directors to Shareholders</i></p>	<p>x</p>	
<p>10 Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan <i>Conducting individual performance assessment of the Directors based on predetermined criteria</i></p>	<p>√</p>	
<p>11 Memasukkan kegiatan pemantauan GCG sebagai bagian dari rencana kerja tahunan Dewan Komisaris <i>incorporate GCG monitoring activities as part of the Board of Commissioners annual work plan</i></p>	<p>√</p>	<p>Memasukan pemantauan penerapan GCG menjadi salah satu rencana kerja Dewan Komisaris <i>Conduct documentation on analysis of performance achievements and efforts to improve strategies based on the results of analysis conducted by direct supervisors</i></p>
<p>12 Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris (self assessment) <i>Measuring and assessing the performance of the Board of Commissioners (self assessment)</i></p>	<p>√</p>	
<p>13 Memberikan persetujuan (validasi) atas risalah rapat sesuai dengan ketentuan, yaitu maksimal 14 hari setelah pengiriman risalah <i>Granting approval (validation) of minutes of meeting in accordance with the provisions, namely a maximum of 14 days after the delivery of the minutes</i></p>	<p>X</p>	
<p>14 Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar mencantumkan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat ke dalam notulen rapat <i>Giving instruction to the Secretary of the Board of Commissioners to include the reasons for the Board of Commissioners' absence in the meeting in the minutes of meeting</i></p>	<p>x</p>	
<p>16 Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan komisaris agar memasukkan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris ke dalam risalah rapat <i>Giving instruction to the Secretary of the Board of Commissioners to include follow-up monitoring of the results of Board of Commissioners' decisions, recommendations and directives into the minutes of meeting</i></p>	<p>X</p>	



Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Results of Recommendations on GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Available in GCG Implementation Assessment Recommendations of 2017 Fiscal Year</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) <i>Follow-Up That Has Been Done / Follow-Up Plan (If It Is A Recommendation For 2017 GCG Implementation Assessment)</i>	
Direksi <i>Board of Directors</i>			
1	Menyempurnakan pedoman program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat dengan menambahkan muatran pendelegasian wewenang <i>Refining the orientation program guidelines for newly appointed Directors by adding the delegation of authority</i>	x	
2	Melaksanakan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat minimal memuat: pelaksanaan prinsip GCG, gambaran tentang BUMD, pendelegasian wewenang, sistem dan kebijakan pengendalian internal, tugas dan tanggung jawab Direksi <i>Carrying out an orientation program for newly appointed Directors must at least contain: the implementation of GCG principles, a description of BUMD, delegation of authority, systems and internal control policies, duties and responsibilities of the Board of Directors</i>	√	Telah dilakukan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat. <i>An orientation program has been carried out for newly appointed Directors.</i>
3	Mengikuti program peningkatan kapabilitas yang terkait pelaksanaan tugas <i>Joining the capability improvement program related to the duties implementation</i>	x	
4	Mengesahkan draft <i>Board Manual</i> yang didalamnya memuat uraian tugas Direksi <i>Ratifying the Board Manual draft, which contains the description of the Board of Directors' duties</i>	x	
5	Melengkapi Peraturan Direksi tentang penggolongan <i>Grade</i> Karyawan di lingkungan PT MRT Jakarta dengan lampiran yang mengatur antara lain metodologi penilaian, faktor-faktor penilaian, proses penilaian, waktu penilaian <i>Complementing the Directors' Regulations regarding Grade classification of Employees within PT MRT Jakarta with attachments governing, among other things, valuation methodologies, assessment factors, assessment processes, assessment times</i>	x	
6	Menyampaikan rencana (<i>list</i>) orang yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan kepada Dewan Komisaris <i>Submitting plans (list) of people who have the competence to occupy positions to the Board of Commissioners</i>	X	
7	Menginstruksikan kepada Kepala Divisi Internal Audit & <i>Control</i> menuangkan penilain atas pegendalian tingkat aktivitas dalam laporan hasil pemeriksaan <i>Giving instruction to the Head of Internal Audit & Control Division to write an assessment of the level of activity control in the audit report</i>	X	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Results of Recommendations on GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year</i>		Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Available in GCG Implementation Assessment Recommendations of 2017 Fiscal Year</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) <i>Follow-Up That Has Been Done / Follow-Up Plan (If It Is A Recommendation For 2017 GCG Implementation Assessment)</i>
8	Mengesahkan SPI Charter dengan muatan yang telah disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku <i>Validating SPI Charter with refined content in accordance with applicable regulations</i>	X	
9	Meningkatkan penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan <i>Improving the implementation of risk management in accordance with the stipulated policies</i>	X	
10	Melengkapi kebijakan teknologi informasi dengan muatan pelaporan <i>Completing information technology policies with reporting content</i>	X	
11	Mengesahkan kebijakan mengenai hak-hak konsumen <i>Validating policies regarding consumer rights</i>	X	
12	Mengesahkan operational manual <i>Validating operational manual</i>	X	
13	Mendorong percepatan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan pihak-pihak terkait untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur <i>Encouraging the acceleration of Minimum Service Standards (SPM) draft discussion with relevant parties to be stipulated as a Governor Regulation</i>	X	
14	Menetapkan kebijakan mengenai hak-hak pelanggan dan kewajiban pelanggan <i>Establishing policies regarding customer rights and customer obligations</i>	√	Kebijakan mengenai hak-hak pelanggan telah disusun, namun belum disahkan <i>Policies regarding customer rights have been prepared, but have not yet been ratified</i>
15	Menyempurnakan job profile dengan uraian tugas unit kerja yang akan melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan <i>Improving job profile with job unit description of work that will carry out the follow-up results of customer satisfaction surveys</i>	X	
16	Melakukan evaluasi terhadap pemasok <i>Evaluating suppliers</i>	√	Evaluasi terhadap kinerja pemasok akan dilakukan di tahun 2019 melalui Vendor Management System (VMS) yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan skema evaluasi kinerja pemasok. <i>Evaluation on supplier performance will be carried out in 2019 through the Vendor Management System (VMS) which is currently in the stage of establishing a supplier performance evaluation scheme.</i>



Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Results of Recommendations on GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Available in GCG Implementation Assessment Recommendations of 2017 Fiscal Year</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) <i>Follow-Up That Has Been Done / Follow-Up Plan (If It Is A Recommendation For 2017 GCG Implementation Assessment)</i>
17 Melakukan survei kepuasan pemasok secara berkala <i>Periodically conduct supplier satisfaction surveys</i>	√	Akan dilakukan di tahun 2019, di tahun 2018 sedang dalam tahap penyusunan tools dan aspek - aspek yang diperlukan dalam survey kepuasan pemasok. <i>Will be carried out in 2019, in 2018 is in the stage of preparing tools and aspects needed in supplier satisfaction surveys.</i>
18 Menyempurnakan <i>job profile</i> dengan uraian tugas unit kerja yang akan melaksanakan tindak lanjut hasil survei kepuasan pemasok <i>Improving the job profile with job unit descriptions that will carry out the follow-up of supplier satisfaction survey results</i>	X	
19 Menetapkan kebijakan keuangan yang di antaranya berisi kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban kreditor yang minimal memuat perencanaan kreditor, kualifikasi dari kreditor, penggunaan sesuai dengan peruntukannya, pembayaran kredit tepat waktu <i>Establishing financial policies which include policies regarding the rights and obligations of creditors which at least include creditors planning, qualifications from creditors, usage in accordance with their designation, timely payment of credit</i>	X	
20 Menetapkan mekanisme untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan <i>Establishing a mechanism for following up customer complaints</i>	√	Mekanisme untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan telah disusun namun belum disahkan <i>The mechanism for following up customer complaints has been compiled but has not yet been enacted</i>
21 Menyusun pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i> dengan muatan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan <i>Preparing reports on the implementation of policies on the Whistle Blowing System with content in accordance with the established Guidelines</i>	X	
22 Menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal <i>Follow up on all findings of SPI and external auditor</i>	X	Divisi <i>Internal Audit and Control</i> melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal <i>The Internal Audit and Control Division monitors the follow-up of the SPI and external auditors audit findings</i>
23 Melengkapi SOP sesuai perkembangan bisnis dan menjaga konsistensi dalam penerapan kebijakan yang telah ditetapkan <i>Completing the SOP according to business development and maintain consistency in the implementation of the established policies</i>	√	Perusahaan melakukan identifikasi dan evaluasi SOP sesuai perkembangan bisnis Perusahaan <i>The Company identifies and evaluates SOPs according to the Company's business development</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Results of Recommendations on GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year</i>		Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 <i>Available in GCG Implementation Assessment Recommendations of 2017 Fiscal Year</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) <i>Follow-Up That Has Been Done / Follow-Up Plan (If It Is A Recommendation For 2017 GCG Implementation Assessment)</i>
24	Menyusun laporan pelaksanaan RKAP triwulanan secara tepat waktu dan menyampaikannya baik kepada Pemegang Saham mayoritas maupun minoritas <i>Preparing quarterly RKAP implementation reports in a timely manner and deliver them to both the majority and minority Shareholders</i>	X	
25	Menyempurnakan pedoman tata tertib rapat Direksi yang minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Direksi <i>Improving the guidelines for the Board of Directors' meetings that at a minimum regulate the ethics of meetings and preparation of minutes of meetings, follow-up evaluations of the previous meetings results, and discussion on Board of Directors' directives / proposals and / or decisions</i>	√	Tata tertib rapat Direksi telah disempurnakan namun belum disahkan <i>The rules of the Board of Directors meeting have been refined but have not yet been ratified</i>
26	Menyusun Rencana Kerja 5 Tahunan dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMD <i>Preparing a 5-Year Work Plan with reference to the DKI Jakarta Provincial Governor's Regulation Number 10 of 2012 concerning Preparation of Long-Term BUMD Plans</i>	X	
27	Menyempurnakan RKAP dengan merinci rencana kerja mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan RKAP serta laporan keuangan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Refining the RKAP by detailing the work plan referring to the Decree of DKI Jakarta Provincial Governor Number 105 of 2003 concerning Guidelines for RKAP Preparation and financial statements of BUMD in DKI Jakarta Provincial Government</i>	√	Perseroan telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD <i>The Company has compiled and submitted RKAP implementation Report to the Head of the BUMD Development Agency</i>
28	Menyampaikan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham minoritas <i>Submitting the draft RKAP to minority Shareholders</i>	X	
29	Menetapkan indikator kinerja untuk setiap jabatan <i>Establishing performance indicators for each position</i>	X	
30	Mendokumentasikan analisis terhadap capaian kinerja dan upaya perbaikan strategi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh atasan langsung <i>Conduct documentation on analysis of performance achievements and efforts to improve strategies based on the results of analysis conducted by direct supervisors</i>	√	Setiap level jabatan menandatangani form capaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan langsung <i>Each position level signs the performance achievement form signed by the direct superior</i>

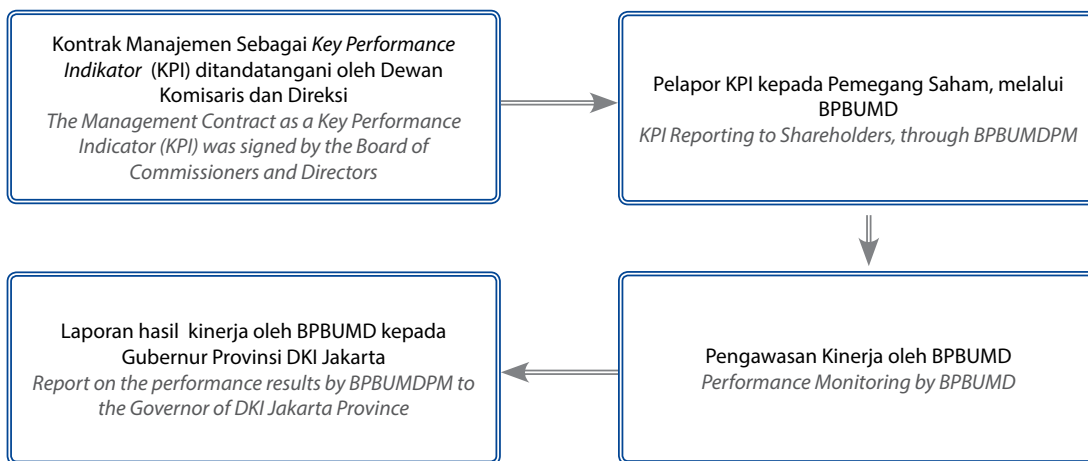


Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan Pemegang Saham yang diwakili oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk *Key Performance Indicator (KPI)* tahun 2018. Capaian atas KPI Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dilaporkan setiap 3 bulannya (triwulan) oleh Perusahaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD). BPBUMD selaku pembina BUMD kemudian melakukan pengawasan atas kinerja BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Performance Assessment Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

The Board of Commissioners together with the Director signed a Management Contract with Shareholders represented by the Governor of DKI Jakarta Province for the *Key Performance Indicator (KPI)* in 2018. The achievements of the Directors and Board of Commissioners KPI are reported every 3 months (quarterly) by the Company to the DKI Provincial Government Jakarta, through the BUMD and Investment Development Agency (BPBUMD). BPBUMD as the BUMD advisor then supervised the performance of DKI Jakarta Provincial BUMD to be reported to the Governor of DKI Jakarta Province.



No	Sasaran strategis <i>Strategic Target</i>	Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i>	Triwulan IV <i>Q4</i>	
			Target	Realisasi <i>Realization</i>
1	Penyelesaian Konstruksi Fase I dan Persiapan Fase II pada Februari 2019 <i>Completion of Phase I Construction and Phase II Preparation in February 2019</i>	Persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi MRT fase 1 <i>Completion of Phase I Construction and Phase II Preparation in February 2019</i>	96,86%	96,87%
		Persentase realisasi dana hibah dan pinjaman untuk pelaksanaan konstruksi proyek mrt fase - 1 <i>Percentage of realization of grants and loans for the construction of MRT Project Phase 1</i>	80%	99,74%



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Sasaran strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Triwulan IV Q4	
			Target	Realisasi Realization
		Ditandatangani <i>Loan Agreement</i> (L/A) tambahan dana untuk penyelesaian konstruksi proyek MRT Fase – 1 dan pendanaan konstruksi fase 2 <i>Signing of Loan Agreement (L/A) for additional funds to complete MRT Phase 1 construction and Phase 2 Funding</i>	100%	100%
		Persentase kesiapan <i>Groundbreaking</i> konstruksi proyek MRT Fase - 2 <i>Percentage of MRT Project Phase-2 construction Groundbreaking readiness</i>	100%	79%
2	Kepastian Persiapan Operasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Usaha untuk Maret 2018 <i>Certainty of Readiness of Business Operation, Maintenance and Development in March 2019</i>	Persentase kesiapan untuk mengoperasikan sistem perkeretaapian <i>Percentage of Railway System operation readiness</i>	88,41%	85,70%
		Persentase penyelesaian penetapan tarif, asset dan subsidi <i>Percentage of completion of tarif, assets and subsidies</i>	100%	60%
		Persentase finalisasi perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra terpilih untuk seluruh sektor NFB (<i>Retail & Naming Rights</i>) <i>Percentage of finalization of cooperation agreements (PKS) with selected partners for all sectors of NFB (Retail & Naming Rights)</i>	100%	100%
		Persentase progress (sesuai target tahun 2018) pengembangan di kawasan <i>Transit Oriented Development</i> <i>Percentage of progress (according to target in 2018) of Transit Oriented Development progress</i>	100%	100%
3	Sistem Korporasi berstandar Internasional <i>International standard corporate system</i>	<i>Maturity Score System</i> Manajemen Risiko <i>Risk Management Maturity Score System</i>	100%	100%
		Nilai <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) <i>Good Corporate Governance (GCG) Score</i>	100%	100%
		Nilai Indeks <i>Public Readiness</i> <i>Public Readiness Index</i>	100%	88%
		<i>Level Knowledge Management Maturity</i> <i>Knowledge Management Maturity Level</i>	100%	100%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mekanisme remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, termasuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD.

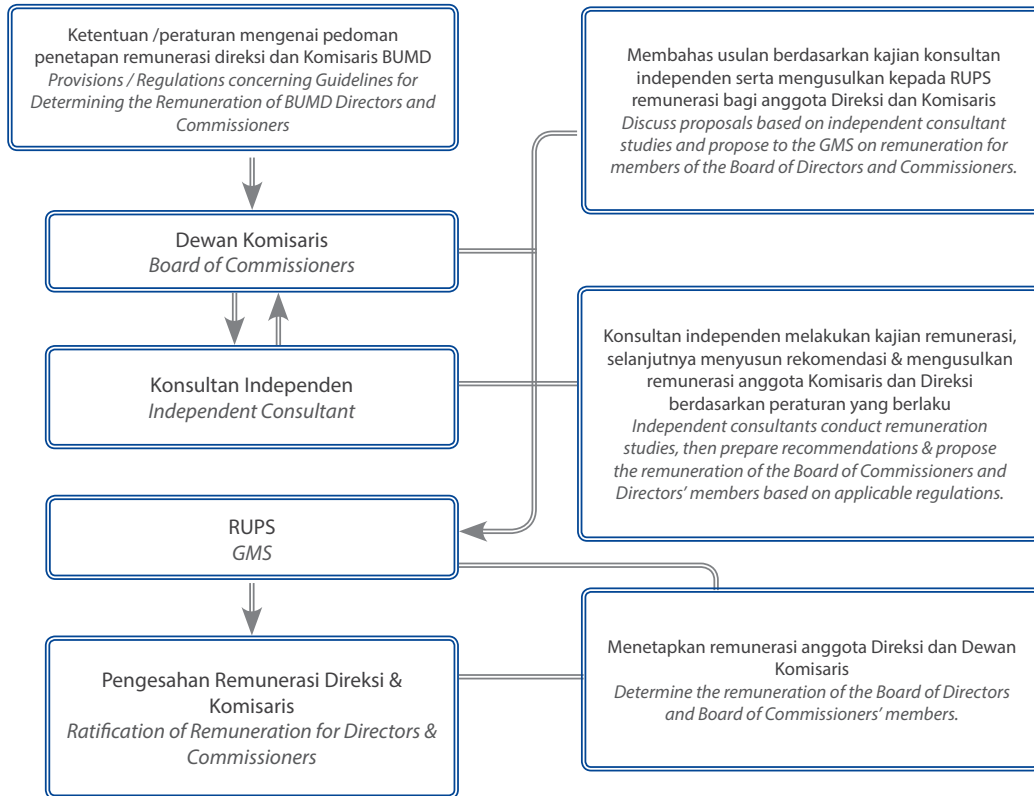
Skema pengusulan hingga penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Remuneration Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Procedure of Proposal Until Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

The remuneration mechanism of the Board of Commissioners' members is determined by the GMS, including the granting of an official allowance for post-employment benefits in accordance with the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 242 of 2015 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of BUMD.

Proposal schemes to determine remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company can be seen in the chart below.



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem/Insentif Kinerja

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors

Based on the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 242 of 2015, the components of the Board of Commissioners and Directors' income consist of:

- Salary / Honorarium
- Benefits
- Facilities
- Performance Tantiem / Incentives

The remuneration structure and components for the Board of Commissioners and Directors can be presented as follows:



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Dewan Komisaris Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> » Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama » Perhitungan gaji Anggota Komisaris sebesar 35% dari gaji Direktur Utama 	<ul style="list-style-type: none"> Gaji Direksi Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> » Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan perhitungan rumusan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015. » Gaji Anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi 90% dari Gaji Direktur Utama.
<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Dewan Komisaris Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> » Tunjangan Hari Raya » Tunjangan Jabatan » Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Direksi Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> » Tunjangan Hari Raya » Tunjangan Jabatan » Tunjangan Asuransi Purna Jabatan » Tunjangan Cuti Tahunan » Tunjangan Cuti Besar
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Dewan Komisaris Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> » Fasilitas Kesehatan » Fasilitas Bantuan Hukum » Fasilitas Keanggotaan Perkumpulan Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Direksi Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> » Fasilitas Kesehatan » Fasilitas Bantuan Hukum » Fasilitas Keanggotaan Perkumpulan Profesi » Fasilitas Kendaraan » Fasilitas Club Membership/Corporate Member
<ul style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> » Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. » Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. 	<ul style="list-style-type: none"> Tantiem Direksi Tantiem diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive/LTI</i>) <ul style="list-style-type: none"> » Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. » Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. » Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi mengikuti Faktor Jabatan, yaitu Anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama.
Board of Commissioners' Remuneration Structure	Board of Directors' Remuneration Structure
<ul style="list-style-type: none"> <i>Honorarium of the Board of Commissioners</i> <i>Fixed income in the form of cash received every month because of his/her position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions:</i> <ul style="list-style-type: none"> » <i>Calculation of President Commissioner's salary is 45% of President Director' salary</i> » <i>Calculation of Commissioners salaries is 35% of President Director' salary</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Salary of the Board of Directors</i> <i>Fixed income in the form of cash received every month because of his/her position as a member of the Company's Board of Directors, with the following conditions:</i> <ul style="list-style-type: none"> » <i>President Director's salary is determined by using the calculation formula stated in the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 242 of 2015.</i> » <i>Salaries of other Directors are set with a composition of 90% of the Director's Salary.</i>



Board of Commissioners' Remuneration Structure	Board of Directors' Remuneration Structure
<ul style="list-style-type: none"> • Allowance of the Board of Commissioners Income in the form of cash or valued by cash received at a certain time by the Board of Commissioners' members other than Honorarium, which can be in the form of: <ul style="list-style-type: none"> » Holiday allowance » Positional allowance » Post-employment Insurance Benefits 	<ul style="list-style-type: none"> • Allowance of the Board of Directors Income in the form of cash or valued by cash received at certain times by the Board of Directors' members other than salaries, which can be in the form of: <ul style="list-style-type: none"> » Holiday allowance » Positional allowance » Post-Employment Insurance Benefits » Annual Leave Allowance » Long Leave Allowance
<ul style="list-style-type: none"> • Facilities of the Board of Commissioners Income in the form of facilities and / or benefits and / or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners in the context of implementing duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of: <ul style="list-style-type: none"> » Health facility » Legal Aid Facility » Professional Association Membership Facility 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilities of the Board of Directors Income in the form of facilities and / or benefits and / or guarantees used / utilized by members of the Board of Directors in the context of implementing duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of: <ul style="list-style-type: none"> » Health facility » Legal Aid Facility » Professional Association Membership Facility » Vehicle Facilities » Club Membership / Corporate Member facilities
<ul style="list-style-type: none"> • Tantiem / Performance Incentives of the Board of Commissioners <ul style="list-style-type: none"> » Tantiem is Income which is an award given to members of the Board of Commissioners if they earn profits and do not experience accumulated losses. » Performance incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantiem of the Board of Directors Tantiem is given in addition to Long Term Incentive / LTI <ul style="list-style-type: none"> » Tantiem, namely income which is an award given to members of the Board of Directors if they make a profit and do not experience accumulated losses. » Performance incentives, namely income which is an award given to members of the Board of Directors in the event of an increase in performance even though they still experience losses or accumulated losses. » The composition of the Tantiem / Performance Incentive for members of the Board of Directors follows the Position Factor, namely the Board of Directors of 90% of the President Director.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015
- Kinerja Perusahaan
- Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan
- Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Basic Policy Regarding Indicators and Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2018

Compilation of structures, policies, and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors must pay attention to the following matters:

- Applicable Legislations, specifically the Governor of DKI Jakarta Province Regulation No. 242 of 2015
- Company Performance
- Work Performance of the Board of Commissioners and Directors
- Applicable Remuneration in the industry in accordance with the business activities of the Company which has the same type and scale of business as the Company
- Other regulations related to remuneration such as Minimum Wages and Labor Law



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

**Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
(Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015)**
*Calculation of the Remuneration Amount of the Board of Commissioners and Directors
(In accordance with the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 242 of 2015)*

Direktur Utama <i>President Director</i>	:	100%
Direksi Lainnya <i>Other Directors</i>	:	Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama <i>90% of the salary of the President Director</i>
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	:	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama <i>45% of the salary of the President Director</i>
Komisaris Lainnya <i>Other Commissioners</i>	:	Sebesar 35% dari gaji Direktur Utama <i>35% of the salary of the President Director</i>

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

Transparency of the Board of Commissioners and Directors' Remuneration in 2018

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is as follows



Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2018
Board of Commissioners Remuneration in 2018

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Periode Menjabat <i>Period of Office</i>	Perhitungan per Bulan <i>Monthly Calculation</i>			
		Honorarium	Tunjangan <i>Allowance</i>	Fasilitas <i>Facility</i>	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Rukijo (Plt. Komisaris Utama)* <i>Acting President Commissioner*</i>	1 Tahun penuh <i>Full year</i>	28.508.900	14.254.450	Kesehatan <i>Health</i>	
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>Commissioner*</i>	1 Tahun penuh <i>Full year</i>	28.508.900	14.254.450	Kesehatan <i>Health</i>	
Zulfikri (Komisaris)* <i>Commissioner*</i>	4 Mei - 31 Desember 2018 <i>May 4 - 31 Desember, 31 2018</i>	28.508.900	14.254.450	Kesehatan <i>Health</i>	
Mukhtasor (Komisaris)* <i>Commissioner*</i>	29 Oktober - 31 Desember 2018 <i>October 29 - December 31, 2018</i>	28.508.900	14.254.450	Kesehatan <i>Health</i>	
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen)* <i>President Commissioner/Independent Commissioner*</i>	1 Januari - 4 Mei 2018 <i>January 1 - May 4, 2018</i>	36.654.300	18.327.150	Kesehatan <i>Health</i>	
Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris)* <i>Commissioner*</i>	1 Januari - 4 Mei 2018 <i>January 1 - May 4, 2018</i>	28.508.900	14.254.450	Kesehatan <i>Health</i>	
TOTAL		179.198.800	89.599.400	-	

*) Keterangan tentang pergantian Dewan Komisaris.

*) Description about the replacement of the Board of Commissioner



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan <i>Amount of Salary, Allowances and Facilities per Month</i>	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama 1 Tahun <i>Amount of Salary, Allowances and Facilities for 1 Year</i>	Tantiem	Tunjangan Hari Raya <i>Religious Hoiday Allowance</i>	Tunjangan Asuransi Purna Jabatan <i>Post-Employment Insurance Benefits</i>	Jumlah Remunerasi Tahun 2018 <i>Total Remuneration for 2018</i>
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	42.763.350	513.160.200	116.492.981	52.729.283	85.920.000	768.302.464
	42.763.350	513.160.200	116.834.781	52.729.283	85.920.000	768.644.264
	42.763.350	342.106.800	-	6.067.600	85.526.700	433.701.100
	42.763.350	85.526.700	-	-	85.526.700	171.053.400
	54.981.450	219.925.800	144.083.831	-	-	364.009.631
	42.763.350	171.053.400	116.492.981	-	-	287.546.381
	268.798.200	1.844.933.100	493.904.574	111.526.166	342.893.400	2.793.257.240



Remunerasi Direksi Tahun 2018
Board of Directors Remuneration in 2018

Direksi Board of Directors	Periode Menjabat Period of Office	Perhitungan per Bulan			
		Gaji Salary	Tunjangan Allowance	Fasilitas Facility	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
William P. Sabandar (Direktur Utama) President Director	1 tahun penuh Full year	88.509.300	62.145.800	Mobil, kesehatan, membership Vehicle, Health, Membership	
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) Construction Director	1 tahun penuh Full year	79.658.370	55.931.216	Mobil, kesehatan, membership Vehicle, Health, Membership	
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) Finance and Administration Director	1 tahun penuh Full year	79.658.370	55.931.216	Mobil, kesehatan, membership Vehicle, Health, Membership	
Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)* Operation and Maintenance Director*	29 Oktober - 31 Desember 2018 October 29 - December 31, 2018	79.658.370	55.931.216	Mobil, kesehatan, membership Vehicle, Health, Membership	
Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis)* Development and Business Support Director*	29 Oktober - 31 Desember 2018 October 29 - December 31, 2018	79.658.370	55.931.216	Mobil, kesehatan, membership Vehicle, Health, Membership	
Agung Wicaksono (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)* Operation and Maintenance Director*	1 Januari - 29 Oktober 2018 January 1 - October 29, 2018	79.658.370	55.931.216	Mobil, kesehatan, membership Vehicle, Health, Membership	
Jumlah (Rp)		486.801.150	341.801.880	-	

*) Keterangan tentang pergantian Dewan Komisaris.

*) Description about the replacement of the Board of Commissioner



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas per Bulan <i>Amount of Salary, Allowances and Facilities per Month</i>	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Selama 1 Tahun <i>Amount of Salary, Allowances and Facilities for 1 Year</i>	Tantiem	Tunjangan Hari Raya <i>Religious Holiday Allowance</i>	Tunjangan Asuransi Purna Jabatan <i>Post-Employment Insurance Benefits</i>	Jumlah Remunerasi Tahun 2018 <i>Total Remuneration in 2018</i>
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	150.655.100	1.807.861.200	339.980.526	150.655.095	265.527.900	2.564.024.721
	135.589.586	1.627.075.032	305.932.464	135.589.586	238.975.110	2.307.572.192
	135.589.586	1.627.075.032	305.932.464	135.589.586	238.975.110	2.307.572.192
	135.589.586	1.355.895.860	-	-	238.975.110	1.594.870.970
	135.589.586	1.355.895.860	-	-	238.975.110	1.594.870.970
	135.589.586	271.179.172	305.932.464	135.589.586	-	712.701.222
	828.603.030	8.044.982.156	1.257.777.918	557.423.853	1.221.428.340	11.081.612.267



Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018
Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2018

Uraian Description	Jumlah Amount (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris <i>Amount of the Board of Commissioners' Remuneration</i>	2.793.257.240
Jumlah Remunerasi Direksi <i>Amount of the Board of Directors' Remuneration</i>	11.081.612.267
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018 <i>Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors 2018</i>	13.874.869.507

Rasio Gaji

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perusahaan adalah sebagai berikut:

Salary Ratio

Information on Salary Ratio of the Company's Board of Commissioners, Directors and employees are as follows:

Perbandingan Comparison	2018	2017
Direktur Utama terhadap Direktur <i>President Director to Directors</i>	1 : 1,11	1 : 1,11
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama <i>President Director to President Commissioner</i>	1 : 2,19	1 : 2,19
Direktur Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris <i>President Director to Board of Commissioners' Members</i>	1 : 2,82	1 : 2,82
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi <i>President Director to Highest Employee</i>	1 : 2,50	1 : 2,97
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah <i>President Director to Lowest Employee</i>	1 : 26,79	1 : 37,21
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah <i>Highest Employee to Lowest Employee</i>	1 : 10,84	1 : 12,50
Karyawan Terendah terhadap UMP <i>Lowest Employee to Provincial Minimum Wage (UMP)</i>	1 : 1,52	1 : 1,09

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Divisi, sementara karyawan terendah adalah Staf.

The highest employee in the table above is the Division Head, while the lowest employee is the Staff.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Sesuai *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan, Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali di setiap bulannya, yang dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

In accordance with the Company's Board Manual, the Board of Commissioners' Meeting consists of an Internal Board of Commissioners Meeting which is only attended by the Board of Commissioners Members and Board of Commissioners Meetings by inviting Directors. Board of Commissioners Meetings are held at least once every month, which can be held at any time if deemed necessary. Decisions of the Board of Commissioners Meeting are determined by deliberation to reach consensus. If no agreement is reached, the decision is taken by voting, based on the vote agreed at least more than ½ (a half) of the number of votes issued at the meeting. Minutes of the Meeting are made and administered by the Secretary of the Board of Commissioners or other officials appointed by the Board of Commissioners and provide copies to all meeting participants. If there is a member of the Board of Commissioners who has a different opinion on the decision made, then this opinion must be included in the minutes of meeting as a form of dissenting opinion.

Secara umum Agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas tentang:

In general, the agenda of Board of Commissioners' meetings, among others, are as follows:

- Evaluasi Kinerja Perusahaan
- Pembahasan rencana jangka panjang Perusahaan dan RKAP
- Menindaklanjuti temuan Auditor Internal
- Menindaklanjuti temuan Auditor serta Assessor Eskternal
- Melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawahnya
- Melakukan pembahasan terkait hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris
- Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan Organ Dewan Komisaris.

- *Evaluation on Company's Performance*
- *Discussion about Company's long term plan and RKAP;*
- *Follow-up of Internal Audit's findings;*
- *Follow-up of Auditor and External Assessor's findings.*
- *Coordination with committees under the Board of Commissioners.*
- *Discussion about other related issues requiring Board of Commissioners' approval; and*
- *Other agenda within the authority of Board of Commissioners.*

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat. Sebagai bentuk persiapan Perusahaan dalam menjalankan sistem dan mekanisme tata kelola yang baik, di awal tahun Perusahaan telah melakukan penyusunan dan penetapan jadwal tahunan (*calendar event*) yang turut mencantumkan waktu-waktu pelaksanaan rapat termasuk

Based on the provisions contained in the Board Manual of Board of Commissioners, the announcement of plan to hold Board of Commissioners meeting must be conducted, at least, in 3 (three) days prior to the meeting. The announcement shall contain the date, time, location, and agenda of the meeting, as well as the parties invited to attend the meeting. As a preparation for the Company in implementing good corporate governance system and mechanism, at the beginning of the year, the Company has arranged and established a calendar event which also stipulated meeting schedule, including Board of Commissioners meeting plan. The information regarding meeting implementation



rencana rapat Dewan Komisaris. Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti Divisi Internal Audit dan Divisi-Divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Dokumentasi Hasil Rapat Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*. Masyarakat dapat memperoleh risalah rapat internal Dewan Komisaris sepanjang tahun buku pelaporan dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada bab pembahasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sebagai bentuk akuntabilitas Perusahaan terkait dengan pendokumentasian aktivitas tata kelola yang dijalankan, Perusahaan memiliki kebijakan umum yang mewajibkan dilakukannya pembuatan risalah rapat pada rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Setelahnya, risalah tersebut juga

plan has also been widely distributed to related parties such as the Secretary of Board of Commissioners, Corporate Secretary and other organs such as Internal Audit Division and existing Divisions of the Company. In the event of incidental meeting, the announcement must be conducted as effectively and efficiently as possible with regard to the applicable documentation procedure (preparing minutes of meeting).

To ensure the implementation of transparency and accountability principles, the Company has properly documented the minutes of Board of Commissioners meeting which contain discussions on meeting agenda, dissenting opinion as well as the meeting decisions. After being approved, meeting documentation is signed by all meeting participants in attendance and distributed accordingly.

Decision of Board of Commissioners Meeting is taken by deliberation for consensus. In case the consensus is not reached, the decision shall be made through voting procedure, with approving votes of, at the very least, $\frac{1}{2}$ (a half) of total votes cast in the meeting. Minutes of meeting are prepared and administered by the Secretary of Board of Commissioners or other official appointed by the Board of Commissioners. The copy of minutes of meeting shall be distributed to all meeting participants. In the event of dissenting opinion among Board of Commissioner's Members in regard to meeting decisions, the dissenting opinion must be recorded in the minutes of meeting.

Minutes of meeting are prepared and administered by the Secretary of Board of Commissioners or other official appointed by the Board of Commissioners. The copy of minutes of meeting shall be distributed to all meeting participants. In the event of dissenting opinion among Board of Commissioner's Members in regard to meeting decisions, the dissenting opinion must be recorded in the minutes of meeting. The public may access and see minutes of Board of Commissioners internal meetings during the reporting fiscal year in the Company's Annual Report under Good Corporate Governance chapter.

As form of the Company's accountability related to the documentation of its governance activities, the Company has established a general policy which obliges a preparation of minutes of meeting for Board of Commissioners' internal meetings or joint meetings with the Board of Directors. Thereafter,



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

diwajibkan untuk diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diberikan salinannya kepada peserta rapat.

the minutes of meeting must be administered by the Secretary of Board of Commissioners or other appointed official to distribute the copies to the meeting participants.

Penyusunan risalah laporan tahunan Perusahaan, telah memenuhi prosedur penyusunan risalah rapat oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang meliputi pemenuhan kebijakan umum terkait aspek prosedural dan administrasi serta rapat yang menggambarkan jalannya rapat.

The preparation of minutes of Company's annual report has met the procedure of minutes of meeting preparation by the Secretary of Board of Commissioners, which covers fulfillment of general policies related to procedural and administrative aspects as well as description of meeting implementation.

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Throughout 2018, the Board of Commissioners held 9 (nine) internal meetings of the Board of Commissioners. The following were presented the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Board of Commissioners in these meetings.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris *Minutes of the Board of Commissioners Internal Meeting and the Presence of the Board of Commissioners*

Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Participants</i>	Alasan Tidak Hadir <i>Reason</i>
26 Februari 2018 <i>February 26, 2018</i>	PT MRT Jakarta	Pengesahan Program Pengembangan BOC dan Organ 2018; Infrastruktur GCG; berakhirnya masa tugas Sekretaris Dewan Komisaris. <i>Validation on 2018 BOC and Organ Development Program; GCG Infrastructure; term of office termination of the Secretary of the Board of Commissioners</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yusmada Faizal 3. Rukijo 4. Prasetyo Boeditjahjono	-
10 April 2018 <i>April 10, 2018</i>	PT MRT Jakarta	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite kepada Dewan Komisaris <i>Report on Committee Duties Implementation to the Board of Commissioners</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Rukijo	Dinas <i>On an Official Duty</i>
4 Mei 2018 <i>May 2018</i>	PT MRT Jakarta	Evaluasi dan Pemutahiran RJPP dan Penyusunan RPJM <i>RJPP Evaluation and Examination and RPJM Preparation</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Prasetyo Boeditjahjono dan Tim Div. CSP	Dinas <i>On an Official Duty</i>
9 Mei 2018 <i>May 9, 2018</i>	PT MRT Jakarta	Pengenalan Komisaris baru dan monitoring Kinerja <i>Introduction of new Commissioners and Performance monitoring</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Rukijo 3. Prasetyo Boeditjahjono	
9 Mei 2018 <i>May 9, 2018</i>	PT MRT Jakarta	Persetujuan PLT Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis <i>Approval of Acting Development and Business Support Director</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Rukijo 3. Prasetyo Boeditjahjono	
9 Agustus 2018 <i>August 9, 2018</i>	PT MRT Jakarta	BOC dan BPBUMD tentang Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2018 <i>BOC and BPBUMD concerning Monitoring of Second Quarter Performance in 2018</i>	1. Yusmada Faizal 2. Rukijo 3. Zulfikri	



Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris
Minutes of the Board of Commissioners Internal Meeting and the Presence of the Board of Commissioners

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Tidak Hadir Reason
24 Agustus 2018 August 24, 2018	PT MRT Jakarta	Laporan Pelaksanaan tugas Komite <i>Report on the Committees' Duties Implementation</i>	Rukijo dan Komite (Moh. Hassan, Ina Susanti, Liyani Harsulistiyani, Rizal Helbari)	Dinas <i>On an Official Duty</i>
10 September 2018 September 10, 2018	PT MRT Jakarta	Laporan pelaksanaan tugas BOC kepada BPBUMD <i>Report on the implementation of BOC duties to BPBUMD</i>	1. Yusmada Faizal 2. Rukijo 3. Zulfikri	
26 September 2018 September 26, 2018	PT MRT Jakarta	Berakhirnya Masa Tugas Komite dan Penunjukkan Komite yang Baru <i>End of Committee Period and Appointment of New Committees</i>	1. Yusmada Faizal 2. Rukijo	Dinas <i>On an Official Duty</i>
9 November 2018 November 9, 2018	PT MRT Jakarta	Bersama Komite Review Draft RKAP 2019 Dan Rencana pembentukan Perusahaan Anak. <i>Together with the Committee Review of 2019 RKAP Draft and Plan for the establishment of a Subsidiary</i>	1. Rukijo 2. Ina Susanti 3. Liyani Harsulistiyani 4. Irwan Rei 5. Ivan Malik	Dinas <i>On an Official Duty</i>
14 November 2018 November 14, 2018	PT MRT Jakarta	Gabungan Komite Review Draft RKAP 2019 Dan Rencana pembentukan Perusahaan Anak (lanjutan) <i>Joint Committee Review of 2019 RKAP Draft and Plan for Establishment of Subsidiary (continued)</i>	1. Rukijo 2. Moh. Hassan 3. Ina Susanti 4. Liyani Harsulistiyani 5. Irwan Rei 6. Ivan Malik	Dinas <i>On an Official Duty</i>

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini:

The attendance recapitulation of the Board of Commissioners' members at the Board of Commissioners Internal Meeting can be seen below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris
Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners Internal Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Compulsory Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tidak Hadir Absence	% Kehadiran Attendance
Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>(Acting President Commissioner)</i>	9	9	-	100,00%
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	9	6	3	66,67%
Zulfikri (Komisaris)* <i>(Commissioner)*</i>	4	3	1	75,00%
Mukhtasor (Komisaris)** <i>(Commissioner)**</i>	-	-	-	-
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen)*** <i>(President Commissioner/Independent Commssioner)***</i>	3	3	-	100,00%



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris *Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners Internal Meeting*

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Compulsory Meeting</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	Tidak Hadir <i>Absence</i>	% Kehadiran <i>Attendance</i>
Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris)**** <i>(Commissioner)****</i>	4	3	-	75,00%
Rata-rata / Average				83,33%

*) Zulfikri duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 4 Mei 2018.

***) Mukhtasor duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 7 November 2018.

****) Erry Riyana Hardjapamekas tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018.

*****) Prasetyo Boeditjahjono tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018.

*) Zulfikri has been in the Board of Commissioners since May 4, 2018.

****) Mukhtasor has been in the Board of Commissioners since November 7, 2018.

*****) Erry Riyana Hardjapamekas has no longer served in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018.

*****) Prasetyo Boeditjahjono has no longer served in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018.

Rapat Direksi

Berdasarkan *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan, Rapat Direksi terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh Anggota Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di setiap bulannya, yang dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu.

Secara umum Agenda rapat yang diselenggarakan Direksi membahas tentang:

- Laporan manajemen mengenai perkembangan konstruksi dan persiapan operasi MRT Jakarta serta kinerja Keuangan
- Pembahasan persiapan RUPS.
- Pembahasan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan & RKAP.
- Menindaklanjuti temuan SPI.
- Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan organ Direksi.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi selambat lambatnya dilakukan 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat.

Sebagai bentuk persiapan Perusahaan dalam menjalankan sistem dan mekanisme tata kelola yang baik, di awal tahun Perusahaan telah melakukan penyusunan dan penetapan jadwal tahunan

Board of Directors Meeting

Based on the established *Board Manual*, Board of Commissioners' meeting consists of Board of Commissioners Internal Meeting attended by members of Board of Commissioners only, and Board of Commissioners Meeting inviting the Board of Directors. Meetings of Board of Commissioners are held at least once a month, and may be held at any time if necessary.

Generally, meeting Agenda held by the Board of Directors discuss the following;

- Management report about development of construction on Financial Performance and Company Operations of MRT Jakarta;
- Discussion on GMS preparation;
- Discussion on the development of Corporate Long Term Plan & RKAP
- Following up SPI findings; and
- Other agenda that become the authority of the Board of Directors organ.

Based on the provisions set out in the code of Corporate Governance, the announcement of plan to hold Board of Directors meeting must be conducted, at least, in 3 (three) days prior to the meeting. The announcement shall contain the date, time, location, and agenda of the meeting, as well as the parties invited to attend the meeting.

As a preparation for the Company in implementing good corporate governance system and mechanism, at the beginning of the year, the Company has developed and established a



(calendar event) yang turut mencantumkan waktu-waktu pelaksanaan rapat termasuk rencana rapat Direksi. Informasinya rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan dan organ-organ terkait lainnya seperti SPI dan Divisi-Divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka ketua rapat Direksi yang menentukan. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat Anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

Hasil pelaksanaan rapat Direksi dituangkan dalam, risalah rapat didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta keputusan yang ditetapkan. dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat Anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

Laporan ringkasan risalah rapat Direksi telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Direktur Utama berhalangan hadir dalam rapat.

Di sepanjang tahun 2018, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 59 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

calendar event which also stipulated meeting schedule, including Board of Directors meeting plan. The information regarding meeting implementation plan has also been widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other related organs, namely Internal Audit Unit and existing Divisions of the Company. In the event of incidental meeting, the announcement must be conducted as effectively and efficiently as possible with regard to the applicable documentation procedure (preparing minutes of meeting).

Decision of Board of Directors Meeting is taken by deliberation toward consensus. In case the consensus is not reached, the decision shall be made through voting procedure, with approving votes of, at the very least, ½ (a half) of total votes cast in the meeting. In case of tie, the Chairman of the meeting shall make the decisions. Minutes of meeting are prepared and administered by the Corporate Secretary. The copy of minutes of meeting shall be distributed to all meeting participants. In the event of dissenting opinion among Board of Directors' Members in regard to meeting decisions, the dissenting opinion must be recorded in the minutes of meeting.

Board of Directors meeting implementation result is recorded in a well documented minutes of meeting containing discussions on meeting agenda, dissenting opinion as well as the meeting decisions. After being approved, meeting documentation is signed by all meeting participants present and distributed accordingly.

Minutes of meeting are prepared and administered by the Corporate Secretary. The copy of minutes of meeting shall be distributed to all meeting participants. In the event of dissenting opinion among Board of Directors' Members in regard to meeting decisions, the dissenting opinion must be recorded in the minutes of meeting.

The summary report of the Board of Directors' minutes of meeting has fulfilled the procedure, legal administration and describes the chronological situation of the meeting including dissenting opinion or delegation of meeting leaders if the President Director is unable to attend the meeting.

Throughout 2018, the Board of Directors held 59 meetings. Following are the agenda, minutes of meeting, attendance and attendance recapitulation of the Directors in these meetings.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
3 Januari 2018 January 03, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Pimpinan Terbatas • Delay Payment Charges • Perubahan nama Stasiun Sisingamangaraja • Potensi Perpanjangan Jalur ke Tangerang Selatan • Information Center • MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • Pencanangan Pembangunan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas • Fase II • Safety MRT Jakarta • Results of the Limited Leadership Meeting • Delay Payment Charges • Change in name of Sisingamangaraja Station • Potential Line Extension to South Tangerang • Information Center • MoU with the Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia • Declaration of Dukuh Atas Transit Oriented Development • Phase II • MRT Jakarta Safety 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A
8 Januari 2018 January 08, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas • Digital Money • Central Clearing house • Factory Acceptance Test (FAT) AFC • Struktur organisasi baru PT MRT Jakarta • Trase MRT Jakarta fase II • Amicable settlement terkait delay payment charges dengan Kontraktor CP103 • Transit Oriented Development (TOD) of Dukuh Atas • Digital Money • Central Clearing house • Factory Acceptance Test (FAT) of AFC • The new organization structure of PT MRT Jakarta • MRT Jakarta route phase II • Amicable settlement related to delay payment charges with CP103 Contractors 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
15 Januari 2018 January 15, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 2 MRT Jakarta • Pertemuan tahunan dengan Kontraktor • Upaya percepatan pekerjaan konstruksi • Lahan eks Pasar Blora • Bisnis <i>retail</i> PT MRT Jakarta • Pedestrianisasi Sudirman-Thamrin • <i>Dispute Adjudication Board</i> (DAB) • <i>Phase 2 of MRT Jakarta</i> • <i>Annual meeting with the Contractor</i> • <i>Efforts to accelerate construction work</i> • <i>Ex-Blora Market land</i> • <i>Retail business of PT MRT Jakarta</i> • <i>Pedestrianization of Sudirman-Thamrin</i> • <i>Dispute Adjudication Board</i> (DAB) 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A
22 Januari 2018 January 22, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 2 MRT Jakarta • <i>Delay payment charges</i> • <i>Potential Tenant Gathering</i> • Penataan jalur pedestrian di Jl. Sudirman – Thamrin • Interkoneksi di Stasiun Sisingamangaraja • <i>On the Job Training</i> (OJT) • <i>Park & ride</i> Lebak Bulus • <i>Phase 2 of MRT Jakarta</i> • <i>Delay payment charges</i> • <i>Potential Tenant Gathering</i> • <i>Arrangement of pedestrian lanes on Jl. Sudirman – Thamrin</i> • <i>Interconnection at Sisingamangaraja Station</i> • <i>On the Job Training</i> (OJT) • <i>Park & ride of Lebak Bulus</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 2 MRT Jakarta • Potensi perpanjangan jalur ke Tangerang Selatan • Perumusan tarif dan subsidi • Pembayaran <i>Dispute Adjudication Board</i> (DAB) • <i>Digital money</i> • Pemanfaatan lahan eks Pasar Blora • <i>Internal recruitment</i> • <i>Phase 2 of MRT Jakarta</i> • <i>Potential extension of the route to South Tangerang</i> • <i>Formulation on tariffs and subsidies</i> • <i>Payment of Dispute Adjudication Board</i> (DAB) • <i>Digital money</i> • <i>Land Utilization of Ex-Blora Market</i> • <i>Internal recruitment</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
5 Februari 2018 February 05, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> TOD Dukuh Atas Interkoneksi dengan TransJakarta dan <i>Park & Ride</i> Pedestrianisasi Jl. Sudirman - Thamrin Rencana Perubahan Struktur Organisasi VO TOD Dukuh Atas Penetapan Lokasi Fase II <i>Groundbreaking</i> Fase II <i>Transit Oriented Development of Dukuh Atas</i> <i>Interconnection with Trans Jakarta and Park & Ride</i> <i>Pedestrianization of Jl. Sudirman – Thamrin</i> <i>Organizational Structure Change Plan</i> <i>VO TOD Dukuh Atas</i> <i>Determination of Phase II Locations</i> <i>Groundbreaking of Phase II</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A
6 Februari 2018 February 06, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> Skema pemanfaatan Lahan Kampung Bandan <i>Leadership Development</i> Proses pendanaan Fase 2 <i>Variations Order (VO)</i> untuk pekerjaan penataan Jalur Pedestrian di Dukuh Atas <i>Land Utilization scheme for Kampung Bandan</i> <i>Leadership Development</i> <i>Funding Process of Phase 2</i> <i>Variations Order (VO) for Pedestrian Line arrangement work in Dukuh Atas</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat	Bapak Agung Wicaksono sedang dalam perjalanan dinas ke Luar Negeri
12 Februari 2018 February 12, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Delay Payment Charges</i> Integrasi antar moda transportasi di Jakarta <i>Information Center</i> Rencana penancangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas Skenario pemanfaatan lahan Kampung Bandan Hasil <i>Engagement Survey</i> <i>Training leadership</i> <i>Non-Fare Box Business Retail</i> <i>Delay Payment Charges</i> <i>Integration between modes of transportation in Jakarta</i> <i>Information Center</i> <i>Planning for Declaration of Dukuh Atas - Oriented Transit Areas (KBT)</i> <i>Land utilization scenario of Kampung Bandan</i> <i>Engagement Survey Results</i> <i>Leadership training</i> <i>Non-Fare Box Business Retail</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
22 Februari 2018 <i>February 22, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Kampung Bandan • Bisnis Retail • Fase 2 MRT Jakarta • <i>Integrated Schedule</i> • <i>Station Staff</i> • <i>Branding</i> Perusahaan pada Seragam dan <i>Merchandising</i> • Lahan Eks Pasar Blora • Program <i>Leadership</i> • Subsidi, Tarif, dan Aset • <i>Pencanangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas</i> • <i>Kampung Bandan Land</i> • <i>Retail Business</i> • <i>Phase 2 of MRT Jakarta</i> • <i>Integrated Schedule</i> • <i>Station Staff</i> • <i>Corporate Branding on Uniforms and Merchandising</i> • <i>Ex-Blora Market Land</i> • <i>Leadership Program</i> • <i>Subsidies, Tariff and Assets</i> • <i>Declaration of Dukuh Atas-Oriented Transit Area (KBT)</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	N/A
28 Februari 2018 <i>February 28, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Konstruksi Fase II MRT Jakarta</i> • <i>Integrated Schedule</i> • <i>Independent Safety Assessor (ISA)</i> • Lahan Eks Pasar Blora • <i>Rencana Pencanangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas</i> • <i>Update</i> bisnis periklanan • Subsidi, tarif, dan aset • <i>Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan</i> • <i>Park and Ride</i> Lebak Bulus • <i>Construction of MRT Jakarta Phase II</i> • <i>Integrated schedule</i> • <i>Independent Safety Assessors (ISA)</i> • <i>Ex-Blora Market Land</i> • <i>Planning for Declaration of Dukuh Atas - Oriented Transit Area (KBT)</i> • <i>Update the advertising business</i> • <i>Subsidies, tariffs and assets</i> • <i>Planning for the Company's Annual GMS Implementation</i> • <i>Park and Ride of Lebak Bulus</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
5 Maret 2018 March 05, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) • Penetapan Lokasi (Penlok) MRT Jakarta Fase II • Jadwal produksi <i>rolling stock</i> • <i>Independent Safety Assessor</i> (ISA) • Eks Lahan Pasar Blora • Rencana Pencanangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas • <i>Non-Fare Box Business</i> – Periklanan • Subsidi, tarif, dan aset • Pra Rapat Umum Pemegang Saham (Pra RUPS) • <i>Park and Ride</i> Lebak Bulus • <i>Non-Fare Box Business</i> (NFB) – Retail • <i>A Memorandum of Understanding (MoU) plan with PT Kereta Api Indonesia (Persero)</i> • <i>Determination of Location (Penlok) of MRT Jakarta Phase II</i> • <i>Schedule of rolling stock production</i> • <i>Independent Safety Assessor (ISA)</i> • <i>Ex Blora Market Land</i> • <i>Plans for the Declaration of Dukuh Atas – Oriented Transit Area (KBT)</i> • <i>Non-Fare Box Business – Advertising</i> • <i>Subsidies, tariffs and assets</i> • <i>Pre General Meeting of Shareholders (Pre GMS)</i> • <i>Park and Ride of Lebak Bulus</i> • <i>Non-Fare Box Business (NFB) – Retail</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Participants</i>	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) <i>Reason of Absence</i>
12 Maret 2018 <i>March 12, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas • <i>Non-Fare Box Business</i> – Periklanan • Subsidi, tarif, dan aset • <i>Park and Ride</i> Lebak Bulus • <i>Non-Fare Box Business</i> – Retail • CP 107 & CP 108 • Kontrak <i>Variation Orders & Price Adjustment</i> • <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan Polda Metro Jaya • Pertemuan dengan JICA • Pedestrianisasi Sudirman – Thamrin • Lahan Kampung Bandan • <i>On Job Training (OJT)</i> dan Sumber Daya Manusia • <i>Mobile Applications</i> • Lahan Eks Pasar Blora • Internal Rekrutmen • <i>Concept of Dukuh Atas Transit Oriented Development</i> • <i>Non-Fare Box Business</i> – Advertising • <i>Subsidies, tariffs and assets</i> • <i>Park and Ride of Lebak Bulus</i> • <i>Non-Fare Box Business</i> – Retail • CP 107 & CP 108 • <i>Variation Orders & Price Adjustment contracts</i> • <i>Memorandum of Understanding (MoU) with Polda Metro Jaya</i> • Meeting with JICA • <i>Pedestrianization of Sudirman – Thamrin</i> • <i>Kampung Bandan Land</i> • <i>On Job Training (OJT) and Human Capital</i> • <i>Mobile Applications</i> • <i>Ex-Blora Market Land</i> • <i>Internal Recruitment</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
19 Maret 2018 March 19, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Pencanaan Pembangunan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas <i>Non-Fare Box Business</i> – Telko dan Periklanan <i>Park and Ride</i> dan Interkoneksi <i>Non-Fare Box Business</i> – Ritel CP 107 Mutasi Karyawan Lahan Kampung Bandan Lahan Eks Pasar Blora Rekrutmen <i>Worksite Structure Personnel</i> Sertifikasi <i>Maintenance</i> <i>Preparation for the Declaration of Dukuh Atas-Oriented Transit Area Development (KBT)</i> <i>Non-Fare Box Business - Telko and Advertising</i> <i>Park and Ride and Interconnection</i> <i>Non-Fare Box Business – Retail</i> CP 107 <i>Employees Mutation</i> <i>Kampung Bandan Land</i> <i>Ex-Blora Market Land</i> <i>Recruitment of Personnel Worksite Structure</i> <i>Maintenance Certification</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
26 Maret 2018 March 26, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> Agenda Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta <i>Non-Fare Box Business</i> – Telko dan Periklanan Pencanangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas Perjanjian Kerja Sama dengan Pasar Blora Interkoneksi di Simpang CSW Progres Fisik Konstruksi <i>Signaling System</i> <i>Progres Payment</i> Persiapan Kedatangan <i>Rolling Stock</i> Lahan Kampung Bandan & MOU dengan PT KAI (Persero) <i>On the Job Training</i> untuk Karyawan Operasi dan Pemeliharaan <i>Meeting Agenda with the Deputy Governor of DKI Jakarta Province</i> <i>Non-Fare Box Business - Telko and Advertising</i> <i>Declaring Dukuh Atas as Transit-Oriented Areas</i> <i>Cooperation Agreement with Blora Market</i> <i>Interconnection at Simpang CSW</i> <i>Physical Construction Progress</i> <i>Signaling System</i> <i>Payment progress</i> <i>Preparation for Rolling Stock Arrival</i> <i>Kampung Bandan Land & MOU with PT KAI (Persero)</i> <i>On the Job Training for Operations and Maintenance Employees</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
2 April 2018 April 02, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerja Sama dengan Pasar Jaya • <i>Rolling Stock</i> • <i>Ridership Survey</i> dan Tarif & Subsidi • Kawasan Berorientasi Transit • Internal Rekrutmen dan Mutasi Karyawan • Uji Beban Struktur Badan Kereta • <i>Digital Platform</i> • Interkoneksi • Sertifikasi <i>Rolling Stock</i> • Keputusan DAB • Skema <i>Overtime</i> dan <i>Off-Day</i> • <i>Cooperation Agreement with Pasar Jaya</i> • <i>Rolling Stock</i> • <i>Ridership Survey and Tariffs & Subsidies</i> • <i>Transit Oriented Development</i> • <i>Internal Recruitment and Employee Mutation</i> • <i>Loading Test of the Train Body Structure</i> • <i>Digital Platform</i> • <i>Interconnection</i> • <i>Rolling Stock Certification</i> • <i>DAB Decision</i> • <i>Overtime and Off-Day schemes</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
10 April 2018 April 10, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Arahan Gubernur DKI Jakarta • <i>Digital Platform/Mobile Apps</i> • Mekanisme Pembayaran Interkoneksi • <i>Advanced Work</i> MRT Jakarta Fase 2 • Audit Internal atas <i>Price Adjustment</i> CP 103 • Rencana Amandemen Kontrak Konsultan JMCMC • Seragam dan Gedung Kantor • <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan Polda Metro Jaya • Aspek Keselamatan Kerja • Tambahan CCTV • Sayembara Transport Hub di Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas • <i>Follow-Up directions from the Governor of DKI Jakarta</i> • <i>Digital Platform / Mobile Apps</i> • <i>Interconnection Payment Mechanism</i> • <i>Advanced Work of MRT Jakarta Phase 2</i> • <i>Internal Audit on Price Adjustment of CP 103</i> • <i>Planning for Amendment of JMCMC Consultant Contracts</i> • <i>Uniforms and Office Buildings</i> • <i>Memorandum of Understanding (MoU) with Polda Metro Jaya</i> • <i>Occupational Safety Aspects</i> • <i>Additional CCTV</i> • <i>Transport Hub Competition in Dukuh Atas - Transit Oriented Development</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
16 April 2018 April 16, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu Pemindehan Pekerjaan <i>Mobile Applications</i> • Interkoneksi di Lebak Bulus • Mekanisme Pembayaran Interkoneksi oleh Pihak Ketiga • Advanced Work MRT Jakarta Fase 2 • Audit Internal atas <i>Price Adjustment</i> CP 103 • Audit Internal atas <i>Price Adjustment</i> CP 103 • Tambahan CCTV • Pagar di Area Transisi • Sayembara <i>Transport Hub</i> di Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas (KBT DA) • <i>Leadership Program</i> • Pengembangan SDM • Jenjang Karier Karyawan • Pedestrian Stasiun Sisingamangaraja • Aset Pipa ESDM • <i>Variations Order</i> (VO) Penerangan Jalan Sudirman – Thamrin • <i>Review on moving Mobile Applications work</i> • <i>Interconnection in Lebak Bulus</i> • <i>Interconnection Payment Mechanism by Third Parties</i> • <i>Advanced Work of MRT Jakarta Phase 2</i> • <i>Internal Audit of Price Adjustment CP 103</i> • <i>Internal Audit of Price Adjustment CP 103</i> • <i>Additional CCTV</i> • <i>Guardrail in the Transition Area</i> • <i>Transport Hub Competition in Dukuh Atas - Transit Oriented Development (TOD DA)</i> • <i>Leadership Program</i> • <i>HC Development</i> • <i>Employee Career Levels</i> • <i>Pedestrian Sisingamangaraja Station</i> • <i>ESDM Pipe Assets</i> • <i>Variations Order (VO) Lighting on Sudirman - Thamrin</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
23 April 2018 April 23, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Advanced Work</i> MRT Jakarta Fase 2 • Sistem Keamanan MRT Jakarta • Pagar di Area Transisi • <i>Leadership Program</i> • <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Pengembangan SDM dengan PT KAI (Persero) • Lahan Eks Pasar Blora • Pascapencanangan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas • Pembentukan Tim Rencana Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas (KBT DA) • Suplai Listrik • <i>Peretujuan Variations Order (VO)</i> • <i>Proposal Revisi Struktur Organisasi Divisi Keuangan & Authorized</i> • <i>Advanced Work of MRT Jakarta Phase 2</i> • <i>MRT Jakarta Security System</i> • <i>Guardrail in Transition Area</i> • <i>Leadership Program</i> • <i>Memorandum of Understanding (MoU) for HC Development with PT KAI (Persero)</i> • <i>Ex-Blora Market Land</i> • <i>Post-declaration of Dukuh Atas - Transit Oriented Development</i> • <i>Management Plan Team (KBT DA) Formation of Dukuh Atas - Transit Oriented Development</i> • <i>Electricity supply</i> • <i>Approval of Variations Order (VO)</i> • <i>Proposal on Organization Structure Revision of Finance & Authorized Division</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
27 April 2018 April 27, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Temuan Audit pada Human Resources & Services Department</i> • <i>Perubahan Kontrak Ke-4 Konsultan JMCMC</i> • <i>Audit Findings in Human Capital & Services Department</i> • <i>Fourth Contract Amendment of JMCMC Consultant</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
30 April 2018 April 30, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Advanced Work</i> MRT Jakarta Fase 2 • Sistem Keamanan MRT Jakarta • Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang Penetapan Dewan Komisaris • <i>Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i> dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) • Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas (KBT DA) • <i>Peretujuan Variations Order (VO) – Soil Handling Work</i> • <i>Human Capital</i> • <i>Drainase</i> di Stasiun Bendungan Hilir • Pendanaan Konstruksi MRT Jakarta Fase 2 • <i>Potential Investment</i> • <i>Transfer Development Right</i> • <i>Sayembara Jingle/Chime</i> MRT Jakarta • <i>Advanced Work of MRT Jakarta Phase 2</i> • <i>MRT Jakarta Security System</i> • <i>Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning Determination of the Board of Commissioners</i> • <i>Memorandum of Understanding (MoU) / Cooperation Agreement (PKS) with PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI)</i> • <i>Dukuh Atas - Transit Oriented Development (TOD DA)</i> • <i>Variations Order (VO) Agreement - Soil Handling Work</i> • <i>Human Capital</i> • <i>Drainage at the Bendungan Hilir Station</i> • <i>MRT Jakarta Phase 2 Construction Funding</i> • <i>Investment Potential</i> • <i>Transfer Development Right</i> • <i>Jingle / Chime Competition of MRT Jakarta</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Agung Wicaksono	Tuhiyat sedang perjalanan dinas he was on an official trip aboard



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
8 Mei 2018 May 08, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis • Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) • Human Capital (Perjalanan Dinas, Tenaga Ahli, dan Anugrah Masa Bakti) • Gedung Kantor untuk Karyawan Worksite • Drainase di Stasiun Bendungan Hilir • Pendanaan Konstruksi MRT Jakarta Fase 2 • Masterplan Depo & TOD Kampung Bandan • Rapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta • Sayembara Jingle/Chime MRT Jakarta • Pedestrianisasi Sudirman – Thamrin • Konstruksi Stasiun Dukuh Atas • Amandemen Kelima Kontrak JMCMC • Survey Tarif dan Ridership • Brand Personality • Operation Readiness Working Group (ORWG) • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) • Acting Development and Business Support Director • Cooperation Agreement (PKS) / Memorandum of Understanding (MoU) with PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) • Human Capital (Official Travel, Expert Staff, and Grace Period) • Office Building for Worksite Employees • Drainage at the Bendungan Hilir Station • MRT Jakarta Phase 2 Construction Funding • Masterplan Depo & TOD in Kampung Bandan • Meeting with the Deputy Governor of DKI Jakarta • Jingle / Chime Competition of MRT Jakarta • Pedestrianization of Sudirman – Thamrin • Construction of Dukuh Atas Station • Fifth Amendment of JMCMC Contract • Survey of Tariff and Ridership • Brand Personality • Operation Readiness Working Group (ORWG) • Cooperation between the Government and Business Entities (KPBU) 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
15 Mei 2018 May 15, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta • Pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) • Konsultan Konstruksi MRT Jakarta Fase 2 • Sayembara Jingle MRT Jakarta • Amandemen Kontrak JMCMC • <i>Transfer Development Right (TDR)</i> • Musholla di Stasiun • <i>Extension of Time (EOT) Kontraktor</i> • Pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Amandemen ke-5 Konsultan JMCMC • Amandemen Kontrak Konsultan JMCMC No. 4 • Gedung Kantor untuk Karyawan <i>Worksite</i> • <i>Meeting with the Deputy Governor of DKI Jakarta</i> • <i>Meeting with the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency (ATR / BPN)</i> • <i>MRT Jakarta Phase 2 Construction Consultant</i> • <i>Jingle Competition of MRT Jakarta</i> • <i>Amendment of JMCMC Contract</i> • <i>Transfer Development Right (TDR)</i> • <i>Musholla at the Station</i> • <i>Extension of Time (EOT) Contractor</i> • <i>Meeting with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) regarding the 5th Amendment of JMCMC Consultants</i> • <i>Amendment to Contract of JMCMC Consultant No. 4</i> • <i>Office Building for Worksite Employees</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
17 Mei 2018 May 17, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi • Penempatan karyawan • Rekrutmen Internal untuk Posisi <i>Worksite</i> • <i>Person Grade</i> • Sistem Manajemen SDM • Ikatan Dinas Karyawan • Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan • <i>Divisi Corporate Secretary</i> • <i>Organization Structure</i> • <i>Employee placement</i> • <i>Internal Recruitment for Worksite Position</i> • <i>Person Grade</i> • <i>HC Management System</i> • <i>Employees Apprenticeship Program</i> • <i>Responsibility for carrying out activities</i> • <i>Corporate Secretary Division</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Participants</i>	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) <i>Reason of Absence</i>
21 Mei 2018 <i>May 21, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Konstruksi MRT Jakarta Fase 2 • Amandemen Kontrak JMCMC • Musholla di Stasiun • Gedung Kantor untuk Karyawan <i>Worksite</i> • <i>Factory Acceptance Test (FAT) – Communications Based Train Control (CBTC)</i> • <i>Update Progres CP 107 dan CP 108</i> • Jasa Penyediaan Periklanan • Pedestrianisasi Sudirman – Thamrin • Pemasangan banner Asian Games 2018 • Lahan kampung Bandan • Lahan PT Mustika Lodan • <i>Ridership Survey</i> • Skema Aset • Pengajuan Harga Sewa Retail • <i>Naming Rights</i> • <i>Update Non Fare Box Business – Periklanan</i> • <i>Persetujuan Variations Order (VO) dan Price Adjustment (PA)</i> • <i>Dispute Adjudication Board (DAB)</i> • <i>MRT Jakarta Phase 2 Construction Consultant</i> • <i>Amendment of the JMCMC Contract</i> • <i>Musholla at the Station</i> • <i>Office Building for Worksite Employees</i> • <i>Factory Acceptance Test (FAT) – Communications Based Train Control (CBTC)</i> • <i>Update of CP 107 and CP 108 Progress</i> • <i>Advertising Provisioning Services</i> • <i>Pedestrianization of Sudirman – Thamrin</i> • <i>Installation of 2018 Asian Games banner</i> • <i>Kampung Bandan land</i> • <i>PT Mustika Lodan's land</i> • <i>Ridership Survey</i> • <i>Asset Scheme</i> • <i>Submission of Retail Rental Prices</i> • <i>Naming Rights</i> • <i>Non Fare Box Business Update – Advertising</i> • <i>Variations Order (VO) and Price Adjustment (PA) Agreements</i> • <i>Dispute Adjudication Board (DAB)</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
28 Mei 2018 May 28, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Dispute Adjudication Board (DAB) • Pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) • Konsultan Konstruksi MRT Jakarta Fase 2 • Musholla di Stasiun • Jasa Penyediaan Periklanan • Lahan Kampung Bandan • Ridership Survey • Pengajuan Harga Sewa Retail • Gedung Kantor Pusat • Skema Subsidi • Strategi Komunikasi Menuju Operasi MRT Jakarta 2019 • E-Ticketing • Naming Rights • Update Enterprise Resource Planning (ERP) • Dispute Adjudication Board (DAB) • Meeting with the Minister of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) • MRT Jakarta Phase 2 Construction Consultant • Musholla at the Station • Advertising Provisioning Services • Kampung Bandan Land • Ridership Survey • Submission of Retail Rental Prices • Headquarters Building • Subsidized Schemes • Communication Strategy Towards 2019 MRT Jakarta Operations • E-Ticketing • Naming Rights • Update Enterprise Resource Planning (ERP) 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
4 Juni 2018 June 04, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Musholla di Stasiun • Lahan Kampung Bandan • Financial Charges OSJ (CP 103) • Ridership Survey • Pengajuan Harga Sewa Retail • Sayembara Jingle MRT Jakarta • Skema Subsidi • Announcer • Kandidat Kepala Divisi Human Capital • Musholla at the Station • Kampung Bandan Land • Financial Charges OSJ (CP 103) • Ridership Survey • Submission of Retail Rental Prices • Jingle Competition of MRT Jakarta • Subsidized Schemes • Announcer • Candidates for the Head of Human Capital Division 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
12 Juni 2018 June 12, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Kampung Bandan • Financial Charges OSJ (CP 103) • Ridership Survey • Gedung Kantor Pusat • Sayembara Jingle MRT Jakarta • Skema Subsidi • Sertifikasi Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) • Kebutuhan Listrik untuk Non-Fare Box Business • Persetujuan SOP • Analisis Dampak Lalu Lintas Dukuh Atas Konsultan PDW • Jadwal Metro One Consortium (MOC) • Lelang OMCS MRT Jakarta Fase 2 • Term of Reference (TOR) Outsourcing • Kampung Bandan Land • Financial Charges of OSJ (CP 103) • Ridership Survey • Headquarters Building • Jingle Competition of MRT Jakarta • Subsidized Schemes • Certification of Indonesia Railways Academy (API) • Electricity Needs for Non-Fare Box Business • SOP approval • Traffic Impact Analysis of PDW Consultants • Metro One Consortium (MOC) Schedule • MRT Jakarta Phase 2 OMCS auction • Outsourcing Term of Reference (TOR) 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
22 Juni 2018 June 22, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Kantor Pusat • Persiapan Asian Games • Lahan Kampung Bandan • Skema Subsidi • Announcer • Pelatihan Karyawan Operasi dan Pemeliharaan • Aspek Security • Lelang OMCS MRT Jakarta Fase 2 • Progres MRT Fase 1 • Headquarters Building • Preparation for Asian Games • Kampung Bandan Land • Subsidized Schemes • Announcer • Operations and Maintenance Employee Training • Security aspects • MRT Jakarta Phase 2 OMCS auction • Phase 1 MRT Progress 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
28 Juni 2018 June 28, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Kantor Pusat • Persiapan Asian Games • Lahan Kampung Bandan • Penyerapan Anggaran • Skema Subsidi • Pelatihan Karyawan Operasi dan Pemeliharaan • Struktur Organisasi – Fungsi Asuransi • Banner Asian Games • Media Center • Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-73 • Acara HUT RI ke 73 dan <i>Employee Gathering</i> PT MRT Jakarta • Pengadaan <i>Outsourcing Services</i> • Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-10 PT MRT Jakarta • <i>Headquarters Building</i> • <i>Preparation for Asian Games</i> • <i>Kampung Bandan Land</i> • <i>Budget Absorption</i> • <i>Subsidized Schemes</i> • <i>Operations and Maintenance Employee Training</i> • <i>Organization Structure - Insurance Function</i> • <i>Asian Games Banner</i> • <i>Media Center</i> • <i>Implementation of the 73rd Republic of Indonesia (RI) Anniversary Ceremony</i> • <i>The 73rd Indonesian Independence Day and Employee Gathering of PT MRT Jakarta</i> • <i>Procurement of Outsourcing Services</i> • <i>Celebration of PT MRT Jakarta's 10th Anniversary</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Agung Wicaksono	Tuhyat sedang perjalanan dinas <i>he was on an official trip aboard</i>
4 Juli 2018 July 04, 2018	Ballroom Hotel Mercure, Simatupang	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Kampung Bandan • Satuan Tugas (<i>Task Force</i>) Percepatan Pembayaran Kontraktor • Skema Subsidi • <i>Testing and Commissioning</i> • <i>Extension Of Time</i> • Sistem Manajemen Pengamanan • Pengadaan <i>Outsourcing Services</i> • <i>Kampung Bandan Land</i> • <i>Task Force for Accelerating Payment of Contractors</i> • <i>Subsidized Schemes</i> • <i>Testing and Commissioning</i> • <i>Extension of Time</i> • <i>Security Management System</i> • <i>Procurement of Outsourcing Services</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
9 Juli 2018 <i>July 09, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Kampung Bandan • Skema Subsidi • Pusat <i>Training</i> di Fase 2 • TOR OMCS 2nd Stage • <i>Manpower</i> dan Struktur Organisasi Direktorat Operasi dan Pemeliharaan • Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) • <i>Tender Local Competitive Bidding</i> MRT Jakarta Fase 2 • <i>Enterprise Resource Program</i> (ERP) • <i>Kampung Bandan Land</i> • <i>Subsidized Schemes</i> • <i>Training Center in Phase 2</i> • TOR OMCS 2nd Stage • <i>Manpower and Organization Structure of the Directorate of Operations and Maintenance</i> • <i>Cooperation Agreement with the Creative Economy Agency</i> (Bekraf) • <i>Local Competitive Bidding Tender for MRT Jakarta Phase 2</i> • <i>Enterprise Resource Program</i> (ERP) 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
16 Juli 2018 <i>July 16, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Kantor Pusat • Lahan Kampung Bandan • Pusat <i>Training</i> di Fase 2 • <i>Manpower</i> dan Struktur Organisasi Direktorat Operasi dan Pemeliharaan • <i>Internal Recruitment, Grade Evaluation, dan Leadership Program</i> • <i>Loan Agreement</i> MRT Jakarta Fase 2 • <i>Tender Local Competitive Bidding</i> MRT Jakarta Fase 2 • <i>Variation order dan Price adjustment</i> • Seragam baru karyawan • <i>Headquarters Building</i> • <i>Kampung Bandan Land</i> • <i>Training Center in Phase 2</i> • <i>Manpower and Organization Structure of the Directorate of Operations and Maintenance</i> • <i>Internal Recruitment, Grade Evaluation, and Leadership Program</i> • <i>MRT Jakarta Phase 2 Loan Agreement</i> • <i>Local Competitive Bidding Tender for MRT Jakarta Phase 2</i> • <i>Variation order and Price adjustment</i> • <i>New employee uniforms</i> 		



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
23 Juli 2018 July 23, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> Naming Rights Digital Display di dalam Rolling Stock ERP dan MMS Integrasi Enterprise Resource Planning (ERP) dan CP107-108 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
30 Juli 2018 July 30, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> Delay Charges Tender Local Competitive Bidding (LCB) MRT Jakarta Fase 2 Operation & Maintenance Cost (OM Cost) Asset Ownership Pelican Crossing Jalan M.H. Thamrin Internal Recruitment Grade Evaluation Rekomendasi Tunjangan Jabatan Rekomendasi Uang Saku Karyawan Magang Employee Gathering dan Perayaan HUT RI Perjanjian Kerja Sama PD Pasar Jaya & PT MRT Jakarta Delay Charges Tender for Local Competitive Bidding (LCB) MRT Jakarta Phase 2 Operation & Maintenance Cost (OM Cost) Ownership Assets Pelican Crossing Jalan M.H. Thamrin Internal Recruitment Grade Evaluation Positional Allowance Recommendations Recommended allowance for internship employees Employee Gathering and Celebration of RI Anniversary PD Pasar Jaya & PT MRT Jakarta Cooperation Agreement 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
7 Agustus 2018 August 07, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Delay Charges • Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan • Memorandum of Understanding (MoU) antara PT MRT Jakarta, PT TransJakarta dan PT Jakarta Propertindo • Operation & Maintenance Cost (OM Cost) • Internal Recruitment • Rekomendasi Tunjangan Jabatan • Launching Marti, Mobile Apps, dan Merchandise MRT Jakarta • Variations Order (VO) CP106 • Delay Charges • Procurement Standard Operating Procedure (SOP) • Memorandum of Understanding (MoU) between PT MRT Jakarta, PT TransJakarta and PT Jakarta Propertindo • Operation & Maintenance Cost (OM Cost) • Internal Recruitment • Positional Allowance Recommendations • Launching of Marti, Mobile Apps and MRT Jakarta Merchandise • Variations Order (VO) CP106 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
13 Agustus 2018 August 13, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Delay Charges • Memorandum of Understanding (MoU) antara PT MRT Jakarta, PT TransJakarta dan PT Jakarta Propertindo • Extension of Time (EOT) CP101 dan CP102 • Dokumentasi Pembebasan Lahan • Service Value and Brand Personality • Delay Charges • Memorandum of Understanding (MoU) between PT MRT Jakarta, PT TransJakarta and PT Jakarta Propertindo • Extension of Time (EOT) CP101 and CP102 • Land Acquisition Documentation • Service Value and Brand Personality 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
21 Agustus 2018 August 21, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institusi Pendidikan • Pemeliharaan di Luar Defect Liability Period (DLP) • Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Metro Jaya • Lahan Kampung Bandan • Financial Charges • Pameran Gagasan Desain Transport Hub di Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas • Kebijakan Sumber Daya Manusia untuk Karyawan Bekerja Lembur • Memorandum of Understanding (MoU) with Educational Institutions • Maintenance outside the Defect Liability Period (DLP) • Memorandum of Understanding (MoU) with Polda Metro Jaya • Kampung Bandan Land • Financial Charges • Exhibition of Design Ideas for Transport Hubs in Dukuh Atas Transit Oriented Development • Human Capital Policy for Overtime Workers 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
24 Agustus 2018 August 24, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Gardu Induk Listrik & Stasiun MRT Monas di Lapangan Merdeka • Development Plan of Electric Power Station & MRT Monas Station at Merdeka Square 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
27 Agustus 2018 August 27, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Malam Penganugerahan Sayembara Gagasan Desain <i>Transport Hub</i> • Tunjangan Jabatan • <i>Internal Recruitment</i> Gelombang 2 • Kebijakan Sumber Daya Manusia <i>Worksite</i> • <i>Extension of Time</i> (EOT) CP101 dan CP102 • Pemeliharaan di luar <i>Defect Liability Period</i> (DLP) • <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan Polda Metro Jaya • Progres <i>Naming Rights</i> • Ketentuan dan Prosedur <i>General affairs</i> • <i>Awarding Night of Transport Hub Design Ideas Competition</i> • <i>Positional Allowance</i> • <i>Internal Recruitment Phase 2</i> • <i>Worksite Human Capital Policy</i> • <i>Extension of Time</i> (EOT) CP101 and CP102 • <i>Maintenance outside the Defect Liability Period</i> (DLP) • <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) with Polda Metro Jaya • <i>Naming Rights Progress</i> • <i>General Affair Terms and Procedures</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
3 September 2018 September 03, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta terkait Stasiun Monas dan Depo Kampung Bandan • <i>Electronic Fare Collection</i> (EFC) • <i>Delay Charges</i> • <i>Internal Recruitment</i> Gelombang 2 • Kebijakan tentang Masa <i>Probation</i> Karyawan • <i>Evaluation of Extension of Time</i> (EOT) <i>Cost Impact</i> • Kebutuhan Dana untuk <i>Masterplan</i> Kawasan Berorientasi Transit (KBT) MRT Jakarta Fase II • <i>Land Acquisition Management</i> MRT Jakarta Fase II • Kebutuhan Dana untuk Penambahan Fungsi SAP • <i>Meeting with the Governor of DKI Jakarta regarding the National Monas Station and Kampung Bandan Depo</i> • <i>Electronic Fare Collection</i> (EFC) • <i>Delay Charges</i> • <i>Internal Recruitment Phase 2</i> • <i>Policy on Employee Probation Periods</i> • <i>Extension of Time</i> (EOT) <i>Cost Impact Evaluation</i> • <i>Funding Requirements for MRT Jakarta Phase II - Transit Oriented Development Masterplan</i> (KBT) • <i>Land Acquisition Management</i> MRT Jakarta Fase II • <i>Funding Requirements for Addition of SAP Functions</i> 	Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	William P. Sabandar sedang dalam cuti <i>he was on day off schedule</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
10 September 2018 September 10, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Electronic Fare Collection</i> • <i>Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas (KBT DA)</i> • <i>Progres Naming Rights</i> • <i>Amendemen Perjanjian Kerjasama (PKS) Telekomunikasi</i> • <i>Kebutuhan Listrik Retail</i> • <i>Electronic Fare Collection</i> • <i>Transit Oriented Development of Dukuh Atas (TOD DA)</i> • <i>Naming Rights Progress</i> • <i>Amendment of Telecommunications Cooperation Agreement (PKS)</i> • <i>Retail electricity needs</i> 	Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	William P. Sabandar sedang dalam cuti He was on day off schedule
18 September 2018 September 18, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strategi Mempersiapkan Penyelesaian Konstruksi dan Persiapan Operasi Fase I</i> • <i>Fase II MRT Jakarta</i> • <i>Safety Function During Pre-Commencement</i> • <i>Retail MRT Jakarta</i> • <i>Strategy to Prepare for Completion of Construction and Preparation for Phase I Operations</i> • <i>MRT Jakarta Phase II</i> • <i>Safety Function During Pre-Commencement</i> • <i>Retail of MRT Jakarta</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
20 September 2018 September 20, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Configuration and Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms (RICEF)</i> • <i>Variation Order - Reinstatement Work Based on the Updated Design Criteria of Sudirman – Thamrin Street (BHI – Sinar Mas Building) CP 106</i> • <i>Price Adjustment untuk IPC 56 – 59 CP 104 dan CP 105</i> • <i>Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas</i> • <i>Configuration and Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms (RICEF)</i> • <i>Variation Order - Reinstatement Work Based on the Updated Design Criteria of Sudirman - Thamrin Street (BHI - Sinar Mas Building) CP 106</i> • <i>Price Adjustment for IPC 56 - 59 CP 104 and CP 105</i> • <i>Construction of Dukuh Atas Pedestrian Deck</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
24 September 2018 September 24, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Departemen Security</i> • <i>Laporan Pemasangan Banner Asian Games 2018</i> • <i>Rencana Pemasangan Banner Asian Paragames 2018</i> • <i>Pameran Publik dan Malam Penganugerahan Sayembara Gagasan Desain Transport Hub</i> • <i>Tindak Lanjut Keamanan Sarana Prasarana MRT Jakarta</i> • <i>Penyelesaian Lahan di Stasiun Sisingamangaraja, Haji Nawi dan Blok A</i> • <i>Security Department</i> • <i>Installation Report for 2018 Asian Games Banner</i> • <i>Planning for Installing 2018 Asian Paragames Banner</i> • <i>Public Exhibition and Awarding Night of the Transport Hub Design Ideas</i> • <i>Security Follow-Up of MRT Jakarta Infrastructure</i> • <i>Land Settlement at Sisingamangaraja Station, Haji Nawi and Block A</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
1 Oktober 2018 October 01, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jadwal Testing and Commissioning</i> • <i>Rencana Awal Pengembangan MRT Jakarta Lebak Bulus Menuju Tangerang Selatan</i> • <i>Update Penyelesaian Kasus Vandalisme dan Upaya Perbaikan Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan</i> • <i>Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Pengamanan Satwa</i> • <i>Fellowship Program</i> • <i>Internal Recruitment</i> • <i>Standard Operation Procedure (SOP) Manajemen Lingkungan</i> • <i>Variation Order (VO) dan Price Adjustment (PA) CP101 dan CP102</i> • <i>Variation Order (VO) CP 103</i> • <i>Pedestrianisasi Jalan Kendal</i> • <i>Testing and Commissioning Schedule</i> • <i>Early Plan for the Development of MRT Jakarta Lebak Bulus Towards South Tangerang</i> • <i>Update on Case Vandalism Settlement and Efforts to Improve Implementation of Security Management Systems</i> • <i>Terms of Reference (KAK) for Animal Safety Services</i> • <i>Fellowship Program</i> • <i>Internal Recruitment</i> • <i>Environmental Management Standard Operation Procedure (SOP)</i> • <i>Variation Order (VO) and Price Adjustment (PA) CP101 and CP102</i> • <i>Variation Order (VO) CP 103</i> • <i>Pedestrianization of Jalan Kendal</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
4 Oktober 2018 October 04, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Extension of time (EOT) Evaluation Kontraktor Tokyo – Wika Joint Operation (TWJO) • Extension of time (EOT) Evaluation of Tokyo Contractor - Wika Joint Operation (TWJO) 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
8 Oktober 2018 October 08, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Pedestrianisasi Jalan Kendal • Hasil Pertemuan dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI) • Hasil Pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta • Amandemen Kontrak JMCMC • Variations Order Kontraktor CP103 • Variations Order dan Price Adjustment CP104 & CP105 • Variations Order CP106 • Pengadaan CP200 • Seragam Baru Karyawan MRT Jakarta • Detailed Engineering Design (DED) Pasar Blora • Retail Regular • Pedestrianization of Jalan Kendal • Meeting Results with the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (RI) • Meeting Results with the Governor of DKI Jakarta • JMCMC Contract Amendment • CP103 Contractor Variations Order • CP104 & CP105 Variations Order and Price Adjustment • CP106 Variations Order • CP200 Procurement • New Uniforms for MRT Jakarta Employees • Blora Market Detailed Engineering Design (DED) • Regular Retail 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	
16 Oktober 2018 October 16, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2019 • Integrasi Jak Lingko • Variations Order CP104 & CP105 dan CP101 dan CP102 • Pengindonesiaan Terminologi MRT Jakarta • Penandatanganan Explanatory Notes • Delay Payment • Proposal of 2019 Local Government's Capital Investment (PMD) • Integration of Jak Lingko • Variations Order of CP104 & CP105 and CP101 and CP102 • Indonesian Terminology of MRT Jakarta • Signing of Explanatory Notes • Delay Payment 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Agung Wicaksono	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
17 Oktober 2018 October 17, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Security Manual • Call Center PT MRT Jakarta • Project Management Manual • Quality Management System Manual • MRT Transport Academy • Jasa Pengamanan Satwa • Security Manual • PT MRT Jakarta Call Center • Project Management Manual • Quality Management System Manual • MRT Transport Academy • Animal Security Services 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
22 Oktober 2018 October 22, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2019 • DED Pasar Blora • Penandatanganan Explanatory Notes dan Loan Agreement • Security • MRT Transport Academy • Perubahan Kebijakan Keuangan dan Akuntansi • Evaluasi atas Honor Tim Verifikasi Pembangunan MRT Jakarta • Progress Penyusunan Tarif dan Subsidi • Delay Payment • Kebutuhan Dana untuk Variation Order • Amandemen Perjanjian Kerja Sama PT MRT Jakarta dengan PT Avabanindo Perkasa • Amandemen Perjanjian Kerja Sama PT MRT Jakarta dengan PT Tower Bersama • ERP • Section Head • Seragam Karyawan PT MRT Jakarta • 2019 Local Government Capital Investment (PMD) • DED Blora Market • Signing of Explanatory Notes and Loan Agreement • Security • MRT Transport Academy • Changes in Finance and Accounting Policies • Evaluation on Verification Team Honorarium of MRT Jakarta Development • Progress on Preparation of Rates and Subsidies • Delay Payment • Funding Requirements for Variation Orders • Amendment of PT MRT Jakarta Cooperation Agreement with PT Avabanindo Perkasa • Amendment of PT MRT Jakarta Cooperation Agreement with PT Tower Bersama • ERP • Section Head • Uniforms of PT MRT Jakarta employees 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
29 Oktober 2018 October 29, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Serah Terima Jabatan Direksi dan Komisaris • Hal-Hal Terkait Penambahan Jumlah Direksi • MoU dengan PT Transportasi Jakarta • Aspek-Aspek Prioritas di Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i> • Interkoneksi • Pembentukan <i>Joint Venture Electronic Fare Collection (EFC)</i> • Security • Tarif dan Subsidi • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 • <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> • Strategi Komunikasi • Subsidi Tunjangan Makan Siang dan Parkir Berlangganan Tenaga Alih Daya • Kebutuhan Kantor PT MRT Jakarta • <i>Handover of Directors and Commissioners' Position</i> • <i>Matters relating to the addition of number of Directors</i> • <i>MoU with PT Transportasi Jakarta</i> • <i>Priority Aspects in Corporate Strategy and Planning Division</i> • <i>Interconnection</i> • <i>Establishment of a Joint Venture Electronic Fare Collection (EFC)</i> • Security • <i>Rates and subsidies</i> • <i>Corporate Work Plan and Budget in 2019</i> • <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> • <i>Communication Strategy</i> • <i>Subsidies on Lunch and Subscription Parking Allowance for the Outsourcing</i> • <i>Office needs of PT MRT Jakarta</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Agung Wicaksono	
6 November 2018 November 06, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi dengan TransJakarta • Integrasi dengan TransJakarta di Bundaran Hotel Indonesia (BHI) dan <i>Centrale Stichting Wederopbouw (CSW)</i> • <i>Non-Fare Box Revenue</i> • <i>Integration with TransJakarta</i> • <i>Integration with TransJakarta at Bundaran Hotel Indonesia (BHI) and Centrale Stichting Wederopbouw (CSW)</i> • <i>Non-Fare Box Revenue</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Muhammad Effendi Ghamal Peris	



Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Participants</i>	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) <i>Reason of Absence</i>
12 November 2018 <i>November 12, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none">• Usulan Anggaran Subsidi• Persiapan dan Jadwal Operasi Komersial• Pra-RUPS dan RUPS• Seragam Baru Karyawan PT MRT Jakarta• MRT <i>Fellowship Program</i> (MFP)• Integrasi dengan TransJakarta di Halte Sisingamangaraja• Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia• Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Lebak Bulus• Pengelolaan Gedung Kantor di Eks Pasar Blora• Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa• TOD dan <i>Land Consolidation</i>• <i>Proposed Subsidized Budget</i>• <i>Commercial Operation Preparation and Schedule</i>• <i>Pre-GMS and GMS</i>• <i>New Uniform of PT MRT Jakarta Employees</i>• <i>MRT Fellowship Program (MFP)</i>• <i>Integration with TransJakarta at Sisingamangaraja Shelter</i>• <i>Integration with TransJakarta at Bundaran Hotel Indonesia Station</i>• <i>Integration with TransJakarta at Lebak Bulus Station</i>• <i>Management of Office Buildings at Ex Blora Market</i>• <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i>• <i>TOD and Land Consolidation</i>	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Muhammad Effendi Ghamal Peris	



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Participants</i>	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) <i>Reason of Absence</i>
19 November 2018 <i>November 19, 2018</i>	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 <i>Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Anggaran Subsidi • Integrasi dengan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) di Stasiun Sisingamangaraja • Pengelolaan Gedung Kantor di Eks Pasar Blora • Amandemen Kontrak dengan PT Tower Bersama (TBG) • Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa • Hal-Hal terkait Operasi dan Pemeliharaan • Arahan dari Gubernur DKI Jakarta • Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia • Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Sisingamangaraja • Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Lebak Bulus • Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Blok M • Integrasi dengan TransJakarta di Stasiun Fatmawati • <i>Transit Oriented Development (TOD) PT MRT Jakarta</i> • <i>Proposal Rangkaian Menuju Operasi dan Peresmian Operasi MRT Jakarta</i> • <i>Potensi Revenue Pengelolaan Halte disekitar Stasiun MRT Jakarta</i> • <i>Proposed Subsidized Budget</i> • <i>Integration with PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) at Sisingamangaraja Station</i> • <i>Management of Office Buildings at Ex Blora Market</i> • <i>Amendment of Contract with PT Tower Bersama (TBG)</i> • <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i> • <i>Matters relating to Operations and Maintenance</i> • <i>Direction from the Governor of DKI Jakarta</i> • <i>Integration with TransJakarta at Bundaran Hotel Indonesia Station</i> • <i>Integration with TransJakarta at Sisingamangaraja Station</i> • <i>Integration with TransJakarta at Lebak Bulus Station</i> • <i>Integration with TransJakarta at Blok M Station</i> • <i>Integration with TransJakarta at Fatmawati Station</i> • <i>Transit Oriented Development (TOD) of PT MRT Jakarta</i> • <i>Series Proposal Towards Operation and Inauguration of MRT Jakarta Operations</i> • <i>Potential Revenue for Shelter Management around MRT Jakarta Station</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Muhammad Effendi Ghamal Peris	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
26 November 2018 November 26, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Park and Ride • Studi Integrasi Transportasi Antarmoda • Rencana Induk Perkeretaapian Jakarta • Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 dan No. 4 Tahun 2008 • Pengelolaan Gedung Kantor di Eks Pasar Blora • Amandemen Kontrak dengan PT Tower Bersama (TBG) • Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa • Hal-Hal Terkait Operasi dan Pemeliharaan • Integrasi di Sisingamangaraja • Park and Ride • Intermodal Transportation Integration Study • Jakarta Railways Master Plan • Amendment to Regional Regulation No. 3 of 2008 and No. 4 of 2008 • Management of Office Buildings at Ex Blora Market • Amendment of Contract with PT Tower Bersama (TBG) • Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa • Matters relating to Operation and Maintenance • Integration in Sisingamangaraja 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Muhammad Effendi Ghamal Peris	
3 Desember 2018 December 03, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Park and Ride • Studi Integrasi Transportasi Antarmoda • Pengelolaan Gedung Kantor di Eks Pasar Blora • Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa • Usulan Perubahan Struktur Organisasi di Direktorat Business Development and Support • Usulan Penamaan Gedung di Depo Lebak Bulus • IT Audit • Park and Ride • Intermodal Transportation Integration Study • Management of Office Buildings at Ex Blora Market • Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa • Proposed Changes on Organization Structure in Development and Business Support Directorate • Proposed Naming of Buildings at Lebak Bulus Depot • IT Audit 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Ghamal Peris	Muhammad Effendi sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri He was on an official trip aboard



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
10 Desember 2018 December 10, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Fase II MRT Jakarta • Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa • Usulan Perubahan Struktur Organisasi • Persiapan Pengadaan <i>Outsourcing</i> Tenaga Pemeliharaan <i>Mechanical Electrical Plumbing</i> (MEP) dan Pintu Tepi Peron/<i>Platform Screen Door</i> (PSD) • Standar Pelayanan <i>Minimum</i> (SPM) dan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) • <i>Roadmap Supply-Chain Management</i> dan <i>Procurement Modernisasi</i> • Usulan Perubahan Struktur Organisasi pada Direktorat Konstruksi • <i>MRT Jakarta Phase II</i> • <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i> • <i>Proposed Changes in Organization Structure</i> • <i>Procurement Preparation of Outsourcing for Maintenance of Mechanical Electrical Plumbing (MEP) and Platform Screen Door (PSD)</i> • <i>Minimum Service Standards (SPM) and Service Level Agreement (SLA)</i> • <i>Roadmap for Supply-Chain Management and Procurement Modernization</i> • <i>Proposed Changes on Organization Structure in Construction Directorate</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Muhammad Effendi Ghamal Peris	
17 Desember 2018 December 17, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Fase II MRT Jakarta • Standar Pelayanan <i>Minimum</i> (SPM) dan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) • <i>Roadmap Supply-Chain Management</i> dan <i>Procurement Modernisasi</i> • Laporan Direktorat Konstruksi • Laporan Direktorat Operasi & Pemeliharaan • Laporan Direktorat Pengembangan dan Dukungan Bisnis • Survei <i>Online</i> Kereta Khusus Wanita • Kebutuhan <i>Insurance Coverage</i> • Integrasi dengan TransJakarta • <i>MRT Jakarta Phase II</i> • <i>Minimum Service Standards (SPM) and Service Level Agreement (SLA)</i> • <i>Roadmap for Supply-Chain Management and Procurement Modernization</i> • <i>Report of Construction Directorate</i> • <i>Report of Operation & Maintenance Directorate</i> • <i>Report of Development and Business Support Directorate</i> • <i>Online Survey of Ladies Special Train Services</i> • <i>Coverage Insurance Needs</i> • <i>Integration with TransJakarta</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Muhammad Effendi Ghamal Peris	



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants	Alasan Ketidakhadiran Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
27 Desember 2018 December 27, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan Listrik untuk <i>Retail</i> dan <i>Advertising</i> • Prosedur dan Kriteria Uji coba Publik Terbatas • Pengadaan <i>Outsource Cleaning, Waste Management</i> dan <i>Pest Control</i> • <i>Call Center</i> MRT Jakarta • Fase II MRT Jakarta • <i>Electricity Needs for Retail and Advertising</i> • <i>Limited Public Test Procedures and Criteria</i> • <i>Procurement of Outsourcing for Cleaning, Waste Management and Pest Control</i> • <i>MRT Jakarta Call Center</i> • <i>MRT Jakarta Phase II</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Muhammad Effendi Ghamal Peris	
31 Desember 2018 December 31, 2018	Kantor Perusahaan. Gedung Wisma Nusantara, lantai 21 Company Office. Wisma Nusantara Building, 21st floor	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan Kriteria Uji coba Publik Terbatas • Mutasi Jabatan • CP 104 & CP 105 <i>Financial Charges</i> SOWJ • Potensi Pendapatan <i>Non-Farebox</i> (NFB) tahun 2019 • UMKM • IT Audit • Pengadaan Kartu Tiket MRT Jakarta • <i>Limited Public Test Procedures and Criteria</i> • <i>Position mutation</i> • <i>CP 104 & CP 105 SOWJ Financial Charges</i> • <i>Non-Farebox Income Potential (NFB) in 2019</i> • <i>MSMEs</i> • <i>IT Audit</i> • <i>Procurement of MRT Jakarta Ticket Cards</i> 	William P. Sabandar Silvia Halim Tuhiyat Muhammad Effendi Ghamal Peris	

Rekapitulasi kehadiran Direksi pada Rapat Direksi dapat dilihat di bawah ini :

Board of Directors' Attendance Recapitulation at the Board of Directors' Meeting can be seen below:

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Board of Directors' Attendance Recapitulation at the Board of Directors' Meeting

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Compulsory Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tidak Hadir Absence	% Kehadiran Attendance
William P. Sabandar (Direktur Utama) <i>President Director</i>	59	57	2	96,61%
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) <i>Construction Director</i>	59	59	0	100,00%
Tuhiyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) <i>Finance and Administration Director</i>	59	57	2	96,61%
Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)* <i>Operation and Maintenance Director*</i>	9	8	1	88,89%



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi *Board of Directors' Attendance Recapitulation at the Board of Directors' Meeting*

Direksi <i>Board of Directors</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Compulsory Meeting</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	Tidak Hadir <i>Absence</i>	% Kehadiran <i>Attendance</i>
Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis)* <i>Development and Business Support Director*</i>	9	9	-	100,00%
Agung Wicaksono (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)** <i>Operation and Maintenance Director**</i>	50	49	1	98,00%
Rata-rata Average				96,68%

*) Muhammad Effendi dan Ghamal Peris duduk dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018.

**) Agung Wicaksono tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018.

*) Muhammad Effendi and Ghamal Peris have been in the Board of Directors since October 29, 2018.

**) Agung Wicaksono has no longer served in the Board of Directors since October 29, 2018.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum Agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

- Evaluasi Kinerja Keuangan dan Operasional Perusahaan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- Pembahasan dan Penetapan RKAP.
- Evaluasi dan Rekomendasi Komite-Komite di Bawah Direksi.
- Persiapan pelaksanaan RUPS.
- Agenda lain yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan Departemen-departemen yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Joint Meeting of The Board of Commissioners and Board of Directors

In general, agenda of joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors discuss the following matters:

- Evaluation on the Company's Financial and Operational Performance (monthly, quarterly, semester and annually);
- Discussion and Determination of RKAP;
- Evaluation and Recommendation of Committees under the Board of Directors
- GMS implementation preparation
- Other agenda to become the authority of Board of Commissioners and Board of Directors

Information regarding implementation of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors must be disseminated at least 7 (seven) days prior to the meeting. The announcement contains information regarding date and time of meeting, meeting location, meeting agenda and participants of meeting. Information regarding meeting implementation plan has also been distributed to related parties such as Corporate Secretary and other organs namely SPI and existing departments. In the event of incidental meeting, the announcement must be conducted as effectively and efficiently as possible with regard to the applicable documentation procedure (preparing minutes of meeting).



Di tahun 2018, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 12 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

In 2018, joint meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors are held 12 times. Following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in these meetings.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan/atau Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
29 Januari 2018 <i>January 29, 2018</i>	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 <i>Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor</i>	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. <i>Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yusmada Faizal 3. Rukijo 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhayat 7. Agung Wicaksono	Prasetyo tidak hadir karena sedang ada tugas <i>Prasetyo was not present because of an assignment</i>
26 Februari 2018 <i>February 26, 2018</i>	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 <i>Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor</i>	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. <i>Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yusmada Faizal 3. Rukijo 4. Prasetyo Boeditjahjono 5. William P. Sabandar 6. Silvia Halim 7. Tuhayat 8. Agung Wicaksono	N/A
21 Maret 2018 <i>March 21, 2018</i>	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 <i>Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 <i>2018 Annual GMS</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yusmada Faizal 3. Rukijo 4. Prasetyo Boeditjahjono 5. William P. Sabandar 6. Silvia Halim 7. Tuhayat 8. Agung Wicaksono	N/A
23 April 2018 <i>April 23, 2018</i>	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 <i>Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor</i>	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. <i>Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.</i>	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yusmada Faizal 3. Rukijo 4. Prasetyo Boeditjahjono 5. William P. Sabandar 6. Silvia Halim 7. Tuhayat 8. Agung Wicaksono	N/A
28 Mei 2018 <i>May 28, 2018</i>	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 <i>Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor</i>	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. <i>Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.</i>	1. Rukijo 2. Yusmada Faizal 3. Zulfikri 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhayat 7. Agung Wicaksono	N/A



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan/atau Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yasmada Faizal 3. Rukijo 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhiyat 7. Agung Wicaksono	Prasetyo tidak hadir karena sedang ada tugas Prasetyo was not present because of an assignment
29 Juni 2018 June 29, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Rukijo 2. Zulfikri 3. William P. Sabandar 4. Silvia Halim 5. Tuhiyat 6. Agung Wicaksono	Yusmada tidak hadir karena sedang ada tugas Yusmada was not present because of an assignment
24 Juli 2018 July 24, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Rukijo 2. Yasmada Faizal 3. Zulfikri 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhiyat 7. Agung Wicaksono	N/A
31 Agustus 2018 August 31, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD and Finance.	1. Rukijo 2. Yasmada Faizal 3. Zulfikri 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhiyat 7. Agung Wicaksono	N/A
26 September 2018 September 26, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Rukijo 2. Yasmada Faizal 3. Zulfikri 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhiyat 7. Agung Wicaksono	N/A



Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan/atau Direksi (Jika Tidak Hadir) Reason of Absence
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Erry Riyana Hardjapamekas 2. Yusmada Faizal 3. Rukijo 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhayat 7. Agung Wicaksono	Prasetyo tidak hadir karena sedang ada tugas Prasetyo was not present because of an assignment
31 Oktober 2018 October 31, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Rukijo 2. Yusmada Faizal 3. Zulfikri 4. Mukhtasor 5. William P. Sabandar 6. Silvia Halim 7. Tuhayat 8. Muhammad Effendi 9. Ghamal Peris	N/A
30 November 2018 November 30, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Pra-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2018 2018 Pre-Extraordinary General Meeting of Shareholders	1. Rukijo 2. Yusmada Faizal 3. Zulfikri 4. Mukhtasor 5. William P. Sabandar 6. Silvia Halim 7. Tuhayat 8. Muhammad Effendi 9. Ghamal Peris	N/A
21 Desember 2018 December 21, 2018	Kantor Perusahaan, Gedung Wisma Nusantara, lantai 22 Company Office, Wisma Nusantara Building, 22nd floor	Perkembangan Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan, Pengembangan & Dukungan Bisnis, TOD, dan Keuangan. Development of Construction, Operation & Maintenance, Development & Business Support, TOD, and Finance.	1. Rukijo 2. Zulfikri 3. Mukhtasor 4. William P. Sabandar 5. Silvia Halim 6. Tuhayat 7. Muhammad Effendi 8. Ghamal Peris	Yusmada tidak hadir karena sedang ada tugas Yusmada was not present because of an assignment

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini,

Attendance recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors' members at the Joint Meeting can be seen below.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan
Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and Directors at the Joint Meeting

Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Compulsory Meeting</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	Tidak Hadir <i>Absence</i>	% Kehadiran <i>Attendance</i>
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>				
Rukijo (Plt. Komisaris Utama)* <i>Acting President Commissioner*</i>	12	12	-	100,00%
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>Commissioner</i>	12	10	2	83,33%
Zulfikri (Komisaris*) <i>Commissioner</i>	8	8	-	100,00%
Mukhtasor (Komisaris)** <i>Commissioner**</i>	3	3	-	100,00%
Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen)*** <i>Independent Commissioner***</i>	4	4	-	100,00%
Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris)**** <i>Commissioner****</i>	4	3	1	75,00%
Direksi <i>Board of Directors</i>				
William P. Sabandar (Direktur Utama) <i>President Director</i>	12	12	-	100,00%
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) <i>Construction Director</i>	12	12	-	100,00%
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) <i>Finance and Administration Director</i>	12	12	-	100,00%
Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)***** <i>Operation and Maintenance Director*****</i>	3	3	-	100,00%
Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis)***** <i>Bisnis/Development and Business Support Director*****</i>	3	3	-	100,00%
Agung Wicaksono (Direktur Operasi dan Pemeliharaan)***** <i>Operation and Maintenance Director*****</i>	9	9	-	100,00%
Rata-rata Average				96,53%

*) Zulfikri duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 4 Mei 2018.

**) Mukhtasor duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 29 Oktober 2019.

***) Erry Riyana Hardjapamekas tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018.

*****) Prasetyo Boeditjahjono tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 4 Mei 2018.

*****) Muhammad Effendi dan Ghamal Peris duduk dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018.

******) Agung Wicaksono tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 29 Oktober 2018.

*) Zulfikri has been in the Board of Commissioners since May 4, 2018.

**) Mukhtasor has been in the Board of Commissioners since October 29, 2019.

***) Erry Riyana Hardjapamekas has no longer served in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018.

*****) Prasetyo Boeditjahjono has no longer served in the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Resolution dated May 4, 2018.

*****) Muhammad Effendi and Ghamal Peris have been in the Board of Directors since October 29, 2018.

******) Agung Wicaksono has no longer served in the Board of Directors since October 29, 2018.



Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Affiliation Disclosure Between The Board Of Directors, Board Of Commissioners, And Major Shareholders And / Or Controllers

Information on Major / Controlling Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. The Company's major / controlling shareholder is the DKI Jakarta Provincial Government with a share ownership of 99.99%.

Affiliation Disclosure Between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major / Controlling Shareholders

The Major / Controlling Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other for the implementation of their respective duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and article of association. The Board of Commissioners and Directors of the Company have guidelines and work rules that include, among others, the responsibilities, obligations, authorities and respective rights.

In accordance with the Company's Articles of Association, between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors there is no family affiliation up to the third degree, either in a straight line or sideways or seminal relationship. The family affiliation of members of the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors and Major / Controlling Shareholders can be seen in the table below:

	Hubungan Afiliasi Affiliation		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemegang Saham Utama/ Pengendali) Provincial Government of DKI Jakarta (Major Shareholder / Controller)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Rukijo (Plt. Komisaris Utama) Acting President Commissioner	x	x	√
Yusmada Faizal (Komisaris) Commissioner	x	x	√
Zulfikri (Komisaris) Commissioner	x	x	√



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

	Hubungan Afiliasi Affiliation		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemegang Saham Utama/ Pengendali) Provincial Government of DKI Jakarta (Major Shareholder / Controller)
Mukhtasor (Komisaris) Commissioner	x	x	X
Direksi Board of Directors			
William P. Sabandar (Direktur Utama) President Director	x	x	x
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) Construction Director	x	x	x
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) Finance and Administration Director	x	x	x
Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) Operation and Maintenance Director	x	x	x
Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis) Development and Business Support Director	x	x	x

√ = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan
v = there is an affiliation | x = there is no affiliation

Rukijo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perusahaan. Yuzmada Faizal memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Zulfikri memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Dewan Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Rukijo has an affiliation with the Major / Controlling Shareholder, through a position at the Ministry of Finance as part of the Company's ultimate owner entity. Yuzmada Faizal has an affiliation with the Major Shareholder / Controller, through a position in the DKI Jakarta Provincial Government as the ultimate owner of the Company. Zulfikri has an affiliation with the Major / Controlling Shareholder, through a position at the Ministry of Transportation as part of the Company's ultimate owner entity. The position of the Company's Board of Commissioners has gone through fit and proper test.



Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Direksi pada perusahaan lain dan/atau institusi lain di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan periode tahun 2018 sebagai berikut:

Concurrent Position Disclosure Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Management affiliation of the Board of Directors' members in other companies and / or other institutions outside the Company that can cause conflicts of interest both directly and indirectly with the Company's interests for the period of 2018 as follows:

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain <i>Management in Other Companies</i>		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>As Board of Commissioners Member</i>	Sebagai Anggota Direksi <i>As Board of Directors Member</i>	Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i>
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>			
Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>Acting President Commissioner</i>	x	x	√
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>Commissioner</i>	x	x	√
Zulfikri (Komisaris) <i>Commissioner</i>	x	x	√
Mukhtasor (Komisaris) <i>Commissioner</i>	x	x	x
Direksi <i>Board of Directors</i>			
William P. Sabandar (Direktur Utama) <i>President Director</i>	x	x	x
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) <i>Construction Director</i>	x	x	x
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) <i>Finance and Administration Director</i>	x	x	x
Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) <i>Operation and Maintenance Director</i>	x	x	x
Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis) <i>Development and Business Support Director</i>	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = there is | x = none



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penjelasan terkait kepengurusan pada perusahaan lain adalah sebagai berikut:

The explanation regarding management in other companies is as follows:

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jabatan pada Perusahaan Lain <i>Position in Other Companies</i>
Rukijo, Plt. Komisaris Utama <i>Acting President Commissioner</i>	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <i>Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance</i>
Yusmada Faizal	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta <i>Development and Environment Assistant of the DKI Jakarta Regional Secretariat</i>
Zulfikri	Dirjen Kementerian Perhubungan <i>Director General of Railways</i>

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership Disclosure Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Demi menjaga independensi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga.

The share ownership of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors' members and other companies is always disclosed regularly through a list of share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors' members. In order to maintain independency, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors must convey the transparency of securities purchase and sale transactions.

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak melakukan penerbitan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perusahaan.

Until the end of 2018, the Company does not issue shares to be owned by the public, and does not have a share ownership program by management. As such, the Board of Commissioners and Board of Directors do not own the Company's shares.

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

The following is conveyed the transparency of the Company's share ownership by the Board of Commissioners and Directors, and share ownership of other companies above 5% by the Board of Commissioners and Directors of the Company which can cause potential conflicts of interest in decision making.



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Share Ownership of The Board of Commissioners and Board of Directors

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	MRT Jakarta	Perusahaan Lain > 5% Other Companies > 5%
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		
Rukijo (Plt. Komisaris Utama) <i>Acting President Commissioner</i>	- Nihil -	- Nihil -
Yusmada Faizal (Komisaris) <i>Commissioner</i>	- Nihil -	- Nihil -
Zulfikri (Komisaris) <i>Commissioner</i>	- Nihil -	- Nihil -
Mukhtasor (Komisaris) <i>Commissioner</i>	- Nihil -	726 lembar 726 sheets
Direksi <i>Board of Directors</i>		
William P. Sabandar (Direktur Utama) <i>President Director</i>	- Nihil -	- Nihil -
Silvia Halim (Direktur Konstruksi) <i>Construction Director</i>	- Nihil -	- Nihil -
Tuhyat (Direktur Keuangan dan Administrasi) <i>Finance and Administration Director</i>	- Nihil -	16.500 lembar 16.500 sheets
Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan) <i>Operation and Maintenance Director</i>	- Nihil -	- Nihil -
Ghamal Peris (Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis) <i>Development and Business Support Director</i>	- Nihil -	- Nihil -

Keterangan:

Mukhtasor memiliki 726 lembar saham di PT Permata Teradaya

Tuhyat memiliki 16.500 lembar saham di PT Aneka Tambang

Mukhtasor has 726 shares in PT Permata Teradaya

Tuhyat has 16,500 shares in PT Aneka Tambang

Seluruh kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki pengaruh atau berpotensi atas benturan kepentingan dalam pengelolaan Perusahaan.

All shareholdings by the Board of Commissioners and the Board of Directors have no influence on or potential for the occurrence of conflict of interest in the Company's management.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretaris Dewan Komisaris

SECRETARY TO BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan

The Secretary to Board of Commissioners has duties and functions in terms of administering administrative and secretarial activities within the scope of the Board of Commissioners' supervisory duties and is responsible directly to the Board of Commissioners.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, the Secretary to Board of Commissioners has a large role in ensuring the Board of Commissioners applies GCG principles in accordance with applicable best practices and laws and regulations.

Ketentuan Masa Jabatan


Ketentuan masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam anggaran dasar maupun *board manual*. Pengangkatan dilakukan oleh Rapat Dewan Komisaris, kemudian dibuatkan perjanjian kerja dengan Perusahaan secara tahunan.

Provision of Secretary to Board of Commissioners Term of Office
Provisions of Secretary to Board of Commissioners Term of Office are not regulated in the articles of association or manual boards. Appointment is made by the Board of Commissioners' Meeting, then an employment agreement is made with the Company on an annual basis.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Akbar Anwar berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT MRT Jakarta tanggal 26 Februari 2018

Secretary Officer to Board of Commissioners
The Secretary to Board of Commissioners is currently held by Akbar Anwar based on the Board of Commissioners' Meeting Decision of PT MRT Jakarta on February 26, 2018

 <p>AKBAR ANWAR Sekretaris Dewan Komisaris Periode Jabatan: 2 Mei 2017- 3 Mei 2019 Secretary to Board of Commissioners Period of Office: May 02, 2017 – May 03, 2019</p>	
<p>Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 59 tahun Kelahiran Jakarta, 7 April 1959</p> <p>Domisili Tangerang, Banten, Indonesia</p> <p>Pendidikan Chartered Accountant, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991)</p> <p>Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor), CRMP (Certified Risk Management Professional)</p> <p>Pengalaman Kerja Kepala Internal Audit PT MRT Jakarta (2009-2017), Auditor Ahli Madya BPKP (1983-2009)</p>	<p>Personal Data Indonesian 59 years old was born in Jakarta, April 7, 1959</p> <p>Domicile Tangerang, Banten, Indonesia</p> <p>Education Chartered Accountant, Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991)</p> <p>Certification QIA (Qualified Internal Auditor), CRMP (Certified Risk Management Professional)</p> <p>History of Employment Head of Internal Audit PT MRT Jakarta (2009-2017), Associate Expert Auditor for BPKP (1983-2009)</p>

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual* yang dimiliki Perusahaan, tugas pokok dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam kegiatan kesekretariatan yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/

Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners

Based on the Board Manual owned by the Company, the main duties and responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities which include:

1. *Organize secretarial administration activities.*
2. *Organize Board of Commissioners internal meetings and*



- pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris, seperti:
 - a. *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
 - c. Membuat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang;
 - d. Mendokumentasikan hasil rapat Dewan Komisaris;
 - e. Menyampaikan salinan risalah Rapat Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris.
 - f. Mengelola data, informasi, dukungan administrasi dan *monitoring* yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris;
 4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris;
 5. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib;
 6. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
 7. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
 8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 10. mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
 11. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
 12. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
- other meetings between the Board of Commissioners and Shareholders / Capital Owners, Directors and other related parties;*
3. *Provide data / information needed by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners, such as:*
 - a. *Monitor follow-up of the Board of Commissioners' decision results, recommendations and directives;*
 - b. *Administrative materials concerning the reports / activities of the Board of Directors in managing the company;*
 - c. *Prepare invitations to meetings of the Board of Commissioners, which are submitted to all members of the Board of Commissioners and other parties invited;*
 - d. *Document the results of the Board of Commissioners meeting;*
 - e. *Submit a copy of the minutes of the Board of Commissioners' Meeting to members of the Board of Commissioners.*
 - f. *Manage data, information, administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners;*
 4. *Collect technical data from Committees within the Board of Commissioners and Board of Commissioners experts for the needs of the Board of Commissioners;*
 5. *Administer outgoing letters and incoming letters to the Board of Commissioners, and other documents in an orderly manner;*
 6. *Prepare the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;*
 7. *Compile the Draft Reports of the Board of Commissioners;*
 8. *Ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of GCG;*
 9. *Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested;*
 10. *Coordinate Committee members, if needed in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners / Supervisory Board;*
 11. *As the Board of Commissioners' liaison officer with other parties.*
 12. *Carry out other duties from the Board of Commissioners.*

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Competence Development of the Secretary to Board of Commissioners

Throughout 2018, the Secretary to Board of Commissioners follows the competence development program, as follows:



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Konferensi Nasional Internal Auditor <i>National Conference of Internal Auditor</i>	<i>Governance Risk Management & Control (GRC)</i>	Penguatan GCG pada Perusahaan Infrastruktur <i>Strengthening GCG in Infrastructure Companies</i>	Denpasar, 28-29 Agustus 2018 <i>Denpasar, August 28-29, 2018</i>	The Institute of Internal Auditor Indonesia
Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko <i>National Conference of Risk Management Professional</i>	<i>Governance Risk Management & Control (GRC)</i>	Penguatan Risk Management pada Perusahaan Konstruksi <i>Strengthening Risk Management in Construction Companies</i>	Palembang, 12-13 Desember 2018 <i>Palembang, December 12-13, 2018</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko <i>Risk Management Professional Certification Institute</i>

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Tugas-tugas lain yang dilakukan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan rapat dana atau pertemuan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
- Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris, seperti:
 - Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
 - Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
 - Membuat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, komite Dewan Komisaris, dan pihak-pihak lain
 - Mendokumentasikan hasil rapat Dewan Komisaris;
 - Menyampaikan Salinan risalah Rapat Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris
 - Mengelola data, informasi, dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris;
- Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Dewan Komisaris dan Manajemen untuk keperluan Dewan Komisaris
- Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib
- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris

2018 Duties Implementation Report

Other duties carried out in 2018 are as follows:

- Organizing fund meetings or meetings of the Board of Commissioners with Shareholders, Board of Directors and other related parties.
- Providing data / information needed by the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, such as:
 - Monitoring the follow-up of the decisions results, recommendations and directives of the Board of Commissioners;
 - Administrative materials concerning reports/activities of the Board of Directors in managing the Company;
 - Preparing an invitation to the Board of Commissioners meeting, which is submitted to all members of the Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committees, and other parties
 - Documenting Board of Commissioners meeting results
 - Submitting a copy of the minutes of the Board of Commissioners meeting to the Board of Commissioners members
 - Managing data, information, administrative support and monitoring related to matters that must get approval or recommendations from the Board of Commissioners;
- Collecting technical data from the Board of Commissioners and Management for the needs of the Board of Commissioners
- Administering outgoing letters and incoming letters to the Board of Commissioners, and other documents in an orderly manner
- Preparing the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners



6. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Di 2018, Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam piagam komite audit, yaitu:

1. Persyaratan Independensi
 - a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perusahaan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain pada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
 - b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
 - c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perusahaan.

6. *Compiling the Draft Reports of the Board of Commissioners*
7. *Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles*
8. *Providing information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested*

Performance Evaluation and Assessment of the Secretary to Board of Commissioners by the Board of Commissioners

A description of 2018 performance evaluation and assessment of the Secretary to Board of Commissioners by the Board of Commissioners

Audit Committee

Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners which serves to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision, provides input and recommendations to the Board of Directors, encourages the implementation of GCG principles within the Company and improves the quality of financial disclosure and reporting. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners and performs its functions in accordance with the regulations and instructions received from the Board of Commissioners.

Qualifications to Become a Member of the Audit Committee

The Company's Audit Committee members have fulfilled the requirements as stipulated in the audit committee charter, namely:

1. *Independence Requirements*
 - a. *Not an insider of public accounting firm that became the Company's external auditors, law firm, or any other party that provides audit services, or non-audit services and or other consulting services to the Company within six (6) months before being appointed by the Commissioner;*
 - b. *Not a person having authority and responsibility for planning, directing, or controlling the Company's activities within six (6) months before being appointed by the Commissioner;*
 - c. *Not having a business relationship, directly or indirectly related to the Company's business;*
 - d. *Not having a family affiliation by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Shareholders of the Company.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2. Persyaratan Kompetensi

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan bisnis operasi Perusahaan;
- Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan.

Masa Jabatan

Persyaratan Keanggotaan

- Masa tugas anggota Komite Audit adalah 1 (satu) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit Tahun 2018

Disepanjang tahun 2018 tidak terdapat perubahan susunan Komite Audit. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

2. Competence Requirements

- Having high integrity, ability, knowledge and adequate experience according to their educational background, and able to communicate well;
- At least one of the Audit Committee members must have a background education and experience in finance and accounting;
- Having sufficient knowledge to read and understand financial statements;
- Having adequate knowledge about the laws and regulations, especially those concerning Regional Owned Enterprises and laws and regulations relating to the business operations of the company;
- One of the Audit Committee members has the ability and understanding of the business scope of the company.

Term of Office

Membership Requirements

- Term of office of the Audit Committee members is 1 (one) year without prejudice to the right of the Commissioner to dismiss them at any time.
- An Audit Committee member whose term of office has expired can be reappointed for only one (1) subsequent term of office.

Structure and Composition of Audit Committee Members in 2018

Throughout 2018 there was no change in the composition of the Audit Committee. The Audit Committee composition as of December 31, 2018 is as follows:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018
Audit Committee Composition As of December 31, 2018

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Rukijo	Ketua Komite Audit/ Komisaris Audit Committee/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02 Tahun 2018 Decision Letter of Board of Commissioners No. 02 of 2018	1 Tahun 1 Year	Ke-2 2nd



Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 Audit Committee Composition As of December 31, 2018

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Mohamad Hassan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02 Tahun 2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. 02 of 2018</i>	1 Tahun 1 Year	Ke-2 2nd
Ina Susanti	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02 Tahun 2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. 02 of 2018</i>	1 Tahun 1 Year	Ke-2 2nd

Profile of Committe Audit Member

Profile of Audit Committee Members

RUKIJO

Ketua Komite Audit/Komisaris Audit Committee Chairman/ Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Rukijo dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile of Audit Committee Chairman Rukijo presented in the Board of Commissioners' profile section in the Company's Profile chapter in this Annual Report

MOHAMAD HASSAN

Anggota Komite Audit Periode Jabatan 31 Oktober 2016 – 30 Oktober 2019 - Periode Ke-2 Audit Committee Member

Period of Office: October 31, 2016 – October 30, 2019 – Second Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran Jakarta, 21 Desember 1960

Personal Data
*Indonesian
58 years old
was born in Jakarta, December 21, 1960*

Domisili
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Domicile
South Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan
Chartered Accountant, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991) dan memiliki sertifikasi CRMA, (Certification in Risk Management Assurance), QIA (Qualified Internal Auditor), dan CRMP (Certified Risk Management Professional).

Education
Chartered Accountant, Accounting, State Accounting College (1991) and has CRMA certification (Certification in Risk Management Assurance), QIA (Qualified Internal Auditor), and CRMP (Certified Risk Management Professional).

Pengalaman Kerja
Anggota Dewan *The Institute of Internal Auditors* Indonesia, Anggota Komite Audit PT Perkebunan 5 (2014-sekarang), Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Tbk (2008), Anggota Komite Audit PT Darma Henwa, Tbk. (2007)

History of Employment
Board Member of the Indonesia Institute of Internal Auditors, Audit Committee Member of PT Perkebunan 5 (2014-present), Audit Committee Member of PT Bakrieland Development, Tbk (2008), Audit Committee Member of PT Darma Henwa, Tbk. (2007)



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

INA SUSANTI Anggota Komite Audit Periode Jabatan 31 Oktober 2016 – 30 Oktober 2019, Periode Ke-2 <i>Audit Committee Member</i> <i>Period of Office: October 31, 2016 – October 30, 2019, Second Period</i>	
<p>Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 61 tahun Kelahiran Solo, 28 Desember 1957</p> <p>Domisili Depok, Jawa Barat, Indonesia</p> <p>Pendidikan Sarjana Teknik Informatika, Universitas Guna Darma (1996)</p> <p>Pengalaman Kerja Direktur Monitor KPK (2010-2015), Kepala Bagian Pengembangan Sistem, Bina Marga (2004)</p>	<p>Personal Data Indonesian 61 years old was born in Solo, December 28, 1957</p> <p>Domicile Depok, West Java, Indonesia</p> <p>Education Bachelor of Informatics Engineering, University of Guna Darma (1996)</p> <p>History of Employment Monitor Director of Corruption Eradication Commission (KPK) (2010-2015), Head of System Development Section, Highways (2004)</p>

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Komite Audit Perusahaan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perusahaan. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016.

Piagam Komite Audit antara lain berisi:

- Struktur Komite Audit.
- Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Audit.
- Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Audit.
- Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit.
- Lingkup pekerjaan.
- Kode etik dan mekanisme rapat.

Independensi Komite Audit

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Audit Perusahaan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.

Work Guidelines: Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee has a charter as a reference and guidelines for Audit Committee to perform its duties and authority in implementing the compliance obligation with laws and regulations and the Company's internal control. The Charter has been established by Board of Commissioners' Decision No. 002 of 2016, dated January 29, 2016.

The Charter stipulates the following:

- Audit Committee Structure.
- The establishment and appointment of Audit Committee members.
- Requirements and term of office of Audit Committee members.
- Functions, duties, authorities, and responsibilities of the Audit Committee.
- Scope of work.
- Code of conduct and meeting mechanism.

Audit Committee Independency

In order to be able to act independently, the Audit Committee Members of the Company are required to meet the following independence criteria:

1. Not an employee of the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other Party that provides audit services, non-audit services and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
2. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except the Audit Committee Members from the Board of Commissioners.



3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perusahaan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite Audit.
 4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan
- Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

3. *Does not have a business affiliation, both directly and indirectly related to the Company's business, including not receiving compensation from the Company and subsidiaries other than the compensation for services received relating to the duties as a Member of the Audit Committee.*
4. *Not having a family affiliation by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, with the Commissioners, Directors, or Major /Controlling Shareholders of the Company.*

The transparency of Audit Committee independence presented in the following table:

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Rukijo	Mohamad Hassan	Ina Susanti
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>Is a person who provides audit, non-audit, or other consulting services to the Company in the past 6 (six) months</i>	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>Is a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company in the last 6 (six) months</i>	X	X	X
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan <i>Have business affiliation, both directly and indirectly related to the Company's business</i>	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Have family affiliation with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders</i>	X	X	X

v = ada | x = tidak ada
v = there is | x = none

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas Komite Audit:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

Audit Committee Duties:

1. *Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of external auditor and internal auditor duties;*
2. *Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Division and external auditors;*
3. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the improvement of the management control system and its implementation;*
4. *Ensure that there is a satisfactory review procedure for all information released by the company;*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

- Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other Board of Commissioners' duties.

Tanggung jawab Komite Audit:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - » Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - » Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - » Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
- Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Audit Committee Responsibilities:

- The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners;
- The accountability of the Audit Committee to the Board of Commissioners is presented in the report as follows:
 - » Annual report on duties implementation of the Audit Committee;
 - » Quarterly report on duties implementation of the Audit Committee;
 - » Reports for each special duties implementation of the Audit Committee.
- The Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the company's documents, data and information.

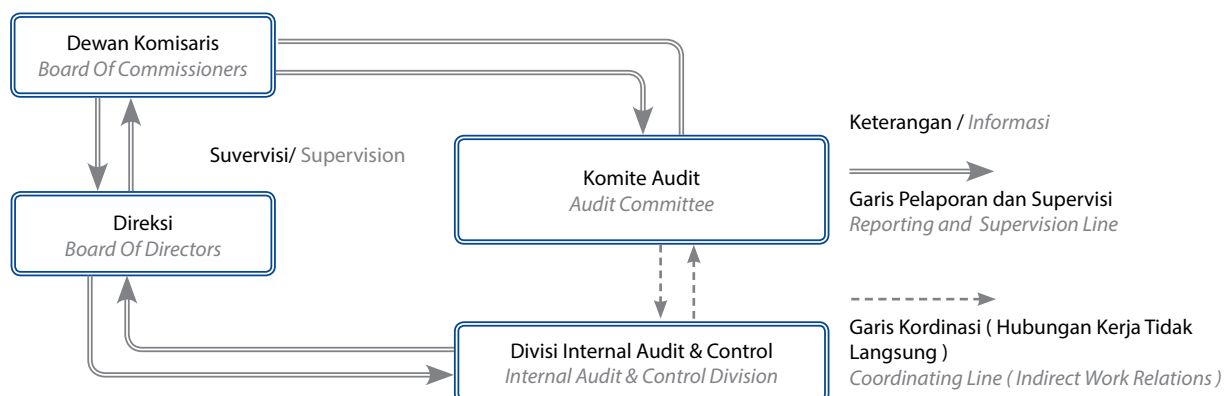
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit diberikan wewenang sebagai berikut:

- Mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Bekerjasama dengan Divisi *Internal Audit & Control*, dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan.

To carry out its duties and responsibilities, the Audit Committee is given the following authority:

- Obtain full and free information about employees, funds, assets and other Company resources related to the implementation of their duties;
- Cooperate with the Internal Audit & Control Division, through established procedures;
- If necessary, with the approval of the Board of Commissioners, may ask for help from experts and / or consultants.

Hubungan Kerja Komite Audit Audit Committee Work Relation





Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Audit di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite.

Secara umum Agenda rapat yang diselenggarakan Komite Audit membahas tentang:

- *Monitoring* dan evaluasi Kinerja dan temuan SPI.
- *Monitoring* dan evaluasi kinerja KAP
- *Monitoring* dan evaluasi kinerja perkembangan proyek
- *Monitoring* dan evaluasi Laporan Keuangan

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Komite Audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan Divisi-Divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Audit telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

Audit Committee Competence Development

The company facilitated the implementation of the development program for the Audit Committee in order to improve the competence of the Audit Committee members. This program is expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Audit Committee's performance.

Regarding the competence development activities that are followed by Audit Committee Members throughout 2018 presented in the Company Profile chapter in this annual report.

Audit Committee Meeting

The Committee holds meetings at least equal to the minimum provisions of the Board of Commissioners / Supervisory Board meetings stipulated in the articles of association. Each Committee meeting is contained in minutes of meetings signed by all Committee Members present. Minutes of meetings are submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners / Supervisory Board. The presence of Committee members at meetings, reported in quarterly reports and annual reports of the Committee.

In general, the meeting agenda held by the Audit Committee discussed:

- *Monitoring and evaluation of Performance and SPI findings*
- *Monitoring and evaluation of Public Accounting Firm (KAP) performance*
- *Monitoring and evaluation of performance of project development*
- *Monitoring and evaluation of Financial Statement*

Information regarding implementation of Audit Committee's meeting must be disseminated at least 7 (seven) days prior to the meeting. The announcement contains information regarding date and time of meeting, meeting location, meeting agenda and participants of meeting. Information regarding meeting implementation plan has also been distributed to related parties such as Corporate Secretary and other organs, namely SPI and existing Divisions. In the event of incidental meeting, the announcement must be conducted as effectively and efficiently as possible with regard to the applicable documentation procedure (preparing minutes of meeting).

The summary of minutes of meeting of the Audit Committee has met the procedures and legal administrations, and has described the meeting situation and chronology, as well as dissenting opinion and delegation of chairman of meeting in the event the Chairman of the Committee cannot attend the meeting.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Di tahun 2018, Komite Audit melakukan 14 kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut,

In 2018, the Audit Committee held 14 meetings, with minutes and attendance recapitulation as follows,

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit *Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings*

Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
2 Januari 2018 <i>January 02, 2018</i>	MRT Jakarta	Monitoring Penugasan Divisi Audit Internal Control dan Tindak Lanjut <i>Monitoring the assignment of the Internal Audit Control Division and Follow-Up</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
5 Januari 2018 <i>January 05, 2018</i>	MRT Jakarta	Monitoring Penugasan Divisi Audit Internal Control (D.AIC) dan Tindak Lanjut <i>Monitoring the assignment of the Internal Audit Control Division and Follow-Up</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti, dan Rukijo
15 Februari 2018 <i>February 15, 2018</i>	MRT Jakarta	Penugasan Konsultan Independen dalam Quality Assurance & Improvement Program aktivitas auditor internal <i>The assignment of Independent Consultants in the Quality Assurance & Improvement Program of internal auditor activity</i>	Mohamad Hassan
28 Februari 2018 <i>February 28, 2018</i>	MRT Jakarta	Pembahasan Hasil Audit KAP EY tahun buku 2017 <i>Discussion on 2017 audit findings by Public Accounting Firm EY</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
9 Maret 2018 <i>March 09, 2018</i>	MRT Jakarta	Penugasan Konsultan Independen dalam Quality Assurance & Improvement Program aktivitas auditor internal <i>The assignment of Independent Consultants in the Quality Assurance & Improvement Program of internal auditor activity</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti, dan Rukijo
18 Mei 2018 <i>May 18, 2018</i>	MRT Jakarta	Evaluasi Penugasan KAP 2017, Review HPS KAP 2018, dan KAK KAP Paket Pekerjaan Audit Tahun Buku 2018. <i>Evaluation of 2017 KAP Assignment, 2018 KAP HPS Review, and KAP Audit Work Package KAK of 2018 Fiscal Year.</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
18 Juli 2018 <i>July 18, 2018</i>	MRT Jakarta	Monitoring Penugasan D. AIC <i>D. AIC Assignment Monitoring</i>	Mohamad Hassan
23 Juli 2018 <i>July 23, 2018</i>	MRT Jakarta	Evaluasi Pelaksanaan RAT Semester I dan Perbaikan Semester II 2018 <i>Evaluation on Implementation of 2018 RAT Semester I and Improvement of Semester II</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
8 Agustus 2018 <i>August 08, 2018</i>	MRT Jakarta	Monitoring Penugasan D. AIC <i>Monitoring Assignment D. AIC</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
24 Agustus 2018 <i>August 24, 2018</i>	MRT Jakarta	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite <i>Committee Duties Implementation Report</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
20 September 2018 <i>September 20, 2018</i>	MRT Jakarta	Monitoring Penugasan D. AIC <i>D. AIC Assignment Monitoring</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti



Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9 November 2018 November 09, 2018	MRT Jakarta	Gabungan Komite <i>Review Draft</i> RKAP 2019 Dan Rencana pembentukan Perusahaan Anak <i>Joint Committee Review of 2019 RKAP Draft and Plan for Establishment of Subsidiary</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti, dan Rukijo
14 November 2018 November 14, 2018	MRT Jakarta	Gabungan Komite <i>Review Draft</i> RKAP 2019 Dan Rencana pembentukan Perusahaan Anak (lanjutan2) <i>Joint Committee Review of 2019 RKAP Draft and Plan for Establishment of Subsidiary (2nd continued)</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti
20 Desember 2018 December 20, 2018	MRT Jakarta	Evaluasi Kinerja Div. Audit Internal <i>Performance Evaluation of Internal Audit Division</i>	Mohamad Hassan, Ina Susanti

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Attendance Recapitulation of Audit Committee Meeting

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Compulsory Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance
Rukijo (Ketua) <i>Chairman</i>	12	3	25,00%
Mohamad Hassan (Anggota) <i>Member</i>	12	12	100,00%
Ina Susanti (Anggota) <i>Member</i>	12	10	83,33%
Rata-rata Average			69,44%

Kebijakan Remunerasi

Perusahaan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Audit. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit ditetapkan berdasarkan keputusan persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit yang ditetapkan oleh SK Direksi No. 098/BOD-MRT/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Honorarium Komite Audit Perusahaan.

Struktur dan komponen remunerasi serta transparansi informasi tentang besaran remunerasi Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

Remuneration Policy

The Company has a policy related to remuneration for the Audit Committee. Approval of the Audit Committee remuneration is determined based on the decision of the Audit Committee remuneration agreement stipulated by the Decision Letter of Board of Directors No.098 / BOD-MRT / XI / 2017 dated November 30, 2017 concerning the Audit Committee's Honorarium.

The remuneration structure and components as well as transparency of information about the amount of remuneration for Audit Committee are presented below.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Remunerasi Komite Audit Remuneration of Audit Committee

Komite Audit Audit Committee	Honorarium per Bulan per month (Rp)	Honorarium 1 Tahun per year (Rp)
Mohammad Hassan	10.000.000	120.000.000
Ina Susanti, ST	10.000.000	120.000.000
Jumlah Total		240.000.000

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk guna membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan diterapkannya *Good Corporate Governance* di lingkungan kerja Perusahaan. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi juga mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (GCG) Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 mengenai Komite Penunjang Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko, serta Komite Kebijakan *Corporate Governance*.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengacu pada aturan di Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris; dan
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. anggota Dewan Komisaris;
 - b. pihak yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
 - ii. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - iii. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.
 - c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Nomination And Remuneration Committee

The Remuneration and Nomination Committee is established to assist supervisory and advisory duties of Board of Commissioners to monitor and ensure the implementation of *Good Corporate Governance* in the Company's working environment. The Remuneration and Nomination Committee establishment refers to provisions contained in Indonesian General Guidelines of *Good Corporate Governance* (GCG) issued by the National Committee on Corporate Governance (KNKG) in 2006 regarding Board of Commissioners Supporting Committees, which consist of Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Policy Committee, as well as *Corporate Governance* Policy Committee.

Qualifications to be a Member of Nomination and Remuneration Committee

Referring to the regulation in the Remuneration and Nomination Committee Charter, the Committee membership must at least be composed of 3 (three) members with the following provisions:

1. 1 (one) chairman also concurrently serves as member of Board of Commissioners; and
2. Other members who may come from:
 - a. members of Board of Commissioners;
 - b. external party with the following requirements:
 - i. Does not have any affiliation with the Company, members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, or Company's Majority Shareholders;
 - ii. Has experience in Nomination and/or Remuneration; and
 - iii. Does not have concurrent position as other Committee members in the Company.
 - c. party with managerial position under Board of Directors in the field of human capital.



Masa Jabatan

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Term Of Office

Committee members are appointed for certain term of office and can be reappointed. The term of office for members of the Remuneration and Nomination Committee is 1 (one) year and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate at any time.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2018

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Structure and Composition of Nomination and Remuneration Committee Members in 2018

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2018 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Yusmada Faizal	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris <i>Nomination and Remuneration Committee Chairman/Commissioner</i>	SK Dewan Komisaris No. SK/04/BOC-MRT/X/2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. SK / 04 / BOC-MRT / X / 2018</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris <i>Following the term of office as Commissioner</i>	
Irwan Rei	Anggota <i>Member</i>	SK Dewan Komisaris No. SK/04/BOC-MRT/X/2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. SK / 04 / BOC-MRT / X / 2018</i>	31 Oktober 2018 – 31 Oktober 2019 <i>October 31, 2018 – October 31, 2019</i>	Ke-2
Lilyani Harsulistyati	Anggota <i>Member</i>	SK Dewan Komisaris No. SK/04/BOC-MRT/X/2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. SK / 04 / BOC-MRT / X / 2018</i>	31 Oktober 2018 – 31 Oktober 2019 <i>October 31, 2018 – October 31, 2019</i>	Ke-2

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

YUSMADA FAIZAL Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris <i>Nomination and Remuneration Committee Chairman/Commissioner</i>	
Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Yusmada Faizal dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini	<i>Profile of Nomination and Remuneration Committee Chairman, Yusmada Faizal, presented in Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LILYANI HARSULITYATI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Periode Jabatan: 31 Oktober 2018 - 31 Oktober 2020, Periode Ke-2
Nomination and Remuneration Committee Member
Period of Office: October 31, 2018 – October 31, 2020, Second Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Salatiga, 4 Desember 1970

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

Diploma (D3) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1992), Sarjana (S1) Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1997)

Pengalaman Kerja

Berkarier di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1992, dengan jabatan terakhir Anggota Tim Akuntabilitas Kinerja (2000-2003). Kemudian bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2004 hingga tahun 2014, dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Sekretaris Pimpinan.

Personal Data

Indonesian
48 years old
was born in Salatiga, December 04, 1970

Domicile

Bekasi, West Java, Indonesia

Education

Diploma (D3) State Accounting College (STAN) (1992), Bachelor (S1) in Economics, majoring in Accounting, University of Indonesia (1997)

History of Employment

Career in the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) since 1992, with the last position being a Member of the Performance Accountability Team (2000-2003). Then joined the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2004 to 2014, with her last position as Secretary Coordinator of the Chairman

IRWAN REI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Periode Jabatan 31 Oktober 2018 – 31 Oktober 2020, Periode Ke-2
Nomination and Remuneration Committee Member
Period of Office: October 31, 2018 – October 31, 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun
Kelahiran Manado, 19 Oktober 1965

Domisili

Kotamadya, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) di Bidang Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (1989), MSc (S2) di bidang Teknik Perminyakan dari University of Southern California (1993), MBA (S2) dari Monas Mt. Eliza Business School, Monash University (1997)

Pengalaman Kerja

Insinyur Perminyakan di Hudebay Oil (1990-1991), Conoco Indonesia (1993-1995), Business Team Leader/Director, People-Value-Management Practice, Hewitt Associates (1997-2001), Senior Consultant, Business Performance Management & Executive Compensation Practice di Towers Perrin (2001-2003), Managing Director di Multi Talent Indonesia (2006-sekarang)

Personal Data

Indonesian
53 years old
was born in Manado, October 19, 1965

Domicile

Province, DKI Jakarta, Indonesia

Education

Bachelor (S1) in Petroleum Engineering from Bandung Institute of Technology (1989), MSc (S2) in Petroleum Engineering from University of Southern California (1993), MBA (S2) from Monas Mt. Eliza Business School, Monash University (1997)

History of Employment

Petroleum Engineer at Hudebay Oil (1990-1991), Conoco Indonesia (1993-1995), Business Team Leader/ Director, People-Value-Management Practice, Hewitt Associates (1997-2001), Senior Consultant, Business Performance Management & Executive Compensation Practice at Towers Perrin (2001-2003), Managing Director at Multi Talent Indonesia (2006-present)



Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagai Komite yang dibentuk untuk menjadi mitra independen bagi Dewan Komisaris guna mendorong peningkatan kinerja manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan, Perusahaan telah menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2017 untuk menjadi pedoman Komite dalam menjalankan tugasnya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain berisi:

- Pembentukan dan Keanggotaan
- Fungsi, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab
- Prosedur Kerja dan Mekanisme Rapat
- Kode Etik

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Bukan merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perusahaan.
2. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perusahaan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan.
4. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Transparansi independensi Komite Nominasi dan Remunerasi terlihat dalam tabel berikut:

Work Guidelines: Nomination and Remuneration Committee Charter

As a Committee formed to be an independent partner of the Board of Commissioners to encourage the improvement of the Company's management performance to achieve its goals, the Company has formulated Remuneration and Nomination Committee Charter in 2017 to serve as the Committee's manual in conducting its duties.

Remuneration and Nomination Committee Charter sets out among others:

- Establishment and Membership
- Function, Duty, Authority and Responsibility
- Working Procedure and Meeting Mechanism
- Code of Conduct

Independency of Nomination and Remuneration Committee

In order to be able to act independently, the Company's Nomination and Remuneration Committee Members are required to fulfill the following independence criteria:

1. Is not part of a human capital consulting company that works for the Company.
2. Does not have business affiliation, directly or indirectly related to the Company's business, including not receiving compensation from the Company and subsidiaries other than the compensation for services received relating to the duties as a Member of Nomination and Remuneration Committee.
3. Does not have family affiliation due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Company.
4. Does not hold multiple positions as administrators of political parties and / or candidates / legislative and / or candidate members to the regions / deputy regional heads, and other positions in accordance with the provisions of legislation that can cause conflicts of interest.

Transparency of Nomination and Remuneration Committee independency presented in the following table:



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Yusmada Faizal	Lilyani Harsulityati	Irwan Rei
Merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perusahaan <i>Is part of a human capital consulting company that works for the Company</i>	x	x	x
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan <i>Have business affiliation, both directly and indirectly related to the Company business</i>	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Have family affiliation with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders</i>	x	x	x
Memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan <i>Hold multiple positions as administrators of political parties and / or candidates / legislative and / or candidate members to the regions / deputy regional heads, and other positions in accordance with the provisions of legislation that can cause conflict of interest</i>	x	x	X

Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi konsultasi pada bidang nominasi dan remunerasi Perusahaan. Untuk itu, Komite mempunyai hubungan kerja langsung dengan Dewan Komisaris, serta berkoordinasi dengan Divisi *Human Capital*.

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- Tugas terkait dengan fungsi Nominasi
 - » Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Unit Kerja Perusahaan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Unit Kerja Perusahaan.
 - » Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Unit Kerja Perusahaan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - » Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Unit Kerja Perusahaan.
 - » Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

Functions, Duties, Responsibilities and Authority of Nomination and Remuneration Committee

The Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out consultation function in the field of remuneration and nomination in the Company. Therefore, the Committee has direct work relation with the Board of Commissioners, and coordinates with Human Capital & General Affairs Division.

Duties of Nomination and Remuneration Committee are divided into 2 (two), namely:

- Related to Nomination function:
 - » Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding composition of Board of Directors, Board of Commissioners and Work Unit of the Company, policies and criteria needed in the Nomination process, and policies to evaluate the performance of members of Board of Directors, Board of Commissioners and Company's Work Unit.
 - » Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners based on the benchmark that have been composed;
 - » Provide recommendation to the Board of Commissioners on programs to develop the capabilities of members of Board of Directors, Board of Commissioners and Company's Work Unit; and
 - » Provide suggestions for candidates that meet the requirements as a member of Board of Directors and/or



Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Dalam mengidentifikasi kandidat yang cocok, Komite dapat menggunakan jasa penasihat eksternal pencarian perekrutan untuk mempermudah pencarian.

- Tugas terkait dengan fungsi Remunerasi
 - » Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
 - » Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Unit Kerja Perusahaan.
 - » Meninjau kelayakan yang berlaku dan relevansi terkait struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi.
- Pelaporan
Komite wajib membuat laporan kegiatan triwulanan kepada Komisaris Utama, laporan ditandatangani oleh Ketua Komite atau anggota Komite lainnya setelah mendapat kuasa dari Ketua Komite.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun program kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Tahunan
 - b. Laporan Triwulanan
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus dari Dewan Komisaris.
4. Komite bertanggung jawab dan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang karyawan, dana, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite.
2. Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komite bekerja sama dengan Divisi *Human Capital* sesuai prosedur kerja yang telah ditentukan.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite.

Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS. In identifying the appropriate candidate, the Committee may use the service of external advisor for recruitment to ease the recruitment process.

- *Related to Remuneration function:*
 - » *Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration structure, policy and amount.*
 - » *Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance to be in conformity with the remuneration received by each member of Board of Directors, Board of Commissioners and Company's Work Unit; and*
 - » *Review the prevailing appropriateness and relevancy of structure, policy, and amount of remuneration.*
- *Reporting*
The committee must prepare a quarterly activity report to be submitted to the President Commissioner. The report is signed by Committee's Chairman or other Committee member after receiving power from the Committee's Chairman.

Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee are:

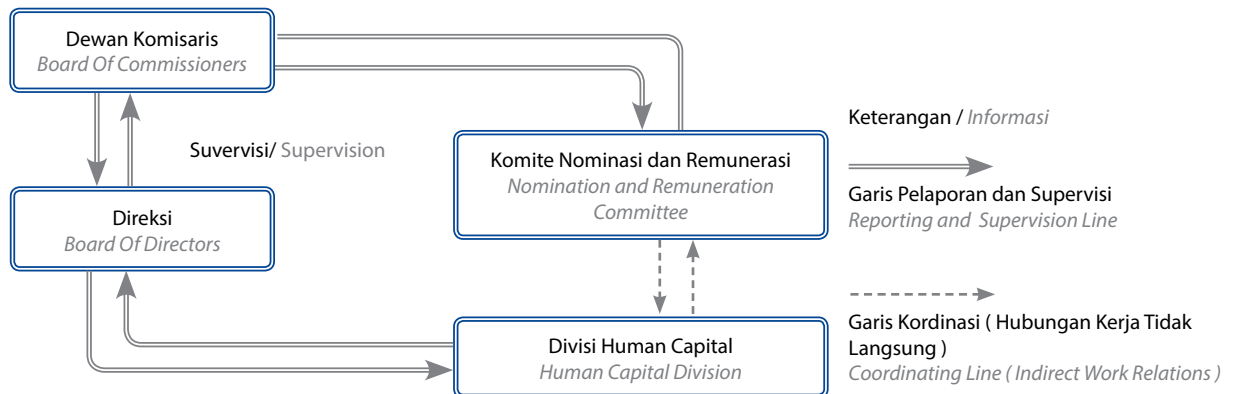
1. *The Committee is responsible to the Board of Commissioners;*
2. *The Committee is responsible for preparing annual work plan to be approved by the Board of Commissioners;*
3. *Accountability of Committee to the Board of Commissioners is submitted in the form of report as follows:*
 - a. *Annual Report*
 - b. *Quarterly Report*
 - c. *Report for each implementation of special assignment from Board of Commissioners.*
4. *The Committee is responsible for and needs to maintain confidentiality of documents, data, and information of the Company.*

Authority of Remuneration and Nomination Committee:

1. *The Committee is authorized to obtain full information regarding employees, funds, as well as other Company's resources related to the Committee's duty implementation;*
2. *In implementing the above authority, the Committee cooperates with Division of Human Capital & General Affairs pursuant to the stipulated work procedures;*
3. *If necessary, with written approval of the Board of Commissioners, the Committee may ask help from experts and/or consultants to assist the Committee.*

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hubungan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Work Relation of Nomination and Remuneration Committee



Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota komite sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite yang akan bertindak sebagai pimpinan rapat.
3. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka pimpinan rapat dapat dikuasakan kepada salah satu anggota komite.
4. Setiap orang dapat menghadiri Rapat dari waktu ke waktu atas undangan Ketua Komite
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

Competence Development of Nomination and Remuneration Committee

The company facilitates the implementation of Nomination and Remuneration Committee development program in order to improve the competence of Nomination and Remuneration Committee members. This program is expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Nomination and Remuneration Committee's performance.

Regarding competence development activities that are followed by the Nomination and Remuneration Committee Members throughout 2018 are presented in the Company Profile chapter in this annual report.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Committee meetings are held with the following conditions:

1. Meetings are held regularly at least 1 (one) time in one month
2. Meetings may only be held if:
 - a. Attended by a majority of committee members; and
 - b. One of the majority of committee members as referred to in letter a is the Committee Chairman who will act as the meeting chairman.
3. In the event that Committee Chairman is unable to attend, then the meeting chairman can be authorized to one member of the committee.
4. Anyone may attend meetings from time to time at the invitation of Committee Chairman
5. Decisions of Committee meetings shall be based on consensus agreement



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak 7. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, Komite dapat meminta pendapat anggota Dewan Komisaris diluar Komite. 8. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perusahaan 10. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris, melalui Sekretaris Dewan Komisaris. 11. Sekretaris Dewan Komisaris, menghadiri rapat Komite dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada Komite. Sekretaris Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite menerima informasi dan dokumen tepat waktu untuk memungkinkan pertimbangan penuh dan tepat dari topik yang ada. | <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>In the event that a decision based on consensus agreement is not reached, then decision shall be made based on the majority vote</i> 7. <i>If in the decision making carried out by voting there is an equal number of votes, the Committee may request the opinion of Board of Commissioners' members outside the Committee.</i> 8. <i>In the event that the decision-making process has differences of opinion, the difference of opinion must be included in minutes of meeting along with the reasons for the dissent.</i> 9. <i>The results of the Committee meeting must be stated in the minutes of meeting and documented by the Company</i> 10. <i>Minutes of Committee meetings must be submitted in writing to the Board of Commissioners, through the Secretary to Board of Commissioners.</i> 11. <i>Secretary to Board of Commissioners, attends Committee meetings and provides necessary support to the Committee. The Secretary to Board of Commissioners ensures that the Committee receives information and documents on time to enable full and appropriate consideration of the topics.</i> |
|---|---|

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

A summary report on the minutes of the Nomination and Remuneration Committee meeting has fulfilled the procedures, legal administration and describes the chronological situation of the meeting including dissenting opinions or delegation of meeting leaders if the Chairman of the Meeting is unable to attend the meeting.

Kebijakan Remunerasi

Struktur dan komponen remunerasi serta transparansi informasi tentang besaran remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat di bawah ini.

Remuneration Policy

Remuneration structures and components as well as transparency of information regarding the amount of remuneration for the Nomination and Remuneration Committee are presented below.

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Remuneration of Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>	Honorarium per Bulan <i>per month</i> (Rp)	Honorarium 1 Tahun <i>per year</i> (Rp)
Irwan Rei (Anggota) <i>Member</i>	10.000.000	120.000.000
Lilyani Harsulistiyati (Anggota) <i>Member</i>	10.000.000	120.000.000
Jumlah Total		240.000.000



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 003 Tahun 2018 yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan dan pengelolaan risiko.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan pergantian Komite Pemantau Risiko jika salah seorang anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Sekretaris Komite ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.

Mengacu pada aturan di Piagam Komite Pemantau Risiko, komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Seorang Komisaris Independen.
2. Seorang Pihak Independen dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
3. Seorang Pihak Independen dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko, bersertifikasi ISO 31000.

Masa Jabatan

Masa tugas Komite Pemantau Risiko adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018, terjadi pergantian anggota Komite Pemantau Risiko. Adapun susunan Komite Pemantau Risiko secara kronologis di sepanjang tahun 2018 dan susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is established by the Company through Decision Letter of Board of Commissioners of the Company No. 001 of 2016 and functions to assist the Board of Commissioners in their supervisory duty and risk management.

Qualification as a member of Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee Members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairman of Risk Monitoring Committee has the right to propose the replacement of the Risk Monitoring Committee if one of the Committee members ends his/her term of office, resigns, or is terminated. The Committee Secretary is appointed based on the decision of the Committee meeting.

Referring to the regulation in Risk Monitoring Committee Charter, the composition of Risk Monitoring Committee must at least consist of 3 (three) members as follows:

- 1. An Independent Commissioner;*
- 2. An Independent Party academician/practitioner with financial expertise;*
- 3. An Independent Party academician /practitioner with Risk Management expertise certified of ISO 31000.*

Term of Office

Risk Monitoring Committee Term of Office is 1 (one) year and can be reappointed only for the next 1 (one) term of office, without prejudice the right of the Board of Commissioners to terminate it at any time.

Structure and Composition of Risk Monitoring Committee Members in 2018

Throughout 2018, members of the Risk Monitoring Committee were replaced. The composition of the Risk Monitoring Committee in chronology throughout 2018 and the composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2018 are as follows:



Kronologi Susunan Komite Pemantau Risiko di Sepanjang Tahun 2018

Chronology of Risk Monitoring Committee Composition in 2018

Periode 1 Januari - 30 Oktober 2018 <i>Period of January 01 - October 30, 2018</i>	Periode 31 Oktober 2018 - 31 Desember 2018 <i>Period of October 31, 2018 - December 31, 2018</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Prasetyo Boeditjahjono (Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris) <i>Risk Monitoring Committee Chairman/Commissioner</i>		Prasetyo Boeditjahjono tidak lagi menjabat di Komite Pemantau Risiko sejak 4 Mei 2018 <i>Prasetyo Boeditjahjono has no longer served in the Risk Monitoring Committee since May 4, 2018</i>
Rudy Hartono (Anggota Komite Pemantau Risiko) <i>Risk Monitoring Committee Member</i>		Rudy Hartono tidak lagi menjabat di Komite Pemantau Risiko sejak 1 Mei 2018 <i>Rudy Hartono has no longer served in the Risk Monitoring Committee since May 1, 2018</i>
Rizal Helbari Rivai (Anggota Komite Pemantau Risiko) <i>Risk Monitoring Committee Member</i>		Rizal Helbari Rivai tidak lagi menjabat di Komite Pemantau Risiko sejak 30 Oktober 2018 <i>Rizal Helbari Rivai has no longer served in the Risk Monitoring Committee since October 30, 2018</i>
	Zulfikri (Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris) <i>Risk Monitoring Committee Chairman/Commissioner</i>	Zulfikri menjabat di Komite Pemantau Risiko sejak 31 Oktober 2018 <i>Zulfikri has been in the Risk Monitoring Committee since October 31, 2018</i>
	Ivan Malik (Anggota Komite Pemantau Risiko) <i>Risk Monitoring Committee Member</i>	Ivan Malik menjabat di Komite Pemantau Risiko sejak 31 Oktober 2018 <i>Ivan Malik has been in the Risk Monitoring Committee since October 31, 2018</i>
	Singgih Budihartono (Anggota Komite Pemantau Risiko) <i>Risk Monitoring Committee Member</i>	Singgih Budihartono menjabat di Komite Pemantau Risiko sejak 31 Oktober 2018 <i>Singgih Budihartono has been in the Risk Monitoring Committee since October 31, 2018</i>

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018

Composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2018

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode Jabatan <i>Period of Office</i>
Zulfikri	Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris <i>Risk Monitoring Committee Chairman/Commissioner</i>	SK Dewan Komisaris No. SK/03/BOC-MRT/X/2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. SK / 03 / BOC-MRT / X / 2018</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris <i>Following the term of office as Commissioner</i>	
Ivan Malik	Anggota <i>Member</i>	SK Dewan Komisaris No. SK/03/BOC-MRT/X/2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. SK / 03 / BOC-MRT / X / 2018</i>	31 Oktober 2018– 31 Oktober 2019 October 31, 2018 – October 31, 2019	Ke-1 <i>1st</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

**Susunan Komite Pemantau Risiko
per 31 Desember 2018**
*Composition of Risk Monitoring Committee
as of December 31, 2018*

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode Jabatan <i>Period of Office</i>
Singgih Budihartono	Anggota <i>Member</i>	SK Dewan Komisaris No. SK/03/BOC-MRT/X/2018 <i>Decision Letter of Board of Commissioners No. SK / 03 / BOC-MRT / X / 201</i>	31 Oktober 2018 – 31 Oktober 2019 <i>October 31, 2018 – October 31, 2019</i>	Ke-1 <i>1st</i>

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee Members

Zulfikri Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris <i>Risk Monitoring Committee Chairman/Commissioner</i>	
Profil Ketua Komite Pemantau Risiko, Zulfikri dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini	<i>Profile of Risk Monitoring Committee Chairman, Zulfikri is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report</i>

Ivan Malik Anggota Komite Pemantau Risiko Periode Jabatan 31 Oktober 2018 – 31 Oktober 2019, Periode Pertama <i>Risk Monitoring Committee Member</i> <i>Period of Office: October 31, 2018 – October 31, 2019</i>	
<p>Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 56 tahun Kelahiran Jakarta, 27 Agustus 1962</p> <p>Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doctoral Degree in Financial Management (Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia, 2012) 2. Master Degree in Financial Management (Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 2001) 3. Bachelor Degree in Civil Engineering (Institut Teknologi Bandung, 1987) <p>Pengalaman Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite GCG & MR Pelindo 3 (tahun 2017-2018) • Komite PR MRT Jakarta (tahun 2018-sekarang) 	<p>Personal Data Indonesian Age 56 Born in Jakarta, August 27, 1962</p> <p>Education</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doctoral Degree in Financial Management (Faculty of Economics and Business - University of Indonesia, 2012) 2. Master Degree in Financial Management (Faculty of Economics - University of Indonesia, 2001) 3. Bachelor Degree in Civil Engineering (Bandung Institute of Technology, 1987) <p>History of Employment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelindo 3 GCG & MR Committee (2017-2018) • MRT Jakarta PR Committee (2018-present)



Singgih Budihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko

Periode Jabatan 31 Oktober 2018 – 31 Oktober 2019, Periode Pertama

Risk Monitoring Committee Member

Period of Office: October 31, 2018 – October 31, 2019

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun
Kelahiran Madiun, 22 Oktober 1963

Pendidikan

1. Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta (1989 – 1993)
2. Magister Sains, Program Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Jakarta (2003)

Pengalaman Kerja

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT (MRT) Jakarta (September 2018 – Sekarang); Komite Audit Perum LKBN ANTARA (2014 – 2018); Direktur PT Tujuh Karta Wesi (2014 – Sekarang); Komite Audit Lembaga Penyiaran Publik TVRI (2009 – 2014);

Personal Data

Indonesian
Age 55
Born in Madiun, October 22, 1963

Education

1. Diploma IV of State College of Accounting (STAN), Jakarta (1989 - 1993)
2. Master of Science, Public Administration and Policy Program, University of Indonesia, Jakarta (2003)

History of Employment

He serves as a Member of Risk Management Monitoring Committee in PT MRT Jakarta (September 2018 - Present); Audit Committee of LKBN ANTARA (2014 - 2018); Director of PT Tujuh Karta Wesi (2014 - Present); Audit Committee of TVRI Public Broadcasting Institute (2009 - 2014);

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko Perusahaan memiliki Piagam yang digunakan sebagai acuan dan pedoman kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016.

Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain berisi:

- Struktur Komite Pemantau Risiko.
- Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko.
- Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.
- Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- Lingkup pekerjaan.
- Kode etik dan mekanisme rapat.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Pemantau Risiko Perusahaan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau

Work Guidelines: Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out their duties and authority to ensure effectiveness of risk management implementation, the Company's Risk Monitoring Committee has a Charter to be used as reference and working guideline determined by the Board of Commissioners Decision No. 001 of 2016, dated January 20, 2016.

The Charter stipulates the following:

- Risk Monitoring Committee Structure.
- The establishment and appointment of Risk Monitoring Committee members.
- Requirements and tenure of Risk Monitoring Committee members.
- Functions, duties, authority, and responsibilities of the Risk Monitoring Committee.
- Scope of work.
- Code of conduct and meeting mechanism.

Independency of Risk Monitoring Committee

In order to be able to act independently, the Company's Risk Monitoring Committee Members are required to fulfill the following independence criteria:

1. Not an employee of the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, or other Party that provides audit services, non-audit services and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months prior being appointed by the Board of Commissioners.
2. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company within the last 6 (six) months



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

mengendalikan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris.

3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perusahaan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan.

prior being appointed by the Board of Commissioners, except the Member of the Risk Monitoring Committee from the Board of Commissioners.

3. *Does not have a business affiliation, directly or indirectly related to the Company's business, including not receiving compensation from the Company and subsidiaries other than the compensation for services received related to the duties as a Member of the Risk Monitoring Committee.*
4. *Does not have family affiliation due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Company.*

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko terlihat dalam tabel berikut:

Transparency of Risk Monitoring independency is presented in the following table:

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Zulfikri	Ivan Malik	Singgih Budihartono
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>An insider of Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, or other party providing service of audit, non-audit and/or other consultation to the Company within the last 6 (six) months.</i>	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>Having authority and responsibility for planning, leading or controlling the Company's activities within the last 6 (six) months.</i>	x	x	x
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan <i>Having business affiliation, both directly and indirectly related to the Company business</i>	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Have family affiliation with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders</i>	x	x	X

Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan supervisi/pengawasan. Dalam hubungan kerja, Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Komite Manajemen Risiko dan Divisi Risk, Quality, and Safety Management.

Functions, Duties, Responsibilities and Authority of Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee functions as the representative of the Board of Commissioners in carrying out supervision. In working relations, the Risk Monitoring Committee has a direct working relationship and responsibility to the Commissioner as well as indirect working relationship with Risk Management Committee and Risk, Quality, and Safety Management Division of PT MRT Jakarta.



Komite Pemantau Risiko Bertugas:

- Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Risk, Quality, and Safety Management.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko Perusahaan serta pelaksanaannya.
- Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan.
- Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan RJPP dan RKAP.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi dan pertimbangan risiko kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar.
- Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan Proyek MRT Jakarta agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham.
- Melakukan evaluasi atas rekomendasi perihal komunikasi Risiko dilaksanakan, pembinaan Budaya sadar Risiko diselenggarakan, penciptaan situasi yang kondusif untuk penerapan Manajemen Risiko diciptakan dan pembentukan "Tone at the Top" terlaksana.
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam) dan melakukan review sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- Memberikan persetujuan atas risiko kritis sebelum ditetapkannya tahun anggaran yang baru.
- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai keseluruhan Risk Appetite, Risk Tolerance, dan strategi Perusahaan serta melakukan pengawasan implementasi strategi Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

- Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

The duties of Risk Monitoring Committees are as follows:

- To assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of risk management and the effectiveness of duties implementation of Risk Management Committee and Risk, Quality, and Safety Management Division.
- To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding system improvement of Company Risk Management and its implementation.
- To deliver the evaluation report to the Board of Commissioners related to the Company's Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) implementation of the current year.
- To deliver the evaluation report on the proposed RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors according to the schedule determined by the Board of Commissioners.
- To provide recommendations to the Board of Commissioners in approving RJPP and RKAP.
- To deliver recommendations to the Board on the policy that has been taken by the Board of Directors with regard to risk management.
- To provide risks recommendations and consideration to the Board of Commissioners on the activities that require the approval of the Board of Commissioners as required in the Articles of Association.
- To conduct a situation assessment that is predicted to endanger the Jakarta MRT project so that the Board of Commissioners can report it to Shareholders.
- To evaluate the recommendations on Risk communication, Risk Awareness coaching, creation of a conducive situation for the implementation of Risk Management, and the establishment of "Tone at the Top".
- To develop guidelines and work procedures (the Charter) and review as needed, at least every 3 (three) years.
- To provide approval for critical risk before the new fiscal year budget is determined.
- To give consideration and advice to the Board on the overall Risk Appetite, Risk Tolerance and the Company's strategy and to supervise the implementation of corporate strategies.
- To perform other duties and responsibilities given by the Board of Commissioners from time to time.

Responsibilities of Risk Monitoring Committee:

- Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - » Laporan Profil Risiko Triwulanan
 - » Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
 - » Laporan Evaluasi Pelaksanaan RJPP dan RKAP
 - » Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko
 - » Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Risiko
- Laporan Komite Pemantau Risiko ditandatangani oleh Ketua.
- Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan
- *Risk Monitoring Committee accountability to the Board of Commissioners presented in the report is as follows:*
 - » *Quarterly Risk Profile Report;*
 - » *Risk Management Implementation Evaluation Report;*
 - » *RJPP and RKAP Implementation Evaluation Report;*
 - » *Risk Monitoring Committee tasks implementation annual report;*
 - » *Risk Monitoring Committee Reports for each special task execution.*
- *Risk Monitoring Committee's Report is signed by the Chairman.*
- *Risk Monitoring Committee is responsible for maintaining the confidentiality of documents, data and information.*

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang informasi Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui Divisi *Risk Management*.
- Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, Komite Pemantau Risiko wajib bekerja sama dengan Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Risk Monitoring Committee has the following authority:

- *Risk Monitoring Committee is authorized to obtain full information about the Company's information relating to its duty implementation through the Risk Management Division.*
- *In implementing the authority as referred to item 3.1, the Risk Monitoring Committee shall work closely with the Risk, Quality, and Safety Management Division through established procedures.*

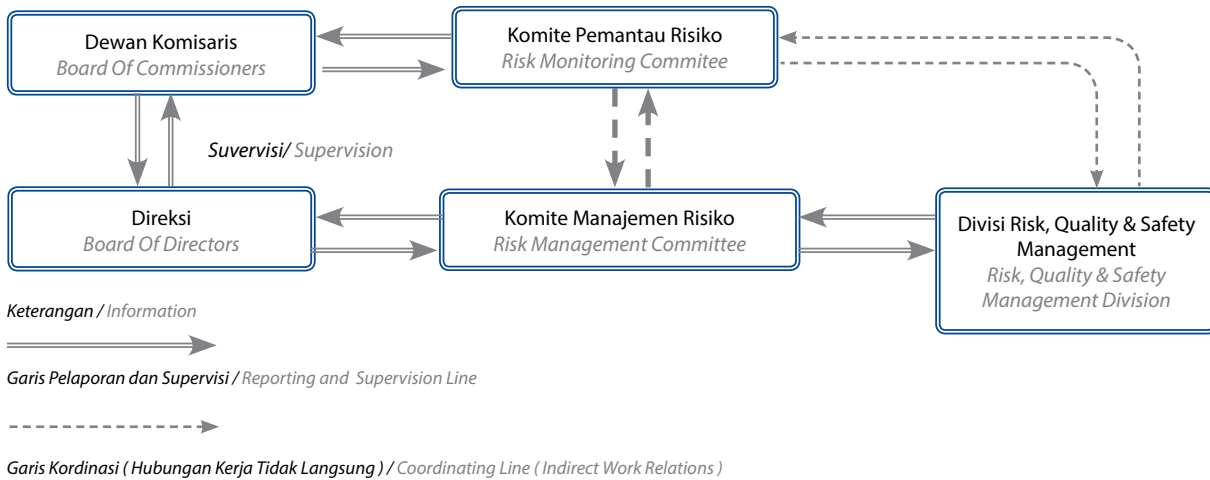
Kriteria dan Independensi Komite Pemantau Risiko Perusahaan telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. Adapun persyaratannya antara lain:

- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan proyek MRT Jakarta yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) selama 6 (enam) bulan;
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan;
- Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris; dan
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Perusahaan.

Criteria and Independence of Risk Monitoring Committee The Company has stipulated several requirements to be fulfilled by an individual in order to become a member of Risk Monitoring Committee. The requirements are among others:

- *Not a former member of Board of Directors or Executive Officer of DKI Jakarta Provincial Government and the Ministry and the parties that have relations with MRT Jakarta project which may affect their ability to act independently, cannot be an independent party in the Committee membership before taking a waiting period (cooling off period) for 6 (six) months;*
- *Does not have a business relationship, directly or indirectly related to the Company's business activities and its subsidiaries;*
- *Not a person having authority and responsibility for planning, directing or controlling the Company within 6 (six) months before being appointed by the Commissioner; and*
- *Not having a family relationship by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the commissioners, directors or Shareholders of the Company.*

Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko Work Relation of Risk Monitoring Committee



Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Ketentuan atau mekanisme rapat Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Rapat Komite dilakukan 10 (sepuluh) kali dalam setahun dan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya. Jadwal dan agenda serta program kerja harus dibuat dalam program tahunan yang ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. Kuorum rapat sekurang-kurangnya dihadiri 51% dari jumlah anggota termasuk Ketua Komite dan seorang pihak independen.

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam

Risk Monitoring Committee Competence Development

The company facilitates the implementation of the development program for the Risk Monitoring Committee in order to improve the competence of the Risk Monitoring Committee members. This program is expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Risk Monitoring Committee's performance.

Regarding competence development activities that are followed by the Risk Monitoring Committee Members throughout 2018 are presented in the Company Profile chapter in this annual report.

Risk Monitoring Committee Meeting

The provisions or mechanism of the Risk Monitoring Committee meeting are stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter. Committee meetings are conducted 10 (ten) times a year and at least 1 (one) time in 3 (three) months. Meetings can be held either by physical presence or through electronic media or a combination of the two. The schedule and agenda as well as work program must be made in the annual program set at the end of the previous year. The quorum of the meeting is attended by at least 51% of the members including the Committee Chairman and an independent party.

Decisions of Committee Meetings are based on deliberations to reach consensus. In the event that deliberations are not reached for consensus, then the decision is made based on the majority of votes. The results of the Committee Meeting must be contained in



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite, dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, serta diketahui dan ditanda tangani oleh anggota Komite yang tidak hadir. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pengambilan keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

Kebijakan Remunerasi

Perusahaan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan persetujuan pemberian remunerasi Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No.098/BOD-MRT/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

Struktur dan komponen remunerasi serta transparansi informasi tentang besaran remunerasi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di bawah ini:

minutes of meetings made by the Secretary of the Committee, and signed by all members of the Committee present, and known and signed by Committee members who were not present. Dissenting opinions in making meeting decisions must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissent.

A summary report on the minutes of the Risk Monitoring Committee meeting has met the procedure requirements, legal administration and describes the chronological situation of the meeting including dissenting opinions or delegation of a Meeting Chairman if the Meeting Chairman is unable to attend the meeting.

Remuneration Policy

The company has a policy related to remuneration for the Risk Monitoring Committee. Approval of the Risk Monitoring Committee remuneration is established based on the Risk Monitoring Committee's remuneration agreement stipulated by Decision Letter of Board of Directors No.098/BOD-MRT/XI/2017 dated November 30, 2017.

The structure and components of remuneration and information transparency regarding the amount of remuneration for the Risk Monitoring Committee are presented below:

Remunerasi Komite Pemantau Risiko Remuneration of Risk Monitoring Committee

Komite Audit Audit Committee	Periode Menjabat di Tahun 2018 Period of Office in	Honorarium per Bulan (Rp) per month	Honorarium 1 Tahun (Rp) per year
Rizal Helbari Rivai (Anggota) Member	1 Januari -31 Oktober 2018 January 1 - October 31, 2018	10.000.000	100.000.000
Rudy Hartono (Anggota) Member	1 Januari -31 Oktober 2018 January 1 - October 31, 2018	10.000.000	100.000.000
Ivan Malik (Anggota) Member	31 Oktober – 31 Desember 2018 October 31 - December 31, 2018	10.000.000	20.000.000
Singgih Budihartono (Anggota) Member	31 Oktober – 31 Desember 2018 October 31 - December 31, 2018	10.000.000	20.000.000
Jumlah Total			240.000.000



Informasi tentang Organ/Komite Lainnya di Bawah Dewan Komisaris

Selain organ pendukung Dewan Komisaris di atas, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko, Perusahaan belum memiliki komite maupun organ lainnya.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Sekretaris Perusahaan

Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola Perusahaan adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang (*exercise of power*) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berjalan dengan baik untuk kepentingan Perusahaan. Untuk mendukung fungsi pembentukan citra positif Perusahaan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan, manajemen Perusahaan didukung oleh Sekretaris Perusahaan. Selain fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, yaitu merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman, perencanaan, evaluasi dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal, *socio marketing*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, protokol, *legal*, administrasi dan komunikasi internal perusahaan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

Information On Other Organ / Committees Under The Board Of Commissioners

In addition to the supporting organs of the Board of Commissioners above, namely the Secretary to Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee, the Company does not yet have a committee or other organs.

SUPPORTING ORGAN OF BOARD OF DIRECTORS

Corporate Secretary

One element in the Corporate Governance structure and process is ensuring that exercise of power and relationships with stakeholders run well for the Company's benefit. To support the function of establishing the Company's positive reputation through managing effective communication programs for all stakeholders, the Company's management is supported by the Corporate Secretary. In addition to these functions, the Corporate Secretary is also tasked with assisting the Board of Directors in formulating and preparing policies and guidelines, planning, evaluating and carrying out external relations activities, sociomarketing, Corporate Social Responsibility (CSR), protocol, legal, administrative and internal communication in accordance with policies, guidelines and plans that have been set.

Parties who Appoint and Dismiss the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is an official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism. The Corporate Secretary is responsible and reports its activities directly to the President Director.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 036 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 yang mengangkat Tubagus Hikmatullah sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Corporate Secretary

Determination of Corporate Secretary in accordance with the Board of Directors Decision Letter No. 036 Year 2016 dated June 30, 2016 appointing Tubagus Hikmatullah as Corporate Secretary and has been approved by the Board of Commissioners.

Tubagus Hikmatullah
Sekretaris Perusahaan
Menjabat sejak September 2014
Corporate Secretary
Been serving since September 2014

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun
Kelahiran Jakarta, 14 Juni 1972

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Islam Bandung (1998), Master (S2) of Commerce, jurusan Finance, University of Wollongong, (1999)

Bergabung di MRT Jakarta

1 September 2014

Pengalaman Kerja

Berkarier di KPPU RI sejak tahun 2001 hingga 2014, dengan jabatan terakhir sebagai Plt. Sekretaris Jenderal KPPU merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; sebelum akhirnya bergabung di Perusahaan sebagai Kepala Divisi *Corporate Secretary*.

Personal Data

Indonesian
46 years old
Born in Jakarta, June 14, 1972

Domicile

South Tangerang, Banten, Indonesia

Education

Bachelor (S1) in Economics, majoring in Accounting, Islamic University of Bandung (1998), Master (S2) of Commerce, majoring in Finance, University of Wollongong, (1999)

Join MRT Jakarta

September 01, 2014

History of Employment

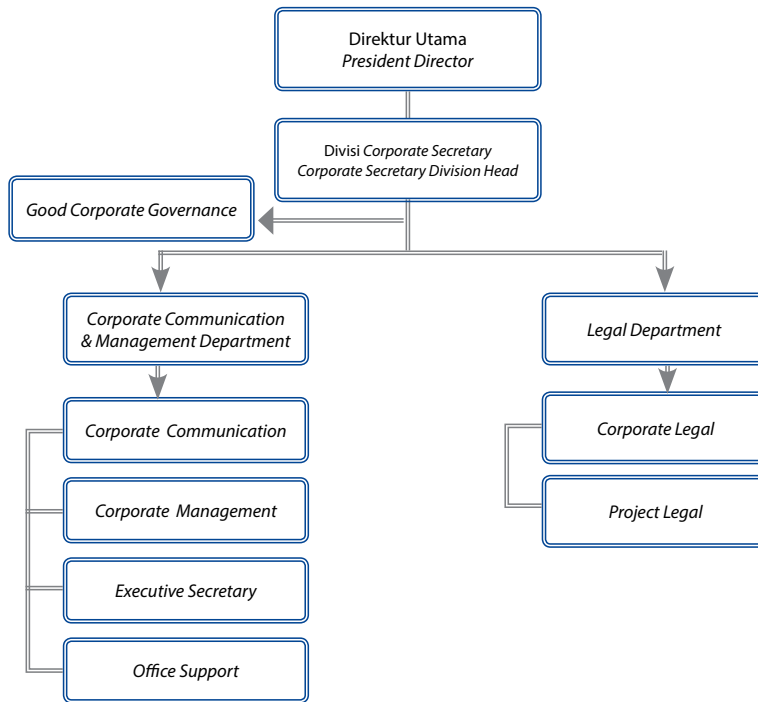
Career with KPPU RI from 2001 to 2014, with his last position as Acting. General Secretary of KPPU concurrently as Budget Authority KPPU RI; before finally joining the Company as Head of Corporate Secretary Division.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Berikut struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berada di dalamnya.

Organization Structure of Corporate Secretary

The following is Corporate Secretary organization structure and functions.



Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No.119 hingga akhir tahun 2018, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 23 orang.

The organization structure of Corporate Secretary is determined in accordance with Decision Letter of Board of Directors No.119 until the end of 2018, with 23 employees in the Corporate Secretary unit.

Jabatan Position	Jumlah Karyawan Number of Employees
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1
Kepala Departemen Corporate Communication & Management Head of Corporate Communication & Management Department	1
Kepala Departemen Legal Head of Legal Department	1
Good Corporate Governance Specialist	1
Corporate Communication Specialist	6
Corporate Management Specialist	1



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Jabatan Position	Jumlah Karyawan Number of Employees
Executive Secretary	2
Office Support	4
Corporate Legal	2
Project Legal	4
Total	23

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

1. Fungsi Pokok:
 - a. Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan Organ Perusahaan dan *Stakeholders*.
 - b. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan, dan pengelolaan masalah kehumasan (*relation officer*).
2. Tugas Pokok:
 - a. Memberikan laporan secara periodik kepada Direktur Utama.
 - b. Menyelenggarakan *data base* dan penyimpanan dokumen asli Perusahaan.
 - c. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk *Stakeholders*.
 - d. Mengomunikasikan kebijakan Perusahaan kepada pihak internal dan eksternal.
 - e. Menyiapkan laporan Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS.
 - g. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, RUPS dan rapat dengan *Stakeholders* lainnya.
 - h. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
 - i. Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan secara benar dan tepat waktu.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara umum, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;
- Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi;

Corporate Secretary Functions and Duties

1. Main Functions:
 - a. As a *liaison officer* between the Company and the Company's Organs and *Stakeholders*.
 - b. Dealing with activities related to secretarial, and public relations issues management (*relations officer*).
2. Main Duties:
 - a. Provide periodic reports to the President Director.
 - b. Organize the *data base* and storage of the Company's original documents.
 - c. Build a mutually beneficial cooperation network with various parties, including the *Stakeholders*.
 - d. Communicate the Company's policy to internal and external parties.
 - e. Prepare the Company report in accordance with prevailing regulations.
 - f. Coordinate the preparation of management and project reports for other purposes than the GMS.
 - g. Coordinate report materials to the Board of Directors Meeting, Board Meeting, GMS and other meetings with *stakeholders*.
 - h. Implement Company secretarial activities.
 - i. Prepare Corporate Secretary activities reports in a correct and timely manner.

The Implementation of Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

In general, Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- Preparing for the implementation of GMS;
- Attending Board of Directors meetings and joint meetings between the Board of Commissioners and Directors;



-
- Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting lainnya;
 - Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala;
 - Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perusahaan dari setiap unit kerja;
 - Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada *stakeholders*, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
 - Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan yang disampaikan kepada *stakeholders*, baik dalam *website* atau media informasi lainnya;
 - Menyelenggarakan *data base* dan penyimpanan dokumen asli Perusahaan;
 - Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk *Stakeholders*;
 - Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan kepada pihak internal dan eksternal;
 - Menyiapkan laporan Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS;
 - Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, RUPS dan rapat dengan *Stakeholders* lainnya;
 - Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan;
 - Merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman hubungan masyarakat, *socio marketing*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), protokoler, legal, administrasi dan komunikasi internal Perusahaan.
 - Menyetujui dan melaksanakan program CSR dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Perilaku dan Pedoman-Pedoman lain yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance*;
 - Melakukan sosialisasi *Good Corporate Governance* ke seluruh Insan Perusahaan;
 - Melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut hasil *assessment* penerapan *Good Corporate Governance*.
- *Managing and storing documents related to the Company's activities including GMS documents, minutes of Board of Directors meetings, minutes of joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners and other important Company documents;*
 - *Recording the special lists related to the Board of Directors and their families and Commissioners and their families both in the Company and its affiliates which include share ownership, business affiliation and other roles that cause conflicts of interest with the interests of the Company;*
 - *Making periodic reports of duties and responsibilities implementation to the President Director;*
 - *Collecting all important information about the Company from each work unit;*
 - *Determining criteria regarding the type and material of information that may be conveyed to stakeholders, including information that can be submitted as a public document;*
 - *Maintaining and updating information regarding the Company that is conveyed to stakeholders, whether on websites or other information media;*
 - *Organizing data bases and storing original documents of the Company;*
 - *Building a network of mutually beneficial cooperation with various parties, including stakeholders;*
 - *Communicating the Company's policies to internal and external parties;*
 - *Preparing Company reports in accordance with applicable regulations;*
 - *Coordinating the preparation of management reports and projects for purposes other than the GMS;*
 - *Coordinating report materials for Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, GMS and meetings with other Stakeholders;*
 - *Carrying out the Company's secretarial activities;*
 - *Formulating and compiling public relations policies and guidelines, social marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), protocol, legal, administrative and internal communication of the Company.*
 - *Approving and implementing CSR programs in coordination with relevant parties.*
 - *Preparing Corporate Governance Guidelines, Board of Commissioners and Directors Work Guidelines (Board Manual), Code of Conduct and other Guidelines relating to the implementation of Good Corporate Governance;*
 - *Disseminating Good Corporate Governance to all Company individuals;*
 - *Monitoring the follow-up of assessment results of the Good Corporate Governance implementation.*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara spesifik, Sekretaris Perusahaan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan internal dan eksternal Perusahaan di bidang Administrasi Perusahaan, hubungan masyarakat dan hukum.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Audit Internal

Untuk memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, diperlukan sebuah proses audit internal mencakup audit atas operasional proyek dan keuangan Perusahaan. Perusahaan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko berdasarkan Standar Prosedur Operasi Audit Internal yang disusun dengan mengacu kepada Piagam Audit Intern (*Audit Charter*).

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, pasal 343, tentang perlunya Pembentukan Komite Audit dan Internal Audit pada BUMD, serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan membentuk unit Audit Internal sebagai organ pendukung yang penting untuk menjamin tercapainya tujuan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Dalam rangka memastikan pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan, Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung terhadap Direksi, di mana Kepala Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama. Untuk mendukung pelaksanaan Audit Internal di lingkup Perusahaan, kepala dan anggota unit kerja Unit Audit Internal telah dilengkapi oleh sertifikasi/kualifikasi audit internal.

Profil Kepala Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi, Direktur Utama mengangkat Andy Revy Rohadian sebagai Kepala Audit Internal Perusahaan.

Specifically, the Corporate Secretary also has duties and responsibilities related to internal and external activities of the Company in the field of Corporate Administration, community and legal relations.

Competence Development of Corporate Secretary

The company facilitates the implementation of development programs for the Corporate Secretary in order to improve competence. This program is expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Corporate Secretary's performance.

Regarding the competence development activities followed by the Corporate Secretary throughout 2018 are presented in the Company Profile chapter in this annual report.

Internal Audit

To ensure optimal management of the Company and in accordance with the applicable laws and regulations, an internal audit process is required including audits of project operations and the Company's finances. The company implements a risk-based system of supervision and internal control based on the Internal Audit Operating Procedure Standards which are prepared by referring to the Audit Charter.

Pursuant to article 343 of Law No. 23 of 2014, on Establishment of Audit Committee and Internal Audit in BUMD, as well as Governor Decision of DKI Jakarta Province No. 96 of 2004 dated October 7, 2004 on Implementation of Good Corporate Governance Practice at Regional Owned Enterprise (BUMD) in DKI Jakarta Provincial Government, the Company has established Internal Audit unit as supporting organ essential to achieve the Company's goals.

Parties who Appoint and Dismiss the Internal Audit Head

To ensure the company's management is well implemented, Internal Audit Unit is directly responsible to Board of Directors, in which the Internal Audit Head is appointed by the President Director. To support Internal Audit activity in the Company, its head and member is supported with certification/qualification of internal audit.

Profile of Internal Audit Head

Pursuant to Decision Letter of Board of Directors. The President Director has appointed Andy Revy Rohadian to serve as Internal Audit Head of the Company.



Andy Revy Rohadian
Kepala Audit Internal dan Control
Menjabat sejak 06 Juni 2017
Internal Audit and Control Head
Been serving since June 06, 2017

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Pontianak, 23 Maret 1966

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

Mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus pada tahun 1987 dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1996.

Bergabung di MRT Jakarta

6 Maret 2017

Pengalaman Kerja

Bergabung di Badan Pengawasan KEuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat pada tahun 1987 sampai 1993. Pada tahun 1996, bergabung di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan BPKP. Pada tahun itu juga, Beliau menduduki jabatan Deputy Investigasi BPKP sebagai Senior Auditor disamping bekerja sebagai staf di Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

Sejak tahun 2016 hingga kini, Beliau menjabat sebagai Deputy Investigasi BPKB bidang Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Personal Data

Indonesian
52 years old
was born in Pontianak, March 23, 1966

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

Education

He obtained his Diploma III Degree and Bachelor Degree from State College of Accounting (STAN), Jakarta, respectively in 1987 and 1996.

Join MRT Jakarta

March 6, 2017

History of Employment

Joined the West Kalimantan Development Audit Agency (BPKP) from 1987 to 1993. In 1996, he joined BPKP Research and Monitoring System Development. At the same year, he held the position of Deputy Investigation of BPKP as Senior Auditor and was concurrently as a staff member at the Jampidsus Indonesian Attorney General's Office.

Since 2016 up to present, he has served as Deputy for Investigation of BPKB in the field of Evaluation of Smooth Development Constraints



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

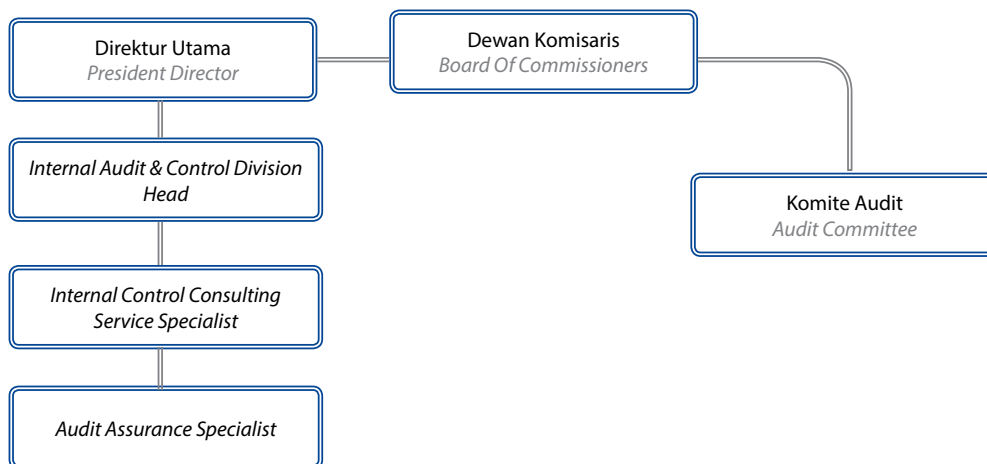
Struktur Organisasi Audit Internal

Berikut struktur organisasi Audit Internal yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berada di dalamnya.

Organization Structure of Internal Audit

The following is Internal Audit organization structure and functions.

Struktur Organisasi Audit Internal Organization Structure of Internal Audit



Struktur organisasi Audit Internal ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 119 Tahun 2018 Hingga akhir tahun 2018, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Audit Internal sebanyak 5 orang.

The organization structure of Corporate Secretary is determined in accordance with Decision Letter of Board of Directors No. 119 until the end of 2018, with 5 employees in the Internal Audit unit.

Jabatan Position	Jumlah Karyawan Number of Employees
Kepala Divisi Internal Audit & Control Internal Audit & Control Division Head	1
Specialist	4
Total	5

Persyaratan Keahlian dan Kecermatan Profesional

Audit Internal haruslah dilaksanakan oleh internal auditor yang baik secara individu ataupun secara kolektif mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama untuk bidang tugasnya. Tanggung jawab Divisi Internal Audit & Control untuk memenuhi standar kecakapan profesionalisme dengan mempertimbangkan penugasan tenaga Auditor internal, yang memenuhi syarat tuntutan tugas baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis, luas cakupan dan kompleksitas tugas Audit tersebut. Pemenuhan kebutuhan tenaga auditor yang mempunyai kecakapan sesuai dengan variasi bidang kerja dan disiplin ilmu yang menjadi tugas dari Divisi Internal Audit & Control, bila perlu

Expertise Requirements and Professional Accuracy

Internal Audit must be carried out by internal auditors who either individually or collectively have adequate professional skills and careful care for their field of work. The responsibility of the Internal Audit & Control Division to meet professional skills standards by considering the assignment of internal Auditors, who fulfill the requirements of the duty demands both in terms of education, technical capability, scope and complexity of the Audit duties. Meeting the needs of auditors who have skills in accordance with variations in the field of work and disciplines that are the duties of the Internal Audit & Control Division, if necessary, can be carried out through outside experts. To that end, the Company commissioned an Audit Team consisting of



dapat dilaksanakan melalui tenaga ahli dari luar. Untuk itu, Perusahaan menugaskan Tim Audit yang terdiri dari Pengawas Tim Audit, Ketua Tim Audit, anggota tim Audit yang berpengalaman dan ahli sehingga terlaksana supervisi yang baik mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Monitoring tindak lanjut hasil Audit.

the Audit Team Supervisor, Audit Team Leader, experienced and expert Audit team members so that good supervision was carried out from the planning to the implementation of the Audit, Audit Reporting and Monitoring the follow-up of Audit findings.

Persyaratan jabatan Auditor pada Divisi *Internal Audit & Control* tertuang dalam Peraturan Direksi No. 022 Tahun 2018 tentang Job Profil bagi Karyawan dilingkungan PT MRT Jakarta.

Requirements for Auditor positions in the Internal Audit & Control Division contained in Decision Letter of Board of Directors No. 053 of 2010 concerning Job Description of Work Units within PT MRT Jakarta.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Audit Internal hingga akhir tahun 2018.

Professional Certification of Internal Audit

Professional certification is an important aspect for auditors to understand the development of audits, especially related to compliance with regulations and industrial development. Following are the professional certifications held by employees of the Internal Audit until the end of 2018.

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Karyawan Certification Level
Manajerial Managerial	2
Lanjutan Advanced	1
Dasar Basic	2
Total	5

Jumlah karyawan Audit Internal yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 5 orang atau 100% dari jumlah keseluruhan karyawan Audit Internal. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Audit Internal, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of Internal Audit employees who have professional certification is as many as 5 employees or 100% of the total number of employees of Internal Audit. The company is committed to increase the level of professional certification for Internal Audit employees, both for employees who have/do not have professional certification.

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal merupakan salah satu penjabaran dari Pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma-norma Acuan kerja bagi Divisi Internal Audit agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya.

Internal Audit Charter

In performing its duties, Internal Audit Unit is guided by the Audit Charter stipulated by the Board of Commissioners and Board of Directors. Internal Audit Charter is a part of GCG implementation Manual and prepared to become the norms of work guidelines for Internal Audit Division to work professionally according to their duties.

Piagam Audit Internal ini ditandatangani tanggal 19 November 2011 dan telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. 001 Tahun 2015 tentang Internal Audit Manual PT MRT Jakarta dan telah diperbaharui tanggal 25 Januari 2016.

This Internal Audit Charter was signed on November 19, 2011 and has been renewed through the Decision Letter of President Director No. 001 of 2015 concerning the Internal Audit Manual of PT MRT Jakarta and was updated on January 25, 2016.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Piagam Audit Internal antara lain berisi:

- Kedudukan dan Fungsi Internal Audit
- Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit
- Wewenang Internal Audit
- Lingkup Kerja Internal Audit
- Hubungan Kerja dan Koordinasi
- Persyaratan Pelaksanaan dan Pelaporan Audit
- Kode etik

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Piagam Audit yang dimiliki Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan proses bisnis di Unit Kerja telah sesuai dengan kebijakan Direksi, Peraturan Perundangan dan didukung *accountability* yang baik.
2. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi di setiap proses di unit kerja.
3. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian intern dan penerapan GCG serta penilaian kesesuaian dengan ketentuan/kebijakan peraturan Perusahaan yang berlaku.
4. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur serta rencana investasi Perusahaan, sehubungan dengan risiko Perusahaan.
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
 - » Administrasi dan Keuangan.
 - » Operasional dan Proyek.
 - » Investasi & belanja modal.
 - » SDM dan Organisasi.
 - » Manajemen Risiko.
 - » Kegiatan Perusahaan lainnya.
6. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala Unit Kerja di lingkungan Perusahaan.
7. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti:
 - » Informasi penting Perusahaan terjamin keamanannya.
 - » Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif.
 - » Penyajian laporan Perusahaan dan kegiatan-kegiatan Perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah sesuai dengan perkembangan Perusahaan dan biaya usaha.

Internal Audit Charter contains, among others:

- *Position and Function of Internal Audit*
- *Internal Audit Duties and Responsibilities*
- *Internal Audit Authority*
- *Internal Audit Scope of Work*
- *Work Relation and Coordination*
- *Requirement of Audit Implementation and Reporting*
- *Code of Conduct*

Duties and Responsibilities

In the Audit Charter of the Company, the duties and responsibilities of the Internal Audit Division can be described as follows:

1. *Ensuring that business process execution at Work Unit are in accordance with Board of Directors policy, laws and regulations, and supported by well accountability.*
2. *Ensuring the integrated risk management implementation at every process in the work unit.*
3. *Carry out inspection/audit on the course of internal control system and GCG implementation and conformity assessment with the Company's regulations/policies applied.*
4. *Conduct analysis and evaluation of systems and procedures effectiveness as well as the Company's investment plan, in connection with the Company's risk.*
5. *Conduct supervision and inspection over the activities carried out in the field of:*
 - » *Administration and Finance.*
 - » *Operations and Projects*
 - » *Investment and capital expenditures*
 - » *Human Capital and Organization.*
 - » *Risk management.*
 - » *Other Corporate Activities.*
6. *Perform test and assessment of Working Unit periodic reports within the Company.*
7. *Conduct assessment and ensure that each Company's work unit activities performed pursuant to applied regulations such as:*
 - » *The Company's Important information are secured.*
 - » *Corporate Secretary function in controlling information can be carried out effectively.*
 - » *The presentation of the Company's reports and activities shall comply with laws and regulations.*
8. *Conduct monitoring and evaluations on the audit findings results and submit suggestions for improvements of the implementation of activities of the Company and system/policy/regulation that has met the development of the Company and business costs.*



9. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

9. Carry out special tasks in the scope of internal control that is assigned by the President Director.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

In carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit has the authority in terms of:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya.
4. Bermitra dengan Komite Audit untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

1. Develop, modify and carry out internal audit policies, including, determining the audit work implementation procedures and scope.
2. Access all documents, records, personal and physical, information of place where audit object is implemented to obtain data and information related to the performance of its duties.
3. Verify and test the reliability of information obtained, in connection with the assessment of the system effectiveness that has been audited.
4. Partnering with Audit Committee to provide information related to tasks execution.

Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviu/diaudit, tetapi tanggung jawab Audit Internal adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

Internal Audit does not have the authority and responsibility for the reviewed/audited activities implementation, yet the Internal Audit's responsibility are to perform assessment and analysis for the activities.

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Competence Development of Internal Audit

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Audit Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Audit Internal.

The company facilitates the implementation of development programs for Internal Audit in order to improve employee competence. This program is expected to have a positive impact on productivity and effectiveness of Internal Audit performance.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Audit Internal di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The Internal Auditors' Competence Development activities throughout 2018, are presented in the Company Profile chapter in this annual report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2018

Brief Report on Internal Audit Duties in 2018

Di tahun 2018, Audit Internal melaksanakan program kerja pengawasan yang rencana dan realisasinya adalah:

In 2018, Internal Audit implements a supervisory work program whose plans and realization are:

Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Asurans atas Divisi Corporate Secretary Assurance on Corporate Secretary Division	Selesai Realized	100%
Asurans atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi (VO/PA) CP 106 Assurance on mplementation of Construction Contract (VO/PA) CP 106	Selesai Realized	100%



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Asurans atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi (VO/PA) CP 103 <i>Assurance on Implementation of Construction Contract (VO / PA) CP 103</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Asurans atas Divisi HR <i>Assurance on HC Division</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Asurans atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi (VO/PA) CP 104 <i>Assurance on Implementation of Construction Contract (VO / PA) CP 104</i>	Selesai <i>Realize</i>	100%
Asurans atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi (VO/PA) CP 105 <i>Assurance on Implementation of Construction Contract (VO / PA) CP 105</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Asurans atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi (VO/PA) CP 101 <i>Assurance on Implementation of Construction Contract (VO / PA) CP 101</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Asurans atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi (VO/PA) CP 102 <i>Assurance on Implementation of Construction Contract (VO / PA) CP 102</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Asurans atas Departement GA, Divisi Bisnis Support <i>Assurance on GA Department, Business Support Division</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Evaluasi atas Amandemen 5 CMCS <i>Evaluation on 5 CMCS Amendments</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Audit atas permintaan dan perintah Direksi/ Komisaris/Komite Audit <i>Audit on the request and order of the Directors / Commissioners / Audit Committee</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Self Assessment atas Quality Assurance Review <i>Self Assessment on Quality Assurance Review</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Maturity Assessment atas Manajemen Risiko <i>Maturity Assessment on Risk Management</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%
Asurans atas Divisi Business Development <i>Assurance on Business Development Division</i>	Selesai <i>Realized</i>	100%

Komite Manajemen Risiko

Sifat dan tujuan pembentukan:

1. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direktur selain Direktur Utama, Kepala Divisi Risk, Quality, and Safety Management serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Divisi yang terkait penanganan Risiko Perusahaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi

Risk Management Committee

Nature and purpose of formation:

1. Risk Management Committee is a committee consisting of Directors other than President Director, Head of Risk, Quality, and Safety Management Division and at least 1 (one) Division Head related to the management of Corporate Risk determined through a Decision Letter of Board of Directors.



2. Komite Manajemen Risiko dapat diketuai oleh salah satu Direktur selain Direktur Utama
3. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Utama
4. Memantau independensi Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* (Peraturan Direksi No. 022 Tahun 2018 tentang *Job Profil* bagi Karyawan dilingkungan PT MRT Jakarta)

Keanggotaan:

- Ketua : Direktur Keuangan dan Administrasi

Anggota :

- Direktur Konstruksi
- Direktur Operasi dan Pemeliharaan
- Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis
- Kepala Divisi *Risk, Quality, and Safety Management*
- Kepala Divisi *Corporate Secretary*
- Kepala Divisi *Internal Audit & Control*
- Kepala Divisi *Project Management Office*
- Kepala Divisi *Engineering*
- Kepala Divisi *Railway Operation*
- Kepala Divisi *Railway Maintenance*
- Kepala Divisi *Business Development and Commercial*
- Kepala Divisi *Corporate Strategy and Planning*

Fungsi, tugas dan tanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan dan persetujuan batas (limit) risiko, penetapan top risiko Perusahaan serta perubahan Kebijakan Manajemen Risiko (apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kegiatan Perusahaan secara signifikan)
2. Memberikan fasilitasi dan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Perusahaan yang memiliki eksposur risiko yang signifikan
3. Mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh karyawan Perusahaan melalui kegiatan pengembangan kapasitas pengelolaan risiko dan sosialisasi hal-hal yang bersifat strategis yaitu menyampaikan profil, peta, risiko kritis, dan batas toleransi risiko Perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
4. Menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi Perusahaan secara keseluruhan
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko serta memberikan arahan berdasarkan laporan profil risiko Perusahaan yang disampaikan Divisi Manajemen Risiko untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko dan memantau kinerjanya

2. *Risk Management Committee can be chaired by one of the Directors other than President Director*
3. *Risk Management Committee is responsible to President Director*
4. *Monitor the independence of Risk, Quality, and Safety Management Division (Regulation of Board of Directors Number 022 Year 2018 concerning Job Profiles for Employees within PT MRT Jakarta)*

Membership:

- *Chairman: Finance and Administration Director*

Members:

- *Construction Director*
- *Operation and Maintenance Director*
- *Business Development and Support Director*
- *Head of Risk, Quality and Safety Management Division*
- *Head of Corporate Secretary Division*
- *Head of Internal Audit & Control Division*
- *Head of Project Management Office Division*
- *Head of Engineering Division*
- *Head of Railway Operation Division*
- *Head of Railway Maintenance Division*
- *Head of Business Development and Commercial Division*
- *Head of Corporate Strategy and Planning Division*

Functions, duties and responsibilities:

1. *Establish risk management policies and strategies including the establishment and approval of risk limits, the determination of the Company's top risks and changes in the Risk Management Policy (if there are changes in factors that may significantly affect the company's activities)*
2. *Provide facilitation and consultation to the Board of Directors, especially the President Director in making decisions on the Company's activities that have a significant risk exposure*
3. *Develop a risk awareness culture for all employees of the Company through the development of risk management capacity and dissemination of strategic matters, namely conveying profiles, maps, critical risks, and risk tolerance limits of the Company at least once a year.*
4. *Provide adequate resources and ensure the alignment of the risk management program with the Company's overall strategy*
5. *Evaluate the implementation of risk control and provide direction based on the Company's risk profile report submitted by the Risk Management Division to ensure the effectiveness of risk management and monitor its performance*



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

6. Diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan menghimpun seluruh data dan informasi termasuk penjelasan yang dibutuhkan untuk melakukan analisa risiko

6. *Granted the authority to obtain and collect all data and information including explanations needed to carry out risk analysis.*

Laporan singkat pelaksanaan tugas tahun 2018

Brief Report on 2018 Duties Implementation:

1. Rapat Komite Manajemen Risiko 6 Juni 2018
Agenda :
 - » Penetapan *Top Risk* Perusahaan terhadap KPI Perusahaan Tahun 2018 dengan metoda *delphi*
2. Rapat Komite Manajemen Risiko 27 Juli 2018
Agenda :
 - » Pemantauan progress mitigasi *Top Risk* Perusahaan Tahun 2018
 - » Pembahasan risiko – risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen.
 - » Sosialisasi perubahan matriks risiko Perusahaan.
3. Rapat Komite Manajemen Risiko 24 Agustus 2018
Agenda :
 - » Pemantauan progress mitigasi *Top Risk* Perusahaan Tahun 2018
 - » Pembahasan risiko – risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen.
4. Rapat Komite Manajemen Risiko 28 September 2018
Agenda :
 - » Penetapan kriteria prioritas risiko
 - » Penginian *Top Risk* menjadi *Top 10 Risk* menggunakan kriteria prioritas risiko.
 - » Pemantauan progress mitigasi *Top Risk* Perusahaan Tahun 2018
 - » Pembahasan risiko – risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen.
5. Rapat Komite Manajemen Risiko 1 November 2018
Agenda :
 - » Pemantauan progress mitigasi *Top Risk* Perusahaan Tahun 2018 dan membahas risiko – risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen
6. Rapat Komite Manajemen Risiko 30 November 2018
Agenda :
 - » Pemantauan progress mitigasi *Top Risk* Perusahaan Tahun 2018 dan membahas risiko – risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen
7. Rapat Komite Manajemen Risiko 31 Desember 2018
Agenda :
 - » Pemantauan progress mitigasi *Top Risk* Perusahaan Tahun 2018 dan membahas risiko – risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen

1. *Risk Management Committee Meeting on June 6, 2018*
Agenda:
 - » *The Company's Top Risk Determination of the Company's KPI in 2018 using the Delphi method*
2. *Risk Management Committee Meeting on July 27, 2018*
Agenda:
 - » *Monitoring the Company's Top Risk mitigation progress in 2018*
 - » *Discussion on identified new risks that require attention from management.*
 - » *Dissemination of changes to the Company's risk matrix.*
3. *Risk Management Committee Meeting on August 24, 2018*
Agenda:
 - » *Monitoring the Company's Top Risk mitigation progress in 2018*
 - » *Discussion on identified new risks that require attention from management.*
4. *Risk Management Committee Meeting on September 28, 2018*
Agenda:
 - » *Determination of risk priority criteria*
 - » *Updating Top Risk to become the Top 10 Risk using risk priority criteria.*
 - » *Monitoring the Company's Top Risk mitigation progress in 2018*
 - » *Discussion on identified new risks that require attention from management.*
5. *Risk Management Committee Meeting on November 01, 2018*
Agenda:
 - » *Monitoring the Company's Top Risk mitigation progress in 2018 and discussing the newly identified risks that require attention from management*
6. *Risk Management Committee Meeting on November 30, 2018*
Agenda:
 - » *Monitoring the Company's Top Risk mitigation progress in 2018 and discussing the newly identified risks that require attention from management*
7. *Risk Management Committee Meeting on December 31, 2018*
Agenda:
 - » *Monitoring the Company's Top Risk mitigation progress in 2018 and discussing the newly identified risks that require attention from management.*



Informasi tentang Komite di Bawah Direksi

Selain Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Komite Manajemen Risiko, serta satuan unit kerja seperti yang tergambar dalam struktur organisasi Perusahaan, Direksi tidak memiliki komite maupun organ pendukung lainnya.

Divisi yang berada di Direktorat Utama adalah Divisi *Corporate Secretary*, Divisi *Risk, Quality, and Safety Management*, dan Divisi *Internal Audit and Control*. Direktur Utama juga memiliki Komite Manajemen Risiko yang anggotanya terdiri dari Seluruh Direksi, Kepala Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* dan beberapa Kepala Divisi.

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

Auditor eksternal atau Akuntan Perusahaan ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaat-asasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Perusahaan ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor Eksternal yang ditunjuk independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan. Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik sehingga memungkinkan Kantor Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-asasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Kantor Akuntan Publik wajib memberitahu Perusahaan bila ada kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Information On Committees Under The Board Of Directors

In addition to the Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management Committee, as well as work units as illustrated in the Company's organization structure, the Directors do not have committees or other supporting organs.

Divisions in the Main Directorate are the Corporate Secretary Division, Risk, Quality, and Safety Management Division, and the Internal Audit and Control Division. The President Director also has a Risk Management Committee whose members consist of the entire Board of Directors, Head of Risk, Quality, and Safety Management Division and several Division Heads.

EXTERNAL AUDITOR/PUBLIC ACCOUNTANT

The Company's External Auditor or Public Accountant is appointed to conduct the financial audit as well as to provide an independent and objective opinion on the fairness, consistency and conformity of the Company's financial statements according to the Indonesia Financial Accounting Standards and laws and regulations in force. The Company's accountant is appointed by the GMS from the candidates nominated by the Board of Commissioners. The appointed External Auditor is independent from the influence of Board of Directors, Board of Commissioners and interested parties in the Company. The Company must provide all accounting records and supporting data needed for the External Auditor/Public Accountant Firm so as to allow the Public Accounting Firm to provide opinion on the fairness, consistency and conformity of the Company's financial statements with the Indonesia Financial Accounting Standards (SAK). Public Accounting Firm shall notify the Company if there are events in which the Company does not comply with the rules and regulations in force.

Compliance with Indonesia Financial Accounting Standards

Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and compliance with the applicable Financial Accounting Standards in Indonesia stipulated by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

External Audit Procedures and Audit Standards

- Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inherent bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

- *Audits of the Company's financial statements are carried out in accordance with the professional standards of Public Accountants which cover all audit procedures that are deemed necessary in accordance with the circumstances.*
- *Audit includes testing and evaluating the internal control system, as well as examining, on the basis of testing, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.*
- *As part of the audit process, the Public Accountant Firm (KAP) also conducts question & answer to management regarding the management statements presented in the financial statements.*
- *Audit contains an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If this is the case, KAP will convey to management.*
- *Management approved the KAP inspection paper on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.*

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

An audit is carried out based on the Public Accountant Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Republic of Indonesia Government, then the audit will be carried out based on the State Financial Inspection Standards (SPKN) issued by the Audit Board of Indonesia (BPK).



Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perusahaan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Mechanism for Appointment of Public Accountants

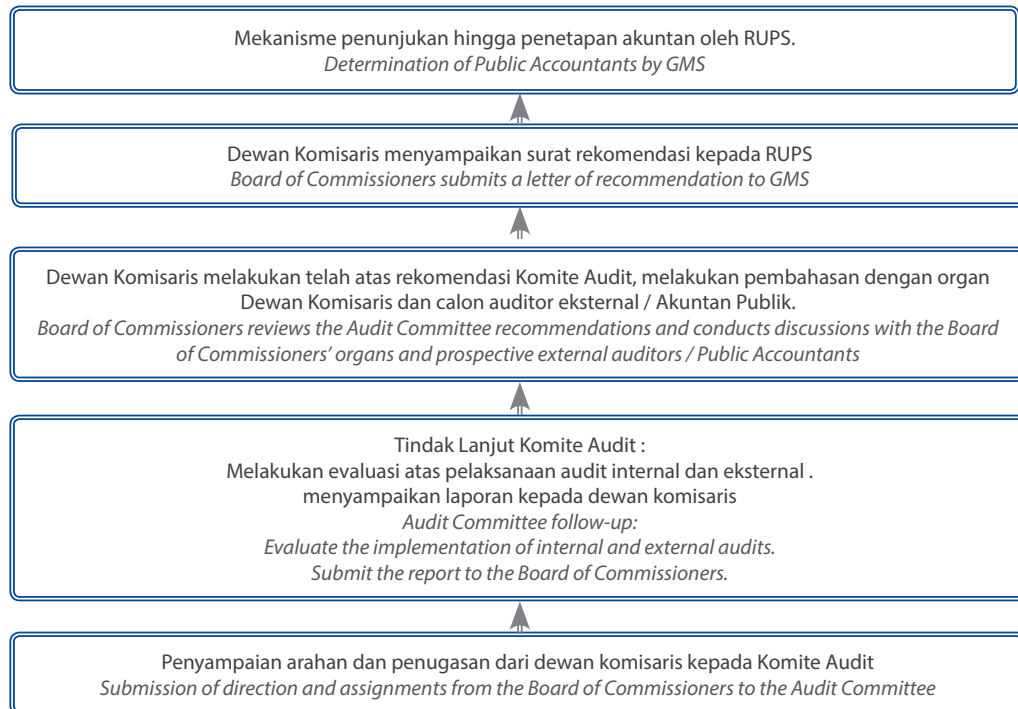
Stages of Public Accounting Firm (KAP) appointment mechanism:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee conducts the process of appointing an external Auditor candidate by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provision of goods / services.
2. The Board of Commissioners can reappoint an external auditor based on the performance evaluation results of the external auditor to conduct an audit of the financial statements.
3. The Board of Commissioners submits the nomination to GMS and the amount of honorarium / service fees proposed for the external auditor.
4. The proposal to GMS can be submitted through a separate letter which is part of the Board of Commissioners' response letter to the Company's annual performance.
5. The Board of Commissioners evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee in accordance with applicable provisions and standards.
6. For the process of appointing prospective external auditors and / or reappointing external auditors carried out by the GMS, the Board of Commissioners is sufficient to authorize the GMS to determine the auditor.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik *Appointment Mechanism To Determine Public Accountants*



Akuntan Publik Tahun 2018

Berdasarkan Keputusan RUPS 21 Maret 2018 Perusahaan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan pekerjaan audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah diperkuat melalui Akta No. 132 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Public Accountant in 2018

Based on the GMS Decision March 21, 2018 The company has approved the appointment of Public Accountant Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct a general audit work on 2018 Financial Statement. The appointment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja has been strengthened through Deed No. 132 in 2018 concerning the Annual GMS Minutes. To guarantee the independence and quality of audit findings, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Company.



Akuntan Publik Tahun 2018 2018 Public Accountant

Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	:	Purwantono, Sungkoro & Surja
Akuntan <i>Accountant</i>	:	Drs. David Sungkoro, CPA
Tahun Audit <i>Audit Year</i>	:	Tahun Buku 2018 <i>2018 Year Book</i>
Periode Penugasan <i>Period of Appointment</i>	:	21 November 2018 - 29 Maret 2019 <i>November 21, 2018 – March 29, 2019</i>
Jasa <i>Service</i>	:	Audit umum atas Laporan Keuangan <i>General Audit on Financial Statement</i>
Jasa Lainnya <i>Other Services</i>	:	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>
Biaya <i>Fee</i>	:	Rp581,4 juta <i>Rp581.4 million</i>

Opini Audit Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan PT MRT Jakarta periode 31 Desember 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja mendapatkan opini "wajar, dalam segala hal yang material" dan telah disampaikan pada Direksi

Daftar Akuntan Publik

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk periode 6 (enam) tahun terakhir.

Audit Opinion of Public Accounting Firm

The financial statements of PT MRT Jakarta period December 31, 2018 audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja received "unqualified opinion, in all material respects" and were submitted to the Board of Directors.

List of Public Accountants

For transparency needs, the following is a list of Public Accounting Firms, Accountants and fees given in auditing the Company's financial statements for the last 6 (six) years.

Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Akuntan <i>Accountant</i>	Jasa Service	Opini Opinion	Jasa Lainnya <i>Other Services</i>	Biaya Jasa <i>Service Fee</i>
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Drs. David Sungkoro, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018 <i>General Audit on Financial Statement of 2018 Fiscal Year</i>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified opinion, in all material respects</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>	Rp581,4 juta <i>million</i>



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ORGAN STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa Service Fee
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	Drs. David Sungkoro, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2017 <i>General Audit on Financial Statement of 2017 Fiscal Year</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>	Rp508,8 juta <i>million</i>
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja	E. Batara Manurung, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2016 <i>General Audit on Financial Statement of 2016 Fiscal Year</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>	Rp480 juta <i>million</i>
2015	Purwanto, Sungkoro & Surja	E. Batara Manurung, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2015 <i>General Audit on Financial Statement of 2015 Fiscal Year</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>	Rp400 juta <i>million</i>
2014	Purwanto, Sungkoro & Surja	E. Batara Manurung, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2014 <i>General Audit on Financial Statement of 2014 Fiscal Year</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>	Rp335 juta <i>million</i>
2013	Purwanto, Sungkoro & Surja	Drs. David Sungkoro, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2013 <i>General Audit on Financial Statement of 2013 Fiscal Year</i>	Wajar tanpa pengecualian <i>Unqualified opinion</i>	Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control</i>	Rp288 juta <i>million</i>



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT



Sebagai entitas usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum Perkotaan, Perusahaan selalu dihadapkan pada kemungkinan risiko yang timbul dalam melaksanakan proses usahanya. Oleh sebab itu, Perusahaan perlu untuk menerapkan Manajemen Risiko yang merupakan upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan terhadap risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan penerapan Manajemen Risiko, diharapkan potensi kerugian dapat ditekan serendah mungkin atau apabila memungkinkan pemanfaatan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan.

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Korporasi secara terstruktur. Perusahaan bertekad untuk membangun budaya sadar risiko di seluruh lapisan Perusahaan dipicu oleh proses implementasi konstruksi yang semakin berkembang, sehingga membuat Perusahaan kerap mengalami banyak hal-hal yang bersifat tidak pasti (*uncertainties*). Walaupun demikian, ketidakpastian tersebut dapat menjadi peluang peluang baru (*opportunities*) yang dapat membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis Perusahaan.

As a Company running in implementation of Urban Public Railway facilities, PT MRT Jakarta faces risk exposure related to the implementation of its business process. Therefore, the Company needs to implement Risk Management which is a coordinated effort to direct and control the Company on risks faced in carrying out its business activities. Through the implementation of Risk Management, it is expected that loss potency may be prevented optimally or, if it is possible, may enable risk utilization to become opportunity that can increase the Company's profits.

Since 2014, the Company has applied and developed a structured Corporate Risk Management System. The Company is committed to build risk awareness culture in all of its business lines as triggered by the ever developing construction implementation process, which causes the Company to experience many uncertainties. However, the uncertainties may become new opportunities to bring positive impact for the Company's business development.



MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Perusahaan berupaya maksimal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) berdasarkan pada tata nilai, sasaran dan strategi dengan prinsip Manajemen Risiko korporat yang bersifat melindungi, menciptakan nilai (*value*), transparan dan inklusif. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan. Di samping itu, Manajemen Risiko tak hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata, tetapi juga dapat menjadi alat strategi utama dalam menentukan perencanaan strategis Perusahaan.

LATAR BELAKANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PT MRT Jakarta selaku salah satu dari BUMD DKI Jakarta wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan/atau menjadikannya sebagai landasan operasionalnya.

Salah satu pilar dari *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan adalah Manajemen Risiko. Dengan dimulainya pelaksanaan konstruksi, Direksi Perusahaan memutuskan untuk mengubah pendekatan dalam pengelolaan Manajemen Risiko. Dengan adanya Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi pada proyek Perusahaan, pengelolaan risiko konstruksi dapat dipersepsikan sebagai bagian dari tugas yang telah dikelola oleh Konsultan. Terlebih lagi dengan belum adanya pengetahuan organisasi yang memadai terkait proses pembangunan proyek MRT Jakarta dengan segala risiko yang kemungkinan terjadi.

Akan tetapi, dengan memperhatikan kompleksitas proses konstruksi yang berlangsung dalam pembangunan MRT Jakarta dan juga hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan, LSM dan juga masyarakat, Direksi memutuskan untuk mengambil peran pro-aktif dan sesuai prinsip pengelolaan risiko yaitu mengutamakan upaya pencegahan/preventif sebagai cara untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan proyek.

The Company gives its maximum effort to implement Risk Management pursuant to the Company Long-Term Plan (RJPP) based on values, goals and strategy with corporate Risk Management is protective, having added value, transparent, and inclusive. Risk management is an integral part of business and decision making process that is systematic, structured and timely based on the best information available that has been adjusted to the Company's internal and external conditions. In addition, Risk Management has not only become daily operation performance measurement, but also the main strategic tool in determining the Company's strategic plan.

COMPANY'S RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION BACKGROUND

Pursuant to Decree of DKI Jakarta Province Governor No. 96 of 2004 on GCG Practice Implementation at Regional Owned Enterprise (BUMD) in DKI Jakarta Government Environment, PT MRT Jakarta as one of DKI Jakarta BUMD must apply Good Corporate Governance (GCG) consistently and/or establishes it as foundation of its operations.

One of the pillars of Good Corporate Governance applied by the Company is Risk Management. With the start of the construction process, the Company's Board of Directors decided to change the approach in managing risk management. With Construction Management Consultation Service in the Company's project, construction risk management can be perceived as part of duties managed by the Consultant. Moreover, adequate knowledge of organization related to MRT Jakarta project development process along with all possible risks is not yet provided.

However, by observing construction process complexity in the development of MRT Jakarta and also relation with all Stakeholders consisting of various government agencies, NGO and also the public, the Board of Directors decided to take proactive role in accordance with the risk management principle, namely prioritizing prevention as a means to ensure the success of project construction and management.



Isu manajemen risiko dalam Perusahaan ini memang masih menjadi suatu hal yang hilang timbul. Hal ini dianggap wajar karena Perusahaan tengah melakukan proses pertumbuhan bisnis dan masih berupaya menentukan arah tujuan jangka panjangnya serta budaya organisasi (*corporate culture*) dalam organisasi tersebut yang masih fleksibel.

Akhir tahun 2014, Perusahaan telah memutuskan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang berisi Visi, Misi, Tujuan Strategis Perusahaan, Bisnis Model dan Risiko-risiko Strategis Korporasi melalui mekanisme keputusan RUPS LB. Keputusan ini membawa konsekuensi logis bahwa pengelolaan manajemen risiko perlu dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan strategis Perusahaan.

TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUP PERUSAHAAN

Tujuan dari pengelolaan risiko di Perusahaan adalah:

1. Melindungi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perusahaan serta mendorong manajemen untuk bertindak proaktif terhadap pengelolaan risiko dan menjadikannya sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja Perusahaan.
2. Membangun kesadaran bertindak hati-hati dan kemampuan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang terintegrasi.
3. Meningkatkan kinerja Perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.

Risk management issue frequently arises and disappears in the Company. This is reasonable as the Company is currently undergoing business growth process and still determines the course of its long-term objectives as well as the flexible organizational culture.

At the end of 2014, the Company has set Long-Term Plan (RJP) that sets out its Vision, Mission, Company Strategic Purpose, Business Models and Corporate Strategic Risks through Extraordinary GMS resolution mechanism. This decision has brought logic consequence that risk management must be done professionally and earnestly to achieve the Company's strategic purpose.

RISK MANAGEMENT OBJECTIVES WITHIN THE COMPANY

The Company's risk management objectives are as follows:

1. *To protect the Company from significant risk which may interfere the Company's purpose achievement as well as to encourage the management to proactively act on risk management and make it as the Company's competitive edge and best performance;*
2. *To build awareness of prudence in act and ability to manage risk pursuant to each position and responsibility as part of integrated risk management;*
3. *To improve the Company's performance through information procurement of risk level contained in risk map suitable for the management in strategic development and risk management improvement in a continuous and sustainable manner.*



ROAD MAP MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen Risiko mulai diterapkan di Perusahaan pada tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 42 Tahun 2009 tentang Penetapan Satuan Tugas Manajemen Risiko Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Manajemen Risiko (Satgas MR) di Lingkungan PT MRT Jakarta. Pada tahun 2011, Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk Tim Ad-Hoc.

Namun, penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2011 tidak dilanjutkan karena struktur organisasi manajemen risiko masih bersifat sementara (dalam bentuk Satgas MR) dan belum adanya *Risk Governance*. Sehingga pada tahun 2014 Perusahaan mulai membentuk Divisi *Risk Management* melalui Surat Keputusan Direksi No. 29 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan PT MRT Jakarta dan penempatan karyawan di Divisi *Risk Management* melalui Surat Keputusan Direksi No. 73 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan penempatan kepala Divisi *Risk Management* melalui Surat Keputusan Direksi No. 81 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014. Seiring dengan dibentuknya Divisi *Risk Management*, disusunlah *Roadmap* Pengembangan Manajemen Risiko dalam rentang waktu 2015 sampai dengan 2018. *Roadmap* ini diperbaharui setiap tahun mengikuti perkembangan lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

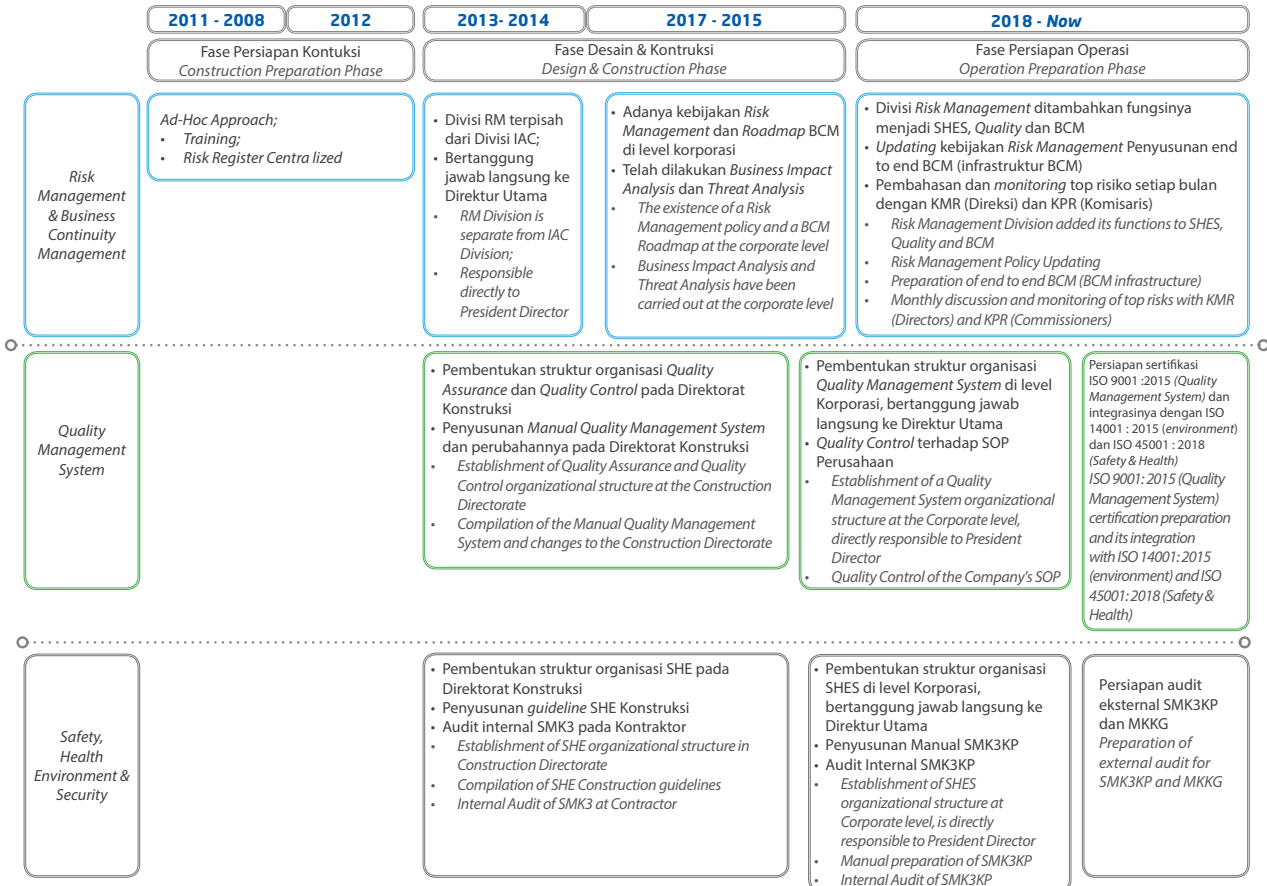
COMPANY RISK MANAGEMENT ROAD MAP

Risk Management has been applied in the Company since 2011 as stipulated in the Board of Directors Decree No. 42 of 2009 on Stipulation of Company's Risk Management Task Force and Board of Directors Decree No. 033 of 2011 concerning Risk Management Task Force Establishment (Satgas MR) within PT MRT Jakarta Environment. In 2011, the Company has applied risk management in the form of Ad-Hoc Team.

However, risk management implementation in 2011 was discontinued as the risk management organization structure is temporary (in the form of Satgas MR) and there is no Risk Governance. Thus in 2014, the Company established Risk Management Division through the Board of Directors Decree No. 029 of 2014 on March 20, 2014 concerning Organization Structure Changes in PT MRT Jakarta Environment and employee placement in Risk Management Division by virtue of the Board of Directors Decree No. 73 of 2014 on August 27, 2014 and placement of head of Risk Management Division by virtue of the Board of Directors Decree No. 081 of 2014 on December 01, 2014. Along with the establishment of Risk Management Division, Risk Management Development Road Map between 2015 until 2018 has been prepared. The Road Map is annually updated by following the Company's internal and external environment conditions.



Peta Jalan Pengembangan Manajemen Risiko MRT Jakarta Road Map of MRT Jakarta Risk Management Development





KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

CORPORATE RISK MANAGEMENT POLICY

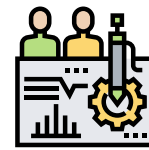
Komponen Sistem Manajemen Risiko MRT Jakarta MRT Jakarta Risk Management System Component



Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Risk Management Principles



Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy



Proses Manajemen Risiko Risk Management Process

Prinsip dan Kebijakan Manajemen Risiko merupakan aturan dasar bagi pengembangan kebijakan kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan manajemen risiko. Adapun Komitmen Manajemen Risiko MRT Jakarta terhadap manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilakukan dengan landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) berdasarkan pada tata nilai, sasaran dan strategi dengan prinsip manajemen risiko korporat yang bersifat melindungi, menciptakan nilai (*value*), transparan dan inklusif.
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.
3. Manajemen Risiko adalah alat strategi utama dalam penentuan perencanaan strategis Perusahaan, bukan hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata.
4. Manajemen Risiko dimulai dari integritas Direksi, dilakukan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan seluruh aspek risiko yang terdapat dalam Perusahaan, sehingga manajemen anti-*fraud* (anti kecurangan) menjadi hal yang wajib dilakukan, khusus untuk risiko yang berhubungan dengan integritas, Direksi tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*).
5. Manajemen Risiko menjamin seluruh laporan yang menyajikan pengukuran kinerja Perusahaan (*corporate performance*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*), sehingga terhindar dari potensi *fraud* (kecurangan).

Risk Management Policy and Principles are the basis of regulation for developing risk management working policy that is the pillars of risk management implementation. MRT Jakarta Risk Management Principles contents are as follows:

1. *Risk Management is implemented by referring to framework set out in the Company's the Company's Long Term Plan (RJPP) based on values, targets and strategies as well as corporate risk management principle that is protective, having added value, transparent, and inclusive.*
2. *Risk Management is an integral part of business process and decision-making conducted systematically, structured and timely based on best information available that has been adjusted to Company's internal and external condition.*
3. *Risk Management is the main strategy tool in determining the Company's strategic planning, not only to serve as a measurement tool of daily operational performance.*
4. *Risk Management is started from Board of Directors integrity, performed with effective and efficient principle with regard to all risk aspects in the Company, so that anti-fraud management has become an obligation, specifically for risk related to integrity, Board of Directors does not tolerate it (zero tolerance).*
5. *Risk Management ensures that the entire report presenting corporate performance is conducted with prudence to avoid the potency of fraud.*



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Manajemen Risiko mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja bagi Karyawan yang merupakan aset utama (<i>human capital</i>) yang dimiliki oleh Perusahaan. 7. Manajemen Risiko ditujukan untuk menjaga Perusahaan tidak berseberangan dengan hukum dan segala bentuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 8. Manajemen Risiko menjamin diterapkannya proses penghargaan (<i>reward</i>) dan konsekuensi (<i>punishment</i>) terhadap segenap Karyawan tanpa terkecuali. 9. Manajemen Risiko dikembangkan sebagai suatu sistem yang dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan perkembangan Perusahaan dan menjadi fasilitas untuk mendeteksi terjadinya perubahan serta proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. 10. Manajemen Risiko merupakan sistem yang mendukung perbaikan dan peningkatan Perusahaan secara berkelanjutan. 11. Manajemen Risiko harus menjadi bagian sistem budaya Perusahaan, sebagai landasan dalam mewujudkan cita cita menjadi Perusahaan terkemuka di Indonesia dan sasaran Perusahaan tercapai | <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Risk Management prioritizes occupational health and safety factor of Employees which is main asset (human capital) owned by the Company.</i> 7. <i>Risk Management is aimed to protect the Company from any acts that are against the laws and all forms of legislation and regulations in force.</i> 8. <i>Risk Management ensures the application of reward and punishment process for all employees without exception.</i> 9. <i>Risk Management is developed as a system that is dynamic, repetitive, and responsive to the Company's development and as a facility to detect any changes as well as adjustment process on the changes.</i> 10. <i>Risk Management is a system supporting the Company's improvement and development sustainably.</i> 11. <i>Risk Management must become part of Corporate culture, as a basis to become a reputable Company in Indonesia and to achieve the Company's goals.</i> |
|---|---|

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT MRT Jakarta didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang efektif menurut ISO 31000:2018, yaitu :

1. *Value Creation and Protection*
Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai yang dinyatakan dalam obyektif organisasi;
2. *Integrated*
Pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam organisasi;
3. *Structured and Comprehensive*
Pendekatan yang terstruktur dan komperhensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang sebanding dan konsisten;
4. *Customized*
Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan diatur secara berimbang sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi yang terkait dengan tujuannya;
5. *Inclusive*
Pertimbangan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk memperoleh pengetahuan, pandangan, dan persepsi dalam menentukan kriteria risiko. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan pengelolaan risiko yang diinformasikan;

The Risk Management Policy Guidelines of PT MRT Jakarta are based on the principle of effective risk management according to ISO 31000: 2018, namely:

1. *Value Creation and Protection*
Risk Management creates and protects values expressed in the organization's objectives;
2. *Integrated*
Risk Management is an integrated part with the entire process in the organization;
3. *Structured and Comprehensive*
A structured and comprehensive approach to risk management contributes to comparable and consistent results;
4. *Customized*
The risk management framework and process are adjusted and regulated in a balanced manner in accordance with the internal and external context of the organization related to its objectives;
5. *Inclusive*
Consideration of stakeholders involvement to obtain knowledge, views, and perceptions in determining risk criteria. This results in increased awareness and informed risk management;



MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

6. *Dynamic*

Risiko bisa muncul, berubah atau menghilang ketika konteks internal dan eksternal organisasi berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan atas kejadian tersebut dengan cara yang tepat dan tepat waktu;

7. *Best Available Information*

Pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai seperti data historis, pengalaman Perusahaan, umpan balik dari pemangku kepentingan, observasi, dan penilaian ahli sehingga para pengambil keputusan dapat meyakini bahwa keputusannya telah memperhitungkan semua informasi yang tersedia pada waktu keputusan tersebut dibuat;

8. *Human and Cultural Factors*

Pengelolaan risiko seharusnya memperhitungkan faktor manusia dan budaya karena mempengaruhi secara signifikan secara aspek manajemen risiko di setiap level dan tahap;

9. *Continual Improvement*

Manajemen Risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman.

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai wujud komitmen untuk penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan secara terintegrasi, dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Perusahaan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur.

Kebijakan Manajemen Risiko menggunakan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam melaksanakan proses manajemen risiko dan tertuang dalam Keputusan Direksi Perusahaan yang telah dibuat pada tahun 2015 dan terakhir telah diperbaharui di tahun 2018 yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. PER/033/BOD-MRT/XI/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan PT MRT Jakarta. Implementasi Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 merupakan tahun ke-3 yang mengintegrasikan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan risiko.

Kebijakan Umum Manajemen Risiko disusun berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Setiap Pemilik Proses di dalam lingkungan Perusahaan mempunyai kewajiban menerapkan manajemen risiko yang terkait dengan aktivitas usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan mendokumentasikan seluruh aktivitas manajemen risiko di unit kerjanya;

6. *Dynamic*

Risks can appear, change or disappear when the organization's internal and external context changes. Risk management anticipates, detects, recognizes, and responds to changes in the event in a timely and appropriate manner;

7. *Best Available Information*

Risk management requires the availability of adequate information such as historical data, Company experience, stakeholder feedback, observation, and expert judgment so that decision makers may believe that the decision has taken into account all the information available at the time the decision was made;

8. *Human and Cultural Factors*

Risk management should take into account human and cultural factors because it significantly influences aspects of risk management at each level and stage;

9. *Continual Improvement*

Risk Management continues to be improved through learning and experience.

The Board of Directors establishes a Risk Management Policy as a form of commitment to implement Risk Management in the Company in an integrated manner, in order to support the achievement of the Company's objectives, and provide a systematic and measurable framework for implementing risk management.

The Risk Management Policy uses ISO 31000: 2018 as a reference in implementing the risk management process and is contained in the Company's Board of Directors' Decree which was drafted in 2015 and was last updated in 2018 as stated in the Company's Directors' Decree No. PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018 concerning Risk Management Policy in PT MRT Jakarta. The Implementation of ISO 31000: 2018-based risk management is the 3rd year that integrates Human Capital in risk management.

Risk Management General Policy is prepared based on the following aspects.

1. *Every Process Owner in the Company has an obligation to apply risk management related to business activities under their responsibility and documenting all risk management activities in their work unit;*



-
- | | |
|---|--|
| <p>2. Pemimpin Pemilik Proses bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya sebagaimana mestinya;</p> <p>3. Manajemen Risiko diterapkan untuk seluruh aktivitas dan kepentingan Perusahaan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">» Aktivitas Konstruksi;» Aktivitas Operasi; dan» Aktivitas Pengembangan Usaha. <p>4. Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none">» Pengawasan aktif pemimpin tertinggi di tiap Pemilik Proses;» Adanya kebijakan, prosedur dan penetapan batasan (<i>limit</i>) risiko yang memadai;» Penetapan toleransi risiko yang sejalan dengan rencana strategis, pengelolaan, penganggaran risiko dan kemampuan manajemen Perusahaan dalam mengelola portofolio bisnis;» Adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif dan penyediaan data yang terintegrasi;» Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja dilakukan;» Sistem pengendalian internal yang menyeluruh;» Keseluruhan proses bisnis Perusahaan; dan» Peningkatan pengetahuan mengenai manajemen risiko khususnya pada tingkat Manajemen. | <p>2. <i>Process Owner Leader is responsible for risk management implementation at the work units as it should be;</i></p> <p>3. <i>Risk Management is applied in all Company's activities and interests, among others:</i></p> <ul style="list-style-type: none">» <i>Construction Activities;</i>» <i>Operating Activities; and</i>» <i>Business Development Activities.</i> <p>4. <i>Risk management application at least include:</i></p> <ul style="list-style-type: none">» <i>Active supervision by the highest leader of each process owner;</i>» <i>The existing of policies, procedures and an adequate risk limits determination;</i>» <i>Risk tolerance determination that is in line with the strategic plan, management, risk budgeting and the Company's capabilities in managing business portfolio;</i>» <i>The existing identification, measurement, monitoring, and controlling of risk as well as a comprehensive risk management information system and an integrated data supply;</i>» <i>Adequate conditions and procedures in evaluating and approving new business activity as well as changes in the system and work procedures;</i>» <i>A comprehensive internal control system;</i>» <i>The entire business process of the Company and</i>» <i>Improvement of knowledge on risk management, especially at the management level.</i> |
|---|--|

Sementara itu, Proses Manajemen Risiko sendiri merupakan penjabaran dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko untuk mempermudah integrasi penerapan pengelolaan risiko baik di tingkat korporasi, unit kerja maupun individu.

Meanwhile, the Risk Management Process itself is a description of Risk Management Framework to provide ease for the integration of good risk management implementation both in corporate level, work unit and individual.

Perusahaan menetapkan kerangka kerja manajemen risiko yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen risiko di seluruh tingkatan organisasi. Kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan membantu organisasi dalam mengelola risiko secara efektif dan akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses Manajemen Risiko dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

The Company implements risk management framework which is the basis of implementation of all risk management activities in all organization levels. The Company's Risk Management Framework facilitates the organization to effectively manage risk and to ensure that complete and adequate risk information obtained from risk management process may be used as the basis in making decisions.



STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan Manajemen Risiko harus diterapkan di semua unit kerja, di mana setiap karyawan memiliki peranan dalam mengelola dan memastikan penerapan manajemen risiko. Untuk mendukung hal tersebut dibuat suatu Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko di Perusahaan yang terdiri dari:

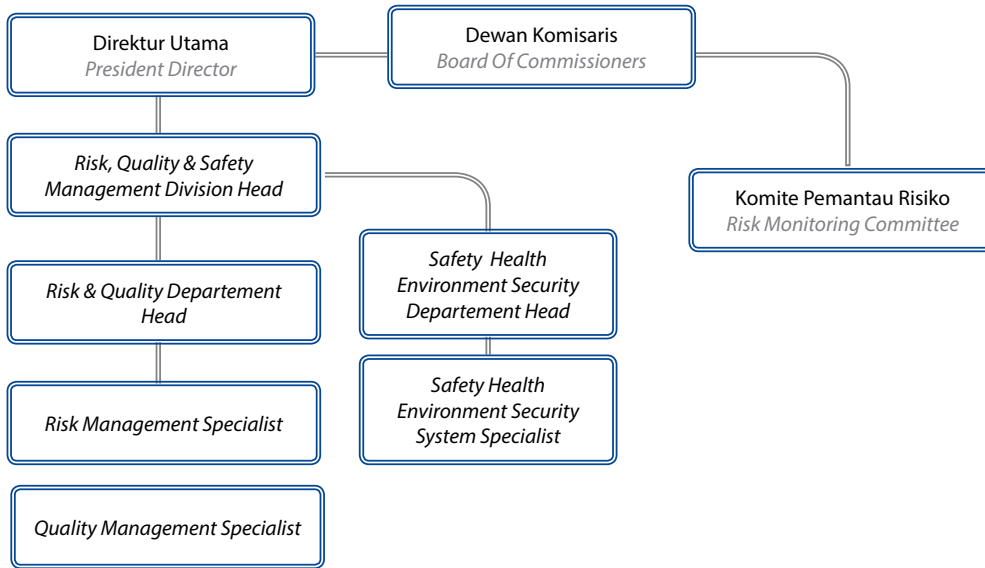
- Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris
- Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi
- Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* sebagai Penanggung Jawab implementasi Kebijakan Manajemen Risiko
- *Process Owner* atau Unit Pengelola Risiko yang ditetapkan di tingkat Divisi / Departemen
- *Risk Officers* yang terdapat di tiap unit kerja setingkat Divisi / Departemen
- Divisi *Internal Audit and Control* sebagai unit yang melakukan pengawasan dan *assurance* terhadap proses Manajemen Risiko

COMPANY'S RISK MANAGEMENT STRUCTURE

To ensure that each employee has a role and responsibility in managing and ensuring risk management to be truly applied in the Company's working environment, thus risk management must be applied in all work units. To support this objective, Risk Management Organization Structure in the Company is established which consists of:

- *Risk Monitoring Committee at the level of Board of Commissioners;*
- *Risk Management Committee at the level of Board of Directors;*
- *Risk Management Division as the Responsible party of Risk Management Policy implementation;*
- *Process Owner or Risk Management Unit, which is set at the Division / Department level;*
- *Risk Officers present in each work unit at Division / Department level;*
- *Internal Audit and Control Division as a unit that carries out the supervision and assurance of the Risk Management process.*

Struktur Organisasi Risk, Quality & Safety Management
Organizational Structure Risk, Quality & Safety Management



Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Finance & Administration dengan anggota Direktur Operation & Maintenance, Direktur Construction, Direktur Business Development & Support, Kepala Divisi Corporate Secretary, Kepala Divisi Risk Management, Kepala Divisi Internal Audit & Control, Kepala Divisi Project Management Office, Kepala Divisi Engineering, Kepala Divisi Railway Operation, Kepala Divisi Railway Maintenance, Kepala Divisi Business Development & Commercial, dan Kepala Divisi Corporate Strategy & Planning.

The Risk Management Committee is chaired by Finance & Administration Director with members of Operation & Maintenance Director, Construction Director, Business Development & Support Director, Head of Corporate Secretary Division, Head of Risk Management Division, Head of Internal Audit & Control Division, Head of Project Management Office Division, Head of Engineering Division, Head of Railway Operation Division, Head of Railway Maintenance Division, Head of Business Development & Commercial Division, and Head of Corporate Strategy & Planning Division.

Perusahaan memiliki Komite Pemantau Risiko yang terpisah dengan Komite Audit. Hal ini merupakan kebijakan yang telah diperhitungkan, mengingat Manajemen Risiko berperan bukan hanya mengelola potensi dampak negatif dalam pencapaian tujuan Perusahaan, namun juga mengeksplorasi potensi dan peluang-peluang positif untuk meningkatkan nilai Perusahaan dan pendekatan pengelolaan risiko tersebut mempunyai orientasi rentang waktu ke masa depan yang cukup jauh untuk dapat membangun kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menjaga nilai Perusahaan. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh salah satu Komisaris Perusahaan.

The company has a Risk Monitoring Committee that is separate from the Audit Committee. This is a calculated policy, considering that Risk Management plays a role not only in managing potential negative impacts in achieving the Company's objectives, but also exploring positive potentials and opportunities to increase Company value and that the risk management approach has sufficient time-to-future far orientation to be able to build organizational readiness and capacity in maintaining the value of the Company. The Risk Monitoring Committee is chaired by one of the Company's Commissioners.



PEMBENTUKAN DIVISI RISK, QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT

Sekilas uraian tugas dan fungsi Divisi *Risk, Quality, and Safety Management*

1. Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* harus independen terhadap *Process Owner*. Independen berarti adanya pemisahan fungsi antara Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* dengan *Process Owner* yang melakukan aktivitas atau transaksi usaha;
2. Kepala Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan mengawasi implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan penanganan risiko yang terkait proses/aktivitas bisnis Perusahaan serta memastikan tingkat risiko telah memenuhi tingkat yang diharapkan Perusahaan.
4. Wewenang dan tanggung jawab Divisi *Risk, Quality, and Safety Management*:
 - a. Menyusun kebijakan manajemen risiko Perusahaan untuk ditetapkan oleh Direksi Perusahaan;
 - b. Bersama Direktorat terkait menyusun kebijakan yang terkait dengan penanganan risiko Perusahaan dan memastikan implementasi kebijakan Perusahaan tersebut sudah secara efektif dilaksanakan;
 - c. Mengembangkan budaya pengelolaan risiko;
 - d. Menyusun laporan profil risiko Perusahaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko;
 - e. Memantau posisi risiko Perusahaan secara korporat, per jenis risiko dan risiko per aktivitas fungsional yang antara lain dapat dituangkan dalam bentuk pemetaan risiko;
 - f. Memberi masukan kepada Komite Manajemen Risiko mengenai besaran atau eksposur risiko maksimum untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - g. Melakukan pemantauan kecukupan aktivitas dan anggaran pengendalian risiko dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
 - h. Melakukan pengkajian terhadap usulan aktivitas/transaksi usaha tertentu apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko;

ESTABLISHMENT OF RISK, QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT DIVISION

Duties and function of Risk, Quality and Safety Management Division

1. *Risk, Quality and Safety Management Division must be independent to the Process Owner. Independent means there is a separation of functions between the Risk, Quality, and Safety Management Division with the Process Owner who conducts business activities or transactions;*
2. *Head of Risk, Quality, and Safety Management Division is responsible to the President Director.*
3. *Risk, Quality, and Safety Management Division has the main task of coordinating and supervising the implementation of the Company's Risk Management Policy and handling risks related to the Company's business processes / activities and ensuring the level of risk meets the expected level of the Company.*
4. *Authority and responsibility of the Risk, Quality and Safety Management Division:*
 - a. *Prepare the Company's risk management policy to be determined by the Company's Directors;*
 - b. *Together with the Directorate related in formulating policies related in handling the Company's risks and ensuring the implementation of the Company's policies has been effectively implemented;*
 - c. *Develop a risk management culture;*
 - d. *Compile reports on the Company's risk profile periodically and submit it to the Board of Directors and the Risk Management Committee;*
 - e. *Monitor the Company's risk position in a corporate manner, per type of risk and risk per functional activity which can be included in the form of risk mapping;*
 - f. *Provide input to the Risk Management Committee regarding the maximum risk exposure or amount to be included in the Company's Work Plan and Budget;*
 - g. *Monitor the adequacy of risk control activities and budgets in the Company's Work Plan and Budget as well as the Company's Long-Term Plan;*
 - h. *Review proposed business activities / specific transactions if deemed necessary by the President Director and the Risk Management Committee;*



- | | |
|---|--|
| <p>i. Melakukan dokumentasi yang memadai untuk keperluan pengendalian internal dan mengkomunikasikan seluruh proses Manajemen Risiko ke seluruh Pemilik Proses;</p> <p>j. Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari Kebijakan, Pedoman dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko;</p> <p>k. Memberikan informasi dan masukan kepada Internal Audit, apabila diperlukan terkait dengan aktivitas <i>risk based audit</i>.</p> | <p>i. <i>Conduct adequate documentation for the purposes of internal control and communicate the entire risk management process to all Process Owners;</i></p> <p>j. <i>Periodically review the adequacy and feasibility of the Policy, Risk Management Implementation Guidelines and Strategies and submit recommendations for changes to the Risk Management Committee;</i></p> <p>k. <i>Provide information and input to Internal Audit, if necessary related to risk based audit activities.</i></p> |
|---|--|

ERNIE WIDIANTY RAHARDJO
Kepala Divisi Risk, Quality and Safety Management
Menjabat 01 Desember 2014
Head of Risk, Quality and Safety Management Division
been serving since 01 Desember 2014

<p>Data Pribadi Warga negara Indonesia Usia 45 tahun Kelahiran Surabaya, 16 April 1973</p> <p>Domisili DKI Jakarta, Indonesia</p> <p>Pendidikan S2 Business Administration Nanyang Technological University 2009</p> <p>Bergabung di MRT Jakarta 1 Januari 2010</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staf Deputy Gubernur Tata Ruang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2009-2010) • Asisten Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta (2004-2008) • Manajer <i>Quality & IT Management</i>, RSUD Cengkareng (2003-2004) • Dokter, PTT Puskesmas Kecamatan Palmerah (2001-2003) 	<p>Personal Data Indonesian 45 years old was born in Surabaya, April 16, 1973</p> <p>Domicile DKI Jakarta, Indonesia</p> <p>Education Master of Business Administration from Nanyang Technological University 2009</p> <p>Join MRT Jakarta January 1, 2010</p> <p>History of Employment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deputy Governor's Staff for Government Spatial Planning DKI Jakarta Province (2009-2010) • Assistant Head of Bapeda DKI Jakarta Province (2004-2008) • Quality & IT Management Manager, RSUD Cengkareng (2003-2004) • Doctor, PTT Palmerah District Health Center (2001-2003)
--	---

Hingga akhir tahun 2018, Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* memiliki 10 karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Until the end of 2018, the Risk, Quality and Safety Management Division has 10 employees with details of the placement and implementation of the following duties:



MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Jabatan/Fungsi Position/Function	Jumlah Karyawan Number of Employees
Kepala Divisi Risk, Quality, and Safety Management Head of Risk, Quality and Safety Management Division	1
Kepala Departemen Risk and Quality Management Head of Risk and Quality Management Department	1
Kepala Departemen Safety, Health, Environment, and Security Head of Safety, Health, Environment, and Security Department	1
Risk Management Specialist	3
Quality Management Specialist	1
Safety Health Environment Security System Development Security System Development	3
Total	10

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan pengelolaan manajemen risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Risk, Quality, and Safety Management hingga akhir tahun 2018.

Professional certification is an important aspect for auditors to understand the development of risk management, particularly related to compliance with regulations and industrial development. The following is conveyed the professional certification held by employees of the Risk, Quality and Safety Management Division until the end of 2018.

Sertifikasi Certification	Divisi Risk, Quality, and Safety Management Risk, Quality and Safety Management Division	Karyawan lain Other Employees
ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional)	5	25
ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional)		1
CRMP (Certified Risk Management Professional)	1	
Bimbingan Teknis Manajemen Risiko ISO 31000:2018 oleh DJKA dan Kemenaker Risk Management Technical Guidance ISO 31000: 2018 by DJKA and Ministry of Manpower	2	
BCMCP (Business Continuity Mangement Certified Professional)	1	

Realisasi program kerja Divisi Risk, Quality, and Safety Management tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko
Dengan adanya pembaharuan Standar Manajemen Risiko dari ISO 31000:2009 ke SNI ISO 31000:2011 kemudian update terkini yaitu ISO 31000:2018, maka dilakukanlah pembaharuan juga untuk Kebijakan Manajemen Risiko PT MRT Jakarta.

Realization of work program of Risk, Quality and Safety Management Division in 2018 are:

1. Update on Risk Management Policies
With the renewal of the Risk Management Standards from ISO 31000: 2009 to SNI ISO 31000: 2011, then the latest update is ISO 31000: 2018, then a renewal is also carried out for the Risk Management Policy of PT MRT Jakarta.



2. *Penyusunan Business Continuity Management (BCM) PT MRT Jakarta secara end-to-end*
Latar belakang disusunnya BCM di PT MRT Jakarta adalah kesadaran PT MRT Jakarta selaku penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian umum perkotaan terhadap risiko atau kemungkinan kondisi abnormal yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, sabotase, serangan teroris, kegagalan pasokan listrik, pemogokan karyawan, yang dapat menyebabkan "sudden and massive lost". BCM diperlukan untuk mengelola dan memastikan proses bisnis tetap berjalan setelah kondisi abnormal terjadi.
3. *Peningkatan budaya Risiko dan Safety Awareness di PT MRT Jakarta*
Dalam meningkatkan budaya risiko di PT MRT Jakarta, Divisi Risk, Quality, and Safety Management mengadakan beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Pelaksanaan Diskusi Panel dengan tema Peran Enterprise Risk Management dalam Implementasi Safety dan Security
 - b. Pelaksanaan Risk Management Competition dengan tema integrasi manajemen risiko dengan SMK3 melalui tata cara Identifikasi Bahaya dan Pengenalan Risiko (IBPR)
 - c. Pembuatan video kampanye terkait Risk and Quality
 - d. Safety talk berkala
4. *Pengukuran Risk Maturity di PT MRT Jakarta*
Pengukuran Risk Maturity pada tahun 2018 dilakukan oleh Divisi Internal Audit and Control untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di PT MRT Jakarta.
5. *Pelaksanaan SHES Award Tahun 2018*
SHES Award diadakan untuk memberikan apresiasi kepada Kontraktor dan Subkontraktor, termasuk para pekerjanya, yang telah melaksanakan tugasnya dengan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kegiatan ini dilakukan juga penandatanganan Komitmen SHES oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta bersama dengan perwakilan dari masing-masing Kontraktor.
6. *Pengembangan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)*
7. *Penandatanganan kerjasama antara PT MRT Jakarta dan Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT) Polda Metro Jaya*
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama di bidang keamanan telah ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya dan berlaku mulai 1 November 2018
8. *Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal untuk SHE*
2. *Preparation of PT MRT Jakarta's Business Continuity Management (BCM) in an end-to-end manner*
The background of the compilation of BCM at PT MRT Jakarta is the awareness of PT MRT Jakarta as the organizer of urban public railway infrastructure and facilities against the risks or possible uncontrolled abnormal conditions such as natural disasters, sabotage, terrorist attacks, power supply failures, employee strikes, which can cause "Sudden and massive lost". BCM is needed to manage and ensure business processes continue to run after abnormal conditions occur.
3. *Increased Risk culture and Safety Awareness at PT MRT Jakarta*
In increasing the risk culture at PT MRT Jakarta, the Risk, Quality, and Safety Management Division held several activities including:
 - a. The implementation of Panel Discussion with the theme of the Role of Enterprise Risk Management in the Implementation of Safety and Security
 - b. Implementation of Risk Management Competition with the theme of integration of risk management with SMK3 through the procedures for Hazard Identification and Risk Recognition (IBPR)
 - c. Create campaign videos related to Risk and Quality
 - d. Periodic safety talk
4. *Measurement of Risk Maturity at PT MRT Jakarta*
The measurement of risk maturity in 2018 is carried out by the Internal Audit and Control Division to evaluate the application of risk management at PT MRT Jakarta.
5. *Implementation of the 2018 SHES Award*
The SHES Award is held to give appreciation to Contractors and Subcontractors, including their workers, who have carried out their duties by applying the principles of Occupational Safety and Health (K3). In this activity, the signing of the SHES Commitment was also carried out by the President Director of PT MRT Jakarta together with representatives from each Contractor.
6. *Development of Occupational Health and Safety Management System (SMK3), Railway Safety Management System (SMKP), and Security Management System (SMP)*
7. *Signing of cooperation between PT MRT Jakarta and Vital Object Safeguards (PAM OBVIT) Polda Metro Jaya*
The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) regarding cooperation in the security sector was signed by the Metro Jaya Regional Police Chief and took effect from November 1, 2018
8. *Implementation of Internal and External Audit for SHE*

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Skema Alur Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan

Enterprise-wide Risk Management berbasis ISO 31000:2018 pada PT MRT Jakarta didefinisikan menjadi: Suatu pendekatan yang terintegrasi, terstruktur dan sistematis yang didukung oleh seluruh aspek sumber daya Perusahaan, guna mencapai peningkatan nilai (*value*) bagi pemegang saham, dengan melakukan implementasi prinsip, kerangka kerja dan proses atas pengelolaan seluruh aspek ketidakpastian risiko Perusahaan dalam konteks internal dan eksternal Perusahaan, yang menghasilkan informasi objektif untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menciptakan budaya Manajemen Risiko yang proaktif, konsisten dan relevan mengikuti perkembangan.

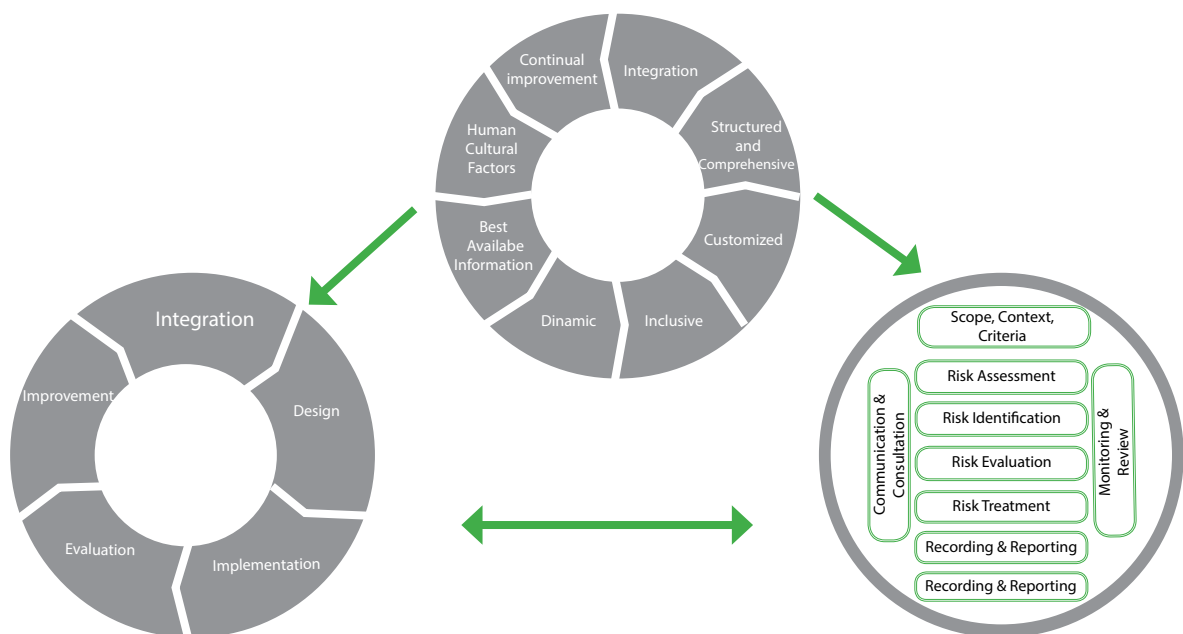
Scheme of Corporate Risk Management Implementation

ISO 31000: 2018 Enterprise-wide Risk Management at PT MRT Jakarta is defined as: An integrated, structured and systematic approach that is supported by all aspects of the Company's resources, in order to achieve an increase in value for shareholders, by implementing the principle, the framework and process for managing all aspects of the Company's risk uncertainty in the Company's internal and external context, which produces objective information to form the basis of decision making so as to create a culture of risk management that is proactive, consistent and relevant to developments.

Sehubungan dengan komitmen Perusahaan dalam menerapkan *Enterprise Risk Management* ISO 31000:2018 sebagai berikut:

In connection with the Company's commitment to implementing the ISO 31000:2018 as follows:

Skema Alur Pelaksanaan Manajemen Risiko MRT Jakarta *MRT Jakarta Risk Management Flowchart Scheme*





Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan telah menyusun beberapa prosedur antara lain:

1. Prosedur Penentuan Konteks Risiko Korporat (PER/033/BOD-MRT/XI/2018)
2. Prosedur Risk Assessment (PER/033/BOD-MRT/XI/2018)
3. Prosedur Pelaporan Periodik Risiko (PER/033/BOD-MRT/XI/2018)
4. Prosedur Penentuan Risiko Kritis Perusahaan (PER/033/BOD-MRT/XI/2018)
5. Prosedur Kajian Risiko Insidental (PER/033/BOD-MRT/XI/2018)

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Evaluasi terhadap penerapan sistem Manajemen Risiko Perusahaan pada tahun 2018 dilakukan oleh pihak internal, dalam hal ini oleh Divisi *Internal Audit and Control*, pada tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018. Tujuan evaluasi penerapan Manajemen Risiko adalah untuk:

1. Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholders bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Mengetahui tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko (*risk management maturity level*).
3. Mengidentifikasi penerapan manajemen risiko yang memerlukan peningkatan atau *areas of improvement* berikut rekomendasi perbaikan.

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko pada PT MRT Jakarta meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang terbagi dalam sembilan komponen, yaitu:

1. *Risk Strategy*
2. *Risk Appetite*
3. *Risk Profile*
4. *Governance Structure*
5. *Risk Policies*
6. *Risk Monitoring and Reporting*
7. *Risk Modelling and Analysis*
8. *Risk Culture*
9. *Risk Technology*

Hasil akhir evaluasi adalah skor/nilai capaian yang akan menunjukkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko (*risk management maturity level*) di PT MRT Jakarta yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

To support the implementation of risk management, the Company has compiled several procedures including:

1. Procedure for Determining Corporate Risk Contexts (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
2. Procedure for Risk Assessment (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
3. Periodic Risk Reporting Procedure (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
4. Procedure for Determining Critical Risk of the Company (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
5. Incidental Risk Assessment Procedure (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)

Evaluation of Corporate Risk Management System Effectiveness

The evaluation of corporate risk management system implementation in 2018 is carried out by internal parties, in this case by the Internal Audit and Control Division, on November 21, 2018 until December 11, 2018. The purpose of evaluating the risk management implementation is to:

1. Assess the adequacy of the design and effectiveness of the risk management process implementation as one of the management tools in providing confidence to stakeholders that the company's goals and objectives are achieved as expected.
2. Knowing the risk management maturity level
3. Identify the application of risk management that requires areas of improvement along with recommendations for improvement.

The scope of implementation of the risk management implementation evaluation at PT MRT Jakarta covers all aspects that support the implementation of risk management divided into nine components, namely:

1. *Risk Strategy*
2. *Risk Appetite*
3. *Risk Profile*
4. *Governance Structure*
5. *Risk Policies*
6. *Risk Monitoring and Reporting*
7. *Risk Modeling and Analysis*
8. *Risk Culture*
9. *Risk Technology*

The final result of evaluation is a score / achievement value that will show the risk management maturity level in PT MRT Jakarta which are classified into 5 categories as follows:



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Tingkat Kematangan Level of Maturity	Nilai Capaian Score of Achievement	Ciri Kapabilitas Characteristic of Capability
Initial	1	Tergantung pada inisiatif personel kunci, kapabilitas kelembagaan <i>Depending on key personnel initiatives, institutional capabilities</i>
Repeatable	2	Proses sudah dibangun dan berulang, tergantung pada kontinuitas SDM <i>The process has been built and repeated, depending on the continuity of HC</i>
Defined	3	Kebijakan, proses, dan standar telah terdefiniskan dan terlembaga <i>Policies, processes and standards have been defined and institutionalized</i>
Managed	4	Risiko terukur, terkelola, dan berlaku di seluruh perusahaan <i>Measured, managed and applicable risks throughout the company</i>
Optimised	5	Manajemen risiko menjadi suatu keunggulan kompetitif <i>Risk management becomes a competitive advantage</i>

Berdasarkan hasil evaluasi melalui metode Reviu dokumen, Kuesioner, Wawancara, Observasi, dan Analisis, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Based on results of the evaluation through the document review method, questionnaire, interview, observation and analysis, the following results are obtained:

No	Komponen/ Atribut Penerapan MR Application Components / Attributes of MR	Nilai Kuesioner Questionnaire Score	Hasil Observasi & Reviu Dokumen Observation & Review Results	Tingkat Kematangan (Maturity) Level of Maturity	
		Bobot Value 40%	Bobot Value 60%	Nilai Akhir Final Score	Keterangan Remarks
1	Risk Strategy	3.59	2.97	3.20	Defined
2	Risk Appetite	3.43	2.83	3.08	Defined
3	Risk Profile	3.75	2.83	3.20	Defined
4	Governance Structure	3.72	3.08	3.33	Defined
5	Risk Policies	3.74	3.33	3.49	Defined
6	Risk Monitoring & Reporting	3.56	2.25	2.77	Repeatable
7	Risk Modelling & Analysis	3.35	1.96	2.52	Repeatable
8	Risk Culture	3.32	2.23	2.66	Repeatable
9	Risk Technology	3.07	1.67	2.22	Repeatable
Total Nilai Maturity		3.46	2.51	2.89	Repeatable



Jenis-jenis Risiko Perusahaan Tahun 2018 dan Pengelolaannya

Sejalan dengan komitmen Direksi Perusahaan untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko secara efektif di setiap jenjang organisasi, Perusahaan harus memperhatikan prioritas kegiatan untuk keberhasilan pencapaian tujuan Perusahaan berdasarkan *Risk Tolerance/Risk Appetite* yang telah ditetapkan Perusahaan.

Dalam penerapan Manajemen Risiko di PT MRT Jakarta, Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* menyusun kebijakan yang sudah ditandatangani direksi, di mana salah satu isinya adalah *risk rating matrix* yang dapat menunjukkan peringkat risiko dan *risk appetite* PT MRT Jakarta.

Types of Company Risks in 2018 and their Management

In line with the commitment of the Company's Directors to implement risk management effectively at every level of the organization, the Company must pay attention to the priority of activities to successfully achieve the Company's objectives based on the Risk Tolerance / Risk Appetite set by the Company.

In implementing risk management at PT MRT Jakarta, the Risk, Quality, and Safety Management Division prepares a policy that has been signed by the Board of Directors, where one of the contents is the risk rating matrix that can show the risk rating and risk appetite of PT MRT Jakarta.

Likelihood	Consequences			
	Minor	Moderate	Significant	Severe
Almost certain	H	H	E	E
Likely	M	H	E	E
Unlikely	L	M	H	E
Rare	L	L	M	H

Catatan:

E=Extreme; H=High; M=Medium; L=Low

Garis Hitam (cetak tebal) merupakan risk attitude/risk appetite;

Wilayah dibawah garis hitam (cetak tebal) merupakan batas toleransi (risk tolerance);

Notes:

E=Extreme; H=High; M=Medium; L=Low

Black Line (bold) is the risk attitude / risk appetite;

Area under the black line (bold) is the tolerance level (risk tolerance);

Pada tahun 2018 ini, jumlah *risk register* yang terkumpul dari seluruh unit kerja sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) risiko. Dari risiko – risiko tersebut, ada 25 risiko yang berdasarkan penilaian, berada di atas *risk tolerance* yang sudah ditetapkan.

In 2018, the total risk register collected from all work units was 307 (three hundred and seven) risks. Of these risks, there are 25 risks based on assessment, which are above the risk tolerance that have been set.



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Tindakan Mitigasi yang dilakukan <i>Mitigation Actions taken</i>
1	<p>Terhambatnya penandatanganan kontrak CP-200 yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ditandatanganinya penetapan lokasi; • Belum tersedianya anggaran, karena belum dimasukkannya kegiatan CP200 dalam APBD 2019; • Gagalnya proses pengadaan sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan mulainya konstruksi fase 2. <p><i>Delay in signing of the CP-200 contract is caused by:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Not yet signed the location determination;</i> • <i>Unavailability of budget, because CP200 activities have not been included in the 2019 Regional Budget;</i> • <i>Failure of the procurement process so that it can cause a delay in the start of phase 2 construction.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau Penetapan Lokasi (Penlok) RSS yang harus melalui RAPIM Gubernur. Penlok telah diterbitkan melalui kepgub 1728 tahun 2018 di tanggal 21 November 2018 untuk koridor Bund. HI sampai Kota (termasuk RSS Monas) 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait pembangunan RSS di area Monas. Izin dari Mensesneg masih dalam proses. Saat ini sedang koordinasi dengan Paspampres terkait pengamanan kegiatan kenegaraan di Monas. Kemensetneg sedang memohon kajian pengamanan kepada instansi terkait. 3. Monitoring perkembangan <i>Loan Agreement</i> di Kemenkeu dan JICA. <i>Loan Agreement</i> sudah ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2018. 4. Pembuatan maket dan animasi 3D untuk menunjukkan ukuran lokasi yang diperlukan untuk RSS, CT, VT, dan Entrance dibandingkan dengan luasan Kawasan Monas, akan menjadi <i>scope</i> kontraktor CP 200 yang terpilih 5. Perlu dibentuk Tim kerja khusus untuk pembebasan lahan dan <i>government relation</i>. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitor the Determination of RSS Locations (Penlok) that must go through the Governor's RAPIM. Penlok has been issued through Kepgub 1728 in 2018 on November 21, 2018 for Bund. HI corridor to the City (including RSS Monas)</i> 2. <i>Coordinate with the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) regarding the development of RSS in Monas area. The permit from the Minister of State Secretariat is still in process. Currently coordinating with Paspampres related to securing state activities at Monas. The Ministry of State Secretariat is requesting security studies to the relevant agencies.</i> 3. <i>Monitor the development of Loan Agreements at the Ministry of Finance and JICA. The Loan Agreement was signed on October 24, 2018.</i> 4. <i>Create 3D mockups and animations to show the size of locations needed for RSS, CT, VT, and Entrance compared to the area of National Monument, will be the scope of selected CP 200 contractors</i> 5. <i>A special work team for land acquisition and government relations is needed.</i>



No.	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Tindakan Mitigasi yang dilakukan <i>Mitigation Actions taken</i>
2	<p>Kekurangan penerimaan subsidi pada fase operasional karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan aset prasarana yang diatur pada Pergub 53/2017 bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.17/2018; • Belum ada referensi peraturan untuk formulasi perhitungan subsidi perkeretaapian perkotaan yang bisa mengakomodir model bisnis MRTJ karena nilainya hanya mencakup untuk OM cost dan join cost, tidak memperhitungkan seluruh/ sebagian nilai penyusutan aset.; sehingga berdampak kepada net income Perusahaan negatif. <p>Subsidy shortage in operational phase because:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastructure asset ownership regulated in Pergub 53/2017 is contrary to the Minister of Transportation Regulation No.17 / 2018; • There is no regulatory reference for the formulation of calculation of urban railways subsidies that can accommodate the MRTJ business model because its value only covers the OM cost and join cost, does not take into account all / part of the asset depreciation value; thus impacting the company's negative net income. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsinyeering bersama DTKJ untuk membahas detail hasil perhitungan terakhir yang telah disampaikan ke Dishub dan surat rekomendasi tarif kepada Gubernur telah diterbitkan pada bulan Desember 2018 2. MRTJ akan menyampaikan surat perihal penetapan skema subsidi kepada Gubernur dan surat kepada DJKA perihal penetapan tarif keekonomian; 3. Skema kepemilikan aset akan dimasukkan ke dalam RJPP setelah ditetapkan Tim Tarif DKI Jakarta 4. Menindaklanjuti surat kepada Menteri Perhubungan mengenai PM baru, khusus untuk penyelenggaraan operasional MRT Jakarta. 5. Mengusulkan agar disusun Pergub transisi untuk mengakomodir penetapan besaran tariff dan subsidi sebelum aset prasarana diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. MRT Jakarta akan mengajukan Rapergub subsidi kepada Pemprov DKI Jakarta. Draft Pergub transisi <p><i>1. Conducting consignment with the DTKJ to discuss the details of the latest calculations results submitted to the Ministry of Transportation and a letter of recommendation to the Governor issued in December 2018</i></p> <p><i>2. The MRTJ will submit a letter regarding the establishment of a subsidi scheme to the Governor and a letter to the DGCA regarding the determination of economic tariffs;</i></p> <p><i>3. The asset ownership scheme will be included in the RJPP after the Jakarta Tariff Team has been determined</i></p> <p><i>4. Following up on a letter to the Minister of Transportation regarding the new PM, specifically for the operation of MRT Jakarta.</i></p> <p><i>5. Suggests that the Pergub transition be prepared to accommodate the determination of the amount of tariffs and subsidies before the infrastructure assets are submitted to the DKI Jakarta Provincial Government. The Jakarta MRT will submit a Rapergub subsidy to the DKI Jakarta Provincial Government. Pergub transition draft.</i></p>
3	<p>Keterlambatan memperoleh sertifikat uji kelayakan prasarana untuk Stasiun Haji Nawi, Blok A, dan Sisingamangaraja karena terhambatnya penyelesaian pembangunan akses masuk stasiun layang di area tersebut.</p> <p>Hal ini disebabkan karena masih adanya lahan yang belum dibongkar, adanya sengketa / tuntutan dengan pemilik lahan sehingga berdampak kepada keterlambatan diperolehnya izin operasi penyelenggaraan prasarana untuk stasiun Haji Nawi, Blok A, dan Sisingamangaraja.</p> <p><i>Delays in obtaining infrastructure feasibility test certificates for Haji Nawi, Blok A, and Sisingamangaraja Stations due to delays in completing construction of elevated station entrance access in the area.</i></p> <p><i>This is due to the fact that there is still land that has not yet been demolished, there are disputes / demands with the land owners that have resulted in delays in obtaining infrastructure operating licenses for Haji Nawi, Blok A and Sisingamangaraja stations.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Binamarga untuk negosiasi/pendekatan dengan pemilik lahan. 2. Melakukan percepatan pembangunan setelah diperoleh kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. <ul style="list-style-type: none"> » Pekerjaan konstruksi entrance pada stasiun Haji Nawi (bagian sisi timur - selatan) sudah dimulai dan perkiraan selesai pada awal Maret 2019, termasuk pemasangan eskalator. » Pekerjaan konstruksi entrance pada stasiun Sisingamaraja (bagian sisi timur) sudah dimulai dan perkiraan selesai pada akhir Maret 2019, termasuk pemasangan eskalator & elevator. Sedangkan, untuk sisi barat akan dilakukan interkoneksi busway. Untuk sementara di Maret 2019, akan dibangun tangga untuk entrance sementara. » Pekerjaan konstruksi untuk stasiun Blok A (bagian sisi timur-selatan) sudah dimulai. Sesuai jadwal awal, jika lahan selesai bulan Oktober 2018, maka konstruksi selesai di bulan mid Maret 2019. <p><i>1. Coordination with Binamarga for negotiations / approaches with land owners.</i></p> <p><i>2. To accelerate development after obtaining an agreement with the relevant parties.</i></p> <p><i>» Construction of the entrance work at the Haji Nawi station (east-south side) has begun and estimates are completed at the beginning of March 2019, including the installation of escalators.</i></p> <p><i>» Construction of the entrance work at Sisingamaraja station (eastern side) has begun and estimates are completed by the end of March 2019, including the installation of escalators & elevators. Meanwhile, for the west side busway interconnection will be carried out. In the meantime in March 2019, stairs will be built for temporary entrance.</i></p> <p><i>» Construction work for the Blok A station (east-south side) has begun. As per the initial schedule, if the land is completed in October 2018, the construction will be completed in mid of March 2019.</i></p>



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Tindakan Mitigasi yang dilakukan <i>Mitigation Actions taken</i>
4	<p>Keterlambatan memperoleh Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari PTSP karena belum diperolehnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (RKK) sehingga berdampak kepada keterlambatan perolehan izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.</p> <p><i>Delay in obtaining a Certificate of Building Proper Function (SLF) from PTSP is because it has not yet obtained a Building Construction Permit (IMB), Building Fire Safety Management (MKKG) and Fire Safety Recommendation (RKK), which has resulted in delays in obtaining operating licenses for the operation of railway infrastructure.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada seluruh kontraktor agar submit GPA ke Divisi Engineering MRTJ untuk dilakukan reviu. GPA sudah disubmit oleh semua Kontraktor dan saat ini sedang dalam review Divisi Engineering. Hasil dari reviu akan di-submit ke PTSP yang selanjutnya akan dilakuakn <i>survey</i>. 2. Melakukan koordinasi dengan PTSP Jika dokumen persyaratan belum terpenuhi pada jangka waktu yang telah ditentukan, kemungkinan akan terbit IMB dan SLF berjangka dengan catatan. 3. PT MRTJ bersurat ke PTSP untuk menjelaskan kondisi dan kendala yang dihadapi. Apabila dokumen persyaratan belum terpenuhi pada jangka waktu yang telah ditentukan, kemungkinan akan terbit IMB dan SLF berjangka dengan catatan. 4. Sedang dilakukan pemenuhan persyaratan MKKG yaitu: <ul style="list-style-type: none"> » Prosedur MKKG; » Pelatihan Sertifikasi <i>Fire Safety</i>; » Peralatan proteksi kebakaran; dan » Emergency exercise <p><i>1. Request all contractors to submit GPA to the MRTJ Engineering Division for review. GPA has been submitted by all Contractors and is currently in the review of the Engineering Division. The results of the review will be submitted to PTSP, which will then be carried out by the survey.</i></p> <p><i>2. Coordinate with PTSP If the requirements document has not been fulfilled at a predetermined period of time, it is likely that IMB and SLF will be termly issued with notes.</i></p> <p><i>3. PT MRTJ corresponds to PTSP to explain the conditions and constraints faced. If the requirements document has not been fulfilled at a predetermined time period, it is likely that IMB and SLF will be termly issued with notes.</i></p> <p><i>4. The fulfillment of MKKG requirements is being carried out, namely:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » <i>MKKG procedure;</i> » <i>Fire Safety Certification Training;</i> » <i>Fire protection equipment; and</i> » <i>Emergency exercise</i>
5	<p>Potensi <i>dispute</i> dengan kontraktor CP 107 karena ketidaksepakatan jumlah pembayaran listrik yang akan ditanggung.</p> <p>Hal ini disebabkan pemakaian listrik pada <i>testing & commissioning</i> tidak mencapai jumlah yang disepakati antara MRTJ dan PLN yaitu sebesar RM 50 sampai dengan Desember 2018.</p> <p><i>Potential disputes with CP 107 contractors due to disagreement over the amount of electricity payments to be borne.</i></p> <p><i>This is because electricity usage in testing & commissioning does not reach the agreed amount between MRTJ and PLN, which amounts to RM 50 up to December 2018.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan 3 skenario pilihan yang dapat diambil oleh Manajemen MRT untuk dinegosiasikan dengan pihak Kontraktor. Untuk menghindari potensi <i>dispute</i> dengan Kontraktor, maka diambil keputusan bahwa Kontraktor akan membayar tagihan listrik sesuai yang digunakan saja. 2. Membagi-bagi beban listrik yang sudah dibayarkan sebelumnya oleh MRTJ kepada masing-masing kontraktor sesuai pemakaian <p><i>1. Prepare 3 selected scenarios that MRT Management may take to negotiate with the Contractor. To avoid the potential dispute with the Contractor, a decision is made that the Contractor will pay the electricity bill as per usage.</i></p> <p><i>2. Divide the electricity load that has been previously paid by MRTJ to each contractor as per usage.</i></p>



No.	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Tindakan Mitigasi yang dilakukan <i>Mitigation Actions taken</i>
6	<p>Penambahan nilai <i>financial charges</i> karena keterlambatan pembayaran kepada kontraktor/konsultan.</p> <p>Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya mekanisme pembayaran dan sumber dana untuk <i>financial charges</i> sehingga berdampak kepada penambahan biaya konstruksi <i>Added value of financial charges due to late payments to contractors / consultants.</i></p> <p><i>This is due to the lack of payment mechanism and source of funds for financial charges that have resulted in additional construction costs</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan <i>awareness</i> pihak yang terlibat dalam proses pembayaran dengan menginformasikan secara tertulis potensi timbulnya <i>financial charges</i> pada tiap pengajuan pembayaran bila terjadi keterlambatan 2. Memastikan ketersediaan dana di tahun 2019 pada DIPA dan PHD yang terkait. 3. Berdiskusi dan meminta arahan kepada Kemenkeu dan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan kesepakatan dan arahan dari DJPPR Kemenkeu dan BPKD Pemprov DKI Jakarta, pembayaran <i>financial charges</i> berupa <i>claim</i> dapat menggunakan <i>Loan JICA IP-578</i> dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Financing Charges</i> disebutkan dalam kontrak (GCC); b. Proses pengajuan harus melalui <i>review</i> paralel oleh Konsultan (<i>Engineer</i>) dan IAC refer kepada PM Manual <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Increase awareness of parties involved in the payment process by informing in writing of the potential for financial charges to arise on each payment proposal if there is a delay</i> 2. <i>Ensure the availability of funds in 2019 in the relevant DIPA and PHD.</i> 3. <i>Discuss and ask for direction from the Ministry of Finance and the DKI Jakarta Provincial Government. Based on the agreement and direction from the Ministry of Finance's DJPPR and DKI Jakarta Provincial BPKD, financial charges in the form of claims may use the JICA Loan IP-578 with the following provisions:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Financial Charges are mentioned in the contract (GCC);</i> b. <i>The submission process must be through a parallel review by the Consultant (Engineer) and IAC refer to the PM Manual</i>
7	<p>Kegagalan mendapatkan izin sebagai penerbit uang elektronik dari Bank Indonesia (Ref: PBI No. 20/2018) karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> » belum lengkapnya dokumen yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (administratif); » terdapat temuan dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia; <p>sehingga pada saat awal operasional, Perusahaan kehilangan peluang dalam meningkatkan pendapatan karena hanya dapat menerbitkan kartu <i>single journey trip</i>.</p> <p><i>Failure to obtain permission as e-money issuer from Bank Indonesia (Ref: PBI No. 20/2018) because:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » <i>incomplete documents required by Bank Indonesia (administrative);</i> » <i>there are findings from the results of Bank Indonesia audit; therefore at the start of operations, the Company lost the opportunity to increase revenue because it could only issue a single journey trip card.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan pengadaan IT Audit untuk memeriksa kesiapan persyaratan perizinan uang elektronik. Pada 14 November 2018 telah disampaikan temuan audit tahap 1 oleh Auditor IT. 2. Divisi <i>Railway Operation</i>, Divisi <i>Railway Maintenance</i>, Divisi <i>Information System and Technology</i>, Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i>, Divisi <i>Risk, Quality, and Safety Management</i>, Divisi <i>Project Management for Railway System</i>, dan Departemen <i>Legal</i> mempersiapkan dokumen untuk remediasi temuan tersebut. 3. Melakukan pertemuan dan pembahasan terkait hal ini antara pihak manajemen PT MRT Jakarta dan manajemen Bank Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>An IT Audit is held to check the readiness of the requirements for e-money licensing. On November 14, 2018, the audit findings of Phase 1 were submitted by the IT Auditor.</i> 2. <i>Railway Operation Division, Railway Maintenance Division, Information System and Technology Division, Corporate Strategy and Planning Division, Risk, Quality, and Safety Management Division, Project Management for Railway System Division, and Legal Department prepared documents to remediate these findings.</i> 3. <i>Meeting and discussing this matter between the management of PT MRT Jakarta and the management of Bank Indonesia</i>



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Deskripsi Risiko <i>Risk Description</i>	Tindakan Mitigasi yang dilakukan <i>Mitigation Actions taken</i>
8	<p>Keterlambatan persetujuan Pergub Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan TOD Dukuh Atas karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Rancangan Lampiran Pergub (<i>draft teknis</i>) belum memenuhi persyaratan dari TGUPP di mana PRK TOD Dukuh Atas harus mempertimbangkan pemukiman kelas menengah bawah (TGUPP baru terlibat dalam penyusunan Rapergub ini setelah <i>master plan</i> selesai disusun MRTJ) sehingga tidak terwujudnya kawasan TOD yang sesuai dengan PRK. <p><i>Delays in approval of the Urban Design Guidelines (PRK) of TOD Dukuh Atas due to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » <i>The Pergub Attachment Design (technical draft) does not meet the requirements of TGUPP where the PRK TOD Dukuh Atas must consider lower middle class settlements (TGUPP has only been involved in drafting this Rapergub after the MRTJ master plan has been completed), therefore the TOD area is not in accordance with the CRP.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MRTJ bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI melakukan tinjauan dan studi kembali untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh TGUPP mengenai pemukiman kelas menengah bawah (prinsip keadilan sosial) 2. Membahas Rancangan Lampiran Pergub (Draft Teknis) pada Rapat BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). 3. Menyusun dan menyiapkan Rancangan Pergub untuk disahkan oleh Gubernur <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>MRTJ together with DKI Jakarta Provincial Government Spatial Planning and Land conduct a review and re-study to fulfill the requirements requested by TGUPP regarding lower middle class settlements (the principle of social justice)</i> 2. <i>Discuss the Governor Regulation Design (Technical Draft) at BKPRD (Regional Spatial Planning Coordination Meeting).</i> 3. <i>Arrange and prepare the Governor Regulation to be ratified by the Governor</i>
9	<p>Adanya perbedaan <i>accuracy stopping point</i> pada SIG ATO antara kereta dengan beban kosong (AW0) dan kereta dengan beban penuh (AW3) pada Train Set 1 sehingga berdampak pada kemungkinan sedikit terhalangnya penumpang saat keluar kereta (AW0) oleh PSD</p> <p><i>There is a difference in accuracy of stopping points on SIG ATO between trains with empty loads (AW0) and trains with full load (AW3) in Train Set 1 therefore will impact on the possibility of a minor obstruction for passengers when exiting trains (AW0) by PSD</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>update software</i> dan melakukan pengujian ulang. Untuk train set 1 sudah dilakukan pengujian dan sudah <i>solved</i> dengan menggunakan <i>update software 1.25</i> dan diperoleh hasil <i>100% accuracy</i>. 2. Software baru akan dilakukan pengujian di train set lain. Waktu pengujian dilakukan secara <i>parallel</i> dengan SAT ATO sehingga tidak ada penambahan waktu <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Perform software updates and retest. For train set 1, a test has been carried out and has been solved using software update 1.25 and 100% accuracy is obtained.</i> 2. <i>New software will be tested in another train set. The testing time is carried out in parallel with the SAT ATO therefore there is no additional time</i>
10	<p>Kegagalan <i>Defect Liability Period (DLP)</i> yang ditanggung oleh kontraktor karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme DLP belum jelas b. Mekanisme instalasi peralatan oleh mitra MRTJ atau MRT sendiri belum jelas c. Bangunan prasarana sudah dibongkar/ dirusak sebelum serah terimasehingga berdampak pada penambahan biaya untuk perbaikan prasarana <p><i>The failure of Defect Liability Period (DLP) borne by the contractor due to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The DLP mechanism is unclear</i> b. <i>The mechanism for installing equipment by MRTJ or MRT partners is not clear</i> c. <i>The infrastructure building had been demolished / damaged before the transfer was made therefore it had an impact on adding costs to repair the infrastructure</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembahasan secara intensif untuk kesepakatan DLP Plan dengan melibatkan <i>construction</i> dan <i>OM team</i> dengan konsultan dan kontraktor terkait. 2. Memastikan selama DLP, kontraktor akan memiliki team yang akan membantu MRTJ dalam perbaikan awal dan tindak lanjut dengan vendor/subkontraktor dan terdapat SLA yang harus dipenuhi. 3. Diperlukan <i>insurance coverage</i> oleh MRTJ atas semua fasilitas yang dipergunakan selama operasi <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Conduct intensive discussions for the DLP Plan agreement by involving construction and OM teams with related consultants and contractors.</i> 2. <i>Ensure that during DLP, the contractor will have a team that will assist MRTJ in the initial repairs and follow-up with vendors / subcontractors and there are SLAs that must be met.</i> 3. <i>MRTJ insurance coverage is required for all facilities used during operations</i>



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direksi BUMD diwajibkan untuk menetapkan sebuah Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal ini mencakup antara lain: lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, pengukuran risiko, rencana mitigasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta *monitoring* atau pemantauan.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, di tahun 2017 manajemen telah menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Internal melalui Peraturan Direksi No. PER/004/BOD-MRT/VI/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT MRT Jakarta. Pedoman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menunjukkan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Pemahaman bagi seluruh pihak internal Perusahaan tentang kerangka dan manajemen Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUP PERUSAHAAN

Direksi Perusahaan telah merancang Sistem Pengendalian Internal dengan acuan *Committee of Sponsoring Organization of Threadway Commission (COSO) Framework*. COSO *Internal Control-Integrated Framework (2013)* mendefinisikan pengendalian intern sebagai, "A process, effected by an entity's board of directors, management, and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of subjectives in the following categories:

- Effectiveness and efficiency of operations.
- Reliability of financial reporting.
- Compliance with applicable laws and regulations.

Definisi di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Governor Decree of DKI Jakarta Provincial Government No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regional-Owned Enterprises (BUMD) within the Special Capital Region of Jakarta, BUMD Directors are required to establish an effective Internal Control System to secure investment and company assets. This Internal Control System includes, among others: the control environment, risk identification, risk measurement, risk mitigation plans, control activities, communication and information, and monitoring.

INTERNAL CONTROL SYSTEM GUIDELINES

In the framework of implementing an effective and efficient internal control system, in 2017 management has established the Guidelines for Internal Control Systems through Board of Directors Regulation No. PER / 004 / BOD-MRT / VI / 2017 concerning Guidelines for the Internal Control System within PT MRT Jakarta. This guide is made with the following objectives:

1. *Demonstrate the Company's commitment in realizing good corporate governance to all stakeholders.*
2. *Understanding of all the Company' internal parties regarding the framework and management of the Company's Internal Control System.*

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITHIN THE COMPANY

In designing Internal Control System, the Board of Directors refers to Committee of Sponsoring Organization of Threadway Commission (COSO) Framework. COSO Internal Control-Integrated Framework (2013) defines internal control as, "A process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of subjective in the following categories:

- *Effectiveness and efficiency of operations.*
- *Reliability of financial reporting*
- *Compliance with applicable laws and regulations.*

Pursuant to the above definitions, internal control is a process affected by Board of Directors, management and other party designed to ensure Company's effective and efficient goals



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

keyakinan yang memadai guna menjamin pencapaian tujuan Perusahaan yang efektifitas dan efisiensi, dengan didukung keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan telah menyesuaikan dengan COSO Framework tersebut. 5 (lima) unsur yang diperhatikan Perusahaan dalam pengembangan pengendalian internal adalah:

1. Lingkungan Pengendalian Perusahaan
Perusahaan telah mengembangkan dan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui pembangunan budaya Perusahaan, seperti adanya kesepakatan seluruh Insan Perusahaan akan nilai-nilai Perusahaan dan aturan perilaku (*Code of Conduct*) serta adanya penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan pendelegasian kewenangan dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan strategi Perusahaan, kebijakan SDM yang berbasis kepada kompetensi, dan pengembangan GCG secara terus menerus.
2. Penilaian Risiko
Guna menjamin adanya sadar risiko pada setiap Insan Perusahaan, Perusahaan telah membangun budaya risiko di setiap unsur dan proses utama. Perusahaan telah menetapkan Divisi Manajemen Risiko sebagai *leader* dalam pengembangan manajemen risiko, baik itu pada risiko level korporasi maupun unit kerja sehingga tersedia *Risk Register* di masing-masing unit kerja. *Risk Register* ini selalu dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
3. Aktivitas Pengendalian
Untuk menjamin bahwa seluruh proses utama Perusahaan telah dilakukan secara baik, memenuhi unsur efektifitas, efisiensi, dan dilengkapi dengan *accountability* serta pertanggungjawaban yang baik, Perusahaan telah melakukan identifikasi proses-proses yang diperlukan dalam pengelolaan Perusahaan, baik itu pada Divisi yang berifat teknis maupun pada Divisi pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan telah dilengkapi standar operasi dan prosedur. Standar operasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dari masing-masing *Risk Register* unit kerja yang bersangkutan.

Dalam penyusunan SOP untuk operasi, pemeliharaan dan perawatan MRT Jakarta, Perusahaan dibantu oleh Konsultan Internasional.

achievement, with support of financial statement's reliability and compliance with laws and regulations.

The development of Internal Control System in the Company has been adjusted to COSO Framework. Five elements of concerns to the Company in developing internal control are:

1. *Control Environment of the Company*
The Company has developed and created an appropriate control environment through the development of corporate culture, such as the agreement of all Company's Corporate values and Code of Conduct, as well as the preparation of an organizational structure that reflects clear delegation of authority and division of tasks in accordance with the Company's strategy, competencybased HC policies, and continuous development of GCG.
2. *Risk Assessment*
In order to ensure the existence of risk awareness in each personnel of the Company, the Company has built a culture of risk in each element and in the main process. The Company has established the Risk Management Division as leader in the development of risk management, in both corporate level and unit, hence a Risk Register will be available in each work unit. The Risk Register is always evaluated every 3 (three) months.
3. *Control Activities*
To ensure that all main processes of the Company have been carried out properly, met the elements of effectiveness and efficiency, and completed with accountability and responsibility, the Company has identified the processes required in the Company's management, either at technical divisions or supporting divisions. This is done to ensure that every management process has been equipped with a standard operating procedure. Operating standards and procedures established by the Board of Directors are part of the risk mitigation from each Risk Register of concerned work unit.

In the preparation of SOPs for operation, maintenance and treatment of MRT Jakarta, the Company is assisted by International Consultants.



4. Komunikasi dan informasi

Sebagai Perusahaan yang sedang mengerjakan proyek besar, proyek untuk kepentingan publik, manajemen sangat menyadari arti penting komunikasi dan informasi, khususnya komunikasi dan informasi tentang dan jalannya pekerjaan proyek, progress proyek dan dampaknya terhadap pelayanan publik lainnya. Fungsi komunikasi dan informasi dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Secretary*. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain adalah membangun, memantau dan evaluasi situs web. Di samping itu, kegiatan lain dilakukan melalui sosialisasi kegiatan proyek baik dengan cara tinjauan langsung kepada masyarakat sekitar jalur proyek maupun melakukan seminar dan konferensi pers.

5. Monitoring

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah berjalan dengan baik, manajemen dan unit-unit kerja terkait diwajibkan melakukan monitoring dan perbaikan secara terus menerus atas penerapan Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, *Internal Audit & Control* secara terpisah juga melakukan monitoring terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal. Fungsi monitoring juga dilakukan Komite Audit dan Auditor Publik, di mana proses audit eksternal yang telah melakukan monitoring atas implementasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di tahun 2016 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).

Untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian pada setiap proses utama telah dilakukan secara baik, Internal Auditor telah melakukan pemetaan tentang proses-proses utama yang telah memiliki SOP yang baik dan yang belum baik. Hasil pemetaan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan selanjutnya memerintah kepada pemilik proses untuk segera memperbaiki SOP yang ada. Selain itu, Direksi telah mengeluarkan surat keputusan Direksi tentang SOP untuk SOP, sebagai panduan bagi unit kerja dalam menyusun SOP pada proses-proses yang ada di unit kerjanya.

4. Communication and information

As the Company which is currently working on a large project for the public interest, the management is very aware of the importance of communication and information, particularly information and communication about and course of the project work, progress of the project, and its impact on other public services. Communication and information functions are coordinated by Corporate Secretary Division. The things that have been done are building, monitoring and evaluating the web sites. In addition, other activities included the dissemination of project activities either by way of direct visit to the public located around the project path as well as conducting seminars and press conferences.

5. Monitoring

To ensure that the Company's internal control system has been running well, the management and related work units are required to conduct continual monitoring and improvements on the implementation of Internal Control Systems. In addition, Internal Audit & Control also separately monitors the implementation of the Internal Control System. The monitoring function is also carried out by the Audit Committee and Public Auditor, in which the external audit process that has monitored the implementation of the Company's Internal Control System in 2016 is the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).

To ensure that control activities in each of the main processes have been carried out properly, the Internal Auditor has mapped out the main processes that have good and unfavorable SOPs. The results of the mapping have been submitted to the President Director and subsequently ordered the process owners to immediately improve the existing SOPs. In addition, the Board of Directors has issued a Decree of the Board of Directors regarding SOPs for SOPs, as a guide for work units in preparing SOPs on the processes in their work units.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

PENILAIAN, EVALUASI DAN PERNYATAAN PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk mengetahui kondisi terkini atas Sistem Pengendalian Internal, Perusahaan melakukan penilaian terhadap 2 (dua) tingkatan pengendalian.

1. Penilaian atas Pengendalian tingkat Perusahaan (*entity level*)
Proses Pengendalian Internal merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis dan pengelolaan risikonya. Proses tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan pada seluruh unit kerja di Perusahaan (*entity level*). Pelaksanaan proses pengendalian internal pada unit kerja akan dievaluasi dan dinilai melalui penilaian mandiri (*self assessment*) setiap tahun.

Divisi *Internal Audit* merupakan salah satu unit yang memberikan kontribusi dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian internal tingkat Perusahaan sesuai dengan COSO tahun 2013. Penugasan tersebut dapat direncanakan dan tertuang dalam Rencana Audit Tahunan (RAT).

Hasil pelaksanaan *self assessment*, Divisi *Internal Audit & Control* menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit atas hasil *assessment* dan rekomendasi terhadap peningkatan pengendalian internal Perusahaan. Selanjutnya hasil penilaian akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).

2. Penilaian atas Pengendalian tingkat Aktivitas (*activity level*)
Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya permasalahan eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan. Risiko operasional bersifat tanpa batas dan melekat pada semua aktifitas bisnis dan operasional Perusahaan. Mengingat Perusahaan bergerak dalam bidang transportasi umum maka risiko operasional merupakan prioritas utama untuk pengendalian internal. Oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian atas kecukupan efektifitas kontrol ("*Control*") pengendalian internal yang sudah ditetapkan Perusahaan berdasarkan Pedoman dan Prosedur ("*Compliance*"). Divisi *Internal Audit* melaksanakan penilaian pengendalian internal tingkat aktivitas sesuai dengan metode *Control & Compliance Self Assessment (CCSA)*.

ASSESSMENT, EVALUATION AND STATEMENT OF INTERNAL CONTROL

To determine the current conditions of the Internal Control System, the Company evaluates 2 (two) levels of control.

1. *Assessment of Company level Control (entity level)*
The Internal Control Process is an inseparable process in every business process and risk management. The process must be carried out by each employee in all work units in the Company (*entity level*). The implementation of the internal control process in the work unit will be evaluated and assessed through a self assessment every year.

The Internal Audit Division is one of the units that contributes in conducting an independent assessment of the Company's internal control in accordance with COSO in 2013. The assignment can be planned and contained in the Annual Audit Plan (RAT). With the results of self assessment implementation, the Internal Audit Division submit a report to President Director with a copy to Audit Committee on the results of the assessment and recommendations for improving the Company's internal control. Furthermore, the results of the assessment will be included in Annual Report.

2. *Assessment of Activity level control*
Operational risk is a risk caused by insufficient and / or non-functioning internal processes, human errors, system failures or external problems that affect the Company's operations. Operational risk is boundless and inherent in all business activities and operations of the Company. Since the Company is engaged in public transportation, operational risk is a top priority for internal control. Therefore it is necessary to assess the adequacy of the internal control effectiveness that has been determined by the Company based on the Guidelines and Procedures ("*Compliance*"). The Internal Audit Division carries out an activity level internal control assessment in accordance with the Control & Compliance Self Assessment (CCSA) method. Each work unit (risk owner) carries out risk identification and control activities over the work process according to their duties and responsibilities periodically.



Setiap unit kerja (*risk owner*) melaksanakan identifikasi risiko dan aktivitas kontrol atas proses kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara periodik. Hasil identifikasi tersebut berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko akan berbentuk Daftar Risiko (*risk register*). Divisi Internal Audit melaksanakan penilaian kecukupan kontrol dan kepatuhan atas kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan aktifitas operasional yang terdapat pada Daftar Risiko.

Bilamana kontrol yang dimiliki dianggap belum memadai oleh Divisi *Internal Audit & Control* untuk mengantisipasi risiko maka Divisi *Internal Audit & Control* merekomendasikan kontrol tambahan dalam rencana mitigasi risiko dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (anggaran, SDM, infrastruktur, waktu dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Divisi *Internal Audit & Control*/pihak independen lainnya maka Direksi dapat menyatakan efektifitas Pengendalian Internal telah memadai yang didukung oleh pernyataan setiap Kepala Divisi.

Dewan Komisaris dapat menunjuk kantor akuntan publik/konsultan independen untuk melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal setiap tahunnya. Biaya yang muncul atas evaluasi tersebut akan dibebankan dalam anggaran Dewan Komisaris. Laporan pihak independen akan disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PROSES DAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2018

Untuk memastikan penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan berjalan secara efektif, Perusahaan melakukan penilaian dan evaluasi. Proses penilaian dan evaluasi telah sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta No. ST-545/PW09/4.2/2018 tanggal 21 Juni 2018, Persetujuan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara No. S-589/D4/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 hal Ijin Penggunaan Bantuan Kedinasan, dan Surat Direktur Utama PT MRT Jakarta No. 1210/DIR-MRT/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal permohonan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta.

The results of the identification coordinate with the Risk Management Division in the form of a risk register. The Internal Audit Division conducts an assessment of the adequacy of controls and compliance with the policies and procedures that have been established in the implementation of operational activities contained in the Risk List.

When the control held is deemed inadequate by the Internal Audit & Control Division to anticipate risks, the Internal Audit & Control Division recommends additional control in the risk mitigation plan by considering available resources (budget, HC, infrastructure, time and others).

Based on the results of an assessment conducted by the Internal Audit & Control Division / other independent parties, the Board of Directors can state that the effectiveness of Internal Control has been adequate, supported by the statements of each Division Head.

The Board of Commissioners can appoint an independent public accounting firm / consultant to evaluate the internal control system annually. Costs incurred for the evaluation will be charged in the budget of the Board of Commissioners. An independent party report will be submitted by the Board of Commissioners to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

PROCESS AND EVALUATION RESULTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2018

To ensure the implementation of the Company's Internal Control System runs effectively, the Company conducts assessments and evaluations. The process of assessment and evaluation is in accordance with Assignment Letter of DKI Jakarta Province BPKP Head of Representative No. ST-545 / PW09 / 4.2 / 2018 dated June 21, 2018, Approval of BPKP State Accountant Deputy Head No. S-589 / D4 / 05/2018 dated May 31, 2018 concerning Permit for Use of Official Assistance, and Letter of PT MRT Jakarta President Director No. 1210 / DIR-MRT / V / 2018 dated May 11, 2018 concerning the request for evaluation of the Internal Control System at PT MRT Jakarta.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	:	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta <i>Evaluation of Internal Control System Implementation in PT MRT Jakarta</i>
Assessor/Penilai	:	BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta BPKP Representative of DKI Jakarta Province
Periode Evaluasi <i>Period of Evaluation</i>	:	Tahun 2017, dengan memperhatikan periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian 2017, taking into account the period of prior and after as long as it has a connection as a basis for conclusions or judgments
Waktu Pengukuran <i>Measuring Time</i>	:	26 Juni - 10 Agustus 2018 June 26 - August 10, 2018

Ruang lingkup evaluasi meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Perusahaan yang terbagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).

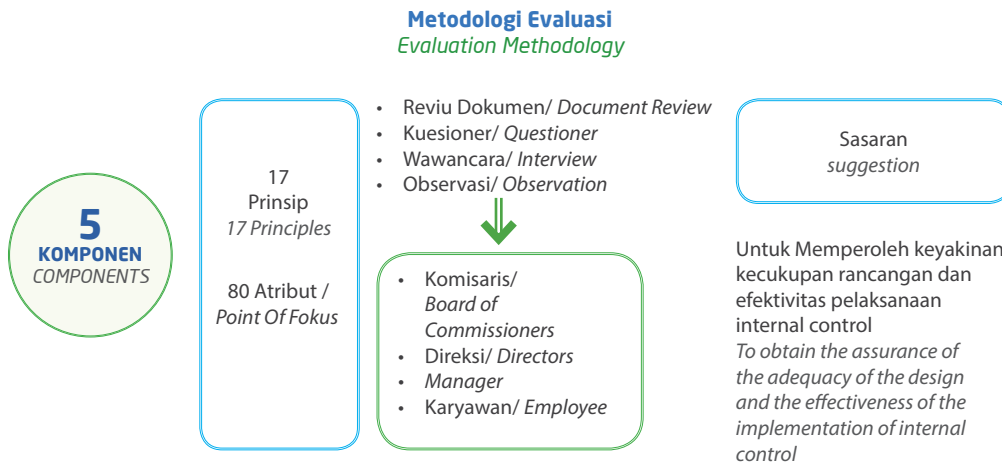
The scope of the evaluation includes all aspects that support the implementation of the internal control system in the Company which is divided into 5 (five) components, namely: Control Environmental, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

Dari ke-5 komponen tersebut, evaluasi menggunakan 17 prinsip dan 80 atribut dengan metode evaluasi seperti yang tergambar di bawah ini.

Of the 5 components, evaluation uses 17 principles and 80 attributes with the evaluation method as illustrated below.

Komponen Evaluasi, Prinsip dan Atribut *Component of Evaluation, Principles and Attributes*

No	Komponen <i>Components</i>	Bobot <i>Value</i>	Prinsip <i>Principles</i>	Atribut <i>Attributes</i>
1	Lingkungan Pengendalian <i>Control Environment</i>	25,00	5	20
2	Penilaian Risiko <i>Risk Assessment</i>	25,00	4	20
3	Aktivitas Pengendalian <i>Control Activities</i>	20,00	3	16
4	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	17,50	3	14
5	Pemantauan <i>Monitoring</i>	12,50	2	10
Jumlah Total		100,00	17	80



Hasil: Rentang Skor dan Tingkat Efektivitas
Results: Range of Scores and Level of Effectiveness

Skor ≤ 50 (Tidak Efektif) <i>Score ≤ 50 (Not Effective)</i>	:	Pengendalian intern masih sederhana <i>Internal control is still simple</i>
50 < Skor ≤ 60 (Kurang Efektif) <i>50 < Score ≤ 60 (Ineffective)</i>	:	Pengendalian intern belum terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang terjadi <i>Internal control has not been integrated and has not been adjusted to organizational changes that occur</i>
60 < Skor ≤ 75 (Cukup Efektif) <i>60 < score ≤ 75 (Effective enough)</i>	:	Pengendalian intern belum sepenuhnya terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang terjadi <i>Internal control has not been fully integrated and has not been adjusted to organizational changes that occur</i>
75 < Skor ≤ 85 (Efektif) <i>75 < Score ≤ 85 (Effective)</i>	:	Pengendalian intern telah terintegrasi namun belum memungkinkan dilakukan perubahan secara cepat mengikuti tuntutan perubahan organisasi dan operasional <i>Internal control has been integrated but it has not been possible to make changes quickly following the demands of organizational and operational change</i>
Nilai di atas 85 (Sangat Efektif) <i>Score above 85 (Very Effective)</i>	:	Pengendalian intern telah terintegrasi dan memungkinkan dilakukan perubahan dengan cepat sesuai tuntutan perubahan organisasi dan operasional <i>Internal control has been integrated and allows changes to be made quickly according to the demands of organizational and operational changes</i>

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk tahun 2017 menunjukkan capaian 70,73 atau berada pada tingkat efektivitas “Cukup Efektif”.

Based on the evaluation that has been carried out, the evaluation results indicate that the Company's internal control system for 2017 shows a performance of 70.73 or is at the level of effectiveness “Effective”.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017
Results of 2017 Internal Control System Evaluation

No	Komponen Components	Capaian Achievement	Tingkat Efektivitas Level of Effectiveness
1	Lingkungan Pengendalian Control Environment	75,31	Efektif Effective
2	Penilaian Risiko Risk Assessment	66,67	Cukup Efektif Effective Enough
3	Aktivitas Pengendalian Control Activities	71,90	Cukup Efektif Effective Enough
4	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	65,00	Cukup Efektif Effective Enough
5	Pemantauan Monitoring	75,83	Cukup Efektif Effective Enough
Jumlah Total		70,73	Cukup Efektif Effective Enough

Dari hasil evaluasi di atas, terdapat 24 rekomendasi sebagai catatan penting bagi peningkatan penerapan sistem pengendalian internal di lingkup Perusahaan. Berikut disampaikan rekomendasi tersebut, dan tindak lanjut yang telah dilakukan:

From the evaluation results above, there are 24 recommendations as an important note for increasing the implementation of the internal control system within the Company. Following are the recommendations, and follow up actions that have been taken:

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017 Results of 2017 Internal Control System Evaluation	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2018/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan Follow-Up That Has Been Done Until End of 2018 / Follow-Up Plan / Reason If Evaluation Recommendation Has Not Been Implemented
I Lingkungan Pengendalian Control Environment		
1 Pimpinan Perusahaan telah memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan perilaku, namun belum dilengkapi SK Direktur Utama tentang penetapan Direksi sebagai <i>role model</i> dan SK Direktur Utama tentang penetapan kriteria <i>role model</i> The Corporate Leadership has given an example of the implementation of the rules of behavior, but has not been equipped with a Decision Letter of President Director regarding the determination of the Board of Directors as a role model and Decision Letter of President Director on the determination of role model criteria	√	SK tentang penetapan kriteria <i>role model</i> belum ditetapkan Decision Letter on determination of role model criteria has not been established
2 Perusahaan telah memiliki pedoman perilaku, namun belum menetapkan unit kerja yang menjalankan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan perilaku The company has a behavioral guideline, but has not set a work unit that evaluates the implementation of the rules of behavior	√	Tugas evaluasi terhadap pelaksanaan aturan perilaku dilaksanakan oleh Divisi HC Evaluation duty on implementation of rules of conduct is carried out by HC Division



Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017 <i>Results of 2017 Internal Control System Evaluation</i>	Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2018/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow-Up That Has Been Done Until End of 2018 / Follow-Up Plan / Reason If Evaluation Recommendation Has Not Been Implemented</i>
3 Melengkapi Pedoman Perilaku dengan aturan terkait jika terjadi penyimpangan atas pelaksanaan aturan perilaku (misalnya register/catatan atas pengaduan yang masuk, Penanganan penyimpangan aturan perilaku secara tepat waktu, pengenaan sanksi disiplin yang tepat) serta melaksanakannya <i>Completing the Code of Conduct with related rules if there is a deviation from the implementation of the rules of conduct (eg registers / records of incoming complaints, Handling irregularities in the rules of behavior in a timely manner, imposing appropriate disciplinary sanctions) and implementing them</i>	√	<i>Whistleblowing system menjadi tanggung jawab GCG (Corsec), namun tindak lanjut dijalankan oleh Divisi HC</i> <i>Whistleblowing system is the responsibility of GCG (Corsec), but follow up is carried out by HC Division</i>
4 SK Pembagian Tugas Dewan Komisaris masih berupa SK Dewan Komisaris tentang pengangkatan Ketua Komite <i>Decision Letter on Segregation of Duties of the Board of Commissioners is still in the form of a Board of Commissioners' Decision Letter regarding the appointment of Committee Chairman</i>	√	SK Dewan Komisaris No.003 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Audit di Lingkungan PT MRT Jakarta <i>Decision Letter of Board of Commissioners No.003 of 2016 concerning the Establishment of an Audit Committee within PT MRT Jakarta</i>
5 Dewan Komisaris telah memiliki jumlah anggota yang cukup, namun dalam SK pengangkatan belum ada state untuk Komisaris Independen <i>The Board of Commissioners already has a sufficient number of members, but in the appointment decree there is no state for Independent Commissioner</i>	√	
6 Manajemen belum sepenuhnya mendesain alur pelaporan dari setiap struktur dalam organisasi Perusahaan <i>Management has not fully designed the reporting flow of each structure in the company organization</i>	√	
7 Perusahaan telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM, namun SOP pemberhentian pegawai dan Job Specification untuk setiap jabatan dalam Perusahaan masih berupa draft <i>The company has an HC management policy, but the SOP for employee dismissal and Job Specification for each position in the company is still a draft</i>	√	Belum di SK kan <i>Decision Letter has not been established</i>
8 Perusahaan telah melakukan identifikasi dan evaluasi kompetensi karyawan, namun belum ditetapkan dengan kebijakan <i>The company has identified and evaluated employee competencies, but has not been determined by policy</i>	√	Belum di SK kan, namun sudah ada evaluasi atas karyawan dalam bentuk assessment yang dilaksanakan oleh tenaga ahli HC <i>Decision Letter has not been established, but there has been an evaluation on employees in the form of an assessment carried out by HC experts</i>
9 Perusahaan telah memiliki Kebijakan penyelenggaraan diklat untuk karyawan, namun belum ada dokumentasi pelaksanaan diklat sesuai dengan hasil mapping kompetensi karyawan <i>The company has a policy of organizing training for employees, but there is no documentation of training implementation in accordance with the results of employee competency mapping</i>	√	Sudah dilengkapi dengan daftar keikutsertaan karyawan dalam training <i>Already equipped with a list of employee participation in training</i>



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017 <i>Results of 2017 Internal Control System Evaluation</i>		Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2018/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow-Up That Has Been Done Until End of 2018 / Follow-Up Plan / Reason If Evaluation Recommendation Has Not Been Implemented</i>
10	Pimpinan Perusahaan belum sepenuhnya mengembangkan rencana suksesi <i>The company leaders have not fully developed a succession plan</i>	√	Dilaksanakan dengan promosi karyawan melalui <i>internal recruitment</i> <i>Implemented with employee promotion through internal recruitment</i>
11	Perusahaan belum memiliki kebijakan/prosedur analisis beban kerja individu <i>The company does not have an individual workload analysis policy / procedure</i>	x	Belum ada <i>Not available</i>
II Penilaian Risiko <i>Risk Assessment</i>			
1	Perusahaan belum memiliki Kebijakan mengenai Pelaporan Internal yang memuat tujuan Pelaporan Internal <i>The company does not yet have an Internal Reporting Policy that contains the objectives of Internal Reporting</i>	√	Terdapat kebijakan WBS <i>There is a WBS policy</i>
2	Perusahaan belum memiliki Kebijakan Pelaporan Non Keuangan untuk pihak eksternal (misalnya pemerintah, regulator) <i>The company does not yet have a Non-Financial Reporting Policy for external parties (eg the government, regulators)</i>	√	Terdapat kebijakan WBS <i>There is a WBS policy</i>
3	Perusahaan telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko, namun belum mengatur Identifikasi dan Analisis Risiko Kecurangan: a. Proses penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam pelaporan, kemungkinan hilangnya aset, korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya yang dapat terjadi; b. Proses penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor insentif dan tekanan; c. Penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko terkait peluang/kesempatan; d. Penilaian risiko kecurangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko terkait sikap dan tindakan yang tidak rasional. <i>The company has a Risk Management Guidelines, but has not yet regulated Fraud Risk Identification and Analysis:</i> a. <i>The fraud risk assessment process is carried out by considering the potential for fraud in reporting, possible loss of assets, corruption and various other irregularities that may occur;</i> b. <i>The fraud risk assessment process is carried out by considering incentive and pressure factors;</i> c. <i>Fraud risk assessment is carried out by considering risk factors related to opportunities;</i> d. <i>Fraud risk assessment is carried out by considering risk factors related to irrational attitudes and actions.</i>	√	Tertuang dalam kebijakan Manajemen Risiko <i>Included in the Risk Management policy</i>



Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017 <i>Results of 2017 Internal Control System Evaluation</i>	Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2018/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow-Up That Has Been Done Until End of 2018 / Follow-Up Plan / Reason If Evaluation Recommendation Has Not Been Implemented</i>
<p>4 Perusahaan telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko, namun belum mengatur Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan:</p> <p>a. Proses penilaian risiko mempertimbangkan adanya perubahan peraturan, perekonomian, dan lingkungan fisik di mana Perusahaan beroperasi;</p> <p>b. Perusahaan mempertimbangkan adanya dampak potensial perubahan lingkungan bisnis, seperti lini bisnis baru yang secara dramatis mengubah komposisi lini bisnis yang ada, investasi atau divestasi operasi bisnis, pertumbuhan yang cepat, ketergantungan pada geografi asing, dan teknologi baru, yang memengaruhi penerapan sistem pengendalian intern;</p> <p>c. Perusahaan mempertimbangkan adanya dampak perubahan kepemimpinan dan perubahan pandangan atau filosofi terhadap sistem pengendalian intern</p> <p><i>The company has a Risk Management Guidelines, but has not yet set a Significant Change Identification and Analysis:</i></p> <p><i>a. The risk assessment process considers changes in regulations, the economy, and the physical environment in which the company operates;</i></p> <p><i>b. Companies consider the potential impact of changes in the business environment, such as new business lines that dramatically change the composition of existing business lines, investment or divestment of business operations, rapid growth, dependence on foreign geography and new technologies, which affect the implementation of internal control systems;</i></p> <p><i>c. The company considers the impact of changes in leadership and changes in views or philosophy towards the internal control system</i></p>	√	<p>Tertuang dalam kebijakan Manajemen Risiko</p> <p><i>Stated in the Risk Management policy</i></p>
<p>III Aktivitas Pengendalian <i>Control Activities</i></p>		
<p>1 Belum seluruh proses bisnis memiliki kebijakan/prosedur terkait pemilihan aktivitas pengendalian yang memuat pertimbangan pengaruh lingkungan, kompleksitas perusahaan, sifat dan ruang lingkup operasi serta karakteristik perusahaan</p> <p><i>Not all business processes have policies/procedures related to the selection of control activities that include consideration of the environment influence, the complexity of the company, the nature and scope of operations and characteristics of the company</i></p>	√	<p>Beberapa proses bisnis belum SK kan namun masih dalam bentuk <i>draft</i></p> <p><i>Some business processes have not been as a Decision Letter, still as a draft</i></p>
<p>2 Perusahaan belum sepenuhnya memiliki pedoman/prosedur untuk menentukan bisnis proses yang membutuhkan aktivitas pengendalian, misalnya persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, <i>review</i> kinerja, pengamanan aset dan pemisahan tugas</p> <p><i>The company does not fully have guidelines/procedures to determine business processes that require control activities, such as approval, authorization, verification, reconciliation, performance review, asset security and segregation of duties</i></p>	√	<p>Beberapa proses bisnis belum SK kan namun masih dalam bentuk <i>draft</i></p> <p><i>Some business processes have not been as a Decision Letter, still as a draft</i></p>



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017 <i>Results of 2017 Internal Control System Evaluation</i>		Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2018/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow-Up That Has Been Done Until End of 2018 / Follow-Up Plan / Reason If Evaluation Recommendation Has Not Been Implemented</i>
3	Belum seluruh aktivitas pengendalian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur <i>Not all control activities are described in the form of policies and procedures</i>	√	Beberapa proses bisnis belum SK kan namun masih dalam bentuk <i>draft</i> <i>Some business processes have not been as a Decision Letter, still as a draft</i>
4	Perusahaan telah memiliki Petunjuk Penyusunan <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP), namun mengatur keharusan melakukan revidu secara berkala atas kebijakan dan prosedur, untuk menjamin bahwa kebijakan dan prosedur masih relevan dan efektif <i>The company has a Standard Operating Procedure (SOP) Preparation Guide, but regulates the necessity to periodically review policies and procedures, to ensure that policies and procedures are still relevant and effective</i>	√	SOP masih memerlukan revisi <i>SOP still need revision</i>
5	Manajemen belum melakukan pembahasan atau rapat mengenai relevansi dan efektifitas atas kebijakan dan prosedur <i>Management has not conducted discussions or meetings regarding the relevance and effectiveness of policies and procedures</i>	√	Sudah dilakukan secara berkala <i>It has been done regularly</i>
IV <i>Information and Communication</i>			
1	Perusahaan telah memiliki sistem Informasi, namun belum terintegrasi <i>The company already has an Information system, but it is not yet integrated</i>	√	Sudah tertuang dalam SK terkait <i>Information & Technology</i> <i>Already stated in Decision Letter related to Information & Technology</i>
2	Perusahaan belum memiliki Kebijakan/SOP/prosedur untuk memperoleh informasi dari pihak eksternal, meliputi: Siapa yang dimaksud pihak eksternal Jenis informasi yang diperlukan perusahaan (relevan) Kapan informasi diperlukan perusahaan (tepat waktu) <i>Personal In Charge</i> dari pihak eksternal <i>The company does not have a policy/SOP/procedure to obtain information from external parties, including:</i> <i>Who is meant by external parties</i> <i>Types of information needed by the company (relevant)</i> <i>When is the information needed by the company (on time)</i> <i>Personal In Charge from external parties</i>	√	Sudah tertuang dalam SK terkait <i>Information & Technology</i> <i>Already stated in Decision Letter related to Information & Technology</i>



Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2017 <i>Results of 2017 Internal Control System Evaluation</i>		Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i>	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2018/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow-Up That Has Been Done Until End of 2018 / Follow-Up Plan / Reason If Evaluation Recommendation Has Not Been Implemented</i>
3	<p>Perusahaan memiliki saluran komunikasi terbuka, yang memungkinkan masukan dari pihak luar untuk memberikan informasi yang relevan kepada manajemen dan direksi. Contoh : kotak saran , <i>email</i> perusahaan, namun Petugas dan unit khusus yang menangani masukan tersebut belum membuat laporan penanganan masukan</p> <p><i>The company has an open communication channel, which allows input from outside parties to provide relevant information to management and directors. Example: suggestion box, company email, but the Officer and special unit handling the input have not yet made a report on handling the input</i></p>	√	Sudah tertuang dalam SK terkait <i>Information & Technology</i> <i>Already stated in Decision Letter related to Information & Technology</i>
v Pemantauan <i>Monitoring</i>			
1	<p>Direksi belum secara berkala mendapatkan laporan status tindak lanjut hasil evaluasi untuk meyakini kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi hasil evaluasi tersebut</p> <p><i>The Board of Directors has not periodically received a follow-up status report on the evaluation results to believe the quality and completion timeliness of each evaluation results recommendation</i></p>	√	Secara berkala terdapat laporan tindak lanjut dari Divisi IAC <i>Periodically there are follow-up reports from IAC Division</i>

v = telah ditindaklanjuti | x = belum ditindaklanjuti
v = has been followed up | x = has not been followed up



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR), is a place for the Company to build relationships that grow together with stakeholders, both internally, such as management and employees, as well as externally, such as communities around business locations and consumers. Regarding the implementation of CSR, the Company divides it into 4 (four) aspects.

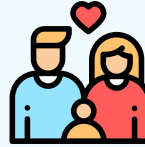
Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility Aspects*



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup
Corporate Social Responsibility related to the environment



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatankerja
Corporate Social Responsibility related to employment, health and safety



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility related to social and community development



Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada produk/konsumen
Corporate Social Responsibility related to product / consumer responsibility

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More information about the implementation of CSR by the Company presented in the chapter on Corporate Social Responsibility in this Annual Report.



PERKARA PENTING

IMPORTANT CASE

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

LEGAL CASES

Problems and / or legal cases faced by the Company, as well as members of the Board of Commissioners and Directors throughout 2018 and 2017 are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Cases</i>	2018		2017	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Final & Binding (inkracht)</i>	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>Legal case</i>				
<i>still on process</i>	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-

<i>Pihak yang Berperkara/ Contracting Party</i>	Pokok Perkara/ Subject Matter	Status Perkara/ Case Status	Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan <i>Risk faced by the Company and Its Impact on the Company</i>	Tindak Lanjut/ Follow-up
Perusahaan/Dewan Komisaris/Direksi <i>Company / Board of Commissioners / Directors</i>	-	-	-	-

SANKSI ADMINISTRASI

Di sepanjang tahun 2018 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

ADMINISTRATIVE SANCTION

Throughout 2018 there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities either to the Company or to members of the Board of Commissioners and Directors.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

IMPORTANT CASE OUTSIDE LEGAL ASPECTS

The company did not find any important cases outside the legal aspects involving the Company or members of the Board of Commissioners and Directors.



PERKARA PENTING IMPORTANT CASE

Pihak yang Berperkar Penting <i>Contracting party</i>	Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan <i>Risk faced by the Company and Its Impact on the Company</i>	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>
Perusahaan/Dewan Komisaris/Direksi <i>Company / Board of Commissioners / Directors</i>	-	-	-

Perkara Penting Di Luar Aspek Hukum *Important Case Outside Legal Aspects*

<i>Dispute Adjudication Board Matters</i>	<i>Permasalahan Issue</i>	<i>Putusan Resolution</i>	<i>Outstanding Issue</i>
CP 104/105	<i>Passenger Information Display (PID)</i>	Penyediaan dan Pemasangan PID untuk CP 104 & 105 adalah sebuah pekerjaan <i>Variation</i> <i>PID Procurement and Instalation for CP 104 & 105 was variation work.</i>	<i>Amicable Settlement</i>
	Tidak dilaksanakan Putusan DAB untuk perkara terdahulu oleh MRTJ <i>No implementation of DAB Decision on previous case by MRTJ</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang berhak diterima Kontraktor sebagai <i>recover damages</i> dalam rangka pelanggaran Kontrak yang dilakukan <i>Employer</i> serta <i>finacing charges</i> atas keputusan DAB dalam <i>referral</i> 104/2 dan 105/2 adalah sebesar: <i>The amount to be received by Contractor as damage recovert regarding Contract violation conducted by Employer as well as financing charges on DAB decision in referral 104/2 and 105/2 was:</i> <p>CP 104: JPY 3,799,238 (excl VAT) dan IDR 2,624,664,797 (excl VAT)</p> <p>CP 105: JPY 3,689,600 (excl VAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> Denda akibat keterlambatan pembayaran harus dibayarkan dalam waktu 28 hari setelah DAB, mengeluarkan keputusan; besaran denda yang dibayarkan ditambah dengan <i>annual rate</i> 12.5% secara <i>accrual</i> dihitung sejak tanggal DAB yang, pertama. <i>Late payment penalty must be paid within 28 days after DAB issued the decision; the amount paid added by annual rate 12,5% on accrual basis since the date of first DAB.</i> Pembayaran PA bisa langsung dibayarkan tanpa melalui amandemen kontrak <i>PA Payment can be directly paid without contract amendment.</i> 	<i>Amicable Settlement</i>



Dispute Adjudication Board Matters	Permasalahan Issue	Putusan Resolution	Outstanding Issue
	Sertifikasi Price Adjustment Price Adjustment Certification	<p>Kontraktor berhak atas pembayaran PA sebesar <i>Contractor is entitled for PA payment of:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. PA untuk IPS No. 1-29 (tidak termasuk D-wall) / CP 104: JPY 19,084,436 dan IDR 44,121,130,751, CP 105: JPY 11,173,562 dan IDR 55,866,002,215 <i>PA for IPS No. 1-29 (excluding D-wall); CP 104: JPY 19,084,436 and IDR 44,121,130,751, CP 105: JPY 11,173,562 and IDR 55,866,002,215</i>b. PA untuk D-wall (<i>original scope & variation</i>) CP 104: JPY 694,766 dan IDR 20,277,719,487 CP 105: JPY 0 dan IDR 22,255,036,972 <i>PA for D-wall (original scope & variation) JPY 694,766 dan IDR 20,277,719,487 CP 105: JPY 0 and IDR 22,255,036,972</i>c. PA untuk IPS No. 30-42 (tidak termasuk IPS No. 39) CP 104: JPY 3,204,209 dan IDR 33,294,753,441 CP 105: JPY 6,407,57 dan IDR 28,258,316,469 <i>PA for IPS No. 30-42 (excluding IPS No.39) CP 104: JPY 3,204,209 and IDR 33,294,753,441 CP 105: JPY 6,407,57 dan IDR 28,258,316,469</i> <p>denda akibat keterlambatan pembayaran harus dibayarkan dalam waktu 28 hari setelah DAB mengeluarkan keputusan; besaran denda yang dibayarkan ditambah dengan <i>annual rate</i> 12,5% secara <i>aktrual</i> dihitung sejak keputusan DAB ini hingga seluruh jumlah pokok dan bunganya dibayar penuh <i>Late payment penalty must be paid within 28 days after DAB decision; the amount of penaly paid added by annual rat 12.5% on accrual basis since DAB decision until total principle and its interest is fully paid.</i></p> <p>Pembayaran PA bisa langsung dibayarkan tanpa melalui amendemen kontrak <i>PA payment can be paid directly without contract amendment.</i></p>	Amicable Settlement



PERKARA PENTING
IMPORTANT CASE

Dispute Adjudication Board Matters	Permasalahan Issue	Putusan Resolution	Outstanding Issue
CP 103	Perubahan desain OCS / OCS design changes	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Design loadings for the OCS pole foundations</i> disediakan oleh Kontraktor CP 107 <i>Design loadings for the OCS pole foundations provided by CP 107 Contractor</i> • Dokumen tender CP 107/8 disediakan oleh Pemberi tugas/Konsultan sebagai tanggapan terhadap permintaan Kontraktor untuk <i>supply</i> informasi sistem <i>railway</i> untuk viaduct, termasuk informasi desain terkait dengan OCS <i>loading</i> yang memperbolehkan, Kontraktor untuk mengintegrasikan desainnya untuk <i>viaduct</i> <i>CP 107/5 tender document provided by, Taskmaster/ Consultant as response of Contrator requesting railway system information supply for viaduct, including information design related to, OCS loading to integrate its design with viaduct.</i> • Jawaban atas pertanyaan tender Ref T-33 yang diterbitkan berdasarkan Tender Addenda Ref 04/N/ Civil100/ MRT/111/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang mengklarifikasikan bahwa dalam hal perubahan yang diminta oleh Kontraktor CP 107 yang dikonfirmasi setelah itu, merupakan pekerjaan variasi <i>Answer on tender question Ref T-33 issued based on Tender Addenda Ref 04/N/Civil100/MRT/111/2012 on March 6, 2012 which clarifies that changes requested by CP 107 Contractor subsequently confirmed is variation work</i> • Instruksi Konsultan yang diberikan setelahnya kepada Kontraktor untuk mengubah desain <i>deck viaduct</i> yang telah disetujui untuk menyesuaikan dengan OCS <i>loading</i> yang disediakan oleh Kontraktor CP 107 pada tahapan terakhir pekerjaan Kontraktor merupakan pekerjaan variasi sehingga memberikan hak kepada Kontraktor untuk penambahan waktu penyelesaian dan kompensasi biaya tambahan <i>Subsequent Consultant Instruction to the Contractor to change viaduct deck design which was approved to be adjusted to OCS loading provided by CP 107 Contractor on last phase of Contractor work, thus providing the right to the Contractor for additional completion time and additional compensation.</i> • Kontraktor berhak atas penambahan waktu penyelesaian atas keterlambatan yang diabaikan oleh Kontraktor lainnya. <i>The Contractor is entitled to additional completion time upon delay neglected by other Contractors.</i> 	Amicable Settlement



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

COMPANY INFORMATION AND DATA ACCESS

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data Perusahaan melalui *website* www.jakartamrt.co.id yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perusahaan dalam menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

The company always makes it easy for stakeholders to access Company information and data through the website www.jakartamrt.co.id which is presented in Indonesian and English. Aside from being a means of disseminating information to the public, this website is also the Company's effort to implement corporate governance practices and transparency to all stakeholders.

Untuk memperoleh laporan tahunan dan informasi lainnya dari Perusahaan, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat PT MRT Jakarta, dengan alamat sebagai berikut:

To obtain the annual report and other information from the Company, you may contact the Corporate Secretary at PT MRT Jakarta Head Office, with the following address:



**Wisma Nusantara, Lantai 21,
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350 - INDONESIA**

*Wisma Nusantara, 21st Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350 - INDONESIA*



(+62) 3103629 21



info@jakartamrt.co.id
corsec@jakartamrt.co.id

TATA KELOLA INFORMASI DAN AKSES DATA PERUSAHAAN UNTUK PIHAK EKSTERNAL

INFORMATION MANAGEMENT AND CORPORATE DATA ACCESS FOR EXTERNAL PARTIES

Perusahaan menyediakan akses informasi dan data Perusahaan untuk Pihak Eksternal dengan cara berikut:

The company provides access to company information and data for external parties in the following ways:

- **Pengelolaan Situs Web**
Perusahaan telah memiliki situs web resmi yang mencerminkan identitas Perusahaan dan dapat diakses melalui www.jakartamrt.co.id. Situs web ini menyediakan berbagai informasi, antara lain mengenai profil Perusahaan, visi dan misi, bidang usaha, informasi keuangan, berita terbaru, tanggung jawab sosial Perusahaan, keterbukaan informasi, dan lain-lain.

- **Website Management**
The company has an official website that reflects the Company's identity and can be accessed through www.jakartamrt.co.id. This website provides a variety of information, including company profiles, vision and mission, business fields, financial information, the latest news, corporate social responsibility, information disclosure, and others.

Situs web Perusahaan juga telah tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perusahaan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan. Situs web Perusahaan juga menyediakan No. kontak serta alamat *email* dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

The Company's website is also available in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The company regularly updates the website to always provide the latest information to stakeholders. The Company's website also provides contact numbers and e-mail and postal addresses that can be contacted for further communication with stakeholders.

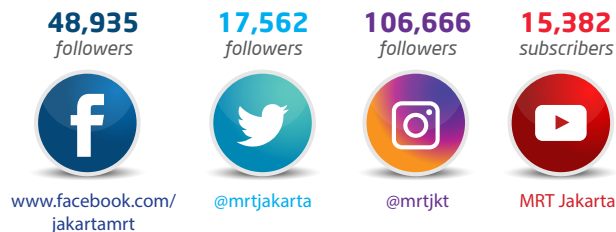


AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN COMPANY INFORMATION AND DATA ACCESS

- **Jejaring Sosial Perusahaan**
Perusahaan juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perusahaan membuka kanal komunikasi daring.
- **Corporate Social Media**
The company also pays attention to the development of social media as a communication facility for interaction with all stakeholders. For this reason, the Company opens an online communication channel.

Corporate Communication

Media Sosial (31 Desember 2018) Social Media (December 31, 2018)



Ad Value & PR Value (Januari -31 Desember 2018) Ad Value & PR Value (January - December 31, 2018)

Nilai Pemberitaan
PR Value

Setara/Equal to

Rp468 miliar/ billion



Nilai Iklan
Ad Value

Setara/Equal to

Rp173 miliar/ billion



- **Siaran Pers/Rilis Media dan Hubungan Media**
Perusahaan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi tentang Perusahaan kepada khalayak. Berikut disampaikan siaran pers/ rilis media serta hubungan media yang dilakukan di sepanjang tahun 2018.
- **Press Conference/Media Release and Media Relations**
The company uses mass media as a partner to disseminate information about the Company to the public. Following are the press conference/ media releases and media relations conducted throughout 2018.

Tanggal Date	Bentuk Kegiatan Form of Activities
11 Mei 2018 May 11, 2018	Penandatanganan PKS MRTJ dan KAI Signing of PKS MRTJ and KAI
14 Mei 2018 May 14, 2018	PT MRT Jakarta Gelar Lokakarya Pemutakhiran RJPP 2014-2030 dan RJMP 2018-2023 PT MRT Jakarta Holds 2014-2030 RJPP Update Workshop and 2018-2023 RJMP
22 Mei 2018 May 22, 2018	Penandatanganan MoU antara PT MRT Jakarta dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek Indonesia) MoU Signing between PT MRT Jakarta and PT Karya Anak Bangsa Application (Go-Jek Indonesia)
3 Juli 2018 July 03, 2018	Insiden Gulungan Kabel Terbakar di Jalur Layang MRT Jakarta Burning Cable Roll Incident at MRT Jakarta Elevated Lane
29 Juli 2018 July 29, 2018	Tahapan pekerjaan pembongkaran JPO Bundaran HI The stages of Bundaran HI JPO demolition
18 Agustus 2018 August 18, 2018	Kedatangan 4 rangkaian kereta MRT Jakarta Arrival of 4 MRT Jakarta train series



Tanggal Date	Bentuk Kegiatan Form of Activities
21 Agustus 2018 August 21, 2018	PT MRT Jakarta lanjutkan <i>System Acceptance Test</i> hingga ke Stasiun Bundaran Hotel Indonesia <i>PT MRT Jakarta continues the System Acceptance Test to Bundaran Hotel Indonesia Station</i>
23 Agustus 2018 August 23, 2018	Gubernur DKI Jakarta tinjau SAT hingga Stasiun Bundaran Hotel Indonesia <i>DKI Jakarta Governor reviews SAT up to Bundaran Hotel Indonesia Station</i>
4 September 2018 September 04, 2018	Dampak kelanjutan pembangunan stasiun bawah tanah MRT Jakarta <i>The impact of continuous construction of MRT Jakarta underground station</i>
19 September 2018 September 19, 2018	Rencana manajemen rekayasa lalu lintas terkait pekerjaan pembangunan akses pemadam kebakaran dan halte busway Transjakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia <i>Traffic Simulation management plan related to the construction work of access to firefighters and Transjakarta busway stops at Bundaran Hotel Indonesia Station</i>
21 September 2018 September 21, 2018	Aksi Vandalisme terhadap kereta MRT Jakarta <i>Vandalism against MRT Jakarta train</i>
1 oktober 2018 October 01, 2018	Perkembangan atas kejadian aksi vandalisme terhadap kereta MRT Jakarta <i>Case development on vandalism against MRT Jakarta train</i>
24 Oktober 2018 October 24, 2018	Penandatanganan Perjanjian pinjaman ODA untuk pembangunan MRT Jakarta fase 2 <i>Signing of ODA loan agreement for MRT Jakarta phase 2 construction</i>
23 November 2018 November 23, 2018	MoU PT MRT Jakarta dan Transjakarta <i>MoU of PT MRT Jakarta and Transjakarta</i>
28 Desember 2018 December 28, 2018	Peresmian Pusat Informasi MRT Jakarta <i>Inauguration of MRT Jakarta Information Center</i>

Hubungan Media Media Relations

Tanggal Date	Bentuk Kegiatan Form of Activities
29 Januari 2018 January 29, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan Januari <i>Journalist and Blogger forum in January</i>
31 Januari 2018 January 31, 2018	Media Visit Jawa Pos
27 Februari 2018 February 27, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan Februari <i>Journalist and Blogger forum in February</i>
28 Maret 2018 March 28, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan Maret <i>Journalist and Blogger forum in March</i>
26 April 2018 April 26, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan April <i>Journalist and Blogger forum in April</i>
30 Mei 2018 May 30, 2018	Forum Jurnalis/Blogger bulan Mei dan Buka Bersama Direksi PT MRT Jakarta <i>Journalist / Blogger Forum in May and Fast-breaking with the Directors of PT MRT Jakarta</i>
28 Juni 2018 June 28, 2018	Halal Bihalal dan Forum Jurnalis dan Blogger bulan Juni <i>Idul Fitr Gathering and Journalist and Blogger forum in June</i>
26 Juli 2018 July 26, 2018	Forum Jurnalis & Blogger MRT Jakarta bulan Juli <i>MRT Jakarta Journalist and Blogger forum in July</i>



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
COMPANY INFORMATION AND DATA ACCESS

Tanggal Date	Bentuk Kegiatan Form of Activities
28 Agustus 2018 August 28, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan Agustus Journalist and Blogger forum in August
29 November 2018 November 29, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan November Journalist and Blogger forum in November
27 Desember 2018 December 27, 2018	Forum jurnalis dan blogger bulan Desember Journalist and Blogger forum in December
Oktober – Desember October - December	MRT Fellowship Program

- Laporan Tahunan**
Perusahaan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan dan penyampaian Laporan Tahunan juga merupakan bentuk pemenuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan dan informasi Perusahaan serta salah satu syarat pelaksanaan RUPS.
- Kunjungan Lapangan**
Perusahaan juga memberikan program kegiatan kunjungan lapangan atau *site visit* sebagai bentuk edukasi moda transportasi MRT Jakarta kepada masyarakat. *Site visit* saat pembangunan proyek diharapkan dapat memberikan perspektif yang menyeluruh terkait MRT Jakarta, mulai dari pendekatan studi, pembangunan tata kota, ataupun pembentukan perilaku masyarakat terhadap layanan publik.
- Korespondensi dan Laporan Berkala**
Informasi keuangan dan *non* keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan.
- Annual report**
The company also publishes an Annual Report book that is shared with shareholders and other stakeholders. The issuance and submission of the Annual Report is also a form of fulfillment of the Company regarding the provisions of Company regulations and information as well as one of the conditions for the implementation of the GMS.
- Site Visit**
The company also provides a site visit program as a form of MRT transportation mode for Jakarta to the public. Site visits during project development is expected to provide a comprehensive perspective on MRT Jakarta, starting from a study approach, urban planning development, or the formation of community behavior towards public services.
- Periodic correspondence and reports**
Financial and non-financial information from the Company has been prepared and reported transparently to the required shareholders, stakeholders and other institutions. Information is reported according to the target time, presented in full and accurate, current, complete and adequate in accordance with the procedures, types and coverage as stipulated in the provisions concerning Transparency of the Company's Financial Conditions.



Di bawah ini disajikan korespondensi Perusahaan selama tahun 2018.

The Company correspondence during 2018 is presented below:

Korespondensi Kepada <i>Correspondence to</i>	Frekuensi <i>Frequency</i>	Perihal <i>Subject</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Direktur Utama PD Pasar Jaya 3. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 5. Menteri Perhubungan RI 6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 7. Menteri Keuangan RI 8. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 9. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI 1. <i>Regional Secretary of DKI Jakarta Provincial Government</i> 2. <i>President Director of PD Pasar Jaya</i> 3. <i>Republic of Indonesia Minister of PPN / Head of Bappenas</i> 4. <i>Republic of Indonesia Minister of Public Works and Public Housing</i> 5. <i>Republic of Indonesia Minister of Transportation</i> 6. <i>Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs</i> 7. <i>Republic of Indonesia Minister of Finance</i> 8. <i>Republic of Indonesia Deputy of Coordination of Infrastructure Acceleration and Regional Development of Coordinating Ministry for Economic Affairs</i> 9. <i>Republic of Indonesia Ministry of Transportation Director General of Railways</i> 	12	<p>Laporan kemajuan pembangunan proyek MRT Jakarta <i>Progress report on MRT Jakarta Phase I Construction Project</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Direktur Utama PD Pasar Jaya 3. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 5. Menteri Perhubungan RI 6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 7. Menteri Keuangan RI 8. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 9. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI 1. <i>Regional Secretary of DKI Jakarta Provincial Government</i> 2. <i>President Director of PD Pasar Jaya</i> 3. <i>Republic of Indonesia Minister of PPN / Head of Bappenas</i> 4. <i>Republic of Indonesia Minister of Public Works and Public Housing</i> 5. <i>Republic of Indonesia Minister of Transportation</i> 6. <i>Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs</i> 7. <i>Republic of Indonesia Minister of Finance</i> 8. <i>Republic of Indonesia Deputy of Coordination of Infrastructure Acceleration and Regional Development of Coordinating Ministry for Economic Affairs</i> 9. <i>Republic of Indonesia Ministry of Transportation Director General of Railways</i> 	12	<p>Laporan kemajuan pembangunan proyek MRT Jakarta Fase II <i>Progress report on MRT Jakarta Phase II Construction Project</i></p>



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
COMPANY INFORMATION AND DATA ACCESS

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Pihak Internal

Information Management and Corporate Data Access for Internal Parties

RAGAM MEDIA

Di bawah ini tabel yang menggambarkan lini media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait korporasi, aktivitas operasional dan capaian-capaian kinerja serta kegiatan-kegiatan lainnya.

VARIETY OF MEDIA

Below is a table that describes the lines of communication media used by the Company to deliver data and information related to corporation, operational activities and performance achievements and other activities.

Kepada To	Bentuk Media Form of Media
Regulator <i>Regulator</i>	Laporan Kemajuan Pembangunan MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Development Progress Report</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Laporan Bulanan Kemajuan Pembangunan MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Monthly Development Progress Report</i>
Lembaga Publik/ <i>Public Institution</i>	Sosialisasi dalam bentuk penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta <i>Dissemination in the form of visits to the office/location of MRT Jakarta project</i>
Konsumen/Calon Konsumen/ <i>Consumer/ Prospective Consumer</i>	Sosialisasi dalam bentuk penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta, Situs Web Perusahaan, media sosial, pameran, penyebaran flyer/brosur, <i>school roadshow</i> <i>Dissemination in the form of visits to the office/location of MRT Jakarta project, Company website, social media, exhibitions, distribution of flyers/brochures, school roadshow</i>
Karyawan <i>Employee</i>	Situs Web Perusahaan, Media Sosial, <i>Town Hall Meeting</i> <i>Company Website, Social Media, Town Hall Meeting</i>
Perusahaan Sejenis Lainnya <i>Other similar company</i>	Situs Web Perusahaan, Media Sosial, penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta <i>Company Website, Social Media, visits to the office/location of MRT Jakarta project</i>
Mitra Kerja dan Rekanan <i>Partners and Associates</i>	Situs Web Perusahaan, Media Sosial, penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta <i>Company Website, Social Media, visits to the office/location of MRT Jakarta project</i>
Organisasi Profesi <i>Professional Organization</i>	Situs Web Perusahaan, Media Sosial <i>Company Website, Social Media</i>
Masyarakat/Umum <i>Public</i>	Situs Web Perusahaan, media sosial, pameran, penyebaran flyer/brosur, siaran pers <i>Company Website, social media, exhibitions, distribution of flyers/brochures, press releases</i>

Pemangku Kepentingan MRT Jakarta
MRT Jakarta Stakeholders

Karyawan <i>Employees</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemerintah <i>Government</i>	Masyarakat dan Lingkungan <i>Community and Environment</i>
Mitra Usaha <i>Business Partners</i>	Pemasok <i>Suppliers</i>	Kreditur <i>Creditors</i>	Media Massa dan Media Sosial <i>Mass Media and Social Media</i>



KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

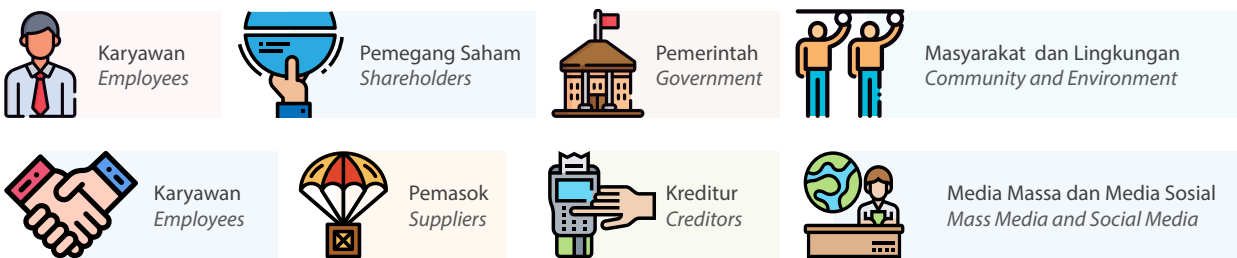
Kode Etik, atau *Code of Conduct*, merupakan pijakan paling mendasar baik bagi Perusahaan sendiri, manajemen, pemangku kepentingan maupun pemegang saham dalam menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan Perusahaan dan asas kepatutan. Kode Etik berperan penting sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan etika kerja antar elemen dalam Perusahaan, khususnya terkait hubungan yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan Perusahaan.

Landasan utama Kode Etik Perusahaan adalah visi dan misi, di mana visi dan misi menjadi proyeksi pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan. Hubungan yang Harmonis dengan Pemangku Kepentingan Salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Perusahaan merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Perusahaan maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

Code of Conduct is the most fundamental basis for the Company, management, stakeholders, and Shareholders in building relations according to the objectives and principle of propriety. Code of Conduct plays an important role as guidelines governing work ethics relations between company elements, specifically related to relations based on professionalism which is expected to continue to provide added value to the Company's management process.

Vision and Mission has become the main foundation of Company's Code of Conduct as sustainable growth projection of the Company. Harmonious Relations with Stakeholders is one of the major objectives of the GCG principles implementation as a development of business entity relationships with the stakeholders. The company formulates its Code of Conduct to be able to establish a harmonious relationship between the Company's operational and business interests with the interests of each stakeholder within the Company's operating and business circles and those affected by the Company's operations and business activities.

Pemangku Kepentingan MRT Jakarta MRT Jakarta Stakeholders





VISI, MISI DAN NILAI BUDAYA PERUSAHAAN SEBAGAI PANGLIWA

Perusahaan telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai panglima utama dalam arahan bagi pengembangan Perusahaan ke depan.

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURAL VALUE AS COMMANDER IN CHIEF

The company has formulated and determined its vision and mission as the main commander in the direction for the Company's future development.



VISI/ VISION

Untuk menjadi penyedia sarana transportasi publik terdepan, yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan.

To become the leading provider of public transportation, committed to encourage economic growth through mobility improvement, traffic reduction and the development of urban transit systems.

MISI/ MISSION

Untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua hal yang kami lakukan melalui:

- Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya dan nyaman;
- Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan,
- Membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan, menginspirasi dan memotivasi tenaga kerja kami.

To strive for excellence in sustainable way in all our undertakings through the following:

- *Development and operation of safe, trusted and comfortable public transportation network;*
- *Rejuvenation of urban environment through prominent urban transit development; and,*
- *Building reputation as the preferable company by involving, inspiring and motivating our manpower.*

Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan dalam nilai-nilai luhur dan budaya kerja yang disebut sebagai Nilai-nilai Perusahaan. Tata nilai ini menjadi acuan bagi seluruh elemen dalam Perusahaan untuk menciptakan kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan Perusahaan ke depan.

The Vision and Mission is derived into the noble values and work culture known as Corporate Values. These values have become reference for all elements of the Company to create a collaboration that could encourage the growth of the Company in the future.

Nilai-nilai Perusahaan adalah rambu atau pagar yang menjadi koridor bagi setiap individu dan organisasi Perusahaan dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi secara berkesinambungan. 4 (empat) tata nilai yang dipilih dan disingkat *I CAN* merupakan tata nilai yang menjadi acuan Perusahaan dalam melakukan kegiatannya termasuk dalam melakukan evaluasi kinerja individu maupun tim kerja.

Corporate Values are signs or guardrail that become a corridor for each Company's people and organization in carrying out the mission to realize the vision on an ongoing basis. The four values chosen and abbreviated as I CAN are reference values for the Company in carrying out its activities including evaluating the performance of individuals and work teams.

Nilai-nilai luhur dan Budaya Perusahaan, yaitu:

- *Integrity*
Setiap Insan Perusahaan secara konsisten menampilkan sikap jujur dan "satu kata dengan perbuatan" sesuai dengan pedoman perilaku dan Tata Kelola Perusahaan.
- *Customer Focus*
Setiap Insan Perusahaan menampilkan sikap empati dan proaktif dalam memahami, membantu & melayani kebutuhan pelanggan serta membangun relasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

The "I CAN" values are detailed as follows:

- *Integrity*
Each Company's people must consistently display honesty and "one word with action" principles according to corporate governance and code of conduct.
- *Customer Focus*
Each Company's people must proactively understand, assist & serve customer's need as well as building good relation with all stakeholders.



- *Achievement Orientation*

Setiap Insan Perusahaan memiliki semangat dan kegigihan untuk berprestasi dan berani menghadapi tantangan dengan cara kerja yang efektif dan efisien.

- *Nurturing Team Work*

Setiap Insan Perusahaan menghargai perbedaan & kontribusi setiap individu serta membangun komitmen Bersama untuk bersinergi secara produktif dan efektif demi perwujudan visi Perusahaan.

- *Achievement Orientation*

Each Company's people has the spirit to create achievements and to face challenges with effective and efficient procedures.

- *Nurturing Team Work*

Each Company's people appreciates differences and contributions of other individuals as well as building commitment to productively creating synergy.



Visi & Misi
Vision & Mission



Nilai-nilai Perusahaan
Corporate Values



Kode Etik
Code of Conduct

ISI KODE ETIK PERUSAHAAN DAN PENETAPANNYA

Perusahaan memiliki Kode Etik, atau *Code of Conduct*, yang tertuang dalam bentuk pernyataan secara tertulis tentang nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh Insan Perusahaan. Kode Etik Perusahaan telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 071-1 Tahun 2018.

Kode Etik Perusahaan mengatur beberapa perilaku yang ideal yang wajib dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini sesuai dengan budaya Perusahaan, di antaranya:

1. Kepatuhan terhadap hukum
 - » Setiap Insan Perusahaan harus patuh dan tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten;
 - » Setiap Insan Perusahaan harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan;
 - » Setiap Insan Perusahaan tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan;
 - » Setiap Insan Perusahaan harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan termasuk dengan bidang terkait lainnya.
2. Memberi
 - » Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan korupsi termasuk tindakan penyuapan dalam segala macam bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

COMPANY CODE OF CONDUCT AND ITS DETERMINATION

The Company's code of conduct is set out in written statement related to ethical values prevailing in the Company's environment as well as becoming policy and standard of conduct which must be obeyed by all individuals of the Company. The Company Code of Conduct has been established through the Board of Directors Regulation Number 071-1 Year 2018

The code of conduct regulates several ideal behaviors which must be implemented based on the values in accordance with Corporate culture, among others:

1. *Compliance with the law*
 - » *Each Company's people must comply with applicable laws and regulations and implement them consistently;*
 - » *Each Company's people must avoid any actions and behaviors that can lead to violations of law and decency;*
 - » *Each Company's people does not engage in unlawful cooperation with other parties that can harm the Company;*
 - » *Each Company's people must understand the applicable laws and regulations in the context of work, including with other related fields.*
2. *Giving*
 - » *Company's people are prohibited from committing acts of corruption including acts of bribery in all forms, both directly and indirectly.*



KODE ETIK CODE OF CONDUCT

- » Insan Perusahaan dilarang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu, kepada Pemasok, Kontraktor, Konsultan, Mitra Kerja, Pejabat Pemerintah atau Pihak Ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perusahaan, baik langsung ataupun tidak langsung
 - » Hadiah dapat diberikan kepada Pihak Ketiga apabila dilakukan dalam konteks bisnis, tidak menimbulkan benturan kepentingan dan dengan jumlah tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemberian hadiah dilakukan pada saat kunjungan kerja, studi banding, seminar/workshop, atau hari ulang tahun Perusahaan dan dilakukan oleh Insan Perusahaan atas nama Perusahaan, bukan atas nama pribadi.
3. Menerima
- » Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak manapun, baik langsung ataupun tidak langsung, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Insan Perusahaan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - » Sesuatu dapat diterima Insan Perusahaan, hanya dalam bentuk barang, dengan nilai yang wajar dan dalam hubungan atas nama Perusahaan (bukan pribadi), terbatas pada benda-benda promosi dengan logo suatu perusahaan, cinderamata atau makanan.
 - » Perusahaan dapat memberikan donasi untuk tujuan amal, dalam batas nilai yang wajar. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi harus mendapatkan persetujuan atasan yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
4. Business Meeting
- » Insan Perusahaan dilarang melakukan pertemuan di luar kantor hanya berdua dengan pihak ketiga. Pada saat melakukan pertemuan (*business meeting*), sebaiknya dilakukan di dalam kantor atau jika harus di luar kantor, hendaknya dilakukan dengan atasan langsung atau rekan lainnya.
 - » Insan Perusahaan dilarang melakukan rapat dan pertemuan seorang diri dengan pimpinan/karyawan Calon Vendor/Vendor/peserta pelelangan/Perusahaan penyedia barang/jasa perusahaan melainkan harus didampingi oleh Insan Perusahaan lainnya, baik itu atasan atau bawahan satu tingkat darinya.
- » *Company's people are prohibited from giving or promising anything, to Suppliers, Contractors, Consultants, Business Partners, Government Officials or other Third Parties related to the Company, either directly or indirectly*
 - » *Gifts can be given to Third Parties if they are carried out in a business context, not causing a conflict of interest and not exceeding IDR 1,000,000 (one million rupiah). Gifts are given during work visits, comparative studies, seminars / workshops, or the anniversary of the Company and are carried out by Company's people on behalf of the Company, not on personal behalf.*
3. Receiving
- » *Company's people are prohibited from accepting gifts from any party, either directly or indirectly, which is known and reasonably suspected that the gift is given so that the Company's people do or do not do something in their position that is contrary to their obligations.*
 - » *Something can be received by Company's people, only in the form of goods, with reasonable values and in relation to the name of the Company (not personal), limited to promotional objects with a Company logo, souvenirs or food.*
 - » *The Company may give donations for charitable purposes, within reasonable limits. All expenditures related to donations must get the approval of the superior who is authorized and can be clearly accounted for.*
4. Business Meeting
- » *Company's people are prohibited from meeting outside the office alone with third parties. When conducting a meeting (business meeting), it should be done in the office or if it must be outside the office, it should be done with a direct supervisor or other colleagues.*
 - » *Company's people are prohibited from conducting meetings and meetings by themselves with the leadership / employees of Prospective Vendors / Vendors / auction participants / the Company providing goods / services of the Company but must be accompanied by other Company's people, either they one-level superiors or subordinates.*



-
- » Dalam hal pertemuan bisnis di tempat mitra kerja, Insan Perusahaan tidak diperkenankan menerima pelayanan berupa: Pelayanan jamuan, Pelayanan transportasi, Pelayanan penginapan (*lodging*) dan Kegiatan olahraga, kecuali yang bersifat umum dan dalam batasan nilai wajar, serta tidak menimbulkan pembiayaan ganda.
5. *Sharing Knowledge*
- » Dengan izin atasan, Insan Perusahaan dapat melakukan *sharing knowledge* sebagai narasumber, pembicara dalam seminar, atau kegiatan sejenis lainnya dengan pihak lain. Atas kegiatan tersebut, Insan Perusahaan dapat menerima honor, insentif atau penghasilan lain dalam bentuk uang atau setara uang sebesar nilai resmi yang dikeluarkan atau diatur oleh pihak pemberi.
6. *Political Activities*
- » Perusahaan dilarang terlibat dan mendukung partai politik manapun.
 - » Perusahaan tidak melarang dan tidak mencegah Insan Perusahaan untuk melaksanakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.
 - » Insan Perusahaan tidak diperkenankan menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu.
 - » Insan Perusahaan dapat diperkenankan sebagai calon legislatif hanya dari wakil independen atau DPD. Namun setelah penetapannya sebagai calon legislatif, Insan Perusahaan tersebut harus mengundurkan diri dari Perusahaan.
7. *Confidentiality of Company Data and Information*
- » Insan Perusahaan dilarang menyembunyikan dokumen Perusahaan selama menjabat dan atau setelah menyelesaikan masa tugasnya.
 - » Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan atau menggunakan dokumen Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, dan pihak manapun selain untuk kepentingan Perusahaan.
 - » Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menyampaikan data atau dokumen Perusahaan kepada pihak lain yang bukan kewenangannya.
 - » Insan Perusahaan dilarang membicarakan informasi material mengenai Perusahaan kepada siapapun, termasuk suami, istri, anak, sanak saudara dan Insan Perusahaan lainnya, kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal tersebut.
- » *In the case of business meetings at business partners, Company's people are not permitted to receive services in the form of entertainment services, transportation services, lodging services and sports activities, except those of a general nature and within fair value limits, and do not cause multiple financing.*
5. *Sharing Knowledge*
- » *With the superiors' permission, Company's people may share knowledge as resource persons, speakers in seminars, or other similar activities with other parties. For these activities, Company's people may receive honorarium, incentives or other income in the form of money or money equivalent equal to the official value issued or regulated by the giver.*
6. *Political Activities*
- » *The Company is prohibited from engaging and supporting any political party.*
 - » *The Company does not prohibit and does not prevent Company's people from exercising their rights to vote in general elections.*
 - » *Company's people are not permitted to become a member or administrator of certain political parties.*
 - » *Company's people may be allowed as legislative candidates only from independent representatives or DPD. However, after the determination as a legislative candidate, the Company's people must resign from the Company.*
7. *Confidentiality of Company Data and Information*
- » *Company's people are prohibited from hiding Company documents during their term of office and or after completing their term of office.*
 - » *Company's people are prohibited from utilizing or using Company documents for personal, family, group and any other parties other than for the interests of the Company.*
 - » *Company's people are prohibited from giving or delivering Company data or documents to other parties that are not their authority.*
 - » *Company's people are prohibited from discussing material information about the Company to anyone, including their husbands, wives, children, relatives and other Company's peoples, unless colleagues who need to know about it.*



KODE ETIK CODE OF CONDUCT

- » Bagi Insan Perusahaan yang tidak bekerja lagi di Perusahaan, dilarang keras mengambil data dan informasi rahasia sebelum meninggalkan Perusahaan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh Insan Perusahaan yang bersangkutan, menjadi hak milik Perusahaan sepenuhnya. Insan Perusahaan tidak diperkenankan untuk membawa dokumen apapun.
8. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan
- » Perusahaan mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset Perusahaan.
 - » Seluruh aset Perusahaan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan.
 - » Insan Perusahaan wajib menjaga keamanan aset Perusahaan.
 - » Insan Perusahaan wajib memelihara dan merawat aset Perusahaan.
 - » Insan Perusahaan wajib menggunakan aset Perusahaan dengan sebaik-baiknya.
 - » Insan Perusahaan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan di luar kepentingan Perusahaan.
 - » Insan Perusahaan mengganti kerugian Perusahaan akibat kesalahan atau kelalaiannya.
 - » Penggunaan aset yang melekat pada jabatan harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam keadaan baik jika Insan Perusahaan sudah dimutasi atau sudah tidak menjabat lagi, kecuali ditetapkan lain oleh kebijakan Perusahaan.
 - » Insan Perusahaan berkewajiban untuk melaporkan indikasi maupun terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan kepada atasan langsung ataupun melalui mekanisme *whistleblowing system*.
9. Komitmen terhadap Keselamatan dan Lingkungan Hidup
- » Perusahaan menjamin pemenuhan hak-hak karyawan sebagaimana ditetapkan oleh perundangan dan menjamin kesetaraan *gender* dalam semua aspek pengelolaan korporasi;
 - » Perusahaan senantiasa mengutamakan Keselamatan Kerja dan Pengelolaan Kesehatan Karyawan untuk mewujudkan perlindungan bagi karyawannya sekaligus menciptakan tempat kerja yang aman;
 - » Perusahaan berkomitmen tinggi untuk mencegah terjadinya polusi akibat proses layanan masyarakat maupun proses pengelolaan korporasi;
- » *For Company's people who no longer work at the Company, it is strictly prohibited to take confidential data and information before leaving the Company. All documents that have been made by the relevant Company's people are fully owned by the Company. Company's people are not allowed to carry any documents.*
8. *Supervision and Use of Company Assets*
- » *The Company follows generally accepted accounting and reporting standards in recording and reporting on the Company's assets.*
 - » *All assets of the Company must be used effectively and efficiently to achieve the Company's objectives.*
 - » *Company's people must maintain the security of the Company's assets.*
 - » *Company's people must maintain the Company's assets.*
 - » *Company's people must use the Company's assets as well as possible.*
 - » *Company's people are prohibited from misusing Company assets for interests outside the interests of the Company.*
 - » *Company's people replace Company losses due to errors or omissions.*
 - » *The use of assets inherent in the position must be returned to the Company in good condition if the Company's people have been transferred or have no longer served, unless otherwise stipulated by Company policy.*
 - » *Company's people are obliged to report indications and occurrences of fraud in the Company to direct superiors or through a whistleblowing system mechanism.*
9. *Commitment to Safety and Environment*
- » *The Company guarantees the fulfillment of employee rights as stipulated by legislation and guarantees gender equality in all aspects of corporate management;*
 - » *The Company always prioritizes Work Safety and Employee Health Management to create protection for its employees while creating a safety workplace;*
 - » *The Company is highly committed to preventing pollution due to the community service process and the corporate management process;*



- » Dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat, Perusahaan juga akan mengedepankan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat pengguna maupun masyarakat yang berada dalam lingkungan layanan MRT Jakarta;
- » Dalam melaksanakan pembangunan sistem perkeretaapian, Perusahaan mengutamakan kepatuhan pada ketentuan perundangan untuk menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak akibat proses pembebasan lahan maupun pelaksanaan operasi;
- » Dalam melaksanakan operasional perusahaan, Perusahaan berkomitmen untuk menjaga dan melindungi serta turut dalam upaya-upaya untuk mewujudkan kelestarian lingkungan yang di wujudkan melalui aspek *design* - pilihan teknologi - maupun aplikasi proses kerja serta akan senantiasa berupaya mengutamakan terwujudnya lingkungan yang lestari.

10. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan. Perusahaan mewajibkan seluruh Insan Perusahaan untuk menjaga integritas bisnis dan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- » Perusahaan menetapkan situasi-situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada insan Perusahaan.
- » Perusahaan mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila ada pemasok/kontraktor/konsultan/pemberi jasa yang sedang/akan melakukan hubungan kerja dengan Perusahaan terdapat hubungan keluarga atau mengalami (potensi) benturan kepentingan.
- » Apabila terdapat potensi benturan kepentingan oleh pejabat pemutus, maka unit kerja pemrakarsa mengikutsertakan unit kerja yang independen untuk melakukan pembahasan bersama sehingga transaksi yang merugikan dapat dihindari.

11. Minuman Keras, Narkoba, Judi dan Kegiatan Lain yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

- » Dilarang minum minuman keras, menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, bermain judi dalam segala bentuk dan kegiatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- » Wajib menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman;

» In carrying out services to the community, the Company will also prioritize safety and security for the user community and the community within the MRT Jakarta service environment;

» In carrying out the construction of the railway system, the Company prioritizes compliance with the provisions of legislation to safeguard the rights of affected communities due to the process of land acquisition and operation;

» In carrying out company operations, the Company is committed to safeguarding and protecting and participating in efforts to realize environmental sustainability that is realized through design aspects - technology choices - and application of work processes and will always strive to prioritize the realization of a sustainable environment.

10. Conflict of Interest

Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the economic interests of the Company and the personal economic interests of Shareholders, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the employees. The Company requires all personnel to maintain the integrity of the business and support the principles of fair competition in accordance with the applicable laws and regulations.

» The Company establishes situations that may pose a conflict of interest to the Company's people.

» The Company regulates actions that must be conducted if there is a supplier/contractor/consultant/ employer that is/will make working relationship with the Company have family relations or potentially have conflict of interests.

» If there is any potential conflict of interest by official being the decision-maker, therefore the initiator work units include independent work units to conduct multi-party discussions to avoid any harmful transactions.

11. Liquor, Narcotics, Gambling and Other Activities that Violate Legislation

» Company's people are Prohibited from drinking liquor, using drugs and illegal drugs, gambling in all forms and other activities that violate the laws and regulations;

» Company's people must create a healthy and comfortable work environment;



KODE ETIK CODE OF CONDUCT

- » Memulai pekerjaan dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk bekerja.
12. Pernyataan Kepatuhan dan Pelanggaran
- » Setiap Insan Perusahaan akan menandatangani surat pernyataan kepatuhan atas pemberlakuan Kode Etik yang merupakan komitmen bahwa Insan Perusahaan secara sungguh-sungguh dan sepakat menerapkan Kode Etik.
 - » Setiap pelanggaran atas Kode Etik merupakan suatu tindakan yang akan dikenakan sanksi yang ditetapkan Direksi.
- » *Company's people starting work in physical and mental conditions that are ready to work.*
12. *Statement of Compliance and Violation*
- » *Each Company's people will sign a letter of statement of compliance with the implementation of the Code of Conduct which is a commitment that the Company's employees sincerely and agree to implement the Code of Conduct.*
 - » *Every violation of the Code of Conduct is an action that will be subject to sanctions set by the Board of Directors.*

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KODE ETIK PERUSAHAAN KEPADA KARYAWAN

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan dilakukan dengan membagikan buku Pedoman Kode Etik. Sebagai tanda telah dibaca dan dipahami, setiap Insan Perusahaan menandatangani Kode Etik Perusahaan.

DISSEMINATION AND INTERNALIZATION OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT TO EMPLOYEES

Dissemination of the Company's Code of Conduct to all Company's employees is done by distributing the Code of Conduct Guidelines. As a sign that has been read and understood, each company member signs the Code of Conduct for the Company.



PERNYATAAN KEPATUHAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, telah menerima, membaca, dan memahami serta akan mematuhi kebijakan dan pedoman perilaku PT MRT Jakarta sesuai dengan Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT MRT Jakarta, tanggal 30 April 2018.

Jakarta,

.....
Nama Lengkap



PENEGAKAN KODE ETIK

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penegakan Kode Etik di seluruh lini Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku dikenakan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin Perusahaan yang berlaku.

Mekanisme penegakan Kode Etik diatur sebagai berikut:

1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau *email* kepada atasan langsung pegawai dan Internal Audit & Compliance.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Pelaksanaan proses pemeriksaan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran kode etik.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi sepanjang tahun 2018

KAJIAN DAN EVALUASI MANAJEMEN

Manajemen secara konsisten melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan, termasuk keterkaitan antara visi, misi dan budaya Perusahaan serta kode etik dengan rencana jangka panjang dan profil risiko yang dihadapi Perusahaan. Penerapan Kode Etik juga menjadi kajian manajemen untuk menjadi salah satu perangkat evaluasi keorganisasian Perusahaan.

ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT

The company is committed to enforce the Code of Conduct in all lines of the Company. Any violation against the Code of Conduct is subject to the provisions of violations of applicable Company discipline.

The enforcement mechanism of the Code of Conduct is regulated as follows:

1. *There are reports of Code of Conduct violations either through media letters or e-mails to direct supervisors of employees and Internal Audit & Compliance.*
2. *Every incoming report will be taken seriously and will be followed up according to the procedure.*
3. *Implementation of the inspection process.*
4. *Determination of sanctions if the results of the investigation state that employees violate the Code of Conduct.*

NUMBER OF VIOLATIONS AGAINST THE CODE OF CONDUCT

There is no violation against the Company's Code of Conduct occurred throughout 2018

MANAGEMENT REVIEW AND EVALUATION

Management consistently conducts studies in order to evaluate the Company's performance, including the relationship between the vision, mission and corporate culture as well as the Code of Conduct with long-term plans and risk profiles faced by the Company. The implementation of the Code of Conduct is also a study of management to be one of the evaluation tools for the Company's organization.



ETIKA PENYEBARAN INFORMASI NON-PUBLIK

ETHICS OF DISSEMINATING NON-PUBLIC INFORMATION

Untuk meminimalisir benturan kepentingan, Perusahaan menekankan pentingnya etika penyebaran informasi non-publik oleh Insan Perusahaan. Segenap Insan perusahaan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi non-publik mengenai Perusahaan serta yang berkaitan dengan pelanggan, *provider*, maupun pihak lainnya yang diperoleh selama bekerja di Perusahaan. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan baik pada masa bakti sebagai pegawai maupun masa purna bakti.

To minimize conflicts of interest, the Company emphasizes the importance of the ethics of disseminating non-public information by Company's people. All company employees are required to maintain the confidentiality of all non-public information regarding the Company and related to customers, providers, and other parties obtained while working in the Company. Disclosure of confidential information to unauthorized parties is prohibited from being carried out both in terms of service and post-employment.



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL

PT MRT Jakarta berkomitmen untuk menghindari praktik Gratifikasi di dalam kegiatan kerja sehari-hari dengan menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Direksi No. 042-1 Tahun 2017. Pedoman ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan PT MRT Jakarta serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT MRT Jakarta. Pada penyusunannya, Pedoman Pengendalian Gratifikasi antara lain mengacu pada Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi. Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah dipublikasikan dalam *website* Perusahaan.

Beberapa hal yang diatur didalam Peraturan Direksi No. 042-1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Gratifikasi yang Wajib dilaporkan:
 - » Penerimaan terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi). Dalam hal ini termasuk, akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olahraga golf, tenis lapangan, *voucher* hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Perusahaan di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan Perusahaan tersebut;
 - » Penerimaan dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan proses penerimaan/promosi/mutasi Insan Perusahaan yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
 - » Penerimaan dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - » Penerimaan sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, uang dan/atau setara uang, termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan cek, yang diberikan kepada Insan Perusahaan dari Pihak Ketiga (vendor, mitra kerja atau pihak lainnya) yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya;

PT MRT Jakarta is committed to avoid the practice of Gratification in daily work activities by publishing the Guidelines for Gratification Control based on Directors' Regulation Number 042-1 Year 2017. This guidance regulates the granting and receiving of Gratification carried out by PT MRT Jakarta's people and Gratification prevention and control efforts within PT MRT Jakarta. In its preparation, the Guidelines for Gratification Control refer to, among other things, KPK Regulation No. 6 of 2015 concerning Amendments to KPK Regulation No. 2 of 2014 concerning Reporting Guidelines and Determination of Status of Gratification and Circular of the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Number. B.1341 / 01-13 / 03/2017 dated March 15, 2017 concerning Guidelines and Limitation of Gratification. The Gratification Control Guidelines have been published on the Company's website.

Some matters stipulated in the Board of Directors' Regulation Number 042-1 Year 2017 concerning the Guidelines for Gratification Control are as follows:

1. *Acceptance of Gratification that Must Be Reported:*
 - » *Acceptance related to carrying out official travel (outside official / official acceptance). In this case, accommodation, facilities, equipment and / or vouchers include and but are not limited to airline tickets, hotel vouchers, golf sports, tennis courts, entertainment vouchers that are carried out related to the implementation of the duties and obligations of the Company's people in Third Party companies that do not relevant / not related to the purpose of assigning such Company's people;*
 - » *Acceptance in any form from Third Parties in connection with the process of acceptance / promotion / transfer of Company's people which is usually carried out as an introductory sign;*
 - » *Acceptance in the process of communication, negotiation and implementation of activities with other parties related to the implementation of their duties and authorities;*
 - » *Acceptance as an expression of gratitude before, during or after the process of procuring goods and services. In this case, money and / or money equivalents, including but not limited to vouchers and checks, are given to Company's people from Third Parties (vendors, work partners or other parties) related to the process of procurement of goods and services, in connection with having been elected or completion of a job (project) and / or other activities;*



PENGENDALIAN GRATIFIKASI GRATIFICATION CONTROL

- » Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/ atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Perusahaan dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, biro perjalanan, dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
- » Penerimaan bingkisan/parsel dalam bentuk apapun dan harga berapapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- » Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki Benturan Kepentingan;
- » Penerimaan uang/barang dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan potensi Benturan Kepentingan kepada Insan Perusahaan dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- » Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Penerima yang melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- » Pemberian sesama karyawan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- » Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
- » *Unofficial grants in the form of money and / or money equivalent, goods, facilities or accommodations received by Company's people from the Third Party who are partners, including but not limited to Notaries, Insurance Companies, Banks, travel agencies, and / or Companies / Other Consultant Firms for ongoing cooperation / cooperation agreements;*
- » *Acceptance of gifts / parcels of any kind and prices of any kind from Third Parties in connection with the celebration of religious holidays;*
- » *Giving due to family relations, namely from grandparents, father / mother / father-in-law, husband / wife, children / daughter-in-law, grandchildren, family-in-laws , uncle / aunt, brother / sister / brother-in-law, cousins and nieces who have Conflict of Interest;*
- » *Acceptance of money / goods from parties who have office relations and potential Conflict of Interest to Company's people in activities such as weddings, births, aqiqah, baptism, circumcisions, tooth filing, religious / customary / other traditional ceremonies that exceed Rp1,000,000, - (one million rupiah) per gift per person;*
- » *Giving related to disaster or disaster experienced by the Recipient, father / mother / father-in-law, husband / wife, or Recipient child that exceeds Rp1,000,000 (one million rupiah) per gift per person;*
- » *Giving fellow employees in the framework of welcome/ farewell, retirement, promotion and birthdays that are not in the form of money or not in the form of money equivalent (checks, shares, deposits, vouchers, quotas, etc.) that exceed the value equivalent to Rp300,000 (three hundred thousand rupiah) per gift per person with a total grant of Rp1,000,000 (one million rupiah) in 1 (one) year from the same giver;*
- » *Giving fellow co-workers not in the form of money or not in the form of money equivalent (checks, shares, deposits, vouchers, quotas, etc.) that exceed Rp 200,000 (two hundred thousand rupiahs) per gift per person with a total grant of a maximum of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) in 1 (one) year from the same giver.*



2. Pemberian Gratifikasi yang Tidak Wajib dilaporkan:

- » Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, /bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- » Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per Pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- » Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Penerima paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- » Pemberian sesama Insan Perusahaan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama;
- » Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama;
- » Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- » Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
- » Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- » Seminar *kit* yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- » Penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang, yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; atau,

2. *Provision of Gratification that Are Not Required to be reported*

- » *Giving due to family relations, namely grandparents, father / mother / father-in-law, husband / wife, children / daughter-in-law, grandchildren, father, uncle / aunt, brother / sister / brother-in-law, cousins and nieces, as long as there is no Conflict of Interest;*
- » *Gifts (sign of care) in the form of money or goods that have a sale value in the organization of weddings, births, aqiqah, baptism, circumcisions, and tooth filing, or other traditional / religious ceremonies with a limit of value per Rp1,000 .000, - (one million rupiah);*
- » *Giving related to the disaster or disaster experienced by the Recipient, father / mother / father-in-law, husband / wife, or Recipient child at most Rp1,000,000 (one million rupiah) per gift per person;*
- » *Giving fellow Company's people in the framework of separating welcome, retirement, promotion, and birthday that is not in the form of money or not in the form of money equivalent of at most Rp300,000 (three hundred thousand rupiah) per gift per person with a total grant of Rp1,000 .000, - (one million rupiah) in 1 (one) year from the same Giver;*
- » *Giving fellow co-workers not in the form of money or money equivalent (checks, demand deposits, shares, deposits, vouchers, quotas, etc.) of a maximum of Rp200,000 (two hundred thousand rupiahs) per gift per person with a total grant of a maximum of Rp1,000,000 (one million rupiah) in 1 (one) year from the same Giver;*
- » *Dishes or dishes that are generally accepted;*
- » *Academic or non-academic achievements followed by using their own expenses such as championships, competitions or non-official competitions;*
- » *Profit or interest from general placement of funds, investments or private ownership;*
- » *Seminar kits in the form of a set of modules and stationery as well as certificates obtained from official activities such as meetings, seminars, workshops, conferences, training, or other similar activities that are generally accepted;*
- » *Acceptance of gifts or benefits, whether in the form of money or goods, which have to do with improving work performance provided by the Company in accordance with applicable regulations; or,*



PENGENDALIAN GRATIFIKASI GRATIFICATION CONTROL

- » Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar Kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Insan Perusahaan, tidak memiliki Benturan Kepentingan dan tidak melanggar aturan internal Perusahaan.
- 3. Insan Perusahaan tidak diperkenankan memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada dan dari Pemasok, Kontraktor, Konsultan, Mitra Kerja, Pejabat Pemerintah atau Pihak Ketiga lainnya, untuk:
 - » Memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya;
 - » Memengaruhi pertimbangannya dalam menjalankan bisnis Perusahaan;
 - » Mengubah keputusan yang seharusnya diambil.
- » *Obtained from compensation for professions outside the Service, which are not related to the Company's people main duties and functions, do not have a Conflict of Interest and do not violate the Company's internal rules.*
- 3. *Company's people are not permitted to give or promise anything, directly or indirectly, something that is valuable to and from suppliers, contractors, consultants, business partners, government officials or other third parties, to:*
 - » *Influence or in return for what he/she has done;*
 - » *Influence their consideration in running the Company's business;*
 - » *Change the decision that should be taken.*

Untuk mengelola pengendalian Gratifikasi Perusahaan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), yaitu Divisi *Corporate Secretary*, yang memiliki tugas dan fungsi utama yaitu melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

To manage Gratification control the Company established a Gratification Control Unit (UPG), which is the Corporate Secretary Division, which has the main duty and function of implementing Gratification monitoring and control within the Company.

Pelaksana fungsi pengendalian Gratifikasi ini memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

The executor of the Gratification control function has the following duties and authorities:

- » Melakukan pemetaan titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan dengan divisi terkait;
- » Menyampaikan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;
- » Melakukan pembaharuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- » Mengoordinasikan kegiatan diseminasi/sosialisasi aturan Gratifikasi, baik kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan;
- » Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi dari Insan Perusahaan;
- » Melakukan telaah penerimaan Gratifikasi dari Perusahaan atas status Gratifikasi. Dalam hal ini dapat meminta bantuan KPK, jika diperlukan;
- » Melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Perusahaan;
- » Meneruskan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK;
- » Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi;
- » *Conduct mapping of potential points of Gratification occurrence within the Company with related divisions;*
- » *Submitting the proposed Guidelines for Gratification Control to the Board of Directors;*
- » *Updating the Guidelines for Gratification Control in accordance with changes that occur in the Company and changes to the applicable laws and regulations;*
- » *Coordinating the activities of dissemination / socialization of the rules of Gratification, both to internal and external parties of the Company;*
- » *Receive, analyze and administer reports on receipt, rejection and gratification from Company's people;*
- » *Reviewing the acceptance of Gratification from the Company for the status of Gratification. In this case, it may request KPK assistance, if needed;*
- » *Managing Gratification goods that are under the authority of the Company;*
- » *Continuing reports on receipt, rejection and gratification to the KPK;*
- » *Deliver the management results of the Gratification report periodically 6 (six) months to the Board of Directors;*



-
- » Melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - » Dalam impelementasinya, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dapat mengusulkan dan membuat sistem pengelolaan Gratifikasi berbasis Teknologi Informasi;
 - » Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
 - » Menindaklanjuti laporan dugaan praktek Gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari WBS, instansi yang berwenang dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat.
- » *Report periodic recapitulation of Gratification reports to KPK;*
 - » *In implementing it, the Gratification Control Unit (UPG) may propose and create an Information Technology-based Gratification management system;*
 - » *Provide clear information to any party related to the provisions contained in the Guidelines for Gratification Control.*
 - » *Follow up on reports of alleged Gratification practices originating from and / or sourced from the WBS, the authorized agency and / or information obtained from the community.*



INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan Insan Perusahaan menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Perusahaan.

The company has a policy to prohibit the involvement of individuals on behalf of the Company in political activities, including giving donations for political purposes. In general, the Company does not allow Company's people to use any facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising or for political participation purposes. As stipulated in the Company's Code of Conduct.

Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, yang diwujudkan melalui program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penjelasan lebih rinci tentang kegiatan CSR yang telah dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2018, serta nilai nominalnya dapat dilihat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Conversely, high concern for social and community issues is an important part of the company's duties and responsibilities towards the community, which is realized through Corporate Social Responsibility (CSR) programs. A more detailed explanation of the CSR activities carried out by the Company throughout 2018, as well as the nominal value are presented the Corporate Social Responsibility Chapter in this Annual Report.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong kebijakan anti korupsi. Bentuk praktik paling mendasar dari komitmen ini adalah larangan suap dan penerimaan hadiah oleh Insan Perusahaan dalam bentuk apapun.

The company has a strong commitment to encourage anti-corruption policies. The most basic forms of practice of this commitment are bribery prohibitions and acceptance of gifts by Company's people in any form.

Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain dengan cara menerima sejumlah imbalan yang bersifat material. Perusahaan melarang Pejabat Perusahaan untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja, konsultan, kontraktor, dan/atau mitra kerja/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang berharga lainnya.

Board of Directors, Board of Commissioners and all Company's employees are prohibited from misusing positions for personal, family and other parties' interests by receiving a number of material benefits. The Company prohibits Company Officials from receiving gifts from subordinates, coworkers, consultants, contractors and / or business partners / entrepreneurs in any form, whether in the form of bouquets of flowers, food parcels or other valuable items.

Pejabat Perusahaan juga dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

Company Officials are also prohibited from giving or promising anything to anyone in order to expect compensation to get special treatment.



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE OFFICIAL ASSETS REPORT (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai entitas BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

BASIC PRINCIPLES OF STATE OFFICIAL ASSETS REPORT

As a Regional Owned Enterprise (BUMD) by DKI Jakarta Provincial Government, the Company must comply with binding laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and internal deviations is the obligation of the State Official Assets Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Officials Assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No. KEP 07 / KPK / 02/2005 concerning Procedures for Registration, Inspection and Announcement of the State Official Assets. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the Corruption Eradication Commission to implement measures or efforts to prevent corruption, among others, through registration and examination of LHKPN. In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism, mandating that each official must report and announce his/her Assets before and after assuming his/her position and are willing to examine his/her assets before and after taking office. In Law No. Article 28 of 1999 Article 2 (7) and its explanation, describes that other officials who have strategic functions in relation to state officials including the Board of Commissioners, Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to realize State Officials who observe the general principles of state officials who are free from the practices of corruption, collusion and nepotism, as well as other despicable acts. Each State Official is required to report its assets through the LHKPN form provided by the KPK to be filled honestly, correctly and completely, so that the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate, and assess all the amounts, types and values of assets reported, correctly, quickly, precisely, accurate and responsible.



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIAL ASSETS REPORT (LHKPN)

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI LINGKUP PERUSAHAAN

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

PELAKSANAAN LHKPN DI LINGKUP PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki pedoman pelaksanaan LHKPN yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 009 Tahun 2017 yang merupakan pemutakhiran dari SK Direksi No. 021 Tahun 2015. Dalam pedoman tersebut, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen dan Karyawan Perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah:
 - » Dewan Komisaris;
 - » Direksi;
 - » Kepala Divisi; dan
 - » Kepala Departemen
2. Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - » Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
 - » Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau;
 - » Berakhirnya masa jabatan atau pensiun.dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.

LEGAL BASIS AND REGULATION IN IMPLEMENTING LHKPN WITHIN THE COMPANY

In implementing LHKPN, the Company considers a number of legal basis and regulation for the perspective of applying LHKPN within the Company. The legal basis are:

1. *Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism.*
2. *Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.*
3. *Regulation of the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials Assets;*
4. *Circular of the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Number SE-08/01/10/2016 concerning Technical Guidelines for Submission and Management of State Officials Assets Reports;*

IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

The Company has in place LHKPN implementation guideline ratified with the Board of Directors Regulation Number 009 Year 2017 which is an update of the Board of Directors Decision Letter Number 021 Year 2015. The guidelines stipulate the following:

1. *Management and Company Employees who are required to submit the State Official Assets Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) are:*
 - » *Board of Commissioners;*
 - » *Board of Directors;*
 - » *Division Head; and*
 - » *Department Head*
2. *LHKPN Obligatory submits LHKPN to KPK, namely at the time:*
 - » *Appointment at the time of first serving;*
 - » *Reappointment after the expiration of the term of office or retirement; or;*
 - » *End of term or retirement.**and submitted within a period of no later than 3 (three) months from the date of the first appointment / reappointment / expiration of the position.*



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyampaian LHKPN selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 5. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan dengan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id 6. Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui: <ul style="list-style-type: none"> » Media pengumuman KPK; » Media pengumuman resmi Perusahaan; dan/atau » Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Submission of LHKPN during the term of office is held every 1 (one) year for assets acquired from January 1 to December 31.</i> 4. <i>Submission of LHKPN as referred to in paragraph (3) shall be submitted within the period of March 31 of the following year.</i> 5. <i>Submission of LHKPN can be done through the e-LHKPN application at the address www.elhkpn.kpk.go.id</i> 6. <i>LHKPN Announcement must be carried out by LHKPN Obligatory within 2 (two) months at the latest after the LHKPN Obligatory submits LHKPN to the KPK through:</i> <ul style="list-style-type: none"> » <i>Media for KPK announcements;</i> » <i>Company official announcement media; and / or</i> » <i>Newspapers that have national circulation.</i> |
|---|--|

PENGELOLA LHKPN

LHKPN MANAGEMENT

Struktur Tim Pengelola LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta
LHKPN Management team Structure Within PT MRT Jakarta



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LHKPN <ul style="list-style-type: none"> » Menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta; » Mengoordinasikan semua kegiatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta; » Mengarahkan kegiatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta; » Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta; » Melaporkan kegiatan pelaksanaan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta kepada Direktur Utama | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>LHKPN Coordinator</i> <ul style="list-style-type: none"> » <i>Organizing the State Official Assets Report (LHKPN) for officials within PT MRT Jakarta;</i> » <i>Coordinating all LHKPN activities for officials within PT MRT Jakarta;</i> » <i>Directing LHKPN activities for officials within PT MRT Jakarta;</i> » <i>Conduct monitoring and evaluation of LHKPN implementation for officials within PT MRT Jakarta;</i> » <i>Report the LHKPN implementation activities for officials in PT MRT Jakarta to President Director</i> |
|---|---|



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIAL ASSETS REPORT (LHKPN)

2. Administrator Instansi

- » Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta;
- » Membuat akun admin unit kerja;
- » Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- » Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
- » Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN;
- » Membuat laporan kegiatan pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta kepada Koordinator LHKPN untuk dilaporkan kepada Direktur Utama;
- » Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta.

3. Administrator Unit Kerja

- » Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerja;
- » Membuat akun wajib LHKPN;
- » Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib LHKPN;
- » Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK RI;
- » Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta.

2. Institution Administrator

- » *Manage the e-LHKPN application within PT MRT Jakarta;*
- » *Create a work unit administration account;*
- » *Validate the making / updating of the LHKPN Obligatory list into the e-LHKPN application;*
- » *Coordinate with KPK regarding the management and administration of the LHKPN Obligatory Application;*
- » *Provide information on LHKPN obligations and technical guidance regarding procedures for filling out and submitting LHKPN;*
- » *Establish a report on LHKPN implementation activities within PT MRT Jakarta to the LHKPN Coordinator to report to the President Director;*
- » *Carry out other tasks given by the LHKPN Coordinator related to LHKPN for officials within PT MRT Jakarta.*

3. Work Unit Administrator

- » *Manage the e-LHKPN application within the Work Unit;*
- » *Create a LHKPN Obligatory account;*
- » *Create and update the Mandatory LHKPN list;*
- » *Prepare the complete LHKPN to be sent to the Republic of Indonesia KPK;*
- » *Carry out other tasks given by the LHKPN Coordinator related to LHKPN for officials within PT MRT Jakarta.*



TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2018

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2018.

TRANSPARENCY OF COMPANY OFFICIALS LHKPN IN 2018

Below is the transparency of LHKPN submission for company officials who have the obligation to report in 2018.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2018 Disclosure of 2018 Company Officials LHKPN Submission

Pejabat Wajib LHKPN/ LHKPN Obligatory Official	2018			2017		
	Jumlah Wajib Lapor Number of LHKPN Obligatory	Jumlah yang Telah Melaporkan Number of Submission	%	Jumlah Wajib Lapor Number of LHKPN Obligatory	Jumlah yang Telah Melaporkan Number of Submission	%
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	4	4	100,00%	4	4	100,00%
Direksi <i>Board of Directors</i>	4	4	100,00%	4	4	100,00%
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	1	1	100,00%	1	1	100,00%
Kepala Divisi dan Kepala Departemen <i>Division Head and Department Head</i>	39	39	100,00%	11	8	72,73%
Jumlah Total	48	48	100,00%	20	17	85,00%



KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

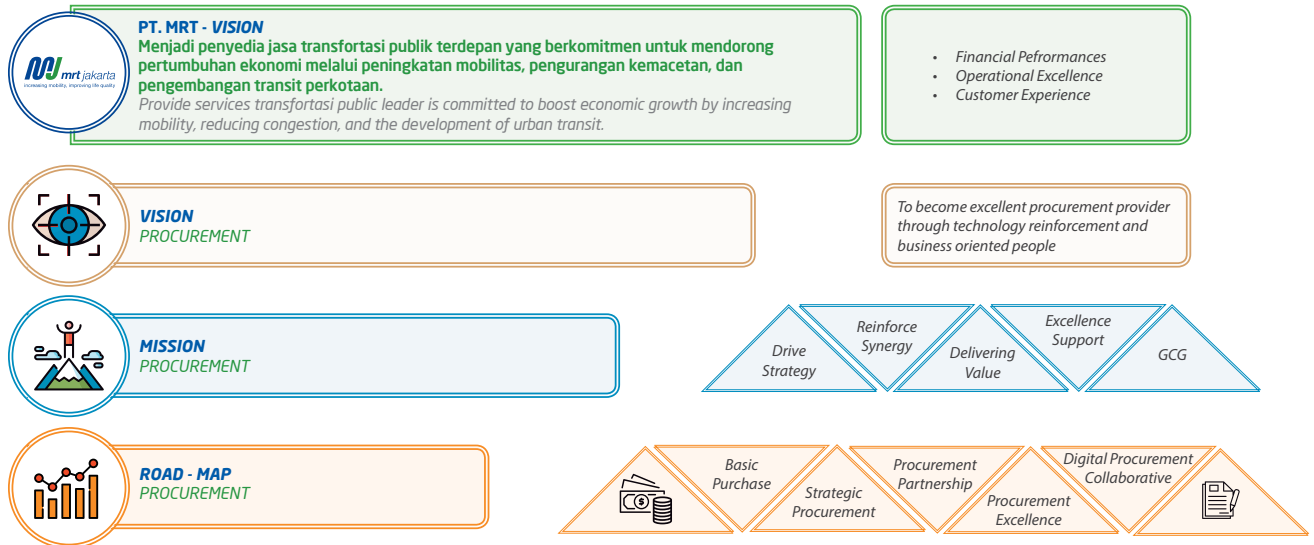
POLICY ON PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Proses pengadaan PT MRT Jakarta merupakan salah satu elemen yang sangat penting pada saat fase pembangunan infrastruktur operasional Perusahaan. Sebagai bagian dari Divisi *Business Support* yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan operasional Perusahaan, *Procurement Department* menjalankan proses dengan penuh tanggung jawab dan Integritas sebagai mana diamanahkan dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan.

The procurement process of PT MRT Jakarta is one of the most important elements during the phase of the Company's operational infrastructure development. As part of the Business Support Division that has responsibility for meeting the Company's operational needs, Procurement Department carries out the process with full responsibility and integrity as mandated in the Corporate Governance Guidelines.

Sebagai bagian dari rangkaian proses pengembangan sistem pengadaan, Perusahaan secara konsisten telah menjalankan strategi pengembangan sesuai dengan program jangka panjang serta visi & misi pengadaan untuk mendorong pencapaian tujuan Perusahaan. Kerangka strategi pengembangan tersebut dijelaskan dalam *figure cascading roadmap & strategi pengadaan* sebagai berikut.

As part of a series of procurement system development processes, the Company has consistently implemented development strategies in accordance with long-term programs and procurement vision & mission to encourage the achievement of the Company's goals. The development strategy framework is explained in the figure cascading roadmap & procurement strategy as follows.



Guna menjawab tantangan bisnis dalam industri yang cukup kompetitif dan masuknya fase Industri 4.0, Perusahaan kini menitik beratkan pengembangan pada tahap *Collaborative & Digital Procurement*, di mana strategi yang dijalankan dalam tahap ini ditujukan untuk mendorong terciptanya pengadaan yang lebih efisien dan efektif melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi antar mitra strategis serta optimalisasi penggunaan teknologi yang dapat memperkuat pengadaan untuk menjadi salah satu pendorong peningkatan daya saing Perusahaan.

In order to respond to business challenges in a fairly competitive industry and the entry of Industry phase 4.0, the Company is now focusing on developing in the Collaborative & Digital Procurement stage, where the strategies implemented at this stage are aimed at encouraging more efficient and effective procurement through increased synergy and collaboration between strategic partners and optimizing the use of technology that can strengthen procurement to become one of the drivers of increasing the competitiveness of the Company.



KINERJA PENGADAAN 2018

Sepanjang tahun 2018, Departemen Pengadaan melaksanakan sebanyak 713 proses pengadaan di mana rata-rata produktivitas personel pengadaan mencapai 41 pengadaan per personel. Adapun kontribusi penghematan yang cukup signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan *Infrastructures* PT MRT Jakarta ;
2. Pengadaan perlengkapan operasional pendukung PT MRT Jakarta;
3. Pengadaan barang pendukung dan perlengkapan kantor;
4. Pengadaan jasa konsultasi pendukung operasional dan strategis Perusahaan;
5. Pengadaan Sistem dan Infrastruktur serta Implementasi ERP dalam penerapan GCG Perusahaan.

Terkait hubungan dengan pemasok, secara periodik Perusahaan melaksanakan “*Supplier Feedback Survey*” dengan tujuan mendapatkan persepsi pemasok atas pengadaan di Perusahaan dan juga mendapatkan *feedback* dari pemasok guna pengembangan pengadaan ke depan.

Persepsi supplier atas pengadaan di Perusahaan berdasarkan hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 95% atau meningkat sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Meskipun secara garis besar tingkat kepuasan *supplier* cukup baik, Perusahaan tetap melakukan penyempurnaan berkelanjutan guna mengembangkan sistem pengadaan yang lebih baik dan transparan.

RENCANA DAN STRATEGI PENGADAAN TAHUN 2019

Sejalan dengan tujuan Perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah tantangan bisnis dalam industri yang cukup kompetitif, Perusahaan telah menyiapkan beberapa inisiatif strategi yang diterapkan di tahun 2019 untuk aspek pengadaan, antara lain:

1. *Sourcing Strategy*

Sourcing strategy ditetapkan berdasarkan orientasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan daya saing Perusahaan, pelayanan yang prima terhadap pelanggan, serta terus mengembangkan kerja sama bernilai tambah (*value added partnership*) dengan memfokuskan diri pada aspek strategis Perusahaan.

PROCUREMENT PERFORMANCE 2018

Throughout 2018, the Procurement Department carried out as many as 713 procurement processes where the average productivity of procurement personnel reached 41 procurement per personnel. The significant savings contribution can be explained as follows:

1. *Procurement of PT MRT Jakarta Infrastructures;*
2. *Procurement of operational equipment supporting PT MRT Jakarta;*
3. *Procurement of supporting goods and office supplies;*
4. *Procurement of operational and strategic supporting consulting services of the Company;*
5. *Procurement of Systems and Infrastructure and ERP Implementation in the Company's GCG implementation.*

Regarding relationships with suppliers, the Company periodically implements a “Supplier Feedback Survey” with the aim of obtaining supplier perceptions of procurement in the Company and also getting feedback from suppliers for future procurement development.

Suppliers' perceptions of procurement in the Company based on the results of survey show a satisfaction index of 95% or an increase of 1% from the previous year. Although broadly the supplier satisfaction index is quite good, the Company continues to make continuous improvements to develop a better and transparent procurement system.

PROCUREMENT PLANS AND STRATEGIES FOR 2019

In line with the Company's objectives in order to increase competitiveness amid the competitive business challenges in the industry, the Company has prepared several strategic initiatives implemented in 2019 for the procurement aspects, including:

1. *Sourcing Strategy*

The sourcing strategy is determined based on the orientation of the Company's business development to support the improvement of the Company's efficiency and competitiveness, excellent service to customers, and continue to develop value added partnerships by focusing on the strategic aspects of the Company.



KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA POLICY ON PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

2. Sumber Daya Manusia dan Penguatan *Value* Pengadaan
Keberhasilan pengadaan tidak terlepas dari peran serta personel pengadaan yang berkualitas dan berorientasi bisnis. Personel pengadaan harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan solusi *end-to-end* yang efisien dan efektif atas strategi pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta mengedepankan integritas sebagai nilai utama pengadaan.
3. Pengembangan Berkelanjutan atas Sistem Pengadaan
Di samping strategi pengadaan yang tepat dan juga SDM yang berkualitas, sistem pengadaan juga memerlukan pengembangan berkelanjutan guna memastikan relevansi dan kemutakhirannya dengan kondisi saat ini. Pengembangan berkelanjutan atas sistem pengadaan meliputi:
 - » *Simplifikasi Proses Bisnis*
Secara periodik, Perusahaan melakukan *review* atas proses bisnis pengadaan guna memastikan bahwa proses bisnis yang diimplementasikan merupakan proses bisnis yang paling efektif dan juga relevan guna menjawab tantangan bisnis.
 - » *IT Based Procurement System*.
Mendorong *IT-Based Procurement System* sebagai perangkat kolaborasi digital untuk mengukuhkan *positioning* Perusahaan dalam persaingan global
2. *Human Capital and Strengthening Procurement Value*
Procurement success is inseparable from the role of qualified and business oriented procurement personnel. Procurement personnel must have the ability to provide efficient and effective end-to-end solutions to strategies for meeting goods / services needs while still adhering to good corporate governance and principles, and promoting integrity as the main value of procurement.
3. *Sustainable Development of the Procurement System*
In addition to the right procurement strategy and human capital quality, procurement systems also require continuous development to ensure relevance and up-to-date with current conditions. Continuous development of the procurement system includes:
 - » *Simplification of Business Processes*
Periodically, the Company reviews the procurement business processes to ensure that the business processes implemented are the most effective and relevant to answer the business challenges.
 - » *IT Based Procurement System*.
Encouraging IT-Based Procurement System as a digital collaboration tool to strengthen the Company's positioning in global competition

Di tahun 2019, Unit Pengadaan akan menjalankan inisiatif untuk mendukung pencapaian target Perusahaan dan juga tema strategis Perusahaan di tahun 2019, yaitu *Building the Platform*, dengan beberapa program di antaranya:

1. Mendorong pencapaian efisiensi melalui penguatan *sourcing strategy*, penyempurnaan pengelolaan vendor serta melakukan *review* atas skema kerja sama dengan pihak ketiga yang dimiliki Perusahaan saat ini, guna memperoleh skema kerja sama dan *benefit* yang lebih baik.
2. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar BUMD DKI Jakarta melalui optimalisasi *joint program*, penyelarasan kebijakan pengadaan, serta mendorong peningkatan kapabilitas pranata BUMD DKI Jakarta.
3. Mengembangkan serta mengoptimalkan *IT-Based Procurement System* yang memfokuskan pada kemampuan analisis guna mendukung strategi dan pengambilan keputusan Perusahaan, serta sebagai sarana kolaborasi digital untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan.
- In 2019, the Procurement Unit will carry out initiatives to support the achievement of the Company's targets and also the Company's strategic theme in 2019, namely Building the Platform, with several programs including:*
1. *Encouraging the achievement of efficiency through strengthening the sourcing strategy, improving vendor management and conducting a review of the current cooperation scheme with third parties owned by the Company, in order to obtain a better scheme of cooperation and benefits.*
2. *Strengthening synergies and collaborations between DKI Jakarta BUMDs through optimizing joint programs, aligning procurement policies, and encouraging improvements in the capabilities of the DKI Jakarta BUMD.*
3. *Develop and optimize IT-Based Procurement systems that focus on analytical skills to support the Company's strategy and decision making, as well as a means of digital collaboration to improve efficiency and transparency in the procurement process.*



Memperkuat *value* pengadaan dengan melakukan pengembangan kompetensi Tim Pengadaan dengan melakukan *update* pengetahuan, sertifikasi, dan *benchmarking* untuk mencapai tujuan Perusahaan dengan standar bisnis proses yang berkelanjutan. Program *Business Improvement*, sebagai Perusahaan yang memiliki KPI memberikan *Service Excellence* kepada penumpang yang nyaman, aman dan andal perlu didukung dengan adanya sebuah *business improvement* yang efektif dan efisien.

Strengthen procurement value by developing the competence of the Procurement Team by updating knowledge, certification and benchmarking to achieve the company's goals with a sustainable business process standard. With Business Improvement Program, as a company that has a KPI, the company is providing Service Excellence to passengers to have comfortable, safe and reliable needs to be supported by the existence of an effective and efficient business improvement.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS), adalah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap *fraud* atau tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja. Manajemen Perusahaan memiliki komitmen yang kuat, bersikap independen, serta bebas intervensi dalam melaksanakan WBS. Kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS diawasi oleh Dewan Komisaris.

Agar *fraud* dapat terdeteksi lebih dini, Perusahaan mewajibkan setiap Insan Perusahaan membuat pernyataan komitmen akan kesediaannya untuk melaksanakan WBS dan berpartisipasi aktif melaporkan pelanggaran. Kepada pemangku kepentingan eksternal, sistem WBS Perusahaan disosialisasikan untuk memberikan pemahaman eksistensi dan mekanisme WBS.

PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan atau WBS mengacu kepada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK/002/BOC-MRT/V/2017 dan No. SK/042-2/BOD-MRT/V/2017 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

RUANG LINGKUP PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS Perusahaan adalah:

- Pelanggaran Etika;
- Pelanggaran Korupsi;
- Pelanggaran Kolusi;
- Pelanggaran Nepotisme;
- Kecurangan;
- Benturan Kepentingan;
- Pelanggaran Gratifikasi;
- Pelanggaran Norma, Ketentuan dan Peraturan Perusahaan;
- Pelanggaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Pelanggaran Lain-lain.

SALURAN PENGADUAN

Informasi rinci tentang saluran pelaporan melalui WBS dapat diakses di <http://wbs.jakartamrt.co.id/wbs/> melalui *website* Perusahaan di <https://www.jakartamrt.co.id/>

Whistleblowing System (WBS), is a system of prevention and identification of intentional fraud or deviation or omission. The Company's management has strong commitments, is independent, and is free of intervention in implementing the WBS. Adequacy and effectiveness of WBS implementation is supervised by the Board of Commissioners.

In order to have early detection of frauds, the Company requires company's people to make a statement regarding their willingness to implement WBS and actively participate in reporting violations. To external stakeholders, the Company's WBS system is socialized to provide an understanding of the existence and mechanism of the WBS.

DETERMINATION OF GUIDELINES FOR WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Guidelines for the Company's Whistleblowing System or WBS refer to the Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors Number SK / 002 / BOC-MRT / V / 2017 and Number SK / 042-2 / BOD-MRT / V / 2017 concerning Guidelines for Whistleblowing System.

SCOPE OF COMPLAINTS ON VIOLATIONS THROUGH WHISTLEBLOWING SYSTEM

Violations that can be reported through the Company's WBS mechanism are:

- *Violation of Code of Conduct;*
- *Violation of Corruption;*
- *Violation of Collusion;*
- *Violation of Nepotism;*
- *Fraud;*
- *Conflict of Interest;*
- *Violation of Gratification;*
- *Violation of Company Norms, Provisions and Regulations;*
- *Violation of Laws and Regulations;*
- *Other Violations.*

COMPLAINTS CHANNEL

Detail information about the reporting channel through WBS can be accessed at <http://wbs.jakartamrt.co.id/wbs/> through the Company's website at <https://www.jakartamrt.co.id/>



PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan atau WBS di Perusahaan adalah:

1. Divisi *Corporate Secretary*
 - » Mengelola penyelenggaraan *whistleblowing system*.
 - » Memeriksa laporan yang masuk pada *whistleblowing system* setiap hari.
 - » Melakukan validasi kesesuaian data/informasi pada laporan yang masuk pada *whistleblowing system*.
 - » Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - » Menyimpan dokumen laporan yang tidak memenuhi syarat pelaporan.
 - » Membuat laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pelaporan dan kategori Pelaporan, serta menyampaikannya kepada Direktur Utama.
2. Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran
 Tugas dan tanggung jawab Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah:
 - » Memutuskan hasil validasi data/informasi laporan WBS, apakah telah memenuhi unsur 4W+1H atau belum untuk dapat dilanjutkan ke selanjutnya.
 - » Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan WBS kepada Direktur Utama (jika terlapor adalah selain Direksi) atau Komisaris Utama (jika terlapor adalah Direksi) untuk diputuskan, apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.
 - » Membentuk Tim Penelitian Awal
 - » Mereviu laporan hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Tim Penelitian Awal.
 - » Membuat laporan akhir pelaporan WBS dan menyampaikannya kepada Direktur Utama/Komisaris Utama.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Unit pengelolaan WBS Perusahaan berada dibawah Divisi *Corporate Secretary*. Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima, Perusahaan akan menginvestigasi lebih lanjut guna mendapat bukti agar dapat mengambil kesimpulan yang tepat sesuai dengan prosedur operasional standar.

COMPLAINTS MANAGEMENT

The Company's Whistleblowing System or WBS managed by:

1. *Corporate Secretary Division*
 - » *Manage the implementation of a whistleblowing system.*
 - » *Check reports that enter the whistleblowing system every day.*
 - » *Validate the suitability of data / information on reports that enter the whistleblowing system.*
 - » *Report the results of data / information validation report to the WBS Committee.*
 - » *Store report documents that do not meet reporting requirements.*
 - » *Establish a report periodically, at least 3 (three) months, including the number of Reporting and Reporting categories, and submit it to President Director.*

2. *WSB Committee*
The duties and responsibilities of the WSB Committee are:

- » *Decide on the results of data / information validation of the WBS report, whether it has fulfilled the 4W + 1H element or not to be able to proceed to the next.*
- » *Report the validation results of WBS report data / information to President Director (if the alleged party is other than the Board of Directors) or the President Commissioner (if the alleged party is the Board of Directors) to be decided, whether the report can proceed to the next stage or not.*
- » *Establish an Preliminary research team*
- » *Review the report of the Special Investigation conducted by the Preliminary research team.*
- » *Create a final report on WBS reporting and submit it to the President Director / President Commissioner.*

PROCEDURES AND MECHANISMS FOR SUBMITTING COMPLAINTS AND COMPLAINT HANDLING

The Company's WBS Management Unit is under the Corporate Secretary Division. Every reporting of violations received, the Company will further investigate the evidence to be able to draw the right conclusions in accordance with standard operational procedures.



WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mekanisme penyaluran Pelaporan terjadinya dugaan Pelanggaran oleh Pelapor dapat dilaporkan melalui menu WBS yang terdapat dalam situs web Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

In distribution mechanism, the reporting of alleged violations by the Reporting Entity can be reported through the WBS menu on the Company's website with the following conditions:

Pelapor <i>Whistleblower</i>	Keterangan <i>Description</i>
Mengakses Whistleblowing System melalui website Perusahaan <i>Accessing Whistleblowing System through Company Website</i>	Pelapor mengakses Whistleblowing System melalui website Perusahaan (www.jakartamrt.co.id) <i>Whistleblower accesses Whistleblowing System through the Company's Website (www.jakartamrt.co.id)</i>
Masukkan identitas diri (Nama/Email No. Telephone) <i>Inputting personal identity (Name/Email/ Phone Number)</i>	Pelapor memasukkan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang- kurangnya memuat nama/email/No. telepon. Pelaporan dapat dilakukan secara anonym, namun harus melampirkan dokumen pendukung laporan. <i>Whistleblower includes information of their identity; which at least contains their name/email/phone number. Reporting may be done anonymously by attaching supporting document.</i>
Buat Laporan secara rinci dan jelas <i>Making detailed and clear Report</i>	Pelapor memasukkan informasi kejadian yang diketahuinya, yang sekurang - kurangnya memenuhi unsur-unsur 4W+1H (What, where, when, who, how) <i>Submission of information containing 4W+1H (What, where, when, who, how).</i>
Pilih kategori laporan <i>Selecting report category</i>	Pelapor memilih kategori laporan yang sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkannya pada kolom kategori laporan. <i>Selection of report category based on the suspected violation in the reporting column category.</i>
Mengisi kolom apakah bersedia untuk dihubungi <i>Filling the column of willing to be contacted</i>	Pelapor mengisi kolom "apakah bersedia dihubungi", untuk keperluan konfirmasi dan tindak lanjut pelaporan. <i>Fill in the column "willing to be contacted"; for confirmation and reporting follow up.</i>
Lampirkan dokumen pendukung <i>Attaching supporting document</i>	Pelapor melampirkan dokumen – dokumen pendukung (jika ada) laporan, seperti foto, dll. <i>Attachment of supporting documents (if any) such as pictures, etc.</i>
Kirim laporan <i>Sending the report</i>	Pelapor menekan tombol kirim laporan setelah memastikan semua informasi yang dibutuhkan telah diisi dengan jelas, rinci, dan benar. <i>Sending the report after ensuring all required information is provided in clear, detailed, and correct manner.</i>
No. token laporan <i>Token report number</i>	Pelapor akan mendapatkan No. token yang dapat digunakan pelapor untuk memeriksa status progress tindak lanjut laporannya. <i>Whistleblower shall receive token number to be used to check the follow up of progress report.</i>



PROSES TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN

Tindak lanjut atas Pelaporan dilakukan mulai dari diterimanya pengaduan tersebut, dengan proses sebagai berikut:

1. Setiap harinya, Petugas WBS memeriksa apakah terdapat laporan yang masuk pada *whistleblowing system*.
2. Petugas WBS melakukan validasi data/informasi dari Pelapor dan menganalisis laporan dugaan Pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W+1H (*What, Where, When, Who dan How*)
3. Petugas WBS melaporkan hasil validasi data/informasi laporan WBS kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, untuk kemudian memutuskan apakah laporan tersebut memenuhi unsur 4W+1H atau belum. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Petugas WBS menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
5. Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran membuat laporan hasil validasi laporan WBS dan menyampaikannya kepada Direktur Utama (jika terlapor adalah selain Direksi) atau kepada Komisaris Utama (jika terlapor adalah Direksi).
6. Berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, Direktur Utama/Komisaris Utama memutuskan apakah laporan WBS dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya atau tidak dan menyampaikannya kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
7. Berdasarkan hasil keputusan Direktur Utama/Komisaris Utama, Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran membentuk Tim Penelitian Awal, yang terdiri dari Divisi Internal Audit untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus.
8. Atas penugasan tersebut, Kepala Divisi *Internal Audit & Control* membuat Surat Tugas Pemeriksaan Khusus.
9. Tim Penelitian Awal melakukan pemeriksaan khusus dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau lebih jika diperlukan. Dalam melakukan Pemeriksaan Khusus, Tim Penelitian Awal dapat dibantu oleh Konsultan/*Fraud Examiner*, jika dibutuhkan.
10. Tim Penelitian Awal melaporkan hasil Pemeriksaan Khusus kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

FOLLOW-UP PROCESS ON REPORTING

Follow-up on Reporting is carried out starting from the receipt of the complaint, with the following process:

1. *Daily, WBS Officer checks whether there is a report on the whistleblowing system.*
2. *WBS officer validates the data / information from the Reporting Party and analyzes the alleged violation report whether it fulfills the 4W + 1H element (What, Where, When, Who and How)*
3. *WBS officer reports the results of the data / information validation of the WBS report to the WBS Committee, then decides whether the report meets the 4W + 1H element or not. If the report has not fulfilled this element, the WBS Committee can clarify the Reporting Party.*
4. *Regarding reports of alleged violations that do not meet the requirements, the WBS Officer keeps a report on the alleged violation report.*
5. *WBS Committee reports the results of the WBS report validation and submits it to the President Director (if the alleged party is other than the Board of Directors) or to the President Commissioner (if the alleged party is the Board of Directors).*
6. *Based on reports from WBS Committee, the President Director / President Commissioner decides whether the WBS report can be continued in the next stage or not and submits it to WBS Committee.*
7. *Based on the decision results of the President Director /President Commissioner, the WBS Committee forms a Preliminary Research Team, which consists of the Internal Audit Division for Special Investigation.*
8. *For the assignment, the Head of the Internal Audit & Control Division makes an Assignment Letter of Special Investigation.*
9. *Preliminary research team conducts special investigation within 14 (fourteen) working days or more if needed. In conducting a Special Investigation, the Preliminary Research Team can be assisted by a Consultant/Fraud Examiner, if needed.*
10. *The Preliminary research team reported the results of the Special Investigation to the Reporting Committee for Alleged Violation Handling.*



WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

11. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan khusus dari Tim Penelitian Awal, Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran membuat laporan akhir hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama.
 12. Berdasarkan laporan tersebut tersebut, Direktur Utama/ Komisaris Utama memutuskan tindak lanjut:
 - a. Jika tidak terbukti, menutup laporan pelaporan dugaan pelanggaran.
 - b. Jika terbukti:
 - i. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan/atau
 - ii. Meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
 - iii. Angka 1) dan 2) harus dilakukan melalui Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris.
 13. Divisi *Corporate Secretary* membuat laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pelaporan dan kategori Pelaporan, serta menyampaikannya kepada Direktur Utama.
 14. Komisaris Utama membuat laporan apabila ada anggota Direksi yang terbukti melakukan Pelanggaran dan dapat disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi.
 15. Direktur Utama melaporkan penanganan Pelaporan yang ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali.
11. *Based on the results of a special investigation report from the Preliminary Research Team, the WBS Committee creates the final report on the investigation results to the President Director / President Commissioner.*
 12. *Based on the report, the President Director / President Commissioner decides the follow-up:*
 - a. *If not proven, close the report of alleged violations reporting.*
 - b. *If proven:*
 - i. *Give sanctions in accordance with applicable regulations in the Company; and / or*
 - ii. *Forward the report to the authorized agency for further processing.*
 - iii. *Figures 1) and 2) must be done through a Board of Directors Meeting or Board of Commissioners Meeting.*
 13. *Corporate Secretary Division reports periodically, at least 3 (three) months, including the number of Reporting and Reporting categories, and submits it to the President Director.*
 14. *President Commissioner creates a report if there are members of the Board of Directors who are proven to have committed a Violation and can be submitted to the Shareholders as a performance evaluation of the Board of Directors.*
 15. *President Director reports the Reporting handling that are followed up or cannot be followed up to the Board of Commissioners at least in every 3 (three) months.*

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Kebijakan Perlindungan Pelaporan (*Whistleblower Protection Policy*) yang dimiliki Perusahaan mengatur secara tegas dan jelas bahwa Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelaporan pelanggaran yang beritikad baik, patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan, serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

Kebijakan perlindungan terhadap Pelapor antara lain sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

The Company's Whistleblower Protection Policy which clearly and firmly regulates that the Company is committed to protecting the whistleblower with a good intention, compliance to the legislations, as well as best practices applicable in the implementation of WBS.

Whistleblower protection policy regulates the following:

1. Confidentiality of whistleblower identity is assured by the Company.
2. The Company guarantees the protection of whistleblower from all forms of threats, intimidations, or indecent acts of any parties as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of information submitted from any parties.



3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pemeriksaan maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Setiap pelaporan pelanggaran diinvestigasi lebih lanjut untuk memperoleh bukti dalam rangka pengambilan kesimpulan yang tepat, yang diatur dengan prosedur operasional standar. Mekanisme pelaporan internal WBS dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa:

1. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik.
2. Pelanggaran yang berulang dan sistematis telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Perusahaan juga memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perusahaan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi.

PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2018 DAN TINDAK LANJUT

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk selama tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) pengaduan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

3. *Protection for Whistleblower is also applied for examining party or parties providing information related to the Report.*

Every violation report is investigated further to obtain evidence in order to draw conclusions, which are regulated by standard operational procedures. WBS internal reporting system mechanism is properly designed to ensure that:

1. *All violations reported and verified have been properly handled.*
2. *Repeating and systematic violations have been reported to related officials authorized to conduct improvement.*

AWARDS AND SANCTIONS

The form of sanctions against the Reported Party that has been proven to have committed a violation is determined in accordance with the applicable rules and regulations in the Company. The company also provides sanctions for reporting violations that are not in accordance with the aims and objectives of this policy, such as slander or false reporting.

In addition, the award is given to the Reporter if the reported case contains the truth and the Company has a positive impact from the existence of the report. The type and size of the awards given are governed by the policies of the Board of Directors.

VIOLATIONS REPORTING IN 2018 AND FOLLOW UP

There were 3 (three) complaints of violations during 2018 with details as follows:



WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Periode Laporan/Reporting Period	Jumlah Laporan Masuk/Number of Incoming Reports	Jumlah Tindak Lanjut/Number of Follow-up	Status/Status
Januari – Maret /January - March	-	-	-
April – Juni/April - June	-	-	-
Juli – September/July - September	-	-	-
Oktober – Desember/October – December	3	1	Proses tindak lanjut Follow-up Process
Jumlah/Total	3	1	

Berikut disampaikan jumlah pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, serta jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti serta jenis sanksi yang diberikan:

The following are the number of complaints that were not followed up, as well as the number of complaints that were followed up and the types of sanctions given:

Tindak Lanjut/Follow-up	Jumlah/ Number	Persentase/ Percentage
Pengaduan yang Selesai Tanpa Tindak Lanjut/Complaints Completed Without Follow-Up		
Jumlah/Total	2	66,67%
Pengaduan dengan Tindak Lanjut Sanksi/ Complaints with Sanctions Follow-Up		
Teguran/Verbal Warning	nihil	nihil
Peringatan 1/1st Warning Letter	nihil	nihil
Peringatan 2/2nd Warning Letter	nihil	nihil
Peringatan 3/3rd Warning Letter	nihil	nihil
Pengunduran Diri /Resignation	nihil	nihil
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/Termination of Employment	nihil	nihil
Jumlah/Total	1	33,33%
Jumlah Keseluruhan/Total Number	3	100,00%



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dituntut untuk bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

The composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors must be considered in such a way as to enable effective, timely and effective decision making. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors are also required to act independently, in the sense of having no conflicts of interest that may interfere with the ability to carry out tasks independently and critically.

Hingga 31 Desember 2018, Perusahaan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan termasuk memperhatikan unsur keberagaman, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

As of December 31, 2018, the Company does not yet have written rules governing the composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors. However, based on the Shareholders policy, the determination of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition has been carried out by considering the needs and complexity of the Company, including taking into account the element of diversity, as presented in the table below:

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia per 31 Desember 2018 Age in December 31, 2018	Tingkat Pendidikan Terakhir Current Education			Keahlian expertise				
			S1	S2	S3	Manajemen Management	Konstruksi & Infrastruktur Construction & Infrastructure	Operasi & Transportasi Operations & Transportation	Pengembangan Bisnis Business Development	Keuangan & Administrasi Finance & Administration
Dewan Komisaris Board of Commissioners										
Erry Riyana Hardjapamekas	Laki-Laki Male	69 tahun		√		√				
Rukijo	Laki-Laki Male	52 tahun		√						√
Yusmada Faizal	Laki-Laki Male	54 tahun		√			√			
Prasetyo Boeditjahjono	Laki-Laki Male	59 tahun		√				√		
Zulfikri	Laki-Laki Male	56 tahun		√				√		
Mukhtasor	Laki-Laki Male	49 tahun			√				√	



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia per 31 Desember 2018 Age in December 31, 2018	Tingkat Pendidikan Terakhir Current Education			Keahlian expertise				
			S1	S2	S3	Manajemen Management	Konstruksi & Infrastruktur Construction & Infrastructure	Operasi & Transportasi Operations & Transportation	Pengembangan Bisnis Business Development	Keuangan & Administrasi Finance & Administration
Direksi Board of Directors										
William P Sabandar	Laki-Laki Male	52 tahun			√	√				
Silvia Halim	Perempuan Female	36 tahun	√				√			
Agung Wicaksono	Laki-Laki Male	42 tahun			√			√		
Tuhyat	Laki-Laki Male	52 tahun		√						√
Muhammad Effendi	Laki-Laki Male	54 tahun		√				√		
Ghamal Peris	Laki-Laki Male	38 tahun		√					√	



TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD* GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF *BAD* GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Di tahun 2018, Perusahaan tidak menemukan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak menemukan adanya kasus terkait dengan buruh ataupun karyawan.

INFORMASI TENTANG PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan belum menerapkan segmen operasi pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Di samping belum adanya kegiatan usaha yang dijalankan, Perusahaan tidak menyanggah status sebagai perusahaan publik dan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan segmen operasi dalam laporan keuangannya.

REPORT ON COMPANY'S ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

In 2018, the Company did not find any report of the Company's activities that polluted the environment.

NON-COMPLIANCE ON ANNUAL REPORT PRESENTATION AND FINANCIAL REPORT WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The entire presentation of information in this Annual Report, specifically related to financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2018 and December 31, 2017 which have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) The presentation and disclosure of the Company's financial statements are prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

Throughout 2018, the Company did not find any cases related to workers or employees.

INFORMATION ON DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS

Until the end of 2018, the Company has not implemented the operating segment in the Financial Statements for the years ended December 31, 2018 and December 31, 2017 that have been audited by the Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) In addition to the absence of business activities carried out, the Company does not hold a status as a public company and has no obligation to implement operating segments in its financial statements.



TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

**KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN
DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL**

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

**CONFORMITY TO THE ANNUAL REPORT
BOOK AND DIGITAL ANNUAL REPORT**

The Company's digital annual report, both submitted to shareholders, stakeholders, and uploaded to the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.





07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*

MRT Jakarta percaya bahwa bisnis yang berkelanjutan akan memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*), dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu Perusahaan menjadikan CSR sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha.

The Company believes that business will be sustainable its provides balanced attention to the aspects of profit, people and the environment (planet). Therefore the Company makes CSR an inseparable part of operations to support its business sustainability.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT



Konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development* yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, profit dan planet. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (*International Organization for Standardization/ISO*), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar imbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat

The Sustainability Development concept that has developed in some countries emerged as part of aspirations from many parties about the balance between people, profit and planet. This concept can only be realized through a strong commitment from all parties, most notably business entities which undeniably are profit oriented and tend to ignore long-term impact of the activities carried out.

In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization effort through Corporate Social Responsibility (CSR), which obliges business entities to have policies and programs related to their commitment to building sustainable relationships with stakeholders.

The International Organization for Standardization (ISO), an agency defining world industry and commercial standards, has released ISO 26000 on Guidance on Social Responsibility. Although it is not mandatory and is merely an appeal, this ISO provides patterns and modules that apply internationally about how CSR can be developed in the dimensions of an organization.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2012.

In Indonesia, ISO 26000 has been ratified by the Government in 2010 and formed the Indonesian National Standard (SNI) in 2012.

Subyek Inti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan ISO 26000 Core Subjects of Corporate Social Responsibility Based on ISO 26000

7 SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
7 CORE SUBJECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Isu Konsumen
Consumer Issues



Tata Kelola Organisasi
Organizational Governance



Hak Asasi Manusia
Human Rights



Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat
Involvement and Development Citizen



Prosedur Operasi yang Wajar
Fair Operating Procedure



Lingkungan
Environment



Praktik Ketenagakerjaan
Labor Practices

Pada lingkup pelaporan tahunan, CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3); pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa. Aspek inilah yang menjadi dasar dari pelaporan dalam bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

In annual reporting, CSR is divided into 4 (four) aspects, namely environmental aspect; labor practice, occupational health and safety (OHS) s; social and community development; and responsibility for goods and/or services. These aspects are the basis of reporting in this Annual Report's Corporate Social Responsibility Chapter.

Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Aspects



Lingkungan Hidup
Environment



Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Labor Practice, Occupational Health and Safety



Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social and Community Development



Tanggung Jawab Barang dan/ atau Jasa
Responsibility for Consumer, Products, Goods and / or Services



KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MRT JAKARTA

GENERAL POLICY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION OF MRT JAKARTA

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PRINCIPLES AND POLICIES FOR IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bagi Perusahaan, CSR tak dapat dilepaskan dari perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berangkat dari gagasan tentang entitas usaha yang dapat menerapkan pola hubungan yang harmonis antara entitas usaha, pemangku kepentingan, dan pemilik modal atau pemegang saham. Perusahaan meyakini CSR menjadi bagian dari komitmen yang terus-menerus diupayakan dengan mengusung prinsip TARIF, khususnya prinsip *responsibility*, yang dapat membuat Perusahaan menjadi semakin kokoh dan berkelanjutan. Perusahaan percaya bahwa bisnis akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*) dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu Perusahaan menjadikan CSR sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha.

CSR to the Company is inseparable from the development of Good Corporate Governance (GCG). GCG departs from the idea of a business entity that can implement a harmonious relationship between business entities, stakeholders, and capital owners or shareholders. The Company believes that CSR is part of a commitment that is constantly being pursued by carrying out the principle of TARIF, especially the principle of responsibility, which can make the Company become more robust and sustainable. The Company believes that business will be sustainable if there is a balanced attention to the aspects of profit, people, and the environment (planet). Therefore, the Company defines CSR an inseparable part of its operations to support business sustainability.

Harmonisasi Operasi MRT Jakarta yang Berkelanjutan *Harmonization of Sustainable MRT Jakarta Operations*



Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selalu bergandengan tangan dengan visi pemerintah, Perusahaan memiliki peran untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial tersebut ke dalam seluruh lapisan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan internal, Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan melakukan berbagai

As a Regional Government-Owned Enterprise (BUMD) that is always inline with the government's vision, the Company has a role to realize Social Responsibility in all lines. To employees and/or workers as internal stakeholders, the Company must pay attention to the welfare and work environment that can provide the basis for the development of each employee. To the community as external stakeholders, the Company carries out various social development activities. Likewise, for Jakarta residents using the roads where the MRT Jakarta project is running, the Company has



KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MRT JAKARTA GENERAL POLICY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION OF MRT JAKARTA

aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan. Demikian pula kepada warga kota Jakarta pengguna jalan dimana proyek MRT Jakarta sedang berjalan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap menyelenggarakan pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan hak-hak pengguna jalan.

Aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perusahaan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada pemegang saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan regulator sebagai pemangku kepentingan. Sebagai BUMD yang memiliki kuasa pemakaian anggaran negara/provinsi, Perusahaan wajib untuk berkomitmen atas pengelolaan operasional yang akuntabel, transparan, berlandaskan pada Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan bebas dari praktik kecurangan. Perusahaan telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik tata kelola yang sehat seperti yang dapat dilihat lebih rinci pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini dan terus mengupayakan perbaikan pada area pengelolaan organisasi yang masih membutuhkan peningkatan.

Fondasi penting yang melandasi komitmen Perusahaan dalam menjalani kegiatan Tanggung Jawab Sosial meliputi:

- Tanggung Jawab Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Tuntutan global terhadap penerapan Tanggung Jawab Sosial yang baik dan merata.
- Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.
- Harapan bahwa Perusahaan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

DASAR HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dasar pelaksanaan program CSR Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, di antaranya:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

an obligation to continue carrying out the project development while taking into account the rights of road users.

Another aspect of Corporate Social Responsibility carried out by the Company is the accountability of business operational management to shareholders of DKI Jakarta Provincial Government and regulators as stakeholders. As a BUMD with the power to use state/provincial budget, the Company is obliged to commit to operational management that is accountable, transparent, based on good corporate governance, and free from fraudulent practices. The Company has committed itself to realizing sound governance practices as further detailed in this Annual Report's Corporate Governance Chapter and continue to seek improvements in the organizational management areas that still need improvement.

Key basis underlying the Company's commitment to Corporate Social Responsibility activities includes:

- *Corporate Social Responsibility is part of good corporate governance implementation.*
- *Global demand on the implementation of good and equitable Social Responsibility.*
- *Increased public attention to business ethics and accountability.*
- *Aspiration that the Company and the surrounding environment can grow together side by side.*

LEGAL BASIS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

The Company's CSR program implementation is based on some legal aspects, including:

1. *Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety.*
2. *Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*
3. *Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.*
4. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
5. *Law No. 25 of 2007 concerning Investment.*
6. *Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*



-
7. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 8. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas.
 12. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 13. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 14. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha.
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label LIMBAH Bahan Berbahaya dan Beracun.
 16. Peraturan Menteri Perhubungan No 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
 18. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
 19. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
 20. Surat Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan
 21. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan.
 22. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.
 23. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Kriteria Kualitas Udara Ambien di Wilayah DKI Jakarta.
 24. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 25. Surat Keputusan Kepala Dinas Petamanan dan Pemakanan DKI Jakarta No. 9 Tahun 2002
7. *Law No. 36 of 2009 concerning Health.*
 8. *Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency.*
 9. *Government Regulation No. 38 of 2008 concerning changes to Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State / Regional Property.*
 10. *Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.*
 11. *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies.*
 12. *Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System.*
 13. *Government Regulation No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste.*
 14. *DKI Jakarta Governor Regulation No. 112 of 2013 concerning Social and Environmental Responsibilities of the Business World.*
 15. *Minister of Environment Regulation No. 14 of 2013 concerning Symbols and Labels of Waste of Hazardous and Toxic Materials.*
 16. *Minister of Transportation Regulation No. 75 of 2015 concerning Implementation of Traffic Impact Analysis.*
 17. *Republic of Indonesia Minister of Health Regulation No. 32 of 2017 concerning Environmental Health Quality standard and Water Health Requirements for Sanitary Hygiene Needs, Swimming Pools, Solus Per Aqua, and Public Baths.*
 18. *Minister of Environment Decree No. 49 of 1996 concerning Standard Vibration Levels.*
 19. *Minister of Environment Decree No. 48 of 1996 concerning Noise Level Standards.*
 20. *Governor of DKI Jakarta Letter of Regulation No. 20 of 2013 concerning Infiltration Wells*
 21. *DKI Jakarta Governor Regulation No. 157 of 2013 concerning Environmental Permits.*
 22. *Governor of DKI Jakarta Regulation No. 122 of 2005 concerning Domestic Wastewater Management in DKI Jakarta Province.*
 23. *Governor of DKI Jakarta Decree No. 551 of 2001 concerning Determination of Ambient Air Quality Criteria in the DKI Jakarta Region.*
 24. *Governor of DKI Jakarta Decree No. 582 of 1995 concerning Determination of Designation and River Water Quality standard/ Water Bodies and Liquid Waste Standards in the Special Capital Region of Jakarta.*
 25. *Head of Jakarta Park and Cemetery Decree No. 9 of 2002.*



KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MRT JAKARTA
GENERAL POLICY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION OF MRT JAKARTA

ORGANISASI, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA

ORGANIZATION, PERSON IN-CHARGE AND MANAGEMENT

Kegiatan CSR merupakan bagian integral dari aktivitas di lingkup Perusahaan, sehingga pengambilan keputusan bisnis dan aktivitas yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan peningkatan profitabilitas semata, melainkan juga untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, karyawan, konsumen, pemberi kerja, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

CSR activities are integral part of activities in the scope of the Company, so that business decision making and activities carried out are not only for the purpose of increasing profitability, but also to maximize value for shareholders, employees, consumers, employers, suppliers, society, government and other stakeholders.





KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN

COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KEBIJAKAN

Undang-undang dan beberapa peraturan seperti yang telah disebutkan di atas mengatur secara tegas dan definitif atas kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Kegiatan utama Perusahaan sejak *groundbreaking* pada konstruksi bawah tanah di penghujung tahun 2013 hingga berakhirnya tahapan konstruksi berkaitan langsung dengan aspek lingkungan. Untuk itu, Perusahaan wajib menjalankan kebijakan yang berhubungan langsung dengan Tanggung Jawab Sosial di bidang lingkungan.

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASNYA DI SEPANJANG TAHUN 2018

- Melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan di bidang lingkungan hidup.
- Melaksanakan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dan dimaksudkan sebagai acuan pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya untuk mencegah, mengulai, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif yang timbul dari kegiatan pembangunan MRT Fase 1.
- Menyusun alternatif penganan dampak negatif, merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau menanggulangi dampak negatif yang diperkirakan terjadi, sehingga dapat menjamin, bahwa kegiatan akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal.
- Merumuskan berbagai upaya kebijakan dan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak lingkungan negatif penting, serta meningkatkan dampak lingkungan positif penting, sebagai bagian yang menyatu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan MRT Fase 1.
- Secara garis besar, upaya dari perealisasi atas rencana di atas, antara lain terdiri dari:
 - » Meminimalisir Pencemaran Udara dan Kebisingan Selama Kegiatan Konstruksi
 - » Meminimalisir Timbulnya Gangguan Getaran dan Kerusakan pada Bangunan Sekitar
 - » Meminimalisir Pencemaran Terhadap Kualitas Air Tanah
 - » Penanaman kembali Tanaman yang Terganggu Kegiatan Konstruksi
 - » Mengurangi tingkat gangguan kegiatan ekonomi masyarakat
 - » Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
 - » Peningkatan Sistem Sanitasi Lingkungan
 - » Meminimalisir Tingkat Gangguan Lalu lintas

POLICY

Laws and several regulations as mentioned above regulate explicitly and definitively for business activities that are directly related to natural resources. The Company's main activities since the *groundbreaking* of the underground construction at the end of 2013 until the end of the construction phase are directly related to environmental aspect. For this reason, the Company must implement policies that are directly related to Social Responsibility in the environmental field.

PLANNING, TARGET ACTIVITIES AND REALIZATIONS THROUGHOUT 2018

- Implement laws and regulations regarding management in the environmental field.
- Implement environmentally sound development policies intended as reference for stakeholders in an effort to prevent, minimize or control the negative impacts arising from Phase 1 MRT development activities.
- Arrange alternative treatment of negative impacts, plan and implement actions to prevent, reduce or overcome the negative impacts that are expected to occur, in order to guarantee that activities to be carried out can provide optimal benefits.
- Formulate various policy efforts and prevention, mitigation and control of important negative environmental impacts, as well as increasing important positive environmental impacts, as an integral part in implementing Phase 1 MRT development activities.
- Broadly speaking, the efforts of the revision of the above plan, among others, consist of:
 - » Minimizing air pollution and noise during construction activities
 - » Minimizing the Emergence of Vibration and Damage Disorders in the Neighborhood Buildings
 - » Minimizing Pollution to Groundwater Quality
 - » Replanting Plants Disturbed by Construction Activities
 - » Reducing the level of disruption of economic activities of the community
 - » Increased Employment and Business Opportunities
 - » Enhancing the Environmental Sanitation System
 - » Minimizing the Level of Traffic Disorders



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan pencegahan atas pekerjaan konstruksi yang dapat mengganggu kondisi lingkungan sekitar telah memberikan dampak yang lebih minim dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- *In general, the implementation of preventive activities on construction work that can disrupt the surrounding environment has brought less impact compared to the previous year and in accordance with the prevailing laws and regulations.*

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

- Penggunaan Emisi *Carbon* dalam Proses Konstruksi
 - » Emisi Gas Rumah Kaca
Pemantauan terhadap *Greenhouse Gas* (GHG) Emissions, atau Emisi Gas Rumah Kaca juga dilakukan pada proyek pembangunan MRT Jakarta. Pemantauan terhadap GHG dilakukan di seluruh CP pembangunan proyek, dan diterapkan sepanjang tahun untuk melihat tingkat pembuangan emisi dari aktivitas pembangunan konstruksi.

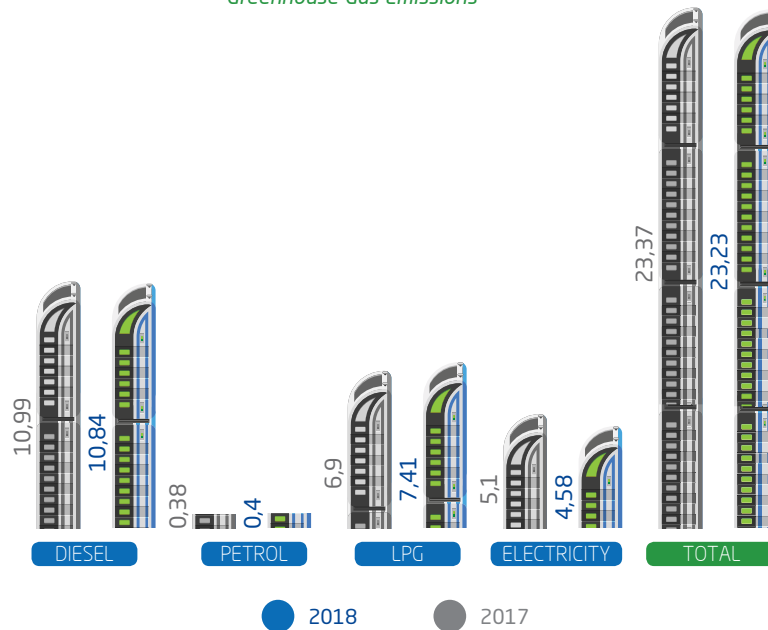
PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED

- *Use of Carbon Emissions in the Construction Process*
 - » *Greenhouse Gas Emissions*
Monitoring of Greenhouse Gas (GHG) Emissions is also carried out on the Jakarta MRT development project. Monitoring of GHG is carried out in all CP development projects, and is implemented throughout the year to see the level of emissions from construction activities.

Emisi Gas Rumah Kaca *Greenhouse Gas Emissions*

Keterangan <i>Description</i>	2017 CO2e (Gg)					2018 CO2e (Gg)					Perubahan Changes	
	CP 101 CP 102	CP 103	CP 104 CP 105	CP 106	Total	CP 101 CP 102	CP 103	CP 104 CP 105	CP 106	Total	Jumlah (Satuan) Total (Unit)	Persentase (%) Percentage (%)
Diesel	10.24	0.40	0.31	0.03	10.99	10.23	0.17	0.41	0.03	10.84	(0.14)	-1%
Petrol	0.38	-	-	-	0.38	0.40	-	-	-	0.40	0.01	3%
LPG	6.64	0.14	0.10	0.02	6.90	7.33	0.06	-	0.02	7.41	0.51	7%
Electricity	4.92	0.17	-	-	5.10	4.44	0.15	-	0.00	4.58	(0.51)	-11%
Total					23.37					23.23	(0.13)	-1%

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions



» Pengelolaan oleh Perusahaan atas Dampak dari Emisi Rumah Kaca

Pada saat ini, emisi rumah kaca dihasilkan dari bahan bakar dan penggunaan listrik sebagai pendukung kegiatan konstruksi. Emisi tersebut pada umumnya sudah berkurang dari tahun 2017, dikarenakan kegiatan pekerjaan konstruksi sudah memasuki masa pemasangan arsitektur dan *Testing and Commissioning*, juga dengan berkurangnya intensitas pekerjaan sipil. Selanjutnya, penggunaan listrik akan menjadi dominan pada saat masa kegiatan operasi dan operasi komersil. Sehingga, PT MRT Jakarta akan menggunakan sistem mekanikal dan elektrikal pendukung stasiun dan terowongan telah didesain untuk mendukung efisiensi atas penggunaan listrik, seperti, penggunaan lampu dan eskalator dengan sensor mati/hidup otomatis.

• Pengelolaan Limbah

Limbah dikategorikan sebagai bahan surplus, didefinisikan baik sebagai bahan usang yang sudah tidak dapat digunakan oleh Perusahaan karena perubahan dalam prosedur operasional atau bahan melebihi jumlah wajar yang diperlukan. Limbah dapat digambarkan seperti kertas yang terbuang, limbah B3, limbah non B3, atau bentuk-bentuk lainnya yang tersisa dan terbuang dari kegiatan usaha.

» Management of Greenhouse Emissions Effects by the Company

At present, greenhouse emissions are generated from fuel and electricity used to support construction activities. In general, emissions was lower than in 2017, because construction work was already in the phase of architectural installation, and *Testing and Commissioning*. This was also due to less intensity of civil works. Furthermore, the use of electricity will become dominant during operations and commercial operations. Thus, PT MRT Jakarta will use mechanical and electrical systems supporting stations and tunnels have been already designed to support efficiency in electricity use, such as the use of lights and escalators with automatic on /off sensors.

• Waste Management

Waste is categorized as surplus material, defined as either obsolete material that cannot be used by the Company because changes in operational procedures or exceeding the reasonable amount needed. Waste can be described as waste paper, B3 waste, non-B3 waste, or forms others left and wasted from business activities.



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perusahaan secara khusus menekankan kepada seluruh pihak kontraktor pentingnya pengolahan limbah dalam proses pembangunan MRT Jakarta. Seperti pengelolaan air limbah dengan pengukuran yang telah disebutkan di atas, pembuangan air limbah ke dalam *drainase* umum harus melewati serangkaian pengukuran dan pengolahan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), agar air limbah proyek MRT Jakarta tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Tahapan seperti pengendapan air limbah ke dalam tangki sedimentasi menjadi salah satu proses dalam IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga.

Untuk pengelolaan sampah dan air limbah kontraktor, Perusahaan melakukan pemantauan secara berkala agar sampah kontraktor tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup maupun kerusakan pada jalur di mana proyek MRT Jakarta dibangun.

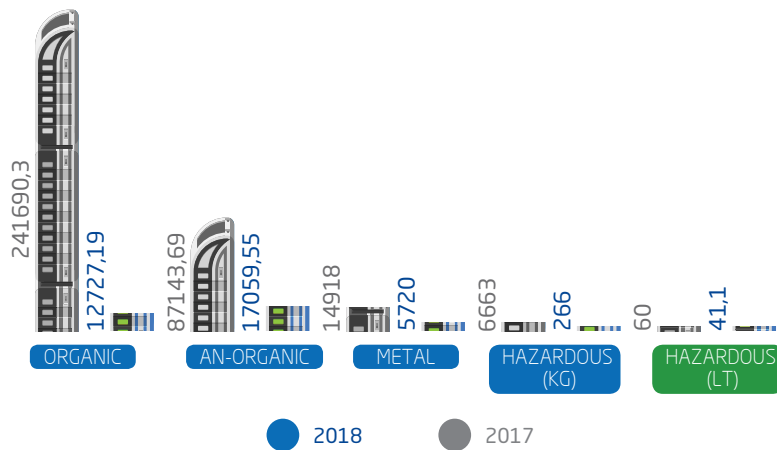
The Company has specifically emphasized to all contractors the importance of waste management in the process of MRT Jakarta construction. Like wastewater management with the measurements mentioned above, the disposal of waste water into public drainage must pass a series of measurements and processing of waste water treatment plant (IPAL) technology, so that MRT Jakarta project wastewater will not adversely impact the environment. Stages such as the deposition of waste water into the sedimentation tank become one of the processes in the WWTP which is managed by a third party.

For the management of contractors' waste and waste water, the Company periodically monitors the contractor's waste not to cause environmental damage or damage to the pathways where the MRT Jakarta project is being developed.

Produksi limbah
Waste production

Item	2017 (m3)						2018 (m3)						Perubahan Changes	
	CP 101 102	CP 103	CP 104 105	CP 106	CP 107	Total	CP 101 102	CP 103	CP 104 105	CP 106	CP 107	Total	Total (Satuan, m3 Unit), m3	Persentase (%) Percentage (%)
Organic	6991	330.40	4649	145.91	229574	241690.30	6527	600	1482	230.70	3887.491	12727.19	-228963.10	-180.0
An-Organic	5245	991.60	4172	683.09	76052	87143.69	4248	840	1778	1074.30	9119.247	17059.55	-70084.14	-134.5
Waste (Total)	12236	1321.7	8821	829	305626	328833.70	10773	1440	3260	1305	13006.68	29784.68	-299049	-166.8
Metal	14918					14918	5720					5720	-9198	-89.1
Hazardous	60 Liter	31 Drum, 63 Jumbo Bag				31 Drum, 63 Jumbo bag, 60 Liter	41.1 Liter	186 kg, 1 pallet				186 kg, 1 pallet, 41.1 Liter	(18.9) Liter, (6397) kg	-37.4, -94

WASTE PRODUCTION



- » Pengelolaan oleh Perusahaan atas Limbah
 - Peningkatan Sistem Sanitasi Lingkungan dengan cara:
 - Melakukan *housekeeping*, pengangkutan sampah secara rutin oleh Dinas Kebersihan DKI dan menjadwalkan pengangkutan keluar masuk material;
 - Tersedianya TPS B3 yang memiliki izin dari BPLHD Provinsi DKI Jakarta;
 - Limbah B3 maupun non B3 dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin dari KLH;
 - Melakukan pemilahan sampah domestik (organik dan anorganik) di TPS dan diangkut secara rutin oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta atau pihak ketiga yang memiliki izin dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Menyediakan STP *Portable* untuk menampung limbah domestik pekerja dan akan dikelola oleh pihak ketiga;
 - Pengelolaan sampah di area proyek dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Pemanfaatan Air dalam Kegiatan Operasi
 - » Kebijakan tentang penggunaan air di lingkup perusahaan. Penggunaan air di Jakarta telah meningkat secara signifikan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta dari tahun ke tahun. Kebutuhan air akan terus meningkat, dan pada saat ini akses air bersih rumah tangga telah mengalami penurunan di Jakarta sejak tahun 2017. Sehingga diperlukannya *water management* dalam kegiatan konstruksi untuk memonitor penggunaan air dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan *recycle water* dan menjaga kebersihan di area konstruksi.
- » *Waste Management by the Company*
 - Improvement of Environmental Sanitation System by:*
 - *Carrying out housekeeping, routinely transporting garbage by the DKI Sanitation Service and making schedule of material in and out transportation;*
 - *Availability of B3 TPS that has permission from the DKI Jakarta Provincial BPLHD;*
 - *B3 and non B3 waste is managed by third parties who have permission from KLH;*
 - *Sorting domestic (organic and inorganic) waste at polling stations and transporting them routinely by the DKI Jakarta Provincial Sanitation Service or third parties licensed by the DKI Jakarta Provincial Sanitation Service;*
 - *Provide Portable STP to accommodate domestic workers' waste and will be managed by third parties*
 - *Waste management in the project area is carried out in accordance with Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management.*
- *Water Utilization in Operational Activities*
 - » *Water Utilization policy in the company*

Water utilization in Jakarta has increased significantly with the increasing population in Jakarta from year to year. Water needs will continue to increase, and at present household water access has decreased in Jakarta since 2017. So water management is needed in construction activities to monitor water use and identify steps to improve water utilization efficiency, one of which is by using recycle water and keeping it clean in the construction area.

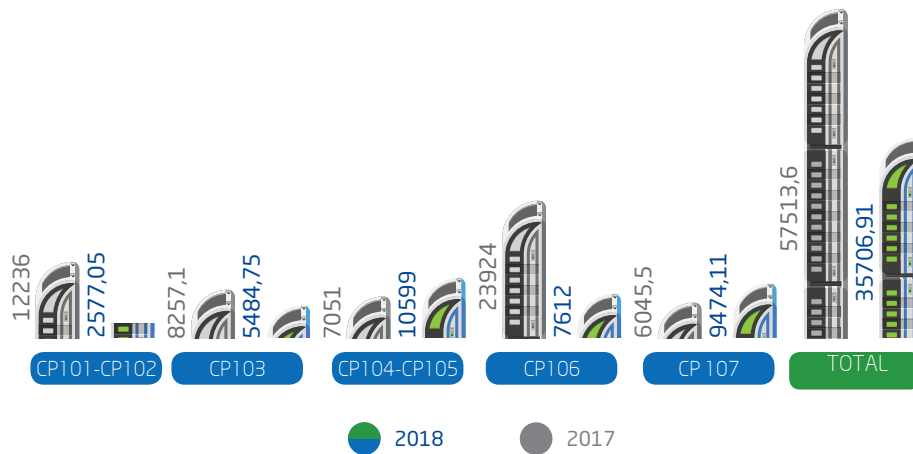


KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Penggunaan Air
Water Usage

Volume Penggunaan Air Volume of Water Utilization	2017, m3						2018, m3						Penurunan Decrease	
	CP 101 CP 102	CP 103	CP 104 CP 105	CP 106	CP 107	Total	CP 101 CP 102	CP 103	CP 104 CP 105	CP 106	CP 107	Total	Jumlah (Satuan) Total/Unit	Persentase (%) Percentage (%)
	12,236	8,257.1	7,051	23,924	6,045.5	57,513.6	2,577.05	5,484.75	10,559	7,612	9,474.11	35,706.91	27,726.86	63.5

PENGUNAAN AIR
Water Usage



- » Pengelolaan Air oleh Perusahaan dalam Kegiatan Konstruksi
Penggunaan air hanya terbatas pada pelaksanaan penyemprotan air untuk mengurangi level debu di area konstruksi, pelaksanaan *housekeeping*, kegiatan *curing concrete*, dan pengetesan sistem ventilasi (pendingin) stasiun. Untuk mengurangi jumlah *total* konsumsi air dalam kegiatan konstruksi, sebagian dari air yang digunakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari *re-use water* air tanah yang muncul dari hasil kegiatan penggalian (*entrance*). Adapun kegiatan menjaga area konstruksi yang rapi dan bersih akan mengurangi tingkat debu dan kotoran, sehingga penggunaan air untuk *housekeeping* menjadi lebih minim.
- Pekerjaan Penggalian
Aktivitas penggalian yang secara langsung memiliki dampak terhadap lingkungan alam dan dilakukan Perusahaan melalui kontraktor yang ditunjuk harus melalui serangkaian observasi dan prosedur perizinan dari regulator yang mengatur lingkungan hidup.
- » *Water Management in construction activities by the company*
Water utilization is limited to the implementation of water spraying to reduce the level of dust in the construction area, implementation of housekeeping, curing concrete activities, and testing of the station's ventilation system. To reduce the total amount of water consumption in construction activities, a portion of the water used for this activity comes from re-use of groundwater which arises from the results of excavation activities (entrance). The activities to maintain a neat and clean construction area will reduce the level of dust and dirt, so that the use of water for housekeeping becomes less.
- *Excavation work*
Excavation activities that directly have an impact on the natural environment and conducted by the Company through designated contractors must go through a series of observations and licensing procedures from regulators that regulate the environment.



Pekerjaan Pengalihan (M3) Excavation work

No	Contractor	Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1	CP 101& CP 102	m3	-	-										
2	CP 103	m3	-	-										
3	CP 104 & CP 105	m3	2,100	2,740	3,660	4,740	3,380	2,860	1,640	**)	**)	**)		
4	CP 106	m3	2,162	2,760	318	-	-							
5	CP 107	m3	-	-	-									

***) Belum dilaporkan
- Tidak ada aktivitas pengalihan

***) not yet reported
There are no excavation activities

Pada umumnya penggalian yang dilaksanakan oleh Kontraktor hanya terbatas pada pembangunan *entrance* dan CTVT, sehingga jumlah total galian di tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan 2017, terlihat bahwa pekerjaan penggalian mendekati akhir tahun 2018, sudah tidak berlangsung.

In general, the excavation carried out by the Contractor is limited to the construction of the entrance and CTVT, so that the total excavation in 2018 is less compared to 2017, it appears that the excavation work is nearing the end of 2018, it has not lasted.

- **Pemenuhan Perizinan Lingkungan**
Sebagai BUMD, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait izin usaha dan pengelolaan lingkungan; sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan. Termasuk dan yang terpenting Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memberikan dasar bagi Perusahaan untuk dapat melakukan seluruh proses pembangunan proyek MRT Jakarta, khususnya terkait konstruksi bawah tanah.
- **Soil Investigation dan Test Pit**
Proses perencanaan diawali dengan tahapan *Soil Investigation* dan *Test Pit*, yaitu kegiatan tes atas karakteristik dan kualitas lapisan kandungan tanah di mana proyek MRT Jakarta akan dibangun, serta investigasi utilitas yang terpendam di bawah tanah. Proses ini menjadi dasar, baik bagi desain dan pembangunan konstruksi maupun pemantauan dampak lingkungan dari pembangunan proyek. Tahapan *Soil Investigation* dan *Test Pit* masuk dalam tahap prakonstruksi yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2014, dengan hasil investigasi yang digunakan untuk melanjutkan proses pembangunan fondasi bangunan, *viaduct* (jembatan penyangga) dan konstruksi bawah tanah.
- **Fulfillment of Licenses and Certifications**
As a Regional-Owned Enterprise, the Company continuously complies with all laws and regulations related to the business and environmental management licenses; i.e. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Licenses, and DKI Jakarta Governor Regulation No. 157 of 2013 on Environmental Licenses; as well as the regulation on Environmental Impact Analysis (AMDAL) that provides the basis for the Company to carry out the entire construction process of MRT Jakarta, especially the underground construction.
- **Soil Investigation and Test Pit**
Planning process is initiated with Soil Investigation and Test Pit phases, namely an examination on the characteristics and quality of soil and earth layer where the MRT Jakarta project takes place, as well as investigation on the utilities buried under the soil. These processes serve as the foundation for construction designing and implementation, as well as monitoring of environmental impact from the project development.
Soil Investigation and Test Pit phases are included in preconstruction phase executed in 2014, with investigation results utilized to continue construction process of building foundation, viaduct (buffer bridge) and underground construction.



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- Pemantauan Dampak Lingkungan Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan pemantauan dampak lingkungan dari keberadaan pembangunan proyek MRT Jakarta; baik sebelum adanya pembangunan proyek maupun saat proyek berjalan. Perusahaan mewajibkan seluruh kontraktor untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dampak lingkungan yang mencakup pengukuran kualitas udara ambien, pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, pengukuran kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik. Pemantauan dan pengukuran dilakukan secara berkala, yaitu:
 - » Pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien di setiap bulannya.
 - » Pemantauan dan pengukuran kebisingan, getaran, kualitas air bersih dan pengukuran kualitas air limbah domestik dilakukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.
 - » Pemantauan air limbah proyek dilakukan setiap bulan.
- *Monitoring of Environmental Impact*
The Company is committed to monitor the impact on the environment as the result of MRT Jakarta project construction; either prior to or during the construction. This is conducted as a form of compliance with the prevailing laws and regulations. The Company also requires all contractors to monitor and measure environmental impact which include measurement of ambient air quality, noise and vibration levels, clean water quality and domestic waste water quality. Monitoring and measurement are carried out regularly, namely:
 - » *Monitoring and measurement are conducted in every month periodically.*
 - » *Monitoring and measurement of noise and vibration levels, clean water quality and domestic waste water quality are conducted once every 3 (three) months.*
 - » *Monitoring of project waste water is conducted monthly.*

Penilaian atas pemantauan dampak lingkungan di atas berguna bagi evaluasi kinerja pembangunan proyek MRT Jakarta dan dampaknya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Pemantauan ini dapat memberikan masukan bagi Perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk dapat melakukan penanganan khusus agar proyek MRT Jakarta tidak menimbulkan dampak lingkungan hidup yang negatif.

The above assessment of the environmental impact monitoring is useful to evaluate the performance of MRT Jakarta project and its impact on the surrounding environment. This monitoring can provide input for the Company to take the necessary measures to be able to perform special handling in order to avoid negative impact of MRT Jakarta project to the environment.

» Kualitas Udara

» Air Quality

CP 101 - Stasiun Lebak Bulus

No	Parameter	Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm3	61	57	47	48	45	48	43	47	45	52	49	45
2	CO	26,000	µg/Nm3	5,384	4,926	4,124	4,468	4,697	4,468	4,812	4,926	4,582	4,468	4,353	4,812
3	NO2	400	µg/Nm3	50	47	35	40	44	38	45	45	38	42	45	40
4	O3	200	µg/Nm3	55	52	42	48	46	45	50	50	43	48	52	45
5	TSP	230	µg/Nm3	181	181	181	185	191	195	197	205	187	215	188	179
6	Pb	2	µg/Nm3	0.8	0.9	0.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.4	0.7
7	HC	160	µg/Nm3	131	131	125	125	130	120	110	138	121	118	127	125



CP 102 - In Front of Honda Fatmawati

No	Parameter	Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm3	63	54	49	52	51	47	45	50	48	45	47	40
2	CO	26,000	µg/Nm3	5,499	4,812	4,697	4,812	4,697	4,353	4,926	4,812	4,468	4,697	4,124	4,239
3	NO2	400	µg/Nm3	52	44	39	45	43	37	41	46	40	40	48	45
4	O3	200	µg/Nm3	64	50	44	51	47	42	48	48	45	47	48	47
5	TSP	230	µg/Nm3	188	170	186	191	199	181	199	211	185	191	163	190
6	Pb	2	µg/Nm3	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.2	0.4
7	Hc	160	µg/Nm3	128	129	128	131	135	113	113	133	117	115	124	

CP 103 - PKK Area, Blok M, H. Nawi

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm3	< 58	< 58	45	0.011	3.57	48	< 58	< 58	45	< 58	0.947	37
2	CO	26,000	µg/Nm3	1,145	1,145	4,812	1,523	1,912	4,582	1,913	1,145	4,582	1,145	1,908	3,895
3	NO2	400	µg/Nm3	14.29	42.99	42	86	80.53	40	6.97	13.83	37	8.85	13.17	42
4	O3	200	µg/Nm3	3.16	2.31	50	12.97	21.92	49	6.39	5.37	50	11.68	7.58	45
5	HC	160	µg/Nm3	0	0	120	0	0	113	0	0	121	0	< 92	101
6	TSP	230	µg/Nm3	63.49	31.75	167	47.62	63.49	180	79.36	174.6	194	63.49	228.5	151
7	Pb	2	µg/Nm3	0.053	< 0.25	0.2	< 0.25	0.042	0.4	< 0.25	< 0.25	0.7	< 0.25	< 0.25	0.1

CP 103 - Al- Azhar Area, Blok A, Sisingamangaraja

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm3	< 58	< 58	52	58	1.51	50	< 58	< 58	52	< 58	3.28	35
2	CO	26,000	µg/Nm3	2290	2290	4926	1912	1523	4697	1523	1523	4812	1145	2290	4010
3	NO2	400	µg/Nm3	35.49	30.59	46	65.77	67.88	40	8.42	19.06	41	31	9.83	38
4	O3	200	µg/Nm3	2.82	7	52	5.77	9.65	48	5.56	5.74	50	10.33	6.72	42
5	HC	160	µg/Nm3	0	0	125	0	0	118	0	0	121	0	< 92	115
6	TSP	230	µg/Nm3	63.49	47.62	171	73.96	158.7	197	63.49	111.1	194	111.1	261.9	160
7	Pb	2	µg/Nm3	< 0.25	0.219	0.4	0.038	0.141	0.6	< 0.25	< 0.25	0.7	0.068	< 0.25	0.2



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CP 104 - Senayan Station

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm ³	26.98	25.63	33.87	14.24	28.96	26.87	18.65	17.65	17.25	14.52	14.35	12.41
2	CO	26000	µg/Nm ³	1476	1523	1285	1136	1465	1147	1088	1024	1254	1187	1188	1398
3	NO2	400	µg/Nm ³	3.25	33.25	13.65	7.36	8.47	10.35	9.87	6.35	8.35	8.65	9.68	7.57
4	O3	200	µg/Nm ³	5.35	10.65	6.35	14.25	4.63	8.65	6.35	2.11	2.14	3.25	4.58	4.65
5	HC	160	µg/Nm ³	3.02	4.98	8.24	2.54	5.22	4.56	4.65	1.02	2.04	0.54	5.87	1.57
6	TSP	230	µg/Nm ³	116.11	120.76	197.95	186.17	138.03	170.3	188.65	100.24	163.38	135.13	166.82	107.4
7	Pb	2	µg/Nm ³	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

CP 105 - Bendungan Hilir Station

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm ³	33.02	33.25	27.45	17.14	21.35	27.66	26.35	23.25	24.01	27.54	27.52	22.98
2	CO	26000	µg/Nm ³	156	1265	1065	1521	1325	1198	1187	1054	1154	1184	13.57	1047
3	NO2	400	µg/Nm ³	4.98	14.36	21.04	11.24	6.98	18.65	10.54	3.02	6.02	4.96	8.57	8.57
4	O3	200	µg/Nm ³	7.31	125.08	2.98	3.81	4.11	6.87	8.99	1.02	4.15	2.54	4.35	6.68
5	HC	160	µg/Nm ³	3.07	1.036	2.02	1.03	6.35	5.65	4.36	1.04	3.84	1.04	2.14	4.17
6	TSP	230	µg/Nm ³	185.99	156.94	203.84	155.59	126.72	180.75	181.13	191.07	136.55	157.54	125.02	108.94
7	Pb	2	µg/Nm ³	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

CP 106 - Dukuh Atas Station

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm ³	N/A	17.36	33.25	N/A	34.87	26.35	N/A	21.02	21.08	N/A	16.17	22.85
2	CO	26000	µg/Nm ³	N/A	12.65	1532	N/A	1457	1435	N/A	1254	1225	N/A	1084	1385
3	NO2	400	µg/Nm ³	N/A	7.33	4.65	N/A	13.25	8.74	N/A	7.35	6.68	N/A	8.35	8.15
4	O3	200	µg/Nm ³	N/A	9.04	3.98	N/A	4.65	4.35	N/A	5.65	7.74	N/A	6.25	6.95
5	HC	160	µg/Nm ³	N/A	5.23	2.37	N/A	5.65	6.35	N/A	4.21	6.35	N/A	5.14	3.35
6	TSP	230	µg/Nm ³	N/A	167.64	119.8	N/A	167.99	137.58	N/A	165.61	115.1	N/A	173.77	153.71
7	Pb	2	mg/Nm ³	N/A	<0.01	<0.01	N/A	<0.01	<0.01	N/A	<0.01	<0.01	N/A	<0.01	<0.01

CP 106 - Bundaran HI Station

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	SO2	900	µg/Nm ³	21.87	N/A	23.02	16.35	N/A	27.33	32.25	N/A	21.54	14.35	N/A	13.54
2	CO	26000	µg/Nm ³	1265	N/A	1687	1425	N/A	1435	1568	N/A	1254	1024	N/A	1055
3	NO2	400	µg/Nm ³	6.35	N/A	8.24	6.35	N/A	9.98	16.35	N/A	6.35	3.35	N/A	8.74



CP 106 - Bundaran HI Station

No	Parameter	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
4	O3	200	µg/Nm3	7.26	N/A	5.36	2.87	N/A	7.54	8.02	N/A	5.87	0.95	N/A	6.82
5	HC	160	µg/Nm3	6.04	N/A	5.01	6.35	N/A	4.32	5.65	N/A	5.87	2.14	N/A	3.35
6	TSP	230	µg/Nm3	18736	N/A	13575	17041	N/A	145	22106	N/A	19812	70.55	N/A	10389
7	Pb	2	µg/Nm3	<0.01	N/A	<0.01	<0.01	N/A	<0.01	<0.01	N/A	<0.01	<0.01	N/A	<0.01

Berdasarkan hasil pengukuran semua parameter kualitas udara *ambient* yang diuji di kedua area *Elevated* dan *Underground* hasilnya masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) udara *ambient* sesuai KEP GUB DKI Jakarta No.551 Tahun 2001.

Based on the measurement results of all ambient air quality parameters tested in both the Elevated and Underground areas the results are still below the Ambient Threshold Value (NAB) according to KEP GUB DKI Jakarta No.551 of 2001.

» Kualitan Kebisingan

» Noise Level

No	Sampling Location	Quality Standard	Unit	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
CP 101 – CP 102															
1	Lebak Bulus Station	60	dB(A)	N/A	N/A	54	N/A	N/A	60	N/A	N/A	57	N/A	N/A	66
2	In Front of Honda Fatmawati	60	dB(A)	N/A	N/A	75	N/A	N/A	72	N/A	N/A	64	N/A	N/A	75
CP 103															
3	PKK Park, Blok M, H. Nawi	70	dB(A)	66-68	69-70	68	65-69	69-70	59	65-67	65-68	56	68-70	67-70	61
4	Al Azhar, Blok A, Sisingamangaraja	70	dB(A)	61-68	67-68	61	68-69	63-66	60	63-67	65-67	65	69-70	68-70	64
CP 104 – CP 105															
5	Senayan Station	60	dB(A)	61.3	68.5	63.2	62.9	66.7	63.1	67.7	67	66.69	63.57	64.67	63.12
6	Bendungan Hilir Station	60	dB(A)	73.8	69	69	67.6	70.2	71.7	67.2	68.8	77.11	76.54	73.68	55.78
CP 106															
7	Bundaran HI Station	70	dB(A)	71.49	N/A	67.4	69.6	N/A	63.5	72.1	N/A	75.96	71.1	N/A	54.27
8	Dukuh Atas Station	70	dB(A)	N/A	63	62.1	N/A	60.2	59.5	N/A	64.8	67.52	N/A	65.93	50.53

Standar nilai kebisingan berbeda dari suatu tempat dengan tempat lainnya berdasarkan lokasi sekitar area pembangunan, apabila stasiun berada di dalam area sensitif (perumahan, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, dll) maka, maksimum standar yang diperbolehkan mejadi lebih ketat.

Noise value standards differ from one place to another based on the location around the construction area, if the station is in a sensitive area (housing, hospital, place of worship, school, government office, etc.), then the maximum allowed standards become more stringent.



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pemilihan dan pelaksanaan metode konstruksi yang mempunyai dampak gangguan minimum terhadap lingkungan sekitar, seperti untuk pemancangan tiang pancang pada lokasi yang berdekatan dengan perkantoran atau pemukiman penduduk dan lokasi sensitif lainnya pada jarak 0-25m, menggunakan metode *bore pile* atau *silent pillar*. Selain itu, jadwal kegiatan konstruksi juga telah diatur untuk mengurangi level kebisingan khususnya pada malam hari.

The selection and implementation of construction methods that have a minimum disruption impact on the surrounding environment, such as for pile erection at locations adjacent to offices or residential areas and other sensitive locations at a distance of 0-25m, using the bore pile or silent pillar method. Construction activities have also been arranged to reduce noise levels especially at night.

Hasil pengukuran tingkat kebisingan di area *elevated* dan *underground*, pada umumnya, masih di bawah baku mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja dan KEP MEMLH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan dan menunjukkan grafik yang konstan di semua stasiun bila dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini dikarenakan tingkat kebisingan yang bersumber dari kondisi lalu lintas kendaraan (*ambience* kebisingan) yang cukup padat lebih dominan dibandingkan dengan kebisingan dari kegiatan konstruksi.

The measurement results of noise level in the elevated and underground areas, in general, are still below the quality standards set in accordance with the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 13 of 2011 concerning the Threshold Value of Physical Factors and Chemical Factors in the Workplace and KEP MEMLH No. 48 of 1996 concerning Noise level standards and graphs are constant at all stations compared to 2017, this is because the noise level derived from vehicle traffic conditions (ambience noise) which is quite dense is more dominant than the noise from construction activities.

» Kualitas Vibrasi

» Vibration Quality

No	Sampling Location	Quality Standard	Unit	2018			
				Q1	Q2	Q3	Q4
CP 101 – CP 102							
1	Lebak Bulus	14	mm/s	0.1	0.3	0.2	0.2
2	Depan Honda Fatmawati <i>In-front of Honda Fatmawati</i>	14	mm/s	0.1	0.4	0.2	0.2
CP 103							
3	PKK Park	10-40	mm/dtk	0.2	0.4	0.1	0.3
4	Al Azhar	10-40	mm/dtk	0.2	0.3	0.1	0.2
CP 104 – CP 105							
5	Senayan Station	10-40	mm/s	0	0.3	0.025	< 0.01
6	Bendungan Hilir Station	10-40	mm/s	0.05	0.17	0.05	0.1
CP 106							
7	Bundaran HI Station	10-40	mm/s	0.03	0.23	0.05	0.075
8	Dukuh Atas Station	10-40	mm/s	0.03	0.08	0.05	0.5



Standar nilai getaran berbeda dari suatu tempat dengan tempat lainnya berdasarkan lokasi sekitar area pembangunan, apabila stasiun berada di dalam area sensitif (perumahan, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, dll) maka, maksimum standar yang diperbolehkan mejadi lebih ketat.

Pelaksanaan pemancangan tiang pancang pada lokasi yang dekat dengan perkantoran atau pemukiman penduduk dan lokasi sensitif lainnya (seperti rumah sakit, kantor pemerintahan) pada jarak 0- 25 m menggunakan metode *bore pile* atau *silent piller*. Tingkat getaran di semua stasiun cenderung turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran tingkat getaran di area *elevated* dan *underground* masih di bawah baku mutu yang telah ditetapkan sesuai KEP. MEMLH No.49 Tahun 1996 dan menunjukkan grafik penurunan di semua stasiun.

» Pemantauan Air Bersih

Area kontruksi akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kegiatan konstruksi, berdasarkan jadwal konstruksi dan rencana *traffic management* yang telah disetujui oleh Dinas terkait, begitu pula dengan sistem drainase pada area konstruksi juga akan disesuaikan dengan perubahan tersebut. Sistem drainase temporer ini berguna untuk menangkap air yang berada di dalam area konstruksi agar tidak memasuki sistem drainase kota dan menjaga agar kontaminasi terhadap lingkungan sekitar tidak terjadi apabila terjadi tumpahan *liquid / solid contaminant*. Area konstruksi juga telah didesain untuk mecegah aliran air akibat banjir masuk melawati area konstruksi dengan pengurukan tanah.

Pemantauan air bersih ini dilaksanakan untuk menjamin kondisi air tanah (*surface water*) di lingkungan sekitar yang dikonsumsi oleh penduduk sekitar untuk aktivitas sehari-hari, tidak berbau, berwarna, berasa, mengandung *heavy metals*, dan zat-zat berbahaya lainnya. Sehingga menjamin bahwa kegiatan konstruksi tidak mengkontaminasi kondisi air di lingkungan sekitar.

Standard vibration value differ from one place to another based on the location around the construction area, if the station is in a sensitive area (housing, hospital, place of worship, school, government office, etc.), then the maximum standard that is allowed becomes more stringent.

The installation of piles in locations close to offices or residential areas and other sensitive locations (such as hospitals, government offices) at a distance of 0-25m using the bore pile or silent piller method. Vibration levels in all stations tend to decrease compared to the previous year.

The measurement results of vibration levels in the elevated and underground areas are still below the quality standards that have been set according to KEP. MEMLH No.49 of 1996 and shows a graph of decline at all stations.

» Clean Water Monitoring

construction schedule and traffic management plan that has been approved by the relevant regional official/ department, as well as the drainage system in the construction area will also be adjusted to these changes. This temporary drainage system is useful for capturing water inside the construction area so that it does not enter the city drainage system and maintains that contamination of the surrounding environment does not occur in the event of a liquid / solid contaminant spill. The construction area has also been designed to prevent water flow due to flooding entering the construction area with landfill.

This clean water monitoring is carried out to guarantee the condition of ground water (surface water) in the surrounding environment that is consumed by the surrounding population for daily activities, odorless, colorless, tasteless, no containing heavy metals, or other harmful substances. So as to ensure that construction activities do not contaminate water conditions in the surrounding environment.



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CP 101 - CP 102

No	Parameter	Standard	Unit	2018				2018			
				CP 101 – Stasiun Lebak Bulus Lebak Bulus Station				CP 102 – Depan Honda Fatmawati In-front of Honda Fatmawati			
				CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
1	Odor (insitu)		-								
2	TDS	1500	mg/L	176	158	159	230	259	228	176	282
3	Turbidity	25	NTU	3	2	< 0,76	< 0,76	2	2	< 0,76	< 0,76
4	Taste		-								
5	Temperature	3	oC	28.7	29.8	28.3	28.7	28.9	29.7	29.7	27.8
6	Color	50	Pt-Co	4	3	2	2	3	2	2	2
<i>Chemical</i>											
1	pH (Insitu)	6,5 – 9,0	-	6.82	7.36	7.68	6.52	6.77	7,56	7.91	7.4
2	Hg	0.001	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0.0005
3	Arsen (As)	0.005	mg/L	<0.003	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	< 0,005	< 0,005	< 0.005
4	Iron (Fe)	1	mg/L	<0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0,02	< 0,02	< 0.02
5	Fluorida (F)	1.5	mg/L	0.08	0.13	0.21	0.04	0.01	0,06	0.25	0.07
6	Cadmium (Cd)	0.005	mg/L	<0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0,003	< 0,003	< 0.003
7	Total Hardness (CaCO ₃)	500	mg/L	130	102	129	185	196	148	158	198
8	Chlorida (Cl)	600	mg/L	17	15	-	-	29	31	31	36
9	Chromium VI(Cr6)	0.05	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	< 0,01	< 0,01	< 0.01
10	Mangan (Mn)	0.5	mg/L	<0.02	<0.02	<0.03	<0.02	0.02	< 0,02	0.03	< 0.02
11	Nitrat (NO ₃ -N)	10	mg/L	3	4	2	2	1	2	2	1
12	Nitrit (NO ₂ -N)	1	mg/L	0.006	0.007	0.007	<0.006	0.006	< 0,006	< 0,007	0.02
13	Selenium (Se)	0.01	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	< 0,002	< 0,002	< 0.002
14	Zinc (Zn)	15	mg/L	<0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0,01	< 0,01	< 0.01
15	Cyanide (CN)	0.1	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	< 0,005	< 0,005	< 0.005
16	Sulfate (SO ₄)	400	mg/L	14	21	5	12	23	26	6	35
17	Surfactant anion (MBAS)	0.5	mg/L	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.03	0,03	0,03	0.01
18	Lead (Pb)	0.05	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	0.01	< 0,01	< 0,01	< 0.01
19	Permanganate	10	mg/L	3	4	1	4	3	3	1	4
20	Coliform Total	50	mg/L	18	<1.8	14	0	18	<1.8	6	2



CP 103

No	Parameter	Standard	Unit	2018				2018			
				CP 103 – PKK Area				CP 103 – Al Azhar Area			
				CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
1	Odor (insitu)		-	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. berbau Odorless
2	TDS	1500	mg/L	196	202	141	222	175	173	161	132
3	Turbidity	25	NTU	2	3	< 0.76	< 0.76	2	2	< 0.76	< 0.76
4	Taste		-	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. berasa Tasteless
5	Temperature	3	oC	28,7	29.8	28.5	27.5	28,8	29.9	30.1	28.4
6	Color	50	Pt-Co	5	4	3	2	3	3	2	2

Chemical

1	pH (Insitu)	6,5 – 9,0	-	6,72	7.4	7.4	7.4	6,99	6,99	7.45	7.25
2	Hg	0.001	mg/L	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
3	Arsen (As)	0.005	mg/L	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
4	Iron (Fe)	1	mg/L	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	, 0,02
5	Fluorida (F)	1.5	mg/L	< 0,01	0.08	0.13	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0.09	< 0.01
6	Cadmium (Cd)	0.005	mg/L	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	0.003
7	Total Hardness (CaCO ₃)	500	mg/L	149	138	122	171	131	131	140	102
8	Chlorida (Cl)	600	mg/L	20	26	25	25	17	17	18	18
9	Chromium VI (Cr ₆)	0.05	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0.01
10	Mangan (Mn)	0.5	mg/L	< 0,02	< 0,02	< 0,03	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,03	< 0.02
11	Nitrat (NO ₃ -N)	10	mg/L	2	4	0.5	0.6	1	1	2	0.9
12	Nitrit (NO ₂ -N)	1	mg/L	< 0,006	0.011	< 0,006	< 0,006	< 0,006	< 0,006	< 0,006	< 0.006
13	Selenium (Se)	0.01	mg/L	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002
14	Zinc (Zn)	15	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0.01
15	Cyanide (CN)	0.1	mg/L	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
16	Sulfate (SO ₄)	400	mg/L	15	18	6	23	14	14	9	2
17	Surfactant anion (MBAS)	0.5	mg/L	0,03	0.02	0.02	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Lead (Pb)	0.05	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0.01
19	Permanganate	10	mg/L	3	3	2	4	3	3	1	4
20	Coliform Total	50	mg/L	< 1.8	< 1.8	12	2	< 1.8	< 1.8	10	2



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CP 104 - CP 105

No	Parameter	Standard	Unit	2018				2018			
				CP 104 – Stasiun Senayan Senayan Station				CP 105 – Stasiun Bundungan Hilir Bundungan Hilir Station			
				CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
1.	Odor (insitu)		-	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless	Tdk Berbau Odorless
2	TDS	1500	mg/L	158.72	174.78	162.5	182.14	266.6	257.53	229.21	225.21
3	Turbidity	25	NTU	0.13	10	0.27	0.14	0.18	6.35	0.08	0.44
4	Taste		-	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless
5	Temperature	3	oC	27.4	26.7	29.4	29.7	27.4	26.6	29.6	29.6
6	Color	50	Pt-Co	10	8.65	5	5	8	10	5.5	3.5
<i>Chemical</i>											
1	pH (Insitu)	6,5 – 9,0	-	7.75	7.89	6.89	6.98	7.25	8	6.97	6.84
2	Hg	0.001	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	Arsen (As)	0.005	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
4	Iron (Fe)	1	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
5	Fluorida (F)	1.5	mg/L	<0.075	<0.075	0.215	0.157	<0.075	<0.075	0.191	0.157
6	Cadmium (Cd)	0.005	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7	Total Hardness (CaCO ₃)	500	mg/L	97	89.3	111.1	129.28	133.86	146.3	296.94	141.8
8	Chlorida (Cl)	600	mg/L	14.87	17.84	16.85	30.95	33.27	32.35	25.38	31.45
9	Chromium VI(Cr6)	0.05	mg/L	<0.023	<0.023	<0.012	<0.012	<0.023	<0.023	<0.012	<0.012
10	Mangan (Mn)	0.5	mg/L	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
11	Nitrat (NO ₃ -N)	10	mg/L	0.825	0.985	0.459	4.85	2.01	2.35	0.398	3.6
12	Nitrit (NO ₂ -N)	1	mg/L	<0.003	<0.003	<0.002	<0.002	<0.003	<0.003	<0.002	<0.002
13	Selenium (Se)	0.01	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
14	Zinc (Zn)	15	mg/L	0.024	0.087	0.03	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016
15	Cyanide (CN)	0.1	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
16	Sulfate (SO ₄)	400	mg/L	23.65	38	40.75	43.25	6.35	33	63.63	63.38
17	Surfactant anion (MBAS)	0.5	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Lead (Pb)	0.05	mg/L	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018
19	Permanganate	10	mg/L	1.2	1.67	2.26	<0.600	<0.622	1.55	1.07	<0.600
20	Coliform Total	50	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	<1.8	<3.0	<3.0	<3.0	<1.8



CP 106

No	Parameter	Standard	Unit	2018				2018			
				CP 106 – Stasiun Dukuh Atas Dukuh Atas Station				CP 106 – Stasiun Bundaran HI Bundaran HI Station			
				CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
1.	Odor (insitu)		-	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. Berbau Odorless	Tdk. berbau Odorless
2	TDS	1500	mg/L	297.6	280.13	207.65	183.27	298.84	304.82	283.72	228.52
3	Turbidity	25	NTU	0.19	5	0.17	0.53	13	12	1.36	1.72
4	Taste		-	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. Berasa Tasteless	Tdk. berasa Tasteless
5	Temperature	3	°C	27.1	27.7	29.1	28.1	27.1	27.5	29.3	27.9
6	Color	50	Pt-Co	8	12	5	0.22	5	5	4.5	0.52
<i>Chemical</i>											
1	pH (Insitu)	6,5 – 9,0	-	7.25	7.32	7.42	6.84	7.64	7.34	7.17	6.68
2	Hg	0.001	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	Arsen (As)	0.005	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
4	Iron (Fe)	1	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
5	Fluorida (F)	1.5	mg/L	<0.075	0.229	0.251	0.638	<0.075	<0.075	0.163	0.114
6	Cadmium (Cd)	0.005	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7	Total Hardness (CaCO ₃)	500	mg/L	192.06	178.6	163.62	86.24	157.14	159.6	16.69	175.24
8	Chlorida (Cl)	600	mg/L	36.3	28.04	23.69	85.18	27.47	39.25	39.75	165.41
9	Chromium VI (Cr ⁶⁺)	0.05	mg/L	<0.023	<0.023	<0.012	<0.012	<0.023	<0.023	<0.012	<0.012
10	Mangan (Mn)	0.5	mg/L	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
11	Nitrat (NO ₃ -N)	10	mg/L	0.393	4.65	1.3	2.08	0.375	0.124	0.991	0.429
12	Nitrit (NO ₂ -N)	1	mg/L	0.003	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.003	<0.002	<0.002
13	Selenium (Se)	0.01	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
14	Zinc (Zn)	15	mg/L	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016
15	Cyanide (CN)	0.1	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
16	Sulfate (SO ₄)	400	mg/L	16.35	28.1	44.25	45.88	23.35	47.13	39.75	52.63
17	Surfactant anion (MBAS)	0.5	mg/L								
18	Lead (Pb)	0.05	mg/L	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018	<0.018
19	Permanganate	10	mg/L	0.983	2.17	1.97	1.81	0.622	0.962	6.58	< 0.600
20	Coliform Total	50	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	< 1.8	<0.3	<0.3	<3.0	< 1.8



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dari hasil analisis laboratorium kualitas air bersih menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai parameter masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan dan sudah memenuhi baku mutu (Permenkes RI No.416 tahun 1999 terkait baku mutu air bersih).

From the results of laboratory analysis, the quality of clean water shows that almost all parameter values are still below the required quality standard and have met the quality standard (Republic of Indonesia Minister of Health Regulation No.416 of 1999 regarding clean water quality standards).

» **Pembuangan Air Kotor**

Kolam sedimentasi telah dibangun untuk menangkap endapan/lumpur di dalam air sebelum dikeluarkan ke saluran pembuangan kota atau digunakan kembali. Pemasangan *oil separator* akan digunakan untuk memastikan air yang dikeluarkan ke sistem drainase, bebas dari kandungan minyak. Air yang dihasilkan dari toilet, kantor, dan area istirahat telah dialirkan melalui instalasi pengelolaan air.

» **Disposal of Waste Water**

Sedimentation tanks have been built to capture sludge in the water before being released into the city drainage or reused. Installation of oil separator will be used to ensure the water released into the drainage system, free of oil content. Water generated from toilets, offices and rest areas has been channeled through a water management installation.

CP 101 - CP 102

No	Parameter	Standard		Unit	2018				2018			
		Individual	Comunal		CP 101 – Stasiun Lebak Bulus Lebak Bulus Station				CP 102 – Depan Honda Fatmawati In-front of Honda Fatmawati			
					CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
					1	pH	9	9	-	6.9	6.9	7.12
2	KMnO4	85	85	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TSS	50	50	NTU	26	23	21	< 28	28	29	24	21
4	NH3-N	10	10	-	9	8	8	68.14	8	9	9	9
5	Oil and Grease	10	10	oC	-	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8	0.5	<.0.2
6	MBAS	2	2	Pt-Co	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BOD5	75	50	-	18	25	16	23	28	27	27	17
8	COD	100	80	-	67	78	52	76	85	89	89	57

CP 103

No	Parameter	Standard		Unit	2018				2018			
		Individual	Comunal		CP 103 – PKK Area				CP 103 – Al Azhar Area			
					CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
					1	pH	9	9	-	8.05	8.8	6.96
2	KMnO4	85	85	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	27,38
3	TSS	50	50	NTU	18	13	29	29	20	15	9	9
4	NH3-N	10	10	-	6	7	5	0.04	9	7	6	0.01



CP 103

No	Parameter	Standard		Unit	2018				2018			
		Individual	Comunal		CP 103 – PKK Area				CP 103 – Al Azhar Area			
					CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
5	Oil and Grease	10	10	oC	0.4	0.2	0.2	0.02	0.6	0.3	0.2	0.2
6	MBAS	2	2	Pt-Co	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BOD5	75	50		26	22	16	2	20	25	16	13
8	COD	100	80	-	87	72	52	66	73	80	52	42

CP 104 - CP 105

No	Parameter	Standard	Unit	2018				2018			
				CP 104 – Stasiun Senayan Senayan Station				CP 105 – Stasiun Bendungan Hilir Bendungan Hilir Station			
				CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
A. Physical											
1	Temperature	38	oC	27.6	26.1	29.5	29.5	27.5	26.3	N/A	29.5
2	TDS	1000	mg/L	179.8	228.35	217.61	213.05	198.4	497.36	N/A	199.91
3	Suspended Solid (TSS)	100	mg/L	55	3	87.5	7	7	57	N/A	4
B. Chemical											
1	Mercury (Hg)	0.02	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	N/A	<0.001
2	Ammonia (NH3)	5	mg-N/L	0.024	<0.037	2.11	0.527	<0.037	0.39	N/A	<0.014
3	Arsenic (As)	0.1	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	N/A	<0.01
4	Iron (total) (Fe)	5	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.214	0.547	N/A	<0.03
5	Fluoride (F)	2	mg/L	<0.142	0.187	0.235	0.187	0.212	0.685	N/A	0.184
6	Cadmium (Cd)	0.05	mg/L	<0.010	<0.010	<0.01	<0.01	<0.010	<0.010	N/A	<0.01
7	Free Chlorine (Cl2)	1	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	N/A	<0.01
8	Chromium (Cr)	0.5	mg/L	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	N/A	<0.043
9	Chromium (VI) (Cr6+)	0.1	mg/L	<0.030	<0.030	<0.022	<0.022	<0.030	<0.030	N/A	<0.022
10	Nickel (Ni)	0.1	mg/L	<0.046	<0.046	<0.046	<0.046	<0.046	<0.046	N/A	<0.046
11	Nitrate (NO3)	10	mg/L	<0.171	0.652	2.96	2.28	1.16	0.652	N/A	1.46
12	Nitrite (NO2)	1	mg/L	0.004	<0.004	0.005	0.56	<0.004	0.013	N/A	0.033
13	pH	9	-	8.04	7.82	7.15	8.72	7.3	7.9	N/A	7.7
14	Zinc (Zn)	2	mg/L	0.014	0.027	<0.013	<0.013	<0.013	<0.013	N/A	<0.013
15	Sulfide (H2S)	0.05	mg/L	<0.02	<0.02	<0.020	<0.020	<0.02	<0.02	N/A	<0.020
16	Copper (Cu)	1	mg/L	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	<0.043	N/A	<0.043
17	Lead (Pb)	0.1	mg/L	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	N/A	<0.026



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CP 104 - CP 105

No	Parameter	Standard	Unit	2018				2018			
				CP 104 – Stasiun Senayan Senayan Station				CP 105 – Stasiun Bendungan Hilir Bendungan Hilir Station			
				CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
18	Manganese (Mn)	2	mg/L	<0.044	<0.044	<0.044	<0.044	<0.044	<0.044	N/A	<0.044
19	Phenol	0.5	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	N/A	<0.01
20	Oil & Grease	5	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	<1.0
21	Surfactants as MBAS	1	mg/L	<0.016	<0.016	<0.017	<0.017	<0.016	<0.016	N/A	<0.017
22	Cyanide (CN)	0.05	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	N/A	<0.01
23	Organic Matter (KMNO4)	85	mg/L	0.998	15.74	81.75	9.08	0.677	36.39	N/A	7.45
24	BOD	75	mg/L	2.12	7.35	69.21	3.24	14.02	17.58	N/A	5.57
25	COD	100	mg/L	6.5	19.5	97.65	11.5	17	56.5	N/A	16

CP 106

No	Parameter	Standard		Unit	2018				2018			
		Individual	Comunal		CP 101 – Stasiun Lebak Bulus Lebak Bulus Station				CP 102 – Depan Honda Fatmawati In-front of Honda Fatmawati			
					CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4	CTW 1	CTW 2	CTW 3	CTW 4
1	pH	9	9	-	7.87	N/A	N/A	N/A	8.28	7.98	N/A	N/A
2	KMnO4	85	85	mg/L	4.23	N/A	N/A	N/A	13.31	.	N/A	N/A
3	TSS	50	50	NTU	8	N/A	N/A	N/A	25	32	N/A	N/A
4	NH3-N	10	10	-	0.517	N/A	N/A	N/A	2.59	3.22	N/A	N/A
5	Oil and Grease	10	10	oC	<0.1	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	N/A	N/A
6	MBAS	2	2	Pt-Co	0.142	N/A	N/A	N/A	<0.0016	<0.016	N/A	N/A
7	BOD5	75	50		2.13	N/A	N/A	N/A	11.02	41.35	N/A	N/A
8	COD	100	80	-	21.5	N/A	N/A	N/A	34.5	74.5	N/A	N/A

Berdasarkan analisis kualitas air limbah domestik di semua lokasi menunjukkan nilai untuk semua parameter masih berada di bawah bakumutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 63 Tahun 2016, Peraturan Gubernur No. 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur No. 69 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Based on the analysis of domestic waste water quality in all locations, the values for all parameters are still below quality standard according to Minister of Environment and Forestry Regulation No. 63 of 2016, Governor Regulation No. 122 of 2005 concerning Domestic Waste water Management in DKI Jakarta Province, and Governor Regulation No. 69 of 2013 concerning Waste Water Quality standard.



- Keanekaragaman Hayati**

Salah satu komitmen Perusahaan dalam mengembalikan fungsi lingkungan hidup saat pembangunan proyek adalah relokasi pepohonan pada jalur di mana proyek MRT Jakarta digelar. Sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyebutkan bahwa penebangan pohon berdiameter 10 sentimeter atau lebih harus diganti dengan penanaman 10 pohon baru, Perusahaan menerapkan penggantian 10 pohon baru untuk setiap 1 (satu) pohon yang ditebang.

Prioritas kegiatan penanaman pohon dilakukan secara konsisten di area resapan air di sekitar wilayah Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memperluas area resapan air untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Adapun pohon yang ditanam berjenis pohon pelindung, seperti Trembesi, Tanjung, Mahoni, Palem, Sawo Kecil, Sapu Tangan, Pule, Kamboja, dan Spatodea. Jenis pohon yang ditanam juga disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Di kemudian hari saat proses konstruksi selesai, Perusahaan juga berkomitmen untuk membentuk jalur hijau pada koridor di mana MRT Jakarta akan beroperasi.

Proses relokasi pepohonan masuk dalam tahapan prakonstruksi yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan telah melakukan penanaman kembali pepohonan sebanyak 26.785 pohon yang tersebar baik di lokasi proyek CP 101 hingga CP 106.

- Biodiversity**

One of the Company's commitments to restore environmental function during project construction is tree relocation on the track where MRT Jakarta project is located. Pursuant to Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order which states that the cutting of trees with diameter of 10 centimeter or more must be replaced by planting 10 new trees, the Company has planted 10 trees for each tree cut down during the construction.

The priority of tree planting activities is consistently conducted in water absorption area around Jakarta to reduce flood risks. The trees planted by the Company are shade trees such as Trembesi, Tanjung, Mahogany, Palm, Sawo Kecil, Sapu Tangan, Pule, Flamboyant, and Spatodea. Tree species to be planted is also adjusted to the condition of the region. In the future, when the construction process is completed, the Company commits to creating green lanes on corridors where MRT Jakarta operates.

The tree relocation process is included in the pre-construction phase that has been carried out since 2014. Until the end of 2018, the Company has planted 26,785 trees which were spread well on the CP 101 project site to CP 106.

No	Kontraktor Contractor	Pohon Tertebang Cutting Tree	Penanaman Kembali Replanting	Lokasi Location
		Jumlah Penanaman Kembali Number of replanting		
1	CP 101 & CP 102	11,835	17,701	RTH Kemuning, RTH Camat Gabun, RTH Kel. Pondok Labu, RTH Kel. Lenteng Agung, Jalur-jalur Hijau di Prov. DKI Jakarta, (Green Lanes at Prov. DKI Jakarta), Banjir Kanal Barat, Pluit Atmajaya, Pluit Muara Bary, Pluit Raya, Ponok Kopi, Kebun Bibit Srengseng RTH Kemuning, RTH Camat Gabun, RTH Sub-district of Pondok Labu, RTH Sub-district of Lenteng Agung, Green Lanes at DKI Jakarta Province, West Flood Canal, Pluit Atmajaya, Pluit Muara Bary, Pluit Raya, Pondok Kopi, Kebun Bibit Srengseng
2	CP 103	342	3,338	Pesanggrahan, Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Jagakarsa, Istiqlal Pesanggrahan, Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Jagakarsa, Istiqlal
3	CP 104 & CP 105	973	1,938	RTH Swadarma, RTH Taman Bambu, RTH Taman Rajiman, RTH Taman Kopi, RTH Taman H. Ipin, RTH Taman Margasatwa, RTH Taman Aselih RTH Swadarma, RTH Bambu Park, RTH Rajiman Park, RTH Kopi Park, RTH H. Ipin Park, RTH Wildlife Park, RTH Aselih Park
4	CP 106	532	3,808	RTH Manunggal II, RTH Kumis Kucing, RTH Assafiyah, RTH Aselih, RTH Kel. Pondok Labu, RTH Kel Pulo Gebang, RTH Petukangan Utara, Jalur-jalur Hijau Prov. DKI Jakarta RTH Manunggal II, RTH Kumis Kucing, RTH Assafiyah, RTH Aselih, RTH Sub-district of Pondok Labu, RTH Sub-district of Pulo Gebang, RTH North Petukangan, Green Lanes at DKI Jakarta Province
Total		13.682	26.785	



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- Proses Lelang Pengadaan *Contract Package* dan Pertimbangan Aspek Lingkungan bagi Kontraktor
Komitmen terhadap lingkungan hidup telah dilakukan Perusahaan sejak tahapan awal pada perencanaan. Proses lelang atau tender *Contract Package* (CP) mempersyaratkan para peserta lelang, khususnya pihak pemenang lelang untuk memperhatikan dampak pengerjaan proyek terhadap lingkungan. Kontrak lelang juga mencakup relokasi lingkungan dan tata ruang-tata kota di mana proyek MRT Jakarta dibangun. Walaupun bersifat artifisial, relokasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang serasi, antara aktivitas pengguna moda transportasi dan lingkungan alam yang berada di sekitarnya.
- *Contract Package Procurement Bid Process and Environmental Aspect Consideration for Contractors*
The Company has carried out its commitment to environment at an earlier stage of planning. The tender of Contract Package (CP) requires tender participants, especially the winner of tender, to pay attention to the impact of project on environment. Tender contract also includes environmental relocation and urban spatial planning on the areas where Jakarta MRT project is built. Although artificial, the relocation is expected to create a harmonious environment between the activities of the transport modes users and the natural environment in the surrounding areas.

Selain relokasi, proses lelang proyek MRT Jakarta mempersyaratkan pihak kontraktor untuk melakukan pemantauan secara berkala atas dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan proyek MRT Jakarta. Pemantauan meliputi pengukuran kualitas udara ambien, pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, pengukuran kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik; yang kemudian dilaporkan kepada Perusahaan sebagai alat untuk mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan proyek MRT Jakarta.

- Penanganan Insiden yang Mencemari Lingkungan
Selama tahun 2018, tidak tercatat terjadinya insiden pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 1.
- *Handling incidents that pollute the environment*
During 2018, there were no recorded incidents of environmental pollution as a result of the Jakarta Phase 1 MRT construction activities.

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Pengaduan masalah lingkungan merupakan sarana pendukung sistem inspeksi yang telah dilakukan oleh PT MRT Jakarta terhadap kontraktor, sistem Pengaduan dari masyarakat setempat/terganggu sangat berharga dalam meningkatkan evaluasi terhadap kinerja Kontraktor. PT MRT Jakarta menganggap bahwa pengaduan masalah lingkungan dari masyarakat juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi terjadinya bahaya selama proses konstruksi berlangsung.

- Mekanisme penyampaian pengaduan masalah lingkungan
Sistem pengaduan selama kegiatan konstruksi MRT Jakarta berlangsung, dapat dilaporkan oleh pihak terkena dampak melalui bagian hubungan masyarakat tiap *Contract Package* atau bersurat langsung ke PT MRT Jakarta. Setelahnya akan dilaksanakan evaluasi apakah masalah tersebut berasal dari kelalaian atas pekerjaan kontraktor atau tidak. Kontraktor wajib memperbaiki kerusakan yang terjadi apabila hasil dari evaluasi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kontraktor.
- *Environmental Grievance Submission Mechanism*
The grievance system during MRT Jakarta construction activities can be reported by the affected parties through the public relations section of each Contract Package or by direct correspondence to PT MRT Jakarta. Afterwards, an evaluation will be carried out whether or not the problem is caused by of the contractor's negligence. The contractor must repair the damage occurring if the results of the evaluation state that it is a contractor's negligence.

ENVIRONMENTAL GRIEVANCES

Environmental grievances are means to support the inspection system that has been carried out by PT MRT Jakarta towards contractors, local community grievance system is very valuable in improving the Contractor performance evaluation. PT MRT Jakarta considers that the community environmental grievances can also be used to identify and prevent potential hazards during the construction process.



- Daftar jumlah pengaduan masalah lingkungan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2018.

- *List of environmental grievances received by the Company in 2018.*



Complaint

CP 106

Solution



Pengaduan dari *Management Gedung Oil Pertamina* terkait vibrasi dari pekerjaan *soldier pile entrance Stasiun BHI*.
Complaints from Pertamina Oil Building Management regarding the vibration of the soldier pile's work at the BHI Station entrance.

Koordinasi dengan *Management Gedung Oil Pertamina* dengan melaksanakan pemantauan dan pengukuran getaran, dan kompensasi atas kerusakan pada *façade*.
Coordination with the Pertamina Oil Building Management by carrying out monitoring and measurement of vibration, and compensation for damage to the building's façade.



Complaint

CP 106

Solution



Pengaduan dari *Management Gedung Oil Pertamina* terkait vibrasi dari pekerjaan *soldier pile entrance Stasiun BHI*.
Complaints from Pertamina Oil Building Management regarding the vibration of the soldier pile's work at the BHI Station entrance.

Koordinasi dengan *Management Gedung Oil Pertamina* dengan melaksanakan pemantauan dan pengukuran getaran, dan kompensasi atas kerusakan pada *façade*.
Coordination with the Pertamina Oil Building Management by carrying out monitoring and measurement of vibration, and compensation for damage to the building's façade.



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Maret 2018
March 2018



CP 104 & CP 105



Complaint

Pengaduan dari Management Gedung BEJ terkait vibrasi dari pekerjaan *soldier pile* Stasiun Istora.
Coordination with the JSX Building Management by carrying out monitoring activities to measure / monitor vibration levels at ground level.



Solution

Koordinasi dengan Management Gedung BEJ dengan melaksanakan kegiatan monitoring untuk mengukur/memantau level vibrasi pada *ground level*.
Coordination with the JSX Building Management by carrying out monitoring activities to measure / monitor vibration levels at ground level.



Complaint

Pengaduan dari Hotel All Season terkait vibrasi dari pekerjaan *soldier pile* Stasiun Dukuh Atas.
Complaints from All Season Hotels regarding the vibration of Dukuh Atas Station soldier pile work.

CP 106



Solution

Koordinasi dengan Management Hotel All Season dengan melaksanakan kegiatan *monitoring* untuk mengukur/memantau level vibrasi pada *ground level*, dan memperbaiki metode konstruksi.
Coordination with the All Season Hotel Management by carrying out monitoring activities to measure / monitor vibration levels at ground level, and improve construction methods.



Complaint

CP 106



Solution

Pengaduan dari Hotel All Season terkait vibrasi dari pekerjaan *soldier pile* Stasiun Dukuh Atas.
Complaints from All Season Hotels regarding the vibration of Dukuh Atas Station soldier pile work.

Koordinasi dengan *Management* Hotel All Season dengan melaksanakan kegiatan monitoring untuk mengukur/memantau level vibrasi pada *ground level*, dan memperbaiki metode konstruksi.
Coordination with the All Season Hotel Management by carrying out monitoring activities to measure / monitor vibration levels at ground level, and improve construction methods.

April 2018



Complaint

CP 101 & CP 102



Solution

Banjir sektoral di area Lebak Lestari
Sectoral flooding in Lebak Lestari area

Perbaikan drainase area Lebak Sari
Drainage Repair of Lebak Sari area



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Mei 2018
May 2018



Complaint

CP 101 & CP 102

Solution



Pengaduan terkait banjir sektoral di area Stasiun Cipete
(dekat toko Bandeng)
*Complaints related to sectoral floods in Cipete Station area
(near Bandeng shop)*

Perbaikan drainase area stasiun Cipete.
Drainage Repair in Cipete Station area



Complaint

CP 104 & CP 105

Solution



Pengaduan dari Management Gedung Chaze Plaza
Complaint terkait suara dari pembongkaran jalan Stasiun
*Complaint from the Chaze Plaza Building Management
related to noise from demolition of the station road*

Koordinasi dengan Management Gedung Chaze Plaza
dengan melaksanakan kegiatan *monitoring* untuk
mengukur/memantau level vibrasi pada *ground level*.
*Coordination with the Chaze Plaza Building Management
by carrying out monitoring activities to measure / monitor
vibration levels at ground level.*

November 2018



Complaint

CP 104 & CP 105

Solution



Pengaduan dari Management gedung Chaze Plaza terkait
getaran akibat pekerjaan *soldier pile* Stasiun Setiabudi
*Complaints from the Chaze Plaza building management
related to vibration caused by the work of Setiabudi Station
soldier pile*

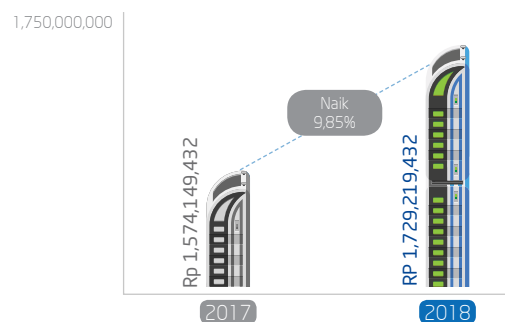
Koordinasi dengan Management Gedung Chaze Plaza
dengan melaksanakan kegiatan *monitoring* untuk
mengukur/memantau level vibrasi pada *ground level*.
*Coordination with Chaze Plaza Building Management by
carrying out monitoring activities to measure / monitor
vibration levels at ground level.*



BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN

COSTS AND/OR INVESTMENTS IN SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL ASPECTS

No	Perihal Subject	2018 (IDR)	2017 (IDR)
1 CP 102 – CP 102			
	Environmental Monitoring	211.000.000	211.000.000
	Waste Disposal	72.000.000	72.000.000
	Toilet Maintenance	19.800.000	21.000.000
	RKL RPL		
	Working Area Cleaning Maintenance	3.000.000	
2 CP 103			
	Environmental Monitoring	147.600.000	166.680.000
	Waste Disposal	173.040.000	173.125.000
	Toilet Maintenance	231.680.000	218.320.000
	RKL RPL	96.000.000	124.900.000
	Working Area Cleaning Maintenance		
	Harardeous Waste Disposal		44.153.000
3 CP 104 – CP105			
	Environmental Monitoring	168.571.432	168.571.432
	Waste Disposal	240.000.000	240.000.000
	Toilet Maintenance		
	RKL RPL		
	Working Area Cleaning Maintenance	366.528.000	134.400.000
Jumlah Total		1.729.219.432	1.574.149.432





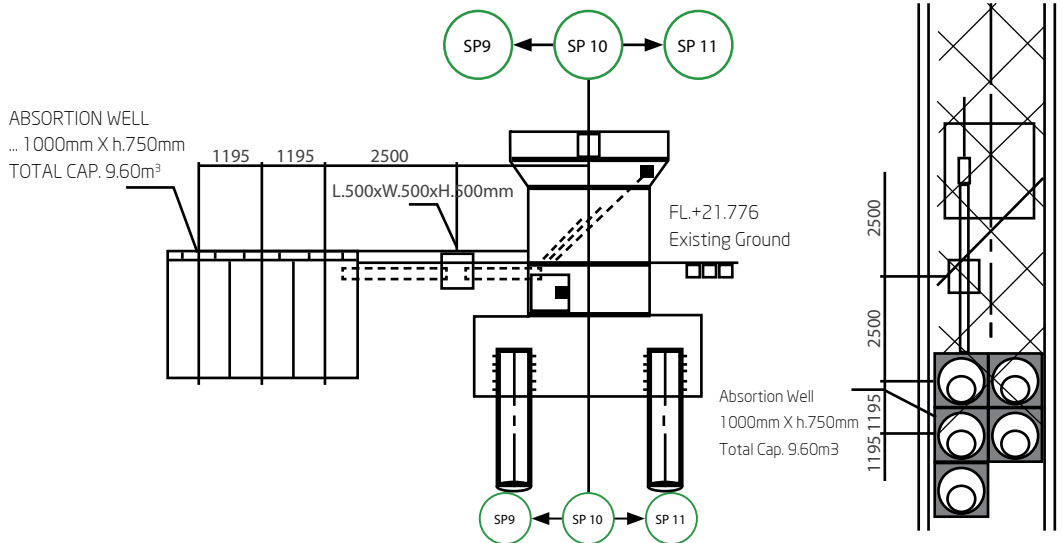
KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

• Pembangunan Sumur Resapan

Pembangunan sumur resapan diperlukan pada area *elevated* yang berfungsi sebagai pengganti penutupan permukaan tanah yang pada dasarnya akan menyerap *surface water*. Jumlah dan kapasitas sumur resapan ini dibangun berdasarkan 1% dari setiap 5000 m2 area yang dibangun. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu solusi untuk menanggapi masalah penurunan muka air tanah yang terjadi di Jakarta sebagai akibat dari pemanfaatan air tanah dari sumur rumah tangga maupun bangunan bertingkat dan pembangunan kota yang telah mengurangi daya resapan tanah. Konsekuensi dari penurunan muka air tanah adalah penurunan permukaan (*land subsidence*) tanah yang telah mengakibatkan keretakan pada bangunan warga Jakarta khususnya Jakarta Barat dan Utara. Berikut merupakan jumlah sumur resapan yang telah dibangun oleh kontraktor MRT Jakarta.

• Construction of Infiltration Well

Construction of infiltration wells is needed in the elevated area which serves as a substitute for ground surface closure which basically absorbs surface water. The number and capacity of infiltration wells is built based on 1% of each 5000m2 area built. The purpose of this activity is as one of the solutions to respond to the problem of land subsidence that occurs in Jakarta as a result of the use of ground water from household wells and multi-storey buildings and city development which has reduced soil absorption power. The consequence of land subsidence is land subsidence which has resulted in cracks in the buildings of Jakarta residents, especially West and North Jakarta. The following is the number of infiltration wells that have been built by the Jakarta MRT contractor.



Area	Total Sumur Resapan Total Infiltration Well	Kapasitas Total Sumur Resapan Total Capacity of Infiltration Well
CP 101- CP 102	12	800 m3
CP 103	151	1.92 m3x151x(+/-)6 = 1,739.52 m3



Sumur resapan yang telah didesain agar air hujan yang tertangkap dalam area *elevated* MRT Jakarta akan diresap ke dalam tanah sebanyak 50% oleh sumur-sumur resapan tersebut sebelum dialirkan ke sistem drainase kota.

Rainwater caught in the elevated area of Jakarta MRT will be absorbed into the ground by as much as 50% by the infiltration wells before being channeled into the city drainage system.

- **Pemasangan *Noise Barrier***

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab MRT Jakarta terhadap masalah gangguan kepada lingkungan sekitar adalah pemasangan *Noise Barrier* pada area yang telah dievaluasi akan terkena dampak pencemaran udara akibat operasi MRT Jakarta melebihi kriteria yang telah ditetapkan dalam KEP MEMLH No. 48 Tahun 1996. Analisis yang telah dilakukan telah memperhatikan tipe area sekitar *viaduct* (area *sensitive* seperti perumahan, rumah sakit, tempat ibadah, atau *non-sensitive* seperti perkantoran), ketinggian bangunan, *peak* dan *non peak hour*. Pemasangan *noise barrier* akan tetap dilaksanakan walaupun kondisi ambience kebisingan dari lalu lintas telah melebihi standar yang berlaku, pemasangan tersebut dilaksanakan berdasarkan efek kebisingan yang ditimbulkan akibat aktivitas operasi MRT Jakarta. Berikut merupakan area yang telah terpasang *noise barrier*:

- ***Noise Barrier Installation***

As one form of MRT Jakarta's responsibility related to issues of disruption to the surrounding environment is the installation of Barrier Noise in the area that has been evaluated to be affected by air pollution due to the Jakarta MRT operation exceeding the criteria specified in KEP MEMLH No. 48 of 1996. The analysis that has been carried out has taken into account the type of area around the viaduct (sensitive areas such as housing, hospitals, places of worship, or non-sensitive areas such as offices), the height of buildings, peak and non peak hours. Installation of noise barrier will still be carried out even though the ambience of noise from traffic has exceeded the applicable standard, the installation is carried out based on the effects of noise caused by the operation of the Jakarta MRT. The following are areas that have installed noise barrier:

Total *noise barrier* terpasang (kombinasi antara sisi Timur dan Barat *viaduct*):

- » TWJO: 240.5 m
- » Termasuk di antaranya adalah pada area Swiss Bell Hotel, Mercure Hotel, Rumah Sakit Siloam, dan Gereja
- » OSJ : 235.02 m
- » Termasuk di antaranya adalah pada area pertokoan, Hotel Amaris, ruko, perkantoran, Hotel Win, Wisma Sehati, Bank AG.
- » Meminimalisir Pencemaran Terhadap Kualitas Air Tanah
 - Telah dibangunnya sumur resapan dengan kapasitas 733m³ untuk depo sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta NO. 68 Tahun 2005
 - Pembuatan sumur resapan di seluruh area CP 103 sebanyak 38 sumur untuk Stasiun Haji Nawi, 41 sumur untuk Stasiun Blok A, 27 sumur untuk stasiun Blok M, 39 sumur untuk stasiun Sisingamangaraja.
- » Penanaman kembali Tanaman yang Terganggu Kegiatan Konstruksi
 - Tanaman pelindung yang terkena proyek telah dipindahkan kembali ke lokasi ruang terbuka hijau atau taman di tempat lain yang terdekat ke lokasi proyek sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta No.09 Tahun 2002.

Total *noise barrier* installed (a combination of East and West side *viaduct*):

- » TWJO: 240.5 m
- » These include the area of Swiss Bell Hotel, Mercure Hotel, Siloam Hospital, and the Church
- » OSJ: 235.02 m
- » These include shopping area, Amaris Hotel, shop houses, offices, Win Hotel, Wisma Sehati, Bank AG.
- » *Minimizing Pollution Against the Quality of Groundwater*
 - There have been built infiltration wells with a capacity of 733m³ for depots in accordance with the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 68 of 2005
 - Preparation of infiltration wells in all CP 103 areas as many as 38 wells for Haji Nawi Station, 41 wells for Blok A Station, 27 wells for Blok M station, 39 wells for Sisingamangaraja station.
- » *Replanting of trees damaged by construction activities*
 - Trees affected by the project have been moved back to the location of green open spaces or parks in other places closest to the project location in accordance with instructions from DKI Jakarta Provincial Park and Cemetery Office No.09 of 2002.



KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN
*COMMITMENT TO HARMONIOUS LIVING ENVIRONMENT: ENVIRONMENTAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

- » Mengurangi tingkat gangguan kegiatan ekonomi masyarakat
 - » Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
 - Kontraktor telah melibatkan masyarakat sekitar dalam konstruksi pembangunan MRT sebagai tenaga keamanan dan buruh harian, tercatat jumlah tenaga kerja terserap 80 orang di area depo, 40 orang di area CP 103, 10-15 orang di area *underground*.
 - » Meminimalisir Tingkat Gangguan Lalulintas
 - Dalam rangka penyambutan kegiatan Asian Games, percepatan pelurusan *alignment* sepanjang tiap Stasiun *Underground* telah terimplementasikan pada tanggal 24 Juli 2018.
 - Rekomendasi penataan ruang jalan Sudirman – Thamrin sesuai dengan kriteria desain dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah diakomodir.
 - Penataan jalur *pedestrian* dan penanaman tanaman hias jalan Sudirman – Thamrin juga telah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Asian Games.
 - » Pemasangan dinding penyerap suara (*sound barrier*) di beberapa titik lokasi seperti di STA0+834~0+875 (Hotel Swiss); STA 0+932~0+983 (Hotel Mercure); STA 1+413~1+513 (Siloam) dan STA 2+856~2+908 (Gereja) Triwulan 3
- » *Reducing the level of disruption of community economic activities*
 - » *Increased Employment and Business Opportunities*
 - *The contractor has involved the surrounding community in MRT construction as security personnel and day laborers, recorded that the number of workers absorbed 80 workers in depot area, 40 workers in CP 103 area, 10-15 workers in underground area.*
 - » *Minimizing the Level of Traffic Disruption*
 - *In order to welcome the Asian Games activities, acceleration of alignment is accelerated as long as each Underground Station has been implemented on July 24, 2018.*
 - *Recommendations for Sudirman - Thamrin road arrangement in accordance with the design criteria from DKI Jakarta Bina Marga Office have been accommodated.*
 - *Arrangement of pedestrian lane and decoration of Sudirman - Thamrin street plants have also been carried out in the event of Asian Games.*
 - » *Sound barrier installation at several local points such as at STA0 + 834 ~ 0 + 875 (Hotel Swiss); STA 0 + 932 ~ 0 + 983 (Hotel Mercure); STA 1 + 413 ~ 1 + 513 (Siloam) and STA 2 + 856 ~ 2 + 908 (Church) Quarter 3*



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY

KEBIJAKAN

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan operasional usaha adalah Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Aspek ini didasari pada pandangan Perusahaan akan karyawan sebagai bagian dari pemangku kepentingan, di mana laju pertumbuhan Perusahaan akan memiliki imbas yang positif terhadap perkembangan setiap karyawan. Pada aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perusahaan memandang aspek ini sebagai pengelolaan operasional proyek dengan mengupayakan risiko yang rendah, terutama adanya risiko kecelakaan kerja dari tenaga kerja di lapangan. Selain berdampak positif terhadap citra korporasi Perusahaan, upaya menekan risiko kecelakaan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan MRT Jakarta.

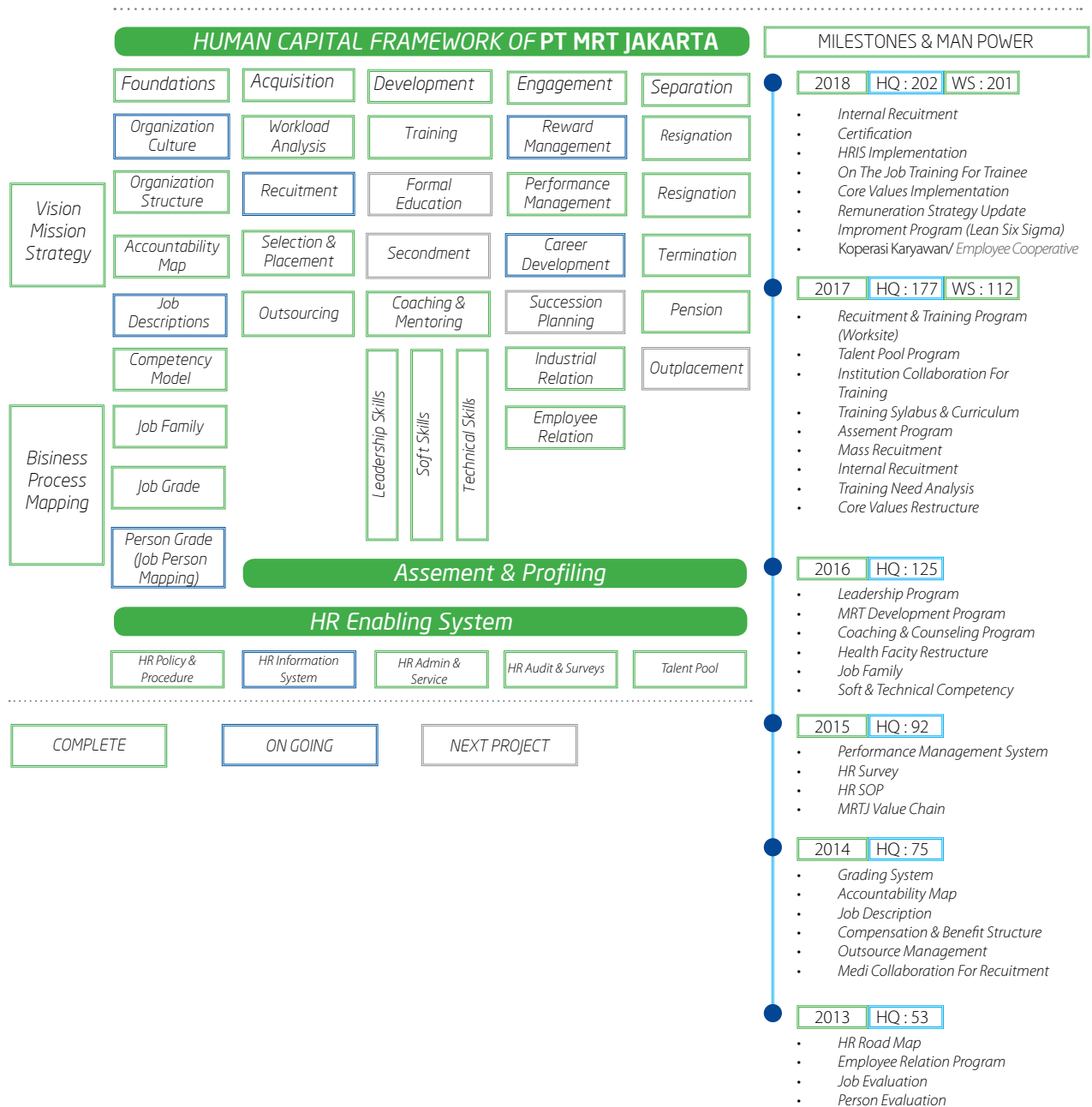
POLICY

Labor practice, Occupational Health and Safety (K3) are important aspects in managing business operations. These aspects are based on the Company's view of employees as part of stakeholders, where the Company's growth rate will have a positive impact on the development of each employee. In the aspect of Occupational Health and Safety (K3), the Company views this aspect as managing the operational of the project by seeking low risk, especially the risk of workplace accidents from workers in the field. To have a positive impact on the corporate image of the Company, efforts to reduce the risk of workplace accidents will create a safe and comfortable work environment for all stakeholders and parties involved in Jakarta MRT development project.



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY

Roadmap Human Capital





PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Karier yang Sama, serta Kesetaraan Gender

Perusahaan merupakan BUMD yang menjunjung tinggi falsafah negara Republik Indonesia dan peraturan serta perundang-undangan sebagai produk hukumnya. Sesuai visi dan misinya, Perusahaan tidak memiliki afiliasi terhadap salah satu golongan maupun paham tertentu yang dapat menciptakan pandangan diskriminatif terhadap sebuah hal. Hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak individu yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian dari terbangunnya hubungan Perusahaan dengan manajemen dan seluruh karyawan.

Perusahaan selalu menghargai hak asasi karyawan dan menghargai segala bentuk perbedaan tanpa melihat budaya, kebangsaan, agama, suku, jenis kelamin, usia maupun kategori yang dilindungi lainnya. Perusahaan menghargai martabat dan nilai setiap individu dalam mengembangkan kemitraan yang setara sebagai bagian dari tim.

Perusahaan tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap perilaku menyimpang antar rekan kerja maupun di luar rekan kerja. Dalam kesehariannya, Insan Perusahaan tidak boleh menggunakan kata-kata atau perilaku yang menghina, mendiskriminasi atau melanggar hak asasi manusia atau merendahkan nilai spiritual seseorang.

Perusahaan berkomitmen untuk mengakomodir segala bentuk perbedaan dan menyatukan kemampuan karyawan, individualitas dan nilai pandang yang beragam ke dalam kekuatan kolektif Perusahaan. Perusahaan memberikan penilaian kepada masing-masing individu secara adil, sesuai dengan peran, tugas, dan kinerjanya dalam mengembangkan kariernya sehingga mereka dapat menghadapi serta mengatasi semua bentuk kesulitan secara pro aktif.

Perusahaan bukan hanya terus berupaya untuk menjaga tempat kerja yang aman, bersih, nyaman dan higienis atas dasar kerja sama antara Perusahaan dan karyawannya, namun juga berupaya memberikan keseimbangan yang sehat antara kinerja pekerjaan dan kesejahteraan karyawan.

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO LABOR PRACTICE

Working Opportunities, Career Development, and Gender Equality

The company is a Regional-Owned Enterprise that upholds the philosophy of the Republic of Indonesia and regulations and legislation as its legal products. In accordance with its vision and mission, the Company has no affiliation with any particular group or beliefs that may create a discriminatory views. Human rights in this case are individual rights regulated in the applicable laws and regulations are part of the establishment of the Company's relationship with management and all employees.

Companies always respect human rights and respect all forms of differences without looking at culture, nationality, religion, ethnicity, gender, age or other protected categories. The company respects the dignity and value of each individual in developing equal partnerships as part of the team.

The company does not tolerate the slightest deviant behavior between work colleagues and outside colleagues. In their daily lives, Company individuals may not use words or behaviors that are insulting, discriminate or violate human rights or undermine one's spiritual values.

The company is committed to accommodate all forms of differences and uniting employee capabilities, individuality and diverse values into the Company's collective strength. Companies provide an assessment to each individual in an appropriate manner, in accordance with their roles, tasks and performance in developing their careers so that they can face and overcome all forms of difficulties proactively.

The company not only continues to strive to maintain a safe, clean, comfortable and hygienic workplace on the basis of cooperation between the Company and its employees, but also strives to provide a healthy balance between work performance and employee welfare.



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

Jika terjadi diskriminasi atau pelecehan, Perusahaan telah memiliki standar baku yang tepat dan cepat, dengan melakukan tindakan sesuai norma dan perundangan yang berlaku, serta membuat skema preventif agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika terjadi kasus pelecehan, Perusahaan berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan semua pihak, termasuk korban, terduga pelaku, dan pemberi informasi.

In the event of discrimination or harassment, the Company has appropriate and fast standards, by taking actions in accordance with applicable norms and regulations, and making preventive schemes so that they do not re-occur in the future. If there is a case of harassment, the Company is committed to protect the confidentiality of all parties, including victims, suspected perpetrators, and informants.

Perusahaan juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau memaksa karyawan bekerja dengan upah minim yang membahayakan perkembangan fisik, mental, moral karyawan.

The company is also committed to not employing minors or forcing employees to work with minimum wages that endanger employees' physical, mental, and moral development.

Dalam program rekrutmen, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi karyawan. Demikian pula dengan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Perusahaan selalu mengedepankan hasil dan produktifitas yang ditunjukkan karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif juga kepada lingkungan kerja di sekitarnya.

In the recruitment program, the Company provides equal opportunities for everyone, both men and women, regardless of ethnic, religious, racial, class, gender, or physical conditions differences to participate employee recruitment programs. Appointment of prospective employees is based on the results of the selection, evaluation results on the trial period and employee orientation. Likewise with opportunities for employees to get promotions or awards. The company always puts forward the results and productivity shown by employees, which in the end will give positive results to the working environment around them.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan usaha dan jangkauan operasi yang berkembang cepat, Perusahaan menerapkan beberapa strategi pemenuhan SDM yang tepat, akurat dan cepat namun dengan tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Strategi Pemenuhan SDM yang diterapkan Perusahaan mencakup 2 (dua) fokus, yaitu :

In order to anticipate the development of the business and the rapidly expanding range of operations, the Company applies several strategies to fulfill the right, accurate and fast Human Capital, but by still paying attention to the quality or basic competencies of the candidates.

1. Mempertahankan karyawan yang masuk dalam *talent pool* agar terus menjadi bagian dari organisasi, dan memberi kontribusi penuh sesuai dengan potensi maksimalnya.
2. Menarik minat para talenta baru yang terdapat di dalam industri segmen Perusahaan ataupun talenta baru yang tertarik masuk ke dunia infrastruktur transportasi.

1. *Maintain employees who are included in the talent pool to continue to be part of the organization, and make full contributions in accordance with their maximum potential.*
2. *Attract new talents in the Company segment industry or new talents who are interested in entering the world of transportation infrastructure.*

Kebijakan bagi Karyawan Perempuan

Policies for female Employees

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan keluarga dan Perusahaan khususnya bagi karyawan wanita dalam Perusahaan, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung hal tersebut yakni sebagai berikut:

In order to create a balance between the interests of the family and the company, especially for female employees in the company, there are several policies that support this, namely as follows:



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 15 Tahun 2013 di kantor maupun stasiun; 2. Istirahat melahirkan/gugur kandungan yakni 1,5 bulan sebelum & setelah melahirkan; 3. Fasilitas kesehatan dengan menanggung maksimal 3 (tiga) anak dari karyawan termasuk suami dari karyawan yang telah di daftarkan di Perusahaan; 4. Kesempatan wanita untuk dapat menyusui anaknya pada saat jam kerja dan/atau pemerah ASI; 5. <i>Pap smear</i> bagi Karyawan wanita yang telah menikah 6. Karyawan wanita mendapatkan <i>benefit montly check up</i> kehamilan & persalinan 7. Karyawan mendapatkan izin untuk meninggalkan pekerjaan pada saat istri melahirkan tanpa memotong hak cuti tahunan sebanyak 2 (dua) hari kerja; 8. Olah raga rutin bagi karyawan wanita; 9. Tidak ada diskriminasi dan prasyarat <i>gender</i> dalam proses perekrutan karyawan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lactation Room for Breastfeeding Mothers according to Minister of Manpower Regulation No. 15 of 2013 in offices and stations;</i> 2. <i>Childbirth / miscarry rest which is 1.5 months before & after giving birth;</i> 3. <i>Health facilities with a maximum of 3 (three) children from employees including the husband of the employee registered at the company;</i> 4. <i>The opportunity for women to be able to breastfeed their children during working hours and / or breastpump;</i> 5. <i>Pap smear for married female employees</i> 6. <i>Female employees get monthly check-up benefits for pregnancy & childbirth</i> 7. <i>Employee gets permission to leave work when the wife gives birth without cutting the annual leave rights of 2 (two) working days;</i> 8. <i>Regular exercise for female employees;</i> 9. <i>There is no discrimination and gender prerequisites in the process of hiring employees.</i> |
|--|--|

Pemenuhan Hak Kesejahteraan Karyawan

Seperti yang telah diuraikan secara rinci dalam bagian Sumber Daya Manusia pada bab Fungsi Penunjang Operasi dan Usaha, di laporan tahunan ini, Perusahaan memiliki komitmen yang kuat bagi pemberdayaan karyawan; termasuk di antaranya kesejahteraan dan program peningkatan kompetensi. Gaji atau *honorarium* sebagai hak karyawan atas imbalan kerja diberikan dengan perhitungan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta pertimbangan kelayakan harga di pasar tenaga kerja DKI Jakarta. Di sepanjang tahun 2018, besaran biaya yang diberikan Perusahaan untuk gaji karyawan mencapai Rp61,37 miliar untuk 518 karyawan, meningkat 126,96% dari tahun 2017 yang sebesar Rp27,04 miliar untuk 288 karyawan. Rincian pemenuhan gaji karyawan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Fulfillment of Employee Welfare Rights

As described in detail in the Human Capital section of the Operational and Business Support Function chapter, in this annual report, the Company has a strong commitment to empowering employees; including among them welfare and competence improvement programs. Salary or honorarium as an employee's right to employee benefits is provided with calculations in accordance with the rules and regulations, as well as consideration of the feasibility of prices in the DKI Jakarta labor market. Throughout 2018, the amount of fees the Company provided for employee salaries reached Rp61.37 billion for 518 employees, increasing 126,96% from 2017 which amounted to Rp27.04 billion for 288 employees. Details of the Company employees' welfare fulfillment for the past 2 (two) years are as follows:

Jumlah Gaji Karyawan
Total Employee Salary

Tahun Year	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employee (person)	Jumlah Gaji (Rp) Salary (Rp)
2014	75	7.608.945.406
2015	89	12.390.590.774
2016	120	15.481.741.733
2017	288	27.042.308.267
2018	518	61.370.052.727



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

Sebagai bagian dari transparansi informasi, berikut disampaikan rasio gaji/remunerasi tertinggi (Kepala Divisi) dan terendah (*Staff / Admin*) per bulan yang menggambarkan jenjang gaji/remunerasi yang diberlakukan Perusahaan.

As part of information transparency, the following is the highest and lowest salary / remuneration ratio per month that describes the salary / remuneration level applied by the Company.

Rasio Gaji/Remunerasi Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary / Remuneration Ratio

Rasio Gaji/Remunerasi <i>Ratio of Salary/Remuneration</i>	Skala Perbandingan <i>Comparison Scale</i>	
	2018	2017
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest ratio of employee salary</i>	1 : 11,37	1 : 12,50
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest ratio of Board of Directors salary</i>	1 : 1,11	1 : 1,11
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest ratio of Board of Commissioners salary</i>	1 : 1,29	1 : 1,29
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan karyawan tertinggi <i>Highest salary ratio of Directors and highest employees</i>	1 : 2,50	1 : 3,01

Apresiasi

- Anugerah Masa Bakti
 - » Masa kerja 8 tahun mendapatkan 10 gram Emas
 - » Masa kerja 16 tahun mendapatkan 15 gram Emas
 - » Masa kerja 24 tahun mendapatkan 20 gram Emas
 - » Masa kerja 32 tahun mendapatkan 25 gram Emas
- Pembentukan Lingkungan Kerja yang Kondusif
Dalam menerapkan *work, life and balance* serta lingkungan kerja yang kondusif bagi Karyawan ditengah target kerja yang meningkat dalam rangka memasuki fase operasi dan komersial, Perusahaan memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan olahraga, *event* karyawan, *employee gathering*, dan lain-lain.

Appreciation

- Award for Years of Service
 - » 8-year work period receives 10 Gram of Gold
 - » 16-year work period receives 15 Gram of Gold
 - » 24-year work period receives 20 Gram of Gold
 - » 32-year work period receives 25 Gram of Gold
- Establishment of a Conducive Work Environment
In implementing *work, life and balance* and a conducive work environment for employees amid increasing work targets in order to enter the operational and commercial phases, the Company provides opportunities for employees to conduct sports, *employee events*, *employee gatherings*, and others.



(Pekan Olahraga, Seni dan Budaya BUMD 2018)
(2018 Regional-Owned Enterprise Sport, Art and Culture Week)



(Employee Gathering 2018)



(Turnamen Futsal antar Karyawan)
(Futsal Tournament among employees)



(Olahraga rutin Karyawan di Kantor Worksite)
(Employees Regular Sports at the Worksite Office)

Rekrutmen dan Turnover Karyawan

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, *gender*, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi karyawan. Demikian pula dengan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Perusahaan selalu mengedepankan hasil dan produktifitas yang ditunjukkan karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif juga kepada lingkungan kerja di sekitarnya.

Hingga akhir Desember 2018, jumlah karyawan mencapai 384 karyawan, meningkat 33,33% karyawan dibandingkan jumlah di akhir tahun 2017 yang sebanyak 288 orang. Di sepanjang tahun 2018, terdapat 8 karyawan yang keluar dari Perusahaan, atau 3% dibanding jumlah karyawan yang sebanyak 384 karyawan. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang sebesar 1,00%.

Employee Recruitment and Turnover

The Company provides equal opportunities for prospective employee, either male or female, regardless of ethnic, religious, racial, class, gender, or physical conditions to attend employee recruitment programs. Appointment of prospective employees is based on the results of the selection, evaluation results on probation and employee orientation. Similarly, the opportunity for employees to get promotions or reward. The Company always prioritizes the results and productivity shown by employees, which in the end will provide positive results to the working environment around them.

Until the end of December 2018, the number of employees reached 384 employees, an increase by 33,33% employees compared to the total employees at the end of 2017 as many as 288 employees Throughout 2018, there were 8 employees who left the Company, or 3% compared to the number of employees as many as 384 employees. the figure is slightly higher compared to the figure 2017 of 1.00%.

Perputaran Karyawan Employee Turnover

Penyebab Reason	2018	2017	2016	2015	2014
Pensiun alami Natural pension	0	1	0	0	0
Pensiun dini Early retirement	0	0	0	0	0
Meninggal Demise	0	0	0	0	0
Mengundurkan diri Resignation	8	4	5	1	2



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

Perputaran Karyawan
Employee Turnover

Penyebab <i>Reason</i>	2018	2017	2016	2015	2014
Diberhentikan karena melakukan pelanggaran <i>Dismissed for violation</i>	0	0	0	0	0
Jumlah karyawan keluar <i>Number of employees left</i>	8	5	5	1	2
Total karyawan <i>Total employees</i>	384	288	120	89	75
Persentase turnover <i>Turnover percentage</i>	3%	1,00%	3,20%	2,17%	6,67%

Tingkat Perputaran Karyawan
Employee Turnover Rate

2014	2015	2016	2017	2018
6,67%	2,17%	3,20%	1,00%	3%

Rentang Usia Karyawan yang Keluar dari Perusahaan di Tahun 2018 (orang)
Age Range of Employees who Leave the Company in 2018 (person)

Rentang Usia <i>Age</i>	2018				2017			
	L <i>M</i>	P <i>F</i>	Jumlah <i>Total</i>	Persentase (%) <i>Percentage</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	Persentase (%) <i>Percentage</i>
51 tahun <i>years old</i>	0	0	0	0.00%	1	0	1	0.35%
41-50 tahun <i>years old</i>	3	0	3	0.58%	1	1	2	0.69%
31-40 tahun <i>years old</i>	1	0	1	0.19%	0	0	0	0.00%
21-30 tahun <i>years old</i>	3	1	4	0.77%	2	0	2	0.69%
Jumlah <i>Total</i>	7	1	8	1.54%	4	1	5	1.74%

**Kebebasan Berserikat dan Berkumpul:
Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial**

Perusahaan menjamin keberadaan seluruh pekerja di lingkungan kerja Perusahaan sebagai bagian dari hak berserikat karyawan. sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan belum memiliki Serikat pekerja di lingkungan Perusahaan, sehingga Perusahaan belum memiliki perjanjian kerja bersama (PKB).

**Freedom of Association and Gathering:
Trade Unions and Industrial Relations**

The company guarantees the existence of all workers in the Company's working environment as part of the workers' right to freedom of association. Until December 31, 2018, the Company does not yet have a union within the Company, therefore the Company do not have any Collective Labor Agreement (CLA).

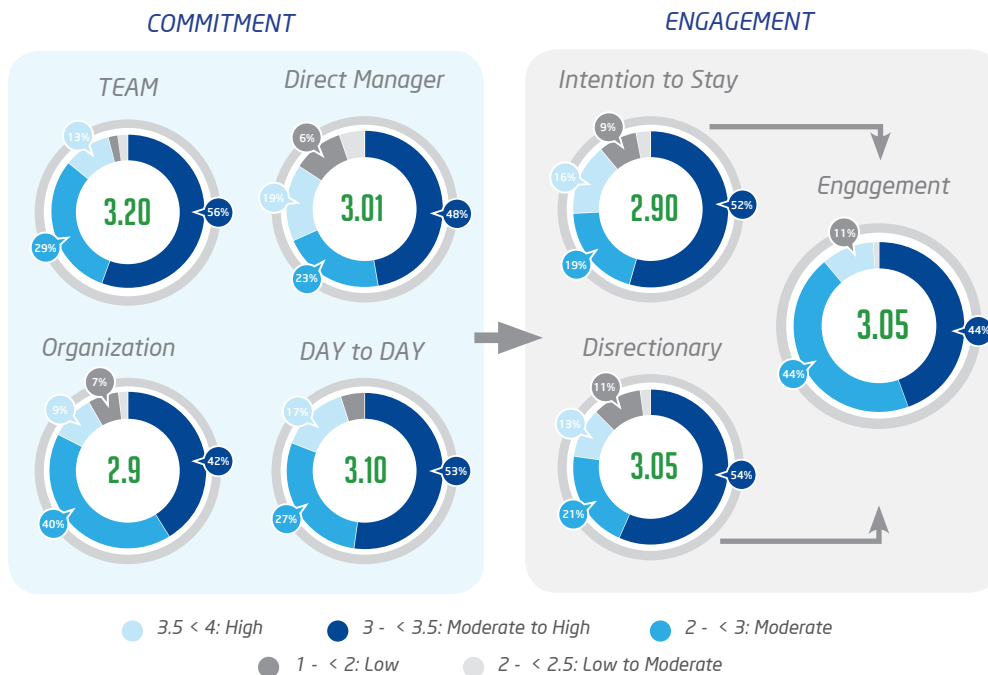


Survei Kepuasan/Keterikatan Karyawan

Perusahaan melakukan survei kepuasan/keterikatan karyawan secara mandiri setiap tahunnya dengan mengadaptasi metode dari *Corporate Leadership Council (CLC) / Corporate Executive Board (CEB)* yang telah di kembangkan selama 25 tahun. Terdapat beberapa dimensi yang memengaruhi keterikatan karyawannya yaitu komitmen dan keterikatan, di mana setiap dimensi memiliki beberapa domain tersendiri. Untuk dimensi komitmen terdiri dari 4 domain yaitu tim, atasan langsung, organisasi dan keseharian pekerjaan. Sedangkan untuk dimensi keterikatan terdiri dari dua domain sebagai karakteristiknya yaitu kecenderungan untuk bertahan dan kemauan untuk berkontribusi lebih. Adapun hasil survei tahun 2018 menunjukkan kenaikan index kepuasan/keterikatan karyawan dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 3.03 menjadi 3.05 (skala 1-4; dengan 4 sangat terikat/puas dan 1 sangat tidak terikat/puas).

Employee Satisfaction / Engagement Survey

The company conducts employee satisfaction / engagement surveys annually by adapting the method of the *Corporate Leadership Council (CLC) / Corporate Executive Board (CEB)* which has been developed for 25 years. There are several dimensions that influence the attachment of their employees, namely commitment and attachment, where each dimension has several separate domains. For the commitment dimension consists of 4 domains, namely team, direct supervisor, organization and daily work. Whereas the attachment dimension consists of two domains as its characteristics, namely the tendency to endure and the willingness to contribute more. The results of the 2018 survey showed an increase in the employee satisfaction / engagement index compared to 2017, which was from 3.03 to 3.05 (scale 1-4; with 4 very bound/satisfied and 1 very unbound/satisfied).





TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pembentukan P2K3

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerja sama antara Perusahaan dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pembentukan P2K3 MRT Jakarta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 450 Tahun 2018 pada tanggal 13 Februari 2018 dan telah dilantik oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Bapak Khadik pada tanggal 15 Februari 2019 pada acara *Safety, Health, Environment, and Security (SHES) Award 2018*.

Struktur P2K3 MRT Jakarta diketuai oleh Direktur Utama (Bapak William Sabandar), Sekretaris P2K3 adalah Kepala Divisi *Risk, Quality, and Safety Management* (Ibu Ernie Widianty R.) dan beranggotakan Direksi, Kepala Divisi, Kepala Departemen, *Project Manager*, dan/atau *Deputy Manager* Konsultan & Kontraktor PT MRT Jakarta.

Kontrol Perusahaan Terhadap Mitra Kerja Terkait Keselamatan Kerja

Perusahaan menekankan pentingnya pengelolaan Keselamatan Kerja kepada seluruh kontraktor yang melakukan pekerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta; tidak terkecuali kepada tamu yang kebetulan melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kemajuan proyek. Penggunaan sarana alat keamanan dan keselamatan kerja seperti helm, *safety booth* dan sarung tangan maupun pakaian pelindung kerja diwajibkan tanpa pengecualian.

Perusahaan juga mewajibkan seluruh kontraktor untuk terus meningkatkan kesadaran para pekerja proyek akan pentingnya keselamatan kerja. Faktor pengetahuan umum dan pengetahuan teknis akan beroperasinya alat-alat di lapangan harus disosialisasikan kepada seluruh proyek. Hal ini penting,

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Establishment of P2K3

As a business entity committed to compliance with occupational safety and health norms and applicable laws and regulations in Indonesia, the Company establishes an Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3). The formation of this organization refers to Minister of Manpower Regulation No. PER.04 / MEN / 1987 concerning the Occupational Safety and Health Supervisory Committee and the Procedure for Appointment of Occupational Safety Experts. P2K3 is an auxiliary body which is a forum for collaboration between companies and employees to develop cooperation in the application of occupational safety and health.

The establishment of MRT Jakarta P2K3 has been ratified based on the Decree of the Head of the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office Number 450 Year 2018 on February 13, 2018 and has been appointed by the Head of the DKI Jakarta Manpower Department Supervision, Mr. Khadik on February 15, 2019 at an event of Safety, Health, Environment, and Security (SHES) 2018 Award.

The MRT Jakarta P2K3 structure is chaired by the President Director (Mr William Sabandar), the P2K3 Secretary is the Head of Risk, Quality and Safety Management Division (Ms. Ernie Widianty R.) and consists of Directors, Division Heads, Department Heads, Project Managers, and / or Deputies Manager Consultant & Contractor PT MRT Jakarta.

Control of the Company Against Working Partners Related to Work Safety

The company emphasizes the importance of managing occupational safety for all contractors who carry out work on the Jakarta MRT development project; no exception to guests who happen to make field trips to review the progress of the project. The use of safety and security equipment such as helmets, safety booths and protective gloves and work clothes is required without exception.

The company also requires all contractors to continue to raise awareness of project workers on the importance of work safety. The general knowledge factor and technical knowledge of the operation of the tools in the field must be socialized to the entire project. This is important, so that every worker understands the



agar setiap pekerja memahami proses beroperasinya alat saat bekerja, dan dapat menghindari risiko kecelakaan secara lebih dini. Selain itu, Perusahaan mewajibkan untuk peralatan yang modern dari kontraktor harus diikuti dengan standarisasi internasional terkait pengetahuan tentang keselamatan kerja dan pencegahannya bagi seluruh pekerja.

Sarana Keselamatan Kerja

Pada area kantor pusat di mana Perusahaan dan seluruh karyawan melakukan aktivitas, Perusahaan telah melengkapi seluruh kantor operasional (kantor pusat dan kantor proyek) dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti: Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), *Smoke Detector*, *Diesel Pump*, tangga darurat, dan alat penunjang keselamatan kerja lainnya. Fasilitas keselamatan dalam gedung di mana Perusahaan berkantor telah sesuai dengan standar alat keselamatan kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Sosialisasi dan Pelatihan K3

Perusahaan menempatkan sosialisasi keselamatan kerja sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses konstruksi. Proses sosialisasi dilakukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, baik para pekerja, maupun kepada pengguna jalan umum yang melintas di area proyek konstruksi MRT Jakarta.

operation of the tool while working, and can avoid the risk of accidents earlier. In addition, the Company requires that modern equipment from contractors must be followed by international standardization regarding knowledge about work safety and prevention for all workers.

Work Safety Facilities

At the head office area where the Company and all employees carry out activities, the Company has equipped all operational offices (head office and project offices) with various safety devices such as: Lightweight Fire Extinguisher (APAR), Smoke Detector, Diesel Pump, emergency ladder, and supporting tools of other work safety. Safety facilities in the Company's office buildings are in accordance with the standards of fire safety equipment based on the Minister of Public Works Regulation on the Technical Requirements of Fire Protection Systems in Buildings and Environment.

K3 Socialization and Training

The company places the socialization of work safety as one of the most important factors in the construction process. The socialization process was carried out to all parties involved in the project, both workers and public road users who crossed the Jakarta MRT construction project area.



Pelaksanaan Safety Talk
Implementation of Safety Talk



Pelaksanaan in-house training
Implementation of in-house training



Pelatihan Basic Fire Fighting
Training of Basic Fire Fighting

Inspeksi keselamatan kebakaran dilakukan secara periodik terhadap alat-alat kebakaran sebagaimana tersebut di atas. Perusahaan juga telah memiliki rencana situasi kebakaran, peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran berada di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh karyawan teredukasi dengan baik. Simulasi serupa juga dilakukan

Fire safety inspections are carried out periodically on fire equipment as mentioned above. The company also has a fire situation plan, laying procedures for fire safety operations in the employee's room and every floor of the building so that all employees are well educated. Simulations are also carried out in



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

di area proyek dengan standar prosedur masing-masing, sesuai dengan karakter situasi dan kondisi di lapangan.

the project area with each standard procedure, according to the character of the situation and conditions in the field.

Foto-foto kegiatan simulasi kebakaran
Pictures of fire simulation activities



Simulasi Tanggap Darurat Wisma Nusantara
Wisma Nusantara Emergency Response Simulation



Simulasi Tanggap Darurat Kontraktor
Contractor Emergency Response Simulation



Simulasi Tanggap Darurat Fase Konstruksi
Construction Phase Emergency Response Simulation

Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety Training

No	Tanggal Pelaksanaan <i>Date of Implementation</i>	Kegiatan <i>Activities</i>	Total
1	15-22 April 2018 <i>April 15-22, 2018</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi K3 Listrik <i>Electric K3 Technician Training and Certification</i>	1
2	06-12 Mei 2018 <i>May 06-12, 2018</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi K3 Listrik <i>General Occupational Safety and Health Expert Training and Certification (AK3U)</i>	5
3	27 Agustus-8 September 2018 <i>August 27 - September 08, 2018</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U) <i>Occupational Health and Safety (K3) Technician Training and Certification</i>	2
4	7-12 Oktober 2018 <i>October 7-12, 2018</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik <i>Occupational Health and Safety (K3) Technician Training and Certification</i>	9
5	30 Oktober 2018 - 1 November 2018 <i>October 30 - November 01, 2018</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Kemnakertrans RI Operator Forklift <i>RI Ministry of Manpower and Transmigration Training and Certification Forklift Operators</i>	8
6	11 -17 November 2018 <i>November 11 - 17, 2018</i>	<i>Safety Management On The Job Training</i> <i>Safety Management On The Job Training</i>	3
7	21-23 November 2018 <i>November 21-23, 2018</i>	<i>Inhouse Pelatihan dan Sertifikasi K3 Kebakaran</i> <i>Inhouse Pelatihan dan Sertifikasi K3</i>	15
8	5-8 November 2018 <i>November 5-8, 2018</i>	Pelatihan Operator Boiler Kelas 2 - Kapasitas < 10 Ton <i>Operator Boiler Training Class 2 - Capacity < 10 Ton</i>	2



Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety Training

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Kegiatan Activities	Total
9	7-9 November 2018 November 7-9, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi K3 Operator Crane Kelas III Kapasitas Di Bawah 25 Ton <i>K3 Training and Certification for Class III Crane Operators with Capacity Below 25 Tons</i>	9
10	19-21 Desember 2018 December 19-21, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi Kemenaker Basic First Aid <i>Ministry of Manpower Basic Training and Certification of Basic First Aid</i>	15
11	9-15 Desember 2018 December 9-15, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik <i>Training and Certification of Electrical Safety and Health Technicians (K3)</i>	3
12	5-7 Desember 2018 December 5-7, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi K3 Operator Rigging <i>K3 Rigging Operator Training and Certification</i>	7
13	10-20 Desember 2018 December 10-20, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi Welding Inspector <i>Welding Inspector Training and Certification</i>	4
14	12-26 November 2018 November 12-26, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Kemnaker <i>Ministry of Manpower General OHS Expert Training and Certification</i>	8
15	17-19 Desember 2018 December 17-19, 2018	Pelatihan dan Sertifikasi K3 Juru Ikat (Rigger) <i>K3 Training and Certification of Riggers</i>	6
16	19-21 Desember 2018 December 19-21, 2018	Inhouse Pelatihan dan Sertifikasi Kelas D Kebakaran <i>Inhouse Class D Fire Training and Certification</i>	30

Kecelakaan Kerja

Perusahaan memiliki kebijakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai bagian dari pemenuhan hak kerja karyawan Perusahaan. Definisi dan jenis kecelakaan kerja di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

Defenisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau kematian.

Jenis Kecelakaan Kerja

Jenis kecelakaan kerja yang di lingkup perusahaan adalah sebagai berikut :

- **Fatality**
Kecelakaan yang mengakibatkan karyawan/personel kehilangan nyawa dalam waktu 24 jam terhitung waktu terjadinya kecelakaan tersebut.
- **Lost Time Injury (LTI)**
Karyawan yang terluka atau sakit mengalami hari hilang kerja.

Work accident

The company has a Work Accident Guarantee Program policy as part of fulfilling the work rights of the Company's employees. The definition and type of workplace accidents in the Company's scope are as follows:

Definition of Work Accident

A work accident is an incident that causes injury, work-related illness or death.

Types of Work Accidents

The types of work accidents that are within the scope of the company are as follows:

- **Fatality**
Accidents that resulted in employees / personnel losing their lives within 24 hours of the time the accident occurred.
- **Lost Time Injury (LTI)**
Injured or sick employees have lost work days.



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

- **Restricted Day Work Case (RWDC)**
Akibat dari cedera atau penyakit akibat kerja di mana menimbulkan kondisi pekerja ditugaskan untuk pekerjaan lain secara sementara atau permanen (*transfer ke pekerjaan lain*)
- **Medical Treatment Cases (MTC)**
kasus kecelakaan kerja yang membutuhkan perawatan lukanya dari tenaga medis yang profesional (*perawat/dokter*).
- **First Aid Cases (FAC)**
kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatan lukanya tidak membutuhkan penanganan dari tenaga medis yang profesional (*perawat/dokter*), cukup Unit P3K yang sudah diberikan pelatihan
- **Restricted Day Work Case (RWDC)**
As a result of work-related injuries or illnesses which cause conditions for workers to be temporarily or permanently assigned to other jobs (transfer to other jobs)
- **Medical Treatment Cases (MTC)**
Work accident cases that require wound care from professional medical personnel (nurses / doctors).
- **First Aid Cases (FAC)**
Work accident cases which in their wound care do not require treatment from professional medical personnel (nurses / doctors), enough first aid units have been given training

Jumlah Kecelakaan Kerja
Total Accident

No	Type of Incident/Accident	CP 101-102	CP 103	CP 104-105	CP 106	CP 107	CP 108
A Lost Time Injuries							
1	Fatality	-	-	-	-	-	-
2	Lost Work Day Case(s)	2	-	-	-	-	-
3	Restricted Work Day Case(s)	-	-	-	-	-	-
4	Medical Treatment Case(s)	1	-	-	-	-	-
Subtotal (A)		3	-	-	-	-	-
B Non-Lost Time Injurious							
1	First Aid Case(s)	-	-	-	-	3	-
2	Fire Incident	-	-	2	-	3	-
3	Spillage	-	-	-	-	-	-
Subtotal (B)		-	-	2	-	6	-
C Non-Injurious Accident							
1	Motor Vehicle Crashes	1	-	-	-	-	-
2	Equipment Incident (EI)	1	-	-	-	-	-
3	Property Damage	1	-	-	-	4	-
Subtotal (C)		3	-	-	-	4	-
Total (A+B+C)		6	-	2	-	10	1
D Near Misses and Hazard Identification Report							
1	Near Misses Incident	22	28	5	3	4	0
2	Hazard Identification Report	5,569	3,522	2,681	241	1,166	54

Audit Keselamatan Kerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan, PT MRT Jakarta melakukan penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Indonesia yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Adapun salah satu bentuk pemenuhan terhadap peraturan tersebut adalah dengan dilaksanakannya Audit SMK3. Audit SMK3 dilakukan oleh Departemen Safety, Health, Environment and Security kepada seluruh Kontraktor setiap 6 (enam) bulan.

Pada tanggal 7-9 Januari 2019 juga telah dilaksanakan Audit Eksternal SMK3-KP yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Kriteria <i>Type of Criteria</i>	:	166 Kriteria (Lanjutan) <i>166 Criteria Continued</i>
Kesesuaian <i>Conformity</i>	:	153 Kriteria <i>153 Criteria</i>
Ketidaksesuaian <i>Incompatibility</i>	:	13 Kriteria (Minor) <i>13 Criteria (Minor)</i>
Presentase <i>Percentage</i>	:	92,17% (Memuaskan) <i>92.17% Satisfying</i>

Work Safety Audit

To realize the vision and mission of the Company, PT MRT Jakarta conducts the preparation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in accordance with the provisions of applicable Indonesian government regulations, namely Government Regulation (PP) No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3).

One form of fulfillment of the regulation is the implementation of the SMK3 Audit. SMK3 Audit is carried out by the Department of Safety, Health, Environment and Security to all Contractors every 6 (six) months.

On January 7 – 9, 2019 an SMK3-KP External Audit was conducted by the Certification Board of Indonesia Classification Bureau (BKI) with the following results:



Pelaksanaan Audit Eksternal SMK3
Implementation of SMK3 External Audit



Pelaksanaan Audit Eksternal SMK3
Implementation of SMK3 External Audit



Fasilitas dan Jaminan Kesehatan bagi Karyawan

Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan Perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing. Fasilitas kesehatan yang diselenggarakan Perusahaan adalah:

Health Facilities and Insurance for Employees

Employee health is one of the key factors in achieving the performance of employees as individuals and the company as a whole. The company facilitates employees with several activities that are expected to generate awareness and motivation in maintaining their health. The health facilities organized by the Company are:



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas <i>Medical Check Up</i>. 2. Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kaca mata, alat bantu dengar, pemeriksaan lab dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Periodic health facilities include Medical Check Up facilities.</i> 2. <i>Treatment facilities that are insurance reimbursement of hospitalization costs, outpatient care after discharge from hospital, labor costs, dental care costs, replacement of glasses, hearing aids, lab checks and other medical treatments recommended by doctors after hospitalization.</i> |
|---|---|

Di samping fasilitas di atas, Perusahaan mengikutsertakan karyawan dan keluarganya dengan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan proteksi dan biaya pertanggungans asuransi saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit termasuk jaminan bagi karyawan dan istri karyawan yang menjalani persalinan.

In addition to the above facilities, the Company includes employees and their families with health insurance organized by BPJS Kesehatan which is carried out in stages. This facility aims to provide protection and insurance coverage costs while undergoing a medical examination or hospital treatment include insurance for employees and wives of employees who undergo labor.

Perihal Subject	2018	2017	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Klaim yang Disetujui (Rp) <i>Approved Claim Amount (Rp)</i>	3.578.725.427	2.029.251.423	1.549.474.005	76,36%
Jumlah Klaim <i>Number of Claims</i>	2.664	1.779	885	49,75%
Jumlah Karyawan (Beserta Keluarga) yang Klaim (orang) <i>Number of Employees (along with Families) Claims (person)</i>	591	308	283	91,88%

Saat ini Perusahaan belum memiliki poliklinik/klinik dan dokter Perusahaan. Maka, Perusahaan selain memberikan Jaminan BPJS Kesehatan, Perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan untuk Karyawan dalam bentuk *Administrative Services Only (ASO)*, Jadi Karyawan Perusahaan memiliki 2 fasilitas kesehatan.

At present the Company does not yet have any clinic or a company doctor. Hence, in addition to provide BPJS Health Guarantees, the Company also provides health facilities for Employees in the form of Administrative Services Only (ASO), therefore the Company's employees have 2 health facilities.



Jumlah Pekerja Proyek Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Number of Registered Workers for BPJS Employment

Paket Package	Proyek Project	Kontraktor Contractor	Jumlah Pekerja Number of Workers	Persentase Terhadap Jumlah Karyawan di Masing-masing CP Percentage on num- ber of employees in each CP
CP 101	Konstruksi Layang Lebak Bulus - Fatmawati <i>Section Lebak Bulus – Fatmawati</i>	Tokyu-Wika JO	440	100%
CP 102	Konstruksi Layang Fatmawati - Cipete Raya <i>Section Fatmawati - Cipete Raya</i>		655	100%
CP 103	Konstruksi Layang Haji Nawi - Sisingamangaraja <i>Section Haji Nawi - Sisingamangaraja</i>	Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV	838	100%
CP 104	Konstruksi Bawah Tanah Senayan - Istora <i>Underground Section Senayan Istora</i>	Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JO	420	100%
CP 105	Konstruksi Bawah Tanah Bendungan Hilir - Setiabudi <i>Underground Section Bendungan Hilir - Setiabudi</i>		416	
CP 106	Konstruksi Bawah Tanah Dukuh Atas - Bundaran Hotel Indonesia <i>Underground Section Dukuh Atas - Bundaran Hotel Indonesia</i>	Sumitomo Mitsui-Hutama Karya JO	279	100%
CP 107	Railway System Lebak Bulus - Bundaran HI	Metro One Consortium	595	100%
Cp 108	Rolling Stock	Sumitomo Corp	26	
Jumlah Total			3669	100%

* Program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja proyek didaftarkan oleh masing-masing kontraktor.

* The BPJS Employment Program for all project workers is registered by each contractor



TUMBUH BERSAMA KARYAWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
*GROWING WITH EMPLOYEES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT,
HEALTH AND SAFETY*

Selain pemenuhan hak karyawan yang wajib dilakukan entitas usaha di Indonesia, Perusahaan melalui kontraktor melakukan pendidikan terkait kesehatan seperti yang dilakukan melalui edukasi dan konseling pencegahan penularan HIV/AIDS serta tes HIV/AIDS bagi para pekerja konstruksi MRT Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pencegahan penularan HIV/AIDS di kalangan pekerja, sekaligus melakukan tes HIV/AIDS.

In addition to fulfill employee rights that must be carried out by business entities in Indonesia, the Company through contractors conducts health-related education such as those carried out through education and counseling to prevent HIV / AIDS transmission and HIV / AIDS testing for Jakarta MRT construction workers. This activity is expected to be able to provide knowledge about the prevention of HIV / AIDS transmission among workers, as well as testing HIV / AIDS.

Kegiatan Edukasi dan Konseling Pencegahan Penularan HIV/AIDS
HIV / AIDS Transmission Prevention and Education Activities

Paket <i>Package</i>	Tempat/Tanggal Kegiatan <i>Date of Activity</i>	Instruktur/Pembicara <i>Instructure</i>
CP 101-102, CP 103, CP 107 dan CP 108	Depo Lebak Bulus/15 Desember 2018 <i>Depo Lebak Bulus/December 15, 2018</i>	Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Wilayah Jakarta Selatan <i>AIDS Countermeasures Commission of DKI Jakarta Province and South Jakarta Regional Health Center</i>
CP 104-105	Kantor Proyek SOWJ/15 Desember 2018 <i>Project Office SOWJ/December 15, 2018</i>	Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Wilayah Jakarta Selatan <i>AIDS Countermeasures Commission of DKI Jakarta Province and South Jakarta Regional Health Center</i>
CP 106	Kantor Proyek SMCC-HK/15 Desember 2018 <i>Kantor Proyek SMCC-HK/December 15, 2018</i>	Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Wilayah Jakarta Selatan <i>AIDS Countermeasures Commission of DKI Jakarta Province and South Jakarta Regional Health Center</i>



Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan belum menerima pengaduan masalah ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Complaints related to Employment, Health and Safety Issues

Throughout 2018, the Company has not received complaints of labor, health and safety issues.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang K3

K3 Award and Certification

Sertifikasi Bidang K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2018 Occupational Health and Safety Certificates that still Valid in 2018

Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan oleh Issued by	Masa Berlaku hingga Valid until
Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System Certification	Kementerian Ketenagakerjaan RI Republic of Indonesia Ministry of Manpower	2022



BERBAGI DENGAN MASYARAKAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SHARING WITH COMMUNITY: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KEBIJAKAN

Pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Perusahaan belum mengarah kepada aspek ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Selain bahwa proyek MRT Jakarta masih dalam tahap pembangunan, pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan seiring dengan tahapan pengoperasian dan komersialisasi dari MRT Jakarta.

Pada tahap konstruksi, pengembangan sosial kemasyarakatan difokuskan pada aspek pendidikan dan berbagi pengetahuan. Kegiatan ini dilakukan melalui *site visit*, atau kunjungan lapangan yang diberikan Perusahaan kepada kalangan umum, khususnya kepada regulator, konsultan dan *civitas* akademika yang memiliki hasrat terhadap proyek transportasi kota, pembangunan konstruksi skala besar, serta pengetahuan tentang tata ruang dan tata kota khususnya DKI Jakarta.

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASNYA DI SEPANJANG TAHUN 2018

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menegaskan bahwa sebuah perusahaan harus memiliki tanggung jawab ke seluruh pemangku kepentingan dan bukan hanya memberikan manfaat bagi para pemegang sahamnya tapi juga berusaha untuk berperan serta dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Perusahaan sangat peduli dengan masalah-masalah yang dirasakan dan dihadapi oleh masyarakat, dan berusaha untuk menanggulangnya. Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga menetapkan target sebagai berikut:

1. Lingkungan Hidup

Perusahaan bergerak dibidang transportasi publik. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu menaati berbagai perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan selalu memenuhi kesepakatan-kesepakatan tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Perusahaan yakin selama masa pembangunan infrastruktur telah mematuhi segala hal yang terkait peraturan-peraturan dengan lingkungan hidup. Perusahaan mengajak masyarakat dimulai dari siswa siswi dari beberapa sekolah di sekitar koridor bisnis perusahaan untuk menanam pohon bersama di kawasan Taman Dukuh Atas dengan tujuan memberikan pemahaman pentingnya menjaga lingkungan hidup.

POLICY

The community social development carried out by the Company has not yet led to economic aspects and improvement in the standard of living and welfare of the people around the operational location. Besides that the Jakarta MRT project is still under construction, the development of economic aspects and community welfare will go hand in hand with the operation and commercialization stages of the Jakarta MRT.

During the construction phase, community social development is focused on aspects of education and knowledge sharing. This activity is carried out through a site visit, or a field visit provided by the Company to the general public, especially to regulators, consultants and academics who have a passion for city transportation projects, large-scale construction, as well as knowledge about spatial planning and urban planning, especially DKI Jakarta.

PLANNING, TARGET ACTIVITIES AND REALIZATIONS THROUGHOUT 2018

Corporate Social Responsibility emphasizes that a company must have responsibility for all stakeholders and not only provide benefits to its shareholders but also strive to participate in providing a better life for the community and actively participating in protecting the environment. The company is very concerned about the problems that are felt and faced by the community, and tries to overcome them. The importance of Corporate Social Responsibility sets targets as follows:

1. Environment

The company is engaged in public transportation. In carrying out its business, the company always adheres to various laws and regulations relating to the environment, and always fulfills certain agreements in accordance with existing regulations. The company believes that during the infrastructure development period it has complied with all matters relating to environmental regulations. The company invited the community to start with students from several schools around the company's business corridors to plant trees together in Taman Dukuh Atas area with the aim of providing an understanding of the importance of protecting the environment.



2. Ketenagakerjaan

Perusahaan selalu memenuhi aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, Perusahaan telah memiliki panduan untuk seluruh karyawan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya serta melarang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan dan hukum yang berlaku. Perusahaan juga mempunyai Peraturan Perusahaan yang merupakan panduan etika kerja bagi golongan staf dan manajerial.

3. Pengembangan Masyarakat

Infrastruktur dari bisnis Perusahaan berlokasi dari kawasan Bundaran HI sampai dengan Lebak Bulus, Perusahaan berperan aktif dalam pengembangan masyarakat khususnya pengembangan sosial dalam meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan transportasi publik. Perusahaan aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di beberapa kelurahan dan juga siswa dan siswi di tingkat SMP dan SMA. Perusahaan juga peduli akan perbaikan fasilitas umum di sekitar koridor jalur bisnis Perusahaan. Di tahun 2018 ini, sudah 3 fasilitas umum yang sudah selesai dikerjakan yaitu pedestrian sepanjang jalur MRT Jakarta, taman umum di kawasan Dukuh Atas, dan tempat beribadah di kelurahan Cilandak Barat.

4. Tanggung Jawab Pendidikan, Olahraga, dan Budaya

Di bidang pendidikan Perusahaan berperan serta dalam pengembangan pengetahuan siswa-siswi di beberapa sekolah dengan pembuatan fasilitas Pojok Pintar MRT Jakarta di perpustakaan sekolah dengan memberikan buku-buku perpustakaan yang dibutuhkan oleh sekolah dan juga buku-buku mengenai transportasi. Tahun ini, Perusahaan membuat program Liburan Pintar Bersama MRT Jakarta dengan mengajak siswa-siswi dari beberapa sekolah untuk mengunjungi museum dengan menggunakan transportasi publik sehingga teredukasi dalam budaya bertransportasi publik. Perusahaan aktif memberikan sponsor dalam berbagai acara, ataupun kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, olahraga, dan budaya baik itu bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun langsung kepada penerima manfaat.

2. Employment

The company always complies with the rules and conditions contained in the law of Manpower. In addition, the company already has a Collective Labor Agreement which guides all company employees in carrying out their duties and prohibits actions that conflict with company regulations and applicable laws. The company also has Company Regulations which are work ethics guidelines for staff and managerial groups.

3. Community Development

Infrastructure from the company's business is located from the Bundaran HI area to Lebak Bulus, the company plays an active role in community development, especially social development in increasing knowledge in using public transportation. The company is active in providing socialization and education to the community in several villages and also students in junior and senior high school. The company also cares about the improvement of public facilities around the corridors of the company's business lines. In 2018, 3 public facilities have been completed, namely pedestrian along the Jakarta MRT line, public parks in Dukuh Atas area, and places of worship in the West Cilandak village.

4. Responsibilities of Education, Sports and Culture

In the field of education the company participates in the development of knowledge for female students in several schools by making MRT Jakarta Smart Corner facility at the school library by providing library books needed by the school and also books on transportation. This year, the company created a Smart Holiday program with MRT Jakarta by inviting students from several schools to visit the museum using public transportation so that it is educated in the culture of public transportation. The company actively sponsors a variety of events, or activities related to education, sports, and culture, both in collaboration with government agencies or directly to beneficiaries.



BERBAGI DENGAN MASYARAKAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
SHARING WITH COMMUNITY: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON
SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

- **Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Lokasi Usaha**
Sebagai pemilik proyek, operator sekaligus pengelola MRT Jakarta yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam melakukan proses rekrutmen serta seleksi calon karyawan yang berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebagai ibukota negara dengan daya tarik ekonomi yang tinggi, Jakarta memiliki beragam lapisan dan latar belakang masyarakat yang memungkinkan bagi Perusahaan untuk memperluas proses rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Seluruh karyawan Perusahaan berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, mencakup Depok, Tangerang, Bekasi dan bahkan Bogor.
- **Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial**
Salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham kepada Perusahaan adalah merelokasi fasilitas umum serta sarana dan prasarana sosial yang berada di jalur perlintasan proyek MRT Jakarta. Proses relokasi fasilitas umum seperti halte bus tidak hanya dilakukan dengan memindahkan fasilitas tersebut, namun juga penataan yang sejalan serta seirama dengan tata jalur lalu lintas di wilayah Jakarta. Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menghadirkan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh semua kalangan, tak terkecuali bagi mereka penyandang disabilitas.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED AND THE IMPACTS

- **Local Labor Absorption and Community Empowerment Around Business Locations**
As a project owner, operator and manager of the Jakarta MRT located in DKI Jakarta Province, the Company has no significant difficulties in carrying out the recruitment and selection process of prospective employees from DKI Jakarta and its surroundings. As the country's capital with high economic attractiveness, Jakarta has a variety of layers and backgrounds that make it possible for the Company to expand the recruitment process to suit the needs of the Company. All of the Company's employees come from the Jakarta and surrounding areas, including Depok, Tangerang, Bekasi and even Bogor.
- **Improvement of Social Facilities and Infrastructure**
One of the responsibilities given by shareholders to the Company is to relocate public facilities, social facilities and infrastructure on the Jakarta MRT project crossing line. The relocation process of public facilities such as bus shelters is not only done by moving the facility, but also in alignment and in line with the traffic management in the Jakarta area. The company has a high commitment to be able to present public facilities that can be used by all groups, including those with disabilities.



Lift Prioritas
Priority Lift



Blok Taktil
Tactile Block



Pintu Prioritas
Priority Gate



Sandai
Ramp



Kereta untuk Prioritas dan Disabilitas
Priority and Disability Train



Eskalator
Escalator



Toilet Disabilitas
Disability Toilet

- Kunjungan Lapangan Proyek MRT Jakarta bagi Publik
Salah satu program pendidikan yang diusung Perusahaan adalah site visit atau kunjungan lapangan proyek MRT Jakarta kepada khalayak umum. Program ini menjadi penting, mengingat proyek MRT Jakarta menggunakan teknologi perkeretaapian yang cukup tinggi, yang dapat menjadi aspek pembelajaran bagi banyak pihak, terutama bagi regulator, konsultan dan civitas akademika. Perusahaan berharap, program site visit dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya pemerhati proyek transportasi kota dan pembangunan konstruksi skala besar.
- *Public Field Visit to MRT Jakarta Project*
One of the educational programs carried out by the Company is public site visit or field visit to MRT Jakarta project. This program is important, considering that the MRT Jakarta project uses quite high railway technology, which can be an aspect of learning for many parties, especially for regulators, consultants and academics. The company hopes that the site visit program can provide additional knowledge for those who need it, especially observers of urban transportation projects and large-scale construction.



BERBAGI DENGAN MASYARAKAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
SHARING WITH COMMUNITY: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON
SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT



Kunjungan dari Presiden JICA
Visit from President of JICA



Kunjungan Dari DPRD
Visit from DPRD

**BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG
JAWAB SOSIAL ASPEK PEMBERDAYAAN
SOSIAL KEMASYARAKATAN**

**COSTS AND / OR INVESTMENTS OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON
COMMUNITY EMPOWERMENT ASPECT**

Jumlah penyaluran program CSR pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The amount of CSR program distribution on aspects of social and community development can be seen in the table below:

No	Perihal Subject	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Liburan Pintar Bersama MRT Jakarta <i>Smart Holiday with MRT Jakarta</i>	43.825.990	59.201.920
2	Peremajaan Masjid Al Hidayah di Kelurahan Cilandak Barat <i>Rehabilitation of Al Hidayah Mosque in Cilandak Barat Village</i>	46.225.000	
Jumlah Total		90.050.990	59.201.920



Liburan Pintar
Smart Vacation



Peremajaan Masjid Cilandak Barat
The Restoration of the Mosque in Cilandak Barat



LAYANAN BERMUTU: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS PRODUK/ JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

QUALITY SERVICES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR PRODUCTS / SERVICES QUALITY, CONSUMERS AND BUSINESS PARTNERS

KEBIJAKAN

Perusahaan memandang warga kota Jakarta, khususnya pengguna jalur koridor di mana proyek MRT Jakarta berjalan, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang dapat diasosiasikan sebagai konsumen infrastruktur transportasi kota. Salah satu permasalahan dalam perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta adalah melakukan inovasi pengerjaan proyek di tengah jantung lalu-lintas Jakarta yang padat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek, Perusahaan memperhitungkan infrastruktur pipa dan kabel bawah tanah perkotaan yang telah ada selama ini. Di samping itu, Perusahaan menempatkan hak pengguna lalu-lintas jalur di mana proyek berjalan baik pengguna jalan raya maupun pejalan kaki di trotoar dapat terus terpenuhi dengan tetap memperhitungkan kemajuan proyek.

POLICY

The Company views Jakarta residents, especially users of the corridors where the MRT Jakarta project is running, as one of the stakeholders that can be associated as a consumer of urban transportation infrastructure. One of the problems in the development of the Jakarta MRT project is to innovate project work in the heart of Jakarta's heavy traffic. As the party responsible for project development, the Company takes into account the urban underground pipeline and cable infrastructure that has existed so far. In addition, the Company places the rights of track traffic users where the project runs - both road users and pedestrians on the sidewalk - that can continue to be fulfilled while taking into account the progress of the project.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan keselamatan pengguna layanan transportasi MRT Jakarta. Perusahaan memiliki *Standard Operational Procedure (SOP)* yang ketat dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan operasinya.

"Based on the applicable laws and regulations, the Company is committed to ensuring the safety of MRT Jakarta transportation service users. The Company has in place a strict Standard Operational Procedure (SOP) in implementing and managing its operations."

Di samping itu, tanggung jawab Perusahaan terhadap kualitas produk dan/atau jasa juga bergantung pada hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja. Kontraktor/pemasok/*vendor/supplier* maupun kreditur memiliki peran yang cukup besar dalam mempermudah kegiatan Perusahaan, khususnya dalam menghadirkan layanan MRT Jakarta yang berkualitas.

The Company's responsibility for products and / or services quality also depends on mutually beneficial relationships with business partners. Contractors / suppliers / vendors and creditors have a significant role in facilitating the Company's activities, especially in delivering the quality services of MRT Jakarta.



PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

- **Membangun Proyek MRT Jakarta di Tengah Kepadatan Masyarakat Jakarta**
Pada tahapan dan proses konstruksi MRT Jakarta, salah satu inisiasi penting yang dilakukan Perusahaan adalah mempersiapkan (prakonstruksi) meliputi pekerjaan *Soil Investigation* dan *Test Pit (Utility Investigation)* yang telah dikerjakan sejak tahun 2014 hingga tahapan konstruksi selesai. *Test Pit* adalah aktifitas pekerjaan untuk mengidentifikasi saluran/*ducting* utilitas pipa atau kabel yang berada di bawah tanah sepanjang bentangan proyek. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan yang berarti ketika proses pembangunan fondasi bangunan dan *viaduct* (jembatan penyangga) jalur MRT. Relokasi atas infrastruktur pipa dan kabel diserahkan kepada masing-masing pemilik pipa dan kabel tersebut. Relokasi terhadap fasilitas umum juga dilakukan Perusahaan untuk tetap mengedepankan hak warga kota Jakarta, seperti relokasi utilitas berupa halte angkutan umum di Sisingamangaraja.

Inisiasi lain ditempuh Perusahaan melalui kerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya (DLLAJR) DKI Jakarta untuk melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang koridor di mana pembangunan proyek MRT Jakarta berjalan. Inovasi ini dilakukan mengingat pembangunan proyek di beberapa titik menambah kemacetan lalu lintas. Perusahaan juga terus melakukan berbagai bentuk kampanye kepada publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur MRT Jakarta untuk menopang arus lalu lintas di ibukota. Beroperasinya MRT Jakarta akan memberikan solusi tambahan bagi masalah kemacetan Jakarta di masa mendatang.

Keselamatan pengguna jalan di sepanjang koridor pembangunan proyek MRT Jakarta juga menjadi perhatian. Berbagai rambu keselamatan dan pagar pembatas dibangun untuk memberikan penanda kepada pengguna jalan. Hal ini menjadi penting mengingat jalur lalu lintas pada koridor pembangunan proyek MRT Jakarta merupakan salah satu jalur terpadat.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED AND THE IMPACTS

- **Building MRT Jakarta Project in the Middle of Jakarta's Community Density**
In the MRT Jakarta stages and construction process, one of the important initiatives carried out by the Company is pre-construction including the Soil Investigation and Test Pit (Utility Investigation) works carried out since 2014 until the construction phase is completed. Test Pit is a work activity to identify pipeline / ducting utility pipes or cables that are underground along the project stretch. This activity is important to ensure that there are no significant disruptions during the process of building the building foundation and viaduct (buffer bridge) of the MRT line. Relocation of pipeline and cable infrastructure was left to each of the owners of the pipe and cable. Relocation of public facilities is also carried out by the Company to continuously prioritize the rights of Jakarta citizens, such as the relocation of utilities in the form of public transport stops in Sisingamangaraja.

Another initiative was taken by the Company in cooperation with the Metro Jaya Regional Police (Polda) and DKI Jakarta Traffic and Highway Service (DLLAJR) to carry out traffic engineering along the corridor where the Jakarta MRT project was running. This innovation is carried out considering that project development at several points adds to traffic congestion. The company also continues to carry out various forms of campaigns to the public to increase awareness of the importance of the Jakarta MRT infrastructure to sustain the flow of traffic in the capital city. The operation of the Jakarta MRT will provide additional solutions for Jakarta's congestion problems in the future.

Road user safety along the MRT Jakarta project development corridor is also a concern. Various safety signs and guardrails have been built to provide markers to road users. This is important considering that the traffic lane in the MRT Jakarta project development corridor is one of the densest routes.



LAYANAN BERMUTU: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA
QUALITY SERVICES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR PRODUCTS / SERVICES QUALITY, CONSUMERS AND BUSINESS PARTNERS

Dalam perencanaan dan pembangunan *Transit Oriented Development (TOD)*, Perusahaan membangun model kawasan yang ramah terhadap pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda. Selain menciptakan lingkungan yang sehat, model kawasan semacam ini akan menarik minat warga kota Jakarta untuk meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke moda transportasi MRT Jakarta dan/atau moda transportasi kota lainnya yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja Kontraktor/ Pemasok/Supplier/Vendor akan dilakukan di tahun 2019, di tahun 2018 sedang dalam tahap penyusunan tools dan aspek-aspek yang diperlukan dalam survei kepuasan pemasok.

In planning and building Transit Oriented Development (TOD), the Company built a model of the area that is friendly to pedestrians and users of bicycle transportation. In addition to create a healthy environment, this kind of regional model will attract the citizens of Jakarta to minimize the use of motorized vehicles and move to MRT Jakarta transportation mode and / or other city transportation modes provided by the DKI Jakarta Provincial Government.

- *Relationships Management with Contractor / Supplier / Vendor as the Company's Business Partners will be carried out in 2019. In 2018 it is in the stage of preparing tools and aspects needed in supplier satisfaction surveys*

PENGADUAN TERKAIT PRODUK/ LAYANAN/JASA PERUSAHAAN DAN PENANGANANNYA

Perusahaan belum menerima pengaduan terkait layanan atau jasa sepanjang tahun 2018.

Pada tahun 2019, setelah Perusahaan beroperasi secara komersial kami akan menerima masukan maupun keluhan, Perusahaan membuka jalur komunikasi kepada masyarakat luas melalui akses situs web resmi www.jakartamrt.co.id pada halaman kontak/*feedback*. Selain itu, publik dapat membuka komunikasi kepada Perusahaan melalui:

COMPLAINTS REGARDING PRODUCTS / SERVICES / COMPANY SERVICES AND HANDLING

The company has not received any complaint regarding services throughout 2018.

In 2019, after the company operates commercially, we will receive input and complaints, the Company opens a communication channel to wider community through the official website www.jakartamrt.co.id on the contact / feedback page. In addition, the public can communicate directly to the Company through:



**Wisma Nusantara, Lantai 21,
Jl. M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350 - INDONESIA**



(62) 3906454



(62) 21 3155846



info@jakartamrt.co.id
corsec@jakartamrt.co.id



www.jakartamrt.co.id





08

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



PT Mass Rapid Transit Jakarta

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as of December 31, 2018
and for the year then ended with independent auditors' report*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-53	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT. MASS RAPID TRANSIT JAKARTA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name

William P. Sabandar

Alamat Kantor/Office address

Wisma Nusantara 21st Floor
Jalan M.H Thamrin 59
Jakarta 10350

Alamat domisili sesuai KTP
/Domicile as stated on ID Card

BSD Blok F. 12/23 A Sektor 1 – 5
Serpong, Tangerang Selatan.

Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position

08111241155
Direktur Utama/President Director

2. Nama/Name

Tuhyat

Alamat Kantor/Office Address

Wisma Nusantara 21st Floor
Jalan M.H Thamrin 59,
Jakarta 10350

Alamat domisili sesuai KTP
/Domicile as stated on ID Card

Jl Emerald 6 Blok L No. 02
Bintaro Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan

Nomor telepon/Phone number
Jabatan/Position

08118602220
Direktur Keuangan & Administrasi/Finance &
Administration Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements as of December 31, 2018 and for the year then ended;*
2. *The financial statements of the Company has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
b. *The financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The above statement is made truthfully.

Jakarta, Maret 2019/March , 2019



William P. Sabander
Direktur Utama/President Director

Tuhayat
Direktur Keuangan & Administrasi
(Finance & Administration Director)



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00183/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/III/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mass Rapid Transit Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00183/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/III/2019

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Mass Rapid Transit Jakarta

We have audited the accompanying financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00183/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/III/2019 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00183/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/III/2019 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

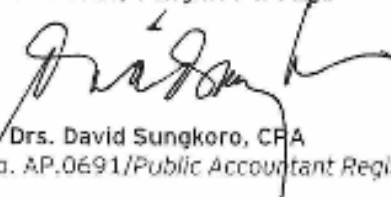
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mass Rapid Transit Jakarta as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Drs. David Sungkoro, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0691/Public Accountant Registration No. AP.0691

14 Maret 2019/March 14, 2019

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2018
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	604.890.512.336	2a,2b,2c,2h 2i,4,18	780.342.541.801	Cash and cash equivalents
Piutang lain - lain	2.470.588.975	2i,5,18	839.009.660	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	3.277.464.575	12a	-	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka - neto	6.166.712.208	6	4.349.831.039	Prepaid expenses and advances - net
Total Aset Lancar	616.805.278.094		785.531.382.500	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka kontraktor	68.570.885.284	2b,17h,17i,17j 17k,17l,17m,17s 2d,7,17h, 17i,17j,17k,17l 17m,17n,17s	608.532.219.898	Contractors' advances
Aset tetap - neto	12.711.521.522.004		8.383.938.519.645	Fixed assets - net
Aset takberwujud - neto	10.277.085.903		-	Intangible asset - net
Uang jaminan	6.724.921.336	2i,18	3.839.493.185	Guarantee deposits
Total Aset Tidak Lancar	12.797.094.414.527		8.996.310.232.728	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	13.413.899.692.621		9.781.841.615.228	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang	11.207.236.410	2b,2i,8,17z	-	Account payables
Utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga	14.649.392.009	2b,2i,9,17i, 17cc,18 2b,2i,11, 17n,18	-	Payables to contractors and consultants-third parties
Beban akrual	354.094.360.436	17n,18	465.430.904.307	Accrued expenses
Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek	1.358.493.945	10	451.942.009	Short-term employee benefits liability
Utang pajak	1.573.096.069	2g,12b	1.058.683.480	Taxes payable
Total Liabilitas Jangka Pendek	382.882.578.869		466.941.529.796	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang retensi	691.273.055.316	2b,2i,17i, 17k,17l,17m,18	542.408.341.738	Retention payables
Pendapatan di terima di muka	40.000.000.000	17ee	-	Unearned revenue
Liabilitas imbalan karyawan	16.881.689.759	2f,16	12.848.177.938	Liability for employee benefits
Total Liabilitas Jangka Panjang	748.154.745.075		555.256.519.676	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	1.131.037.323.944		1.022.198.049.472	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				Share capital - par value of Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 10.200.000 saham				Authorized - 10,200,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.165.807 saham pada tahun 2018 dan 5.721.807 saham pada tahun 2017	6.165.807.000.000	13 13,17c,17h, 17i,17j,17k,17l 17m,17s,19	5.721.807.000.000	Issued and fully paid - 6,165,807 shares in 2018 and 5,721,807 shares in 2017
Modal disetor lainnya	6.606.169.772.791		3.389.444.841.341	Other paid-up capital
Defisit	(490.137.911.697)		(351.418.430.267)	Deficit
Penghasilan (beban) komprehensif lain	1.023.507.583	2f,16	(189.845.318)	Other comprehensive income (loss)
EKUITAS NETO	12.282.862.368.677		8.759.643.565.756	NET EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13.413.899.692.621		9.781.841.615.228	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam rupiah)

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended December 31, 2018
(Expressed in rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,				
	2018	Catatan/ Notes	2017	
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	(207.263.897.046)	2e,14	(136.265.508.532)	General and administrative expenses
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSE)
Penghasilan bunga	43.684.004.732	15	29.032.157.407	Interest income
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	31.276.751		58.901.297	Other income (expense) - net
Beban pajak atas penghasilan bunga	(8.736.800.946)	15	(5.806.431.482)	Tax expense of interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto	33.565.935.079		(2.149.266.679)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan lain-lain - neto	68.544.415.616		21.135.360.543	Other income - net
RUGI TAHUN BERJALAN	(138.719.481.430)		(115.130.147.989)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.213.352.901	2f,16	(1.764.444.643)	Actuarial gain (loss) on long-term employee benefits liability
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(137.506.128.529)		(116.894.592.632)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2018
(Expressed in rupiah)**

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Modal disetor lainnya/ Other paid-up capital	Defisit/ Deficit	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Ekuitas neto/ Net equity	
Saldo tanggal 31 Desember 2016		3.958.878.000.000	1.763.174.594.937	(236.288.282.278)	1.574.599.325	5.487.338.911.984	Balance as of December 31, 2016
Modal disetor lainnya	13, 17c, 17h 17i, 17j, 17k 17l, 17m, 17s	-	3.389.199.246.404	-	-	3.389.199.246.404	Other paid-up capital
Reklasifikasi atas modal disetor lainnya	13	1.762.929.000.000	(1.762.929.000.000)	-	-	-	Reclassification of other paid-up capital
Rugi tahun berjalan		-	-	(115.130.147.989)	-	(115.130.147.989)	Loss for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	16	-	-	-	(1.764.444.643)	(1.764.444.643)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Saldo tanggal 31 Desember 2017		5.721.807.000.000	3.389.444.841.341	(351.418.430.267)	(189.845.318)	8.759.643.565.756	Balance as of December 31, 2017
Modal disetor lainnya	13, 17c, 17h 17i, 17j, 17k 17l, 17m, 17s	-	3.660.724.931.450	-	-	3.660.724.931.450	Other paid-up capital
Reklasifikasi atas modal disetor lainnya	13	444.000.000.000	(444.000.000.000)	-	-	-	Reclassification of other paid-up capital
Rugi tahun berjalan		-	-	(138.719.481.430)	-	(138.719.481.430)	Loss for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	16	-	-	-	1.213.352.901	1.213.352.901	Remeasurement of employee benefits liabilities
Saldo tanggal 31 Desember 2018		6.165.807.000.000	6.606.169.772.791	(490.137.911.697)	1.023.507.583	12.282.862.368.677	Balance as of December 31, 2018

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2018
 (Disajikan dalam rupiah)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
STATEMENT OF CASH FLOWS
 For the year ended
 December 31, 2018
 (Expressed in rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31				
	2018	Catatan/ Notes	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	35.150.178.790		23.082.219.076	Cash receipts from interest income
Penerimaan kas dari pendapatan diterima dimuka	40.000.000.000	17ee	-	Cash receipts from unearned revenue
Pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan	(96.314.836.698)		(75.431.717.247)	Payments to commissioners, directors and employees
Pembayaran kepada pemasok	(90.433.887.594)		(58.932.806.085)	Payment to vendors
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(111.598.545.502)		(111.282.304.256)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITY
Perolehan aset tetap	(63.853.483.963)	7	(23.628.666.917)	Acquisitions of fixed assets
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY
Penerbitan saham baru dan modal disetor lainnya	-	13	444.000.000.000	Issuance of capital stocks and other paid in capital
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(175.452.029.465)		309.089.028.827	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	780.342.541.801	4	471.253.512.974	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	604.890.512.336	4	780.342.541.801	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Pengungkapan informasi tambahan arus kas disajikan pada Catatan 22.

Supplemental disclosure of cash flow information is presented in Note 22.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perseroan Daerah") adalah Badan Usaha Milik Daerah didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 ("Perda No. 3"). Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. Pada tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Daerah No. 9 ("Perda No. 9"), menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya dan status Perusahaan diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Anggaran Dasar ("AD") Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 17 April 2018 sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan. Perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No 57 tanggal 17 April 2018 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0156597 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018, ruang lingkup kegiatan Perusahaan mencakup:

- a. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana.
- b. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana.
- c. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Perusahaan berlokasi di Wisma Nusantara, lantai 21, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. Sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan masih dalam tahap konstruksi proyek.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan mempunyai 194 karyawan tetap dan 325 karyawan kontrak (2017: 147 karyawan tetap dan 145 karyawan kontrak) (tidak diaudit).

1. GENERAL

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) is a Regional-Owned Company established in the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 140 dated June 17, 2008 of Sutjipto, S.H., M.Kn. and Local Government Regulation No. 3 Year 2008 dated June 17, 2008 ("Perda No. 3"). Its establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-36355.AH.01.01 Year 2008 dated June 27, 2008. On December 28, 2018, published Local Government Regulation No. 9 ("Perda No. 9") replaced Local Government Regulation beforehand and the status of the Company was changed to "Perseroan Daerah (Perseroda).

The Company's Articles of Association ("AoA") has been amended several times, the latest of which was made on April 17, 2018, in relation to equity changes. The latest amendment was under Notarial Deed No. 57 dated April 17, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. and had been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0156597 Year 2018 dated April 20, 2018.

Based on Local Government Regulation of DKI Jakarta No. 9 Year 2018, the Company's scope of activities covers the following:

- a. *Infrastructure management for public train in an urban area that includes infrastructure development, infrastructure operation, infrastructure maintenance, and infrastructure management.*
- b. *Facilities management for public train in an urban area that includes facility development, facilities operation, maintenance and management of the facilities.*
- c. *Development and management of property or business on the station area and areas around the station, also Depo and areas around it.*

The Company is located in Wisma Nusantara, 21st floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. As of March 14, 2019, the Company is still under the project construction stage.

As of December 31, 2018, the Company had a total of 194 permanent employees and 325 contract employees (2017: 147 permanent employees and 145 contract employees) (unaudited).

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 16 tanggal 07 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Plt. Komisaris Utama
Komisaris

Rukijo
Yuzmada Faizal
Zulfikri
Mukhtasor

Board of Commissioners
Acting Official President Commissioners
Commissioners

Direksi
Direktur Utama
Direksi

William P. Sabandar
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Tuhayat
Ghamal Peris

Board of Directors
President Director
Directors

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.230.029.795 (2017: Rp13.519.152.312).

1. GENERAL (continued)

Based on the Notarial Deed No. 16 dated November 07, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 was as follows:

The compensation and other benefits of the Company's Boards of Commissioners and Directors for the year ended December 31, 2018 amounted to Rp14,230,029,795 (2017: Rp13,519,152,312).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk instrumen keuangan yang dinyatakan dengan nilai wajar dan untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK").

The financial statements are prepared in accordance with PSAK 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements are prepared using the historical cost basis of accounting, except for financial instruments which are stated at fair value and for certain accounts which are stated on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang fungsional yang digunakan Perusahaan adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang penyajian dalam laporan keuangan.

b. Transaksi dalam mata uang asing

Perusahaan melakukan pencatatan akuntansi dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang selain rupiah dicatat dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan tahun tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
1 Dolar Amerika Serikat	14.481	13.548
100 Yen Jepang	13.115	12.022

c. Setara kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

d. Aset tetap

Perusahaan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

The statement of cash flows presents the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The functional currency of the Company is rupiah, which is also as the presentation currency used in the financial statements.

b. Foreign currency transactions and balances

The Company maintains its accounting records in rupiah. Transactions in currencies other than rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to rupiah based on the middle rates published by Bank Indonesia at the last banking transaction date for the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current year operations.

The exchange rates used were as follows:

c. Cash equivalents

Time deposits with maturities of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral are considered as "Cash Equivalents".

d. Fixed assets

The Company has applied PSAK 16 (Revised 2011), "Fixed Assets".

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan atas setiap aset tetap dimulai ketika aset tetap siap untuk digunakan sesuai peruntukannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	<u>Tahun/Year</u>
Kendaraan	4
Peralatan dan perabotan kantor	4-8

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin dan peralatan dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan tersebut selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Fixed assets (continued)

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as they are incurred.

Depreciation of each item of fixed assets starts when it is available for its intended use and is calculated on the straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

4	Vehicles
4-8	Furniture, fixtures and office equipment

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery and equipment and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to the appropriate fixed assets accounts when the related construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets become ready for their intended use.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset tetap (lanjutan)

Perusahaan telah menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam tahun tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

e. Pengakuan pendapatan dan biaya

Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek MRT Jakarta dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

f. Imbalan karyawan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Beban pensiun Perusahaan, ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan di saldo laba.

Perusahaan mengakui kewajiban tanpa pendanaan atas imbalan karyawan terkait dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Fixed assets (continued)

The Company has applied PSAK 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the year, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

e. Revenue and expense recognition

Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of MRT Jakarta's project which are capitalized as construction in progress.

f. Employee benefits

The Company has applied PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". The Company's pension costs are determined by periodic actuarial calculation using the *projected-unit-credit* method.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income. Accumulated actuarial gains and losses are reported in retained earnings.

The Company recognizes its unfunded liability for employee benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Perpajakan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang mensyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, serta transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada tahun saat nilai aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal laporan posisi keuangan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Taxation

The Company has adopted PSAK 46 (Revised 2014), "Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position, and transactions and other events of the current year that are recognized in the financial statements. This PSAK also prescribes an entity to present the underpayment of income tax, as part of "Tax Expense - Current" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presents interest/penalty on tax, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carryover of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. The tax effects for the year are allocated to current operations, except for the tax effects from transactions which are directly charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

h. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait.

i. Instrumen keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Transactions with related parties

The Company has applied PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", that requires disclosure of related party relationships, transactions, and outstanding balances, including commitments, in the financial statements. The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

i. Financial instruments

The Company has adopted PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures".

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each reporting date.

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang bunga, piutang lain-lain dan uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2018.

Perusahaan telah menentukan bahwa semua aset keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau derivatif yang ditetapkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Initial recognition (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

The Company's financial assets include cash and cash equivalents, interest receivable, other receivables and guarantee deposits as of December 31, 2018.

The Company has determined that all of these financial assets are categorized as loans and receivables. As of December 31, 2018, the Company did not have any financial assets at fair value through profit or loss, available-for-sale financial assets and held-to-maturity investments or derivatives designated as hedging investment in an effective hedge.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan

Pengukuran setelah pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk utang, utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga, beban akrual dan utang retensi.

Perusahaan telah menentukan bahwa semua liabilitas keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman dan utang. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau derivatif yang ditempatkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities

Subsequent measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs.

The Company's financial liabilities as of December 31, 2018 included account payables, payables to contractors and consultants - third parties, accrued expenses and retentions payable.

The Company has determined that all off these financial liabilities are categorized as loans and borrowings. As of December 31, 2018, the Company did not have any financial liabilities at fair value through profit or loss, or derivatives designated as hedging investment in an effective hedge.

After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit *counterparty* antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

5. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Financial instruments (continued)

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

5. Impairment of financial assets

The Company assesses at the end of each reporting year whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Penurunan nilai dari aset keuangan
(lanjutan)**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif secara individual atas penurunan nilai.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Financial instruments (continued)

**5. Impairment of financial assets
(continued)**

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company assesses the impairment based on the individual objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a "loans and receivables" asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Instrumen keuangan (lanjutan)

**6. Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through" dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu kewajiban yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Financial instruments (continued)

**6. Derecognition of financial assets and
liabilities**

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada akhir tahun, Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai penghasilan pada tahun dimana pemulihan tersebut terjadi.

k. Provisi

Perusahaan menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". PSAK ini menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Impairment of non-financial assets

At the end of the year, the Company undertakes a review to determine whether there is any indication of asset impairment.

Fixed asset and other non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which an asset's carrying amount exceeds its recoverable amount which is the higher of the asset's net selling price or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as income in the year when the reversal occurs.

k. Provisions

The Company adopted PSAK 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". This PSAK provides that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

A provision is recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

1. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

• Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

• Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*.

Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

The following judgments, estimates and assumptions were made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

• *Determination of functional currency*

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated.

• *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities*

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

- Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

- Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

- *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities (continued)*

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

- *Estimating useful lives of fixed assets*

The Company estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial yearend and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Company's fixed assets will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

- *Impairment of non-financial assets*

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

- Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Realisasi dari aset pajak tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

- Estimasi beban imbalan karyawan

Imbalan karyawan ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

- *Impairment of non-financial assets (continued)*

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

- *Realization of deferred tax assets*

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Company's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

- *Estimation of employee benefits*

Employee benefits are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

- Estimasi beban imbalan kerja (lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan karyawan dan beban imbalan karyawan neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.881.689.759 dan Rp12.848.177.938 (Catatan 16).

Perusahaan percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

- Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (Revisi 2009). Perusahaan membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

- *Estimation of employee benefits (continued)*

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Company are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated employee benefits liability as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp16,881,689,759 and 12,848,177,938, respectively (Note 16).

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

- *Uncertain tax exposure*

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57 (Revised 2009). The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Kas	7.398.350	12.577.850	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak ketiga:			Third party:
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.551.006.595	5.008.695.570	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$851 pada tahun 2018 dan US\$3.067 pada tahun 2017)	12.324.634	41.557.541	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$851 in 2018 and US\$3,067 in 2017)
Pihak berelasi - rupiah:			Related party - rupiah:
PT Bank Daerah Khusus Ibukota	8.355.083.088	25.279.710.840	PT Bank Daerah Khusus Ibukota
Total Bank	18.918.414.317	30.329.963.951	Total Cash in Banks
Total Kas dan Bank	18.925.812.667	30.342.541.801	Cash on Hand and in Banks
Deposito berjangka - rupiah			Time deposits - rupiah
Pihak berelasi:			Related party:
PT Bank Daerah Khusus Ibukota	545.000.000.000	650.000.000.000	PT Bank Daerah Khusus Ibukota
Pihak ketiga:			Third party:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40.964.699.669	100.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Deposito Berjangka	585.964.699.669	750.000.000.000	Total Time Deposits
Total Kas dan Setara Kas	604.890.512.336	780.342.541.801	Total Cash and Cash Equivalents

Pada tahun 2018 dan 2017, kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka masing-masing antara 4,25% sampai dengan 7,00% dan 4,50% sampai dengan 7,50%.

In 2018 and 2017, the annual interest rates of time deposits range between 4.25% to 7.00% and 4.50% to 7.50%, respectively.

Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

The interest rates of the related-party bank are comparable to those offered by third-party banks.

5. PIUTANG LAIN - LAIN

5. OTHER RECEIVABLE

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Piutang lain pihak ketiga	1.253.192.460	-	Other receivable third parties
Piutang karyawan	699.056.451	117.694.592	Employee receivables
Piutang bunga	518.340.064	721.315.068	Interest receivable
Jumlah piutang lain lain, bersih	2.470.588.975	839.009.660	Total other receivables, Net

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA - NETO

6. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES - NET

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Biaya dibayar dimuka - neto	4.623.594.826	3.685.692.977	Prepayments - net
Uang muka operasional	1.543.117.382	664.138.062	Operational advances
Neto	6.166.712.208	4.349.831.039	Net

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA - NETO (lanjutan)

Akun biaya dibayar dimuka - neto merupakan biaya sewa kantor dan asuransi yang dibayar dimuka.

6. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES - NET (continued)

Prepayments account represent of office rent and insurance expense that was paid in advance.

7. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

7. FIXED ASSETS - NET

The details of fixed assets are as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan dan perabotan kantor	12.722.659.984	1.032.560.681	-	13.755.220.665	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	4.275.600.000	71.200.000	-	4.346.800.000	Vehicles
Sub-total	16.998.259.984	1.103.760.681	-	18.102.020.665	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	8.375.536.556.104	4.329.377.956.112	-	12.704.914.512.216	Construction in progress
Total Harga Perolehan	8.392.534.816.088	4.330.481.716.793	-	12.723.016.532.881	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan dan perabotan kantor	6.740.068.320	2.066.119.641	-	8.806.187.961	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	1.856.228.123	832.594.793	-	2.688.822.916	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	8.596.296.443	2.898.714.434	-	11.495.010.877	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	8.383.938.519.645			12.711.521.522.004	Carrying Amount
31 Desember 2017/December 31, 2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan dan perabotan kantor	8.387.652.031	4.335.007.954	-	12.722.659.985	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	3.298.900.000	1.522.700.000	546.000.000	4.275.600.000	Vehicles
Sub-total	11.686.552.031	5.857.707.954	546.000.000	16.998.259.985	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	4.466.642.398.477	3.908.894.157.626	-	8.375.536.556.103	Construction in progress
Total Harga Perolehan	4.478.328.950.508	3.914.751.865.580	546.000.000	8.392.534.816.088	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan dan perabotan kantor	5.268.498.347	1.471.569.973	-	6.740.068.320	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan	1.468.611.457	899.491.666	511.875.000	1.856.228.123	Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	6.737.109.804	2.371.061.639	511.875.000	8.596.296.443	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	4.471.591.840.704			8.383.938.519.645	Carrying Amount

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset dalam penyelesaian Perusahaan merupakan biaya atas pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi manajemen konstruksi, jasa konsultasi pengadaan, jasa konsultasi pengembangan usaha serta biaya karyawan yang terkait langsung dengan penyelesaian pembangunan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Beban/biaya tersebut terjadi sejak tahap awal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

As of December 31, 2018, the Company's construction in progress mainly represents costs of construction, management construction consultancy services, procurement consultancy services, business development consultancy services and employee expenses that are directly related to the completion of the construction of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The costs/expenses were incurred from the initial phase up to December 31, 2018.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

7. ASET TETAP – NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, rata-rata persentase penyelesaian pekerjaan konstruksi sipil, sistem dan rangkaian kereta yang tercatat sebagai aset dalam penyelesaian adalah sebesar 96,86% yang diestimasi akan siap beroperasi pada tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

7. FIXED ASSETS – NET (continued)

As of December 31, 2018, the average percentage of completion on the civil construction work, system and rolling stock which was recorded as construction in progress is 96.86% which is estimated to be ready for operation in 2019.

As of December 31, 2018, the management believes that there was no indication of impairment of fixed assets.

8. UTANG

Utang terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Pihak ketiga:		
Akademi Perkeretaapian Indonesia	3.333.660.560	-
Pandega Desian Waherma	858.736.740	-
Deloitte Konsultan Indonesia	856.288.125	-
YND Planning Indonesia	710.296.411	-
Haskoning Indonesia	668.340.000	-
Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta	526.615.645	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000.000)	4.253.298.929	-
Total	11.207.236.410	-

Seluruh utang berdenominasi dalam mata uang rupiah.

8. ACCOUNTS PAYABLES

Account payables consist of:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Third parties:		
Akademi Perkeretaapian Indonesia	-	-
Pandega Desian Waherma	-	-
Deloitte Konsultan Indonesia	-	-
YND Planning Indonesia	-	-
Haskoning Indonesia	-	-
Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta	-	-
Others (each below Rp500,000,000)	-	-
Total	-	-

All account payables denominated in rupiah.

9. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN - PIHAK KETIGA

Utang kontraktor dan konsultan terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Pihak ketiga:		
Oriental Consultant Global Co, Ltd	14.338.192.009	-
SMCC – HK Joint Operations	311.200.000	-
Total	14.649.392.009	-

9. PAYABLES TO CONTRACTORS AND CONSULTANTS - THIRD PARTIES

Payables to contractors and consultants consist of:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Third parties:		
Oriental Consultant Global Co, Ltd	-	-
SMCC – HK Joint Operations	-	-
Total	-	-

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**9. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN -
PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Utang kontraktor dan konsultan berdasarkan mata uang terdiri dari:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Yen Jepang	10.844.972.509	-	Japanese yen
Rupiah	3.804.419.500	-	Rupiah
Total	14.649.392.009	-	Total

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor dan konsultan sehubungan dengan paket pekerjaan pembangunan *Elevated Structure and Station* dan *Underground and Tunnels*.

**9. PAYABLES TO CONTRACTORS AND
CONSULTANTS - THIRD PARTIES (continued)**

Payables to contractors and consultants based on currency consist of:

This account represents payables to contractors and consultants associated with the construction of *Elevated Structure and Station* and *Underground and Tunnels*.

**10. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN - JANGKA
PENDEK**

Pada tahun 2018, akun ini merupakan hutang atas pegawai, BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, masing-masing sebesar Rp54.490.682, Rp424.360.428 dan Rp879.642.835.

**10. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS - SHORT
TERM**

In 2018, this account represents liabilities to employees, BPJS Ketenagakerjaan and Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, amounted to Rp54,490,682, Rp424,360,428 and Rp879,642,835, respectively.

11. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Jasa kontraktor dan konsultan	338.179.601.660	457.499.844.576	Contractors and consultants services
Operasional kantor	15.914.758.776	7.931.059.731	Office operations
Total	354.094.360.436	465.430.904.307	Total

Beban akrual jasa kontraktor dan konsultan terdiri dari nilai progress pekerjaan yang belum ditagihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Accrued expense of contractors and consultant services consist of progress value which has not been billed as of December 31, 2018.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
PPN	3.277.464.575	-	VAT
Total	3.277.464.575	-	Total

b. Utang pajak terdiri dari:

b. Taxes payable consists of the following:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 4(2)	3.760.869	472.952	Article 4(2)
Pasal 21	1.459.296.198	1.007.256.642	Article 21
Pasal 23/26	69.129.911	50.953.886	Article 23/26
PPN	40.909.091	-	VAT
Total	1.573.096.069	1.058.683.480	Total

c. Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

c. The reconciliation between loss before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss for the years ended December 31, 2018 and 2017 is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2018	2017	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(138.719.481.430)	(115.130.147.989)	Loss before income tax
Beda waktu:			Temporary differences:
Liabilitas imbalan karyawan	3.968.328.424	2.781.545.564	Liability for employee benefits
Penyusutan aset tetap	419.962.501	87.060.180	Depreciation of fixed assets
Sub-Total	4.388.290.925	2.868.605.744	Sub-Total
Beda tetap:			Permanent differences
Biaya tunjangan kesehatan	3.435.313.167	2.785.243.117	Medical benefits
Biaya kegiatan dan keperluan rumah tangga	2.297.381.108	1.223.381.150	Employee activity and household appliances
Biaya representasi	589.190.464	391.892.330	Representation
Biaya sumbangan	330.245.000	76.500.000	Donation
Biaya gaji dan tunjangan	-	16.781.333	Salary and benefits
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(34.947.203.786)	(23.225.725.925)	Interest income subject to final tax
Sub-Total	(28.295.074.047)	(18.731.927.995)	Sub-Total
Estimasi rugi fiskal	(162.626.264.552)	(130.993.470.240)	Estimated tax loss

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,	
	2018	2017
Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal awal tahun:		
2013 ^{*)}	-	(39.654.649.219)
2014	(44.113.302.351)	(44.113.302.351)
2015	(74.211.150.921)	(74.211.150.921)
2016	(50.044.645.329)	(50.044.645.329)
2017	(130.993.470.240)	-
Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal akhir tahun	(461.988.833.393)	(339.017.218.060)

^{*)} Habis pada akhir tahun 2017

Perusahaan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2018 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer karena adanya ketidakpastian dalam pemulihannya selama periode 5 tahun mendatang.

- d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Otoritas pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

12. TAXATION (continued)

- c. *The reconciliation between loss before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss for the years ended December 31, 2018 and 2017 is as follows: (continued)*

	Estimated tax losses carry-forward at beginning of year:
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Estimated tax losses carry-forward at end of year

^{*)} Expired at the end of year 2017

The Company will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2018 to the Tax Office based on information reported in these financial statements.

The Company decided not to recognize the deferred tax asset on the temporary differences due to the uncertainty in their recovery during the prospective period of 5 years.

- d. *Administration*

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend the tax within 5 years after the date when the tax became due.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

13. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

13. SHARE CAPITAL

The shareholders' composition as of December 31, 2018 and 2017 is as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018				
Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/ Total	Stockholders
Pemerintah Daerah DKI Jakarta	6.165.307	99,99%	6.615.307.000.000	Local Government of DKI Jakarta
PD Pasar Jaya	500	0,01%	500.000.000	PD Pasar Jaya
Total	6.165.807	100%	6.165.807.000.000	Total

31 Desember 2017/December 31, 2017				
Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/ Total	Stockholders
Pemerintah Daerah DKI Jakarta	5.721.307	99,99%	5.721.307.000.000	Local Government of DKI Jakarta
PD Pasar Jaya	500	0,01%	500.000.000	PD Pasar Jaya
Total	5.721.807	100%	5.721.807.000.000	Total

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 17 April 2018, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 57 tanggal 17 April 2018, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp6.165.807.000.000. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0156597 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2018, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 14 tanggal 14 Januari 2019, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan menjadi sebesar Rp9.111.248.000.000.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders on April 17, 2018 which were on Notarial Deed No. 57 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated April 17, 2018, the stockholders approved the increase in the issued and fully paid share capital to Rp6,165,807,000,000. The said changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0156597 Year 2018 dated April 20, 2018.

Based on the General Meeting of Shareholders on December 21, 2018 which were on Notarial Deed No. 14 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated January 14, 2019, the shareholders approved the increase in the issued and fully paid share capital to Rp9,111,248,000,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2019 (Catatan 21b).

Selama tahun 2018, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penyertaan modal disetor yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman sebesar Rp3.660.724.931.450 (Catatan 17f, 17g, 17h, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17p, 17q, 17s dan 17cc).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, penambahan modal sebesar Rp6.606.169.772.791 belum diaktakan sehingga dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" didalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan.

13. SHARE CAPITAL (continued)

The above changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of on January 16, 2019 (Note 21b).

During 2018, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta, as follow Funded from the grant and loan mechanism amounting Rp3,660,724,931,450, (Notes 17f, 17g, 17h, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17p, 17q, 17s and 17cc).

As of December 31, 2018, the paid-up capital amounting to Rp6,606,169,772,791 has not been notarized and, accordingly, was presented as "Other Paid-up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			Issued and fully paid share capital
Saldo awal tahun	5.721.807.000.000	3.958.878.000.000	Balance at beginning of year
Penambahan tahun berjalan yang berasal dari reklasifikasi modal disetor lainnya	444.000.000.000	1.762.929.000.000	Addition during the year from reclassification of other paid-up capital
Saldo akhir tahun	6.165.807.000.000	5.721.807.000.000	Balance at end of year
Modal disetor lainnya			Other paid-up capital
Saldo awal tahun	3.389.444.841.341	1.763.174.594.937	Balance at beginning of year
Penambahan tahun berjalan yang berasal dari:			Addition during the year from:
APBD dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman	3.660.724.931.450	2.945.441.445.342	APBD from grant and loan mechanism
APBD DKI Jakarta	-	444.000.000.000	APBD DKI Jakarta
Pengurangan selama tahun berjalan yang disebabkan oleh reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	(444.000.000.000)	(1.762.929.000.000)	Deduction during the year from reclassification to issued and fully paid share capital
Penyesuaian modal disetor lainnya	-	(242.198.938)	Adjustment other paid-up capital
Saldo akhir tahun	6.606.169.772.791	3.389.444.841.341	Balance at end of year

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2019, modal disetor lainnya sebesar Rp2.945.441.000.000 telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Catatan 21b).

Perusahaan membukukan penambahan modal disetor lainnya pada saat penerbitan *Notice of Disbursement* oleh JICA serta diakui sebagai modal ditempatkan yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman Pemerintah menggunakan nilai tukar yang terdapat dalam Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

13. SHARE CAPITAL (continued)

On January 16, 2019, other paid-up capital amounting to Rp2,945,441,000,000 has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Note 21b).

The Company recorded the addition of other paid-up capital at the date of the Notice of Disbursement from JICA, and recognized it as issued share capital from the Government grant and loan using the rate in Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan which published by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

14. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2018	2017	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	92.070.527.122	56.682.184.875	Salaries and employee benefits
Pelatihan dan keanggotaan	37.901.583.992	29.980.311.215	Training and membership
Sewa kantor dan kendaraan	19.073.047.747	12.218.592.536	Office and vehicle rent expenses
Jasa konsultan	17.536.960.183	15.677.394.410	Professional fee
Perlengkapan kantor	16.018.137.849	5.484.358.244	Office supplies
Keperluan rumah tangga	7.786.882.161	4.876.514.123	Household appliances
Promosi dan pameran	6.218.815.296	4.104.343.224	Promotion and exhibition
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 7)	3.100.647.653	2.371.061.639	Depreciation and amortization (Note 7)
Transportasi dan parkir	3.197.823.756	1.893.131.774	Transportation and parking
Rapat koordinasi dan rapat umum pemegang saham	2.528.485.564	1.802.330.184	Coordination and stockholders' meetings
Komunikasi, energi dan utilitas	1.472.220.967	1.083.365.546	Communication, energy and utility
Biaya sumbangan	330.245.000	76.500.000	Donation
Biaya administrasi bank	28.519.756	15.420.762	Bank administration charge
Total	207.263.897.046	136.265.508.532	Total

15. PENGHASILAN BUNGA

15. INTEREST INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2018	2017	
Penghasilan bunga deposito	42.699.371.402	28.563.526.417	Deposit interest income
Penghasilan jasa giro	984.633.330	468.630.990	Current accounts income
Beban pajak deposito	(8.539.874.280)	(5.712.705.283)	Deposit interest expense
Beban pajak giro	(196.926.666)	(93.726.199)	Current account expense
Neto	34.947.203.786	23.225.725.925	Net

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN

Akrual atas liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaris yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019 dan 23 Februari 2018.

Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

		31 Desember/December 31,		
		2018	2017	
Tingkat diskonto		8,58%	7,09%	Discount rate
Kenaikan gaji dan upah		6%	6%	Wage and salary increase
Usia pensiun normal	58 tahun/58 years		58 tahun/58 years	Retirement age
Tabel mortalitas	TMI III (2011)		TMI III (2011)	Mortality table
Tingkat cacat	10% dari TMI 2011		10% dari TMI 2011	Disability rate
	10% of TMI 2011		10% of TMI 2011	
Tingkat pengunduran diri untuk usia:				Voluntary resignation for ages:
15-29	6%	6%	6%	15-29
30-34	3%	3%	3%	30-34
35-39	1,8%	1,8%	1,8%	35-39
40-51	1,2%	1,2%	1,2%	40-51
52-53	1,2%	1,2%	1,2%	52-53
54-55	0,6%	0,6%	0,6%	54-55
lebih dari 55	0,0%	0,0%	0,0%	more than 55

Perusahaan membukukan liabilitas imbalan karyawan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31,		
		2018	2017	
Nilai kini liabilitas - awal tahun		12.848.177.939	10.066.632.374	Present value liability - beginning of year
Biaya bunga		910.935.815	837.543.814	Interest cost
Biaya jasa kini		4.400.417.544	3.428.259.907	Current service cost
Biaya jasa lalu		635.602.062	(2.427.023.084)	Past service cost
Pembayaran manfaat		(888.465.605)	(1.392.628.937)	Benefits paid
		17.906.667.755	10.512.784.074	
Keuntungan aktuaris:				Actuarial gain:
- Dari perubahan asumsi keuangan		(2.117.225.993)	1.132.516.165	From changes in financial assumptions -
- Penyesuaian atas pengalaman		1.092.247.997	1.202.877.699	Experience adjustments -
Nilai kini liabilitas - akhir tahun		16.881.689.759	12.848.177.938	Present value liability - end of year

16. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS

The Company's outstanding liability for employee benefits as of December 31, 2018 and 2017 was determined based on the actuarial valuation performed by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, based on their reports dated February 28, 2019 and February 23, 2018, respectively.

The actuarial valuation was performed using the *projected-unit-credit* method which considered the following assumptions:

The Company recorded liability for employee benefits in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefits.

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN (lanjutan)

Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2018	2017	
Biaya jasa kini	4.400.417.544	3.428.259.907	Current service cost
Biaya bunga	910.935.815	837.543.814	Interest cost
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti - neto	188.374.905	570.949.221	Recalculation of liability (asset) defined of benefit - net
Biaya jasa lalu	635.602.062	(2.427.023.084)	Past service cost
Total	6.135.330.326	2.409.729.858	Total

Pada tahun 2018, Perusahaan mengkapitalisasi penyisihan imbalan kerja pada tahun berjalan ke dalam aset dalam penyelesaian sebesar Rp1.278.536.297.

The provision for employee benefits recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income consisted of the following:

In 2018, the Company capitalized provision for employee benefits for the current year to construction in progress amounting to Rp1,278,536,297.

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of of actuarial gain (loss) in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2018	2017	
Penghasilan komprehensif lain			Other comprehensive income
Keuntungan aktuarial			Actuarial gain
- Perubahan asumsi keuangan	1.765.075.660	(983.637.639)	Changes in financial assumptions -
- Penyesuaian atas pengalaman	(551.722.759)	(780.807.004)	Experience adjustments -
Penghasilan (beban) komprehensif lain	1.213.352.901	(1.764.444.643)	Other comprehensive income (loss)

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in the liabilities in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2018	2017	
Liabilitas neto awal tahun	12.848.177.939	10.066.632.374	Net liability - beginning of year
Beban tahun berjalan	6.135.330.326	2.409.729.858	Recognized expenses
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	(1.213.352.901)	1.764.444.643	Recognized in other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(888.465.605)	(1.392.628.937)	Benefits paid
Liabilitas neto akhir tahun	16.881.689.759	12.848.177.938	Net liability - end of year

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KARYAWAN (lanjutan)

Rincian nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2018	2017	2016	2015	2014	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	16.881.689.759	12.848.177.938	10.066.632.374	7.895.596.418	4.495.333.417	Present value of defined benefit obligation
Penyesuaian pada liabilitas program	(1.092.247.997)	(1.202.877.699)	707.584.500	80.785.512	(192.772.955)	Experience adjustment on liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat diskonto tahunan dinaikkan/diturunkan sebesar 1% dengan semua variabel lain dianggap konstan, liabilitas imbalan pasca kerja akan lebih tinggi/rendah menjadi sebesar Rp15.292.655.339/Rp18.771.569.785.

16. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The details of the present value of the defined benefit obligation as of December 31, 2018, 2017, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

As of December 31, 2018, had the annual discount rate appreciated/depreciated by 1% with all other variables held constant, post-employee benefits liability would have been higher/lower to become Rp15,292,655,339/Rp18,771,569,785.

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

- a. Pada tanggal 28 November 2006, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-536 dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") terkait dengan jasa teknik untuk Proyek Mass Rapid Transit Jakarta ("Proyek").

JBIC setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY1.869.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan jasa teknik untuk Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk pengadaan jasa konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2012, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Closing Date* Perjanjian Utang No. IP-536 yang semula tanggal 22 Maret 2012 diubah sehingga menjadi tanggal 22 Desember 2014.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- a. On November 28, 2006, Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-536 with the Japanese Government through the *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") in relation to the *Jakarta Mass Rapid Transit Project* (the "Project").

JBIC agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY1,869,000,000 for the engineering services of the Project. The loan would be used for the purchase of eligible services from consultants that is necessary for the Project implementation.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month at five years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JBIC and the Government of the Republic of Indonesia.

On June 19, 2012, based on a letter from the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the *Closing Date* of Loan Agreement No. IP-536 which was originally on March 22, 2012 had been extended to become December 22, 2014.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- Pada tanggal 27 Februari 2013, berdasarkan *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari JICA, Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perusahaan dimana para pihak telah menyepakati nilai keseluruhan pembangunan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta adalah sebesar JPY137.695.000.000.
- b. Pada tanggal 17 Juni 2008, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan sebesar Rp49.500.000.000, setara dengan 99% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perusahaan.
- c. Pada tanggal 25 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY758.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi pengadaan.

Dana hibah yang tidak melebihi dari JPY191.000.000 akan diteruskan seluruhnya kepada Perusahaan sebagai penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan oleh Perusahaan.

Tata cara penyaluran hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan hibah sebesar Rp21.058.437.149 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

On February 27, 2013, based on the *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* which were signed by representatives of JICA, the Government of the Republic of Indonesia as represented by the National Development Planning Agency, the Directorate General of Railways, DKI Jakarta Provincial Government and the Company agreed that the total project cost for the construction of the Mass Rapid Transit Jakarta Project amounted to JPY137,695,000,000.

- b. On June 17, 2008, the Governor of DKI Jakarta issued Local Government Regulation No. 4 Year 2008 regarding the capital investment in the Company amounting to Rp49,500,000,000, which was equivalent to 99% of the issued and fully paid share capital of the Company.
- c. On March 25, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 with the Local Government of DKI Jakarta.

Under the Grant Agreement, Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting JPY758,000,000, which was to be obtained from a loan from another country, to the Local Government of DKI Jakarta in order to implement management consultancy services and tender assistance consultancy.

Grant fund not exceeding JPY191,000,000 would be granted to the Company as equity of the Local Government of DKI Jakarta for the implementation of the Company's consulting services.

The procedures to distribute the grant are covered by Regulations No. 188/PMK.07/2012 dated November 26, 2012, of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2018, Government of the Republic of Indonesia has provided Rp21,058,437,149 grant to the Local Government of DKI Jakarta.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- d. Pada tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-554 dengan JICA terkait dengan Proyek.

JICA setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY48.150.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia.

- e. Pada tanggal 15 Juni 2009, Perusahaan menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mengenai penyediaan tenaga listrik untuk pembangunan dan pengoperasian kereta api Perusahaan.
- f. Pada tanggal 24 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY48.150.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan sipil dan peralatan, jasa konsultasi dan alokasi cadangan kontinjensi oleh Perusahaan bagi pelaksanaan kegiatan Proyek.

Pada tanggal 23 Maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/PK/2016 dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penerusan hibah dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar JPY11.347.000.000.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- d. On March 31, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-554 with JICA in relation to the Project.

JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY48,150,000,000 for the implementation of the Project. The loan will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Project.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month at ten years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JICA and the Government of the Republic of Indonesia.

- e. On June 15, 2009, the Company entered into a Memorandum of Understanding with PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution related to electricity supply for the construction and operation of the Company's railways.
- f. On July 24, 2009, Government of the Republic of Indonesia signed the Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 with the Local Government of DKI Jakarta.

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant fund amounting to JPY48,150,000,000, which would be obtained from a loan from another country, to the Local Government of DKI Jakarta in order to implement equipment and civil works, consultation services and allocation for contingency reserves by the Company for implementation of development activities of the Project.

On March 23, 2016, the Government of Republic Indonesia signed grant agreement No. PHD-001/PK/2016 with the local government of DKI Jakarta related to subsidiary loan JICA loan agreement on IP-571 for project financing Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue the JICA loan IP-571 as grant to the Local Government of DKI Jakarta amounted to JPY11,347,000,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan hibah sebesar Rp6.954.549.720.045 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Catatan 17g).

- g. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1517/2011, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.179.480.000 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp30.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.179.480.000, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 17c).

Pada tanggal 2 Oktober 2012, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1525/2012, yang menyetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp968.509.699.990 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp65.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.041.116.650 sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 16c) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp889.468.583.340, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 17f).

Pada bulan November dan Desember 2013, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp111.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 704 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp31.000.000.000 dan Keputusan Gubernur No. 1923 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp80.000.000.000 yang alokasinya bersumber dari APBD.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

As of December 31, 2018, Government of the Republic of Indonesia has provided Rp6,954,549,720,045 as grant to the Local Government of DKI Jakarta (Note 17g).

- g. On October 27, 2011, the Company received Governor Decree No. 1517/2011, whereby additional paid-in capital would be made by the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp44,179,480,000, which would be funded from the APBD amounting to Rp30,000,000,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,179,480,000 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 17c).

On October 2, 2012, the Company received Governor Decree No. 1525/2012, whereby additional paid-in capital would be made by the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp968,509,699,990, which would be funded from the APBD amounting to Rp65,000,000,000 and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp14,041,116,650 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 16c) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp889,468,583,340 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 17f).

In November and December 2013, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp111,000,000,000 based on Governor Decree No. 704 dated May 1, 2013 amounting to Rp31,000,000,000 and Governor Decree No. 1923 dated December 11, 2013 amounting to Rp80,000,000,000 which were funded from the APBD.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan menerima Keputusan Gubernur No. 1924/2013, dimana telah disetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.720.529.427.822 yang alokasinya bersumber dari hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp12.088.062.892, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 17c) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.708.441.364.930, sesuai Naskah Perjanjian Pernerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 17f).

Pada bulan Juli 2014, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1123 tanggal 8 Juli 2014 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp49.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2092 tanggal 16 September 2016 dan Rp100.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2730 tanggal 20 Desember 2016.

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp444.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2308 tanggal 20 Desember 2017 yang alokasinya bersumber dari APBD (Catatan 13).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah menerima pencairan modal yang berasal dari APBD dan penerusan hibah serta penerusan pinjaman masing-masing sebesar Rp1.193.500.000.000 dan Rp11.577.976.772.791 (Catatan 17b, 17c dan 17f).

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

On December 11, 2013, the Company received Governor Decree No. 1924/2013, whereby additional paid-in capital would be made by the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp1,720,529,427,822, which would be funded from a grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp12,088,062,892 based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 17c) and grant from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,708,441,364,930 based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 17f).

In July 2014, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp125,000,000,000 based on Governor Decree No. 1123 dated July 8, 2014 which were funded from the APBD.

In December 2015, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp145,000,000,000 based on Governor Decree No. 2700 dated December 8, 2015 which were funded from the APBD.

In December 2016, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta amounting to Rp49,000,000,000 based on Governor Decree No. 2092 dated September 16, 2016 and amounting to Rp100,000,000,000 based on Governor Decree No. 2730 dated December 20, 2016.

In December 2017, the Company received the additional contribution from the Local Government of DKI Jakarta totaling Rp444,000,000,000 based on Governor Decree No. 2308 dated December 20, 2017 which were funded from the APBD (Note 13).

As of December 31, 2018, the Company has received additional paid-up capital that was funded from the APBD, grant and loan mechanism amounting to Rp1,193,500,000,000 and Rp11,577,976,772,791, respectively (Notes 17b, 17c and 17f).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- h. Pada tanggal 10 Juni 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Construction Management Consulting Services* dengan Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., dan Pacific Consultants, Co. Ltd. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kelima tanggal 31 Oktober 2018. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2019. Total nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY1.989.287.297 dan Rp137.167.805.186.

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY61.502.096 (setara dengan Rp7.947.652.339) dan Rp7.262.850.626.

- i. Pada tanggal 11 Juni 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:
- (i) Perjanjian *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-104). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keenambelas tanggal 25 Oktober 2018 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY1.733.678.798 dan Rp1.091.349.330.285. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2019.
- (ii) Perjanjian *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102* dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Jaya Konstruksi JV (CP-105). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keenambelas tanggal 25 Oktober 2018 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY1.312.336.475 dan Rp1.124.414.565.432. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2019.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- h. On June 10, 2013, the Company entered into a *Construction Management Consulting Services* agreement with Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., and Pacific Consultants, Co. Ltd. The agreement was last amended on fifth amendment dated October 31, 2018. The agreement is valid until April 30, 2019. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY1,989,287,297 and Rp137,167,805,186.

During 2018, total consultants' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY61,502,096 (equivalent to Rp7,947,652,339) and Rp7,262,850,626.

- i. On June 11, 2013, the Company entered into several agreements as follows:
- (i) *Underground and Tunnels 9K+211 to 11K+043* agreement with Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Jaya Konstruksi JV (CP-104), The agreement was last amended on sixteenth amendment dated October 25, 2018 with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY1,733,678,798 and Rp1,091,349,330,285. The contract is valid until March 1, 2019.
- (ii) *Underground and Tunnels 11K+043 to 13K+102* agreement with Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & Jaya Konstruksi JV (CP-105), The agreement was last amended on sixteenth amendment dated October 25, 2018 with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY1,312,336,475 and Rp1,124,414,565,432. The contract is valid until March 1, 2019.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Pada tanggal 11 Juni 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut: (lanjutan)

(iii) Perjanjian *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123* dengan SMCC and HK JO (CP-106). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen ketujuh tanggal 2 November 2018 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY5.552.464.950 dan Rp1.210.576.341.353. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran Kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY332.197.704 (setara dengan Rp43.356.515.707) dan Rp712.245.496.018.

j. Pada tanggal 4 Juli 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian *Tender Assistance Services (2) For Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project* dengan Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT Lapi ITB dan PT Inti Daya Kreasicitra. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keempat tanggal 8 Juli 2015 dengan jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY91.284.484 dan Rp5.045.016.623.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, keseluruhan nilai pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY66.582.190 (setara dengan Rp7.472.838.243) dan Rp4.159.605.827.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. On June 11, 2013, the Company entered into several agreements as follows: (continued)

(iii) *Underground and Tunnels 13K+102 to 15K+123 agreement with SMCC and HK JO (CP-106). The agreement was last amended on seventh amendment dated November 2, 2018 with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY5,552,464,950 and Rp1,210,576,341,353. The contract is valid until February 3, 2019.*

During 2018, total Contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted to JPY332,197,704 (equivalent to Rp43,356,515,707) and Rp712,245,496,018.

j. On July 4, 2013, the Company entered into a *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project agreement with Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT Lapi ITB and PT Inti Daya Kreasicitra. The agreement was last amended on fourth amendment dated July 8, 2015 with total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY91,284,484 and Rp5,045,016,623.*

As of December 31, 2018, total payment to consultant related to the above agreements amounted to JPY66,582,190 (equivalent to Rp7,472,838,243) and Rp4,159,605,827.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630* dengan Tokyu-Wika JO (CP-101). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesepuluh tanggal 17 Oktober 2018 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY6.028.617.117 dan Rp1.012.398.370.433. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.
- (ii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations* dengan Tokyu-Wika JO (CP 102). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesepuluh tanggal 17 Oktober 2018 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY2.278.210.959 dan Rp1.057.381.567.912. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.
- (iii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211* dengan Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan tanggal 18 Oktober 2018 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar JPY3.942.187.439 dan Rp1.076.193.721.891. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY2.528.767.587 (setara dengan Rp331.877.381.786) dan Rp769.631.298.178.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

k. In October 2013, the Company entered into several agreements as follows:

- (i) *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630 agreement with Tokyu-Wika JO (CP-101). The agreement was last amended on tenth amendment dated October 17, 2018, with total cost of contract (excluding PPN) amounting to JPY6,028,617,117 and Rp1,012,398,370,433. The contract is valid until February 3, 2019.*
- (ii) *Elevated Structures and Stations agreement with Tokyu-Wika JO (CP 102). The agreement was last amended on tenth amendment dated October 17, 2018, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY2,278,210,959 and Rp1,057,381,567,912. The contract is valid until February 3, 2019.*
- (iii) *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211 agreement with Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). The agreement was last amended on eight amendment dated October 18, 2018, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY3,942,187,439 and Rp1,076,193,721,891. The contract is valid until February 3, 2019.*

During 2018, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY2,528,767,587 (equivalent to Rp331,877,381,786) and Rp769,631,298,178.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- l. Pada tanggal 3 Maret 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock* dengan Sumitomo Corporation. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2019. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY10.835.357.676 dan Rp21.960.355.914.

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY6.960.688.064 (setara dengan Rp896.013.786.370) dan Rp6.110.534.823.

- m. Pada tanggal 30 April 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* dengan Mitsui & Co, Ltd., Toyo Engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2019. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY15.762.000.007 dan Rp1.010.217.668.955.

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY3.175.846.664 (setara dengan Rp410.880.408.583) dan Rp400.025.909.433.

- n. Berdasarkan *General Conditions of Contract, FIDIC Yellow Book* edisi tahun 1999, pada klausul 20.1 *Contractor's Claim*, kontraktor dapat mengajukan notifikasi bila mereka merasa berhak atas hal tersebut /dengan memberikan pemberitahuan kepada *Engineer* dalam waktu tidak lebih dari 28 hari setelah kontraktor mengetahui atau, seharusnya mengetahui, terhadap keadaan atau kejadian yang mengakibatkan notifikasi tersebut.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- l. On March 3, 2015, the Company entered into a *Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock with Sumitomo Corporation*. The agreement is valid until February 6, 2019. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY10,835,357,676 and Rp21,960,355,914.

During 2018, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY6,960,688,064 (equivalent to Rp896,013,786,370) and Rp6,110,534,823.

- m. On April 30, 2015, the Company entered into a *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107 with Mitsui & Co, Ltd., Toyo engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation and PT Inti Karya Persada Teknik*. The agreement is valid until February 6, 2019. Total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY15,762,000,007 and Rp1,010,217,668,955.

During 2018, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY3,175,846,664 (equivalent to Rp410,880,408,583) and Rp400,025,909,433.

- n. Based on the contract clause 20.1 on the *FIDIC General Conditions of Contract, Yellow Book Year 1999*, the contractor shall give notice if the contractor considers himself to be entitled of claim, describing the event or circumstance giving rise to the claim, the notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days to *Engineer* after the contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada bulan November 2015, kontraktor paket pekerjaan CP104 dan CP105 (Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JV) telah mengajukan permintaan keputusan kepada *Dispute Adjudication Board (DAB)* terkait dengan *Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims for the system wide works and equipment dan Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations.*

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan telah mengirimkan tanggapan kepada DAB atas permintaan keputusan oleh kontraktor CP104 dan CP105 kepada DAB tentang *Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims for the system wide works and equipment dan Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations* dimana Perusahaan berkeyakinan bahwa hal - hal yang telah diajukan oleh kontraktor tidak sesuai dengan kontrak.

Pada tanggal 31 Maret 2016, DAB telah mengeluarkan hasil keputusan terkait dengan *Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments* dimana Perusahaan dikenakan *financing charges* sebesar Rp5.882.581.748 (tidak termasuk PPN) dan JPY7.488.838 (tidak termasuk PPN).

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

In November, 2015, the contractor of CP104 and CP105 (Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JV) has requested the decision from Dispute Adjudication Board (DAB) relating to Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims for the system wide works and equipment also Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations.

On January 14, 2016, the Company has submitted their respons to DAB relating to the request of decision from contractor CP104 and CP105 to DAB regarding Adjustment for Changes in Cost; Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments; Administration of Variations and Claims for Extension of Time under the Contract; Supply of Cast - in sockets including bolts, nuts, and washer, packing and shims or the system wide works and equipment also Supply and Installation of Fire Shutters to the Stations whereas the Company believed that the matters which has been submitted by the contractors is not meet the contract.

On March 31, 2016, DAB has issued the results of decisions related to Delayed Valuation, Certification and Payment of the Advance and Interim Progress Payments which the Company is subject to financing charges amounted Rp5,882,581,748 (excluding VAT) and JPY7,488,838 (excluding VAT).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan dan Kontraktor CP 103 telah membuat Amicable Agreement terkait denda keterlambatan pembayaran interim No 1-50 sebesar JPY8.946.574 dan Rp4.631.577.451.

Pada tanggal 4 Januari 2019, Perusahaan dan Kontraktor CP 104 dan 105 telah membuat Amicable Agreement terkait keterlambatan (Catatan 21a).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menerima notifikasi denda keterlambatan pembayaran dari kontraktor dimana denda keterlambatan tersebut terutama disebabkan oleh proses verifikasi dari instansi-instansi terkait. Liabilitas kontinjensi atas denda keterlambatan tersebut adalah sebesar JPY7.410.123 dan Rp2.580.353.145. Hal tersebut sedang berada dalam tahap awal pemrosesan sehingga tidak dimungkinkan untuk menentukan tingkat kemungkinan dan ataupun jumlah penyelesaian yang diperlukan.

- o. Untuk memenuhi kebutuhan proyek, Perusahaan melakukan impor atas material, peralatan dan mesin tertentu yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi Mass Rapid Transit Jakarta. Terdapat kewajiban Perusahaan untuk melakukan re-ekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor. Terkait atas kewajiban tersebut, Perusahaan telah mengeluarkan surat jaminan atas bea masuk kepada Kantor Bea dan Cukai, yang akan menjadi kewajiban sesungguhnya, apabila Perusahaan tidak melakukan re-ekspor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, surat jaminan bea masuk yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp9.307.233.380.
- p. Pada tanggal 4 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-571 dengan JICA terkait dengan Proyek. JICA setuju untuk memberikan pinjaman sebesar JPY75.218.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

On June 28, 2018, the Company and Contractor CP 103 made an Amicable Agreement related to the late interim payment No 1-50 in the amount of JPY8,946,574 and Rp4,631,577,451.

On January 4, 2019, the Company and Contractor CP 104 and 105 made an Amicable Agreement regarding the delayed (Note 21a).

As of December 31, 2018, the Company received notifications of delay payment charges from the contractors where in the delayed where in delayed payment chargers mainly due to the verification process of related institutions. The contingent liability of delayed charges amounting to JPY7,410,123 and Rp2,580,353,145. As the case is at an early stage in proceedings it is not possible to determine the likelihood or amount of any settlement.

- o. *In order to fulfill the project needs, the Company imported the material, equipment and machine that would be used for construction of Mass Rapid Transit Jakarta. There is a liability for the Company to re-export the equipment and machine which has been imported. Related to its liability, the Company has issued its guarantee letter to cover the custom import duty to "Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai", in which, the liability will be recognized if the Company failed to re-export. As of December 31, 2018, the Company has issued its guarantee letter amounted to Rp9,307,233,380.*
- p. *On December 4, 2015, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-571 with JICA in relation to the Project. JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount JPY75,218,000,000 for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The loan will be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- q. Pada tanggal 4 Februari 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman No.SLA-1263/DSMI/2016 dengan Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta terkait penerusan pinjaman dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebesar JPY63.871.000.000 kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan pinjaman sebesar Rp4.623.427.052.744 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Catatan 17g).

- r. Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara Internasional terkait penambahan ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 23. Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai kontrak sewa tahun pertama dan kedua sebesar Rp250.000 per meter persegi per bulan, lalu tahun ketiga sebesar Rp300.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran dimuka setiap enam bulan.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara Internasional terkait penambahan ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 22. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai kontrak sewa tahun pertama sebesar Rp300.000 per meter persegi per bulan, lalu sewa tahun kedua dan ketiga sebesar Rp350.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran dimuka setiap enam bulan.

- s. Pada tanggal 13 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian *Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Tahap 1 Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia* dengan Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (Joint Venture and Association). Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2019. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar JPY803.705.793 (tanpa pajak) dan Rp49.479.817.804 (tanpa pajak)

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- q. On February 4, 2016, the Government of Republic of Indonesia signed Grant Agreement Pinjaman No.SLA-1263/DSMI/2016 with the Local Government of DKI Jakarta related to subsidiary loan from JICA loan agreement on IP-571 for project financing Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue the JICA loan IP-571 amounted to JPY63,871,000,000 to Local Government of DKI Jakarta.

As of December 31, 2018, Government of the Republic of Indonesia has provided Rp4,623,427,052,744 as loan to the Local Government of DKI Jakarta (Note 17g).

- r. On February 29, 2016, the Company signed a Lease Agreement of Office Area with PT Wisma Nusantara International related to the additional of office area for PT MRT Jakarta in Wisma Nusantara building. This agreement valid for 36 months, since March 1, 2016 until February 28, 2019, with the value of contract for first and second year of Rp250,000 per square metre per month and for the third year of Rp300,000 per square metre per month. The payment of office rent will be paid in advance every six months.

On August 28, 2017, the Company signed a Lease Agreement of Office Area with PT Wisma Nusantara International related to the additional of office area for PT MRT Jakarta in Wisma Nusantara building 22 floor. This lease agreement is valid from September 18, 2017 until December 31, 2019 with the value of contract or first year of Rp300,000 per square metre per month and for the second and third year of Rp350,000 per square metre per month. The payment of office rent will be paid in advance every six months.

- s. On April 13, 2016, the Company entered into a Contract for Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia with Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (Joint Venture and Association). The Agreement is valid until November 30, 2019. Total cost of the Contract amounted to JPY803,705,793 (without taxes) and Rp49,479,817,804 (without taxes).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY227.176.342 (setara dengan Rp29.330.358.981) dan Rp11.984.804.228.

- t. Pada tanggal 28 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian tentang Jasa Konsultan Business Plan Non Farebox & Property Sepanjang Stasiun Koridor Fase 1 MRT Jakarta koridor Lebak Bulus - Bundaran HI dengan PT Roland Berger Strategy Consultants. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 dengan nilai sebesar Rp4.304.263.496 (termasuk PPN).
- u. Pada tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya untuk kebutuhan Sistem Operasi MRT Jakarta dengan Biaya Penyambungan (BP) listrik menurut kontrak sebesar Rp32.100.000.000. Perjanjian tersebut berlaku selama Perusahaan masih menjadi pelanggan listrik. Kewajiban bulanan pembayaran listrik dimulai pada saat Perusahaan memulai kegiatan operasional MRT Jakarta.
- v. Pada tanggal 22 Maret 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun batch I – prasarana, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.199.626.825. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 tahun.

Pada tanggal 7 Juli 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun batch II – training dasar, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.167.305.800. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan diklat.

Pada tanggal 8 September 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian untuk Sumber Daya Manusia MRT Jakarta dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun batch II – prasarana, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.639.357.000. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan bulan Desember 2017.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

During 2018, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY227,176,342 (equivalent to Rp29,330,358,981) and Rp11,985,804,228.

- t. *On July 28, 2016, the Company entered into a Contract for Consulting Services for Non Farebox and Property Business in MRT Jakarta Project Phase 1 Corridor Lebak Bulus - Bundaran HI with PT Roland Berger Strategy Consultants. The agreement is valid until January 13, 2017 with value of Rp4,304,263,496 (including VAT).*
- u. *On December 21, 2016, the Company signed a Purchase Agreement of Electricity Power with PT PLN (Persero) Distribution Area of Jakarta Raya to supply electricity for operational system of MRT Jakarta with the cost of installation electricity for Rp32,100,000,000. This agreement is valid as long as the Company is a customer of PT PLN (Persero). The monthly payment of the electricity begins when the Company starts MRT Jakarta operational.*
- v. *On March 22, 2017, the Company entered into an agreement related to Human Resources Education and Training with Indonesia Railway Academy Madiun batch I – infrastructure, amounted to Rp2,199,626,825. This agreement is valid for 1 year.*

On July 7, 2017, the Company entered into an agreement related to Human Resources Education and Training with Indonesia Railway Academy Madiun batch II – basic training, with contract value amounted to Rp2,167,305,800. This agreement is valid up to the end of the training period.

On September 8, 2017, the Company entered into an agreement related to Education and Training for MRT Jakarta Human Resources with Indonesia Railway Academy Madiun batch II – infrastructure, with contract value amounted to Rp5,639,357,000. This agreement was valid up to December 2017.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun batch III – prasarana, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.145.812.800. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan diklat.
- w. Pada tanggal 13 April 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 53 Tahun 2017 tentang penugasan kepada Perusahaan untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit.
- x. Pada tanggal 14 Juli 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian atas paket pekerjaan jasa konsultansi penyusunan *master plan* dan usulan rancangan kota (PRK) Kawasan Transit Terpadu dengan PT Pandega Desain Weharima. Perjanjian ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.732.710.000. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2018.
- y. Pada tanggal 11 September 2017, perusahaan menandatangani perjanjian Jasa Konsultansi Penyusunan *Master Plan* Bawah Tanah Kawasan Transit Terpadu dengan PT Arup Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2018. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp4.649.775.000 (termasuk pajak).
- z. Pada tanggal 5 Oktober 2017, perusahaan menandatangani perjanjian pengelolaan program pensiun dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2017 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk waktu yang sama, kecuali diputuskan lain oleh salah satu pihak.
- aa. Pada tanggal 6 Oktober 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 140 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perusahaan sebagai operator utama pengelola kawasan Transit Oriented Development Koridor (Utara - Selatan) Fase I Mass Rapid Transit Jakarta.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- On December 4, 2017, the Company entered into an agreement related to Human Resources Education and Training with Indonesia Railway Academy Madiun batch III – infrastructure, with contract value amounted to Rp2,145,812,800. This agreement is valid up to the end of the training period.*
- w. *On April 13, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Local Government Regulation No. 53 Year 2017 regarding the appointment of the Company to the implement infrastructure and facilities Mass Rapid Transit.*
- x. *On July 14, 2017, the Company entered into a procurement package agreement of master plan preparation consultancy services and proposed city plan for Integrated Transit Area with PT Pandega Desain Weharima. This agreement has contract value amounted to Rp5,732,710,000. This agreement is valid from July 14, 2017 until April 13, 2018.*
- y. *On September 11, 2017, the Company entered into an agreement for consultancy services Design Master Plan Underground Transit Oriented Development with PT Arup Indonesia. The Agreement is valid until March 10, 2018. Total cost of the Contract amounted to Rp4,649,775,000 (include taxes).*
- z. *On October 5, 2017, the Company entered into an agreement for the management of pension program with Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). The agreement shall be effective for the period of 2 (two) years commencing on October 1, 2017, and shall always automatically extended for the same periode, unless otherwise terminated by either party.*
- aa. *On October 6, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Local Government Regulation No. 140 Year 2017 regarding assignment to the Company as the main operator of the Transit Oriented Development Corridor (North - South) phase I Mass Rapid Transit Jakarta.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

bb. Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana angkutan umum masal kereta api (*Mass Rapid Transit*) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian ini meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun dihitung dan dapat diperpanjang untuk setiap kali untuk jangka waktu maksimal 20 tahun berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

cc. Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian *Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System* dengan Oriental Consultants Global Co., Ltd (Joint Venture and Association). Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar JPY1.113.348.000 (tanpa pajak) dan Rp61.722.326.250 (tanpa pajak).

Selama tahun 2018, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian diatas adalah sebesar JPY179.159.181 (setara dengan Rp23.546.294.439) dan Rp10.511.639.937.

dd. Pada tanggal 15 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi dengan PT Tower Bersama untuk kebutuhan penyediaan konektivitas seluler dan Wifi pada area operasional MRT Jakarta – Fase 1. PT Tower Bersama wajib membayar bagi hasil dengan nilai minimum Rp5.000.000.000 setiap tahun ditambah jumlah nominal tersisa dari bagi hasil pada tahun kerjasamana dikurangi nilai minimum. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

ee. Pada tanggal 13 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Periklanan dengan PT Avabanindo Perkasa (AP) untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan operasional MRT Jakarta - Fase I. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AP wajib memberikan komisi penandatanganan perjanjian kepada Perusahaan sebesar Rp40.000.000.000. Atas fee tersebut dicatat sebagai Pendapatan Ditangguhkan dan akan diamortisasi sejak Perusahaan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

bb. On October 13, 2017, the Company signed implementation of infrastructure agreement for mass railway public transport (*Mass Rapid Transit*) with Provincial Government of DKI Jakarta. This agreement covers development, operation, maintenance, and business. This agreement is valid for 30 years starts from operating license determination date of public railway infrastructure, and may be renewed for each time for a maximum period of 20 years based on the agreement in accordance with the provisions of the law.

cc. On December 4, 2017, the Company entered into a Contract for Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System with Oriental Consultants Global Co., Ltd (Joint Venture and Association). The Agreement is valid until May 4, 2021. Total cost of the Contract amounted to JPY1,113,348,000 (without taxes) and Rp61,722,326,250 (without taxes).

During 2018, total contractors' payment certificate which has been paid related to the above agreements amounted JPY179,159,181 (equivalent to Rp23,546,294,439) and Rp10,511,639,937.

dd. On December 15, 2017, the Company signed Telecommunication Cooperation Agreement with PT Tower Bersama for provide cellular connectivity and Wifi in the operational area of MRT Jakarta – Phase I. PT Tower Bersama is required to pay profit sharing with a minimum value of Rp5,000,000,000 annually plus the remaining nominal amount of profit sharing in the year of cooperation minus the minimum value. The agreement is valid for 10 years starting from the date of operating income.

ee. On December 13, 2107, the Company signed an Advertising Cooperation Agreement with PT Avabanindo Perkasa (AP) for provide advertising services in the operational area of MRT Jakarta - Phase I. This agreement is valid for 20 years from the revenue operation date.

Based on the agreement, AP shall have an obligation to pay the Agreement signing commission to the Company amounting to Rp40,000,000,000. The fee recognized as Unearned revenue, and will amortize since the Company operated and during the term of the agreement.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

17. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- ff. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta fase 1 di stasiun Dukuh Atas. Perjanjian tersebut berlaku 10 tahun setelah tanggal pendapatan dengan nilai kontrak sebesar Rp161.000.000.000.
- gg. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak PT Astra International dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta fase 1 di stasiun Setiabudi. Perjanjian tersebut berlaku 10 tahun setelah tanggal pendapatan dengan nilai kontrak sebesar Rp250.000.000.000.

17. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- ff. On December 31, 2018, the Company signed the Station Naming Rights Agreement with PT Bank BNI (Persero) Tbk in the context of the exclusive naming rights of MRT Jakarta stations phase 1 at the Dukuh Atas station. The agreement is valid for 10 years after the date of income with contract value of Rp161,000,000,000.
- gg. On December 31, 2018, the Company signed the Station Naming Rights Agreement with PT Astra International in the context of the exclusive naming rights of MRT Jakarta stations phase 1 at the Setiabudi station. The agreement is valid for 10 years after the date of income with contract value of Rp250,000,000,000.

18. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai tercatat, yang juga merupakan taksiran nilai wajar, dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

18. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The carrying values, which are also the estimated fair values, of the Company's financial instruments that are carried in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Aset Keuangan Lancar			Current Financial Assets
Kas dan setara kas	604.890.512.336	780.342.541.801	Cash and cash equivalents
Piutang bunga	518.340.064	721.315.068	Interest receivable
Piutang lain-lain - neto	1.952.248.911	117.694.592	Other receivables - net
Total aset keuangan lancar	607.361.101.311	781.181.551.461	Total current financial assets
Aset Keuangan Tidak Lancar			Non-current Financial Assets
Uang jaminan	6.724.921.336	3.839.493.185	Guarantee deposits
Total Aset Keuangan	614.086.022.647	785.021.044.646	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			Current Financial Liabilities
Utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga	14.649.392.009	-	Payables to contractors and consultants - third parties
Beban akrual	354.094.360.436	465.430.904.307	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan jangka pendek	368.743.752.445	465.430.904.307	Total current financial liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang			Non-current Financial Liabilities
Utang retensi	691.273.055.316	542.408.341.738	Retention payables
Total Liabilitas Keuangan	1.060.016.807.761	1.007.839.246.045	Total Financial Liabilities

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

18. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*) dan bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Hierarki nilai wajar

Perusahaan menggunakan hierarki teknik penilaian berikut dalam menentukan dan mengungkapkan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan:

Tingkat 1: harga yang beredar di pasar aktif (tidak disesuaikan) untuk aset atau liabilitas yang identik.

Tingkat 2: teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tingkat 3: teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak ada nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang wajar aset dan liabilitas keuangan yang ditentukan dengan menggunakan salah satu dari teknik penilaian tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 karena Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset lancar dan liabilitas jangka pendek non-derivatif

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang terdiri dari kas dan setara kas, piutang bunga, piutang lain-lain - neto, utang kontraktor dan konsultan - pihak ketiga, beban akrual dan utang retensi.

18. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The fair values of the financial assets and liabilities are determined based on the amount at which the instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

Fair value hierarchy

The Company uses the following hierarchy of valuation techniques in determining and disclosing the fair value of financial assets and liabilities:

Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly.

Level 3: techniques which use inputs that have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

As of December 31, 2018 no fair value of assets and liabilities was determined using either level 1, level 2 or level 3 valuation technique since the Company does not have financial assets at fair value through profit or loss.

Short-term non-derivative financial assets and liabilities

Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less consist of cash and cash equivalents, interest receivable, other receivables - net, payables to contractors and consultants - third parties, accrued expenses and retentions payable.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

18. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Aset lancar dan liabilitas jangka pendek non-derivatif (lanjutan)

Nilai wajar aset lancar dan liabilitas jangka pendek non-derivatif diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena akan jatuh tempo dalam waktu singkat.

Aset keuangan tidak lancar jangka panjang non-derivatif

Aset keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal (uang jaminan) diukur pada biaya perolehan.

Risiko suku bunga

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

	Kurang dari 1 tahun/ Below 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Biaya transaksi atas utang/ Debt issuance cost	Nilai tercatat/ Carrying value	
2018					
Suku bunga mengambang - Bank dan deposito berjangka	604.890.512.336	-	-	604.890.512.336	Floating rate - Cash in banks and time deposits
2017					
Suku bunga mengambang - Bank dan deposito berjangka	780.342.541.801	-	-	780.342.541.801	Floating rate - Cash in banks and time deposits

19. PENGELOLAAN MODAL

Dalam mengelola permodalannya, Perusahaan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan (a) efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi serta (b) pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

18. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Short-term non-derivative financial assets and liabilities (continued)

The fair values of short-term non-derivative financial assets and liabilities are assumed to be the same as their carrying amounts due to their short-term maturities.

Non-current non-derivative financial assets

Long-term financial assets which do not have quoted prices in active markets and their fair value cannot be measured reliably (guarantee deposits) are measured at cost.

Interest rate risk

The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Company's financial instruments that are exposed to interest rate risk:

19. CAPITAL MANAGEMENT

In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to the stockholders and other stakeholders.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the (a) efficiency of capital use based on operating cash flow and (b) capital expenditures and future capital needs.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

20. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN

Standar baru, revisi terhadap standar yang telah ada dan interpretasi berikut ini, telah diterbitkan dan wajib untuk diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku Perusahaan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 atau periode setelahnya. Perusahaan telah mengadopsinya tetapi tidak ada dampak signifikan terhadap bisnis Perusahaan saat ini.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Penerapan dini amandemen ini diperkenankan.

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut:

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019

- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018): Pajak Penghasilan.
- Amandemen PSAK 24 (2018): Imbalan Kerja. Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang merevisi persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, dan persyaratan akuntansi lindung nilai secara umum yang baru. Penerapan dini PSAK ini diperkenankan.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan berapa besar pendapatan dapat diakui. PSAK 72 menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan. Penerapan dini PSAK ini diperkenankan.

20. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES

The following new standards, amendments to existing standards and interpretations have been published and are mandatory for the first time adoption for the Company's financial year beginning on January 1, 2018 or later periods. The Company has adopted them but they have no significant impact to the Company's business.

- Amendment to PSAK 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, which requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash. Earlier application of this amendment is permitted.

The following are several accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Perusahaan but not yet effective for financial statements as of December 31, 2018 and for the year then ended:

Effective at January 1, 2019

- PSAK 46 (Annual Improvement 2018): Income Taxes.
- Amendment to PSAK 24 (2018): Employee Benefits. Plan Amendment, Curtailment or Settlement.

Effective at January 1, 2020

- PSAK 71: Financial Instruments, which revised the requirements related to the classification and measurement of financial instruments, including the expectation credit loss model for calculation of impairment of financial assets, and new general hedging accounting requirements. Earlier application of this PSAK is permitted.
- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, which sets out a comprehensive framework to determine how, when and how much revenue can be recognized. PSAK 72 supersedes some current revenue accounting standards, including PSAK 23: Revenue, PSAK 34: Construction Contracts and ISAK 10: Customer Loyalty Programs. Earlier application of this PSAK is permitted.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**20. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGUNGKAPAN (lanjutan)**

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- PSAK 73: Sewa, yang menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

21. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 4 Januari 2019, Perusahaan dan Kontraktor CP 104 dan CP 105 telah membuat Amicable Agreement terkait penilaian yang tertunda, sertifikasi dan pembayaran Uang Muka dan pembayaran kemajuan sementara (Nos. 1-60) dan penilaian yang tertunda, sertifikasi dan pembayaran Penyesuaian untuk Perubahan Biaya (Penyesuaian Harga) dengan jumlah masing-masing JPY9.264.746 dan Rp9.230.696.337 serta JPY1.977.415 dan Rp37.192.183.562 (Catatan 17n).
- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2018, yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 14 tanggal 14 Januari 2019, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan menjadi sebesar Rp9.111.248.000.000 dan menetapkan perubahan modal dasar menjadi Rp14.659.000.000.000 (Catatan 13).
Perubahan di atas telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0028922 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019.
- c. Pada tanggal 11 Februari 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta fase 1 di stasiun Istora. Perjanjian tersebut berlaku 10 tahun setelah tanggal pendapatan dengan nilai kontrak sebesar Rp180.000.000.000.

**20. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND
DISCLOSURES (continued)**

Effective at January 1, 2020 (continued)

- PSAK 73: Lease, which establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of leases by introducing a single accounting model specifically for lessee. Lessee are required to recognize right-of-use assets and lease liabilities.

21. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On January 4, 2019, the Company and Contractor CP 104 and CP 105 made an Amicable Agreement related to delayed valuation, certification and payment of Advances and interim progress payment (Nos. 1-60) and delayed valuation, certification and payment of Adjustment for Change in Cost (Price Adjustment) in the amount of JPY9,264,746 and Rp9,230,696,337 and JPY1,977,415 and Rp37,192,183,562, respectively (Note 17n).
- b. Based on the General Meeting of Shareholders on December 21, 2018 which were on Notarial Deed No. 14 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated January 14, 2019, the shareholders approved the increase in the issued and fully paid share capital to Rp9,111,248,000,000 and authorized capital changes to Rp14,659,000,000,000 (Note 13).

The above changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0028922 Year 2019 dated January 16, 2019.
- c. On February 11, 2019, the Company signed into a Station Naming Rights Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the context of the exclusive naming rights of phase 1 Jakarta MRT stations at Istora station. The agreement is valid for 10 years after the date of income with contract value of Rp180,000,000,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- d. Pada tanggal 13 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/MK.7/2019 dengan pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penerusan hibah atas Loan Agreement IP-578 untuk kegiatan Mass Rapid Transit Jakarta Phase 2 (I). Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman IP-578 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar JPY70.021.000.000.

**21. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

- d. On February 13, 2019, Government of Republic Indonesia signed grant No.PHD-001/MK.7/2019 with local government of DKI Jakarta related to subsidiary loan agreement on IP-578 for Mass Rapid Transit Jakarta phase 2 (I) activities. The parties agreed to continue the loan IP-578 as grant to the Local Government of DKI Jakarta amounted to JPY70,021,000,000.

**22. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN
ARUS KAS**

Transaksi non-kas:

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Years ended December 31,

	2018	2017
a. Perolehan/penambahan aset tetap dikreditkan ke:		
a. Modal disetor lainnya	3.660.724.931.450	2.945.199.246.404
b. Uang muka kontraktor dan konsultan	539.961.334.613	537.162.974.502
c. Utang retensi	148.864.713.578	207.347.186.602
d. Utang kontraktor dan konsultan	14.649.392.009	(95.411.580.186)
e. Kapitalisasi gaji dan kesejahteraan karyawan proyek	15.442.954.672	13.480.255.296
f. Biaya masih harus dibayar	111.336.543.871	283.102.917.108
b. Penambahan modal disetor lainnya dikreditkan ke:		
Aset tetap	(3.660.724.931.450)	(2.945.199.246.404)

**22. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF CASH FLOW
INFORMATION**

Non-cash transactions:

- a. Acquisition of/addition to fixed assets credited to:
- a. Other paid-up capital
- b. Contractors' and consultant advances
- c. Retentions payable
- d. Payables to contractors and consultants
- e. Capitalization of salaries and employee benefits
- f. Accrued expenses
- b. Addition to other paid-up capital credited to:
- Fixed assets

23. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang selesai disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2019.

23. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of the financial statements that were completed and authorized for issued by the Board of Directors on March 14, 2019.



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
I. Umum / General		
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris <i>Annual report is presented in proper Bahasa Indonesia. English version of the report is recommended.</i>		√
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>Annual report is printed on good quality paper grade, using readable typography</i>		√
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>Annual report clearly states corporate identity</i>	Nama Perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. <i>Company name and year of annual report are displayed on the:</i> 1. Cover; 2. Side; 3. Back cover; and 4. Each page	√
4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan <i>Annual report is uploaded to company's website</i>	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir. Covers the last report and at least reports of last 4 (four) years	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Financial Highlights		



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information on company's operating results in the form of three (3) years comparison or since business commences-if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): <ol style="list-style-type: none"> a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : <ol style="list-style-type: none"> a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. <p>Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.</p> <p><i>Sales / revenue</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Income (loss):</i> 2. <i>Gross profit</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Income attributable to owner of parent company; and</i> b. <i>Income attributable to non-controlling interests;</i> 3. <i>Total comprehensive income (loss)</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Income attributable to owner of parent company;</i> b. <i>Income attributable to non-controlling interests; and</i> 4. <i>Earnings (loss) per share</i> <p><i>Note: Companies without subsidiaries need to present income (loss) and income (loss) and other comprehensive income as total.</i></p>	24
<p>2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information on Company's financial position in the form of three (3) years comparison or since business commences-if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Total investments in associates;</i> 2. <i>Total assets;</i> 3. <i>Total liabilities; and</i> 4. <i>Total equity</i> 	24, 25
<p>3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Financial ratio in the form of three (3) years financial year comparison or since business commences-if the company's business activities have been conducted for less than 3 (three) years.</i></p>	<p>Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan <i>Information includes 5 (five) financial ratios that are general and relevant to the industry where the company is engaged</i></p>	25



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik <i>Stock price information in tables and charts</i></p>	<p>1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan</p> <p>1. <i>Total outstanding shares;</i> 2. <i>Information in tables include:</i> a. <i>Market Capitalization based on price of stock where the share is engaged;</i> b. <i>Highest, lowest, and closing price of stock where the share is engaged; and</i> c. <i>Share trade volume n price of stock where the share is engaged.</i> <i>Information in charts include at least:</i> d. <i>Closing price of stock where the share is engaged; and</i> e. <i>Share trade volume n price of stock where the share is engaged. for every quarterly for the last 2 (two) financial years.</i></p> <p><i>Note: Disclose if company does not own market capitalization, stock price information, and share trade volume</i></p>	26-27
<p>5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last two (2) financial years</i></p>	<p>Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i> 1. <i>Total outstanding bonds/sukukconvertible bonds</i> 2. <i>Interest rate/Return</i> 3. <i>Maturity date</i> 4. <i>Bonds/sukuk rating in 2015 ang 2016</i></p> <p><i>Note: Disclose if company does not own bonds/sukuk/convertible bonds</i></p>	28



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / <i>Report of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>		
1. Laporan Dewan Komisaris <i>Report of the Board of Commissioners</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Containing matters as follows:</i> 1. <i>Assessment on the performance of the Board of Directors for managing the company and the basis of assessment;</i> 2. <i>The view over the company's business prospects prepared by the Board of Directors and the considerations;</i> 3. <i>The view on the implementation/management of the whistleblowing system (WBS) at the company and the Board of Commissioners' role in the WBS; and</i> 4. <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons</i>	32-43
2. Laporan Direksi <i>Report of the Board of Directors</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Containing matters as follows:</i> 1. <i>Analysis on the performance of the company, which include among others:</i> a. <i>strategic policy;</i> b. <i>comparison between the results achieved by the targeted; and</i> c. <i>constraints faced by the company and actions to solve them;</i> 2. <i>Analysis on business prospects;</i> 3. <i>Development of the implementation of corporate governance in the financial year; and</i> 4. <i>Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reasons</i>	46-61



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners</i></p>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan <p><i>Include the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Signatures are placed on a separate page</i> 2. <i>Statement that the BoD and BoC are fully responsible for the accuracy of the annual report's content.</i> 3. <i>Signed by all members of the BoC and the BoD, with name and title; and</i> 4. <i>Written explanation in a separate letter by any member of the BoC or BoD who does not sign the annual report, or, written explanation in a separate letter by the other members should the written explanation is not available.</i> 	64-65
<p>IV. Profil Perusahaan / Company Profile</p>		
<p>1. Nama dan alamat lengkap Perusahaan <i>Company's name and full address</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.. <i>Information includes, among others: name and address, zip code, telephone & fax number, email, and website</i></p>	68-69
<p>2. Riwayat singkat Perusahaan <i>A brief history of the Company</i></p>	<p>Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan</p> <p><i>Information includes, among others: date/year of incorporation, name, and change(s) to the Company's name (where applicable).</i> <i>Note: disclose if change has never been made to company's name</i></p>	70-73
<p>3. Bidang usaha <i>Business Fields</i></p>	<p>Uraian mengenai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. <p><i>Description on, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Company's business activities according to the latest Articles of Association; and</i> 2. <i>Description of business activities; and</i> 3. <i>Products and/or services generated</i> 	74-77
<p>4. Struktur Organisasi <i>Organizational structure</i></p>	<p>Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi. <i>Presented in chart, including names and positions of at least up to one level below the BoD</i></p>	78-83



5.	Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan <i>Description</i>	Hal <i>Pages</i>
	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Company's Vision, Mission and Corporate Culture</i>	Mencakup: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. <i>Includes:</i> 1. <i>Company's vision;</i> 2. <i>Company's mission;</i> 3. <i>A statement declaring that the vision and mission have been endorsed by the BoD/BoC in current financial book year; and</i> 4. <i>Statement of corporate culture</i>	84-85
	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris <i>Brief background information on members of BoC</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <i>Information includes, among others:</i> 1. <i>Name;</i> 2. <i>Position (including position(s) in other companies or institutions);</i> 3. <i>Age;</i> 4. <i>Domicile;</i> 5. <i>Education (field of study and education institution attended);</i> 6. <i>Working experience (position, institution, and tenure period)</i> 7. <i>Brief appointment chronology as member of company's BoC</i>	88-91
	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi <i>Brief background information on members of BoD</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <i>Information includes, among others:</i> 1. <i>Name;</i> 2. <i>Position (including position(s) in other companies or institutions);</i> 3. <i>Age;</i> 4. <i>Domicile;</i> 5. <i>Education (field of study and education institution attended);</i> 6. <i>Working experience (position, institution, and tenure period)</i> 7. <i>Brief appointment chronology as member of company's BoD</i>	92-96



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi</p> <p><i>Number of employees (2 year-comparison) and a description of competence development which shows there is any chance for every each organization level</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of employees for each level of the organization 2. Number of employees for each level of education 3. Number of employees by employment status; 4. Description and data of employee development programs, that had been realization in current book year includes position level who follows the training, type of training, and the training purpose; and 5. Costs incurred for development programs 	<p>113-121, 200-219</p>
<p>9. Komposisi Pemegang saham</p> <p><i>Composition of Shareholders</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <p><i>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</i></p> <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Detailed names of 20 largest shareholders and percent of ownership 3. Details of shareholder names and percent of ownership cover: <ol style="list-style-type: none"> a. Shareholders with 5% of more ownership; b. Names of public who own shares less than 5% 4. Names of Directors and Commissioners who own direct or indirect shares. <p><i>Note: Disclose if Directors or Commissioners hasn't own direct and indirect shares</i></p>	<p>122-124</p>
<p>10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi</p> <p><i>List of Subsidiaries and/or Associates</i></p>	<p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of Subsidiaries and/or Associates 2. Percent of share ownership 3. Description of the Subsidiaries and/or Associates' business fields 4. Information on Subsidiaries and/or Associates operational status (in operation or otherwise) 	<p>124</p>



	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
11.	Struktur grup Perusahaan <i>Company's group structure</i>	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). <i>Company's group structure in chart that describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vehicle (SPV)</i>	125
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Share listing chronology (includes private placement) and/or share listing from the first publishing until the end of financial book year.</i>	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. <i>Information includes:</i> 1. Year of shares publishing, total share, share value, and price of share for every each corporate action; 2. Total listing share after every each corporate action; 3. Names of exchange where the Company share is listing. <i>Note: Disclose if the Company has no share listing chronology</i>	125
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Listing chronology of other securities</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. <i>Information includes:</i> 1. Listing chronology of other securities, other interest rate, and other securities due date; 2. Other securities value; 3. Name(s) of stock markets where the the securities are listed; and 4. Securities rating <i>Note: Disclose if the company hasn't publishing and listing securities chronology</i>	125
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang <i>Name and address of capital market institutions and/or capital market supporting professions</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <i>Information includes:</i> 1. Name and address of the Securities Administration Agency 2. Name and address of the Public Accounting Firm 3. Name and address of rating agency	126-128



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>Awards and/or certification received during last financial year and/or certification effective during last financial year, both national and international</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of awards and/or certificates 2. Year received 3. Award and/or certification issuer 4. Validity period (for certification) 	129
<p>16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) <i>Name and address of subsidiaries and/or branches or representative (if any)</i></p>	<p>Memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan</p> <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address of subsidiary; and 2. Name and address of branch/representative office <p><i>Note: Disclose if company does not own subsidiary/branch office/representative office</i></p>	129
<p>17. Informasi pada Situs Web Perusahaan <i>Information available on company website</i></p>	<p>Meliputi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. <p><i>Information includes, at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholder information up to ultimate individual owner; 2. Code of Conduct; 3. AGMS Information at least include the agenda of AGMS, summary of AGMS, and information of important date including announcement date, invitation date, and summary AGMS date is announced; 4. Annual financial statements (last 5 years); 5. BoC and BoD profiles; and 6. BOC, BOD, Committees and Audit Internal Unit Charter. 	130-131



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal</p> <p><i>Education and/or training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit</i></p>	<p>Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan</p> <p><i>Covering least information (type and other relevant parties to attend):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Education and/or training for the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Education and/or training for the Board of Directors;</i> 3. <i>Education and/or training for the Audit Committee;</i> 4. <i>Education and/or training for the Nomination and Remuneration Committee;</i> 5. <i>Education and/or training for Other Committee;</i> 6. <i>Education and/or training for the Corporate Secretary; and</i> 7. <i>Education and/or training for the Internal Audit Unit. which attended in the financial year.</i> <p><i>Note: if there is no education and/or training in the financial year, to be revealed</i></p>	132-135
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Management Discussion and Analysis on Company Performance		
<p>1. Tinjauan operasi per segmen usaha</p> <p><i>Operational review per business segment</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. <p><i>Contains a description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Each business segment;</i> 2. <i>Performance per segment, including:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Production/operations;</i> b. <i>Increase/decrease in production capacity;</i> c. <i>Sales / revenue;</i> d. <i>Profitability</i> 	142-154



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>2. Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan <i>Description of Company's financial performance</i></p>	<p>Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. <p><i>Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the year and with previous years (both in narrative and tables), which covers among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Current assets, non-current assets, and total assets;</i> 2. <i>Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities</i> 3. <i>Equity</i> 4. <i>Sales/revenues, expenses, and net income (loss), other comprehensive income, and total Comprehensive Income (loss); and</i> 5. <i>Cash flows</i> 	155-165
<p>3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri Perusahaan <i>Discussion and analysis on Company's solvency and collectability, presenting the calculation of ratios relevant to company's type of industry</i></p>	<p>Penjelasan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. <p><i>Description on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Short and long term solvency</i> 2. <i>Receivables collectability Level</i> 	165-166
<p>4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) <i>Discussion on capital structure and capital structure policy</i></p>	<p>Penjelasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal <p><i>Description on:</i> <i>Capital structure consisting of interest bearing liabilities/sukuk and equity; Capital structure policies and basis of policy formulation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Basis of management policies of capital structure.</i> 	166-168



	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
5.	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir</p> <p><i>Discussion on material commitment for capital goods investment during last financial year</i></p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila Perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan</p> <p><i>Description on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Names the party who committed; 2. Purpose of commitment; 3. Expected fund source to fulfil the respective commitments; 4. Currency of denomination; and 5. Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position. <p><i>Note: Disclose if company has no material commitment for investments in capital goods</i></p>	168
6.	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir</p> <p><i>Discussion on capital goods investment realized during last financial year</i></p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of capital goods investment 2. Purpose of investment; and 3. Value of capital goods investment realized during last financial year <p><i>Note: Disclose if there is no realization of capital goods investments</i></p>	168-169
7.	<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan</p> <p><i>Comparative information between target at the beginning of financial year with realization, and target or projection for next one year regarding revenue, income, and other aspects considered significant for the Company</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comparison between target at the beginning of financial year with achievement (realization) 2. Target or projection for next 1 (one) year in terms of revenues. 	170-174



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan <i>Material Information and facts subsequent to the accountant's reporting date</i></p>	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description on significant events subsequent to the accountant's reporting date including their impacts on future business performance and risks.</i></p> <p><i>Note: Disclose if there is no significant event subsequent to accountant's reporting date.</i></p>	175
<p>9. Uraian tentang prospek usaha Perusahaan <i>Description on company's business prospect</i></p>	<p>Uraian mengenai prospek Perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p> <p><i>Description on company's business prospect based that takes into account general industry and economic view supported by quantitative data from valid data sources.</i></p>	176
<p>10. Uraian tentang aspek pemasaran <i>Marketing aspect description</i></p>	<p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa Perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p> <p><i>Description on marketing aspects of the company's products and services, namely marketing and market share strategy</i></p>	176
<p>11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Description regarding dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kebijakan pembagian dividen; 4. Total dividen yang dibagikan; 5. Jumlah dividen kas per saham; 6. Payout ratio; dan 7. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p> <p><i>Description includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividend payout policy; 2. Amount of dividend; 3. Amount of dividend per share; 4. Pay-out ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividend for each year. <p><i>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</i> <i>Note: Disclose reasons where dividend payout is not exercised</i></p>	177
<p>12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku <i>Exercise of employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP)</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amount of stock in ESOP/MSOP and realization; 2. Period 3. Requirements of employee and/or management eligibility; and 4. Exercise price <p><i>Note: disclose if ESOP/MSOP is not available</i></p>	179



	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
13.	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal Perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p><i>Use of proceeds from Initial Public Offering (where the company is still required to report proceeds realization)*</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total proceeds generated; 2. Plan of proceeds use; 3. Details of utilization; 4. Proceeds balance; and 5. Date of GMS/EGMS approval to proceeds use amendment (if any). <p><i>Note: Disclose if the Company hasn't any realization information of funds</i></p>	179
14	<p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi</p> <p><i>Information on material transactions with conflict of interests and/or transactions with affiliated parties</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan Perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan Peraturan dan ketentuan terkait. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of parties and nature of affiliation; 2. Statement on the fairness of transaction; 3. Reasons of transactions; 4. Realization of transactions during last financial year; 5. Company policy concerning review mechanism on transactions; and 6. Fulfillment of relevant rules and regulations. <p><i>Note: disclose if no such transaction occurs</i></p>	179-181
15.	<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p><i>Description on regulatory changes that hold significant impact to the company in the last financial year</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names of regulations that changes; and 2. The impact (quantitative and/or qualitative) to the company (if significant) or declaration that the impact is not significant. <p><i>Note: Disclose if there is no regulations changes in the last financial year.</i></p>	182



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p><i>Description on changes in accounting policies applied by the Company in last financial year</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accounting policies changes 2. Accounting policies changes reason; and 3. The quantitative impact of financial report. <p><i>Note: disclose if there is no change to accounting policies in the last financial year.</i></p>	183
<p>17. Informasi kelangsungan usaha</p> <p><i>Information on business continuity</i></p>	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p> <p><i>Information contains:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspects that hold potentially significant impacts to business continuity in last financial year; 2. Management assessment on aspects intended in point 1 3. Assessment assumptions used by the management <p><i>Note: disclose if there is no aspect that holds potentially significant impacts to business continuity during last financial year; disclose assumptions used by the management that inform the confidence that there is no significant aspects that hold potentially significant impacts to the company's business during financial year</i></p>	184-197
<p>VI. Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Good Corporate Governance</p>		
<p>1. Uraian Dewan Komisaris</p> <p><i>Board of Commissioners description</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).. <p><i>Description includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Description of BoC duties; 2. Training program to enhance BoC's competency or induction program for new BoC member; and 3. Disclosure on the Board Charter (Board of Commissioners Manual) 	282-296



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) <i>Information on Independent Commissioner (minimum 30% of total BOC)</i>	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <i>Information includes, among others:</i> 1. <i>Criteria to appoint independent commissioner; and</i> 2. <i>Statement of independency of each Independent Commissioner.</i>	296-298
3. Uraian Direksi <i>Board of Directors description</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).. <i>Description includes, among others:</i> 1. <i>Scope and responsibility of each BoD member;</i> 2. <i>Training program to enhance BoD's competency or induction program for new BoC member; and</i> 3. <i>Disclosure on the Board Charter (Board of Directors Manual)</i>	298-321
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment for GCG Implementation in 2015 on Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan. <i>Information includes, among others:</i> 1. <i>Criteria used to assess;</i> 2. <i>Assessor</i> 3. <i>Assessment score in every each criteria;</i> 4. <i>Assessment result recommendation; and</i> 5. <i>Not yet realization of recommendation.</i> <i>Note: if there is no assessment of GCG implementation for the 2015 financial year, it should be disclosed.</i>	244-257, 322-329



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p><i>Board of Commissioners and Board of Directors remuneration policy</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <p><i>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</i></p> <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>BoC Remuneration policy disclosure</i> 2. <i>BoD remuneration policy disclosure</i> 3. <i>Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoC</i> 4. <i>Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoD</i> 5. <i>Disclosure of indicators to determine BoD remuneration</i> 6. <i>6. Disclosure of performance bonus, non performance, and/or BOC and BOD received share option</i> 	331-340
<p>6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)</p> <p><i>Frequency and attendance in Board of Commissioners meetings (minimum once in two months), Board of Directors meetings (minimum once in a month), and joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors (minimum once in four months).</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Date of meeting</i> 2. <i>Meeting participants; and</i> 3. <i>Meeting agenda for each BoC, BoD, and joint meeting</i> 	341-383



	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
7.	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu</p> <p><i>Information on majority and controlling shareholder(s), direct and indirect, up to ultimate individual owner(s)</i></p>	<p>Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perusahaan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p> <p><i>Presented in schematics or diagram that separate main shareholders and controlling shareholders.</i></p> <p><i>Notes: main shareholders is the one who directly or indirectly has at least 20% voting rights of all shares that released by a company, but not a controlling shareholders.</i></p>	262-263
8.	<p>Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali</p> <p><i>Disclosure of affiliated relationship between members Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or Majority/Controlling Shareholders</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Affiliated relationship between members of BoD;</i> 2. <i>Affiliated relationship between members of BoD and members of BoC;</i> 3. <i>Affiliated relationship between members of BoD with Majority and/or Controlling Shareholders;</i> 4. <i>Affiliated relationship between members of BoC;</i> 5. <i>Affiliated relationship between members of BoC with Majority and/or Controlling Shareholders</i> 	384-385
9.	<p>Komite Audit</p> <p><i>Audit Committee</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name and position of Audit Committee members.</i> 2. <i>Educational qualification and professional experience of Audit Committee members</i> 3. <i>Audit committee members independency</i> 4. <i>Duties and responsibilities description</i> 5. <i>Brief report of Audit Committee activities, and</i> 6. <i>Audit committee meeting frequency and attendance level</i> 	392-401



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi</p> <p><i>Remuneration and/or Nomination Committee</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, position, and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members 2. Nomination and/or remuneration committee members' independency 3. Description of duties and responsibilities 4. Nomination and/or remuneration committee duties implementation report 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level 6. Statement of nomination and/or remuneration committee guideline availability; and 7. BoD succession policy 	401-408
<p>11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan</p> <p><i>Other committees company's BoC</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, title, and brief profile of the members of the committees 2. Independency of the committee; 3. Duties and responsibilities description 4. Other committees' duties implementation report 5. Other committees' meeting frequency and attendance level 	409-418
<p>12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan</p> <p><i>Corporate Secretary duties and function description</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and brief profile of Corporate Secretary officer; 2. Domicile; 3. Brief of duties and responsibilities; and 4. Brief of implementation duties of Corporate Secretary on the financial year. 	418-423



	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
13.	Uraian mengenai unit audit internal <i>Description of Audit Internal Unit</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. <i>Information includes:</i> 1. <i>Name of Audit Internal Unit Head</i> 2. <i>Total employee (Internal auditor) in Audit Internal Unit</i> 3. <i>3. Certification as Audit Internal Profession</i> 4. <i>4. Position of Audit Internal Unit in Company's Structure</i> 5. <i>5. Description of Audit Internal Unit activity in financial year, and</i> 6. <i>6. Party who appointed and dismissed Head of Audit Internal Unit.</i>	423-429
14.	Akuntan Publik <i>Public accountant</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan <i>Information includes, among others:</i> 1. <i>Name and year of the last 5 years where the public accountant conducts financial statements audit;</i> 2. <i>Name and year of the last 5 years where the Public Accounting Firm conducts financial statements audit;</i> 3. <i>The amount of fees for each type of service provided by public accountant during last financial year; and</i> 4. <i>Services other than financial statements audit provided by accountant during last financial year</i> <i>Notes: Disclose if other services is not provided</i>	432-437
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan <i>Description on company's risk management</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. <i>Information includes, among others:</i> 1. <i>Explanation on risk management system implemented by the company;</i> 2. <i>Explanation on risk management system evaluation;</i> 3. <i>Explanation on risks faced by the company; and</i> 4. <i>Efforts to manage those risks</i>	438-461



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>16. Uraian mengenai sistem pengendalian internal</p> <p><i>Description of internal control system</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brief explanation on internal audit system, including operational and financial control; 2. framework (COSO - internal control framework), and 3. Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness. 	462-474
<p>17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup</p> <p><i>Description regarding corporate social responsibility related to natural environment</i></p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. <p><i>Containing information about:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/action plans in 2016 set by the management; 2. Activities undertaken and quantitative impact on these activities; and environmental programs related to the company's operational activity, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, the company's waste management system, complaint mechanisms of environmental issues, consideration of environmental aspects in the provision of credit to customers, and others. 3. Certification in the environment field owned 	475, 530-559
<p>18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja</p> <p><i>Description regarding corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety</i></p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. <p><i>including information about:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/action plans in 2016 set by the management; and 2. Activities undertaken and quantitative impact on the activities related to employment practices, occupational health and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety at work, employee turnover rate, work-related accident rate, remuneration, complaint mechanism of employment issues, and others 	475, 560-578



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan</p> <p><i>Description regarding corporate social responsibility related to social and community development</i></p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. <p><i>Including information about:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/action plans in 2016 set by the management; 2. Activities undertaken and the impact of these activities; and 3. Costs incurred related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of surrounding community, repairment of social facilities and infrastructures, other form of donations, communication regarding anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others 	475, 579-584
<p>20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen</p> <p><i>Description regarding corporate social responsibility related to responsibility to customer</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. <p><i>Including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/action plans in 2016 set by the management; and 2. Activities undertaken and the impact of those activities related to product responsibility, such as health and safety of customers, product information, facilities, number and countermeasures on consumer complaints, and others 	475, 585-587
<p>21. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan</p> <p><i>Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or Board of Commissioners serving on the Annual Report period</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pokok perkara/gugatan; 4. Status penyelesaian perkara/gugatan; 5. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 6. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Description of case/litigation; 2. Case/litigation settlement status; 3. Impacts on company's financial condition; and 4. Administrative sanctions imposed on the company, BoC members, and BoD members by relevant authorities (in capital market, banking, or others) in the last financial year (or statement where sanctions are not imposed) <p><i>Note: Disclose if company, subsidiaries, BOC, and BOD has no litigation or legal cases.</i></p>	476-479



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>22. Akses informasi dan data perusahaan</p> <p><i>Information Access and corporate data</i></p>	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p> <p><i>Description on publicly available access to corporate information and data, for example through website (in Bahasa Indonesia and in English) mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, and so forth.</i></p>	480-485
<p>23. Bahasan mengenai kode etik</p> <p><i>Discussion on Company's Code of Conduct</i></p>	<p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Code of Conduct content 2. Disclosure that the Code of Conduct's is applicable for all organizational level 3. Code of conduct dissemination 4. Type of sanction for each breach of Code of Conduct 5. Number of code of conduct breach and imposed sanction in last financial year <p><i>Note: Disclose if no code of conduct breach occurs in last financial year</i></p>	486-494
<p>24. Pengungkapan mengenai whistleblowing system</p> <p><i>Disclosure on Whistle blowing system</i></p>	<p>Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description of whistleblowing system mechanism that includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grievance procedure 2. Protection for whistleblower 3. Report holding 4. Report management unit, 5. Number of report failed and processed in last financial year, and 6. Sanction/follow-up of completed report in financial year. <p><i>Note: Disclose if there is no completed report in the last financial year.</i></p>	511-517



	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
25.	<p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p><i>Heterogeneity policy in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors</i></p>	<p>Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya</p> <p><i>Description on company's heterogeneity policy in the composition of BoC and BoD in terms of education background (field of study), professional experience, age, and gender.</i></p> <p><i>Note: where such policy is not present, disclose the reasons and considerations</i></p>	518-519
VII. Informasi Keuangan / Financial Information			
1.	<p>Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan</p> <p><i>Board of Directors and/or Board of Commissioners' statement on Financial Statements Accountability</i></p>	<p>Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.</p> <p><i>Compliance with relevant regulations concerning Financial Statements Accountability</i></p>	√
2.	<p>Opini auditor independen atas laporan keuangan</p> <p><i>Independent auditor's opinion on the financial statements</i></p>		√
3.	<p>Deskripsi Auditor Independen di Opini</p> <p><i>Description on the opinion of Independent auditor's opinion</i></p>	<p>Deskripsi memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. <p><i>The description should contain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and signature 2. Audit Report Date 3. Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number. 	√



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>4. Laporan keuangan yang lengkap</p> <p><i>Comprehensive financial statements</i></p>	<p>Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). <p><i>Comprehensively discloses all elements in financial statements:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial position statement</i> 2. <i>Other Comprehensive income and loss statement</i> 3. <i>Equity change statement</i> 4. <i>Cash flows statement</i> 5. <i>Notes on financial statements;</i> 6. <i>Comparative information about the earlier period</i> 7. <i>Financial position statement at the beginning of period when an entity applies certain accounting policies restropectively or restates certain financial statement accounts, or when an entity reclassifies certain financial statement accounts (where relevant).</i> 	√
<p>5. Perbandingan tingkat profitabilitas</p> <p><i>Profitability ratio comparison</i></p>	<p>Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.</p> <p><i>Comparison of current year's profit/loss with previous year.</i></p>	√
<p>6. Laporan Arus Kas</p> <p><i>Cash flow report</i></p>	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. <p><i>Report has to meet the following rules:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Categorization of three activities: operating, investing, and financing activities.</i> 2. <i>Using direct method to present cash flow from operating activities</i> 3. <i>Separating the presentation between cash received and or cash expenses for operating, investing and financing activities during the year</i> 4. <i>Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statement notes</i> 	√
<p>7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi</p> <p><i>Accounting policy highlights</i></p>	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. <p><i>Information includes, at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Compliance with FAS.</i> 2. <i>Basis of financial statement measurement and preparation</i> 3. <i>Income tax</i> 4. <i>Employment benefits; and</i> 5. <i>Financial Instrument</i> 	√



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Related party transaction disclosure</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. <i>Information includes, among others:</i> 1. Name of the related parties, as well as the nature and relationship therewith 2. Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses. 3. Total outstanding and the percentage to total asset or liabilities	√
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosure on any aspects related with Taxes</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <i>Information includes, among others:</i> 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 2. Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income. 3. Statement that Taxable Profit as calculated through reconciliation is used as the basis to fill Tax Return statement. 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the balance sheet in each period of presentation, and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report. 5. Tax dispute disclosure	√
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosure on fixed assets</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <i>Information includes, among others:</i> 1. Method of depreciation 2. Description on adopted accounting policy – revaluation or cost model 3. Method and significant assumptions used to estimate fair value of fixed asset (for revaluation model) or disclosures on fair value of fixed assets (for cost model); and 4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and at the end of the period by indicating: addition, reduction, and reclassification	√



KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARDS CRITERIA

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Pages
<p>11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi</p> <p><i>Disclosure related to operating segments</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi. <p><i>closures must include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>General information which includes the factors used to identify the reported segments;</i> 2. <i>Information on profit and loss, assets, and the liabilities of the reported segments;</i> 3. <i>Reconciliation of the segments' total revenues, reported segments' profit and loss, assets, liabilities, and other material elements of the segment to the relevant amount within the entity; and</i> 4. <i>Disclosure at entity level, which covers information on product and/or services, geographical location, and major customers.</i> 	N/A
<p>12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan</p> <p><i>Disclosure regarding Financial Instruments</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <p><i>Disclosure must include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Details of financial instruments and their classification;</i> 2. <i>Fair value and hierarchy for each financial instrument category;</i> 3. <i>Risk Management policy;</i> 4. <i>Explanation on financial instrument inherent risks: market risk, credit risk, and liquidity risk; and</i> 5. <i>Quantitative analysis on each financial instrument inherent risk</i> 	√
<p>13. Penerbitan laporan keuangan</p> <p><i>Issuance of Financial Statements</i></p>	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Date of financial statements issuance authorization; and</i> 2. <i>Parties responsible to authorize financial statements.</i> 	√

2018

Laporan Tahunan
Annual Report



PT MRT JAKARTA
Wisma Nusantara, 21 th Floor,
Jl. M.H. Thamrin 59,
Jakarta 10350 - INDONESIA



(62)21 3906454



(62)21 3155846



info@jakartamrt.co.id



www.jakartamrt.co.id